PEMERINTAH
KOTA PALOPO
SUL-SEL, INDONESIA

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palopo.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2026 ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun.
(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    BAB I PENDAHULUAN
    BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
    BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
    BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
    BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
    BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; DAN
    BAB VII PENUTUP
(3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksanaan program pembangunan dari RPD Tahun 2024-2026.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 31 Juli 2025

Pj. WALI KOTA PALOPO,

FIRMANZA DP

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 31 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

ILHAM

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2025 NOMOR 16

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK iv
DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN ..... Hal 1

1.1. Latar Belakang ..... Hal 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... Hal 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... Hal 4
1.4. Maksud dan Tujuan ..... Hal 5
1.5. Sistematika Dokumen RKPD ..... Hal 5

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI ..... Hal 1

2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH ..... Hal 1
2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi ..... Hal 1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... Hal 12
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ..... Hal 39
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... Hal 103
2.2 CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH ..... Hal 109
2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... Hal 109
2.3 EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPD ..... Hal 111
2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 ..... Hal 111
2.3.1.1 Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan ..... Hal 111
2.3.1.2 Konsistensi Kerangka Pendanaan ..... Hal 111
2.4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ..... Hal 177
2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan ..... Hal 177
2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ..... Hal 185
2.5 ISU STRATEGIS ..... Hal 190
2.5.1 Isu Strategis Global ..... Hal 190
2.5.2 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan ..... Hal 191
2.5.3 Isu Strategis Kota Palopo ..... Hal 195
2.6 INOVASI DAERAH ..... Hal 199
2.6.1 Riset yang dilakukan pada tahun 2024 ..... Hal 199
2.6.2 Data Inovasi yang diterapkan di tahun 2023 ..... Hal 199
2.6.3 Data Inovasi yang diterapkan di tahun 2024 ..... Hal 201
2.6.4 Indeks Inovasi Daerah Kota Palopo ..... Hal 202

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ..... Hal 1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... Hal 1
3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah ..... Hal 1
3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah ..... Hal 1
3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Global ..... Hal 2
3.1.1.3 Tantangan Perekonomian Nasional ..... Hal 3
3.1.1.4 Tantangan Perekonomian Prov. Sulawesi Selatan ..... Hal 3
3.1.1.5 Tantangan Perekonomian Daerah ..... Hal 4
3.1.1.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi ..... Hal 4

3.1.1.5.2 PDRB Perkapita ..... Hal 4
3.1.1.5.3 Inflasi ..... Hal 6
3.1.1.5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka ..... Hal 6
3.1.1.5.5 Kemiskinan ..... Hal 7
3.1.1.5.6 Gini Rasio ..... Hal 7
3.1.2. Arah Kebijakan Nasional Tahun 2026 ..... Hal 8
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah… ..... Hal 8
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... Hal 9
3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah ..... Hal 9
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... Hal 12
3.2.3.1. Alokasi Belanja Perangkat Daerah ..... Hal 14
3.2.3.2. Alokasi Belanja Untuk Mandatory Spending ..... Hal 24
3.2.3.3. Alokasi Untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... Hal 27
3.2.3.4. Alokasi Untuk SDGS/TPB ..... Hal 27
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... Hal 32
3.2.5. Pendanaan Pembangunan Lainnya ..... Hal 37
3.2.5.1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ..... Hal 37
3.2.5.2. Obligasi ..... Hal 37
3.2.5.3. Coorporate Social Responsibility (CSR) ..... Hal 38

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... Hal 1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... Hal 2
4.2. Prioritas Pembangunan ..... Hal 8
4.2.1. Prioritas Pembangunan Pembangunan Kota Palopo 2026 ..... Hal 8

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... Hal 1

5.1. Target Pendapatan dan Belanja Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027 Pemerintah Kota Palopo ..... Hal 1
5.2. Tabel Program Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2026 ..... Hal 5
5.3. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Alokasi Pagu Indikatif per Perangkat Daerah Tahun 2026 ..... Hal 12
5.4 Program Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2026 ..... Hal 15

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMRITAHAN DAERAH ..... Hal 1

6.1. Indikator Makro Pembangunan ..... Hal 1
6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... Hal 2
6.3. Indikator Kinerja Daerah ..... Hal 2
6.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... Hal 25
6.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ..... Hal 28

BAB VII PENUTUP ..... Hal 1

7.1. Kaidah Pelaksanaan ..... Hal 1
7.2. Kesimpulan ..... Hal 2

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2024 ..... Hal 1
Tabel 2.2. Data Iklim Kota Palopo ..... Hal 4
Tabel 2.3. Rencana Lokasi dan Luasan RTH Kota Palopo ..... Hal 5
Tabel 2.4. Profil Luas Wilayah Terpapar Bahaya di Kota di Kota Palopo ..... Hal 8
Tabel 2.5. Tingkat Ancaman Bencana di Kota Palopo ..... Hal 9
Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 10
Tabel 2.7. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Palopo Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) ..... Hal 12
Tabel 2.8. PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024 .. Hal 13
Tabel 2.9. Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 18
Tabel 2.10. Capaian Paritas Daya Beli Kota Palopo ..... Hal 24
Tabel 2.11. Capaian SDGs Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 25
Tabel 2.12. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan ..... Hal 39
Tabel 2.13. Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Palopo ..... Hal 41
Tabel 2.14. Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kota Palopo ..... Hal 46
Tabel 2.15. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik di Kota Palopo ..... Hal 47
Tabel 2.16. SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum ..... Hal 48
Tabel 2.17. Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kota Palopo ..... Hal 48
Tabel 2.18. Rasio Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 48
Tabel 2.19. Rasio Permukiman Layak Huni Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 49
Tabel 2.20. Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 49
Tabel 2.21. Persentase Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 49
Tabel 2.22. Persentase Pemukiman yang Terjadi di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 50
Tabel 2.23. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 50
Tabel 2.24. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Palopo Tahun 2020– 2024..... Hal 50
Tabel 2.25. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kota Palopo Tahun 2020 – 2024..... Hal 51
Tabel 2.26. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 51
Tabel 2.27. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ..... Hal 52
Tabel 2.28. Persentase Penegakan PERDA Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 52
Tabel 2.29. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 52
Tabel 2.30. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 52
Tabel 2.31. Tingkat dan Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Hal 53
Tabel 2.32. Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani dan Jumlah Kasus Kebakaran dalam Jangkauan WMK di Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 53
Tabel 2.33. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Palopo ..... Hal 54
Tabel 2.34. SPM Bidang Urusan Sosial ..... Hal 55
Tabel 2.35. Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... Hal 59
Tabel 2.36. Realisasi Penyusunan RPPLH Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 65
Tabel 2.37. Penyusunan Dokumen KLHS Kota Palopo..... Hal 65
Tabel 2.38. Persentase Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH di Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 67
Tabel 2.39. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 67
Tabel 2.40. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota di Kota Palopo Tahun 2020 -2024 ..... Hal 72
Tabel 2.41. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 72

Tabel 2.42. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 73
Tabel 2.43. Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)di Kota Palopo Tahun 2020 –2024 ..... Hal 73
Tabel 2.44. Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 73
Tabel 2.45. Persentase LSM Aktif di Kota Palopo Tahun 2020 - 2024 ..... Hal 74
Tabel 2.46. Persentase LPM Berprestasidi Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 74
Tabel 2.47. Persentase PKK Aktif di Kota Palopo Tahun 2020 - 2024 ..... Hal 74
Tabel 2.48. Dokumen Rancangan Induk Pengendaian Penduduk Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 76
Tabel 2.49. Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB di Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 77
Tabel 2.50. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB Di Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 79
Tabel 2.51. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber KB Di Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 79
Tabel 2.52. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB Di Kota Palopo Tahun 2020 -2024 ..... Hal 79
Tabel 2.53. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 80
Tabel 2.54. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtara di setiap Kecamatan ..... Hal 80
Tabel 2.55. Cakupan PKB / PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 80
Tabel 2.56. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri di Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 81
Tabel 2.57. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa / Kelurahan (PPKBD) Setiap Desa / Kelurahan Di Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 81
Tabel 2.58. Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak ..... Hal 81
Tabel 2.59. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD ..... Hal 82
Tabel 2.60. Jumlah uji KIR angkutan umum Kota Palopo ..... Hal 82
Tabel 2.61. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 82
Tabel 2.62. Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 82
Tabel 2.63. Persentase Pemasangan Rambu - Rambu di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ... Hal 83
Tabel 2.64. Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 83
Tabel 2.65. Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 84
Tabel 2.66. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 84
Tabel 2.67. Presentase Koperasi Aktif di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 84
Tabel 2.68. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 85
Tabel 2.69. Presentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 85
Tabel 2.70. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Palopo Tahun 2020 – 2023 ..... Hal 87
Tabel 2.71. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 ..... Hal 87
Tabel 2.72. Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kota Palopo Tahun 2019-2023 ..... Hal 87
Tabel 2.73. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 .... Hal 88
Tabel 2.74. Persentase Wirausaha Muda di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 88
Tabel 2.75. PersentasePembinaan Atlet Muda di Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 89
Tabel 2.76. Persentase Atlet Berprestasi di Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 90
Tabel 2.77. Persentase Prestasi Olahraga di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 90
Tabel 2.78. Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi di Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 90

Tabel 2.79. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kota Palopo ..... Hal 90
Tabel 2.80. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 Hal 91
Tabel 2.81. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 91
Tabel 2.82. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi di Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 92
Tabel 2.83. Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 92
Tabel 2.84. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Palopo Tahun 2020-2024 .. Hal 92
Tabel 2.85. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Palopo ..... Hal 93
Tabel 2.86. Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Kota Palopo ..... Hal 93
Tabel 2.87. Perpustakaan per Tahun di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 93
Tabel 2.88. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kota Palopo ..... Hal 94
Tabel 2.89. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikatdi Kota Palopo Tahun 2022 – 2024 ..... Hal 94
Tabel 2.90. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 94
Tabel 2.91. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Palopo Tahun 2018 – 2024 ..... Hal 94
Tabel 2.92. Konsumsi Ikan Masyarakat Kota Palopo ..... Hal 95
Tabel 2.93. Produksi Ikan di Kota Palopo ..... Hal 95
Tabel 2.94. Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Palopo ..... Hal 95
Tabel 2.95. Nilai Tukar Nelayan Kota Palopo ..... Hal 95
Tabel 2.96. Persentase Kunjungan Wisatawan ..... Hal 96
Tabel 2.97. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD ..... Hal 96
Tabel 2.98. Produktivitas Padi di Kota Palopo ..... Hal 96
Tabel 2.99. Hasil Kinerja Bidang Urusan Perdagangan ..... Hal 97
Tabel 2.100. Pertembuhan Industri Kota Palopo ..... Hal 97
Tabel 2.101. Jumlah Lokasi Transmigrasi di Palopo ..... Hal 97
Tabel 2.102. Return on Aset BUMD Kota Palopo ..... Hal 98
Tabel 2.103. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif Kota Palopo ..... Hal 98
Tabel 2.104. Rasio Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan Kota Palopo ..... Hal 98
Tabel 2.105. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Palopo ..... Hal 98
Tabel 2.106. Skor Penilaian SAKIP Kota Palopo ..... Hal 98
Tabel 2.107. Indeks Reformasi Hukum Kota Palopo ..... Hal 99
Tabel 2.108. Hasil Kinerja Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan ..... Hal 101
Tabel 2.109. Rasio PAD Kota Palopo ..... Hal 101
Tabel 2.110. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan ..... Hal 102
Tabel 2.111. Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan ..... Hal 102
Tabel 2.112. Rasio PNS terhadap Penduduk Kota Palopo ..... Hal 102
Tabel 2.113. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan ..... Hal 103
Tabel 2.114. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Palopo ..... Hal 103
Tabel 2.115. Maturitas SPIP Kota Palopo ..... Hal 103
Tabel 2.116. Peningkatan Kapabilitas APIP Kota Palopo ..... Hal 103
Tabel 2.117. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 104
Tabel 2.118. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita untuk Makanan dan Bukan Makanan ..... Hal 104
Tabel 2.119. Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik ..... Hal 105
Tabel 2.120. Persentase penduduk berakses air minum ..... Hal 105
Tabel 2.121. Rumah Tinggal Bersanitasi ..... Hal 105
Tabel 2.122. Jumlah arus penumpang angkutan umum ..... Hal 105
Tabel 2.123. Produktivitas Total Daerah sesuai dengan 17 sektor ..... Hal 105
Tabel 2.124. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum ..... Hal 107
Tabel 2.125. Angka Kriminalitas yang tertangani Tahun 2020-2024 ..... Hal 108
Tabel 2.126. Jumlah Demonstrasi di Kota Palopo ..... Hal 108
Tabel 2.127. Rasio Ketergantungan Kota PalopoTahun 2020-2024 ..... Hal 108
Tabel 2.128. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... Hal 109

Tabel 2.129. Konsistensi Kerangka Pendana RPD, RKPD dan APBD Kota Palopo Tahun 2024 Hal 113
Tabel 2.130. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2025 Kota Palopo ..... Hal 117
Tabel 2.131. Pemetaan Permasalahan Ketergantungan Fiskal Tinggi dan PAD ..... Hal 177
Tabel 2.132. Pemetaan Permasalahan Ketimpangan Ekonomi Dan Kesejahteraan yang Masih Tinggi, Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat Berjalan Lamban ..... Hal 179
Tabel 2.133. Pemetaan Permasalahan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melambat, Daya Saing dan Produktivitas belum Optimal ..... Hal 180
Tabel 2.134. Pemetaan Permasalahan Ketahanan Pangan Stagnan dan Degradasi Lingkungan Meningkat ..... Hal 182
Tabel 2.135. Pemetaan Permasalahan Ketahanan Sosial Masyarakat Semakin Terancam Akibat Perubahan Sosial dan Ekonomi ..... Hal 183
Tabel 2.136. Keterkaitan Permasalahan Pembangunan dengan Tujuan dan Sasaran Daerah Hal 184
Tabel 2.137. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ..... Hal 185
Tabel 2.138. Riset yang Dilakukan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2024 ..... Hal 199
Tabel 2.139. Data Inovasi yang Diterapkan di Tahun 2023 pada Lingkup Pemerintahan Kota Palopo ..... Hal 200
Tabel 2.140. Data Inovasi yang Diterapkan di Tahun 2024 pada Lingkup Pemerintah Kota Palopo ..... Hal 201
Tabel 2.141. Indeks Inovasi Daerah Kota Palopo ..... Hal 203

BAB III

Tabel 3.1 Kondisi dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Palopo 2024-2025..... Hal 1
Tabel 3.2 Pencapaian PDRB per Kapita Kota Palopo Tahun 2022-2024..... Hal 5
Tabel 3.3 Perkembangan Nilai PDRB Kota Palopo (ADHB & ADHK) Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2022-2024 ..... Hal 5
Tabel 3.4 Perbandingan PDRB ADHB per Kapita Kota Palopo dan Beberapa Daerah Lain Tahun 2022-2024 ..... Hal 5
Tabel 3.5 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Tahun 2022-2024..... Hal 7
Tabel 3.6 Pencapaian Indikator Kemiskinan Kota Palopo dan beberapa daerah lain Tahun 2024 ..... Hal 7
Tabel 3.7 Pencapaian Gini Rasio Kota Palopo dan beberapa daerah lain Tahun 2022-2024 ..... Hal 8
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kota Palopo Tahun 2023 s.d 2027.. Hal 11
Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi Belanja daerah Kota Palopo Tahun 2023 s.d 2027 ..... Hal 14
Tabel 3.10 Jumlah Pagu Alokasi Belanja Perangkat Daerah Tahun 2026 ..... Hal 15
Tabel 3.11 Proyeksi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun 2026..... Hal 23
Tabel 3.12 Rencana Alokasi Belanja Pemerintah Kota Palopo Untuk Pemenuhan Mandatory Spending Tahun 2026 ..... Hal 24
Tabel 3.13 Rencana Alokasi Belanja Pemerintah Kota Palopo Untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026..... Hal 27
Tabel 3.14 Rencana Alokasi Belanja Pemerintah Kota Palopo Untuk Dukungan bagi SDGs/ TPB Tahun 2026 ..... Hal 27
Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Palopo Tahun 2023 s.d tahun 2027 ..... Hal 34
Tabel 3.16 Ringkasan RKPD Pemerintah Kota Palopo Tahun 2023 s/d 2027 ..... Hal 35

BAB IV

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Kota Palopo Tahun 2026 ..... Hal 2
Tabel 4.2 Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palopo 2026 ..... Hal 4
Tabel 4.3 Keterkaitan dan Relvansi Tema Pembangunan Kota Palopo 2026 Terhadap Tema Nasional dan Provinsi Sulsel ..... Hal 9
Tabel 4.4 Keterkaitan Proritas Pembangunan, Program Prioritas dan Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun 2026 ..... Hal 16

Tabel 4.5 Hubungan Keterkaitan Prioritas dan Tujuan, Sasaran Pembangunan Kota Palopo Tahun 2026 ..... Hal 18
Tabel 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Palopo Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 2026 ..... Hal 19
Tabel 4.7 Keselerasan/Dukungan Program Kota Palopo Terhadap Prioritas Provinsi Sulsel Tahun 2026 ..... Hal 22
Tabel 4.8 Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Kota Palopo Tahun 2026 ..... Hal 25
Tabel 4.9 Pemetaan Peran Perangkat Daerah Kota Palopo Terhadap Outcome Prioritas Nasional 2026 ..... Hal 28
Tabel 4.10 Lokasi Prioritas, Highlight Intervensi dan Dukungan Pemerintah Kota Palopo terhadap RKP 2026 ..... Hal 36
Tabel 4.11 Tabel Dukungan Pemerintah Kota Palopo Terhadap RKP 2026 ..... Hal 40

BAB V

Tabel 5.1 Target Belanja Tahun 2026 dan Proyeksi Belanja Tahun 2027 Pemerintah Kota Palopo ..... Hal 2
Tabel 5.2 Tabel Program Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2026 ..... Hal 5
Tabel 5.3 Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Alokasi Pagu Indikatif per Perangkat Daerah Tahun 2026 ..... Hal 10
Tabel 5.4 Program Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2026 ..... Hal 15

BAB VI

Tabel 6.1 Indikator Makro Pembangunan Kota Palopo Tahun 2026 ..... Hal 1
Tabel 6.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Palopo Tahun 2026 ..... Hal 2
Tabel 6.3 Indikator Kinerja Daerah Kota Palopo Tahun 2026 ..... Hal 2
Tabel 6.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Palopo Tahun 2026 ..... Hal 6
Tabel 6.5 Capaian dan Perkiraan Penerapan SPM Tahun 2024, serta Penetapan Target Indikator SPM Kota Palopo Tahun 2026 (sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021) ..... Hal 25
Tabel 6.6 Capaian Indikator TPB/SDGs Kota Palopo Tahun 2024 dan Sasaran Nasional Tahun 2024 ..... Hal 28

DAFTAR GRAFIK

BAB II

Grafik 2.1	Jumlah Penduduk Usia Tidak produktif dan Penduduk Usia Produktif Kota Palopo Tahun 2024	Hal 11
Grafik 2.2	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Palopo Tahun 2024	Hal 11
Grafik 2.3	Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2020 – 2024	Hal 13
Grafik 2.4	Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2020 – 2024	Hal 14
Grafik 2.5	Perkembangan Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2024	Hal 14
Grafik 2.6	Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Desember 2024 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan	Hal 15
Grafik 2.7	Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Indonesia	Hal 15
Grafik 2.8	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun di Kota Palopo	Hal 16
Grafik 2.9	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024	Hal 16
Grafik 2.10	Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, dan SMA Kota Palopo Tahun 2020-2024	Hal 17
Grafik 2.11	Angka Partisipasi Murni SD, SMP, dan SMA Kota Palopo Tahun 2020-2024	Hal 17
Grafik 2.12	Angka Partisipasi Sekolah Kota Palopo Tahun 2020-2024	Hal 17
Grafik 2.13	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Palopo Tahun 2020-2024	Hal 18
Grafik 2.14	Angka Harapan Hidup Kota Palopo Tahun 2020-2024	Hal 18
Grafik 2.15	Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Palopo Tahun 2020-2024	Hal 19
Grafik 2.16	Rasio Penduduk Kota Palopo yang Bekerja Tahun 2020-2024	Hal 19
Grafik 2.17	Jumlah Angkatan Kerja Kota Palopo Tahun 2020-2024	Hal 19
Grafik 2.18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palopo	Hal 20
Grafik 2.19	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Nasional	Hal 20
Grafik 2.20	Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan di Kota Palopo Tahun 2020-2024	Hal 21
Grafik 2.21	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Palopo	Hal 21
Grafik 2.22	Perkembangan Capaian Indikator Gini Ratio Kota Palopo	Hal 22
Grafik 2.23	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Palopo	Hal 22
Grafik 2.24	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	Hal 23
Grafik 2.25	Capaian Indeks Pembangunan Gender Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	Hal 23
Grafik 2.26	Capaian Indeks Ketimpangan Gender Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	Hal 24
Grafik 2.27	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Palopo	Hal 38
Grafik 2.28	Cakupan Pembinaan Olahraga Tahun 2020 – 2024	Hal 38
Grafik 2.29	Angka Partisipasi Sekolah Kota Palopo Tahun 2020 - 2024	Hal 39
Grafik 2.30	Persentase Angka Putus Sekolah Kota Palopo Tahun 2020-2024	Hal 40
Grafik 2.31	Persentase Angka Kelulusan di Kota Palopo Tahun 2020-2024	Hal 40
Grafik 2.32	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Kota Palopo Tahun 2020-2024	Hal 41
Grafik 2.33	Jumlah Posyandu Kota Palopo Tahun 2020 – 2024	Hal 41
Grafik 2.34	Persentase Posyandu Aktif Kota Palopo Tahun 2020 – 2024	Hal 42
Grafik 2.35	Jumlah Puskesmas di Kota Palopo Tahun 2024	Hal 42
Grafik 2.36	Rasio Puskesmas di Kota Palopo Tahun 2020-2024	Hal 43
Grafik 2.37	Rasio Puskesmas Pembantu Kota Palopo Tahun 2020-2024	Hal 43
Grafik 2.38	Rasio Dokter Kota Palopo Tahun 2020 – 2024	Hal 43
Grafik 2.39	Rasio Tenaga Medis Kota Palopo Tahun 2020 - 2024	Hal 44
Grafik 2.40	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	Hal 44
Grafik 2.41	Cakupan Kelurahan UCI di Kota Palopo	Hal 44
Grafik 2.42	Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Palopo	Hal 45
Grafik 2.43	Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Palopo	Hal 45
Grafik 2.44	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Palopo	Hal 46
Grafik 2.45	Persentase Keluarga Berakses Air Minum Layak	Hal 47

Grafik 2.46 Indeks Risiko Bencana Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... . Hal 54
Grafik 2.47 Jumlah PMKS yang Memperolah Bantuan Sosial dalam 1 Tahun (jiwa) ..... . Hal 54
Grafik 2.48 Angka Sengketa Perusahaan Pekerja Kota Palopo ..... . Hal 56
Grafik 2.49 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... . Hal 56
Grafik 2.50 Besaran Pencarian Kerja yang Ditempatkan Tahun 2020-2024..... . Hal 56
Grafik 2.51 Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kota Palopo Tahun 2020 – 2024..... . Hal 57
Grafik 2.52 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek di Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... . Hal 57
Grafik 2.53 Persentase Pemeriksaaan Perusahaan di Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... . Hal 58
Grafik 2.54 Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kota Palopo Tahun 2020-2024..... . Hal 58
Grafik 2.55 Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kota Palopo Tahun 2020-2024..... . Hal 58
Grafik 2.56 Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kota Palopo Tahun 2020-2024..... . Hal 59
Grafik 2.57 Partisipasi Perempuan Kota Palopo dalam Pemerintahan Tahun 2020-2024..... . Hal 59
Grafik 2.58 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... . Hal 60
Grafik 2.59 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024..... . Hal 60
Grafik 2.60 Rasio KDRT di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... . Hal 60
Grafik 2.61 Persentase Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... . Hal 61
Grafik 2.62 Persentase Laporan/Pengaduan ke Unit Pelayanan Terpadu Kota Palopo Tahun 2020 – 2024..... . Hal 61
Grafik 2.63 Persentase Penegakan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024..... . Hal 62
Grafik 2.64 Persentase Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024..... . Hal 62
Grafik 2.65 Data Ketersediaan Pangan Utama Kota Palopo Tahun 2020-2024..... . Hal 63
Grafik 2.66 Indeks Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... . Hal 63
Grafik 2.67 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Palopo ..... . Hal 63
Grafik 2.68 Pola Pangan Harapan Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... . Hal 64
Grafik 2.69 Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kota Palopo..... . Hal 64
Grafik 2.70 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kota Palopo..... . Hal 65
Grafik 2.71 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... . Hal 66
Grafik 2.72 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Palopo Tahun 2020-2024. Hal 67
Grafik 2.73 Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditangani di Kota Palopo Tahun 2020-2024..... . Hal 68
Grafik 2.74 Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani di Kota Palopo Tahun 2020-2024. Hal 68
Grafik 2.75 Persentase Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... . Hal 69
Grafik 2.76 Persentase Cakupan Area Pelayanan di Kota Palopo Tahun 2020-2024..... . Hal 69
Grafik 2.77 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Palopo Tahun 2020-2024 . Hal 70
Grafik 2.78 Fasilitasi pengurangan sampah di perkotaan di Kota Palopo Tahun 2020-2024 . Hal 70
Grafik 2.79 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk di Kota Palopo Tahun 2020-2024 Hal 71
Grafik 2.80 Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Palopo Tahun 2020-2024..... . Hal 71
Grafik 2.81 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... . Hal 72
Grafik 2.82 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Palopo Tahun 2020-2024..... . Hal 73
Grafik 2.83 Persentase Posyandu Aktif di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... . Hal 75
Grafik 2.84 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Palopo Y-o-Y Tahun 2020-2024..... . Hal 75
Grafik 2.85 Pertumbuhan Penduduk Tahun Dasar 2010 (2020) dan 2020 (2021-2024) ..... . Hal 76
Grafik 2.86 Angka pemakaian kontrasepsi /cpr bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun di Kota Palopo Tahun 2020-2024..... . Hal 77
Grafik 2.87 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) Di Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... . Hal 77

Grafik 2.88 Persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 78
Grafik 2.89 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Di Kota Palopo Tahun 2020-2024 ..... Hal 78
Grafik 2.90 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Kota Palopo ..... Hal 86
Grafik 2.91 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 86
Grafik 2.92 Persentase Pembinaan Olahraga di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 88
Grafik 2.93 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ..... Hal 89
Grafik 2.94 Jumlah Perda/Peraturan lainnya yang dihasilkan DPRD Kota Palopo ..... Hal 99
Grafik 2.95 Jumlah Usulan Propemperda yang terlaksana dan disahkan DPRD Kota Palopo Hal 100
Grafik 2.96 Jumlah Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD ..... Hal 100
Grafik 2.97 Jumlah Anggota DPRD Kota Palopo ..... Hal 101

DAFTAR GRAFIK

BAB II

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Palopo ..... . Hal 2
Gambar 2.2 Peta Pulau Libukang Kota Palopo..... . Hal 2
Gambar 2.3 Peta Topografi Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan ..... . Hal 3
Gambar 2.4 Potensi Ruang Terbuka Hijau Kota Palopo..... . Hal 5
Gambar 2.5 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Palopo ..... . Hal 7
Gambar 2.6 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana..... . Hal 8

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR : 16 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam melaksanakan Amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah, juga berpedoman Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah dan nasional. Perencanaan Pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang diwujudkan dalam dokumen RKPD.

Tahapan penyusunan RKPD ini merupakan hasil kinerja Tim melalui proses yang sistematis yaitu : pembentukan tim, pengumpulan data, identifikasi permasalahan, telaah dokumen, diskusi dan perumusan secara keseluruhan. RKPD berisi tujuan, sasaran dan target kinerja pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Palopo.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Dokumen RKPD Kota Palopo Tahun 2026 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahapan :

a. Persiapan Penyusunan RKPD;

b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;

c. Penyusunan Rancangan RKPD;

d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;

e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan

f. Penetapan.

Muatan dalam dokumen RKPD tahun 2026 merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026, yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, serta berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2026 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mengacu pada RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2024-2026, RKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD juga selanjutnya diseleraskan dengan renja Perangkat Daerah tahun 2026. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun APBD.

Diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menjadi starting point bagi Pemerintah Kota Palopo dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Nomenklatur yang semula hanya pada level program dan kegiatan, kini menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengelolaan data perencanaan pembangunan yang semula menggunakan aplikasi E Planning, harus berganti dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Peremerintahan Daerah) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dinamika perkembangan ekonomi makro Kota Palopo sampai dengan tahun 2024 menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palopo lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya walaupun pertumbuhannya melambat, pengurangan persentase penduduk miskin juga berjalan dengan baik termasuk tingkat pengangguran terbuka. Pada aspek kesejahteraan masyarakat, pendapatan per kapita masyarakat Kota Palopo juga masih tertinggal dibandingkan Kota Makassar dan Pare-pare, sementara gini rasio dan inflasi meski cenderung membaik, tetapi belum signifikan. Beberapa kondisi ekonomi makro ini menjadi perhatian utama dalam penyusunan RKPD Kota Palopo 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Palopo Tahun 2026 ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kota /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 435);
39. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 239);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7.)
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 12);
45. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
46. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender;
47. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2041 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2024 Nomor 4);
49. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2023 Nomor 13).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPD dan RKPD Kota Palopo Tahun 2026

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan menyelaraskan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026, Penyusunan RKPD 2026 Kota Palopo memperhatikan isu strategis dalam RKP Nasional dan sesuai dengan perkembangan kondisi daerah sehingga terjadi keselarasan antara pembangunan pusat dan daerah. Pembangunan Daerah sendiri sejatinya merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten/Kota harus mengacu kepada RPD.

Penyusunan RKPD 2026 Kota Palopo diseleraskan dengan RPJPD 2025-2045 serta RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026 yang merupakan tahun ke tiga pelaksanaannya, konsistensi antara semua dokumen perencanaan harus menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD Kota Palopo Tahun 2026, RKPD yang memuat kebijakan, pogram dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS dimana Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah **untuk periode 1 (satu)** tahun,. Penyusunan Renja-PD lingkup Pemerintah Kota Palopo mengacu pada RKPD Kota Palopo Tahun 2026, selanjutnya, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

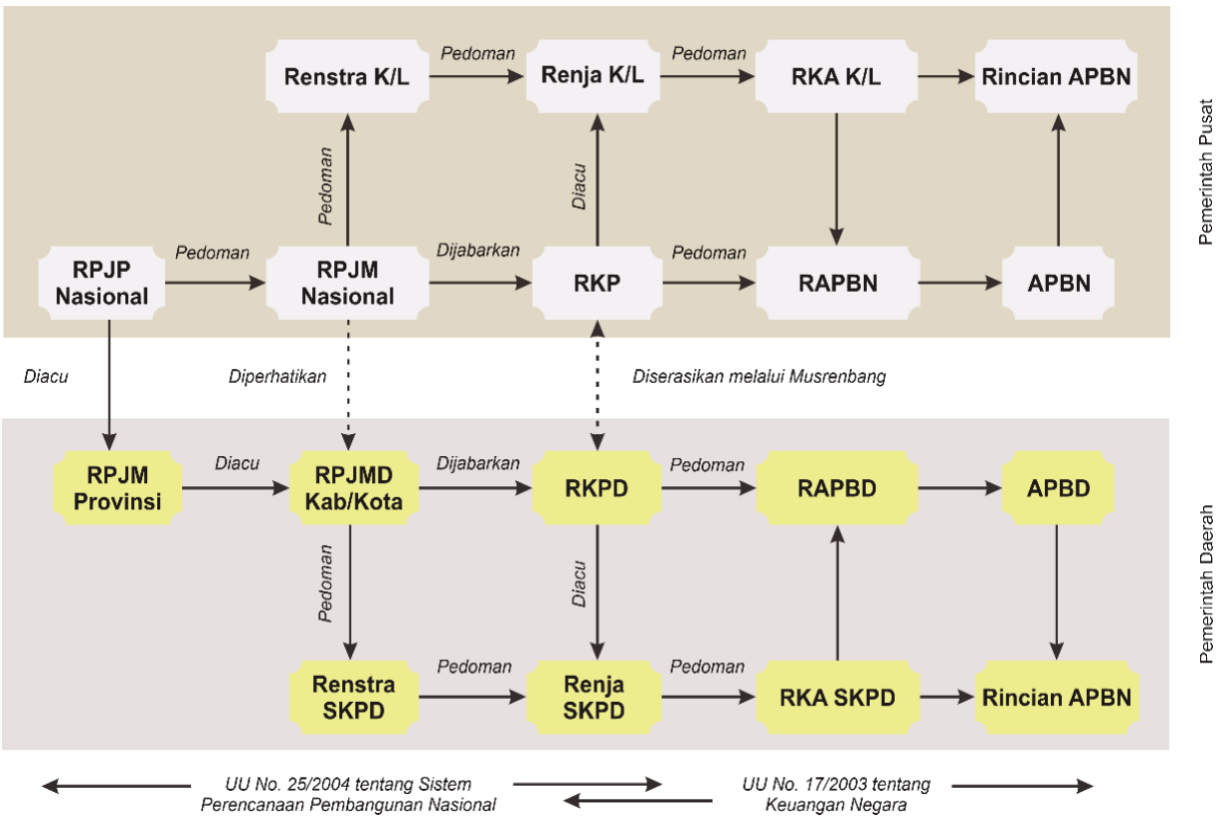

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Palopo Tahun 2026 adalah sebagai :

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026;
2. Menjadi pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
3. Menjadi pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Kota /kota; dan
4. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Kota Palopo Tahun 2026 ini adalah :

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegitan Tahun 2026;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Palopo.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kota Palopo Tahun 2026, disusun dengan sistematika berdasarkan kaidah peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta Permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran kinerja Arah kebijakan ekonomi dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan daerah Tahun 2026.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan tahun 2026, program prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 yang akan dilaksanakan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan target tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan substansi dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

Kota Palopo merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186.

Kota Palopo sebelumnya berstatus sebagai kota administrasi sejak tahun 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota otonom pada tahun 2002 tertanggal 10 April 2002. Pada awal berdirinya sebagai kota otonom, Palopo terdiri atas 4 (empat) kecamatan dan 20 (dua puluh) kelurahan. Namun seiring dengan perkembangan dinamika pembangunan Kota Palopo di berbagai sektor, sehingga untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005 wilayah kecamatan dan kelurahan kemudian dimekarkan menjadi 9 (Sembilan) kecamatan dan 48 (empat puluh delapan) kelurahan.

Tahun 2024 Kota Palopo telah berusia 22 tahun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2023 yang menetapkan hari jadi Kota Palopo pada tanggal 10 April 2002. Penetapan hari jadi merupakan momentum berdirinya pemerintahan Kota Palopo sebagai daerah otonom. Pelaksanaan pemerintahan Kota Palopo melalui pendekatan 7 (tujuh) dimensi yaitu, 1) dimensi religi, 2) dimensi pendidikan, 3) dimensi olahraga, 4) dimensi adat/budaya, 5) dimensi dagang, 6 dimensi industri dan 7) dimensi pariwisata.

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

A. KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Palopo tercatat 273,23 km persegi yang meliputi 9 kecamatan dan 48 kelurahan dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Luwu
Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu
Sebelah Timur : Teluk Bone
Sebelah Barat : Kabupaten Toraja Utara

Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 101,64 km persegi atau mencakup 37,20 persen dari luas Kota Palopo secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Wara dengan luas 4,42 km persegi atau hanya sebesar 1,62 persen dari luas Kota Palopo. Rincian luas wilayah kecamatan dengan perbandingan persentase luas wilayah kota Palopo sebagai berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2024

KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	LUAS AREA (Km²)	PERSENTASE TERHADAP LUAS KOTA PALOPO
Wara Selatan	Songka	4	10,66 / 15,11	5,85
Sendana	Sendana	4	36,09/ 35,05	13,58
Wara	Dangerakko	6	11,49/3,97	1,54
Wara Timur	Malatunrung	7	12,08/5,34	2,07
Mungkajang	Mungkajang	4	53,8/37,5	14,52
Wara Utara	Salobulo	6	10,58/5,69	4,27 / 2,2
Bara	Temmalebba	5	23,35/22,00	8,52
Telluwanua	Maroangin	7	34,34/35,75	13,85
Wara Barat	Tomarundung	5	54,13/97,72	21,87 / 37,85
		48	247,52/**258,17**	

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

Jarak antara Kota Palopo ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, adalah 390 km. Jarak seluruh ibukota kecamatan ke ibukota Kota Palopo semua relatif dekat, berkisar antara 1 – 5 km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,00 km. Secara administrative Kota Palopo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022 – 2041 dapat dilihat pada Grafik berikut :

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Palopo

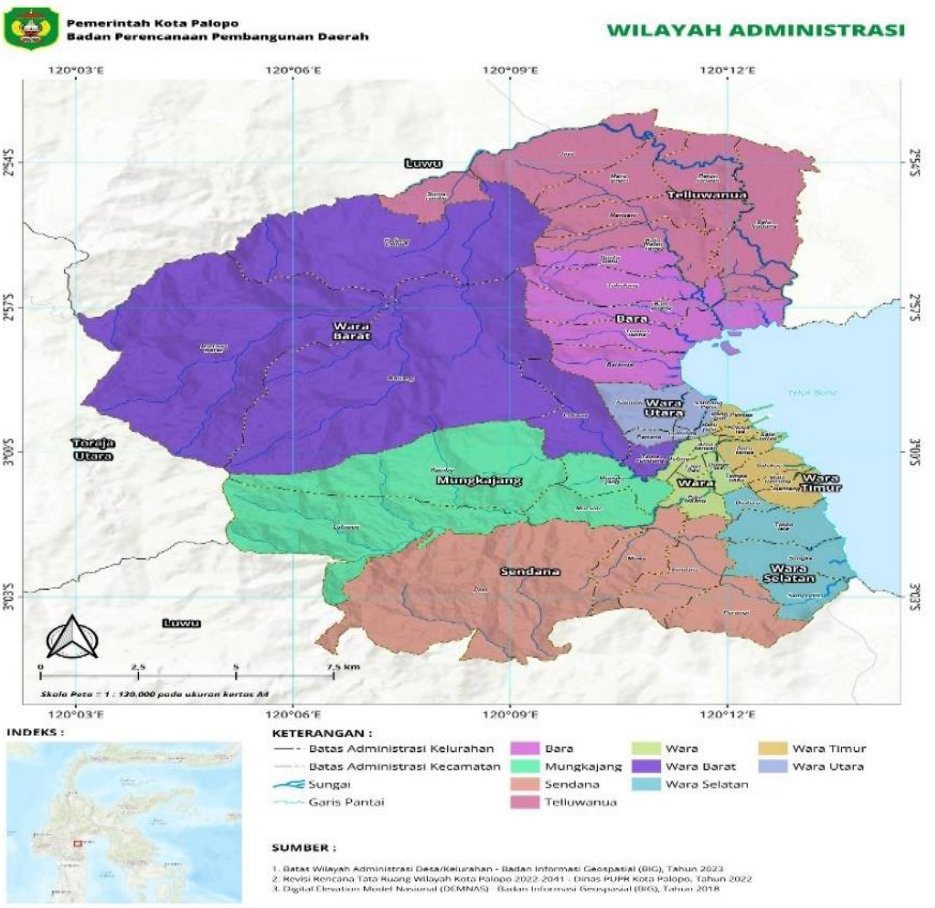

Selain memiliki wilayah daratan, Kota Palopo juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat digaris pantai Kota Palopo. Pulau tersebut adalah Pulau Libukang. Pulau Libukang adalah salah satu pulau yang berada di Teluk Bone dan secara administratif masuk pada wilayah Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara. Wilayah Pulau Libukang Kota Palopo dapat dilihat pada Grafik berikut ini :

Gambar 2.2
Peta Pulau Libukang Kota Palopo

Sumber : www.google.com/maps/place

2) Letak dan Kondisi Geografis

Kota Palopo terletak di jazirah utara Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada titik koordinat antara 2º53'15"-3º04'08" Lintang Selatan dan 120º03'10"- 120º14'34" Bujur Timur.

3) Topografi

Wilayah Kota Palopo sebagian besar merupakan dataran rendah dengan keberadaannya di wilayah pesisir pantai. Sekitar 62,85% dari total luas daerah Kota Palopo, menunjukkan bahwa yang merupakan daerah dengan ketinggian 0 – 500 mdpl, sekitar 24,76% terletak pada ketinggian 501 – 1000 mdpl, dan selebihnya sekitar 12,39% yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Secara garis besar keadaan topografi Kota Palopo terdiri dari 3 variasi yaitu dataran rendah sepanjang pantai, wilayah perbukitan bergelombang dan datar di bagian tengah, serta perbukitan dan pegunungan di bagian barat, selatan dan sebagian di utara.

Gambar 2.3
Peta Topografi Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan

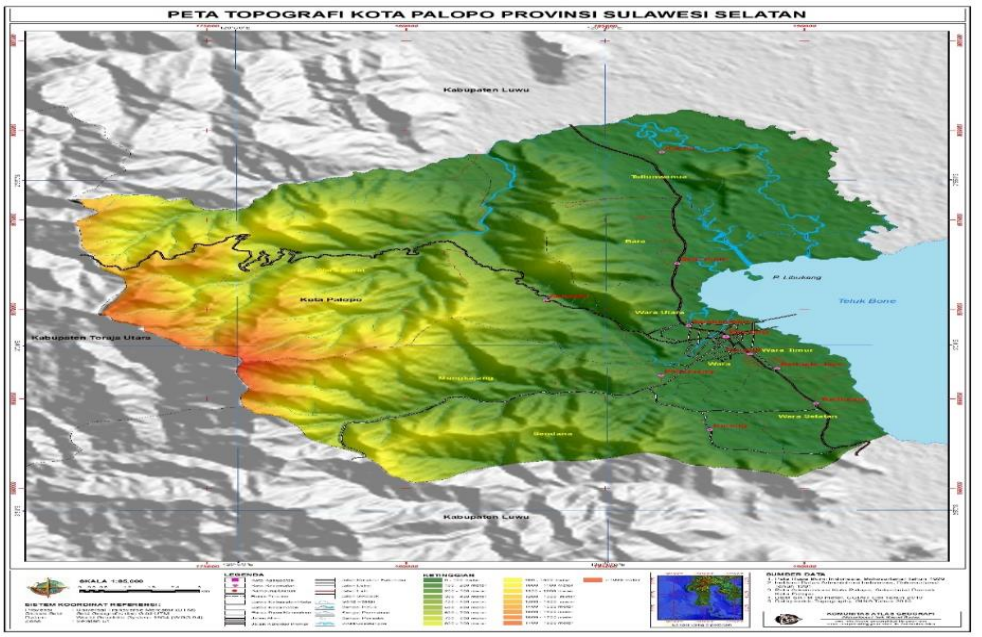

Sumber : https://petatematikindo.wordpress.com

4) Geologi

Struktur lapisan dan jenis tanah serta batuan di Kota Palopo pada umumnya terdiri atas 3 jenis batuan beku. Batuan metamorf dan batuan vulkanik serta endapan alluvial yang hampir mendominasi seluruh wilayah Kota Palopo. Penyebaran jenis batuan dan struktur lapisan tanahnya mempunyai kecenderungan batuan beku granit dan garbo serta beberapa intrusi batuan lainnya. Kemudian dijumpai pula batuan beku yang merupakan jejak aliran larva yang telah membeku yang bersusunan balastik hingga andesitik. Batuan sedimen yang dijumpai meliputi batu gamping, batu pasir, untuk mendukung pembangunan dan bangunan di kawasan Kota Palopo. Ketersediaan tanah urukan, pasir serta batuan di wilayah Kota Palopo cukup tersedia yang terhampar di beberapa sungai Battang, sungai Latuppa, dan sungai yang berbatasan dengan Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi atau Walenrang.

5) Hidrologi

Kota Palopo memiliki panjang garis pantai kurang lebih 21 kilometer dengan kondisi hidrologi pada umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Bambalu atau biasa disebut Sungai Battang, Sungai Latuppa, Sungai Boting, dan dan beberapa anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. Keberadaan sungai-sungai tersebut berpotensi dikembangkan bagi kepentingan pariwisata, misalnya permandian alam dan *rafting*. Selain itu, dipengaruhi juga oleh sistem hidrologi saluran perkotaan, yakni kanal-kanal yang hulunya terletak di dalam kota dan bermuara di laut. Kondisi hidrologi Kota Palopo secara umum terdiri atas air tanah dan pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 meter dan air permukaan yang paada umumnya berupa sungai dan genangan.

6) Klimatologi

Seperti wilayah lain di Indonesia, Kota Palopo beriklim tropis dengan tipe iklim hutan hujan tropis (*Af*) yang ditandai dengan curah hujan yang cenderung tinggi hampir sepanjang tahun. Curah hujan tahunan di kota Palopo berkisar antara 2100–2700 mm per tahun dengan rata-rata bulanan di atas 100 mm per bulan dan jumlah hari hujan lebih dari 120 hari per tahunnya. Curah hujan maksimum terjadi pada bulan Juni dengan rata-rata curah hujan

di atas 300 mm per bulannya dengan hari hujan terbanyak yakni sebanyak 21 hari hujan. Suhu udara rata-rata di Kota Palopo berada pada angka 21 °C–32 °C dan tingkat kelembapan nisbi sebesar ±81%.

Tabel 2.2
Data Iklim Kota Palopo

Data iklim Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia													
Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun
Rata-rata tertinggi °C (°F)	30.4 (86.7)	30.5 (86.9)	30.7 (87.3)	31 (88)	31 (88)	30.3 (86.5)	30 (86)	30.9 (87.6)	31.4 (88.5)	32.3 (90.1)	31.7 (89.1)	30.8 (87.4)	30.92 (87.68)
Rata-rata harian °C (°F)	26.8 (80.2)	26.8 (80.2)	26.9 (80.4)	27.1 (80.8)	27.3 (81.1)	26.5 (79.7)	25.9 (78.6)	26.4 (79.5)	26.8 (80.2)	27.6 (81.7)	27.5 (81.5)	27 (81)	26.88 (80.41)
Rata-rata terendah °C (°F)	23.2 (73.8)	23.2 (73.8)	23.2 (73.8)	23.3 (73.9)	23.6 (74.5)	22.8 (73)	21.9 (71.4)	22 (72)	22.2 (72)	22.9 (73.2)	23.3 (73.9)	23.3 (73.9)	22.91 (73.27)
Presipitasi mm (inci)	207 (8.15)	220 (8.66)	303 (11.93)	341 (13.43)	301 (11.85)	247 (9.72)	194 (7.64)	120 (4.72)	123 (4.84)	183 (7.2)	260 (10.24)	235 (9.25)	2.734 (107,63)
Rata-rata hari hujan	12	12	16	17	14	14	11	8	7	9	12	14	146
% kelembapan	82	81	83	84	85	81	78	77	76	79	80	81	80.6
Rata-rata sinar matahari bulanan	261	252	196	175	160	154	165	171	180	221	236	245	2.416

Sumber : *Climate-Data.org*

7) Penggunaan Lahan

a) Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah, secara substansial penetapan kawasan lindung mengakomodasi kawasan-kawasan berikut :

- **Badan Air**

  Badan air merupakan palung sungai yang tersebar di seluruh wilayah Kota Palopo.

- **Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya bertujuan untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kawasan, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya mencakup kawasan resapan air. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kota Palopo berupa kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 8.250 (delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan) hektar, terletak di Kelurahan Latuppa, Kelurahan Kambo, Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Lebang, Kelurahan Murante dan Kelurahan Peta.

- **Kawasan Perlindungan Setempat**

Kawasan perlindungan setempat bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan danau atau waduk. Kawasan perlindungan setempat Kota Palopo seluas kurang lebih seluas kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) hektar terdapat di Kelurahan Temmalebba, Salu Battang (Sungai Battang), Salu Tombang (Sungai Marobo), Salu Paringan (Sungai Salubattang) Salu Pengmengke (Sungai Padang Lambe), Salu Karetan (Sungai Karetan), Salo Lemperante (Sungai Lemperante), dan Salu Bambalu (Sungai Bambalu).

- **Ruang Terbuka Hijau Kota**

Rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) disesuaikan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. RTH dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tipologinya, yakni dari segi fisik, fungsi, struktur, dan kepemilikan. Berdasarkan kepemilikan ruang terbuka hijau terbagi atas ruang terbuka hijau privat dan ruang terbuka hijau publik. Untuk ruang terbuka hijau privat merupakan RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Sedangkan ruang terbuka hijau publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan masyarakat secara umum. Kondisi eksisting RTH Kota Palopo masih jauh dari yang ditetapkan oleh pemerintah dari alokasi total RTH yang mencapai 30%. Sesuai arahan dari Undang-Undang Penataan Ruang dan Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 yang mengalokasikan luasan RTH sebesar 30% dengan alokasi persentase untuk RTH publik 20% dan RTH privat 10%, maka pengembangan RTH Kota Palopo didorong untuk memenuhi luasan minimal tersebut.

Gambar 2.4
Potensi Ruang Terbuka Hijau Kota Palopo

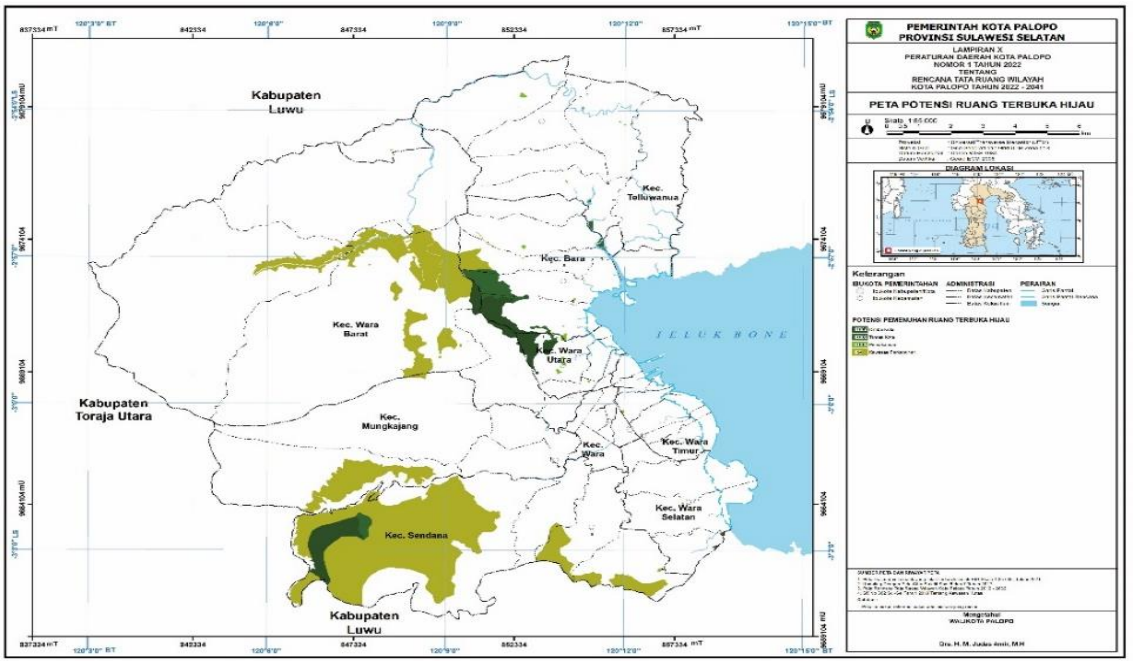

Konsep pengembangan RTH Kota Palopo sesuai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022 – 2041 pasal 39 seluas kurang lebih 564 (lima ratus enam puluh empat) hektar yang terdiri atas rimba kota, taman kota dan pemakaman. Rimba kota seluas kurang lebih 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) hektar, Taman kota seluas kurang lebih 171 (seratus tujuh puluh satu) hektar dan Pemakaman seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektar.

Tabel 2.3
Rencana Lokasi dan Luasan RTH Kota Palopo

Lokasi Kelurahan	Rimba Kota (Ha)	Taman Kota (Ha)	Pemakaman (Ha)
Peta	166	30	
Salobulo	70	6	2.2
Battang	28	1.9	0.5
Balandai	85	25	2.4
Lebang	30		
Sendana		0.5	
Sampoddo		1.5	
Songka		1.1	0.1
Takkalala		0.1	
Batupasi		0.4	
Pontap		0.1	
Salekoe		0.1	
Temmalebba		86	0.3
Rampoang		9	0.2
To'Bulung		4	1.5
Batu Walenrang		4	0.3
Pentojangan		0.1	0.4
Padang Lambe		0.7	0.2
Luminda			0.5
Jaya			2.8
Sumarambu			0.4
Surutanga			0.9
Purangi			1.3
LUAS (Ha)	379	171	14

Sumber : RTRW Kota Palopo Tahun 2022 – 2041

- **Kawasan Konservasi**

  Kawasan konservasi adalah kawasan yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kawasan ini memiliki ciri khas tertentu dan merupakan satu kesatuan ekosistem. Kawasan konservasi bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati, sumber daya alam, dan budaya yang terkait. Kawasan ini juga berperan dalam mendukung kehidupan manusia. Kawasan konservasi di Kota Palopo seluas kurang lebih 910 (sembilan ratus sepuluh) hektar terdiri atas kawasan pelestarian alam dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawasan pelestarian alam berupa Taman Wisata Alam Nanggala III seluas kurang lebih 889 (delapan ratus delapan puluh sembilan) hektar terletak di Kelurahan Battang Barat dan Kelurahan Padang Lambe. Sedangkan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu taman pulau kecil Pulau Libukang seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar yang terdapat di Kelurahan Balandai.
- **Kawasan Cagar Budaya**

  Kawasan cagar budaya bertujuan untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman dan/atau keunikan alam serta situs-situs purbakala sebagai peninggalan budaya. Kawasan cagar budaya berupa kawasan Masjid Jami Tua di Kelurahan Batupasi dan Istana Datu Luwu di Kelurahan Amassangan seluas kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hektar.
- **Kawasan Ekosistem *Mangrove***

  Kawasan ekosistem *mangrove* berupa kawasan hutan *mangrove* seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar terdapat di sebagian wilayah pesisir Kelurahan Temmalebba dan Kelurahan Rampoang.

b) Kawasan Budi Daya

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan Budi Daya Kota Palopo meliputi :

- **Badan Jalan**

  Badan jalan berupa badan jalan umum yang tersebar di seluruh wilayah Kota Palopo.
- **Kawasan Hutan Produksi**

  Kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 609 (enam ratus sembilan) hektar berupa kawasan hutan produksi terbatas (HPT) terletak di Kelurahan Salubattang, Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Mancani, Kelurahan Peta, Kelurahan Rampoang, dan Kelurahan To'bulung.
- **Kawasan Pertanian,** meliputi :
  - ¤ Kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 1.245 (seribu dua ratus empat puluh lima) hektar, berupa bukan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas seluas 326 (tiga ratus dua puluh enam) hektar, dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 919 (sembilan ratus sembilan belas) hektar.
  - ¤ Kawasan hortikultura seluas kurang lebih 438 (empat ratus tiga puluh delapan) hektar.
  - ¤ Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 7.380 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh) hektar.
  - ¤ Kawasan peternakan seluas kurang lebih 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hektar.
- **Kawasan Perikanan**

  Kawasan perikanan seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar terdiri atas. kawasan perikanan tangkap terdapat di pesisir Teluk Bone Kelurahan Pontap seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar dan kawasan perikanan budi daya terdapat di Kelurahan Temmalebba seluas kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hektar.
- **Kawasan Pertambangan dan Energi,** meliputi ;
  - ¤ kawasan pertambangan mineral berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan seluas kurang lebih 295 (dua ratus sembilan puluh lima) hektar yang terdapat pada Kelurahan Lebang, Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Purangi, Kelurahan Mancani, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Jaya, dan Kelurahan Murante. dan
  - ¤ Kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas kurang lebih 6 (enam) hektar terdapat di Kelurahan Mungkajang.
- **Kawasan Peruntukan Industri**

  Kawasan peruntukan industri seluas 350 (tiga ratus lima puluh) hektar terdapat di Kelurahan Maroangin, Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Batu Walenrang, dan Kelurahan Mancani.
- **Kawasan Pariwisata**

  Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) hektar terdapat di Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Kambo, Kelurahan Mawa, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Balandai, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan Rampoang, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Latuppa, Kelurahan Sumarambu, dan Kelurahan Salekoe.
- **Kawasan Permukiman,** meliputi :

  ¤ Kawasan perumahan seluas kurang lebih 5.347 (lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh) hektar.

  ¤ Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas kurang lebih 255 (dua ratus lima puluh lima) hektar.

  ¤ Kawasan ruang terbuka non hijau seluas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar.

  ¤ Kawasan infrastruktur perkotaan seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar

- **Kawasan Campuran**
  Kawasan campuran seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar terdapat di Kelurahan Batupasi, Kelurahan Penggoli, dan Kelurahan Pontap.
- **Kawasan Perdagangan dan Jasa**
  Kawasan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 990 (sembilan ratus sembilan puluh) hektar
- **Kawasan Perkantoran**
  Kawasan perkantoran seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar
- **Kawasan Transportasi**
  Kawasan transportasi seluas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar tediri atas:
  ¤ Terminal Penumpang Tipe A dan Stasiun Kereta Api di Kelurahan Songka;
  ¤ Terminal Penumpang Tipe C di Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Maroangin dan Kelurahan Mancani;
  ¤ Pelabuhan di Kelurahan Pontap; dan
  ¤ Rest Area di Kelurahan Sampoddo.
- **Kawasan Pertahanan dan Keamanan**
  Kawasan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar terdapat di Kelurahan Boting, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Batupasi, Kelurahan Balandai, dan Kelurahan Maroangin.

B. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Pengembangan wilayah Kota Palopo diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 untuk mengarahkan pembangunan di Kota Palopo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penataan ruang wilayah Kota Palopo adalah mewujudkan Kota Palopo sebagai kota modern pusat pelayanan ekonomi dan pelayanan umum terdepan di kawasan timur Indonesia yang berkearifan lokal dan religius, serta nyaman dan produktif untuk semua.

Kebijakan pengembangan struktur ruang Kota Palopo sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo Tahun 2022-2041 sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 terdiri atas:

a. penyebaran pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan umum skala regional dan skala kota;
b. pengendalian intensitas fungsi primer kawasan pusat kota;
c. pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum yang integratif, komprehensif, dan menerapkan teknologi terbaru untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
d. pengoptimalan pemanfaatan dan pengembangan lahan-lahan marginal di kawasan pesisir dan pantai menjadi lahan produktif perkotaan;
e. pengembangan jaringan transportasi baru guna mengefisienkan mobilitas penduduk serta angkutan barang antar kota dan dalam kota;
f. peningkatan kualitas kawasan lindung guna mendukung upaya pembangunan kota yang berkelanjutan;
g. peningkatan daya saing kota melalui program-program inovasi daerah yang berkearifan lokal; dan
h. pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Adapun rencana Struktur Ruang Kota Palopo berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo Tahun 2022-2041 dapat dilihat pada Grafik berikut ini :

Gambar 2.5
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Palopo

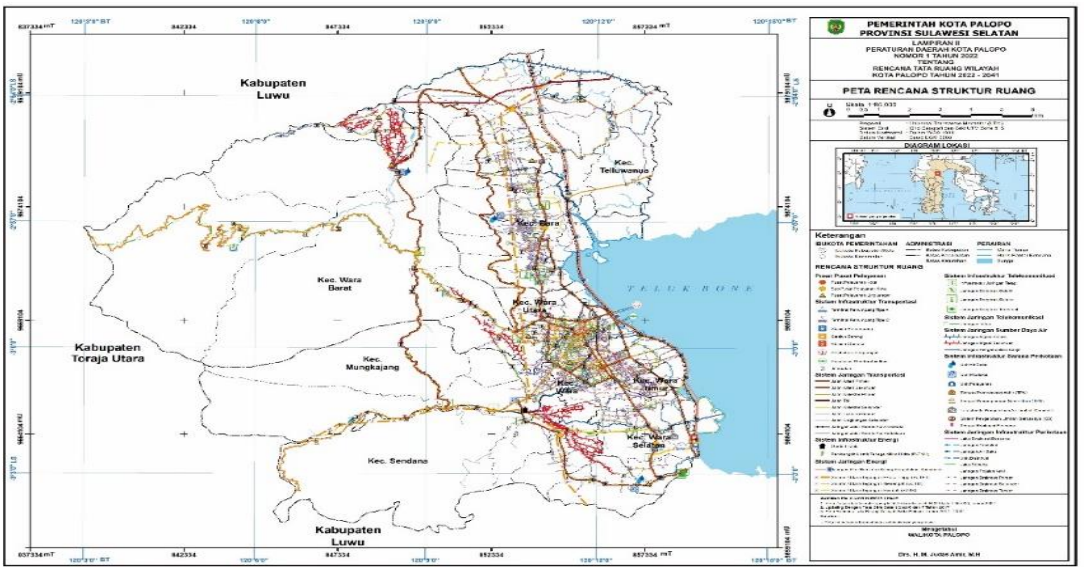

Sumber : RTRW Kota Palopo Tahun 2022 – 2041

C. WILAYAH RAWAN BENCANA

Kota Palopo dilihat dari kondisi geografis, geologi, demografi, ekonomi, topografi, hidrologi dan klimatologi menjadikan daerah ini rawan terhadap berbagai bencana. Berdasarkan data kejadian bencana yang dihimpun dalam Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) - BNPB dan data BPBD Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2023, terdapat 3 (tiga) jenis bencana yang sering terjadi di Kota Palopo. Ketiga bencana tersebut adalah banjir, cuaca ekstrim (puting beliung), dan tanah longsor. Kawasan rawan bencana di Kota Palopo merupakan kawasan yang memiliki kecenderungan terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2023 telah melaksanakan Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2024-2028 dan menjadi data pokok dalam pemilihan atau prioritas penanganan bencana dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kota Palopo 2025- 2029. Hasil evaluasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan pencegahan bencana dan tercermin dalam peta risiko bencana dan peta bencana yang kompleks untuk setiap jenis bencana. Kajian risiko merupakan penggabungan antara indeks/kelas bahaya, kelas kerentanan, dan kelas kapasitas. Hasil dari penggabungan ketiga indeks/kelas tersebut akan menunjukkan kelas risiko bencana di tiap kelurahan di Kota Palopo.

Potensi bahaya di Kota Palopo teridentifikasi 6 (enam) jenis bahaya yang telah disepakati. Adapun rekapitulasi hasil kajian seluruh potensi bahaya di Kota Palopo dapat dilihat pada Tabel berikut;

Tabel 2.4
Profil Luas Wilayah Terpapar Bahaya di Kota di Kota Palopo

Jenis Bahaya		Luas Bahaya (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Banjir	2.083,23	1.936,08	1.482,93	5.502,24	Tinggi
2	Tanah Longsor	6.774,93	2.018,61	9.577,26	18.370,8	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	349,74	4.101,12	7.706,70	12.157,5	Tinggi
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	144,0	183,65	327,72	Tinggi
5	Gempabumi	24.752,00	-	-	24.752,00	Rendah
6	Tsunami	51,66	36,18	-	87,84	Sedang

Sumber : Dokumen KRB Kota Palopo 2024-2028

Berdasarkan Tabel **2.4**, dapat diketahui bahwa jenis bencana yang ada di Kota Palopo memiliki tingkat bahaya yang bervariasi, yaitu Rendah, Sedang dan Tinggi. Bencana yang termasuk tingkat bahaya Rendah di Kota Palopo adalah bencana gempa bumi, dan tingkat bahaya Sedang hanya bencana Tsunami. Sementara itu bencana dengan tingkat bahaya Tinggi adalah bencana Banjir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrim, dan Gelombang Ekstrim dan Abrasi. Hasil kajian luas wilayah terdampak bencana akan sangat berkaitan dengan luas potensi penduduk terpapar untuk setiap jenis bahaya. Potensi luas terdampak ini dapat menjadi pertimbangan untuk penentuan lokasi dan revisi tata ruang dan perencanaan pembangunan lainnya di Kota Palopo.

Gambar 2.6
Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana

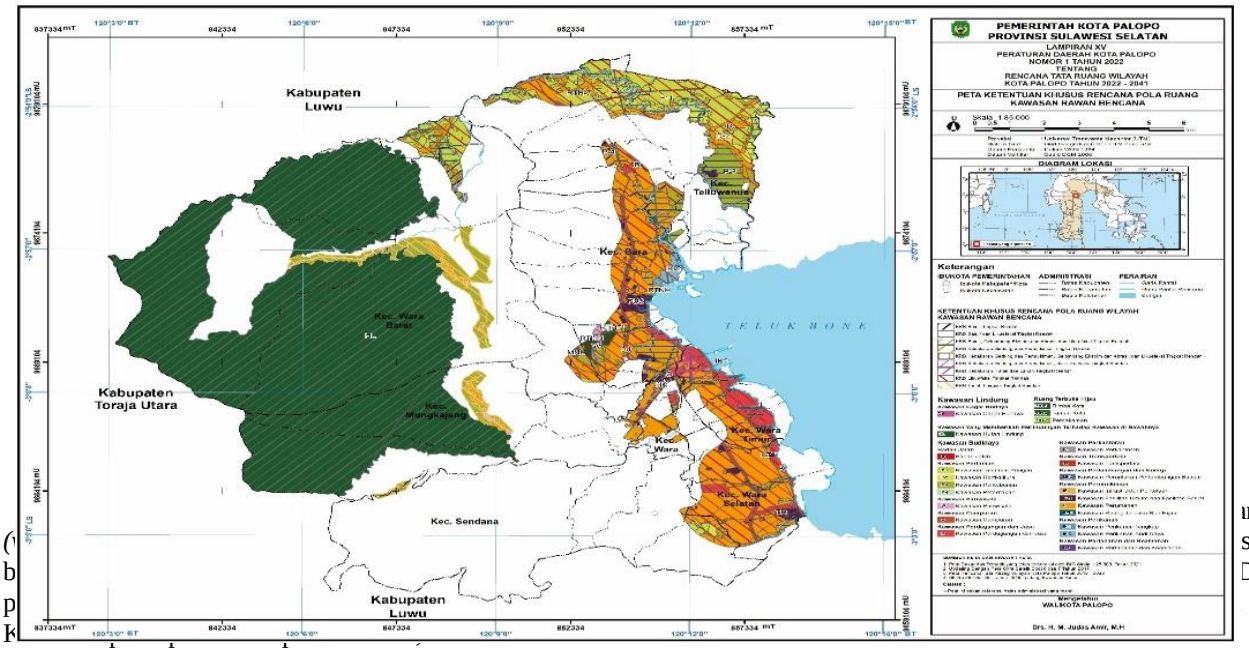

Tabel 2.5
Tingkat Ancaman Bencana di Kota Palopo

Bencana	Klasifikasi
Banjir	Tinggi
Banjir Bandang	Tinggi
Cuaca Ekstrim	Tinggi
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi
Gempa Bumi	Rendah
Likuefaksi	Sedang
Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang
Kekeringan	Sedang
Tanah Longsor	Tinggi
Tsunami	Rendah
Epidemi dan Bahaya Penyakit	Rendah

Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Nasional Sulawesi Selatan
Tahun 2022-2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa klasifikasi tingkat ancaman bencana di Kota Palopo berada klasifikasi tinggi meliputi banjir, banjir bandang, dan cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi dan tanah longsor. Potensi bahaya pada tingkat sedang meliputi likuefaksi, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan. Sedangkan potensi bahaya gempa bumi, tsunami serta epidemi dan bahaya penyakit tergolong pada potensi bahaya dengan klasifikasi rendah.

D. DEMOGRAFI

1) Jumlah Penduduk

Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang, Palopo tumbuh dengan ditunjang berbagai macam potensi wilayah, salah satunya adalah jumlah penduduk. Perkembangan jumlah penduduk di Kota Palopo menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Jumlah penduduk pada Tahun 2020 sebesar 184.681 jiwa meningkat menjadi **195.670** jiwa pada Tahun 2024. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kota Palopo
Tahun 2020-2024

Kecamatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	Laki-Laki	Perem-puan	Jumlah	Laki-Laki	Perem-puan	Jumlah	Laki-Laki	Perem-puan	Jumlah	Laki-Laki	Perem-puan	Jumlah	Laki-Laki	Perem-puan	Jumlah
Wara Selatan	9.343	9.336	18.679	9.593	9.570	19.163	9.894	9.854	19.748	9.386	9.494	18.880	9.991	10.047	20.038
Sendana	3.739	3.642	7.381	3.790	3.700	7.490	3.859	3.776	7.635	3.827	3.772	7.599	4.031	3.961	7.992
Wara	15.675	15.864	31.539	15.864	16.046	31.910	16.126	16.303	32.429	14.678	14.711	29.389	14.847	14.820	29.667
Wara Timur	19.126	19.218	38.344	19.334	19.428	38.762	19.632	19.724	39.356	18.343	18.497	36.840	18.982	19.006	37.988
Mungkajang	5.079	4.983	10.062	5.215	5.108	10.323	5.378	5.260	10.638	4.800	4.771	9.571	4.962	4.914	9.876
Wara Utara	10.254	10.391	20.645	10.378	10.510	20.888	10.549	10.679	21.228	9.747	9.852	19.599	9.956	10.049	20.005
Bara	15.337	15.323	30.660	15.522	15.499	31.021	15.778	15.747	31.525	14.291	14.442	28.733	14.739	14.800	29.539
Telluwanua	8.041	7.846	15.887	8.185	7.994	16.179	8.368	8.182	16.550	8.134	7.947	16.081	8.450	8.276	16.726
Wara Barat	5.850	5.634	11.484	5.901	5.694	11.595	5.978	5.780	11.758	5.487	5.347	10.834	5.632	5.435	11.067
Jumlah	92.444	92.237	184.681	93.782	93.549	187.331	95.562	95.305	190.867	88.693	88.833	177.526	91.590	91.308	**182.898**

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

Distribusi persebaran penduduk antar kecamatan di Kota Palopo pada tahun 2024 menunjukkan sebaran yang merata. Kepadatan penduduk per kilometer persegi adalah 771 jiwa. Kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Wara, dengan 3.258 jiwa per km², sementara Kecamatan Mungkajang memiliki kepadatan terendah, yaitu 198 jiwa per km².

2) Struktur Penduduk

Secara umum, masyarakat dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu berdasarkan usia produktif dan tidak produktif. Kelompok usia produktif biasanya dianggap sebagai usia 15-64 tahun, sedangkan kelompok usia tidak produktif terdiri dari anak-anak pada usia 0-14 tahun dan lanjut usia (lansia) 65 tahun keatas. Berdasarkan struktur kelompok usia, sebagian besar penduduk Kota Palopo berada pada usia produktif. Proporsi kelompok usia 15-64 tahun sekitar 62,62 persen dari keseluruhan penduduk Kota Palopo pada tahun 2024, sedangkan usia tidak produktif sebesar 37,38 persen.

Grafik 2.1
Jumlah Penduduk Usia Tidak produktif dan Penduduk Usia Produktif Kota Palopo Tahun 2024

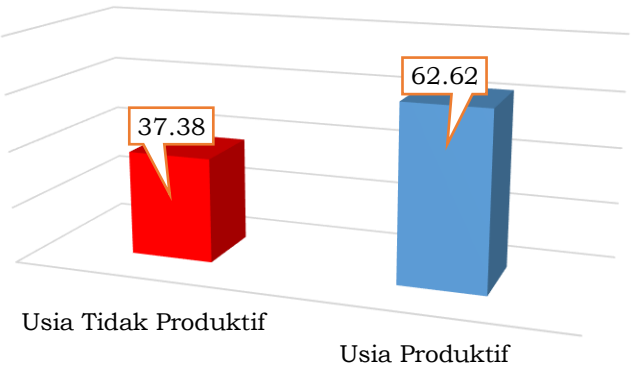

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Palopo memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang besar dan pembangunan sosial yang lebih baik, karena ditunjang oleh proporsi penduduk produktif yang lebih tinggi. Penduduk usia produktif memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan produktivitas daerah. Dengan peningkatan produktivitas, maka daerah dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, penduduk usia produktif dapat berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih inklusif. Hal ini dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya bagi seluruh lapisan masyarakat.

Grafik 2.2
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Palopo Tahun 2024

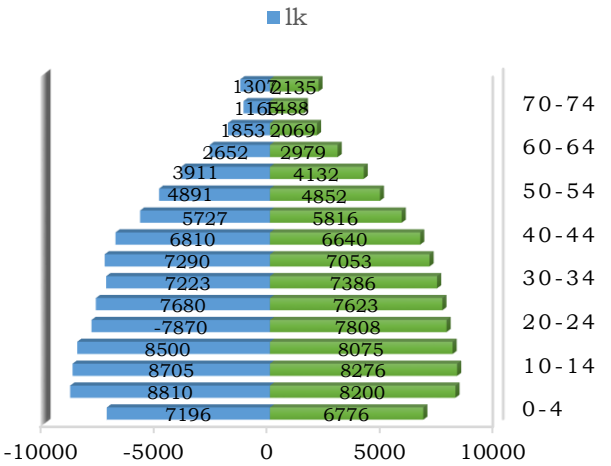

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025. Diolah.

Angka yang menunjukkan tingkat rata-rata pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu merupakan penjabaran dari laju pertumbuhan penduduk. Beberapa faktor seperti kematian, kelahiran, dan perpindahan penduduk memiliki pengaruh dalam dinamika penduduk. Dinamika penduduk tersebut memungkinkan mengubah struktur, komposisi dan persebaran penduduk. Adanya perhitungan laju pertumbuhan penduduk akan membantu proyeksi perubahan kebutuhan yang harus dipenuhi dan fasilitas pelayanan publik yang perlu disediakan.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga, dimana pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil akan mendorong peningkatan kemampuan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa sehingga dapat memacu berkembangnya perekonomian dalam skala yang lebih besar dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk.

1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Kinerja perekonomian di Kota Palopo dapat tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonominya. Produk Domestik Bruto (PDB), atau dalam cakupan yang lebih kecil adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk menjelaskan kinerja ekonomi. Secara sederhana, PDRB Kota Palopo memberikan Grafik an mengenai ukuran ekonomi di Kota Palopo. Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun tertentu. Tahun yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan adalah Tahun 2010.

Data struktur ekonomi menunjukkan aktivitas dan perkembangan mengenai kontribusi setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Kontribusi setiap lapangan usaha memberikan informasi mengenai lapangan usaha utama penggerak ekonomi daerah.

Tabel 2.7
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Palopo
Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Bidang /Urusan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	**884,51**	**923,60**	**956**	**951.24**	949.39
Pertambangan dan Penggalian	6,76	7,16	8,06	8.55	8.84
Industri Pengolahan	130,85	134,79	147,42	155.98	163.41
Pengadaan Listrik dan Gas	6,10	6,73	6,59	7.11	7.7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	15,42	15,40	16,45	17.32	18.48
Konstruksi	**774,84**	**816,75**	**894,51**	**940.22**	**947.48**
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	**1.426,60**	**1.491,21**	**1.568.52**	**1648.94**	**1732.73**
Transportasi dan Pergudangan	268,07	304,64	345,35	367.16	385.3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	60,02	64,27	68,42	74.18	79.65
Informasi dan Komunikasi	376,60	387,66	409,51	435.33	467.51
Jasa Keuangan dan Asuransi	391,48	423,52	446,9	488.69	511.49
Real Estate	258,25	265,22	283,1	298.69	316.98
Jasa Perusahaan	4,97	5,14	5,68	6.24	6.57
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	377,91	399,87	400,15	392.6	425.22
Jasa Pendidikan	26,576	272,25	270,4	277.42	298.91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	150,56	172,78	283,83	196.16	211.84
Jasa Lainnya	73,37	77,63	93,85	103.87	118.57
PDRB	**5.472,08**	**5.768,28**	**6.104,74**	**6.369,71**	**6.650,07**

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025

Berdasarkan Tabel 2.5 tentang nilai PDRB atas dasar harga konstan diketahui bahwa dari mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tiga sektor penyumbang paling besar untuk PDRB sama yaitu yang pertama adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sementara kontributor terbesar kedua adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan yang ketiga adalah sektor konstruksi. Sedangkan 3 (tiga) sektor yang memberi kontribusi terkecil juga sama dari tahun 2020 hingga 2024 yaitu terkecil pertama adalah jasa perusahaan, selanjutnya diikuti oleh sektor listrik dan gas, dan terakhir pertambangan dan penggalian.

Tabel 2.8
PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)
Tahun 2020-2024

Bidang /Urusan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	**1.352,04**	**1.493,21**	**1.672,46**	**1.716, 09**	**1.730,09**
Pertambangan dan Penggalian	12,55	13,43	15,57	16,90	17,46
Industri Pengolahan	205,18	216,58	247,16	269,80	289,73
Pengadaan Listrik dan Gas	6,18	6,46	6,74	8,02	8,61
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13,61	13,58	14,97	15,58	16,62
Konstruksi	**1.325,43**	**1.454,37**	**1.689,45**	**1.834,10**	**1.861,81**
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	**1.963,95**	**2.095,14**	**2.295,74**	**2.488,59**	**2.674,30**
Transportasi dan Pergudangan	409,35	485,29	648,31	793,69	858,37
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87,50	94,27	108,04	119,19	131,24
Informasi dan Komunikasi	374,82	388,18	413,59	443,13	473,20
Jasa Keuangan dan Asuransi	593,39	671,08	772,18	861,24	916,30
Real Estate	403,01	414,50	463,54	472,12	503,11
Jasa Perusahaan	7,46	7,82	9,01	10,26	11,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	624,20	666,24	671,01	667,40	740,49
Jasa Pendidikan	349,40	359,18	362,23	374,33	398,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	193,41	223,66	241,47	257,24	278,20
Jasa Lainnya	103,81	111,04	136,42	152,14	174,85
PDRB	**8.025,29**	**8714,31**	**9.767,89**	**10.499,83**	**11.083,92**

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.8 tentang nilai PDRB atas dasar harga berlaku diketahui bahwa dari mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tiga sektor penyumbang paling besar untuk PDRB sama yaitu yang pertama adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kontributor terbesar kedua adalah sektor konstruksi, dan yang ketiga adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sedangkan 3 (tiga) sektor yang memberi kontribusi terkecil juga sama dari tahun 2020 hingga 2024 yaitu terkecil pertama adalah jasa perusahaan, selanjutnya diikuti oleh sektor listrik dan gas, dan terakhir pertambangan dan penggalian. Dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Sulawesi Selatan dan nasional, Kota Palopo selalu mempunyai pertumbuhan yang lebih tinggi. Akan tetapi di tahun 2020 saat pandemi Covid-19 Kota Palopo mengalami kontraksi lebih dalam daripada Nasional. Dimana Kota Palopo mengalami kontraksi sebesar minus 2,26 sedangkan nasional mengalami kontraksi minus 2,07. Di tahun 2028 sampai 2023, Kota Palopo kembali

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Salah satu cara untuk mengetahui stabilitas perekonomian suatu daerah dengan melihat tingkat perkembangan indeks harga konsumen (laju inflasi). Untuk pendidikan, rekreasi dan olahraga, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan menempati kedudukan paling atas, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pada bidang tersebut bagi masyarakat Kota Palopo semakin banyak yang memicu kenaikan harga dari tahun-tahun sebelumnya sehingga hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Palopo sangat membutuhkan sarana pendidikan yang memadai. Lebih dari itu semua, tiga kelompok besar penyumbang inflasi tertinggi di Kota Palopo secara tidak langsung telah memicu peningkatan kebutuhan pada kelompok-kelompok lain yang terkait. Perkembangan capaian indikator laju inflasi Kota Palopo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Grafik. 2.3
Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

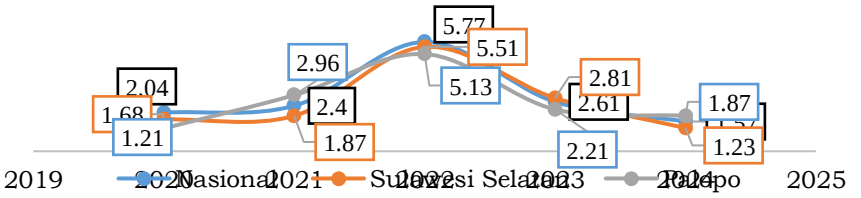

Sumber : BPS Tahun 2025

Inflasi bulanan sepanjang tahun 2024 di Kota Palopo menunjukkan fluktuasi harga yang terkendali. Pada tahun 2024 tercatat puncak inflasi terjadi pada bulan Maret yakni 0,90 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,09, sedangkan deflasi terdalam terjadi pada bulan Juni dengan deflasi sebesar 0,32 persen serta IHK pada bulan Juni sebesar 106,31. Faktor dominan yang mempengaruhi inflasi pada tahun 2024 sebagian besar disebabkan karena adanya harga-harga untuk Kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam grafik berikut;

Grafik. 2.4
Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2024

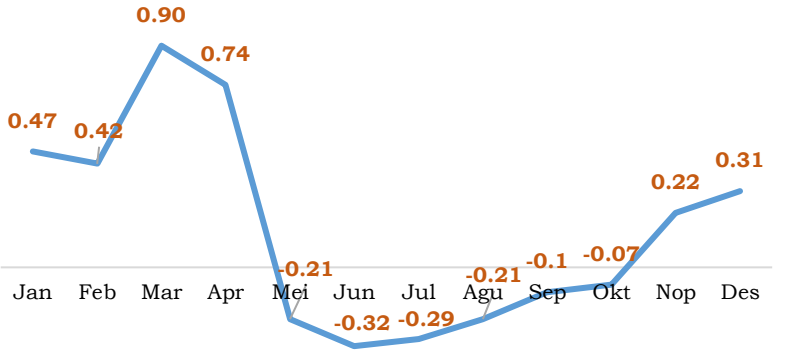

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025

Grafik. 2.5
Perkembangan Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2024

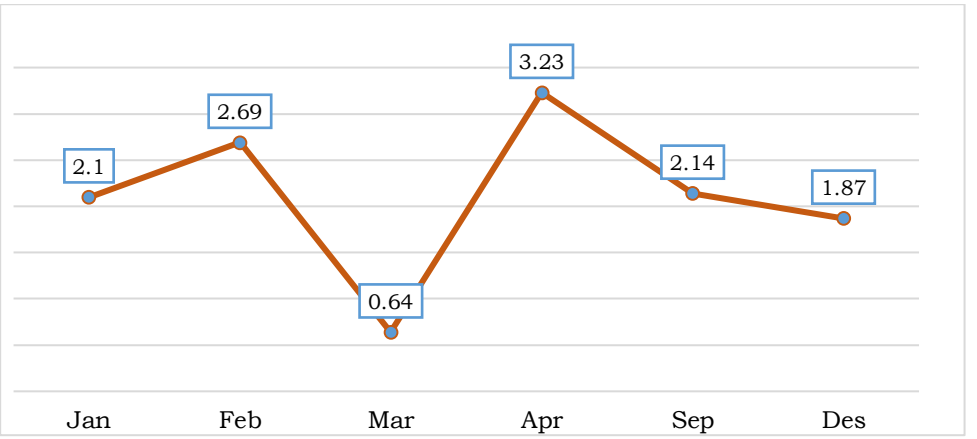

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

Grafik di atas menunjukkan bahwa laju inflasi Kota Palopo di tahun 2024, berdasarkan data BPS, menunjukkan berbagai angka. Pada bulan Januari 2024, inflasi year on year (yoy) sebesar 2,10%. Kemudian, pada Februari 2024, inflasi yoy naik menjadi 2,69%. Pada bulan September 2024, inflasi yoy adalah 2,14%. Di bulan April 2024, beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi, termasuk kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,79%, dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,70%. Sementara itu, pada Desember 2024, inflasi yoy sebesar 1,87% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,16.

Pada Desember 2024, seluruh kota IHK di Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah 8 kabupaten/kota mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Luwu Timur sebesar 2,02 persen dengan IHK sebesar 106,78 dan terendah terjadi di Kabupaten Wajo sebesar 0,68 persen dengan IHK sebesar 106,41. Lebih jelasnya pada Grafik berikut:

Grafik. 2.6
Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Desember 2024
Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

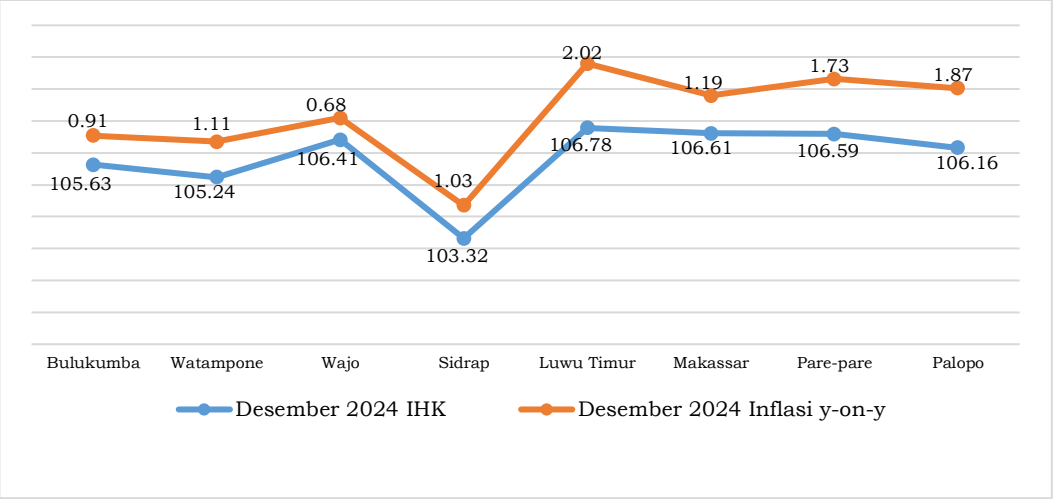

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah proses pembangunan yang ditujukan untuk pembangunan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dihitung dengan komponen Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, dan Indeks Daya Beli. Hal ini dikarenakan pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia.

Grafik. 2.7
Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Indonesia

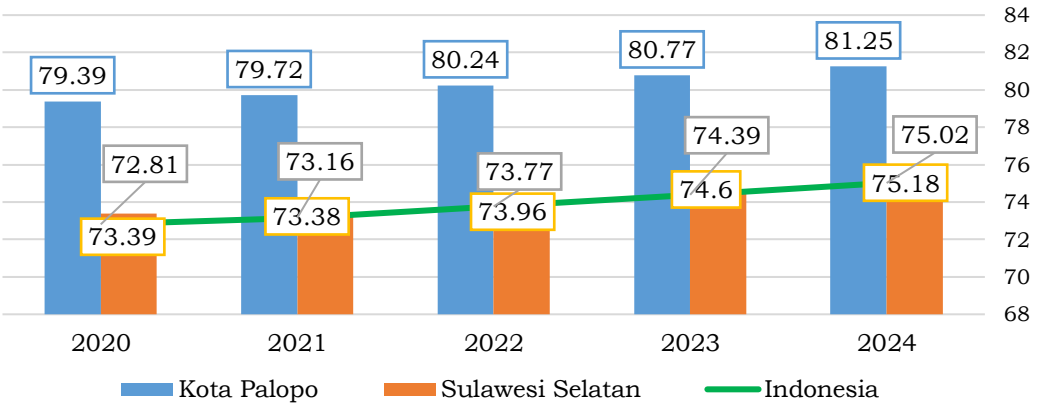

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Pembangunan manusia di Kota Palopo terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. IPM Kota Palopo tumbuh sebesar 2,34 persen dalam waktu lima tahun terakhir, sebagaimana termuat pada tabel di atas. Sedangkan pada tahun 2024 tumbuh sebesar 0,59 persen dari tahun 2023. Kota Palopo menempati ranking kedua se-Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar. Tahun 2024, BPS Kota Palopo telah selesai menghitung IPM dengan UHH hasil SP 2020 *Long Form*. Dari hasil penghitungan IPM dengan UHH hasil SP tahun 2020 *Long Form* menghasilkan bahwa IPM tertinggi Jawa Timur adalah Kota Makassar sebesar 85,23 berbeda dan Kota Palopo berada di posisi kedua tertinggi. Terdapat 3 (tiga) daerah dengan kategori **sangat tinggi**, yaitu Kota Makassar, Kota Palopo, dan Kota Pare-pare. Sedangkan IPM dengan kategori **tinggi** terdapat 20 kabupaten, sedangkan IPM dengan kategori **sedang** terdapat 1 kabupaten. Kota Palopo menjadi Kota dengan IPM kategori sangat tinggi dengan dasar UHH SP 2020 *Long Form* besar kemungkinan dipengaruhi pengeluaran per kapita yang mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 4.0 persen.

b. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Perkembangan capaian indikator angka melek huruf (AMH) di Kota Palopo dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Grafik. 2 8

Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun di Kota Palopo

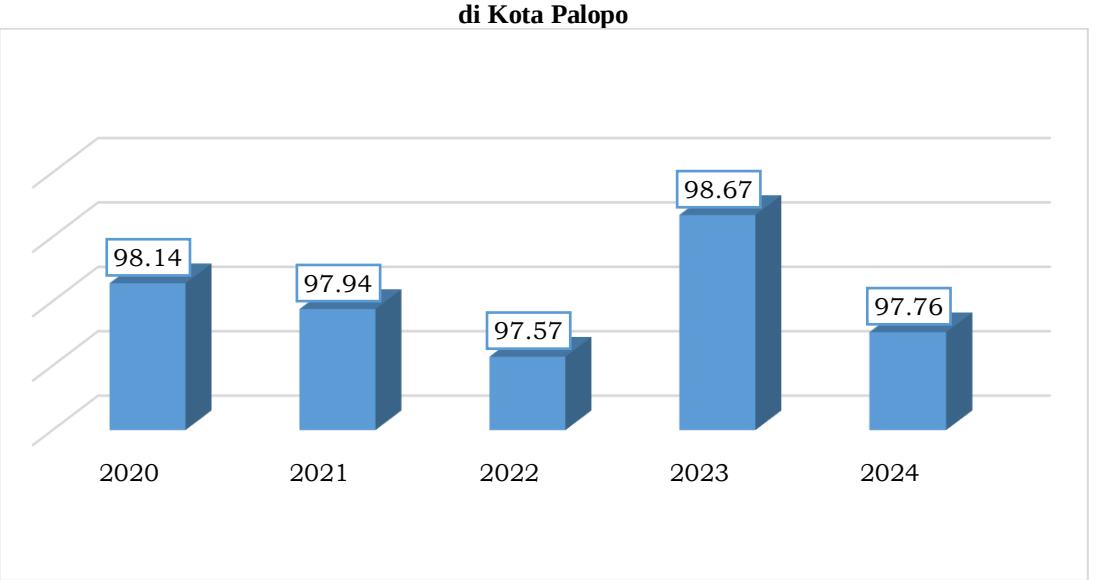

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025

c. Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah menunjukkan adanya peningkatan dalam lima tahun terakhir. Sebagaimana data tertuang pada Grafik berikut :

Grafik. 2.9

Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

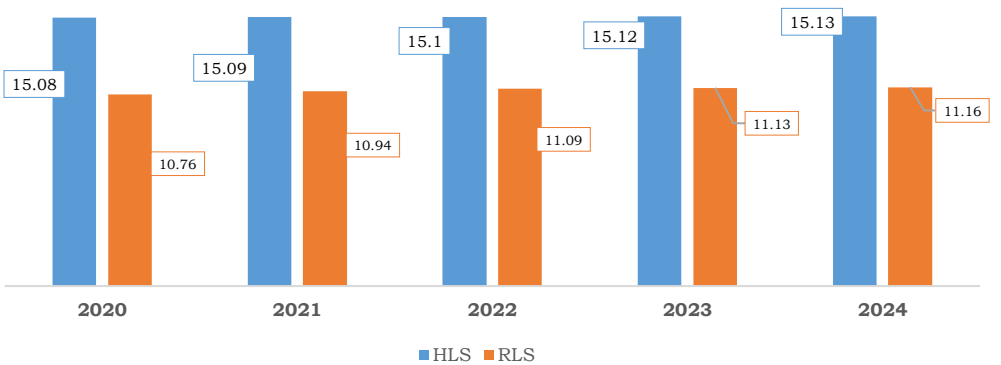

Sumber : Badan Pusat Statisik Kota Palopo, 2025

Harapan lama sekolah menunjukkan adanya peningkatan dalam lima tahun terakhir. Data pada Grafik di atas menunjukkan anak-anak pada 2024 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menempuh pendidikan selama 15,13 tahun atau hingga diploma III, lebih lama 0,01 tahun dari sebelumnya yang mencapai 15,12 tahun. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Terjadi peningkatan selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Di tahun 2020 angka RLS Kota Palopo adalah 10,76, hal ini berarti rata-rata penduduk Kota Palopo yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,76 tahun atau hampir menamatkan kelas XI. Nilai RLS tahun 2023 ini naik dari tahun 2021 sebesar 0,25 basis poin.

d. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK Kota Palopo dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik. 2.10
Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, dan SMA Kota Palopo Tahun 2020-2024

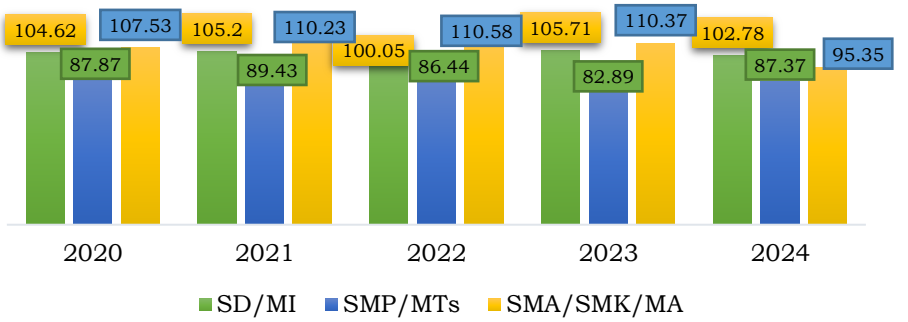

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

e. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari jumlah penduduk usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM ditujukan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh dan juga untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap usia sekolah.

APM Kota Palopo dalam kurun waktu lima t ahun terakhir dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik 2.11
Angka Partisipasi Murni SD, SMP, dan SMA Kota Palopo Tahun 2020-2024

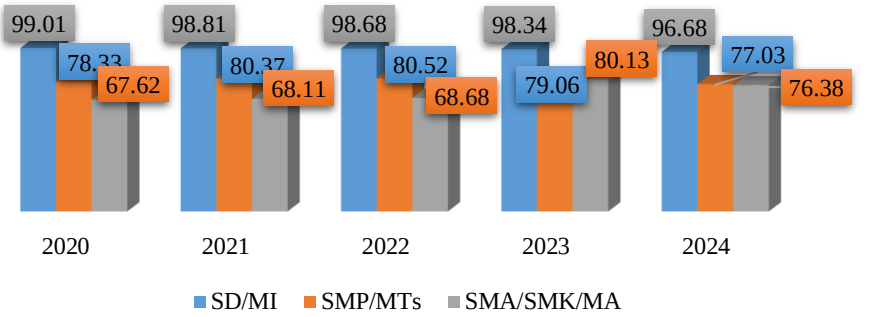

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palopo, 2025.

f. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dengan persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Berikut adalah APS Kota Palopo Tahun 2020-2024:

Grafik 2.12
Angka Partisipasi Sekolah Kota Palopo Tahun 2020-2024

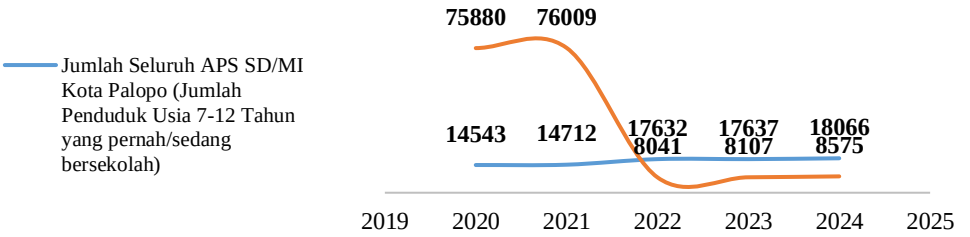

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025

g. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah rasio bayi yang hidup dari 1.000 kelahiran hidup. AKHB dihitung dengan mengurangi angka kematian dari 1.

Grafik 2.13
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Palopo Tahun 2020-2024

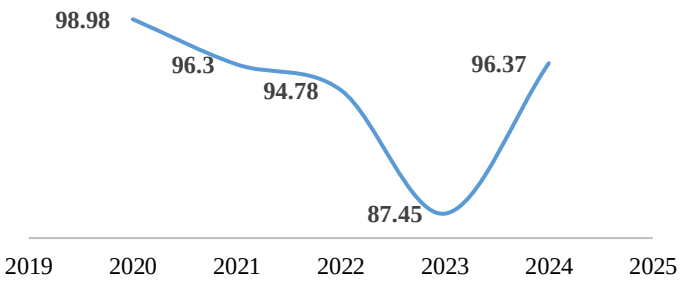

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

Berdasarkan grafik diatas, capaian angka kelangsungan hidup bayi di Kota Palopo pada tahun 2020 menunjukkan kondisi kesehatan bayi cukup baik. Selanjutnya terjadi penurunan secara bertahap pada tahun 2021–2022, meskipun masih di atas 90% dan turun secara drastis pada tahun 2023 ke angka 87,45%. Tahun 2024 terjadi perbaikan signifikan ke 96,37%. Hal tersebut menandakan adanya peningkatan pelayanan kesehatan atau program intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo berhasil.

h. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup adalah data statistik yang mengGrafik kan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi**.** Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Angka Harapan Hidup Kota Palopo Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Grafik 2.14
Angka Harapan Hidup Kota Palopo Tahun 2020-2024

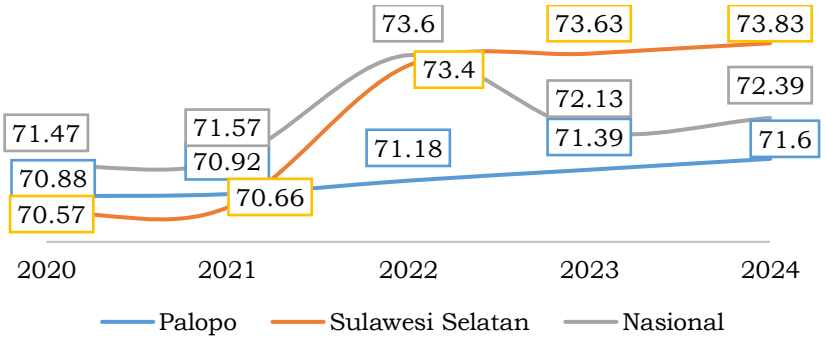

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025

i. Persentase Balita Gizi Buruk

Berikut adalah data jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan serta cakupannya.

Tabel 2.9
Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palopo Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Balita Gizi Buruk	0	0	0	0	0
Jumlah Balita (sasaran)	18.117	18.377	18.724	17.415	17.415
Persentase Balita Gizi Buruk	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, tidak ada kasus balita gizi buruk yang tercatat (jumlah = 0). Persentasenya selalu 0 persen meskipun jumlah balita sasaran tiap tahun berubah. Hal ini bisa menunjukkan keberhasilan intervensi gizi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo dalam rangka pencegahan balita gizi buruk.

j. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi gizi kurang adalah ukuran persentase individu dalam suatu populasi yang mengalami kekurangan gizi dengan tingkat sedang, yang ditandai dengan berat badan yang rendah untuk usia mereka. Menurut standar WHO, gizi kurang dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat jika prevalensinya di atas 10 persen.

Grafik 2.15
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Palopo Tahun 2020-2024

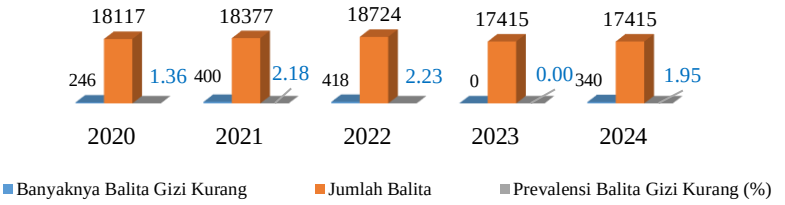

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025

k. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja dikali 100 persen. Angkatan Kerja merupakan penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja dan pengangguran. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja dikali 100 persen. Angkatan Kerja merupakan penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Grafik 2.16
Rasio Penduduk Kota Palopo yang Bekerja Tahun 2020-2024

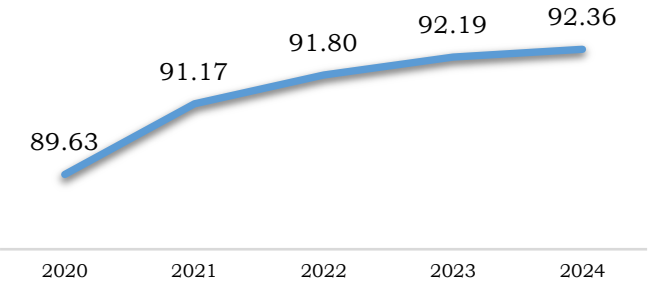

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2025.

Dari grafik rasio penduduk Kota Palopo yang bekerja tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa setelah terjadi peningkatan penduduk yang bekerja setiap tahun. Kenaikan rasio penduduk yang bekerja tahun 2022 lebih dikarenakan adanya penurunan jumlah angkatan kerja Kota Palopo, sedangkan pada tahun 2023 kenaikan disebabkan oleh kenaikan jumlah penduduk yang bekerja.

l. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan Kerja merupakan penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk Kota Palopo usia 15+ tahun pada tahun 2024 sebanyak 146.827 jiwa. Sedangkan untuk jumlah Angkatan Kerja Kota Palopo tahun 2024 sebanyak 97.189 orang. Angkatan Kerja Kota Palopo 2024 ini naik sebesar 2.308 jiwa dibandingkan dengan jumlah Angkatan Kerja 2023.

Grafik 2.17
Jumlah Angkatan Kerja Kota Palopo Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2025.

Kenaikan angkatan kerja beriringan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2024 sebesar 66,19 persen, yang mengalami kenaikan sebesar 0,44 persen poin dibandingkan TPAK tahun 2023.

Grafik 2.18
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palopo

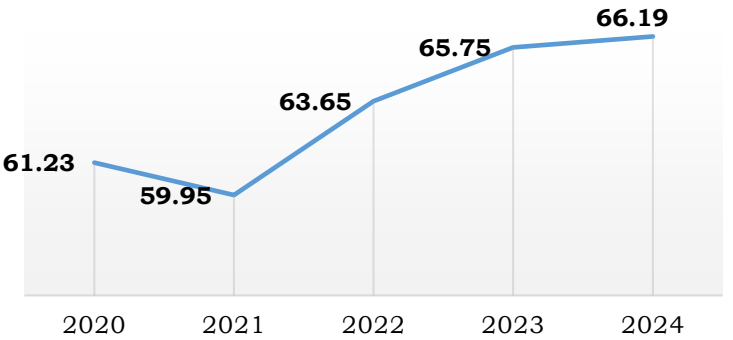

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

Grafik di atas menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK sendiri merupakan persentase Angkatan Kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Jumlah TAPK digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada 2021 TPAK Kota Palopo turun akan tetapi pada 2022 sampai dengan 2024 TPAK Kota Palopo naik sebesar 6,24 persen poin. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pertambahan jumlah penduduk bekerja.

m. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Berikut Grafik TPT di Kota Palopo:

Grafik 2.19
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Nasional

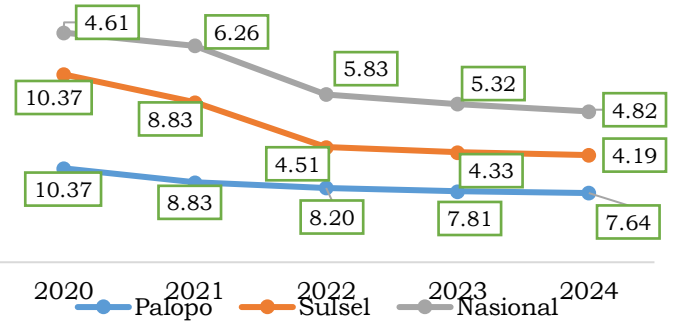

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025

TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT di Kota Palopo pada tahun 2024 turun sebesar sebesar 0,17 di mana di tahun sebelumnya 2023 sebesar 7,81. Hal ini berarti dari tiap 10.000 orang angkatan kerja, terdapat 764 orang penganggur. TPT Kota Palopo menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Akan tetapi proporsi TPT Kota Palopo adalah pengangguran terdidik. Dilihat dari data pencari kerja terdaftar menurut pendidikan didominasi pada lulusan SMA/SMK, Diploma dan Perguruan Tinggi. Tiga kelompok tersebut merupakan kelompok yang terdidik dan mempunyai keahlian. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan yang tersedia belum terintegrasi dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Sehingga perlu adanya sinkronisasi agar keahlian lulusan yang yang ada sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Sinkronisasi ini tentu saja membutuhkan koordinasi dengan semua pihak terkait, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah kabupaten/kota hanya sampai pada tingkat SMP. Hal ini selain bisa dipandang sebagai hal yang negatif, dapat pula dipandang sebagai sebagai hal positif karena menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia pencari kerja di Kota Palopo. Pencari kerja terdaftar menurut pendidikan di Kota Palopo dilihat pada Grafik berikut;

Grafik 2.20
Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan di Kota Palopo Tahun 2020-2024

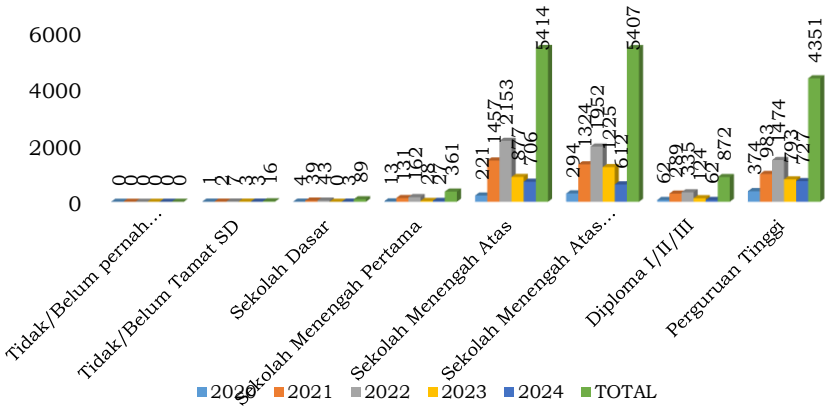

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

n. Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan di Kota Palopo pada tahun 2024 sebesar 7,35%, sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,69%. Dengan jumlah penduduk 180.518 jiwa, terdapat 14.430 penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kota Palopo pada bulan Maret 2024 mencapai 14,43 ribu jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar kurang lebih 0,42 ribu jiwa atau sekitar 450 ribu jiwa terhadap Maret 2023 dan menurun sebesar 0,35 ribu jiwa terhadap Maret 2022. Pada Maret 2024, garis kemiskinan sebesar Rp. 466.521,-/kapita/bulan. Jika dibandingkan dengan maret 2023, garis kemiskinan mengalami peningkatan sebesar Rp. 24.245,-/kapita/bulan.

Perubahan Garis Kemiskinan (GK) di Kota Palopo dipengaruhi oleh pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan GK ini selain dipengaruhi oleh inflasi juga dipengaruhi oleh dinamika pola konsumsi di kalangan penduduk yang dijadikan sebagai referensi dalam pengukuran seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh rata-rata penduduk Kota Palopo. Pada Maret 2024, Garis Kemiskinan sebesar Rp 466.521,-/kapita/bulan. Jika dibandingkan dengan Maret 2023, Garis Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar Rp 24.245,-/kapita/bulan. Pada Periode 5 tahun terakhir, Garis Kemiskinan terus mengalami peningkatan. Garis Kemiskinan telah meningkat sebesar Rp 103.662,-/kapita/bulan dari Rp 362.859,-/ kapita/bulan pada Maret 2020 menjadi Rp 466.521,-/kapita/bulan pada Maret 2024.

Indeks Kedalaman Kemiskinan *(Poverty Gap Index-P1)* merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2024, garis kemiskinan di Kota Palopo ditetapkan sebesar Rp 466.521 per kapita per bulan. Dalam memaknai garis kemiskinan dapat dianalogikan dengan kebutuhan pengeluaran rumah tangga yaitu ayah, ibu, dan dua orang anak, maka yang dibutuhkan rumah tangga tersebut untuk keluar dari garis kemiskinan pada tahun 2024 adalah 4 kali GK atau setara dengan Rp. 1.866.084. Dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,35 persen, jumlah penduduk miskin di Kota Palopo mencapai 14,43 ribu jiwa. Selain itu, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Palopo masing-masing tercatat sebesar 0,94 dan 0,19.

Grafik 2.21
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Palopo

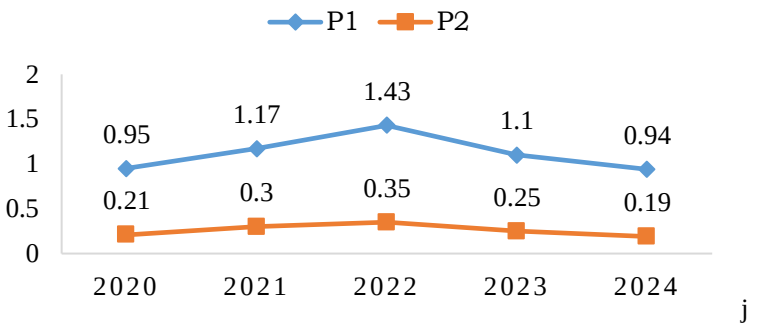

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

Pada tahun 2023, angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan sebesar 0,16 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi 0,94. Artinya secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekat dari Garis Kemiskinan (GK). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah dalam menetukan dan mejalankan program pengentasan kemiskinan pada tahun yang akan datang lebih mudah dan terarah. Sedangkan untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Palopo menunjukkan arah perbaikan yaitu terjadi penurunan 0,06 poin dari 0,25 pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa kondisi social ekonomi penduduk miskin Kota Palopo menyempit keberagamannya.

Dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Persentase penduduk miskin Kota Palopo berada pada posisi 9 (sembilan) terendah sebesar 7,35 persen. Persentase penduduk miskin tertinggi pada Maret 2024 dimiliki oleh Kabupaten Pangkajene Kepulauan sebesar 12,41 persen, disusul oleh Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Luwu. Sementara itu, Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar sebesar 4,97 persen, kemudian disusul oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kota Parepare. Kemudian secara total, persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,06 persen.

o. Ketimpangan Pendapatan / *Gini Ratio*

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Grafik 2.22
Perkembangan Capaian Indikator Gini Ratio Kota Palopo

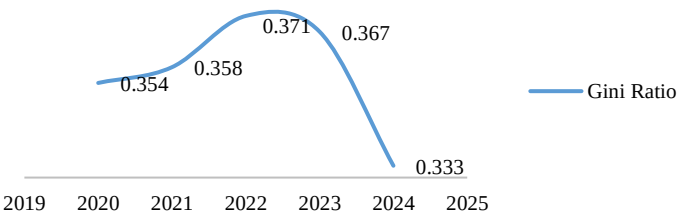

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025

p. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya pembangunan nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat *(tools)* dalam rangka percepatan pencapaian prioritas pembangunan nasional. Dalam mempercepat reformasi birokrasi agar lebih berdampak untuk masyarakat maka sejak tahun 2024, evaluasi Reformasi Birokrasi bertransformasi dari fokus pada 8 (delapan) area perubahan menjadi berfokus pada isu strategis hulu dan isu strategis hilir melalui penilaian Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi sendiri dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi penting demi mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal dan mempunyai

dampak langsung terhadap masyarakat dimana hal tersebut dapat diwujudkan apabila pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menyelesaikan isu strategis hulu dan hilir. Berikut adalah realisasi indeks reformasi birokrasi Kota Palopo.

Grafik 2.23

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Palopo

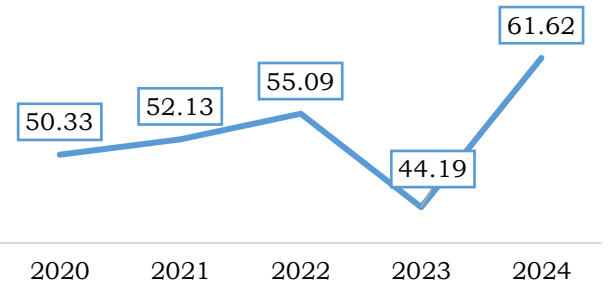

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025.

Terlihat ada kenaikan Indeks Reformasi Birokrasi dari mulai tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami tren yang terus meningkat, di mana terakhir tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Palopo berada pada skor 55.09. Pada tahun 2023 terjadi penurunan skor indeks. Salah satu penyebabnya adalah karena terjadinya perubahan regulasi dari penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) berubahn menjadi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan road map Reformasi birokrasi nasional yang diikuti oleh perubahan map reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Pemerintah Kota Palopo Tahun 2024 melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan RB general dan RB tematik. Hal tersebut berdampak pada terjadinya kenaikan skor pada tahun 2024 sebesar 61,62. Kondisi tersebut mengGrafik kan keseriusan Pemerintah Kota Palopo memperbaiki layanan pemerintahan dan percepatan pencapaian prioritas pembangunan daerah.

q. Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender

Semakin kecil jarak Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IDG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Partisipasi perempuan di Kota Palopo dalam kehidupan ekonomi dan politik cenderung mengalami tren fluktuatif sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hal tersebut terlihat pada perkembangan skor IDG, dimana pada tahun 2022 IDG sebesar 79,10 kemudian mengalami penurunan skor indeks pada tahun 2024 yaitu pada angka 73,74. Capaian Tahun 2024 berada dibawah capaian IDG Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 75,25 dan capaian nasional sebesar 77,62. IDG Kota Palopo yang menurun kemungkinan disebabkan oleh berbagai factor, salah satunya adalah rendahnya partisipasi perempuan di lembaga DPRD. Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palopo Periode 2024-2029 masih belum memenuhi harapan. Jumlha yang terpilih sebanyak 5 (lima) orang atau 20 persen dari jumlah kursi anggota DPRD. Jumlah tersebut berkurang dari perioe sebelumnya yang berjumlah 7 orang anggota DPRD.

Grafik 2.24

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

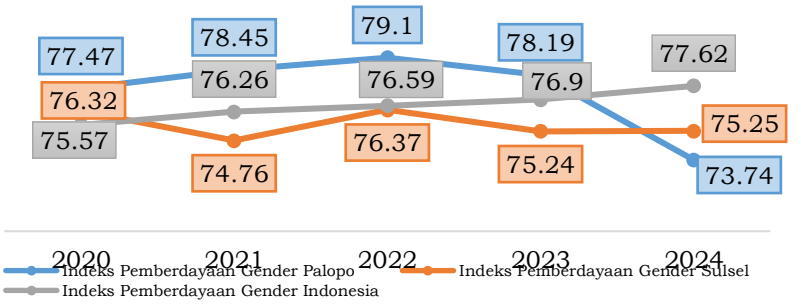

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Hal tersebut berbanding terbalik dengan indeks pembangunan gender yang mengalami tren yang naik sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Grafik 2.25
Capaian Indeks Pembangunan Gender Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

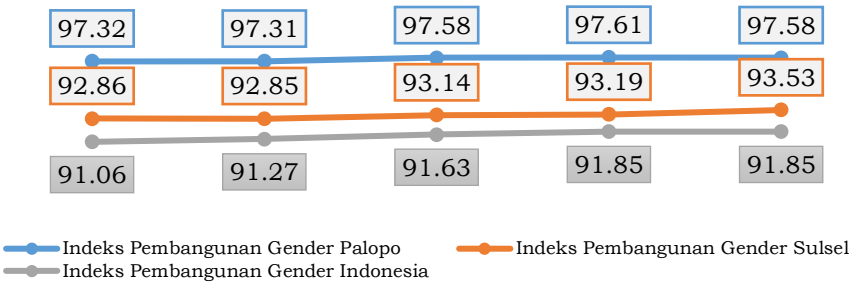

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025.

Meningkatnya IPG Kota Palopo kemungkinan disebabkan oleh peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan juga merupakan indikator penting yang berkontribusi terhadap naiknya IPG. Secara keseluruhan, tren menaiknya IPG Kota Palopo merupakan indikasi positif bahwa pembangunan berbasis gender sedang mengalami kemajuan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palopo dan berbagai *stakeholder* telah berhasil dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan.

r. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran gabungan yang mencerminkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi; kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. IKG mengukur seberapa jauh ketimpangan gender mempengaruhi pencapaian pembangunan di berbagai bidang. IKG Kota Palopo dalam waktu lima tahun terakhir, tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan perbaikan setiap tahun. Berdasarkan data yang ada, capaian IKG Kota Palopo lebih baik dibanding capaian IKG Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender setiap tahun. Penurunan angka ketimpangan gender menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palopo telah membuat kemajuan dalam mengurangi ketimpangan gender di bidang kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan dan pasar tenaga kerja. IKG mengukur seberapa jauh ketimpangan gender mempengaruhi pencapaian pembangunan di berbagai bidang.

Grafik 2.26
Capaian Indeks Ketimpangan Gender Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

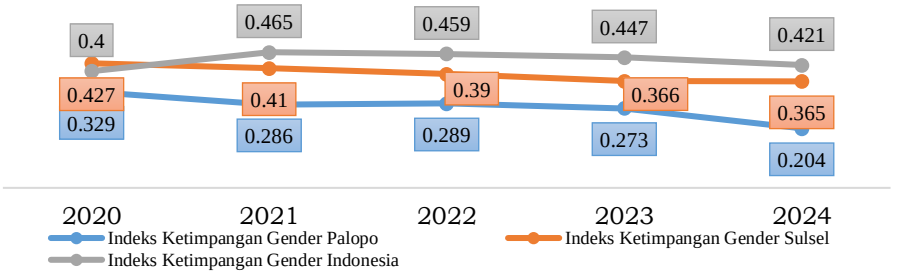

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025.

s. Paritas daya Beli

Paritas daya beli (PPP) adalah ukuran teoritis nilai tukar antar mata uang yang menunjukkan jumlah mata uang yang dibutuhkan untuk membeli jumlah barang dan jasa yang sama di negara lain, dengan tujuan menghilangkan perbedaan tingkat harga antar negara. PPP berfungsi sebagai alat untuk membuat perbandingan daya beli yang lebih akurat antara negara-negara dengan menggunakan "keranjang barang" yang representatif, bukan hanya berdasarkan nilai tukar pasar yang fluktuatif.

Tabel 2.10
Capaian Paritas Daya Beli Kota Palopo

Indikator	Capaian 2024	Target Tahun 2025
Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	14.369	14.018

Sumber : Bappeda Kota Palopo, 2025

t. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang terdiri dari 17 tujuan yang masing-masing tujuan memiliki indikator dan sub indikator. Berikut ini merupakan pemetaan Perangkat Daerah (PD) dan program yang sesuai nomenklatur yang merupakan sebaran pengampu indikator untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals di Kota Palopo sebagai berikut:

Tabel 2.11

Capaian SDGs Kota Palopo Tahun 2020-2024

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
TUJUAN I TANPA KEMISKINAN							
Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar amerika per hari	Tingkat kemiskinan ekstrim	Persen (%)	Indikator tingkat kemiskinan ekstrim di mulai tahun 2021	1,94	2,18	0,64	0.57
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional	Persen (%)	7,85	8,14	7,78	7,69	7,35
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/ melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen (%)	80.14	90.39	93.14	95.80	96,82
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persen (%)	34.01	43.95	35.75	41.79	43,25
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 1.000 orang	Jiwa/1.000	0.03	0.06	0.09	0.02	0,03
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	Pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional	Dokumen	n/a	n/a	n/a	1 (Dokumen Kawasan Resiko Bencana)	1 (Dokumen Kawasan Resiko Bencana)

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN							
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Indeks	4.22	3.69	5.62	4.35	6.26
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan	Indeks	4.33	4.02	3.78	3.63	
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	Prevalensi stunting (gagal tumbuh) dan stunted (pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	Persen (%)	Belum di hitung tahun 2020	28.5	23.8	25.50	22.80
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	Prevalensi wasting (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Persen (%)	3.24	7.67	7.48	2.90	1,99 *data baru
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Indeks	90.1	90	82.5	85.5	
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	Persen (%)	8.37	4.78	1.72	8.37	13,59
Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	Kg/Jiwa	n/a	n/a	n/a	37,19	37,22
Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Persen (%)	0.00	12.81	12.28	12,22	45,83
Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	PDRB Pertanian/ APBD Pertanian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang							
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Angka kematian ibu (AKI)	Kasus	1	6	8	3	2
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	Persen (%)	100	88.81	84.60	76,46	100
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB)	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	12,55	3,63
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Jiwa/ 1.000	2.72	1.30	1.50	12,55	3,63
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	Jiwa/ 1.000	0.47	1.69	0.58	0.77	0,22
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 1.000 penduduk	Jiwa/ 1.000	1.62	1.87	1.07	2.58	2,49
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	Kejadian Malaria per 1.000 orang.	Jiwa/ 1.000	0.72	0.29	0.34	3,83	4,48
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	Jumlah kasus malaria	Jiwa	51	37	63	68	82
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	Insiden Hepatitis B per 1.000 penduduk		0	0	94	125	0
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	Jiwa	0	4	2	2	9
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Persen (%)					
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	Prevalensi tekanan darah tinggi	Persen (%)	2.74	3.17	5.20	n/a	n/a
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Persen (%)	30.21	n/a -	25.45	n/a	n/a
Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Jiwa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan							
Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi	Jiwa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	Persen (%)	23.86	36.88	25.03	n/a	n/a
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1.000 perempuan di kelompok umur yang sama	Jiwa/ 1.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	Total Fertility Rate (TFR)	Persen (%)	2.31	N/A	2.22	2.24	2,18
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen (%)	80.14	90.39	93.14	91.86	96,82
Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Persen (%)	0.93	2.75	1.97	n/a	n/a
Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	44,66	38,36
Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	Persen (%)	34.65	34.65	34.65	33.91	100

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua							
Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Jiwa/ 1.000	5.83	4.93	10.67	13.76	15,18
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS							
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	4,64	4,24
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 25-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Persen (%)	60.5	67.29	73.16	n/a	n/a
Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ lakilaki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil	Persen (%)	APM SD/Sederajat (99.01%) APM SMP/Sederajat (78.33%) APM SMA/Sederajat (67.62%)	APM SD/Sederajat (98.81%) APM SMP/Sederajat (80.37%) APM	APM SD/Sederajat (98.68 %) APM SMP/Sederajat (80.52	APM SD/Sederajat (98.34) APM SMP/Sederajat (79..06)	APM SD/Sederajat (87,16 %) n/a

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
	terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas		APK SD/Sederajat (104.62%) APK SMP/Sederajat (87.87%) APK SMA/Sederajat (107.53%)	SMA/Sederajat (68.11%) APK SD/Sederajat (105.20%) APK SMP/Sederajat (89.43%) APK SMA/Sederajat (110.23%)	%) APM SMA/Sederajat (68.68%) APK SD/Sederajat (100.05%) APK SMP/Sederajat (86.44%) APK SMA/Sederajat (110.58%)	APM SMA/ Sederejat (80.13) APK SD/Sederajat (105.71) APK SMP/Sederajat (82.89) APK SMA/ Sederajat (110.37)	
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Persen (%)	98.14	97.94	97.57	98,11	98,48
Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir pada tingkat SD/ Sederajat, SMP/ Sederajat dan SMA/ Sederajat	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	88.46	88,46
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER							
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	0.011	n/a
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	0.0015	n/a
Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b pemerintah daerah	Persen (%)	28	28	28	32	20

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	28.38	27.96
Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK							
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Persen (%)	84	96.22	97.36	84.38	85.11
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Persen (%)	96.60	92.09	94.64	82.69	84.86
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman	Persen (%)	N/A	N/A	N/A	0	0
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	Kualitas air permukaan (sungai) sebagai air baku	Indeks	31.08	20.17	18.45	53.33	59.06
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	N/A	N/A
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	N/A	N/A
TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU							
Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	Rasio elektrifikasi	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	66.18	67.09
Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	Konsumsi listrik per kapita	Mega Watt/ Jiwa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI							
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	Laju pertumbuhan PDRB per kapita harga konstan 2010	Persen (%)	0,41	3,95	3,83	12,20	4,40
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional	PDRB per kapita harga berlaku	Juta	43,66	46,52	51,18	58,86	56,63

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang							
Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya	Laju pertumbuhan PDRB harga konstan 2010 per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun	Persen (%)	-4,77	3,70	-2,89	0,71	4,40
Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Persen (%)	10,37	8,83	8,20	7,81	7,64
Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	Tingkat setengah pengangguran (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu)	Persen (%)	31,15	30,68	32,10	28,64	
Pada tahun 2020, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja dan tidak dalam pelatihan dan tidak sekolah	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	Jumlah wisatawan mancanegara	Jiwa	22	0	5	68	217
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jiwa	61267	68184	172910	178561	187.865
TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR							
Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Kondisi mantap jalan nasional	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	94,2	n/a
Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Kondisi mantap jalan provinsi	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	75,39	71,42
Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Kondisi mantap jalan kabupaten/ kota	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	58,04
Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	jiwa	539,500	945,036	2,301,320	1,982,192	872.745
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi	Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) industri manufaktur	Persen (%)	-5,12	5,56	14,12	9,16	7,39

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang							
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 industri manufaktur	Persen (%)	-6,00	3,01	9,37	5,81	4,76
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN							
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	Rasio Gini	Indeks	0,354	0,358	0,371	0,367	0,333
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persen (%)	7,85	8,14	7,78	7,69	7,35
Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A
Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persen (%)	34.01	43.95	35.75	41.79	43,25
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persen (%)	92.75	97.06	92.47	27.62	27.56
Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Hektare/Jiwa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Rupiah/ Jiwa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah	Jumlah korban meninggal, hilang,	Jiwa / 1.000	0.03	0.06	0.09	0.02	0.22

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	dan terkena dampak bencana per 1.000 orang						
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	77.28	71.41
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	Persentase sampah nasional yang terkelola	Persen (%)	75.82	70.42	73.45	77.28	71.41
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10	ugram/m3/ Jiwa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87.74	88.56	88.22	89.53	86.59
Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030	Pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	Dokumen	n/a	n/a	n/a	1 (Dokumen Kawasan Resiko Bencana)	1 (Dokumen Kawasan Resiko Bencana)
Memberikan dukungan kepada negara - negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memfaatkan bahan lokal	Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal	Perda	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB							
Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen	Persentase Sisa Makanan	Persen (%)	20	30	30	35	N/A
Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan - bahan	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri (Pengurangan dan penghapusan Merkuri di tahun 2020 dan 2021 sebesar 10% dari baseline 10 ton,	Ton	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan	pengurangan dan penghapusan di tahun 2022 sampai 2024 sebesar 20% dari baseline 10 ton)						
Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan - bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/ diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengelolaannya	Ton/ Jiwa	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A
Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Ton	1.401	1.762,37	2.024	2.880,35	2.172,00
Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Perusahaan	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A
Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM							
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 1.000 orang	%	0.03	0.06	0.09	0.02	0,07
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	Pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	Dokumen	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen Kawasan Resiko Bencana	1 Dokumen Kawasan Resiko Bencana
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN							
Mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi pada tahun 2025	Persentase penurunan sampah terbuang ke laut	Persen (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jiwa	0	0	100	2000	2000
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN							
Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Persen (%)	24.43	24.06	25.53	35,60	35,60
Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A
Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	Km2	n/a	n/a	n/a	189,64	189,64

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan							
Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan	Indeks tutupan hijau pegunungan	Km2	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kasus	25	4	19	16	
Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun	Kematian disebabkan konflik per 1.000 penduduk	Jiwa/ 1.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak	Angka korban perdagangan manusia per 1.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi	Jiwa/ 1.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	Pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini LHP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	Pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Skor	60.03 B	61.01 B	62.40 B	64,35 B	
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Indeks	50.33 CC	52.13 CC	55.09 CC	44.19 C	63.56
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	Pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Tinggi/ Sedang/ Rendah	n/a	n/a	n/a	72,12 (Sedang)	70,92 (Sedang)
Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Persen (%)	28	28	28	28	28
Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II dan III)	Persen (%)	Eselon II 10.71% Eselon III 28.42%	Eselon II 25.00% Eselon III 26.59%	Eselon II 23.53 % Eselon III 28.90 %	Eselon II 25,00 % Eselon III 29,63 %	Eselon II 26,19 % Eselon III 30,21 %
Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	97,71
Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0 - 17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	19,14	
Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun	Persen (%)	72.78	89.54	99.21	n/a	98,39 %
Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Skor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Kebijakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN							
Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang,	Total pendapatan asli daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	Persen (%)	2.21	1.61	1.54	1.86	1,86

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya							
Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	Persen (%)	0.42	0.41	0.42	0.45	0,44
Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Persen (%)	18.77	14.98	17.22	20.91	77,73
Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi	Persentase pengguna internet	Persen (%)	0	0	0	0	0
Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko di antara para pihak (Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur)	Proyek	0	0	0	0	0
Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Proyek	0	0	0	0	0
Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap	Rupiah	0	0	0	0	0

TARGET	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama	perencanaan, penyiapan dan transaksi						
Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	YA/ TIDAK	ya	ya	ya	ya	ya

3. FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya adalah acara yang menampilkan berbagai bnetuk seni dan budaya, bertujuan untuk melestarikan, mempromosikan, dan merayakan kekayaan budaya suatu daerah. Festival ini dapat melibatkan berbagai kegiatan seperti pertunjukan tari, music, seni rupa, teater, serta pameran kerajinan tangan. Tujuan penyelenggaraan festival seni dan budaya antara lain, Pelestarian Budaya; untuk menjaga keberlangsungan seni dan budaya agar tidak hilang ditelan zaman, Promosi Budaya; untuk memperomosikan seni dan budaya kepada masyarakat luas, baik local maupun internasional; Penguatan Identitas; memperkuat rasa memiliki dan kebanggaan terhadap budaya daerah, Peningkatan Pariwisata; menjadikan festival sebagai daya tarik yang dapat meningkatkan perekonomian daerah; Pendidikan dan Hiburan; memberikan hiburan sekaligus edukasi tentang seni dan budaya kepada masyarakat; Pertukaran Budaya; memfasilitasi interaksi dan pertukaran budaya antar daerah atau negara; Pemberdayaan Masyarakat; melibatkan masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kreativitas, Festival Seni Tradisional; menampilkan seni dan budaya tradisional, seperti tari daerah, music tradisional, dan kerajinan tangan; Festival Seni Kontemporer; menampilkan karya seni modern yang terinspirasi dari budaya, Festival Budaya; menampilkan berbagai aspek budaya, seperti upacara adat, kuliner tradisional, dan permainan rakyat, dan Festival Seni Lintas Budaya; menampilkan kolaborasi seni dari berbagai budaya, baik local maupun internasional.

1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya adalah kegiatan yang penting untuk melestarikan, mempromosikan, dan merayakan kekayaan budaya suatu daerah atau negara. Festival ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk menampilkan berbagai bentuk seni dan budaya, baik tradisional maupun kontemporer, serta memperkuat hubungan antar budaya.

Grafi 2.27

Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Palopo

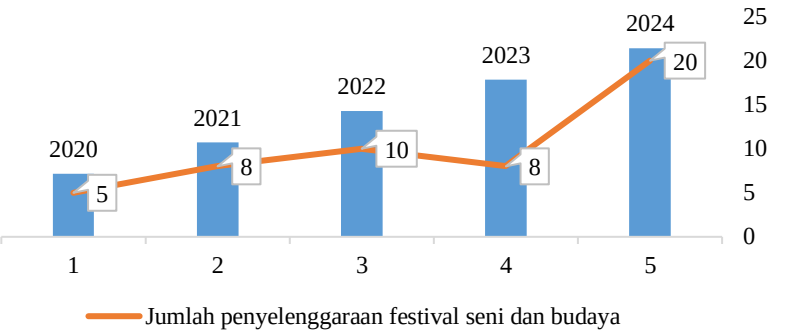

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Palopo, 2025.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami kenaikan hamper setiap tahun dalam waktu lima tahun terakhir. Kenaikan ini karena dukungan pemerintah untuk menyelenggarakan pagelaran seni dan budaya untuk mendukung penggiat seni dan budaya. Pada tahun 2022 dan 2023 pertunjukkan seni dan budaya menunjukkan adanya geliat peningkatan pertunjukkan setelah mengalami penurunan pada 2021. Sedangkan untuk kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina, Kota Palopo masih pada nilai 41 persen. Pemerintah Kota Palopo terus berupaya melakukan pendekatan dan juga fasilitasi terhadap pelaku-pelaku budaya di Kota Palopo dengan melakukan Focus Group Discussion untuk menggali hal-hal yang diperlukan untuk

2) Cagar Budaya

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan, baik yang berada di darat maupun di air, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan,

agama, dan/atau kebudayaan. Ini bisa berupa benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan yang ditetapkan sebagai cagar budaya.

Tabel 2.12
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	148	148	148	23	23

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Palopo, 2025.

Kota Palopo memiliki benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 148 sejak tahun 2020. Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 23 buah. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kota Palopo memiliki komitmen untuk terus melestarikan cagar budayanya.

3) Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan pembinaan olahraga mencakup berbagai aspek untuk mengembangkan potensi solahraga pada individu, baik dari segi fisik, mental maupun social. Ini melibatkan pembinaan atlet mud, pelatihan, penyediaan sarana prasarana, serta upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga. Dengan cakupan yang luas dan terpadu, pembinaan olahraga diharapkan dapat mencapai tujuan meningkatkan prestasi olahraga daerah dan membentuk masyarakat yang sehat dan berkualitas. Progress cakupan pembinaan olahraga di Kota Palopo tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut;

Grafik 2.28
Cakupan Pembinaan Olahraga Tahun 2020 – 2024

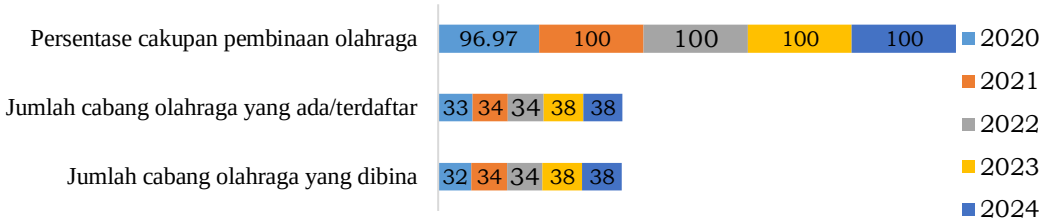

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2025

Persentase cakupan pembinaan olahraga sejak tahun 2021 menunjukkan angka 100 persen yang disebabkan karena semua cabang olahraga yang terdaftar telah menerima pembinaan dari Pemda. Jumlah cabang olahraga dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2020 sebanyak 33 cabang olahraga yang ada semuanya telah mendapat pembinaan dari Pemda dan tahun 2021 bertambah 1 cabang olahraga yang ada di Kota Palopo menjadi 38 cabang olahraga dan seluruhnya telah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kota Palopo.

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

A. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan memiliki tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palopo menekankan pada pemerataan dan perluasan pelayanan Pendidikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan indikator-indikator yang mengukur pemerataan pendidikan, seperti Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Persentase Angka Partisipasi Sekolah mengGrafik kan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Semakin besar nilai Angka Partisipasi Sekolah

mengGrafik kan semakin banyaknya anak usia sekolah yang menempuh pendidikan sekolah. Hal tersebut menunjukkan seberapa besar penduduk dalam mengakses pendidikan secara umum.

Grafik 2.29
Angka Partisipasi Sekolah Kota Palopo
Tahun 2020 - 2024

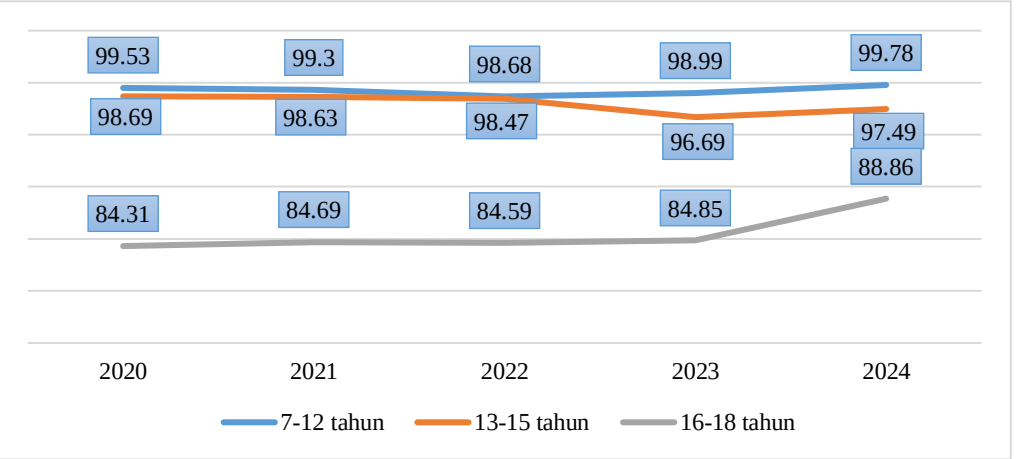

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

Untuk usia 7-12 dan usia 13-15 tahun mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai 2022, akan tetapi kedua jenjang usia APS tersebut kembali naik pada tahun 2023 sampai tahun 2024. Sedangkan jenjang usia 16-18 tahun APS terjadi fluktuasi angka partisipasi sekolah. Penurunan APS jenjang usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun perlu didalami permasalahannya. Hal itu berarti banyaknya usia tersebut dalam partisipasi sekolah menurun. Penurunan APS pada rentan usia tersebut selaras dengan APK SD dan SMP. Begitu pula halnya dengan usia 16-18 tahun yang mengalami fluktuatif, perlu dilakukan pendalaman penyebab terjadinya hal tersebut.

Persentase Angka Putus Sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, seperti pada angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD. Angka Putus Sekolah berfungsi untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Grafik an persentase angka putus sekolah di Kota Palopo seperti tabel di bawah ini:

Grafik 2.30
Persentase Angka Putus Sekolah Kota Palopo Tahun 2020-2024

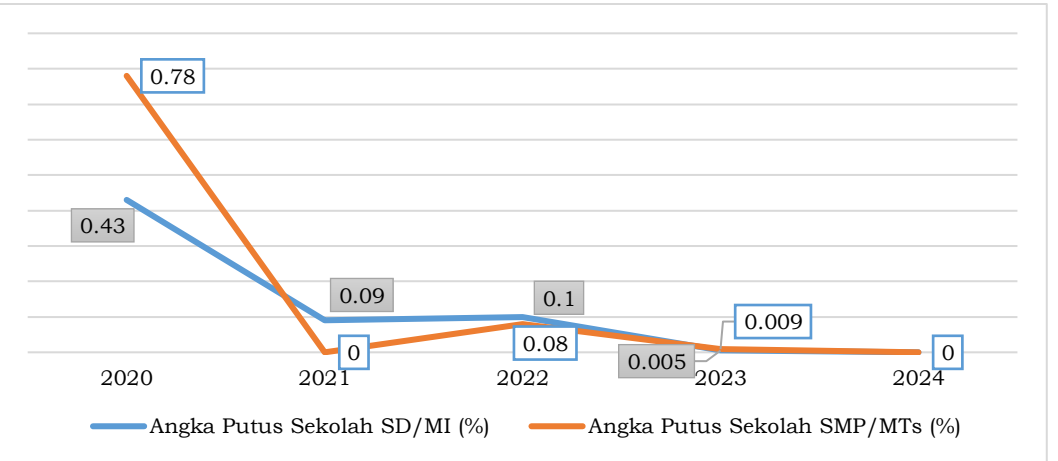

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palopo, 2025.

Persentase angka putus sekolah pada SD mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 hingga di tahun 2023 mencapai angka 0,009 persen. sedangkan Persentase Angka Putus Sekolah jenjang SMP/MTs dari tahun 2020-2022 memiliki tren yang menurun. Pada tahun 2021 di Kota Palopo mampu menekan angka putus sekolah SMP/MTs hingga 0 persen. Akan tetapi setelah turun pada tahun 2022 menjadi 0 persen, di tahun 2023 Persentase Angka Putus Sekolah jenjang SMP/MTs kembali naik menjadi 0,08 dan kembali menurun pada tahun 2023 pada angka 0,009 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk segera dicari sebab dan solusinya. (data 2024 berapa?)

Grafik 2.31
Persentase Angka Kelulusan di Kota Palopo
Tahun 2020-2024

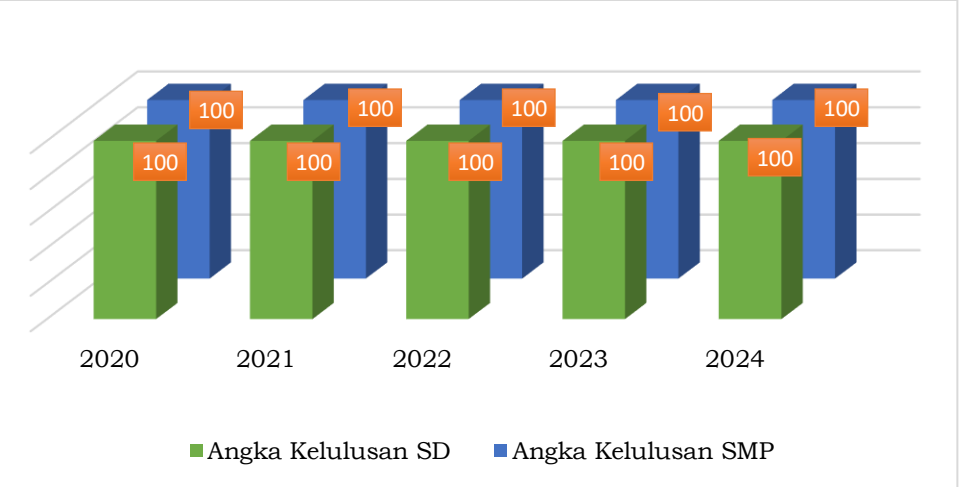

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palopo, 2025.

Pada jangka waktu lima tahun terakhir, angka kelulusan di Kota Palopo mencatatkan perkembangan yang positif. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, selalu mencatatkan kondisi 100 persen. Sedangkan pada jenjang SD/MI mencatatkan persentase angka kelulusan yang meningkat sejak 2020 dan tahun 2024 juga mencapai angka 100 persen. Upaya dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Palopo perlu adanya kualifikasi terhadap tenaga pendidik dalam mendukung kegiatan pendidikan. Kualifikasi pendidik atau guru merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di Kota Palopo sampai denngan tahun 2024 telah mencapai 97,62 persen. Hal ini merupakan indikasi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan, karena kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi seringkali berhubungan dengan pemahaman materi yang lebih mendalam dan kemampuan mengajar yang lebih baik.

Grafik 2.32
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4
Kota Palopo Tahun 2020-2024

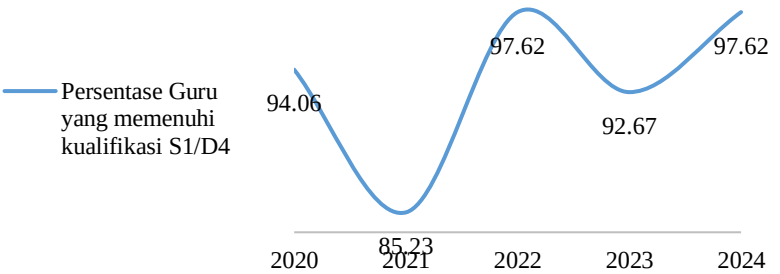

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palopo, 2025.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan pada tahun 2020-2024 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini. Tabel 2.12 SPM Bidang Urusan Pendidikan

Tabel 2.13
Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Palopo

Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase warga negara berusia 4-6 tahun yang mendapatkan pelayanan dasar pendidikan anak usia dini	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	n/a	n/a	n/a	n/a	65.68
Pendidikan	Rata-rata kemampuan literasi	n/a	n/a	51.99	58.46	60.67

Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Dasar	SD berdasarkan asesmen nasional					
	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	n/a	n/a	23.24	37.86	50.55
	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	n/a	n/a	49.10	63.01	71.15
	Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	n/a	n/a	33.17	63.01	71.15
Pendidikan Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan kesetaraan	n/a	n/a	n/a	n/a	0.1

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palopo, 2025.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan menjadi salah satu investasi yang penting pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Posyandu (pos pelayanan terpadu) menjadi upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Data jumlah posyandu di Kota Palopo mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir sebagaimana Grafik berikut;

Grafik 2.33
Jumlah Posyandu Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

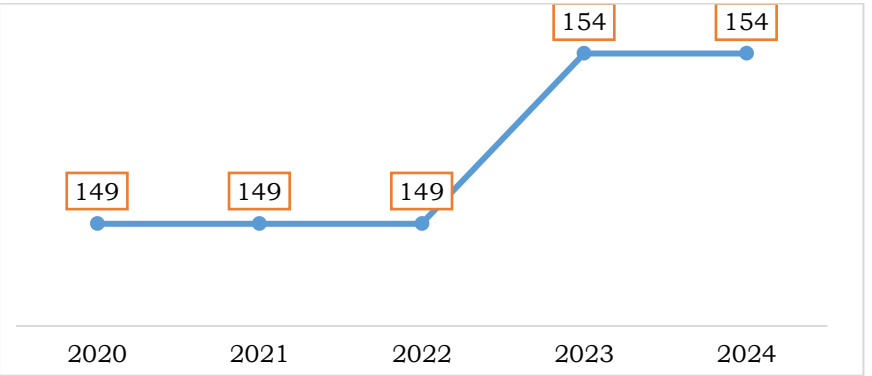

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

Data persentase posyandu aktif di Kota Palopo mengalami peningkatan sepanjang lima tahun terakhir dimana pada 2020 sampai dengan 2024 sebesar 100% sebagaimana Grafik berikut:

Grafik 3.34
Persentase Posyandu Aktif Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

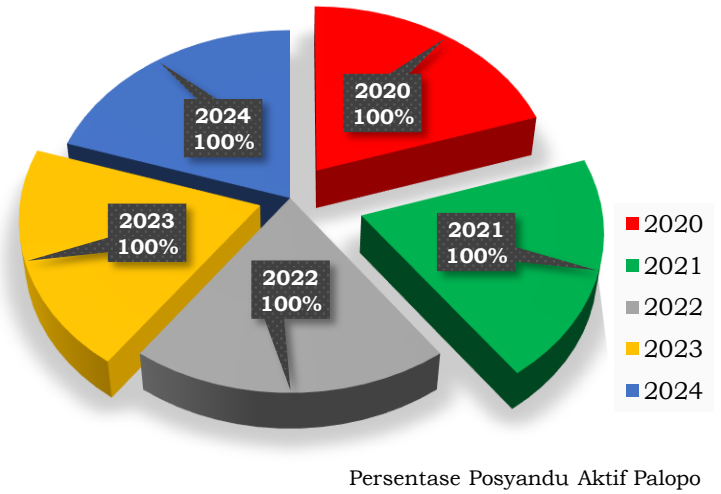

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Puskesmas menjadi unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya secara terpadu dan terkoordinasi. Jumlah Puskesmas pada tahun 2024 di Kota Palopo mencapai 12 unit tersebar di 9 (Sembilan) kecamatan.

Grafik 2.35
Jumlah Puskesmas di Kota Palopo Tahun 2024

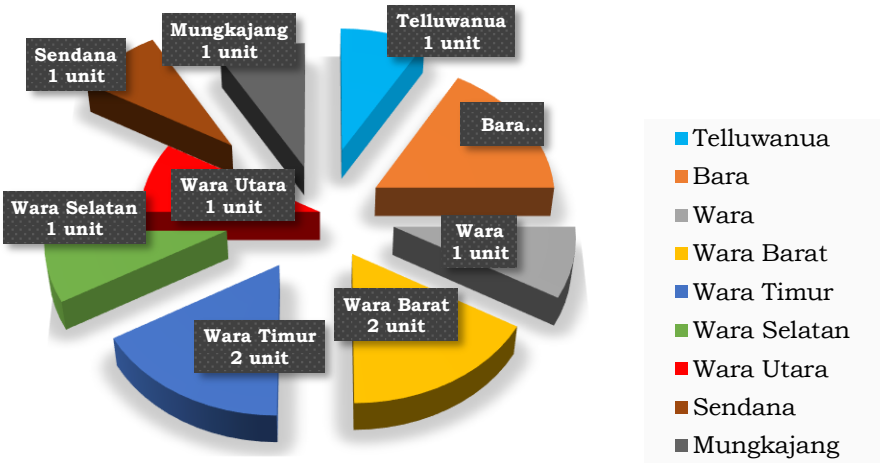

Puskesmas di Palopo

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

Rasio puskesmas adalah perbandingan jumlah puskesmas dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Rasio puskesmas yang ideal adalah 1 (satu) puskesmas untuk setiap 1.000 penduduk.

Grafik 2.36
Rasio Puskesmas di Kota Palopo Tahun 2020-2024

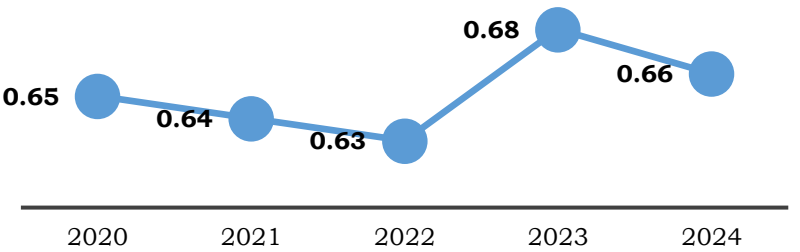

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

Puskesmas pembantu (pustu) merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas. Tujuan Puskesmas Pembantu adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Jumlah Pustu di Kota Palopo pada Tahun 2024 mencapai 30 unit.

Grafik 2.37
Rasio Puskesmas Pembantu Kota Palopo Tahun 2020-2024

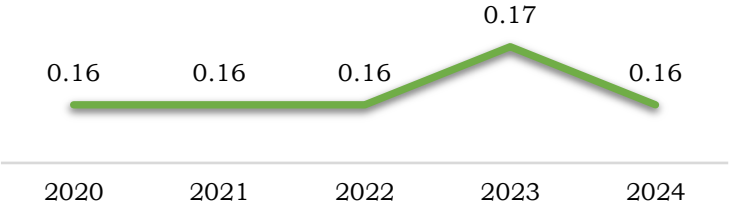

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

Ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Dokter menjadi satu diantara tenaga kesehatan yang berperan penting sebagai advokat di bidang kesehatan bagi pasien. Rasio tenaga dokter per satuan penduduk merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga dokter dengan jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan idealnya pada 1 dokter berbanding 2.500 penduduk. Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Palopo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 2.38
Rasio Dokter Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

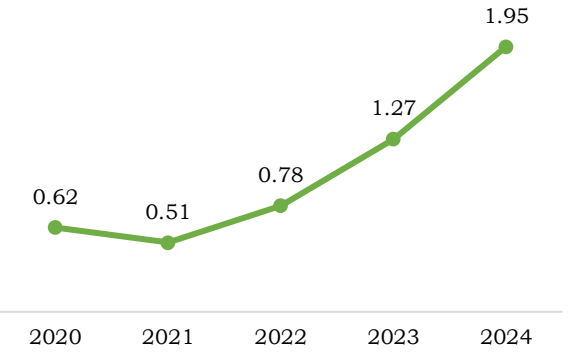

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, untuk melayani 1000 jiwa penduduk, Pemerintah Kota Palopo menyiapkan 1 orang dokter atau 1 dokter harus melayani sebanyak kurang lebih 1000 penduduk. Namun pada tahun 2024, meningkat menjadi tersedia 2 orang dokter untuk melayani 1000 jiwa penduduk Kota Palopo. Ini memberikan informasi bahwa beban kerja tenaga dokter di Kota Palopo sejak 2024 jauh lebih ringan dibandingkan tahun 2020. Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 182.898, dimana 1000 penduduk sudah bisa terlayani oleh 2 dokter.

Grafik 2.39
Rasio Tenaga Medis Kota Palopo Tahun 2020 - 2024

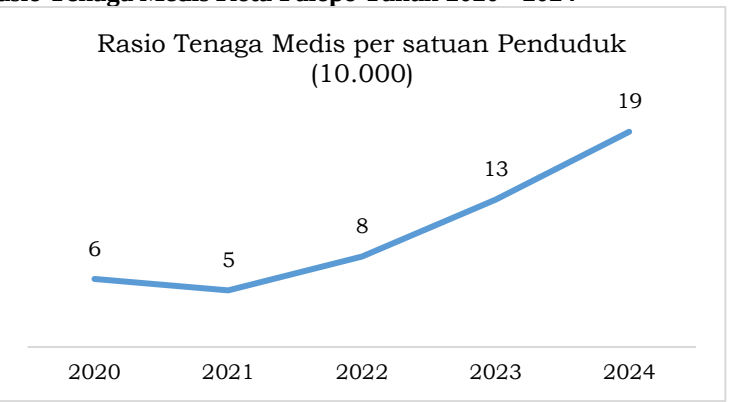

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, untuk melayani 10.000 jiwa penduduk, Pemerintah Kota Palopo bisa menyiapkan 6 orang tenaga medis. Namun pada tahun 2024, tersedia 19 orang tenaga medis untuk melayani 10.000 jiwa penduduk Kota Palopo.

Komplikasi kebidanan adalah gangguan kesehatan yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan/atau janin. Gangguan ini dapat berupa penyakit menular atau tidak menular. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (PK) adalah persentase kasus komplikasi kebidanan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah. Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palopo selama 5 (lima) tahun terakhir memiliki kecenderungan berfluktuatif bahkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan ada kecenderungan menurun. Hal tersebut bisa dilihat pada angka pada tahun 2020 sebesar 64,20 dan pada tahun 2024 berada pada angka 61,85. Walaupun terjadi kenaikan yang cukup besar pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan ibu dengan komplikasi kebidanan di Palopo pada tahun 2022 yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan.

Grafik 2.40
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

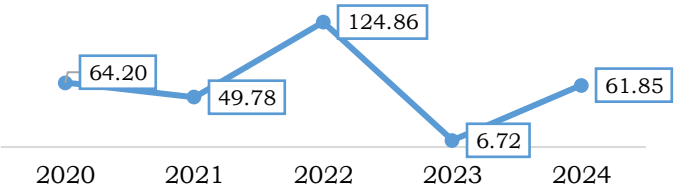

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

UCI *(Universal Child Immunization)* adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), Ibu hamil, Wanita Usia Subur (WUS) dan anak sekolah tingkat dasar. UCI merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Imunisasi juga merupakan cara untuk mencegah cara untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B,dan 1 dosis Campak.Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT. Data menunjukan cakupan kelurahan UCI di Kota Palopo belum mencapai angka 100 persen, tetapi secara angka mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hal itu menunjukkan cakupan kelurahan UCI belum tercapai. Grafik berikut menunjukkan cakupan kelurahan UCI di Kota Palopo.

Grafik 2.41
Cakupan Kelurahan UCI di Kota Palopo

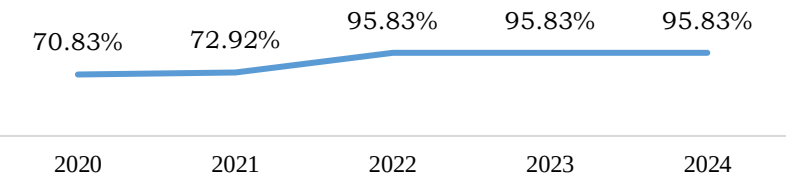

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

Prevalensi balita gizi kurang merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi kurang berdasarkan kriteria berat badan per umur dan jumlah balita yang ditimbang. Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas di dalam upaya perbaikan pangan dan gizi.

Grafik 2.42
Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Palopo

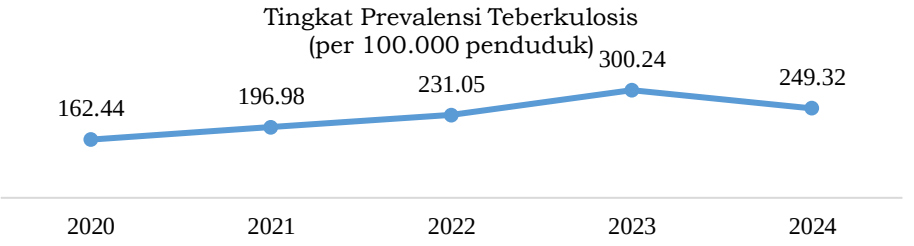

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

Prevalensi balita gizi kutrang di Kota Palopo selama lima tahun terakhir mengalami perbaikan yang signifikan. Data yang ada menunjukkan bahwa sejak tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024, prevalensi gizi kurang mencapai nol persen. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangu masalah gizi kurang pada balita, seperti pemberian makanan tambahan, pendidikan gizi serta perbaikan sanitasi dan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Grafik 2.43
Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Palopo

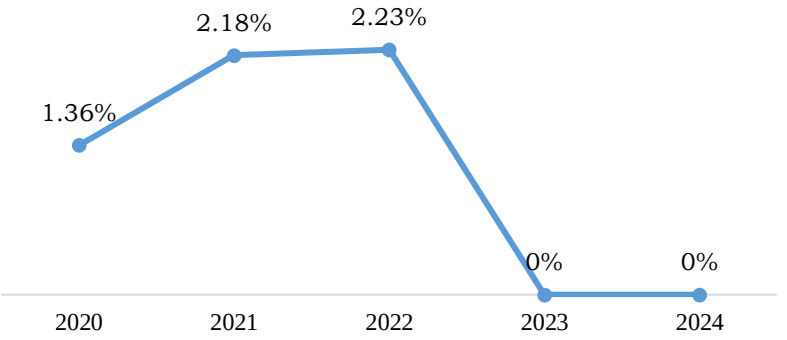

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14
Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kota Palopo

Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	2612	3019	3142	2777	2493
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	2947	2991	2880	2768	2466
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	2749	2900	2815	2751	2456
Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	5409	6294	6935	11868	12020
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	6842	6525	9647	22324	28655
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	28749	35246	21192	75580	83224
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	5743	9743	9124	11274	13598
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	3640	4566	4921	13794	14289
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	1249	1782	2042	3231	2977
Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	242	282	297	339	355
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	431	1525	3382	4085	5054
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	5116	4238	5200	6068	5531

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2025.

Pada 2024 secara keseluruhan indikator SPM bidang kesehatan terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Memperhatikan capaian SPM Kesehatan tersebut berbagai upaya yang dilakukan dalam proses penerapan dan pencapaian SPM diantaranya dengan peningkatan penyediaan sarana-prasarana kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan Kota Palopo.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal tersebut mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Secara umum, perkembangan proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2020 proporsi jalan dalam kondisi baik adalah 76,11 persen kemudian meningkat menjadi 78,44 persen pada 2021. Pada tahun 2022 meningkat pesat menjadi 81,96 persen dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur. Sedangkan persentase kondisi jalan dalam keadaan baik turun pada tahun 2023 menjadi 61,38 walaupun tahun 2024 mulai mengalami peningkatan walaupun dalam jumlah yang sangat sedikit. Hal tersebut terjadi akibat penjang jalan kondisi baik mengalami penurunan pada tahun tersebut, sebagaimana diGrafik kan dalam grafik di bawah ini:

Grafik 2.44
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Palopo

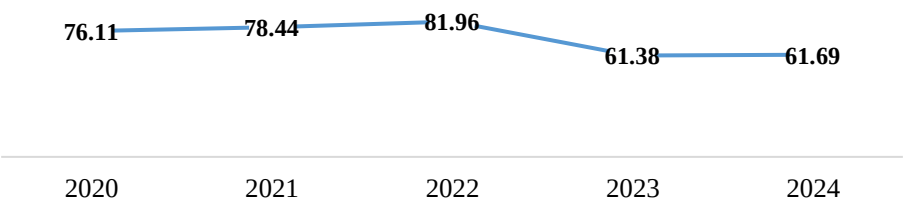

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo, 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan. Untuk menjamin kualitas ketersediaan sistem drainase, dilakukan penghitungan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase dalam kondisi yang baik dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.

Tabel 2.15
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik di Kota Palopo

Indikator	2023	2024
Panjang drainase dalam kondisi baik (Km)	245.9	247.65

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo, 2025

Panjang drainase dalam kondisi baik di Kota Palopo pada tahun 2023 sampai 2024 mengalami peningkatann volume. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Palopo terus melakukan peningkatan kualitas drainase perkotaan baik di kawasan permukiman maupun diluar kawasan permukiman. Akses air minum layak menjadi salah satu infrastruktur dasar yang bertujuan mendorong kualitas kesehatan masyarakat di wilayahnya. Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase keluarga berakses air minum yang layak. Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah keluarga berakses air minum dengan total keluarga di Kota Palopo.

Grafik 2.45
Persentase Keluarga Berakses Air Minum Layak

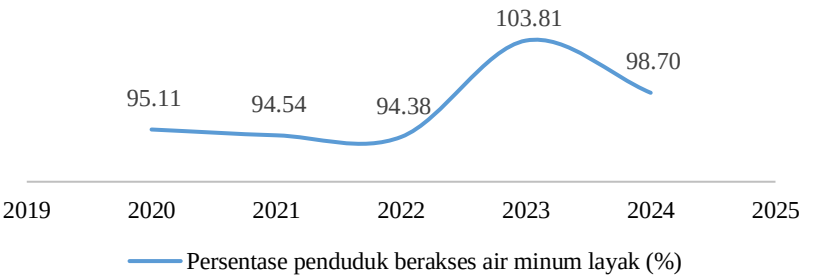

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo, 2025

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16
SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pemenuhan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	n/a	n/a	n/a	84,38	85,53
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Persentase warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	n/a	n/a	n/a	82,69	84,85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo, 2025

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan pembangunan multisektoral yang penyelenggaraannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua warga, Pemerintah Kota Palopo bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya.

Tabel 2.17
Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kota Palopo

Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kota	Persentase Warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	n/a	n/a	n/a	n/a	100
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palopo, 2025

a) **Rasio Rumah Layak Huni**

Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu : jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Jadi Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Data pada tahun 2024 menunjukkan pada angka

Tabel 2.18
Rasio Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah layak huni	35.313	37.876	38.967	39365	39992
Jumlah penduduk	184.681	187.331	190.867	194241	195670
Rasio Rumah Layak Huni	0.191	0,201	0,204	0,202	0,204

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palopo Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang tahun 2020-2021 meningkat. Jika pada tahun 2018 hanya terdapat sebanyak 32.097 unit rumah layak huni, pada tahun 2024 jumlah rumah layak huni meningkat menjadi 39.992 unit. Rasio rumah layak huni pada tabel di atasmenunjukkan bahwa pada tahun 2018, per 1000 penduduk Kota Palopo hanya terdapat 178 unit rumah layak huni, kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2024 terdapat 204 unit rumah layak huni per 1000 penduduk Kota Palopo.

b) Rasio Pemukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman.Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik.

Tabel 2.19
Rasio Permukiman Layak Huni Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas area permukiman Layak Huni (Ha)	5.205	5.185	5.231,2	5462.9	5751,77
Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	5.561	5.611	5.680,4	5904	6013,4
Rasio Permukiman Layak Huni (%)	93.59	92,40	92,09	92,52	95,65
Rasio Pemukiman Layak Huni Sulsel (%)	-	-	-		

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palopo Tahun 2024

Rasio permukiman layak huni dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperti yang terlihat pada tabel, rasio permukiman layak huni tahun 2020 pada angka 93,59% menjadi 95,65% di tahun 2024. Data pada tahun 2024 menjadi luas area pemukiman layak huni (Ha) yaitu 5751,77 Ha dan Luas area pemukiman keseluruhan (Ha) yaitu 6013,4 menunjukkan rasio 95,65%.

c) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan RLH dihitung dari jumlah seluruh RLH pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah total rumah pada tahun tertentu dikali 100%. Semakin seimbangnnya jumlah RLH dengan jumlah total keseluruhan di suatu wilayah menunjukkan bahwa di wilayah tersebut memiliki akses perumahan yang nyaman dan layak bagi penghuninya, sehingga akan tercipta kebersihan, keteraturan, dan kesehatan.

Tabel 2.20
Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	35.313	37.876	38.967	39.365	39.992
Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	38.075	39.025	42.142	42.403	42.882
PersentaseKetersediaan Rumah Layak Huni	%	92.74	97,06	92,47	92,84	93,26

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dari 100 rumah yang ada, sebanyak 92 rumah merupakan rumah layak huni. Kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2021 angkanya menjadi 97 rumah layak huni per 100 rumah. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang 2020-2021. Namun, di tahun 2024, ketersediaan rumah layak huni mengalami penurunan menjadi 93 rumah per 100 unit rumah.

d) Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Tabel 2,21
Persentase Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	Unit	5.389	5.926	6.468	6.531	6596
Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	Unit	5.726	6.226	6.769	6.831	6894
Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	94,11	95,18	95,55	95,60	95,67

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, dari 100 rumah tangga MBR yang ada, sebanyak 94 rumah tangga MBR telah menempati rumah layak huni. Kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2022 angkanya menjadi 95 rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni per 100 rumah tangga MBR, angka ini terus stagnan sampai tahun 2024. Ini menunjukkan adanya perbaikan rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang 2020-2024. Artinya semakin banyak rumah tangga MBR yang mampu mengakses rumah layak huni. Data pada tahun 2024 Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu yaitu 6596 dan Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu yaitu 6894 menunjukkan presentase 95,67%.

e) Persentase Pemukiman yang Tertata

Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan.

Tabel 2.22
Persentase Pemukiman yang Terjadi di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Luas area permukiman tertata	Ha	5.185	5.186	5.539,15	5633	5751,77
Luas area permukiman keseluruhan	Ha	5.661	5.611	5.811	5904	6013,4
Persentase Pemukiman yang Tertata	%	92.40	92,42	95,32	95,40	95,64

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, persentase luas pemukiman yang tertata di Kota Palopo sudah mencapai 92,40%. Persentase permukiman yang tertata terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2024 mencapai 95,64 persen. Selain persentase, luas area pemukiman yang tertata meningkat dari 4702.47 Ha pada tahun 2019 menjadi 5.751,77 Ha pada tahun 2024. Pertambahan jumlah penduduk serta meningkatnya angka urbanisasi di Kota Palopo mengakibatkan kebutuhan untuk area permukiman semakin bertambah. Perlu pengawasan secara terpadu sehingga permukiman yang dibangun pengembang dapat tertata dengan baik.

f) Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Lingkungan pemukiman kumuh adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukimanyang mengalami kekumuhan.Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan atau lingkungan pemukiman yangtergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat : Tingkat kepadatan kawasan, Kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut.Penilaian tingkat kekumuhan harus terdiri dari kombinasi dari beberapa indikator kumuh yang ada.

Tabel 2.23
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	426,37	303,40	303,40	271.85	261,63
Luas wilayah Kota Palopo	Km^2	247,52	247,52	247,52	247,52	273,23
	Ha	24.752	24.752	24.752	24.752	27.323
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	1,72	1,23	1,23	1,10	0,96

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025
Keterangan : 1 Km^2 = 100 Ha

Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2020 persentase lingkungan permukiman kumuh mencapai 1,72 persen dari luas permukiman kumuh 426,37 Ha. Angka ini terus mengalami penurunan hingga di tahun 2024 mencapai 0,96 persen dari total luas permukiman kumuh mencapai 261,63 Ha. Data tahun 2024, terjadi perubahan luas wilayah Kota Palopo dari awalnya 247,52 km^2 atau 24.752 Ha bertambah menjadi 273,23 km^2 atau 27.323 Ha. Perubahan luas wilayah ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

g) Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Luasan permukiman kumuh dan termasuk suatu kawasan dalam satuan persegi ataupun hektar yang tidak layak huni ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Tabel 2.24
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Palopo Tahun 2020– 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha)	4	4	31,6	0	15,92
Luas pemukiman kumuh (Ha)	85,48	121,92	303,40	271,85	261,63
Persentase luasan pemukiman kumuh tertangani	4,50	3,49	10,42	0	6,08

Sumber : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2024

Data di atas menunjukkan bahwa penanganan permukiman kumuh yang ditangani selama lima tahun terakhir, atau sejak tahun 2020 sebanyak 55,52 hektar atau 21,22 persen dari luas permukiman kumuh. Jika dibandingkan dengan luas pemukiman kumuh secara keseluruhan, yaitu 261,63 hektar. Masih ada kurang lebih 78,78 persen permukiman kumuh yang membutuhkan pananganan dari Pemerintah Kota Palopo.

h) Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Rumah tangga kumuh perkotaan merupakan kondisi permukiman yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, seringkali ditemukan di daerah perkotaan. Karakteritistik rumah tangga kumuh perkotaan antara lain : kondisi fisik yang buruk, kepadatan penduduk yang tinggi, kurangnya akses ke pelayanan dasar, kemiskinan dan pengangguran. Rumah tangga perkotaan dapat menimbulkan masalah social utamanya masalah gangguan kesehatan pagi penghuninya. Selain itu, masalah keselamatan (resiko kebakaran, kejahatan, kecelakaan) serta masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan social dan ekonomi.

Tabel 2.25
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	KK	2.808	2.298	2.356	2413	2587
Jumlah seluruh rumah tangga	KK	40.303	41.220	42.158	42403	57779
Persentase	%	6,97	5,57	5,59	5,69	4,47

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024 dan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan di Kota Palopo mengalami fluktuasi tiap tahunnya, di tahun 2020 jumlah rumah tangga sebanyak 2.808 KK atau sebesar 6,97 % dari total rumah tangga, angka ini terus menurun sampai di tahun 2021 yang mencapai 2.298 KK atau 5,57%. Selanjutnya di tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah rumah tangga kumuh perkotaan menjadi 2.356 KK atau 5,59% hingga di tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi 2.587 atau 4.47% dari total rumah tangga sebanyak 57.779 kk. Meningkatnya jumlah penduduk, khususnya kategori ekonomi menengah ke bawah serta urbanisasi penduduk yang mencari pekerjaan menyebabkan meningkatnya hunian yang tidak layak.

i) Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU

Indikator ini mengGrafik kan keberadaan sarana dan prasarana utilitas umum (PSU) berupa kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin baik kualitas pemukiman masyarakat. Data tahun 2023 pada jumlah rumah tangga kumuh prkotaan menunjukkan angka 2413 dan jumlah seluruh rumah tangga menunjukkan pada angka 42403 menunjukkan presentase pada angkat 5,69%.

Tabel 2.26
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	Kawasan	46	50	69	80	87
Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	Kawasan	164	230	246	251	296
Persentase	%	28.05	21,74	28,04	31,87	29,39

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025

Data di atas menunjukkan bahwa kawasan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana Utilitas Umum (PSU) di Kota Palopo semakin berkurang. Pada tahun 2022 lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU Kota Palopo jumlah menjadi 28,04%, yang artinya bahwa dari 100 lingkungan perumahan yang ada pada tahun 2022, terdapat 69 lingkungan perumahan yang memiliki PSU. Data pada tahun 2023 pada jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu 80 dan jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu yaitu 251 hingga menunjukkan presentase 31,87%.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a) Tingkat Penyeleaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3) dan Penegakan Peraturan Daerah (perda)

Dalam hal pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, setiap unit masyarakat berhak atas rasa aman. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah diamanatkan untuk menegakkan peraturan perundang-

undangan, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Dalam penegakan peraturan daerah, tidak sedikit terjadi pelanggaran, sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	kasus	150	134	114	737	43
Jumlah Pelanggaran K3	kasus	158	134	120	741	43
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	94,93	100	95	99.46	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, 2025.

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018 – 2024, seluruh laporan pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo semuanya diselesaikan walaupun tidak 100%, kecuali pada tahun 2021. Namun sesuai data Satpol PP Kota Palopo, jumlah pelanggaran K3 yang mereka selesaikan jauh lebih banyak dari yang dilaporkan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa meski pelanggaran K3 tersebut tidak dilaporkan, jika ditemukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja juga diselesaikan.
Penegakan perda adalah proses memastikan kepatuhan dan kepastian hukum terhadap perda yang berlaku di daerah. Penegakan perda sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, menjaga ketertiban, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan penegakan perda yang baik, masyarakat dapat merasa aman, nyaman, dan terlindungi oleh aturan yang berlaku.

Tabel 2.28
Persentase Penegakan PERDA Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	150	134	131	105	20
Jumlah pelanggaran PERDA	158	145	137	130	20
Persentase penegakan PERDA (%)	94,93	93,36	95.62	80.76	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, 2025.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa persentase penegakan Perda sampai dengan Tahun 2024 mencapai 100 persen. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ketetapan Peraturan Daerah.

b) Cakupan Perlindungan Masyarakat

Cakupan perlindungan masyarakat di Kota Palopo mencakup berbagai upaya dan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Cakupan ini mencakup perlindungan hokum, perlindungan social dan peran perlindungan masyarakat (Linmas).

Tabel 2.29
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
100 orang Petugas Linmas di kabupaten/kota daerah pemekaran baru	Orang	0,96	0,96	0,96	10,12	10,12
1 wilayah kerja kabupaten/kota	Kelurahan	48	48	48	48	48
Persentase	Persen	2	2	2	21	21

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, 2025.

c) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah luas dan mencakup berbagai aspek untuk melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran. Pelayanan ini penting untuk mencegah, mengurangi risiko, dan merespons bencana kebakaran secara efektif. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencakup semua area yang berpotensi mengalami kebakaran, termasuk sumber daya yang berisiko dan perlu dilindungi dari bahaya kebakaran. Pelayanan ini meliputi kegiatan seperti pemadaman kebakaran, penyelamatan korban, dan pananganan dampak kebakaran.

Tabel 2.30
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	Km²	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Luas wilayah kabupaten/kota	Km²	247,50	247,50	247,50	247,50	273,23

Persentase	%	9,09	9,09	9,09	9,09	8,23

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo Tahun 2022

Angka dalam tabel menunjukkan bahwa cakupan jangkauan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palopo selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2023 hanya mampu memenuhi cakupan sebesar 9,09 persen atau kurang lebih 10 Km². Cakupan pelayanan bencana kebakaran pada tahun 2024 mengalami penurunan persentase, karena dipengaruhi oleh luas wilayah Kota Palopo yang mengalami perubahan dari 247,50 Km² menjadi 273,23 Km². Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan luas wilayah Kota Palopo. Hal ini menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam menjangkau dan memberikan bantuan secara efektif kepada masyarakat yang terdampak kebakaran. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Tingkat waktu tanggap *(response time rate)* daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah rasio antara jumlah kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit. Target waktu kebakaran pada permukiman, bangunan gedung, dan pabrik atau industry adalah tidak lebih dari 60 menit.

Tabel 2.31
Tingkat dan Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat waktu *tanggap (Response Time Rate)* Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	99,86	98,81	100	100	100
Waktu Tanggap *(Respon Time Rate)* Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	menit	6	6	6	6	6

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palapo, 2025.

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK di Kota Palopo mencapai 100 persen sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Sementara Waktu Tanggap Daerah Layanan WMK ditangani dalam waktu 6 menit atau dibawah standar target waktu 60 menit.
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK bisa diukur dengan melihat jumlah kasus kebakaran yang terjadi di Kota Palopo. Data ini penting untuk mengetahui efektivitas pengelolaan kebakaran. Untuk mengetahui jumlah kasus kebakaran di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.32
Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani dan Jumlah Kasus Kebakaran dalam Jangkauan WMK di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	Kasus	105	166	47	73	49
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	Kasus	106	168	47	73	49
Persentase	%	98,13	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo Tahun 2025.

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus kebakaran yang ditangani kurang atau dalam waktu maksimal 15 menit, menurun. Pada tahun 2020, dari 106 kasus kebakaran, sebanyak 105 kasus yang ditangani kurang dalam waktu 15 menit. Tahun 2024, jumlah kasus kebakaran semakin berkurang, sebanyak 49 kasus dan ditangani kurang dari 15 menit sebanyak 49 kasus.

d) Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebencanaan

Cakupan pelayanan kebencanaan mencakup semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, persiapan, tanggap darurat, hingga pemullihan. Ini melibatkan berbagai aspek seperti perencanaan, penanggulangan, dan tindakan pasca bencana. Dalam aspek penanggulangan kebencanaan Kota Palopo menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. IRB Kota Palopo dapat dilihat pada diagram berikut.

Grafik 2.46
Indeks Risiko Bencana Kota Palopo Tahun 2020-2024

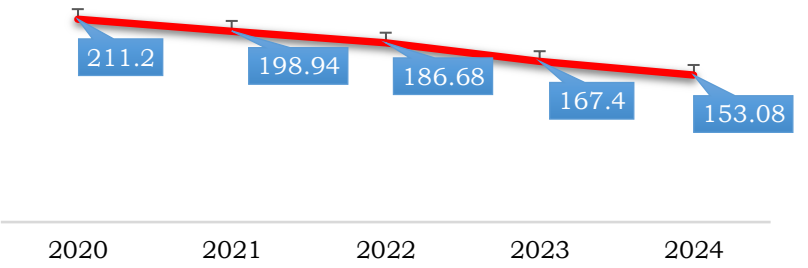

Sumber : https://inarisk.bnpb.go.id/irbi

Data diatas menunjukkan bahwa IRB Kota Palopo Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengindikasikan terjadinya penurunan setiap tahun. Hal tersebut berarti bahwa risiko bencana Kota Palopo rendah yang berarti bahwa memiliki potensi kerugian akibat bencana yang kecil. Ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingkat bahaya yang rendah, tingkat kerentanan yang rendah, dan kapasitas daerah yang tinggi dalam menghadapi bencana. Dengan kata lain, daerah tersebut dianggap memiliki kemampuan yang baik dalam mencegah, mempersiapkan, merespons, dan memulihkan diri dari dampak bencana.

6) Urusan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhana hidupnya (jasmani, rohani dan social) secara memadai dan wajar. Secara umum kondisi PMKS yang meperoleh bantuan sosial di Kota Palopo cenderung mengalami kondisi penurunan sejak 2022 hingga tahun 2024 meskipun pada tahun 2021 terjadi peningkatan.

Grafik 2.47
Jumlah PMKS yang Memperolah Bantuan Sosial dalam 1 Tahun (jiwa)

Sumber : Dinas Sosial Kota Palopo, 2025.

Data di atas menunjukkan besaran PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam satu tahun di Kota Palopo sejak 2020 sampai dengan 2024 meningkat. Jika 2018 sebanyak 59,06% artinya dari 100 orang PMKS, sebanyak 59 orang telah diberikan bantuan sosial, tahun 2022 sebanyak 17.576 orang bisa diberikan bantuan sosial. Data tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 92,54 persen dengan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sebanyak 4.345 orang dari total 4.695 orang PMKS.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah individu, keluarga, kelompok, atau komunitas yang menghadapi berbagai kendala atau tantangan yang menghalangi mereka untuk berfungsi secara sosial secara normal. Kendala ini bisa berupa masalah ekonomi, sosial, psikologis, atau kesehatan yang menyebabkan mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Data PPKS di Kota Palopo dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.33
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Palopo

JENIS PPKS	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Anak Balita Terlantar	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	2

JENIS PPKS	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Anak dengan Disabilitas	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	119
Jumlah Anak Jalanan	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah Anak Terlantar	orang	n/a	n/a	126	126	390
Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum	orang	n/a	n/a	n/a	48	4
Jumlah Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	12
Jumlah Anak yang Menjadi Tindak Kekerasan	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah Bekas warga Binaan Pemasyarakatan	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah Fakir Miskin	orang	n/a	n/a	10.150	n/a	9907
Jumlah Gelandangan dan Gelandangan Psikotik	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah Kelompok Minoritas	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Keluarga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah Korban Bencana Alam	orang	n/a	n/a	n/a	429	3.324
Jumlah Korban Bencana Sosial	orang	n/a	n/a	n/a	48	59
Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	2
Jumlah Korban Tindak Kekerasan	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah Korban Trafficking	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	1
Jumlah Lanjut Usia Terlantar	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	30
Jumlah Pekerja Migran Bermasalah Sosial	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	1
Jumlah Pemulung	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	32
Jumlah Pengemis	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	25
Jumlah Penyandang Disabilitas	orang	990	1109	1104	1104	1102
Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah Tuna Susila	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Sosial Kota Palopo, 2025

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 25 (dua puluh lima) jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Palopo, terdapat didominasi 15 jenis PPKS yang terdiri dari Anak Balita Terlantar, Anak dengan Disabilitas, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Fakir Miskin, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Korban Penyalahgunaan Napza, Korban Trafficking, Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Pemulung, Pengemis, dan Penyandang Disabilitas.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial pada tahun 2020-2024 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.34

SPM Bidang Urusan Sosial

Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar panti	Persentase Warga penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	n/a	n/a	n/a	100	100
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	n/a	n/a	n/a	100	100
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase warga lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	n/a	n/a	n/a	100	100
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Presentase warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	n/a	n/a	n/a	100	100
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Presentase warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	n/a	n/a	n/a	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kota Palopo, 2025

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN NON DASAR

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Grafik 2.48
Angka Sengketa Perusahaan Pekerja Kota Palopo

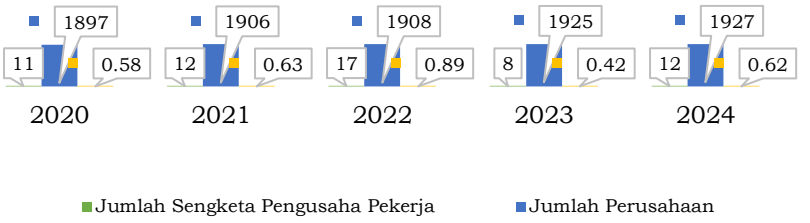

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2025.

Persentase angka sengketa pengusaha dengan pekerja di Kota Palopo dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara umum dibawah 1 persen. Walaupun secara riil terjadi secara fluktuatif, sebagai akibat dari adanya pertambahan jumlah sengketa dan jumlah perusahaan yang bertambah setiap tahun. Persentase sengketa pengusaha pekerja pada tahun 2020 sebesar 0,58 persen dengan jumlah sengketa pengusaha dengan pekerja sebanyak 11 dan jumlah perusahaan sebanyak 1.897 perusahaan. Sedangkan di tahun 2021 dengan jumlah perusahaan yang meningkat menjadi 1.906 perusahaan, kasus sengketa hanya sejumlah 12 kasus sehingga persentase angka sengketa perusahaan dan pekerja meningkat menjadi 0,63 persen. Angka ini terus meningkat di tahun 2022 dimana jumlah perusahaan meningkat walaupun dalam jumlah sedikit menjadi 1.908 perusahaan dan kasus sengketa perusahaan dan pekerja naik sejumlah 17 kasus, sehingga persentase angka sengketa perusahaan dan pekerja menjadi 0,89 persen. Begitu juga tahun 2023 jumlah perusahaan meningkat sangat banyak menjadi 1.925 perusahaan dan kasus sengketa perusahaan dan pekerja turun sejumlah 8 kasus, sehingga persentase angka sengketa perusahaan dan pekerja turun menjadi 0,42 persen dan tahun 2024 kembali naik seiring dengan bertambahhnya jumlah perusahaan sebanyak 1.927 dengan jumlah kasus sebanyak 12 kasus dan persentase angka sengketa pengusaha dan pekerja sebesar 0,62 persen.

Grafik 2.49
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Kota Palopo Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2025.

Tingkat penyelesaian kasus dengan perjanjian bersama di tahun 2020 sebesar 100 persen. Terdapat 11 kasus yang diselesaikan. Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan jumlah penyelesaian kasus. Dari 49 kasus yang dicatat/dilaporkan, yang bisa diselesaikan sebanyak 12 kasus dengan tingkat penyelesaian kasus sebesar 24,50 persen.

Grafik 2.50
Besaran Pencarian Kerja yang Ditempatkan Tahun 2020-2024

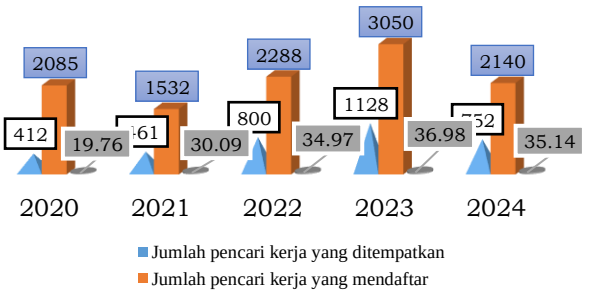

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2025.

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kota Palopo mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama empat tahun terakhir (2020-2023) walaupun mengalami penurunan penempatan pencari kerja pada tahun

2024. Hal tersebut diakibatkan oleh menurunnya jumlah pencari kerja dan terbatasnya lowongan kerja yang tersedia. Menurut data BPS Kota Palopo (2023) jumlah pencari kerja yang terdaftar didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebesar 66,90% dan 33,10% adalah perempuan.

Indikator Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja mengGrafik kan besaran perusahaan yang memperhatikan dan menerapkan prinsip keselamatan dan perlindungan bagi pekerjanya. Semakin tinggi angka indikatornya, maka semakin banyak cakupan tenaga kerja yang dilindungi keselamatan dan keamanan kerjanya.

Grafik 2.51
Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

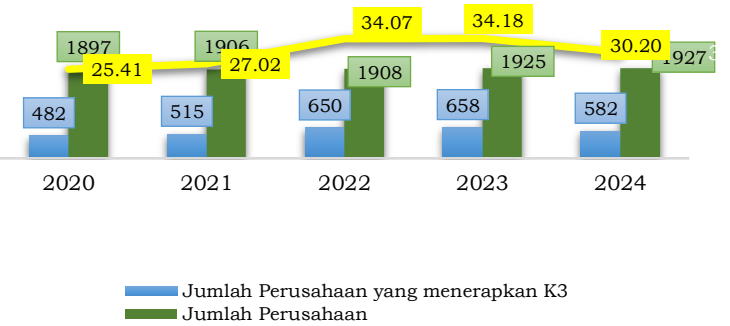

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2025

Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja di Kota Palopo mengalami tren peningkatan sejak tahun 2020-2023. Persentase keselamatan dan perlindungan di tahun 2023 sebesar 34,18%. Kondisi ini mengGrafik kan bahwa pelaku usaha telah konsisten mematuhi dan melaksanakan aturan K3 (kesehatan keselamatan kerja) di lokasi kerjanya. Namun, pada pada tahun 2024 jumlah presentase keselamatan dan perlindungan menurun hingga mencapai angka 30,20. Indikator Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek mengGrafik kan cakupan pekerja yang menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Semakin tinggi nilai indikator, maka semakin banyak jumlah pekerja/buruh yang dijamin jaminan sosial bidang ketenagakerjaannya

.

Grafik 2.52
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek di Kota Palopo Tahun 2020-2024

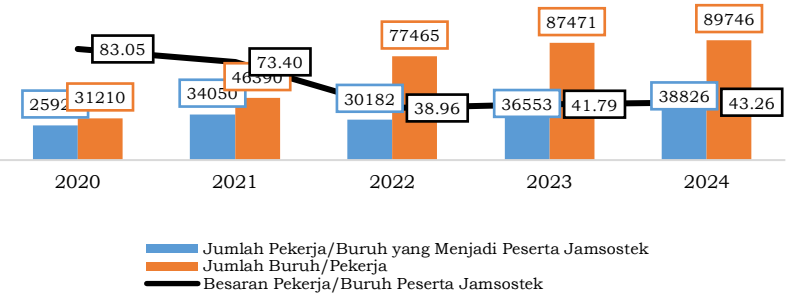

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2025; BPJS Ketenagakerjaan Kota Palopo

Besaran pekerja yang mengikuti kepesertaan jaminan sosial mengalami tren penurunan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2022, kemudian naik turun sampai pada angka 43,26% tahun 2024. Disisi lain jumlah pekerja/buruh di Kota Palopo setiap tahunnya mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Situasi ini menjadi *alarm* pengingat kepada perangkat daerah pengampu untuk terus mensosialisasikan dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi anggota jaminan sosial tenaga kerja.

Indikator perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah mengGrafik kan pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap angka perselisihan buruh dan pengusaha. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin dinamisnya kondisi ketenagakerjaan di daerah.

Indikator Besaran Pemeriksaan Perusahaan yang menunjukkan cakupan perusahaan yang diperiksa dalam menerapkan prinsip prinsip sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin tingginya komitmen pemerintah dan perusahaan memenuhi hak dan kewajibannya bagi para pekerja dan buruh.

Grafik 2.53
Persentase Pemeriksaaan Perusahaan di Kota Palopo Tahun 2020-2024

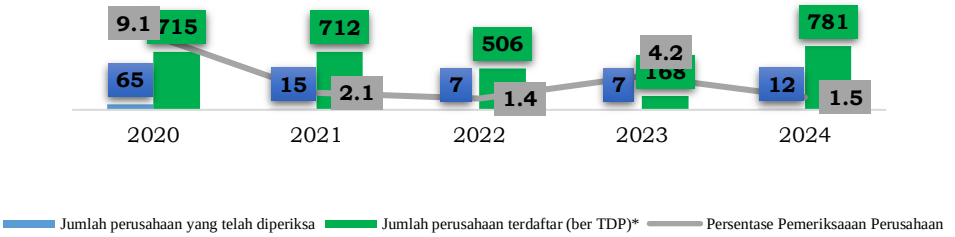

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2025.

Berdasarkan data diatas, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo memiliki kinerja yang rendah sekali dalam melaksanakan pemeriksaan perusahaan yang berTDP. Tahun 2022 hanya 7 (1,38%) perusahaan yang telah dilakukan pemeriksaan, terjadi penurunan yang jauh dari tahun sebelumnya 15 (2,10%) perusahaan. Data perusahaan jumlah perusahaan yang telah diperiksa yaitu 7 dan jumlah perusahaan terdaftar (ber TDP) (*) yaitu 168 dengan hasil persentase 11,76%. Di tahun 2024, jumlah persentase pemeriksaan perusahaan hanya mencapai 1,58 persen. Hanya 12 perusahaan yang telah diperiksa dibandingkan total 781 perusahaan yang terdaftar. Terjadi peningkatan secara signifikan jumlah perusahaan dari angka 168 di tahun 2023, menjadi 781 di tahun 2024. Perlu peningkatan pengawasan bagi perusahaan, utamanya yang baru berkembang di Kota Palopo. Indikator Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan mengGrafik kan besaran perusahaan yang menggunakan peralatan di perusahaannya namun tetap memperhatikan prinsip prinsip keamanan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerjanya. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik bagi keamanan kerja bagi para karyawannya. Indikator Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi memberikan Grafik an proporsi tenaga kerja di Kota Palopo yangmemiliki keterampilan kompetensi kerja setelah medapatkan pelatihan. Umumnya hambatan utama untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja (seperti memiliki lebih banyak tenaga kerja terampil) adalah rendahnya akses ke pendidikan menengah berbasis vokasi, apalagi dengan kondisi Kota Palopo dimana sebagian besar angkatan kerja merupakan lulusan SMA/SMK sederajat. Indikator ini akan berdampak pada tingkat produktifitas tenaga kerja yang ada dalam menghasilkan nilai tambah produk barang atau jasa.

Grafik 2.54
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kota Palopo Tahun 2020-2024

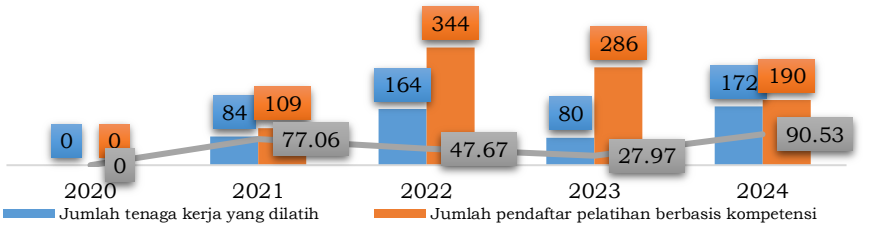

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2025.

Persentase jumlah tenaga kerja pada tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja dilatih mencapai 172 orang dari total 190 orang pendaftar pelatihan atau mencakup 90,53 persen. Indikator Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam skala komunitas dalam pelatihan ketenagakerjaan. Semakin nilai indikator ini, semakin banyak komunitas komunitas tenaga kerja yang siap kerja di sebuah daerah.

Grafik 2.55
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kota Palopo Tahun 2020-2024

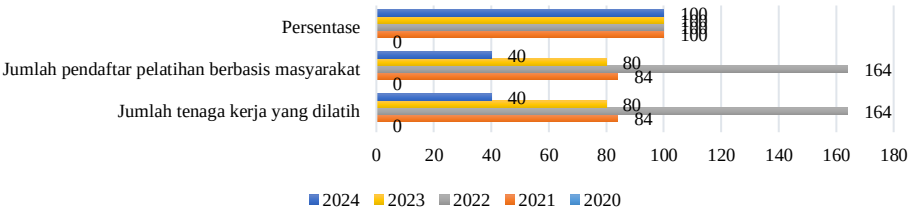

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2024

Dari Grafik di atas terGrafik kan bahwa empat tahun terakhir, pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat dilaksanakan 100 persen dari total pendaftar pelatihan. Di tahun 2020, tidak terlaksana pelatihan dikarenakan kondisi Covid-19. Indikator persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur proporsi tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kewirausahaan. Ini membantu Pemerintah kota Palopo untuk mengevaluasi efektifitas program pelatihan kewirausahaan dan memberikan Grafik an tentang seberapa banyak tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan kewirausahaan.

Grafik 2.56
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kota Palopo Tahun 2020-2024

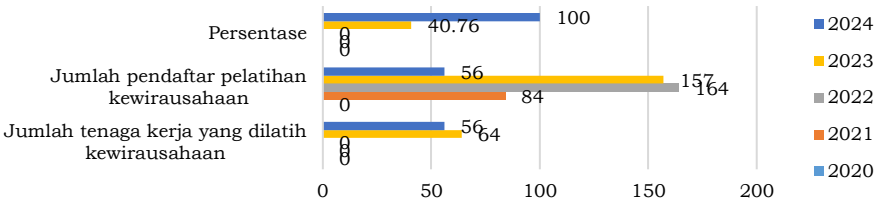

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2025.

Data di atas menunjukkan persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan oleh Dinas Tenaga Kerja tidak terlaksana dalam 3 tahun (2020-2022) sejak Covid-19 yang diakibatkan oleh *refocusing* anggaran sehingga anggaran pelatihan tidak mencukupi untuk pelatihan kewirausahaan. Namun di tahun 2023-2024 telah dilaksanakan pelatihan kewirausahaan dengan kecenderungan mengalami peningkatan. Di tahun 2023 mencapai 40,76 % pelatihan kewirausahaan dan angka ini meningkat di tahun 2024, mencapai 100 %.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pemerintah Daerah Kota Palopo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.35
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	97.32	97.31	97.58	97.61	97.58
Persentase penanganan kasus tindakan KDRT	%	23.76	30.76	11.11	47.91	11.11
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
Persentase organisasi perempuan yang difasilitasi	%	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Persentase Forum Anak yang Difasilitasi	%	6.25	3.22	2.38	2.38	5.55

Sumber : DInas Sosial Kota Palopo, 2025.

Partisipasi perempuan dalam pemerintahan merujuk pada keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan di semua tingkatan pemerintahan. Partisipasi perempuan dalam pemerintahan akan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi secara aktif dan melahirkan inisiatif pembangunan dan memberi ruang untuk mengemukakan kebijakan yang menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat. Partisipasi perempuan yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kota Palopo masih rendah, yaitu dibawah 30 persen. Partisipasi ini mencakup berbagai bentuk, seperti menjadi aparatur sipil negara dan anggota legislatif. Berdasarkan data yang ada, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir atau, tahun parstisipasi tertinggi pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 28 persen, sedangkan partisipasi terendah pada tahun 2024 yaitu sebesar 7 persen.

Grafik 2.57
Partisipasi Perempuan Kota Palopo dalam Pemerintahan Tahun 2020-2024

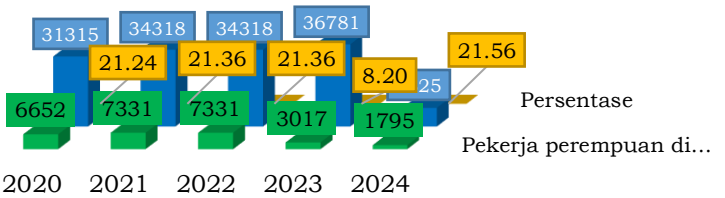

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

Data di atas menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sejak tahun 2020-2022 terus mengalami peningkatan, terakhir di tahun 2022 – 2023 mencapai 7.331 orang. namun di tahun 2023 menurun mencapai 3017 orang, kemudian turun menjadi 1.795 orang pada tahun 2024. Sejalan dengan upaya pemberdayaan perempuan dan pengarutamaan gender, perempuan berhak berpartisipasi dalam dunia politik khususnya keterwakilan dalam legislatif. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, keterwakilan perempuan diatur sebanyak 30% dari total keseluruhan anggota legislatif. Kota Palopo masih belum masuk dalam keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Jumlah keterwakilan perempuan tahun 2020-2023 masih stagnan berada di angka 28% dengan jumlah anggota DPRD perempuan sebanyak 7 orang. Namun di tahun 2024, jumlah perempuan yang menduduki kursi anggota DPRD menurun menjadi 5 orang dibanding total keseluruhan anggota DPRD sebanyak 25 orang dengan persentase hanya mencapai 20%. Lebih jelasnya dilihat pada grafik berikut;

Grafik 2.58
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

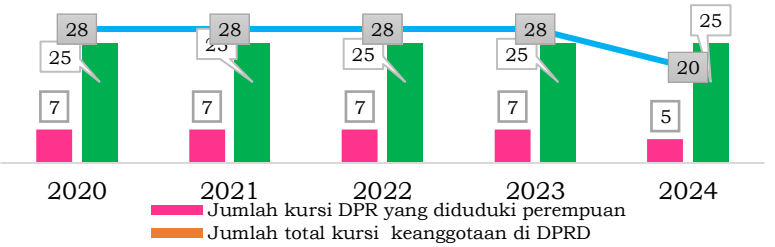

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2025

Partisipasi perempuan di Lembaga swasta merupakan bagian dari menyebarnya paham feminisme dan kesetaraan gender di Indonesia. Perempuan tidak lagi dinomorduakan, tetapi juga bebas berekspresi dan beraktifitas layaknya laki-laki. Persentase partisipasi perempuan sejak tahun 2020 di Kota Palopo mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021. ……..

Grafik 2.59
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

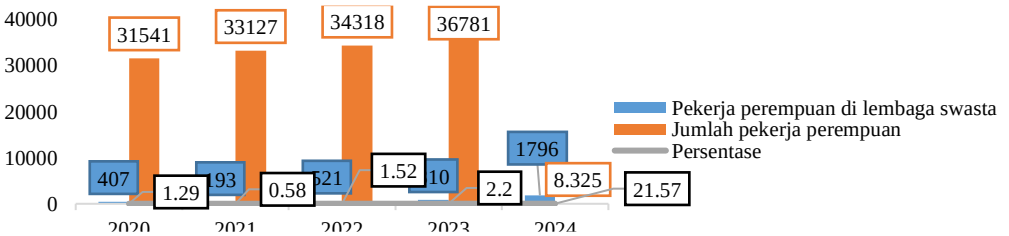

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2025

- **Rasio Kekerasan Dalam RUmah Tangga (KDRT)**

Rasio KDRT adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap total populasi atau terhadap suatu kelompok tertentu dalam periode waktu tertentu. Secara sederhana, ini adalah ukuran seberapa seing KDRT terjadi di suatu tempat atau kelompok.

Grafik 2.60
Rasio KDRT di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

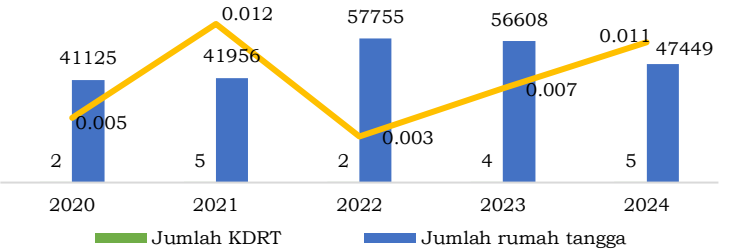

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2025

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020-2024, kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo cenderung menurun atau semakin baik. Rasio KDRT per 10.000 rumah tangga selama kurun waktu lima tahun tersebut mencapai 1 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa program Pemerintah kota Palopo terkait pencegahan KDRT berjalan dengan baik.

- **Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur**

Persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas. Semakin tinggi nilai indikator ini mengindikasikan masih lemahnya perlindungan anak. Anak dianggap masih memiliki nilai ekonomi dan seringkali anak dieksploitasi.

- **Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) Perempuan adalah persentase dari jumlah perempuan yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap total jumlah penduduk perempuan usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas). Dengan kata lain, TPAK Perempuan menunjukkan seberapa besar proporsi perempuan dalam suatu wilayah atau negara yang aktif mencari pekerjaan atau sudah bekerja. Perkembangan TPAK Perempuan Kota Palopo dapat dilihat pada grafik berikut;

Grafik 2.61
Persentase Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

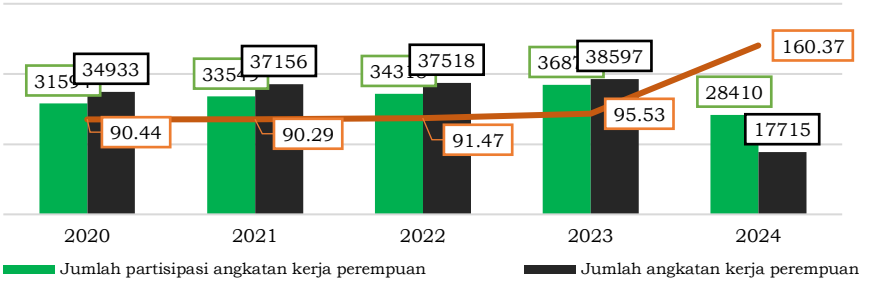

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2025

Dari aspek gender, tabel diatas juga menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sepanjang 2020-2022 di Kota Palopo fluktuatif, dari 90,44 % di tahun 2020 menjadi 89.99% di tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan 91,47%..

- **Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu**

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan terpadu (UPT) adalah indikator kinerja kunci yang mengukur seberapa efektifnya layanan perlindungan perempuan dan anak di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang berhasil mengakses dan menerima penanganan dari petugas terlatih di UPT.

Grafik 2.62
Persentase Laporan/Pengaduan ke Unit Pelayanan Terpadu Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

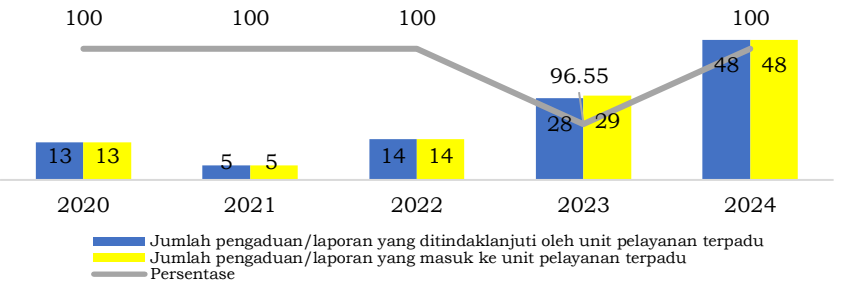

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2025

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat penanganan pengaduan atau laporan kasus perempuan atau anak korban kekerasan di Kota Palopo mengalami peningkatan. Jumlah pengaduan/laporan yang masuk ke UPT PPA jumlah laporan ditindaklanjuti sebanyak 109 adun dan sebanyak 108 aduan yang telah ditindaklanjuti. Hal ini didukung oleh terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)

sehingga pengaduan/laporan kekerasan perempuan dan anak dapat ditangani dengan baik berdasarkan *standar operational procedure.*

- **Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus – Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Cakupan penegakan hokum untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencakup bebrrapa tahap, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Ini termasuk proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan hingga putusan pengadilan. Ini termasuk proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tujuan utama dari penegakan hokum dalam kasus ini adalah untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan dihukum sesuai dengan hokum yang berlaku dan korban mendapatkan keadilan serta pemulihan.

Grafik 2.63
Persentase Penegakan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

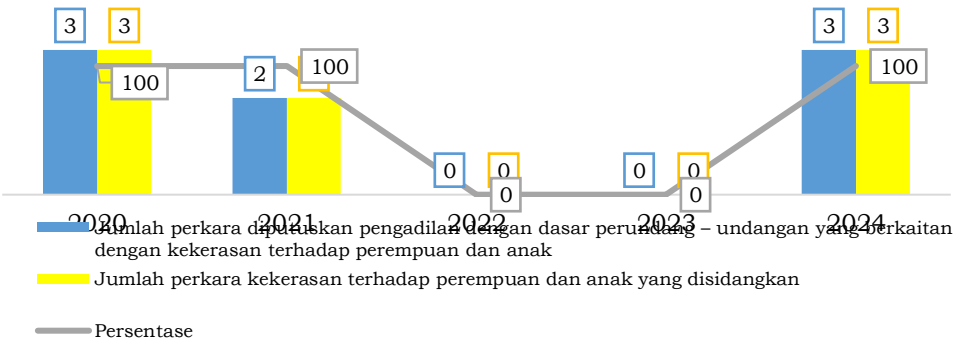

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2025

Perempuan merupakan obyek yang rentan dalam kekerasan, baik yang bersifat domestik maupun berbagai bentuk pelecehan baik *verbal* maupun *non verbal* dalam ruang publik. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam memberikan fasilitisasi terhadap korban kekerasan baik pada anak mupun perempuan.

Grafik 2.64
Persentase Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

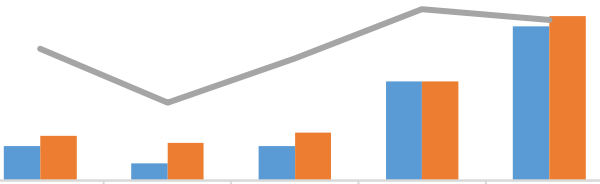

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	10	5	10	29	45
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	13	11	14	29	48
Persentase	76.92	45.45	71.43	100	93.75

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2025

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- **Ketersediaan Pangan Utama**

Ketersediaan pangan utama adalah kondisi dimana jumlah pangan, terutama pangan pokok, tersedia secara mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduk suatu wilayah atau negara. Ketersediaan ini mencakup produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan juga impor jika diperlukan. Ketersediaan pangan utama Kota Palopo

Grafik 2.65
Data Ketersediaan Pangan Utama Kota Palopo Tahun 2020-2024

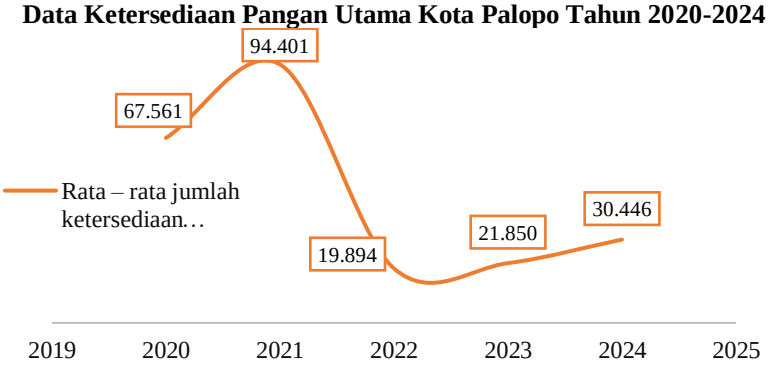

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo, 2025

Dari grafik menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama *(food availability)* di Kota Palopo lima tahun terakhir berfluktuasi. Akan tetapi secara keseluruhan, ketersediaan pangan utama sejak tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

- **Indeks Ketahanan Pangan**

Indeks Ketahanan Pangan Pangan (IKP) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. IKP disusun berdasarkan beberapa indikator yang mencerminkan tiga dimensi utama ketahanan pangan; ketersediaan pangan, akses ketahanan pangan dan pemanfaatan pangan. IKP Kota Palopo seelama lima tahun terakhir (2020-2024) cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan di Kota Palopo. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Palopo mampu menyediakan pangan yang cukup, terjangkau, dana aman bagi penduduk, serta mampu menjaga pasokan pangan tetap stabil selama lima tahun terakhir.

Grafik 2.66
Indeks Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2020-2024

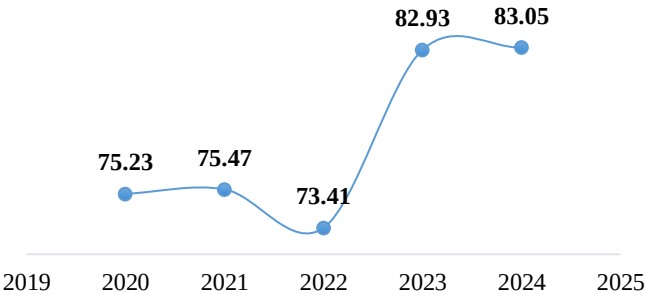

Sumber : satudata.badanpangan.go.id

- **Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan adalah upaya untuk memastikan bahwa makanan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Ini melibatkan berbagai kegiatan mulai dari penetapan standar keamanan, pengawasan di berbagai titik rantai pasokan, hingga edukasi masyarakat tentang cara memilih dan mengolah makanan yang aman.

Grafik 2.67
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Palopo

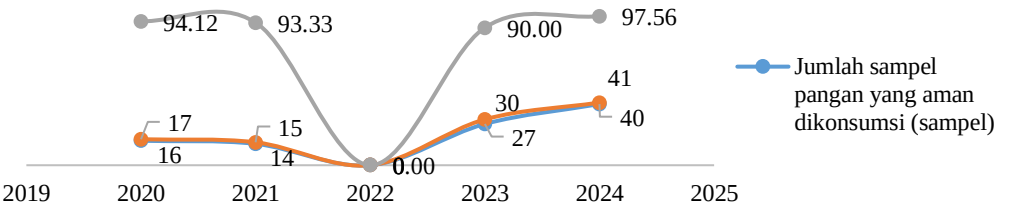

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo, 2025

Dalam pengawasan dan pembinaan pangan, Kota Palopo mengalami penurunan di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dimana persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan tahun 2023 sebesar 90 persen turun sebesar 4,12 persen dari tahun 2020 yang sebesar 94,12 persen. Penurunan ini karena di tahun 2023 menurunnya jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi dibanding jumlah sampel pangan yang diambil. Dimana dari 30 sampel pangan yang diambil hanya 27 sampel pangan yang aman dikonsumsi. Sedangkan di tahun 2021 dari 17 sampel pangan yang diambil, ada 16 sampel pangan yang aman dikonsumsi. Untuk tahun 2022, data yang disajikan tidak ada. Hal ini disebabkan oleh karena Dinas Ketahanan Panngan Kota Palopo tidak melakukan pengambilan sampel.

- **Pola Pangan Harapan**

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi penduduk. Sempat mengalami penurunan skor PPH di tahun 2021, nilainya kembali naik di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Skor PPH tahun 2023 adalah 85,50 yang mendekati nilai 100. Sehingga bisa dikategorikan sangat baik dan terus meningkat di tahun 2024 sebesar 2,3 poin menjadi 87,80.

Grafik 2.68
Pola Pangan Harapan Kota Palopo Tahun 2020-2024

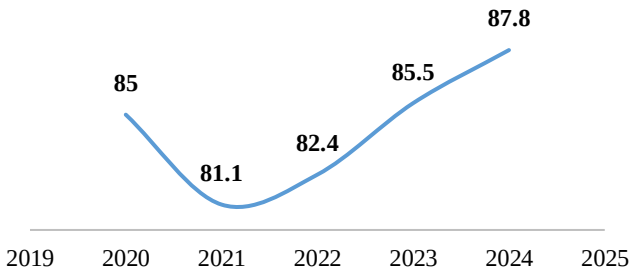

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo, 2025.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan pemerintahan bidang pertanahan meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, pendaftaran tanah, pengukuran dan pemetaan, pengadaan tanah, serta penataan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang.

Grafik 2.69
Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kota Palopo

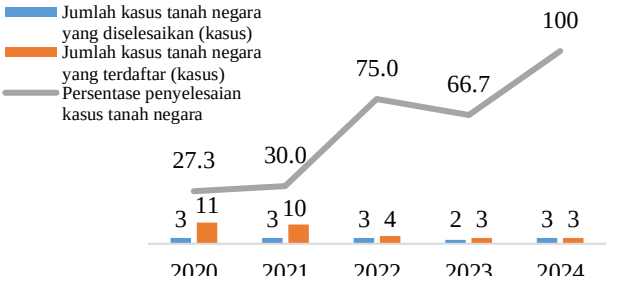

Sumber : Dinas Pertanahan Kota Palopo, 2025

Persentase kasus tanah negara yang diselesaikan sejak tahun 2020 terus mengalami peningkatan dan sampai tahun 2024 sebesar 100 persen.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Indikator aspek Bidang Lingkungan Hidup dengan realisasinya tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut;

- **Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**

RPPLH merupakan instrumen hukum bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH sebagai instrumen perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang

tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Kota Palopo belum mempunyai dokumen RPPLH sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.36
Realisasi Penyusunan RPPLH Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya RPPL	Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2025

- **Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilaksanakan bersamaan pada saat penyusunan suatu Kebijakan Rencana Program (K/R/P) atau setelah (K/R/P) ditetapkan (peninjauan kembali, revisi dan/atau evaluasi terhadap K/R/P yang bersangkutan). Oleh karena itu di Kota Palopo penyusunan tahun 2021 bersamaan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kota Palopo. dan tahun 2023 disusun KLHS bersamaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan berlanjut diselesaikan sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.37
Penyusunan Dokumen KLHS Kota Palopo

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah	Dokumen	Tidak ada	KLHS Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023	Tidak ada	- KLHS RPJPD Kota Palopo Tahun 2025-2045 - KLHS RPJMD Kota Palopo Tahun 2025-2029	- KLHS RPJPD Kota Palopo Tahun 2025-2045 - KLHS RPJMD Kota Palopo Tahun 2025-2029

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2025

- **Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air**

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Indeks Kualitas Air, menegaslkan bahwa indeks Kualitas air merupakan tingkat kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan kualitas air eksisting dengan baku mutu air yang ditetapkan. Menurut metode CCME WQI yang diformulasikan oleh *British Columbia Ministry of Environment, Lands and Parks*, rentang skor adalah sebagai berikut (Kemen LHK, 2020) :

Kategori	Level
- Sangat Baik	95 – 100
- Baik	80 – 94
- Cukup	65 – 79
- Kurang	45 – 64
- Buruk	0 - 44

Kondisi kualitas air Kota Palopo sepanjang tahun 2020 – 2022, berdasarkan hasil pengukuran indeks kualitas air (IKA) berada pada kategori tercemar atau buruk. Nilai IKA diperoleh dengan cara melalui uji laboratorium terhadap sampel air sungai di Kota Palopo. Di tahun 2023 – 2024, indeks kualitas air menujukkan perbaikan berada pada level 53,33 dan kembali turun pada level 50 di tahun 2024 yang masuk dalam kategori KURANG. Artinya kualitas air di Kota Palopo tidak dalam kondisi baik atau tidak memenuhi standar baku mutu. IKA Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut;

Grafik 2.70
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kota Palopo

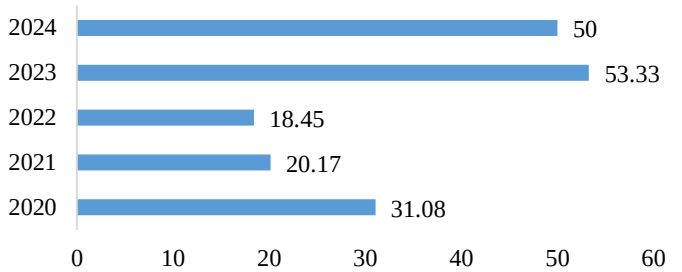

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, 2025.

- **Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara**

Indeks kualitas udara adalah pengukuran konsentrasi polutan udara dalam polusi udara ambien dan resiko kesehatan yang terkait. Indeks kualitas udara atau disebut AQI (air pollution index) diukur melalui parameter enam polutan yaitu PM2.5; PM 10; CarbonO2; SulfurO2; NitrogenO2, dan ozon permukaan tanah. Rentang skor hasil pengukuran AQI berada pada 0-500 (KemenLHK,2020). Kategori penilaian Indeks AQI adalah sebagai berikut:

Kategori	Level
- Good (baik)	0 – 50
- Moderate (sedang)	51 – 100
- Unhealty for sensitive groups (tidak sehat bagi kelompok sensitive)	101 – 150
- Unhealty (tidak sehat)	151 – 200
- Very Unhealty (sangat tidak sehat)	201 – 300
- Hazardous (berbahaya)	300 +

Kualitas udara di Kota Palopo pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung menurun. Berdasarkan hasil AQI di Kota Palopo menunjukkan kategori nilai indeks *moderate* (sedang) yaitu 51-100. Diperlukan upaya yang serius untuk mencapai kategori *good* (baik), salah satunya dengan melalui penghijauan dan pengurangan emisi yang dihasilkan oleh kendaraan melalui kegiatan *car free day* serta pengurangan aktivitas pembakaran sampah agar mendukung kualitas udara yang masuk kategori baik.

Grafik 2.71
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kota Palopo Tahun 2020-2024

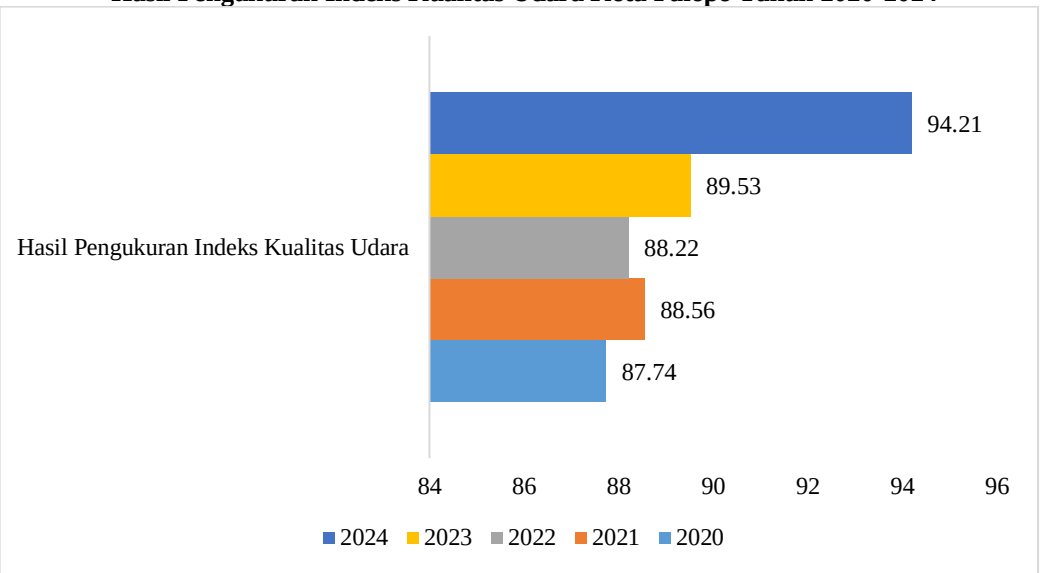

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, 2025.

- **Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan**

Indeks kualitas tutupan lahan merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan yang digunakan sebelum tahun 2017. Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) adalah nilai yang mengGrafik kan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakukan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.

- **Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Penghitungan IKTL dilakukan dengan membanding luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap Provinsi, Kabupaten/Kota minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Dalam perhitungan IKTL ini, bahwa Kota Palopo memiliki kawasan hutan 30,35 % dan 40% dari luas wilayah administrasinya sehingga selama tahun 2021 sampai 2024 nilai IKTL cenderung meningkat.

Grafik 2.72
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Palopo Tahun 2020-2024

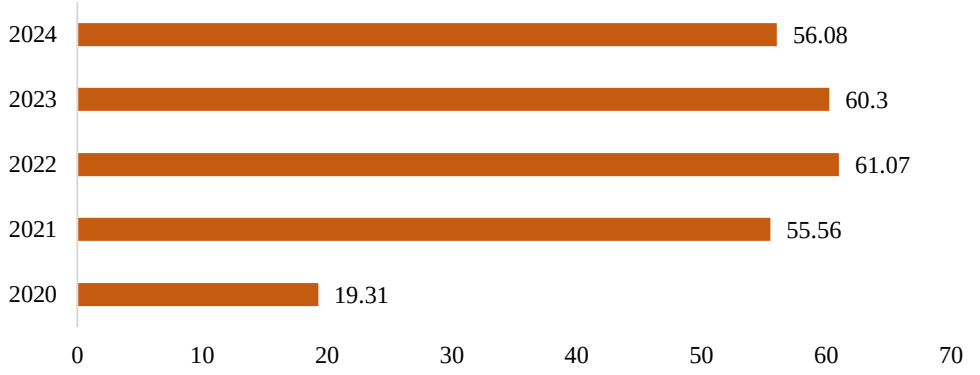

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, 2025.

- **Ketaatan terhadap izin lingkungan**

Ketaatan terhadap izin lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL/UPL dalam rangka sebagai syarat memperoleh izin usaha/kegiatan. Merujuk pada peraturan tersebut, segala usaha/kegiatan yang dilakukan di wilayah pemerintah Kota Palopo wajib memiliki izin lingkungan. Izin yang wajib dimiliki meliputi izin PPLH (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup), dan PUU-LH (peraturan undang-undang lingkungan hidup) yang diterbitkan oleh pemerintah setempat. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU-LH masuk dalam indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup. Selama tahun 2020-2022 ketaatan pelaku usaha di Kota Palopo yang memiliki perizinan terkait lingkungan hidup masih rendah, kurang dari ¼ atau baru mencapai 24,16%.

Tabel 2.38
Persentase Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU-LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo yang ditangani	izin	57	135	106	93	87
Total penanggung jawab usaha dana atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU-LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo	pihak	1315	711	965	105	100
Persentase	persen	4.33	18.99	10.98	88.57	87.00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, 2025.

Persentase ketaatan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU-LH di Kota Palopo tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU-LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo yang ditangani cenderung mengalami penurunan dan total penanggung jawab usaha dana atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo dari 2020-2024 cenderung menurun.

- **Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup**

Pemberian penghargaan lingkungan hidup berkaitan dengan apresiasi pemerintah terhadap individu atau kelompok yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup. Pemberian penghargaan ini diharapakan dapat menjadi sarana dalam menyelesaikan berbagai isu lingkungan hidup. Selama tahun 2020-2024 Kota Palopo baru melaksanakan kegaiatan pemberian penghargaan sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 yaitu penghargaan adiwiyata. Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang mampu menjaga lingkungan sekolahnya bersih, asri dan hijau serta menerapkan sstem daur ulang persampahan sehingga memberikan efek positif terhadap kegiatan pembelajaran bagi guru dan siswa.

Tabel 2.39
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Terlaksanaya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali	Tidak ada	Ada (adiwiyata)	Ada (adiwiyata)	Ada (adiwiyata)	Ada (adiwiyata)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, 2025.

- **Pengaduan Masyarakat Terkait Permasalahan Lingkungan**

Pengaduan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan di Kota Palopo menjadi indicator kinerja utama pada Dinas Lingkungan Hidup. Selama tahun 2018-2022 jumlah permasalahan terkait lingkungan hidup di Kota Palopo mengalami tren penurunan dari 13 kasus laporan menjadi hanya 6 kasus laporan, kemudian secara keseluruhan 100% dapat ditangani oleh perangkat daerah pengampu.

Grafik 2.73
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditangani di Kota Palopo Tahun 2020-2024

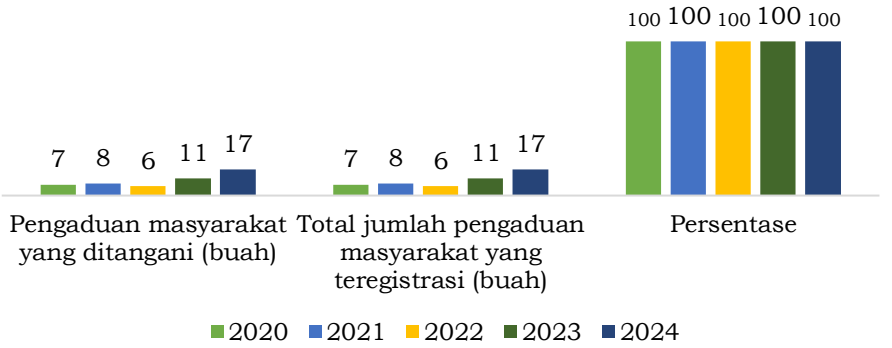

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2024

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 – 2024, seluruh pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup telah tertangani dengan baik 100 persen.

- **Timbunan Sampah yang Ditangani**

Sampah merupakan bagian dari limbah domestic yang dihasilkan oleh rumah tangga. Semakin banyak aktivitas manusia dan kegiatan usaha disuatu wilayah berdampak kepada peningkatan jumlah limbah domestik yang dihasilkan, apabila tidak dilakukan penanganan akan menimbulkan timbunan sampah. Kota Palopo juga mengalami permasalahan tersebut, selama tahun 2020-2024 jumlah timbunan sampah cenderung berfluktuasi namun masih berada di kisaran 30.000 ton. Di tahun 2023 jumlah timbulan sampah terbesar yaitu 34.833,23 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang masih berada di angka 33.215 ton. Kinerja perangkat daerah terkait belum memberikan hasil yang terbaik, selama tahun 2020-2024 terjadi penurunan penanganan dari 88,63% menjadi 78,28% di tahun 2024.

Grafik 2.74
Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani di Kota Palopo Tahun 2020-2024

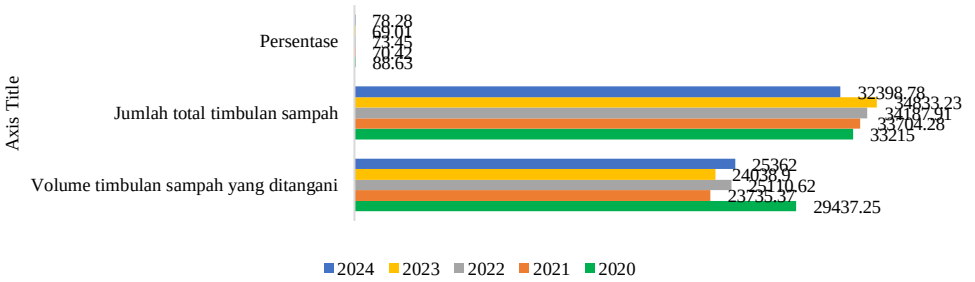

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2025

Kendala yang dialami dalam penanganan timbulan sampah adalah kurangnya armada pengangkutan sampah. Penambahan armada pengangkutan sampah melalui pengadaan truk sampah dan penyewaan mobil untuk pengangkut sampah menjadi salah satu faktor pendukung penanganan timbulan sampah di Kota Palopo. Selain itu perlu upaya yang lebih massif penanganan timbulan sampah dengan menggunakan berbagai metode, mulai dari pengurangan di sumber, pengelolaan yang terpadu, hingga pemanfaatan teknologi dan inovasi seperti pengolahan sampah menjadi RDF *(refuse-derived fuel)* atau biogas juga dapat membantu.

- **Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R**

Salah satu program penanganan sampah perkotaan melalui program *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) adalah sebuah program yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, serta mengurangi dampak lingkungan yang negatif akibat sampah. Program 3 R dilaksanakan dengan tujuan untuk :

Mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, Mengurangi dampak lingkungan yang negatif akibat timbulan sampah. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dengan baik.

Grafik 2.75
Persentase Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kota Palopo Tahun 2020-2024

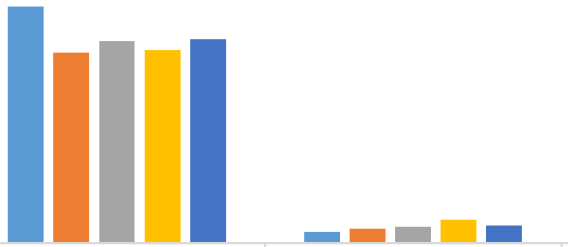

	Jumlah Timbulan Sampah yang ditangani (ton)	Jumlah yang tertangani di TPS 3R setara (ton)	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R
2020	29437.25	1401	4.76
2021	23735.37	1762.37	7.43
2022	25110.62	2024	8.06
2023	24038.9	2880.35	11.98
2024	25362	2172	8.56

2020 2021 2022 2023 2024

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2025

Persentase jumlah sampah yang tertangani menggunakan konsep 3R menjadi salah satu indicator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup. Selama tahun 2020-2023 terjadi perubahan yang dimana persentase sampah yang tertangani melalui TPS 3R mengalami peningkatan dari 4,76 % menjadi 11,98 %, namun di tahun 2024, mengalami penurunan kembali menjadi 8,56%. Beberapa TPS3R yang tidak berfungsi menjadi faktor terjadinya penurunan tersebut, namun di tahun 2025 sudah dipersiapkan pembangunan TPS 3R yang baru di Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Selatan.

- **Persentase Cakupan Area Pelayanan**

Penanganan sampah tidak hanya berskala individu rumah tangga tetapi berskala keseluruhan wilayah sesuai batas wilayah yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Kota Palopo memiliki luas wilayah 273,23 km². Cakupan area layanan tahun 2020-2024 sebesar 201,56 km². Selama tahun 2020-2021 persentase cakupan area layanan yang tertangani mengalami peningkatan dari menjadi 81,43%. Terjadi penurunan persentase cakupan area layanan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh karena terjadinya perubahan luas wilayah Kota Palopo dari 247, km² menjadi 273,23 km² berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Grafik 2.76
Persentase Cakupan Area Pelayanan di Kota Palopo Tahun 2020-2024

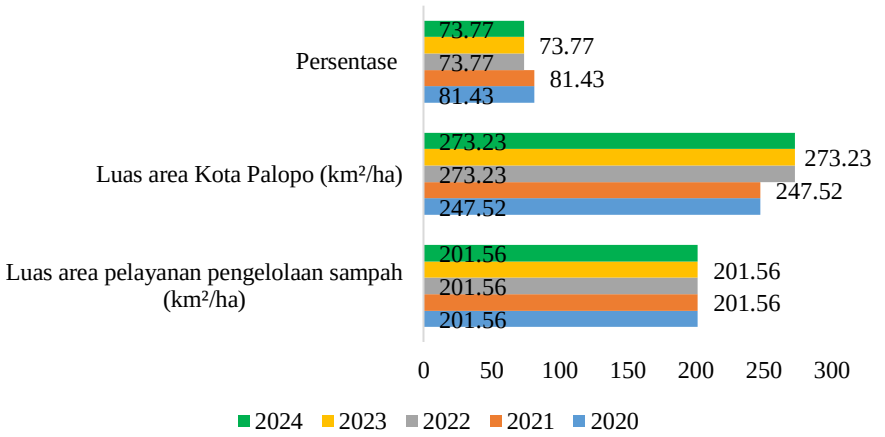

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2025

- **Jumlah Sampah Tertangani**

Jumlah sampah yang tertangani merupakan indikator yang menyajikan jumlah sampah yang dihasilkan Kota Palopo dalam periode waktu satu tahun. Total sampah yang dihasilkan setiap tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata 34.789,63 ton/tahun. Jumlah sampah yang tertangani mengalami peningkatan setiap tahun. Jumlah sampah yang tertangani pada tahun 2018 sebesar 18.487,25 ton dan meningkat sebanyak 25.362 ton pada tahun 2024, dengan persentase penanganan pada tahun 2024 sebesar 78.28 persen. Di sisi lain jumlah timbulan sampah di Kota Palopo cenderung menurun selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Jumlah timbulan sampah pada tahun 2020 sebesar 38.823,96 ton dan pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan kapasitas timbulan sebesar 32.398,9 ton.

Grafik 2.77
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Palopo Tahun 2020-2024

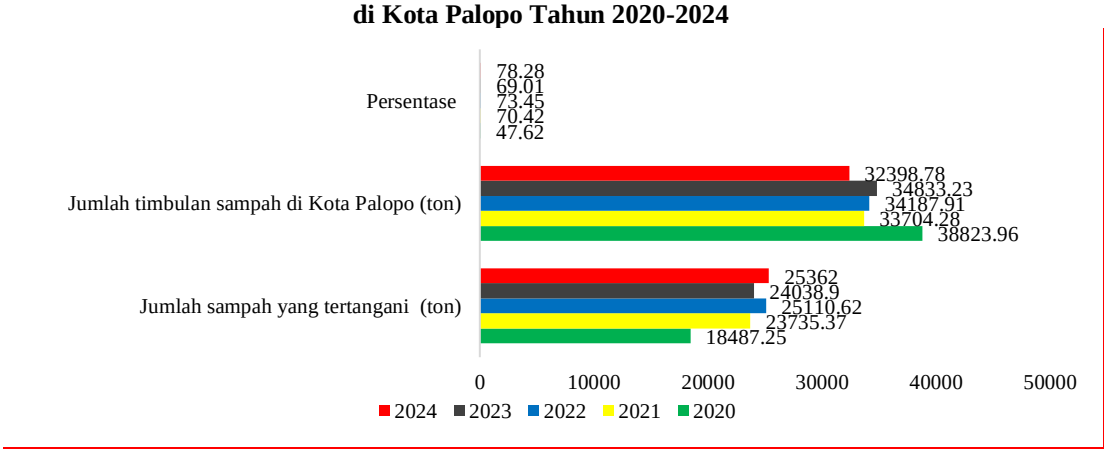

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2025

- **Fasilitasi Pengurangan Sampah di Perkotaan**

Fasilitasi pengurangan sampah adalah bagian dari sarana infrastruktur pendukung pengelolaan limbah domestik tingkat kabupaten/kota dalam mengurangi jumlah produksi sampah. Fasilitasi pengurangan sampah tersebut memberikan dampak terhadap volume sampah yang masuk dalam TPA (tempat pembuangan akhir).

Grafik 2.78
Fasilitasi pengurangan sampah di perkotaan di Kota Palopo Tahun 2020-2024

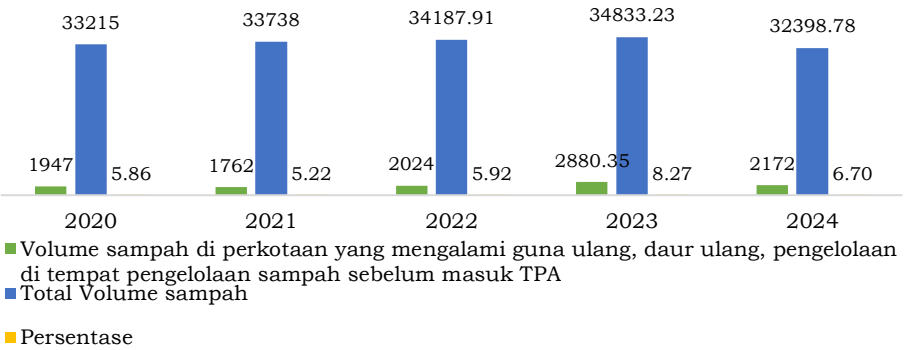

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2025

Selama tahun 2020-2024 persentase fasilitasi pengurangan sampah mengalami peningkatan dari 5,86 persen menjadi 6,70 persen di tahun 2024, namun di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 6.70 persen, dengan total sampah yang dihasilkan oleh Kota Palopo setiap tahunnya rata-rata 26.707,94ton / tahun.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Bidang kependudukan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu indicator utama pada bidang urusan ini adalah kepemilikan identitas kependudukan. Berdasarkan undang-undang kependudukan Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Negara berkewajiban memberikan dokumen identitas kependudukan bagi warga negaranya. Kartu tanda penduduk (KTP) adalah produk dari dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan KTP adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Grafik 2.79
Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk di Kota Palopo Tahun 2020-2024

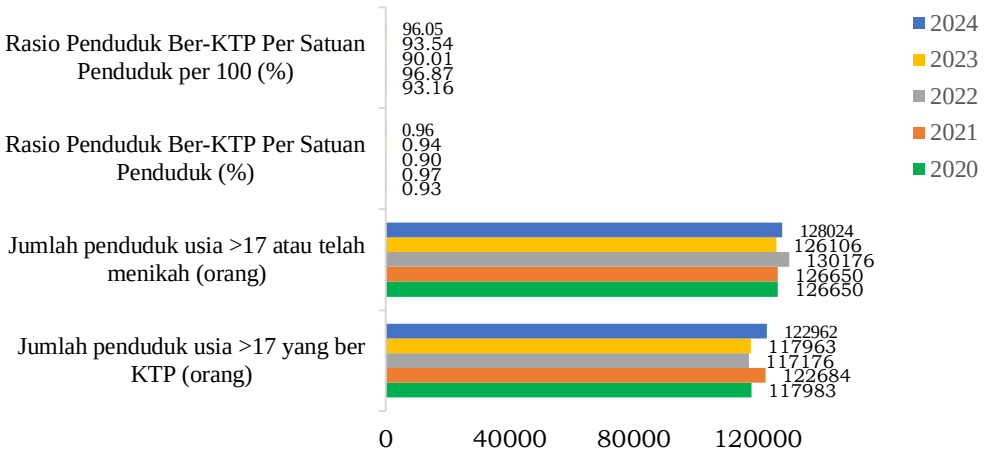

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, 2025.

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Palopo yang berusia >17 tahun meningkat di tahun 2021 dan belum terdata di tahun 2023, penduduk yang telah menikah terus meningkat hingga tahun 2022, dan rasio penduduk Be-KTP per satuan penduduk per 100 terus mengalami peningkatan hingga tahuun 2024. Selama tahun 2020-2024 rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk per 100 cenderung mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan selama lima tahun tersebut Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk per 100 (%)mengalami peningkatan sampai dengan 96.05 persen pada tahun 2024 dari 93,16 pada tahun 2020.

- **Rasio Bayi Berakte Kelahiran**
  Akta kelahiran merupakan dokumen yang menunjukkan bukti pencatatan kelahiran yang sah dikeluarkan oleh Negara yang didalamnya memuat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama pasangan orang tua. Kepemilikan akta kelahiran digunakan sebagai bukti asal-usul kelahiran individu tersebut, yang dapat digunakan sebagai dokumen resmi pendaftran sekolah dan lainnya sesuai kebutuhan, serta yang lebih penting adalah terkait urusan kewarisan.

Grafik 2.80
Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Palopo Tahun 2020-2024

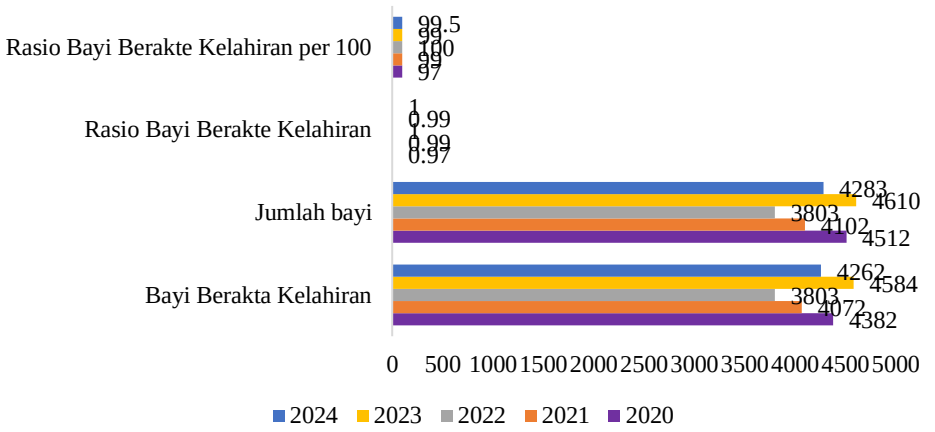

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2025

Capaian indikator utama ini adalah rasio bayi berakte kelahiran. Hasil capaian di Kota Palopo telah berhasil mencapai 100% atau dengan kata lain setiap 100 kelahiran bayi semuanya telah memiliki dan terbit akta lahir. Angka capaian 100%, dicapai pada tahun 2022. Di Tahun 2024, rasio bayi berakte kelahiran menurun menjadi 99,5 yang menandakan masih terdapat 0,5 persen bayi lahir di tahun 2024 yang belum memiliki akte kelahiran.

- **Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi**

Database kependudukan adalah bagian dari SIAK (Sistem informasi administrasi kependudukan) yang didalamnya terintegrasi secara **nasional** dalam pemberian identitas melalui NIK (nomor induk kependudukan). Hasi capaian Kota Palopo terkait ketersediaan database kependudukan skala provinsi selama tahun 2020-2024 adalah tersedia.

Tabel 2.40
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota
di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, 2025.

Pada indikator **ketersediaan** Database Kependudukan skala di Kota Palopo sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 sudah tersedia. Indikator ini memudahkan siapa saja yang ingin mengakses tentang Kota Palopo sehingga tiap tahunnya indikator ini sudah tersaji.

- **Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**
  Kartu tanda penduduk berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) adalah bagian dari perubahan undang-undang administrasi kependudukan yang mengharuskan satu individu hanya memiliki satu NIK. Pemberian NIK telah terintegrasi dengan sistem database nasional melalui aplikasi SIAK. Kota Palopo telah menerapkan KTP nasional berbasis NIK sejak tahun 2018.

Tabel 2.41
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota PalopoTahun 2025

Indikator Penerapan KTP nasional Berbasis NIK sudah dilakukan sejak tahun 2018 hingga tahun 2024. Penerapan KTP berbasis NIK bertujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan publik yang cepat, mudah dan terintegrasi di Kota Palopo.

- **Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**
  Cakupan penerbitan KTP adalah indikator kerja utama capaian pada bidang urusan kependudukan. Indikator ini diukur melalui jumlah penduduk wajib KTP dengan Jumlah KTP yang telah diterbitkan. Hasil capaian Kota Palopo selama tahun 2020-2024 adalah lebih dari 96 % jumlah penduduk telah memiliki KTP.

Grafik 2.81
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
di Kota Palopo Tahun 2020-2024

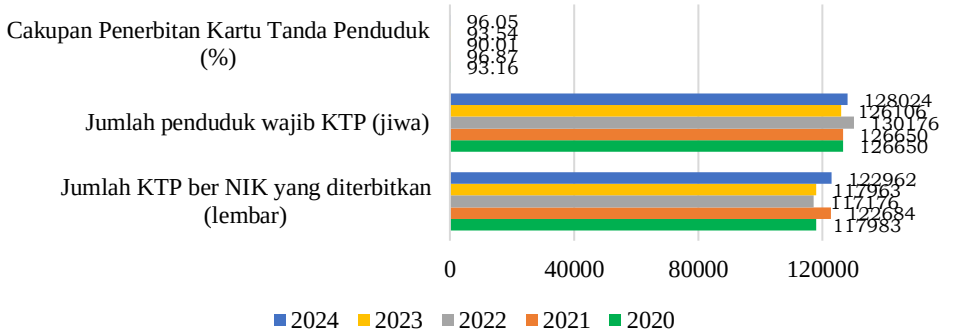

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2025

Cakupan penerbitan KTP mengalami penurunan di tahun 2022. Tahun 2022 cakupan penerbitan KTP sebanyak 90.01 persen. Jumlah ini mengalami kenaikan di tahun 2022 dengan jumlah cakupan penerbitan KTP sebesar 93,54 persen dan tahun 2024 cakupan penerbitan KTP menjadi 96,05 persen.

- **Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**
  Cakupan indicator ini sama dengan KTP yang membedakan adalah penerima manfaatnya yaitu bayi yang baru lahir. Data ini **bersumber** dari Dinas kesehatan, dan selama tahun 2018-2022 jumlah kelahiran bayi mengalami peningkatan. Walaupun demikian meningkatnya jumlah kelahiran bayi didukung oleh kepemilikan akta lahir, sehingga hasil capaian menunjukkan angka yang tinggi yaitu 100% pada tahun 2022.

Grafik 2.82

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo Tahun 2025

Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun 2024 mengalami penurunan yaitu 1592 orang dibandingkan dengan total kelahiran sebanyak 1756 orang atau mencakup 95,78 persen. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk pengfurusan akte kelahiran, beberapa masyarakat mengurus akte kelahiran anak ketika anak sudah memasuki usia sekolah.

- **Rasio Ketergantungan**

  Rasio ketergantungan **adalah** perbandingan jumlah penduduk berumur 0 hingga 14 tahun dan penduduk berusia 65 tahun ke atas, dibandingka dengan jumlah penduduk umur 15 hingga 64 tahun. Menurut BPS, rasio ini digunakan untuk mengukur beban ketergantungan penduduk yang tidak produktif terhadap penduduk yang produktif. Rasio ketergantungan dapat dihitung dengan rumus : [(penduduk 0-14 + penduduk 65+)/penduduk 15-64].

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- **Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik**

Tabel 2.42

Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kantor pemerintahan kelurahan yang baik	48	48	48	48	48
Jumlah seluruh pemerintahan Kelurahan	48	48	48	48	48
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo Tahun 2025

Data di atas menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2024 tidak ada lagi kantor kelurahan di wilayah Kota Palopo yang kondisinya kurang baik.

- **Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

Tabel 2.43

Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)di Kota Palopo Tahun 2020 –2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kelompok binaan LPM	Kelompok	48	48	48	48	48
Jumlah LPM	Kelompok	48	48	48	48	48
Rata-rata	Kelompok	1	1	1	1	1

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo Tahun 2023

Data di atas menunjukkan bahwa tiap kelurahan di Kota Palopo rata-rata memiliki 1 lembaga pemberdayaan masyarakat. Jumlah LPM ini tidak mengalami pertambahan selama 5 tahun.

- **Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK**

  Data di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017, 1 PKK di Kota Palopo membina sebanyak 2-3 kelompok binaan. Kelompok binaan PKK ini antara lain adalah Dasawisma dan BKMT di tingkat kelurahan.

Tabel 2.44

Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	145	145	145	145	145
Jumlah PKK	Unit	58	58	58	58	58
Rata-rata	Persen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo Tahun 2025

Dari data diatas menunjukkan dari tahun 2020-2024 bahwa di Kota Palopo memiliki 2 kelompok PKK masyarakat. Jumlah ini bertambah selama 5 (lima) tahun.

- **Persentase LSM Aktif**

Tabel 2.45
Persentase LSM Aktif di Kota Palopo Tahun 2020 - 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah LSM aktif	Buah	3	1	n/a	n/a	99
Jumlah LSM Keseluruhan	Buah	38	1	n/a	n/a	360
Persentase	%	7,89	100	n/a	n/a	27,5

Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo Tahun 2025

Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Jumlah LSM di Kta Palopo mengalami peingkatan. LSM yang terdata pada tahun 2024 sebanyak 360 dan yang aktif sebanyak 99 atau sebesar 27,5 persen.

- **Persentase LPM Berprestasi**

Tabel 2.46
Persentase LPM Berprestasidi Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Sat	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah LPM berprestasi	Buah	2	2	2	2	2
Jumlah LPM	Buah	48	48	48	48	48
Persentase	%	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo Tahun 2025

Sesuai data dari Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Setda Kota Palopo, pada tahun 2024 hanya 4,17% atau 2 LPM di Kota Palopo yang berprestasi. Jumlah relatif masih sedikit dibanding jumlah seluruh LPM yang ada di Kota Palopo.

- **Persentase PKK Aktif**

Tabel 2.47
Persentase PKK Aktif di Kota Palopo Tahun 2020 - 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PKK aktif	Unit	58	58	58	58	58
Jumlah PKK	Unit	58	58	58	58	58
Persentaase	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo Tahun 2025

Sesuai data Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palopo, dari 58 PKK yang ada di Kota Palopo terdiri dari 9 PKK Kecamatan dan 48 PKK Kelurahan

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- **Persentase Posyandu Aktif**

Posyandu (pos pelayanan terpadu) merupakan program pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Pelayanan Posyandu antara lain: 1) Pelayanan kesehatan ibu: Posyandu menyediakan pelayanan kesehatan ibu, seperti pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan pemeriksaan kesehatan ibu; 2) Pelayanan kesehatan anak: Posyandu menyediakan pelayanan kesehatan anak, seperti pemeriksaan kesehatan anak, imunisasi, dan pemberian vitamin; 3) Pelayanan gizi: Posyandu menyediakan pelayanan gizi, seperti pemberian makanan tambahan dan penyuluhan gizi; dan 4) Pelayanan keluarga berencana: Posyandu menyediakan pelayanan keluarga berencana, seperti pemberian kontrasepsi dan penyuluhan keluarga berencana.

Grafik 2.83
Persentase Posyandu Aktif di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

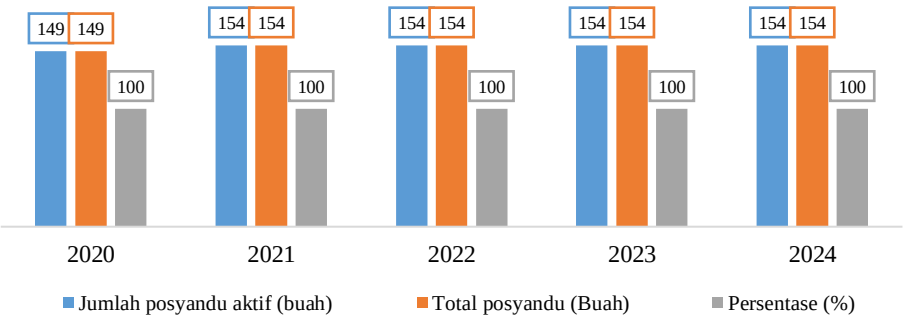

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2025

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020-2024, Posyandu di Kota Palopo 100% berfungsi aktif melakukan pembinaan kesehatan masyarakat. Selain itu, data di atas juga menunjukkan bahwa terjadi penambahan Posyandu yang aktif dari 149 unit di tahun 2020 menjadi 154 di tahun 2024.

- **Laju Pertumbuhan Penduduk**

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan data yang disajikan BPS Kota Palopo, terdapat dua jenis penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang relevan untuk Kota Palopo: Laju Pertumbuhan Penduduk *Year-on-Year* (Y-o-Y) dan Laju Pertumbuhan Penduduk berdasarkan Tahun Dasar.

- **Pertumbuhan Penduduk Y-o-Y (%)**

Grafik 2.84
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Palopo Y-o-Y Tahun 2020-2024

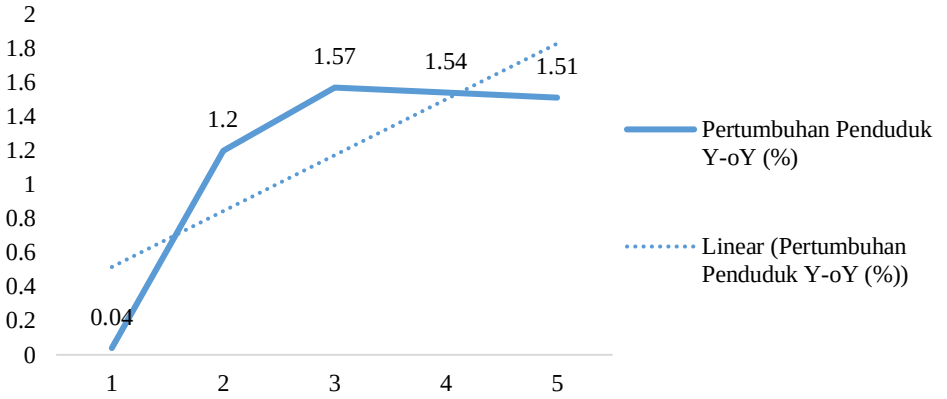

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

- Data pertumbuhan penduduk Y-o-Y Kota Palopo menunjukkan tren yang bervariasi dalam lima tahun terakhir. Laju pertumbuhan pada tahun 2020 sangat rendah, hanya 0,04%. Angka ini bisa mengindikasikan stagnasi atau bahkan sedikit penurunan populasi jika tidak dibulatkan secara presisi, atau mungkin dampak dari faktor-faktor tertentu seperti pandemi COVID-19 yang memengaruhi mobilitas dan pendataan penduduk. Tahun 2021, terjadi lonjakan signifikan menjadi 1,20%. Ini menunjukkan pemulihan atau percepatan pertumbuhan setelah tahun 2020. Tahun 2022 mengindikasikan pertumbuhan sedikit meningkat menjadi 1,57%. Sedangkan laju pertumbuhan pada tahun 2023 sedikit menurun menjadi 1,54%, pada tahun 2024 kembali terjadi sedikit penurunan menjadi 1,51%. Secara umum, setelah lonjakan di tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk Y-o-Y Kota Palopo menunjukkan tren stabil namun sedikit menurun dari tahun 2022 hingga 2024, berada di kisaran 1,5%. Meskipun demikian, angka ini masih tergolong positif, menandakan adanya penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya.

- **Pertumbuhan Penduduk Tahun Dasar 2010 (2020) dan 2020 (2021-2024)**
  Penghitungan ini memberikan gambaran laju pertumbuhan penduduk Kota Palopo dalam konteks perbandingan dengan tingkat nasional (Indonesia) dan provinsi (Sulawesi Selatan), serta kota-kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan (Pare-pare dan Makassar).

Grafik 2.85
Pertumbuhan Penduduk Tahun Dasar 2010 (2020) dan 2020 (2021-2024)

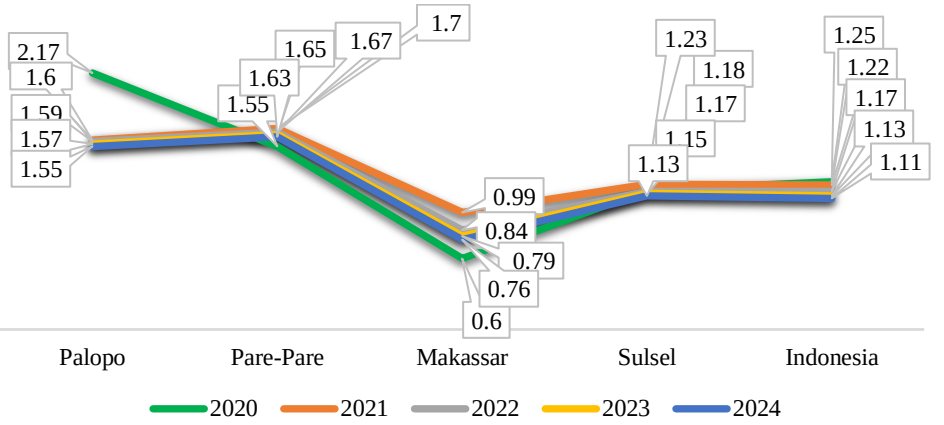

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

Berdasarkan data pada grafik diatas menunjukkan bahwa Tahun 2020 Kota Palopo mencatat laju pertumbuhan yang sangat tinggi, yaitu 2,17%. Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional (1,25%) dan Sulawesi Selatan (1,18%). Hal ini mengindikasikan Palopo mengalami pertumbuhan populasi yang sangat pesat pada tahun tersebut dibandingkan dengan wilayah lain. Tahun 2021: Laju pertumbuhan sedikit menurun menjadi 1,60%. Meskipun terjadi penurunan, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan Indonesia (1,22%) dan Sulawesi Selatan (1,23%). Namun, mulai terlihat bahwa Pare-pare (1,70%) menyalip Palopo dalam hal laju pertumbuhan. Tahun 2022: Laju pertumbuhan Palopo kembali sedikit menurun menjadi 1,59%. Angka ini masih di atas rata-rata nasional (1,17%) dan Sulawesi Selatan (1,17%). Pare-pare (1,67%) tetap menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Tahun 2023 Palopo mencatat laju pertumbuhan sebesar 1,57%, masih di atas rata-rata nasional (1,13%) dan Sulawesi Selatan (1,15%). Pare-pare (1,65%) tetap unggul, dan Tahun 2024 Laju pertumbuhan Palopo sedikit menurun lagi menjadi 1,55%. Angka ini tetap lebih tinggi dari Indonesia (1,11%) dan Sulawesi Selatan (1,13%). Pare-pare (1,63%) masih menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi, sementara Makassar (0,76%) memiliki laju pertumbuhan yang jauh lebih rendah.

- **Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 Aspek**
  Indikator ini menunjukkan tersedianya dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada pemerintah daerah. Dokumen ini berupa *grand desain* pada level Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualiats hidup masyarakat.

Tabel 2.48
Dokumen Rancangan Induk Pengendaian Penduduk Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, 2025

Dokumen Rancangan Induk Pengendaian Penduduk (RIPP) Kota Palopo memuat tentang analisis situasi penduduk Kota Palopo, struktur demografi dan tingkat pertumbuhan penduduk. Analisa terhadap proyeksi penduduk, serta strategi Pemerintah Kota Palopo dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas hidup serta mengoptimalkan sumberdaya manusia yang dimiliki.

- **Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB**
  Kampung KB merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana (KB), meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat terutama dalam hal kesehatan, Pendidikan dan ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut, peran aktif dalam pengembangan kampung KB tidak hanya dapat dilakukan oleh Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DPPKB) melainkan juga dibutuhkan partisipasi perangkat daerah lain yang memiliki kesesuaian program dan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan lokasi prioritas prioritas yang telah ditetapkan sebagai Kampung KB. Selama tahun 2020-2024 persentase perangkat daerah mengalami peningkatan dari awalnya 19 menjadi 30 perangkat daerah

Tabel 2.49
Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif dalam Kampung KB	19	28	22	18	30
Jumlah Perangkat Daerah	49	49	49	49	49
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	38.78	57.14	44.90	36.73	61.22

Sumber ; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2025

- **Angka pemakaian kontrasepsi / cpr bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun**
  Pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur (PUS) digunakan untuk mengatur jumlah anak yang diinginkan, mencegah kehamilan yang tidak terencana, meningkatkan kesempatan Pendidikan dan ekonomi bagi PUS, juga dapat mengurangi resiko penyakit menular seksual serta dapat mengurangi beban ekonomi sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup. Capaian indikator pemakaian kontrasepsi bagi PUS mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus berfluktuatif.

Grafik 2,86
Angka pemakaian kontrasepsi /cpr bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun di Kota Palopo Tahun 2020-2024

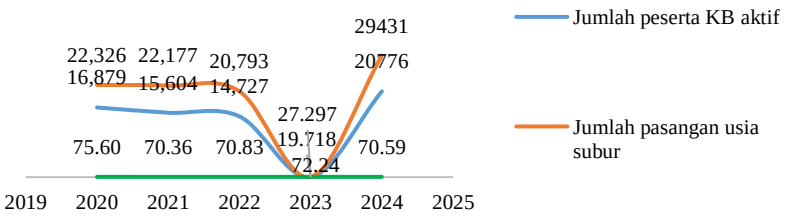

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo Tahun 2025

Jika data di atas dibandingkan angka pemakaian kontrasepsi /cpr bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, maka indiaktor tersebut mengalami penurunan dari angka 72, 24% di tahun 2023, dan menurun di angka 70,59% di tahun 2024. Namun, perlu diperhatikan bahwa jumlah peserta KB Aktif juga mengalami peningkatan di tahun 2024 sebanyak 20.776 orang tetapi jumlah Pasangan Usia Subur juga meningkat sebanyak 29.431. kurangnya pengetahuan, dukungan bagi perempuan atau pasangan dalam penggunaan alat kontrasepsi yang tepat dengan resiko kesehatan yang minim menjadi salah satu factor masih belum optimalnya penggunaan alat kontrasepsi bagi PUS.

- **Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi *(unmet need)***
  Unmet Need merupakan istilah yang digunakan dalam bidang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana (KB) untuk menggambarkan kebutuhan akan kontrasepsi atau layanan kesehatan reproduksi yang tidak terpenuhi. Indikator ini merupakan persentase pasangan usia subur (PUS) yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak memakai alat kontrasepsi. Indiaktor Unmet Need merupakan indiaktor kinerja utama pada bidang kependudukan dan pengendalian penduduk. Hasil capaian Kota Palopo mengalami penurunan PUS yang tidak terlayani KB.

Grafik 2.87
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi *(Unmet Need)* Di Kota Palopo Tahun 2020-2024

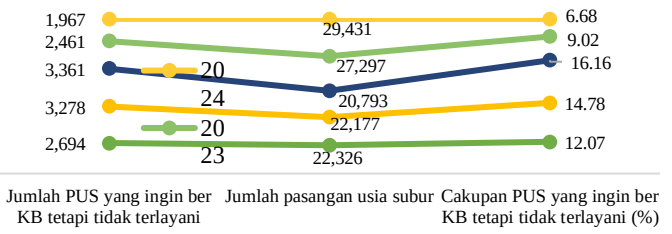

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Tahun 2025

Rata-rata cakupan PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani *(Unmet Need)* di Kota Palopo terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir, kecuali di tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 16,16 persen, namun selanjutnya terus mengalami penurunan. Di tahun 2024 jumlah PUS yang tidak terlayani menurun 494 pasangan yang tidak terlayani KB dengan total cakupan 6,68 persen dibandingkan dengan cakupan di Tahun 2023 sebesar 9,02 %. Peran Dinas Pengendalian penduduk dan KB sangat dalam memberikan informasi dan layanan Keluarga Berencana yang tepat sesuai pasangan usia subur butuhkan.

- **Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**

Metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) merupaka metode kontrasepsi yang dapat dihgunakan untuk jangka waktu yang lama, biasanya lebih dari 1 tahun. MKJP sangat efektif dalam pengendalian penduduk karena dapat mengontrol pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu yang lama. Metode ini pula dapat mengurangi resiko kematian ibu dan anak karena dapat mengindari kehamilan yang tidak terencana dan tidak aman. semakin banyak akseptor KB yang mengikuti program MKJP maka akan memberikan dampak positif bagi pengendalian penduduk di Kota Palopo.

Grafik 2.88
Persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)
Kota Palopo Tahun 2020-2024

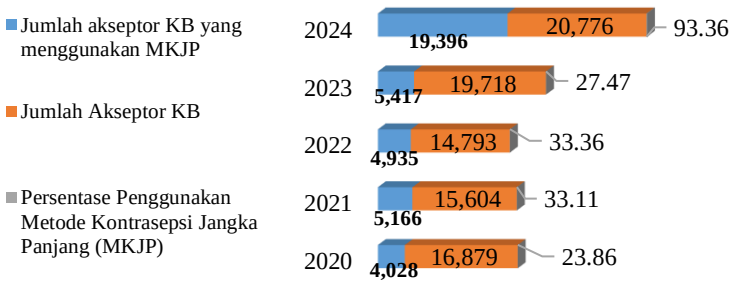

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Tahun 2025

Dari tabel di atas tergambarkan fluktuasi persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) dari tahun 2020 sampai 2024. Cakupan MKJP sebesar 23,86 persen dan mengalami naik turun hingga di tahun 2024 persentase MKJP meningkat tajam mencapai 93,6 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas pasangan usia subur dalam memilih metode kontrasepsi yang aman dalam jangka panjang untuk mengurangi resiko kehamilan tidak terencana.

- **Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi**

Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan indikator yang mengukur penggunaan jenis metode kontrasepsi yang sama dalam periode tertentu secara konsisten dan sesuai dengan instruksi indikator ini menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pengendalian penduduk adalah dengan melihat persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi. Hasil capaian Kota Palopo menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan, terjadi penurunan signifikan dari 38,44% di tahun 2023 menjadi 25,33% di tahun 2024.

Grafik 2.89
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
Di Kota Palopo Tahun 2020-2024

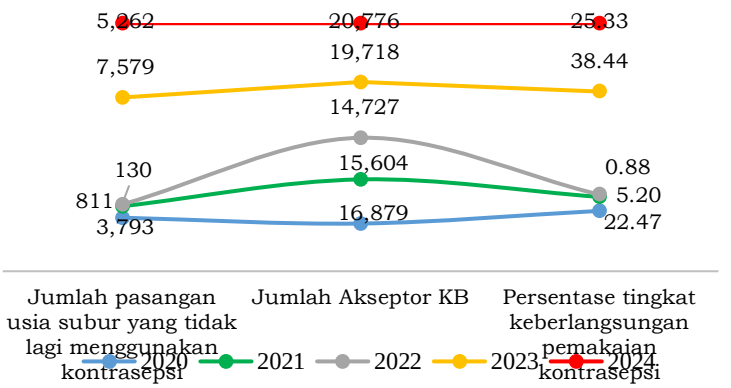

Sumber ; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, tahun 2025

Dari tabel di atas, tergambarkan bahwa persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 22,47 persen dan capaian terendah pada tahun 2024 sebesar 25,33 persen. Perlu perhatian ekstra dari Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kota Palopo untuk meningkatkan capaian indikator ini, dikarenakan keberlangsungan pemakaian kontrasepsi yang tinggi dapat membantu mencegah kehamilan yang tidak terencana, mengurangi resiko kematian ibu dan anak serta meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

- **Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB**
  Bina keluarga balita (BKB) merupakan program yang dirancang untuk membantu keluarga dalam merawat dan mengembangkan anak usia balita (0-5 tahun) agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan berakhlak baik. Anggota Bina keluarga balita (BKB) adalah orang-orang yang terlibat dalam program BKB yang terdiri dari : orang tua balita, Kader BKB, Petugas Kesehatan, Tenaga pendidik, Tokoh masyarakat dan relawan. Anggota BKB berperan dalam memberikan edukasi kepada orang tua balita dan masyarakat di lingkungannya tentang pentingnya perawatan dan pengembangan anak balita. Selain itu, anggota BKB juga tetap memberikan edukasi terkait program KB.

Tabel 2.50
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB
Di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Jumlah Anggota kelompok BKB yang ber KB	1,27	1147	746	543	749
Jumlah anggota Kelompok BKB	1.722	1,546	921	543	1294
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB (%)	22,47	74,19	80,99	60,53%	57,88

Sumber ; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Tahun 2025

- **Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB**
  Bina keluarga remaja (BKR) merupakan program yang dirancang untuk membantu keluarga dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang dialami oleh remaja (10-19 tahun). Program BKR ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup remaja dan membantu mereka menjadi inidividu yang sehat, cerdas dan berakhlak baik. Kader BKR merupakan orang yang dipilih dan dilatih untuk membantu orang tua dan remaja dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Kader BKR juga bertugas untuk mengawasi perkembangan remaja dan memberikan umpan balik kepada orang tua termasuk juga penyuluhan terkait program KB. Kader BKR telah berhasil mendorong anggotanya untuk melaksanakan program dengan hasil capaian di angka 63,03% pada tahun 2023, turun dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.51
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber KB
Di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Jumlah Anggota kelompok BKR yang ber KB	1,066	905	672	1875	420
Jumlah anggota Kelompok BKR	1,818	1,26	1,066	1066	922
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB (%)	58,63	71,82	63,03	75,89%	45,55

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Tahun 2024

- **Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber KB**
  Bina Keluarga Lansia (BKL) merupakan suatu program yang membantu keluarga dalam merawat dan mengembangkan lansia (usia 60 tahun ke atas) agar menjadi lansia yang sehat, mandiri dan berkualitas hidup yang baik. Anggota BKL merupakan orang-orang yang dipilih dan dilatih untuk membantu keluarga dalam merawat dan mengembangkan lansia. Dalam pelaksanaan tugasnya, kader BKL juga tetap konsisten ber KB dan mempromosikan program keluarga di masyarakat.

Tabel 2.52
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB
Di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Anggota kelompok BKL yang ber KB	613	709	52	106	153
Jumlah anggota Kelompok BKL	1,276	1,165	664	792	794
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB (%)	48.04	60.86	7.83	13.38	19.27

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Tahun 2025

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) mengalami penurunan, jika dibandingkan data tahun 2021 mencapai 60,86% atau sebanyak 709 orang anggota BKL yang ber KB, namun di tahun 2024 hanya mencapai 19,27% atau 153 orang anggota BKL yang ber KB.

- **Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan**
  Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) merupakan lembaga yang menyediakan berbagai layanan informasi (komunikasi, informasi dan edukasi) untuk mendukung kesejahteraan keluarga terutama dalam bidang kesehatanb, Pendidikan dan social. Hasil capaian PPKS selama kuran waktu 2020 – 2022 hanya 1 kecamatan yang memiliki PPKS. Sejak tahun 2023, PPKS sudah tersedia di 9 kecamatan di Kota Palopo.

Tabel 2.53
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan
Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PPKS	1	1	1	9	9
Jumlah kecamatan	9	9	9	9	9
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	11.11	11.11	11.11	100.00	100.00

Sumber ; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Tahun 2025

Data tabel di atas menggambarkan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, 2023-2024 sudah tersedia PPKS di 9 kecamatan.

- **Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di setiap Kecamatan**
  Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah fasilitas yang didirikan di tingkat kecamatan untuk memberikan berbagai layanan dan dukungan kepada keluarga, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. PPKS beroperasi sebagai wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, berfokus pada pelayanan keluarga melalui komunikasi, informasi, edukasi (KIE), konsultasi, konseling, pembinaan, dan rujukan.

Tabel 2.54
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtara di setiap Kecamatan

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PIK R/M (buah)	68	68	68	68	66
Jumlah kecamatan	9	9	9	9	9
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	755.56	755.56	755.56	755.56	733.33

- **Cakupan PKB / PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk.**
  Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) merupakan penyuluh yang ditugaskan untuk menyebarluaskan informasi dan melakukan pendampingan kepada masyarakat tentang program Keluarga Berencana (KB).

Tabel 2.55
- **Cakupan PKB / PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun 2020-2024**

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PKB / PLKB yang didayagunakan	63	57	57	49	45
Jumlah PKB / PLKB	63	57	57	49	45
Cakupan PKB / PLKB yang didayagunakan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Tahun 2024

Tabel di atas menggambarkan cakupan PKB / PLKB yang didayagunakan mecapai 100%, namun melihat jumlah Penyuluh KB / penyuluh lapangan KB terus mengalami penurunan, dari awalnya di tahun 2020 sebanyak 63 orang, hingga di tahun 2024 hanya sebanyak 45 orang.

- **Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri.**

Tabel 2.56
Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber KB mandiri	218	194	48	48	48
Jumlah Anggota Kelompok UPPKS	952	822	n/a	8184	686
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri (%)	22.90	23.60	n/a	0.59	7.00

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Tahun 2024

Dari tabel di atas, tergambarkan bahwa cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB mandiri tertinggi pada tahun 2021 sebesar 23,96%, sementara cakupan terendah pada tahun 2023 sebesar 0,59%. Dari tabel di atas juga terlihat bahwa jumlah anggota kelompok UPPKS ditahun 2024 juga menurun drastis yaitu sebanyak 686 orang, dibandingkan di tahun sebelumnya, di tahun 2023 sebanyak 8.184 orang

- **Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan**
  Petugas pembantu KB Desa / Kelurahan merupakan orang-orang yang tunjuk oleh Pemerintah Kelurahan untuk membantu pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di tingkat kelurahan.

Tabel 2.57
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa / Kelurahan (PPKBD) Setiap Desa / Kelurahan Di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa / Kelurahan	48	48	48	48	48
Jumlah Kelurahan	48	48	48	48	48
Rasio petugas pembantu Pembina KB Desa / Kelurahan (PPKBD) setiap Desa / Kelurahan (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah pembantu Pembina KB Desa / Kelurahan dari Tahun 2020 – 2024 terus tetap di angka 48. Dengan jumlah 48 kelurahan, yang artinya tiap 1 orang PPKBD bertugas membina 1 kelurahan.

- **Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak**

Tabel, 2.58
Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	1.722	1.546	921	921	1294
Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	1.722	1.546	921	16.753	10290
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	100.00	100.00	100.00	5.50	12.58

Sumber ; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Tahun 2024

Tabel di atas tergambar Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir (2023 dan 2024). Di tahun 2023, cakupan hanya mencapai 5,50 % dan ditahun 2024 mencapai 12,58%.

- **Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD.**
  Pembiayaan program kependudukan dan keluarga berencana selain bersumber dari APBD dapat juga berasal dari DAK Fisik dan Non Fisik yang berasal dari pemerintah pusat. Hasil capaian indikator ini diukur dari Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD yang sudah diperuntukkan penggunaannya. Untuk tahun anggaran 2023 – 2024 menggunakan DAK Non Fisik Tematik Stunting.

Tabel 2.59
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	2.441.839.000	3.210.274.000	5.727.928.250	4.035.896.000	12.837.976.000	10.178.464.000
Jumlah APBD dan APBDes	5.909.076.000	5.189.110.000	1.001.572.261.730	12.374.263.000	n/a	n/a
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	41,32	61,86	0.57	32.61	n/a	n/a

Sumber ; Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2024

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- **Jumlah Uji KIR Angkutan Umum**

Tabel 2.60
Jumlah uji KIR angkutan umum Kota Palopo

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Uji KIR angkutan umum (Unit)	2.602	251	180	167	3265

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2025

Data Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2020-2024 memperlihatkan jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)mengalami penurunan yang signifikan. Namun, di tahun 2024 jumlah Uji KIR meningkat signifikan yaitu sebanyak 3.265.

- Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Kota Palopo tidak memiliki Pelabuhan Udara, akan tetapi memiliki Pelabuhan Laut dan Terminal Bus. Terminal Bus di Kota Palopo akan megalami penambahan 1 unit yang memiliki Type A yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan yang terletak di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, yang masih dalam proses pengerjaan yang dibiaya oleh kemernterian Perhubungan. Terminal Bus merupakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akan sarana transportasi di kota Palopo, mengingat kota Palopo merupakan kota yang akan padat penduduk ditahun tahun mendatang. Adapun jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bus dari tahun sebelumnnya tidak mengalami perubahan dari 2022.

Tabel 2.61
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pelabuhan laut	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah terminal bis	Unit	1	1	1	1	1

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2025

Data dari Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kota Palopo Tahun 2020–2024 memperlihatkan jumlah pelabuhan laut 1 unit dan jumlah terminal bis 1 unit dari tahun 2020-2024.

- **Persentase Layanan Angkutan Darat**
Indikator yangmenunjukkan seberapa besar kemampuan layanan angkutan tranportasi darat yang tersedia untuk memenuhi atau mencover kebutuhan transportasi darat atau penumpang yang ada. Semakin tinggi angka indikator ini, semakin tinggi kemampuan layanan angkutan darat di Kota Palopo.

Tabel 2.62
Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah angkutan darat	Unit	3.479	3.396	198.900	164569	56587

Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	573.160	969.316	2.301.320	1982192	872745
Persentase	Persen	6.07%	0.35%	0.09%	8.30%	6.48%
Per 10.000 Penumpang		606.99	35.04	8.64	830.24	648.38

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2025

Data Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 angka tertinggi jumlah angkutan darat di tahun 2022 yaitu 198.900 unit, sedangkan jumlah penumpang angkutan darat tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 2.301.320 orang. Pada Tahun 2024, jumlah angkutan darat mengalami penurunan signifikan yaitu sebanyak 56.587 unit dengan jumlah penumpang sebanyak 872.745 orang. Makin meningkatnya jumlah masyarakat yang beralih ke mode transportasi online dan kendaraan pribadi (khususnya roda 2) mengakibatkan angkutan umum semakin jarang di gunakan. Angkutan umum yang bertahan dan berkembang di Palopo, umumnya angkutan antar kota dalam provinsi (Makassar) dan lintas provinsi.

- **Pemasangan Rambu – Rambu Lalu Lintas**

  Rambu lalu lintas adalah tanda atau simbol yang digunakan untuk mengatur dan mengarahkan lalu lintas di jalan. Rambu ini berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah,informasi dan petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu lalu lintas punya banyak jenis yang punya kegunaan atau fungsi masing-masing. Namun secara umum, rambu lalu lintas berfungsi untuk mengatur jalannya lalu lintas agar tertib dan teratur, meningkatkan keselamatan, mengurangi resiko terjadinya kecelakaan serta membantu pengemudi dalam bernavigasi.

  Rambu-rambu ini juga berguna untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk untuk pemakai jalan, baik pejalan kaki atau pengendara. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014. Secara umum, ada 4 jenis rambu lalu lintas, yaitu: Rambu Peringatan, Rambu Larangan, Rambu Perintah, dan Rambu Petunjuk.

Tabel 2.63

Persentase Pemasangan Rambu - Rambu di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pemasangan rambu – rambu pada tahun n	Buah	293	21	14	27	11
Jumlah rambu – rambu yang seharusnya tersedia	Buah	518	618	100	100	90
Persentase	%	56.56	3.40	14.00	27.00	12.22

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2025

Pemasangan rambu lalu lintas di Wilayah Kota Palopo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2020 persentase pemasangan rambu-rambu hanya sekitar 56,56% dibandingkan dengan tahun 2024 sekitar 12,12%. Hal ini disebabkan karena pengurangan perhitungan rambu-rambu yang harus tersedia di jalan, dari angka 618 buah di tahun 2020, menurun menjadi 90 buah di tahun 2024.

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

- Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

  Komunikasi adalah proses atau tindakan menyampaikan pesan *(message)* dari pengirim *(sender)* ke penerima *(receiver)*, melalui suatu medium(channel) yang biasa mengalami gangguan *(noise)*. Dalam definisi ini, komunikasi haruslah bersifat *intentional* (disengaja) serta membawa perubahan. Bahwa sesuai dengan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika yang terdapat pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Adapun persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan Kota Palopo tidak mengalami perubahan dari tahun tahun sebelumnya.

Tabel 2.64

Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah KIM	Kelompok	34	32	35	48	48
Jumlah kecamatan yang ada dalam Kota Palopo	Kecamatan	9	9	9	9	9
Persentase	%	26,47	28,13	25,71	18,75	18,75

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun 2025

- **Cakupan Layanan Telekomunikasi**

Jasa telekomunikasi adalah layanan Telekomunikasi untuk memenuhi keperluan bertelekomunikasi dengan menggunakan Jaringan Telekomunikasi. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan Jasa Telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi. Cakupan layanan telekomunikasi di wilayah Kota Palopo di tahun 2021 mengalami kenaikan sekitar 90 % dari tiga tahun sebelumnya. Keterbatasan data yang dimiliki perangkat daerah pengampu membuat hasil capaian pada tahun 2022 belum tersedia.

Tabel 2.65
Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Luas wilayah yang tercoverage signal 4G (km2)	Km²	222,47	222,47	223,48	225,49	232,50
Luas wilayah keseluruhan	Km²	252,99	247,52	247,52	247,52	247,52
Persentase		87,94	89,88	90,29	91,10	93,93

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun 2025

Dari tabel cakupan layanan telekomunikasi di Kota Palopo tahun 2020-2024 terdata luas wilayah yang tercoverage cenderung meningkat dan wilayah keseluruhan terus meningkat dari 87,94 persen pada tahun 2020 dan mencapai 93,93 persen pada tahun 2024.

- **Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet**
  Internet merupakan sebuah sistem komunikasi yang mampu menghubungkan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Berbagai jenis komputer dengan spesifikasi yang berbeda-beda dapat saling berkomuikasi melalui internet. Beberapa bentuk jaringan yang berbeda-beda dapat saling bertukar informasi dan data melalui internet menggunakan seperangkat aturan yang disebut *transmission control protocol* (TCP) dan sambungan *Internet Protocol* (IP). Akses internet adalah jalan masuk untuk bisa terhubung atau terkoneksi dengan jaringan komputer. Adapun Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kota Palopo mengalami kenaikan di tahun 2021 dari tiga tahun sebelumnya. Keterbatasan data yang dimiliki perangkat daerah pengampu membuat hasil capaian pada tahun 2022 belum tersedia.

Tabel 2.66
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	25.12	35.43	25.82	27.49	28.70
Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet (KK)	9,910	14,534	14,912	15,315	16,454
Jumlah rumah tangga (KK)	39,444	41,023	57,755	55,713	57,326

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun 2025

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 sebesar 25.12 persen dan pada tahun 2024 mencapai 28.70 persen dengan jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet sebanyak 16,454 rumah tangga.

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- **Persentase Koperasi Aktif**
  Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi merupakan model yang tepat untuk mengurangi kemiskinan, karena keanggotaan terbuka, usaha dilakukan secara bersama untuk memenuhi kepentingan bersama, dan pembagian keuntungan didasarkan pada transaksi anggota dengan koperasi

Tabel 2.67
Presentase Koperasi Aktif di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi Aktif	Unit	69	77	76	74	75
Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	292	296	298	294	295
Jumlah Koperasi Aktif	%	23.63	26.01	25.50	25.17	25.42

Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM Kota Palopo Tahun 2025

Berdasarkan tabel jumlah koperasi yang aktif terbanyak pada tahun 2022 yaitu 77 unit dan terendah berada ditahun 2020 yaitu 69 unit. Jumlah seluruh koperasi terbanyak pada tahun 2022 yaitu sebanyak 298 unit. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif cenderung mengalami penurunan. Permasalahan dari

menurunnya persentase koperasi aktif, dikarenakan kurangnya kemampuan pengurus dan anggota terkait manajemen pengelolaan koperasi juga kurangnya pengalaman dan pengetahuan dalam bidang koperasi.

- **Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif**
  Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non BPR adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. LKM biasanya menyediakan pinjaman, LKM bisanya berbentuk koperasi atau Perseroan terbatas.

Tabel 2.68
Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Unit	2.001	1.953	84	82	83
Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	Unit	2.001	2.087	106	302	303
Persentase	Persen	100	93,57	79,24	27,15	27,39

Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM Kota Palopo Tahun 2025

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah UKM non BPR/LKM aktif dari tahun 2020-2024 tertinggi menunjuk pada tahun 2020 yaitu 2.001 unit dengan jumlah seluruh UKM non BPR/LKM 2.001. Hasil capaian di Kota Palopo selama tahun 2020-2024 mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020 persentase UKM non BPR dan LKM aktif menyusut menjadi 27,39 persen pada tahun 2024.

- **Persentase Usaha Mikro dan Kecil**
  Selain mengampu kegiatan perkoperasian Dinas Koperasi Kota Palopo juga mengampu program dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha kecil dan mikro. Seperti diketahui bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak cabang yang dimiliki ataupun dikuasai oleh perusahaan lain baik secara langsung dan tidak langsung yang memenuhi criteria yaitu jumlah asset maksimal > Rp.50.000.000,- s/d Rp.500.000.000,- dan jumlah omzet maksimal > Rp.300.000.000,- s/d Rp.2.500.000.000,-. Kemudian definisi dari usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki criteria dengan jumlah asset maksimal Rp.50.000.000,- dan omzet maksimal Rp.300.000.000,-.

Tabel 2.69
Presentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	9.021	9.123	12.047	14.804	15.759
Jumlah seluruh UKM	Unit	11.022	11.211	14.048	14.804	15.759
Persentase UMK	%	81.84	81,37	85,75	100	100

Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM Kota Palopo Tahun 2025

Berdasarkan tabel jumlah usaha mikro dan kecil terbanyak pada tahun 2024 yaitu 15.759 unit dan jumlah usaha mikro kecil terendah pada tahun 2020 yaitu 9.021 unit. Usaha mikro dan kecil semakin bertambah dikarenakan usaha ini memerlukan modal yang relative kecil untuk memulai usaha dengan resiko yang relative kecil dan dapat beroperasi dengan fleksibilitas yang tinggi. SeKtor usaha warung /kios makanan yang semakin diminati masyarakat.

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

- **Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri**
  Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan penanaman modal Pemerintah Daerah Kota Palopo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Grafik 2.90
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Kota Palopo

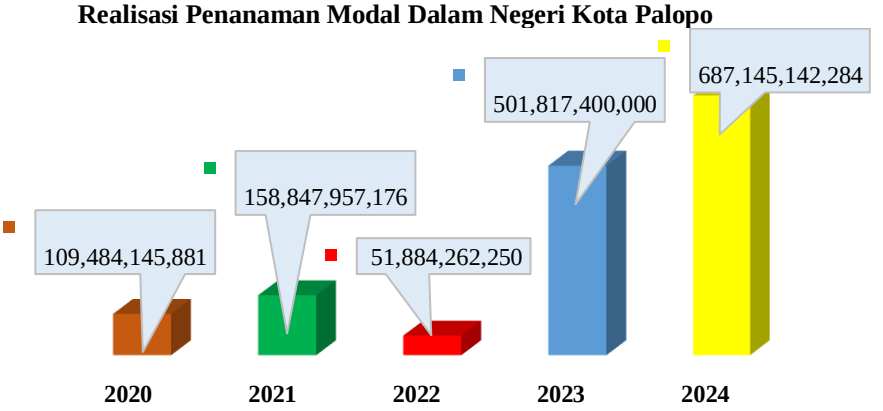

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Nilai realisasi investasi PMDN di Kota Palopo mengalami penurunan di tahun 2022 setelah sempat sebelumnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Sektor penyumbang investasi terbesar di tahun 2021 adalah sector konstruksi dengan nilai investasi sebesar 93.246,9 juta. Pada tahun 2022 investasi PMDN tertinggi adalah pada sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran dengan nilai ivestasi sebesar 50.360,1 juta, kemudian disusul sektor konstruksi dengan nilai investasi sebesar 40.094,7 juta dan yang ketiga adalah sector perdagangan reparasi dengan nilai investasi sebesar 19.828,6 juta. Tahun 2023 realisasi investasi PMDN naik drastis menjadi Rp.501.817.400.000 dan berlanjut pada tahun 2024. Hal ini diharapkan memberi sinyal yang baik untuk perekonomian Kota Palopo.

- **Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah investasi yang dilakukan oleh investor domestik dalam bentuk pembangunan atau pengembangan usaha di Indonesia. PMDN bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah grafik jumlah investor berskala nasional di Kota Palopo 2020-2023. Jumlah investor merujuk pada jumlah proyek-proyek penanaman modal yang diinvestasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun.

Grafik 2.91
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

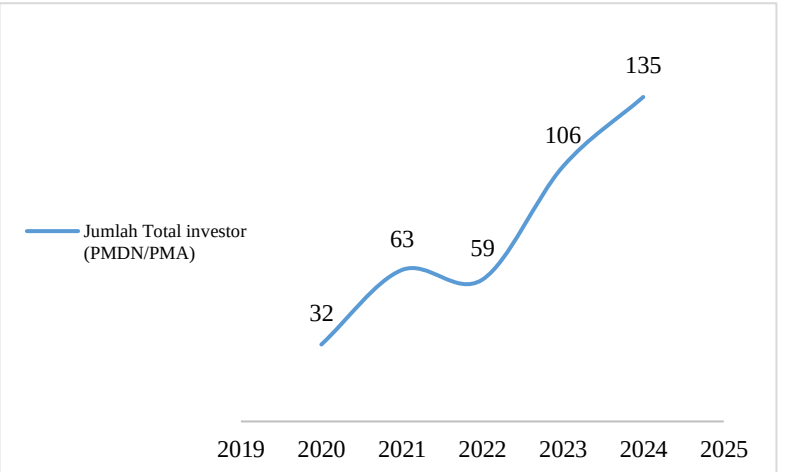

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Palopo Tahun 2024

Jumlah investor berskala nasional yang menanamkan investasinya di Kota Palopo dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang ada, terjadi peningkatan investor sebanyak 103 investor sampai tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Palopo merupakan salah satu daerah yang nyaman untuk menanamkan investasinya. Salah satu pengungkitnya adalah kemudahan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kota Palopo bagi para investor.

- **Jumlah dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN adalah sebuah bentuk entitas bisnis yang paling banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas bisnis di Indonesia. Selain itu, PMDN dianggap memiliki dasar hukum yang paling jelas dan menjadi pilihan utama bagi para investor asing yang ingin mengembangkan bisnis tertutup terhadap kepemilikan asing. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah sebuah pembentukan modal bisnis bagi investor asing dan menggunakan sepenuhnya atau sebagian modal asing dengan investor domestik.

Tabel 2.70

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Palopo Tahun 2020 – 2023

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah investasi berskala nasional (PMDN) (Buah)	74	77	51	55
Jumlah nilai investasi verskala nasional (PMA/PMDN) (Juta)	109.484	158.847	884	149.633

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Palopo Tahun 2024

Dari tabel diatas tergambar jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional baik PMDN maupun PMA di Kota Palopo selama tahun 2020-2023 mengalami tren penurunan yang signifikan, hanya Rp.884.000.000,- dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya yang mencapai angka milyar rupiah. Di tahun 2023, jumlah investasi meningkat menjadi 55 buah dengan nilai investasi sebesar 149.633.000.000.

- **Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**

  Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja.

  Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Adanya pandemi covid-19 yang melanda wilayah Indonesia khusunya di wilayah Kota Palopo mengakibatkan daya serap Tenaga Kerja mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun tabel rasio daya serap tenaga kerja selama tahun 2017-2022 mengalami tren penurunan yang signifikan.

Tabel 2.71

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan	Orang	30.140	760	392	676	308	586
Jumlah seluruh PMDN	Juta	220.859	130.740	109.484	158.847	51.884	1.545
Rasio per 100 Juta	Angka	13.65	9.04	36	4,25	1,5	n/a

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Palopo dan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Jumlah tenga kerja bekerja pada perusahaan tertinggi pada tahun 2018 dengan jumlah 30.140 orang dengan jumlah 220.859 jumlah seluruh PMDN.

- **Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)**

  Indikator dalam pencapaian Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN sangatlah berpengaruh terhadap Perekonomian di wilayah Kota Palopo, dimana realisasi tahun 2018 mencapai 57,77% dibandingkan dengan tahun 2022 hanya mencapai 32,66% maka nilai realisasi PMDN mengalami penurunan yang disebabkan beberapa faktor antara lain lesunya ekonomi akibat pandemi covid-19.

Tabel 2.72

Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kota Palopo Tahun 2019-2023

Indikator	Sat	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi PMDN tahun evaluasi	Rp	130,740,222,514	109.484.145.881	158.847.957.176	51.884.262.250	508.082.236.292
Realisasi PMDN sebelum evaluasi	Rp	220,859.000.000	130.740.222.514	109.484.145.881	158.847.957.176	51.884.262.250
Persentase	%	59.19	21.25	45.09	32.66	

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2024

Tabel presentase nilai kenaikan/penurunan dari tahun 2018-2024 meningkat ditahun 2019 yaitu 220,859,000,000 dengan realisi PMDN sebelum Evaluasi 382,322.260.000. di tahun 2023, Nilai PMDN sebesar 508.082.236.292 dengan realisasi PMDN sebelum evaluasi 51.884.262.250

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- **Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif**

  Berkaitan dengan Kepemudaan dan Olah Raga di Kota palopo sangatlah penting untuk menunjang kegiatan para pemuda untuk beraktivitas dalam kegiatan yang bersifat positif dan mampu mengekspresikan semua potensi yang dimilikinya. Penyadaran dan pemberdayaan pemuda dilakukan melalui penumbuhan kreativitas pemuda di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan pemanfaatan teknologi digital. Indikator yang berkaitan dengan hasil capaian kinerja pada perangkat daerah pengampu diukur dari jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kota Palopo. Berdasarkan hasil capaian selama tahun 2018-2024, persentase organisasi pemuda yang aktif mengalami peningkatan.

Tabel 2.73

Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Sat	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah organisasi pemuda yang aktif	OKP	73	136	166	83	84
Jumlah seluruh organisasi pemuda	OKP	102	218	215	105	108
Persentase	%	62.39	77.21	79.05	77.78	70.18

Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, persentase organisasi Pemuda yang aktif di Kota Palopo dengan jumlah yang aktif berada ditahun 2020 sebanyak 73 organisasi dengan jumlah seluruh organisasi sebanyak 102 OKP. Di Tahun 2024 jumlah organisasi pemuda menurun hingga mencapai 108 organisasi dengan total organisasi aktif sebanyak 84 organisasi atau sekitar 70,18 persen. Kegiatan kepemudaan yang menarik dan relevan dengan kebutuhan pemuda perlu ditingkatkan untuk membangun kembali partisipasi pemuda dalam pembangunan.

- **Persentase Wirausaha Muda**

  Wirausaha adalah orang yang membuat suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru hingga mengatur permodalan serta pemasarannya. Tujuan dari berwirausaha antara lain menyebarkan pengaruh wirausaha, membangun karakter wirausaha, membentuk wirausaha yang berkualitas, dan membangun kesejahteraan masyarakat. Wirausaha muda merupakan orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan kearah yang lebih baik. Pada era modern seperti saat ini, seringkali kita menemukan beberapa acara seminar yang berkaitan dengan wirausaha. Semboyan yang digaungkan yaitu mandiri dan kreatif. Tidak hanya itu, bahkan anak muda zaman sekarang berbondong-bondong menjadi wirausaha muda sebagai salah satu jalan tempuhnya. Adapun persentase wirausaha muda di Kota Palopo selama tahun 2018-2024 mengalami tren penurunan.

Tabel 2.74

Persentase Wirausaha Muda di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah wirausaha muda	Kelompok	430	835	621	432	439
Jumlah seluruh wirausaha	Kelompok	3.299	7.669	44.121	669	679
Persentase	%	13.03	10.89	1.41	64.57	64.65

Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo Tahun 2024

Jumlah wirausaha muda yang ada di Kota Palopo tertinggi berada pada tahun 2021 yaitu 835 dengan jumlah seluruh wirausaha 7.669. di tahun 2024 jumlah kelompok wirausaha muda sebanyak 439 dengan total wirausaha sebanyak 679 kelompok atau mencapai 64,65%.

- **Cakupan Pembinaan Olahraga**

  Pembinaan olahraga merupakan usaha yang merupakan proses untuk mencapai prestasi puncak. Pembinaan yang dilakukan tersebut akan sesuai dengan harapan apabila dilaksanakan secara efisien, sitematik, dan berkelanjutan, karena suatu proses pembinaan olahraga membutuhkan waktu yang lama. Persentase pembinaan Olahraga di Kota Palopo sejak tahaun 2018 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan dari seluruh cabang olah raga dengan persentase yang sangat baik 100%.

Grafik 2.92

Persentase Pembinaan Olahraga di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

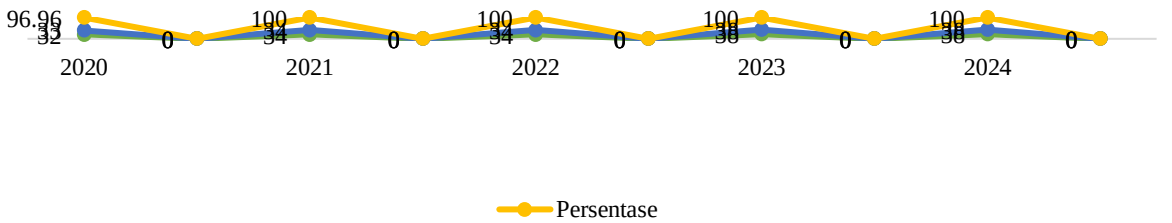

Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo Tahun 2025

Jumlah cabang yang dibina di kota palopo dengan jumlah yang tinggi pada tahun 2023-2024 sebanyak 38 cabor. Dengan jumlah seluruh cabang yang terdaftar sebanyak 38 atau mencapai 100% pembinaan dilaksanakan pada seluruh cabang olahraga yang terdaftar di Dinas Pemuda dan Olahraga.

- **Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi**

Pelatih bersertifikasi menjadi indicator kinerja pada perangkat daerah pengampu dikarenakan berkaitan dengan pola pembinaan atlet dan pelatih. Semakin banyaknya pelatih yang telah memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang cabor, akan berdampak pada kualitas atlet yang dihasilkan. Disisi lain pemerintah setempat memiliki andil dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pelatih yang dimilikinya. Adapun cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kota Palopo terdapat selama tahun 2018-2024 masih berada dibawah angka 50%.

Grafik 2.93
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

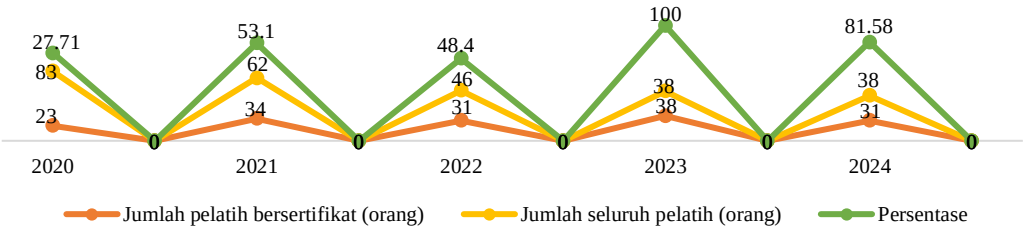

Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo Tahun 2025

Jumlah pelatih bersertifikat di Kota Palopo dalam kurun waktu 7 tahun terakhir tertinggi berada ditahun 2023 sebanyak 38 dari total 38 pelatih atau mencapai 100%. Di tahun 2024 jumlah pelatih bersertifikat berkurang menjadi 31 orang dikarenakan ada beberapa pelatih yang pindah tugas dan ada penambahan pelatih baru namun belum bersertifikat.

- **Cakupan Pembinaan Atlet Muda**

Pembinaan atlet muda adalah proses pengembangan dan pembinaan atlet-atlet muda untuk mencapai prestasi yang optimal dalam olahraga. Proses ini harus berkesinambungan dimana latihan harus dilakukan sepanjang waktu, berkelanjutan, terus menerus tentu seusai dengan tahapan tahapan yang telah direncanakan dan di susun yang tertuang tertulis dalam perencanaan latihan dan Program Latihan. Pembinaan karir atlet muda juga menjadi salah satu perhatian, melalui pengembangan kemampuan atlet untuk menajdi pribadi yang sukses dan berprestasi dalam karirnya.

Persentase pembinaan atlet muda di Kota Palopo terdapat selama tahun 2018-2024 masih stagnan di angka 20%.

Tabel 2.75
PersentasePembinaan Atlet Muda di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah atlet pelajar yang dibina	Orang	-	14	36	69	69
Jumlah seluruh atlet pelajar	Orang	98	85	176	n/a	n/a
Persentase	%	0	16.05	20.5	-	-

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo Tahun 2025

Jumlah atlet pelajar yang dibina dari tahun 2020-2024 sebanyak 188 orang dengan jumlah atlet pelajar mencapai 170 orang atau sekitar 28 persen.

- **Jumlah Atlet Berprestasi**

Atlet menurut UU Nomor 3 Tahun 2015 sistem Keolahragaan Nasional Bab I Pasal I Nomor 7 bahwa atlet adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. Atlet adalah ahli olahraga atau orang yang profesional dalam bidang olahraga. Atlet adalah seseorang yang menggeluti dan aktif melakukan latihan untuk meraih prestasi pada cabang olahraga yang dipilihnya. Atlet berprestasi adalah atlet yang ikut serta dalam pertandingan Nasional pada level tertinggi dan ampu mencapai prestasi tinggi sebagai tim Nasional. Sesuai dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa atlet berprestasi adalah atlet yang memiliki prestasi dan dengan upaya maksimal mampu mencapai level prestasi tinggi dengan turut serta berpartisipasi dalam pertandingan Tingkat Nasional maupun Internasional. Sebelum pandemi covid-19 yakni pada tahun 2018 atlet-atlet Kota Palopo dapat menyumbangkan medali ditingkat nasional. Seiring dengan adanya pandemi covid-19 para atlet-atlet di Kota Palopo mulai menurun persentase prestasi yang dicapainya disebabkan minimnya latihan yang maksimal sehingga mengalami persaingan yang lebih ketat untuk menjadi atlet yang berprestasi.

Tabel 2.76

Persentase Atlet Berprestasi di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	-	1	0	38	55

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo Tahun 2025

Di tahun 200-2024 jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional mengalami peningkatan, di tahun 2023 mencapai 38 orang dan di tahun 2024 mencapai 55 orang. pencapaian ini menandakan perlunya pembinaan secara serius bagi para atlet muda yang memiliki bakat, bukan hanya pembinaan fisik namun juga pembinaan secara mental.

- **Jumlah Prestasi Olahraga**

  Prestasi olahraga merupakan hasil optimal yang dicapai oleh seorang olahragawan (atlet) atau sekelompok orang (tim/regu) dalam bentuk kemampuan dan keterampilan dalam menyelesaikan tugas-tugas, baik dalam kompetisi beregu maupun individu. Prestasi olahraga dapat dicapai memerlukan menejerial atau manajemen yang baik, efektivitas dalam melaksanakan kegiatan merupakan tuntutan bagi setiap organisasi untuk mencapai tujuan. Ilmu manajeman dalam organisasi keolahragaan sangatlah memiliki dampak baik jika dijalankan atau dikelola dengan benar dan teratur.

Tabel 2.77

Persentase Prestasi Olahraga di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun	-	1	71	71	74

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo Tahun 2024

Presentase prestasi olahraga dari tahun 2020-2024 jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun terus meningkat. Jumlah cabang olahraga yang dimenangkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 74 cabor dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya (2022-2024).

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

  Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Sistem Data Statistik Terintegrasi (Simdasi). Hal itu digunakan sebagai penunjang dimulainya Satu Data Indonesia (SDI). SDI tersebut ke depan akan menghilangkan perbedaan data yang saat ini kerap terjadi. "Masih ada inkonsisten data baik di level nasional maupun daerah. Di Kota Palopo terkait dengan ketersediaan sistem data statistik yang terintegrasi masih dalam proses penginputan.

Tabel 2.78

Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Dalam proses penginputan	Dalam proses penginputan	Dalam proses penginputan	Dalam proses penginputan	Dalam proses penginputan

Sumber : Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo

15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan persandian Pemerintah Daerah Kota Palopo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.79

Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kota Palopo

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	39	49	49	49	49
Jumlah total perangkat daerah	49	49	49	49	49
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	79,59	100	100	100	100

Sumber : Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo, 2025.

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi di Kota Palopo tahun 2020-2024 jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah meningkat ditahun 2022 dengan total perangkat daerah 49 atau 100 persen.

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- **Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**

Festival seni dan budaya merupakan acara yang menampilkan berbagai bentuk seni dan budaya, seperti musik, tarian, teater, dan lain-lain. Festival ini biasanya diadakan untuk mempromosikan dan melestarikan seni dan budaya lokal, serta untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya. Festival dalam kategori ini adalah peristiwa yang dikelola baik oleh komunitasnya, atau dengan bantuan pemerintah yang telah memasukkannya ke dalam program kerjanya. Festival merupakan sarana komunikasi yang penting untuk membangun, memberdayakan dan pengakuan suatu identitas budaya. Festival seni dan budaya juga merupakan upaya untuk mempertahankan nilai – nilai seni budaya dan nilai tradisional.

Tabel 2.80
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	8	10	8	20

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Palopo, Tahun 2025

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Palopo dari tahun 2020-2024 dengan jumlah penyelenggaraan mengalami naik turun. Di tahun 2022 jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan 10 event, terjadi peningkatan daripada tahun sebelumnya yang hanya 8 event. Selama tahun 2021-2022 terjadi peningkatan event seni budaya dikarenakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi akibat pandemic. Di tahun 2024, festival seni budaya meningkat signifikan menjadi 20 event. Hal ini dikarenakan festival seni dan budaya ini menjadi salah satu program kerja Dinas Kebudayaan di Tahun 2024 melalui pelaksanaan event budaya secara rutin.

- **Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**

Pengertian Cagar Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan atau yang biasa disebut dengan bersifat *tangible*. Artinya bahwa warisan budaya yang masuk ke dalam kategori Cagar Budaya adalah warisan budaya yang berwujud konkrit, dapat dilihat dan diraba oleh indra, mempunyai massa dan dimensi yang nyata. Contohnya batu prasasti, candi, nisan makan, dll. Warisan budaya yang bersifat intangible seperti bahasa, tarian dan sebagainya tidak termasuk pada kategori Cagar Budaya.

Hasil capain indicator menunjukkan hasil yang menggembirakan yaitu persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan adalah 100%.

Tabel 2.81
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	148	148	148	23	23
Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah	Buah	148	148	148	148	148
Persentase	%	100	100	100	15,54	15,54

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Palopo, Tahun 2025

Persentase Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Palopo tahun 2020-2024 terus berada di posisi 148 ditahun 2022 dengan total benda 148. Di Tahun 2023-2024 jumlah cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 23 buah dengan total cagar budaya sebanyak 148 buah atau mencapai 15.54%.

- **Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi**

Kota Palopo memiliki 149 buah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah. Terdapat 148 buah yang merupakan asset daerah, sedangkan 1 buah merupakan rumah pribadi yang berada dalam kawasan cagar budaya sehingga tidak dilakukan pelestarian oleh Pemerintah Kota Palopo.

Tabel 2.82
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	3	3	9	8

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo, 2025.

Tabel jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kota Palopo di tahun 2021 dan 2022 berjumlah 3. Karya Budaya yang direvitalisasi dan invetarisasi di tahun 2023 mencapai 9 buah dan di tahun 2023 sebanyak 8 buah.

- **Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu**
  Pengelolaan cagar budaya secara terpadu di Kota palopo Pertama, dengan melindunginya. Kedua, dengan mengembangkannya. Dan ketiga, dengan memanfaatkannya. Perlindungan adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahannya, dengan cara penyelamatan, pengamanan, pewilayahan (zonasi), pemeliharaan, serta pemugaran. Adapun jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan dari 51 menjadi 55 buah cagar budaya.

Tabel 2.83
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	53	53	53	53	55

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Palopo, Tahun 2025

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- **Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun**
  Perpustakaan adalah sebuah institusi yang menyediakan koleksi buku, jurnal, majalah, dan sumber informasi lainnya untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan rekreasi.. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Tujuan perpustakaan adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengguna. Dapat membantu meningkatkan keterampilan pengguna dalam mencari dan mengolah informasi; Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan dan pengetahuan; Dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan dan pengetahuan serta meningkatkan kualitas hidup penggena dengan menyediakan akses informasi dan sumberdaya yang memadai. Indikator kinerja Dinas Perpustakaan dapat dilihat dari jumlah kunjungan setiap tahunnya, baik yang meminjam buku maupun melaksanakan aktivitas belajar dan membaca di dalam perpustakaan. Selama tahun 2018-2022 persentase jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Palopo mengalami penurunan dari 9,81% menjadi 6,1%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat literasi masyrakat di Kota Palopo masih sangat rendah < 10%.

Tabel 2.84
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Palopo Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	Orang	35.571	13.947	9.492	12.899	12.997
Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	153.110	154.808	157.251	170.018	176.832
Persentase	%	23,23	9,01	6,1	7,59	7,35

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo, Tahun 2025

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Palopo dengan jumlah kunjungan terbanyak di tahun 2020 dengan jumlah populasi yang dilayani 153.110 orang. Di tahun 2024, persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan menurun hingga mencapai 7,35 persen dari total masyarakat yang harus dilayani.

- **Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah**
  Dinas Perpustakaan Daerah Kota Palopo memiliki beberapa koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah yang terdiri dari berbagai macam buku mulai dari Ilmu Politik, sosial dan Ilmu pengetahuan, Buku Cerpen, Buku Pendidikan, dll. Setiap tahunnya jumlah koleksi buku di perpustakaan bertambah baik melalui pengadaan APBD dan bantuan hibah buku dari PERPUSTAKAAN Nasional Republik Indonesia. Adapun jumlah koleksi buku yang tersedia di perustakaan daerah mengalami tren peningkatan setiap tahunnya dari 1991 buah menjadi 16.500 buah pad tahun 2022, kenaikan yang signifikan ini terjadi karena adanya bantuan hibah buku dari PERPUSNAS.

Tabel 2.85
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Kota Palopo

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	7.615	7.460	16.500	16.500	16.500
Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	20.279	7.772	30.835	30.835	30.385
Persentase	%	37,55	96,00	53.51	53.51	53.51

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo, Tahun 2025

Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Palopo di tahun 2022-2024 tidak ada penambahan jumlah koleksi judul buku sebanyak 16.500 buah dengan total jumlah buku sebanyak 30.835 buah.

- **Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk**

Indikator rasio perpustakaan per satuan penduduk menjadi salah satu indicator kinerja utama dikarenakan ketersedian fasilitas perpustakaan baik yang berada di area public maupun di dalam fasilitas sekolah guna mendukung kebutuhan literasi masyarakat maupun siswa.

Tabel 2.86
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk
Kota Palopo

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah perpustakaan	Jiwa	216	228	231	226	227
Jumlah penduduk	Jiwa	184.681	187.331	190.867	194448	192760
Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	Per 1000	1.17	1.22	1,21	1,16	1,18

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2025

Hasil capaian indicator ini menunjukkan bahwa per 1000 penduduk hanya terdapat 1 fasilitas perpustakaan. Walaupun jumlah perpustakaan cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2020, tetapi tidak didukung dengan minat baca masyarakat yang masih rendah.

- **Jumlah Rata – Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun**

Indikator rata-rata pengunjung perpustakaan setiap tahunnya menjadi indicator capaian kinerja utama pada Dinas Perpustakaan. Semakin banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Palopo menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengkampanyekan budaya literasi, demikian juga sebaliknya apabila jumlah pengunjung perpustakaan sedikit mengindikasikan bahwa minat baca masyarakat masih rendah. Selama tahun 2018-2022 hasil menunjukkan tren menurun, hanya mencapai 791 pengunjung di tahun 2022.

Tabel 2.87
Perpustakaan per Tahun di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rata- rata pengunjung perpustakaan per tahun	2.964	1.162	791	1.074	1.083

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2025

Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (2023-2024), jumlah rata-rata pengunjung mengalami peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana perpusatakan yang nyaman serta update koleksi buku menjadi daya Tarik bagi masyarakat, khususnya pelajar/mahasiswa yang paling sering berkunjung ke perpustakaan.

- **Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan**

Jumlah koleksi judul buku perpustakaan merupakan salah satu indicator yang menunjukkan bahwa kelengkapan fasilitas penunjang tersedia dengan lengkap. Kelengkapan fasilitas yang salah satunya adalah buku yang dapat menarik minat baca masyarakat. Semakin banyaknya buku baru yang disediakan oleh perpustakaan membawa pengaruh terhadap minat baca baik masyarakat maupun pelajar sekolah/mahasiswa.

Hasil capaian indicator ini menunjukkan terjadi kenaikan yang sangat signfikan koleksi buku di perpustakaan umum Kota Palopo dari 1.191 buku menjadi 16.500 buku, dikarenakan adanya bantuan hibah buku dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Tabel 2.88
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kota Palopo

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	185	7.460	16.500	16.500	16.500

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2025

- **Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat**

  Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur yang dilakukan secara internal oleh perangkat daerah pengampu, baik melalui jenjang diklat maupun alih fungsi jabatan fungsional umum menjadi pustakawan.

Tabel 2.89
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikatdi Kota Palopo Tahun 2022 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	Orang	3	3	3	8	5
Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	Orang	3	3	3	8	5
Persentase	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2025

Hasil capaian menunjukkan terjadinya peningkatan dari sebelumnya yang masih 1 tenaga pustakwan di tahun 2028, menjadi 3 pustakawan di tahun 2022 dan meningkat menjadi 8 orang di tahun 2023. Namun di tahun 2024 jumlah pustakawan menurun menjadi 5 orang karena ada pustakawan yang pindah tugas dan pension. Keseluruhan pustakawan, tenaga teknis dan penilai sudah bersertifikat 100%.

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- **Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku**

  Kearsipan merupakan bagian dari kegiatan tertib administrasi yang bertugas menyimpan dan memelihara arsip dan dokumen penting milik pemerintah baik berupa file bentuk fisik maupun yang sudah dialihmediakan menjadi bentuk digital. Perangkat daerah yang bertugas mengampu urusan kearsipan adalah Dinas Kearsipan Kota Palopo. Salah satu indicator capaian kinerja pada perangkat daerah ini adalah persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Hasil capaian indicator ini menunjukkan perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku masih rendah yaitu kurang 25% dari jumlah total perangkat daerah yang ada di Kota Palopo.

Tabel 2.90
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kota Palopo Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku	OPD	6	8	10	10	10
Jumlah perangkat daerah	OPD	49	49	49	49	49
Persentase	%	12,24	16.33	20,41	20,41	20,41

Sumber : Dinas Kearsipan Kota Palopo Tahun 2025

- **Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan**

  Peningkatan SDM pengelola kearsipan adalah bagian dari penilaian indicator kinerja utama untuk mendukung pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan.

Tabel 2.91
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Palopo Tahun 2018 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	6	15	20	350	350

Sumber : Dinas Kearsipan Kota Palopo Tahun 2025

Selama tahun 2020-2024 terjadi peningkatan jumlah kegiatan yang sangat signfikan dalam menunjang SDM kearsipan dari 6 kegiatan di tahun 2020 menjadi 350 kegiatan pada tahun 2024. Adanya peningkatan jumlah kegiatan kearsipan diharapkan agar terciptanya tertib administrasi dokumen maupun konsistensi penyimpanan dan pengarsipan dokumen setiap tahunnya yang dilakukan oleh perangkat daerah lainnya.

C. URUSAN PILIHAN PILIHAN

1) Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

- **Konsumsi Ikan Masyarakat**

  Konsumsi ikan di Kota Palopo cukup tinggi, bahkan menjadi salah satu pusat distribusi ikan segar di Sulawesi Selatan, menurut penelitian Universitas Trisakti. Hal ini didukung oleh posisi strategis Kota Palopo sebagai daerah perbatasan, yang memudahkan distribusi produk perikanan baik di dalam maupun luar kota. Selain itu, kampanye gemar makan ikan oleh berbagai pihak juga turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi ikan.

Tabel 2.92
Konsumsi Ikan Masyarakat Kota Palopo

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah konsumsi ikan	Kg/kapita	55,50	53,17	53,98	54,79	52,39

Sumber : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2025

Konsumsi ikan di Kota Palopo cukup tinggi, didukung oleh potensi wilayah dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya ikan sebagai sumber gizi. Kota ini memiliki peran penting dalam distribusi ikan segar, baik secara lokal maupun regional.

- **Produksi Ikan**

  Produksi ikan di Kota Palopo cukup signifikan. Total hasil produksi perikanan mencapai 169.121,21 ton pad atahun 2024. Produksi ikan ini didistribusikan ke berbagai daerah, termasuk Makassar, Pare-pare, Masamba, Toraja, Enrekang, Sengkang, Soroako, Soppeng, Pinrang, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Pelabuhan Perikanan PPI Pontap di Kota Palopo juga mengalami peningkatan produksi ikan, menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo.

Tabel 2.93
Produksi Ikan di Kota Palopo

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah produksi ikan	Ton	145.144,27	176.897,4	193.005,27	193.154,56	169.121,21

Sumber : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2025

- **Cakupan Bina Kelompok Nelayan**

  Cakupan bina nelayan adalah indikator yang mengukur seberapa luas jangkauan program pemerintah dalam memberikan bantuan dan pembinaan kepada kelompok nelayan Cakupan bina nelayan mengacu pada persentase kelompok nelayan yang menerima bantuan dan bimbingan dari pemerintah daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas mereka. Ini mencakup berbagai bentuk dukungan, seperti pelatihan, akses modal, dan penyediaan fasilitas.

Tabel 2.94
Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Palopo

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun-n	Kelompok	4	1	35	15	4
Jumlah kelompok nelayan	Kelompok	143	143	142	142	142
Cakupan Bina kelompok Nelayan	%	2.80	0.70	24.65	10.56	2.82

Sumber : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2025

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa cakupan kelompok nelayan yang menerima bantuan dari Pemerintah masihtergolong rendah dan cenderung mengalami fluktuatif jumlah kelompok nelayan yang menerima bantuan setiap tahun.

- **Nilai Tukar Nelayan**

  Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah indikator yang mengukur kesejahteraan nelayan, dengan membandingkan indeks harga yang diterima nelayan (It) terhadap indeks harga yang dibayar nelayan (Ib). NTN juga menunjukkan daya tukar *(term of trade)* dari produk perikanan tangkap nelayan dengan barang dan jasa yang mereka konsumsi mauun untuk biaya produksi.

Tabel 2.95
Nilai Tukar Nelayan Kota Palopo

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar nelayan	Indeks	99,64	107,43	109,27	111,49	111,92

Sumber : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa NTN Kota Palopo selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun tahun 2020 NTN dengan indeks sebesar 99,64 dan pada tahun 2024 indeks NTN berada pada angka 111,92. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemamapuan atau daya beli nelayan Kota Palopo yang bagus.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- Persentase Kunjungan Wisatawan

Tabel 2.96
Persentase Kunjungan Wisatawan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se - Kota Palopo	Orang	61.267	68.184	172.915	178.629	188.082
Jumlah Kunjungan Wisata Yang Direncanakan se - Kota Palopo	Orang	115	120	125	130	135
Persentase Kunjungan Wisatawan	%	53.28	56.82	138.33	137.41	139.32

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Paopo, 2025.

Persentase kunjungan wisata ke Kota Palopo menunjukkan adanya peningkatan, baik lokal maupun mancanegara. Secara spesifik, berdasarkan data diatas menunjukkan peningkatan sekitar 86,04 persen dalam lima tahun terakhir.

- **Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD**

Sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD Kota Palopo, terutama melalui retribusi objek wisata, industri kreatif terkait pariwisata, dan peningkatan kunjungan wisatawan. Meskipun ada potensi, penerimaan retribusi dari sektor wisata belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kota Palopo.

Tabel 2.97
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Indikator	Sat	2020	2021	2022	2023	2024
PAD sektor pariwisata	Rp	6428266808	7324530315	8942731819	10549353297	10435060737
Total PAD	Rp	46097862325.28	140122685326.17	178686155930	193967685159.96	207650279423
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	13.94	5.23	5.00	5.44	5.03

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Paopo, 2025.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Palopo di tahun 2020 mencapai 13,94 persen, di mana capaian tersebut mengalami penurunan pada empat tahun berikutnya. Kondisi tersebut terjadi karena selain meningkatnya PAD sektor wisata, juga disertai peningkatan PAD Kota Palopo secara total. Adanya peningkatan kontribusi sektor pariwisata tersebut, Pemerintah Kota Palopo juga harus dapat menyediakan infrastruktur serta mengembangkan berbagai fasilitas untuk dapat mengembangkan sektor pariwisata di Kota Palopo.
Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kontribusi pariwisata terhadap PAD Kota Palopo antara lain, pengelolaan objek wisata yang belum optimal, promosi pariwisata yang belum maksimal, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata, dan keterlibatan masyarakat lokal yang masih perlu ditingkatkan.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- Produktivitas Padi

Secara umum, kondisi produktivitas padi di Kota Palopo terus mengalami penurunan pada lima tahun terakhir. Tahun 2024 produksi padi Kota Paloposebesar 14.860,86 ton. Produksi ini turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 16.067,64 ton. Kondisi ini dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah terus menurunnya luasan lahan panen padi, serta adanya alih fungsi lahan pertanian juga turut menjadi faktor turunnya produksi padi. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dalam sektor pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk Kota Palopo.

Tabel 2.98
Produktivitas Padi di Kota Palopo

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Padi (ton)	15.892,98	18.962,26	16.806,41	16.067,64	14.860,86
Luas Panen Padi(ha)	2.956,96	2.966,25	2.923,02	2.925,19	2.932,36
Produktivitas Lahan (ton/ha)	53,75	63,93	57,50	54,93	50,68

Sumber : BPS Kota Palopo, 2025.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- Hasil Kinerja Bidang Urusan Perdagangan

Tabel 2.99

Hasil Kinerja Bidang Urusan Perdagangan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai ekspor	Juta/Rp	2.539.220,00	2.538.012,08	2.112.272	n/a	n/a
Nilai impor	Juta/Rp	3.543.980,00	3.543.980,26	2.914.631	n/a	n/a

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Palopo, 2025.

a. Nilai Ekspor
Nilai Ekspor Kota Palopo dalam Juta/Rp pada Tabel diatas terus mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Data nilai ekspor tahun 2023 sampai dengan 2024 belum ada.

b. Nilai Impor Nilai impor Kota Palopo sempat mengalami stagnasi pada tahun 2021. Kemudian mengalami penurunan nilai impor pada tahun 2022. Data impor tahun 2023sampai dengan tahun 2024 belum ada.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perindustrian Pemerintah Daerah Kota Palopo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.100

Pertembuhan Industri Kota Palopo

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Industri (%)	5	5	5	5	5
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	10	10	10	10	10
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	2,92	2,95	2,98	3	3

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Palopo, 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukkan bahwa pertumbuhan sector industri di Kota Palopo pada lima tahun terakhir mengalami stagnasi pada angka pertumbuhan 5 persen. Keberadaan Kawasan Industri Palopo belum memberikan dampak positif terhadap geliat sektor industri. Hal ini terjadi karena keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palopo di dalam kawasan Industri. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sector industri juga masih rendah, yaitu pada angka 10 persen dalam lima tahun terakhir, sedangkan kontribusi sector industri terhadap PDRB cenderung mengalami peningkatan walaupun dalam jumlah yang relative kecil yaitu berada pada angka 3 persen pada tahun 2024.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Urusan pemerintahan bidang transmigrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memfasilitasi perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, dengan tujuan pemerataan penduduk, pengembangan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan. Penetapan lahan transmigrasi di Kota Palopo berdasarkan Keputusan Wali Kota Palopo Nomor 275/V/2019 Tahun 2019 tentang Pencadangan Tanah untuk Lokasi Rencana Kawasan Transmigrasi Wara Kota Palopo dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi dan Luas Lokasi sekitar 800 Ha.

Tabel 2.101

Jumlah Lokasi Transmigrasi di Palopo

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Penetapan Lahan Transmigrasi (lokasi)	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Transmigrasi Kota Palopo, 2025

D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah berfungsi sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah serta lembaga teknis daerah.

- **Return on Aset (ROA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Return on Aset (ROA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan aset BUMD dalam menghasilkan laba bersih. Dengan membandingkan laba bersih BUMD dengan

total aset yang dimiliki, ROA menunjukkan efisiensi manajemen dalam memanfaatkan aset untuk mendapatkan keuntungan, di mana semakin besar nilai ROA, semakin baik kinerja dan rentabilitas usaha BUMD tersebut.

Tabel 2.102
Return on Aset BUMD Kota Palopo

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,42	1,65	2,52	3,93	3

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Palopo, 2025

- **Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif**

Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak kegiatan pengadaan yang menggunakan metode kompetitif dibandingkan dengan total semua kegiatan pengadaan, dan nilai pastinya berbeda-beda antar daerah atau instansi, karena ini merupakan data indikator kinerja kunci (IKK) untuk setiap wilayah atau unit kerja.

Tabel 2.103
Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif Kota Palopo

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	n/a	n/a	21	55	84

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Palopo, 2025

- **Rasio Belanja Melalui Pengadaan**

Rasio belanja melalui pengadaan adalah persentase nilai belanja suatu entitas yang dialokasikan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa dibandingkan dengan total belanja keseluruhan entitas tersebut dalam periode waktu tertentu. Rasio ini menunjukkan seberapa besar porsi belanja yang dikelola melalui mekanisme pengadaan formal.

Tabel 2.104
Rasio Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan Kota Palopo

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Palopo, 2025

- **Indeks Reformasi Birokrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi adalah sebuah sistem penilaian dan pemantauan yang mengukur kemajuan dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu instansi pemerintah. Indeks ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik upaya perbaikan tata kelola, efisiensi, dan pelayanan publik telah diterapkan, serta memastikannya berjalan sesuai prinsip pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Indeks Reformasi Birokrasi Kota Palopo data dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.105
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Palopo

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	52.13 (CC)	55.09 (CC)	44.19 (C)	63.56 (B)

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Palopo, 2025

- **Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan instansi pemerintah mengelola dan melaporkan kinerjanya secara efektif, efisien, dan akuntabel, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengukuran, hingga pelaporan kinerja untuk mencapai hasil yang diinginkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Skor penilaian SAKIP Kota Palopo sebagai berikut;

Tabel 2.106
Skor Penilaian SAKIP Kota Palopo

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Tingkat penilaian akuntabilitas suatu instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015	Skor	61,01 (B)	62,40 (B)	64,35 (B)	64,30 (B)

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Palopo, 2025

- **Indeks Reformasi Hukum (IRH)**

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah suatu pengukuran kinerja reformasi hukum di Indonesia untuk menilai kemajuan dan efektivitas dalam upaya harmonisasi, penyederhanaan, dan deregulasi peraturan perundang-undangan serta peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara perancang peraturan. IRH merupakan amanat dari Program Reformasi Birokrasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, bertujuan untuk memastikan regulasi tepat guna dan sasaran. IRH Kota Palopo sebagai berikut;

Tabel 2.107
Indeks Reformasi Hukum Kota Palopo

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum	n/a	n/a	67,78	77,3	77,4

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palopo, 2025

2) Sekretariat DPRD

Unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Sekretariat DPRD itu sendiri. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang berfungsi sebagai unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administratif dan pendukung tugas serta fungsi DPRD. Dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, lembaga ini bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, memfasilitasi rapat, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli untuk mendukung kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

- Jumlah Peraturan Daerah/peraturan lainnya yang dihasilkan

  Jumlah peraturan daerah (perda) atau peraturan daerah lainnya yang dihasilkan merupakan indikator kinerja DPRD Kota Palopo yang mengggambarkan tentang jumlah Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan lain yang berhasil dibuat dan disahkan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Angka ini menunjukkan tingkat produktivitas dan efektivitas DPRD Kota Palopo dalam membuat kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan dan pembangunan.

Grafik 2.94
Jumlah Perda/Peraturan lainnya yang dihasilkan DPRD Kota Palopo

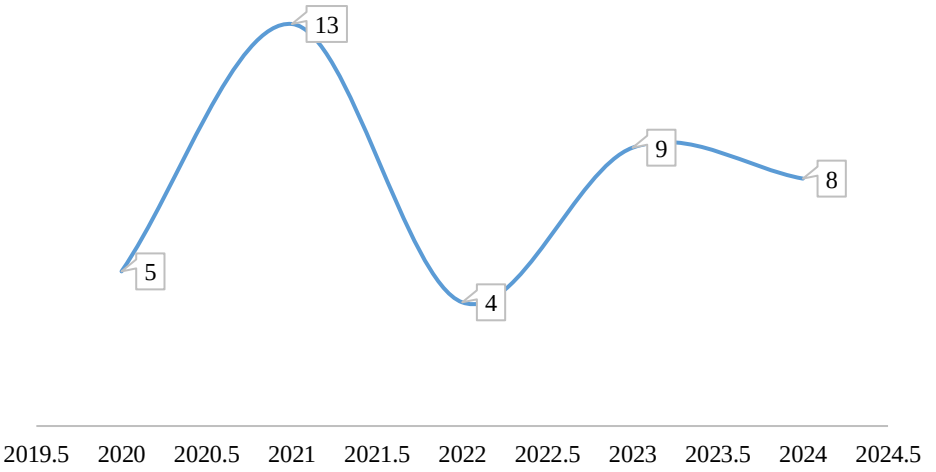

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palopo, 2025

- Jumlah Usulan Propemperda Terlaksana dan disahkan

  Propemperda adalah program tahunan yang isinya berupa daftar rancangan peraturan daerah prioritas untuk dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (perda). Propemperda atau program pembentukan peraturan daerah merupakan cetak biru atau rencana penyusunan Perda dalam satu tahun anggaran yang berisi daftar Ranperda yang menjadi prioritas untuk dibahas dan disahkan. Jumlah usulan propemperda yang terlaksana dan disahkan DPRD Kota Palopo Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut;

Grafik 2.95
Jumlah Usulan Propemperda yang terlaksana dan disahkan DPRD Kota Palopo

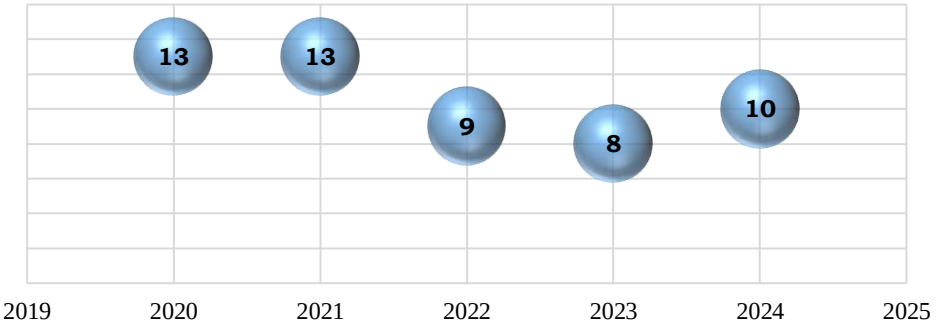

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palopo, 2025

- Jumlah Perda Inisiatif DPRD

  Perda inisiatif DPRD adalah Peraturan Daerah yang diusulkan oleh anggota sebagai upaya untuk melaksanakan fungsi legislasi dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta kebutuhan daerah. Inisiatif ini berupa usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disertai penjelasan atau naskah akademik, lalu dibahas bersama antara DPRD dan eksekutif (pemerintah daerah) hingga ditetapkan menjadi Perda. Jumlah Perda inisiatif DPRD Kota Palopo tahun 2020 sampai dengan 2024, dapat dilihat pada grafik berikut;

Grafik 2.96
Jumlah Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD

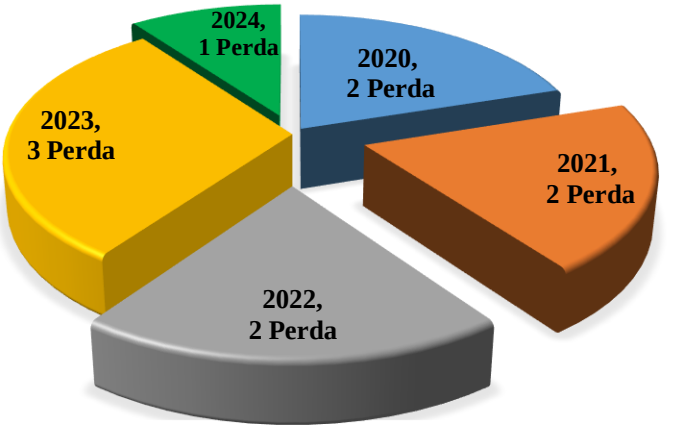

Sumber : Sejkretariat DPRD Kota Palopo, 2025

- Jumlah Anggota DPRD

  Anggota DPRD kabuoaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan masa jabatan adalah 5 (lima) tahun. Jumlah Anggota DPRD Kota Palopo sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Anggota DPRD Kota Palopo periode 2019-2024 diisi oleh laki-laki senbanyak 18 orang dan perempuan sebanyak 7 orang. Sedangkan pada periode 2024-2029, laki-laki sebanyak 20 orang dan perempuan sebanyak 5 orang. Untuk lebih jelasnya dilihat pada grafik berikut;

Grafik 2.97
Jumlah Anggota DPRD Kota Palopo

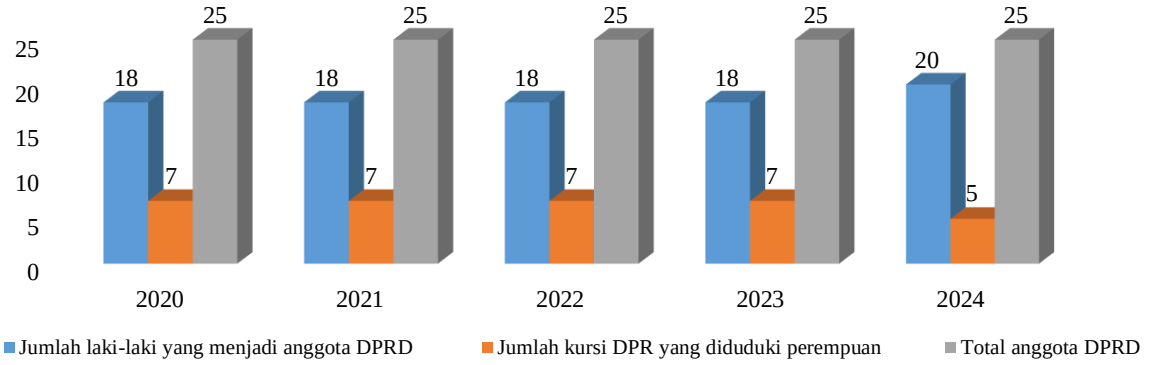

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palopo, 2025

E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1) Perencanaan Pembangunan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Palopo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.108
Hasil Kinerja Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	98	99,49	99,53	92,96	100
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	97,47	94,39	100	92

Sumber : Bappeda Kota Palopo, 2025.

Hasil kinerja urusan bidang perencanaan menunjukkan dari 6 indikator, hampir seluruhnya telah terpenuhi di tahun 2024. Sedangkan untuk indikator Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD meskipun belum mencapai 100% namun menunjukkan tren yang cukup bagus meskipun terjadi secara fluktuatif.

2) Keuangan

Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan menjadi cerminan tingkat kemandirian fiskal daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah menggambarkan semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada pusat. Adanya kontribusi yang semakin meningkatkan, pemerintah daerah akan semakin mandiri dalam membiayai keuangan daerah. Adapun perkembangan rasio PAD Kota Palopo dapat digambarkan tabel berikut:

Tabel 2.109
Rasio PAD Kota Palopo

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Total PAD (Rp)	177203606906.65	140133041613	178677929800.29	194018591747.16	207420000.00
Total Pajak Daerah (Rp)	34031809461	35,622,582,580	41,417,676,185	46,687,824,782	48,529,612,241
Rasio PAD (%)	19.20	25.42	23.18	24.06	23396.79

Sumber : Bapenda Kota Palopo, 2025.

Opini BPK adalah pernyataan profesional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ada empat jenis opini yang dapat dikeluarkan oleh BPK: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer).

Tabel 2.110
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah	Opini LPH	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Kota Palopo, 2025.

Pemerintah Kota Palopo meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024, ini adalah yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Meskipun meraih WTP, BPK memberikan catatan terkait Penekanan Suatu Hal (PSH) mengenai kondisi kas Pemkot Palopo yang tidak mencukupi untuk membayar kewajiban jangka pendek, serta penataan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Hal ini berpotensi mengganggu arus kas dan pembayaran rutin pemerintah daerah. Opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkot Palopo dianggap menyajikan secara wajar semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pencapaian opini WTP ke-10 kalinya secara berturut-turut ini menunjukkan komitmen dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan di Pemkot Palopo dalam mengelola keuangan daerah.

3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Pemerintah Daerah Kota Palopo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

Tabel 2.111
Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Hari/Jam Pelajaran	103/893	103/893	103/893	0	0
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	4	47	49	0	0
Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	Orang	379	423	411	0	0
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Orang	28	32	34	44	44
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Orang	947	901	613	652	622
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	Orang	2122	2201	2428	2296	2240

Sumber : BKPSDM Kota Palopo, 2025.

Dari capaian kinerja bidang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan ada indikator yang perlu dijadikan perhatian yaitu indikator Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan Jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Kedua indikator ini penting karena berimbas dengan kinerja pegawai dan juga keahlian. Meskipun mengalami perkembangan yang berfluktuasi pada sebelum tahun 2021 dan 2022, namun pada tahun 2023 dan 2024 pendidikan dan pelatihan tidak diikuti oleh satupun pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palopo. Sedangkan untuk indikator lain, erat kaitannya dengan perubahan SOTK dan penyederhanaa. Rasio PNS terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan total jumlah penduduk di suatu wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak PNS yang melayani setiap 100 orang penduduk.

Tabel 2.112
Rasio PNS terhadap Penduduk Kota Palopo

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PNS Total	Orang	4310	4311	4391	4075	3929
Jumlah penduduk	jiwa	184681	187331	190867	177526	182898
Ratio PNS terhadap penduduk	%	2.33	2.30	2.30	2.30	2.15

Rasio PNS (Pegawai Negeri Sipil) terhadap jumlah penduduk di Kota Palopo saat ini adalah sekitar 2,15%. Ini berarti, setiap 100 orang penduduk, terdapat sekitar 2 orang PNS yang melayani.

4) Penelitian dan Pengembangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan adalah ukuran seberapa baik rencana penelitian dan pengembangan (litbang) telah dilaksanakan. Ini menunjukkan sejauh mana kegiatan dan target yang ditetapkan

dalam rencana tersebut telah direalisasikan. Data persentase ini penting untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam kegiatan kelitbangan.

Tabel 2.113
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kelitbangan dalam RKPD	Prog	6	11	2	2	2
Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	Prog	6	11	2	2	2
Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100	100	100	100

Sumber : Balitbangda Kota Palopo, 2025

Ada berbagai jenis kebijakan inovasi, seperti kebijakan yang berkaitan dengan teknologi, lingkungan, sosial, atau ekonomi. Tingkat penerapan bisa berbeda-beda tergantung jenis kebijakannya. Kesiapan daerah dalam hal sumber daya, infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia juga mempengaruhi penerapan kebijakan inovasi. Dukungan politik dan anggaran dari pemerintah daerah sangat penting untuk keberhasilan penerapan kebijakan inovasi. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan inovasi juga dapat meningkatkan tingkat penerapannya.

Tabel 2.114
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Palopo

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	Buah	18	18	15	17	34
Jumlah inovasi yang diusulkan	Buah	49	18	15	17	34
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	36,3	100	100	100	100

Sumber : Balitbangda Kota Palopo, 2025

F. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pengawasan Pemerintah Daerah Kota Palopo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.115
Maturitas SPIP Kota Palopo

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Poin	3	3	3	3	3

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Palopo, 2025.

Hasil capaian urusan pengawasan maturitas SPIP mengalami stagnasi selama lima tahun terakhir. Hasil maturitas SPIP yang stagnan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya kompetensi SDM, keterbatasan anggaran, kurangnya kepatuhan terhadap prosedur, dan belum maksimalnya kegiatan evaluasi serta dokumentasi. Selain itu, faktor lain seperti kurangnya personil yang bertanggung jawab terhadap pelaporan, serta belum optimalnya pelaksanaan kegiatan SPIP oleh staf dan pimpinan juga dapat menjadi penyebabnya.

Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertujuan untuk memperkuat peran pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, memastikan efektivitas dan efisiensi, serta mencegah penyimpangan. Hal ini melibatkan peningkatan kompetensi SDM APIP, penyusunan pedoman dan standar operasional, serta penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan.

Tabel 2.116
Peningkatan Kapabilitas APIP Kota Palopo

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Poin	3	3	3	3	3

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Palopo, 2025.

Hasil capaian urusan pengawasan maturitas SPIP mengalami stagnasi selama lima tahun terakhir. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang stagnan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan kompetensi dan jumlah sumber daya manusia (SDM) APIP, kurangnya komitmen dan komunikasi, serta kendala dalam anggaran dan perencanaan. Selain itu, rendahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kurangnya pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi penghambat.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

A. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita mencakup statistik pendapatan dan pengeluaran rumah tangga dari sudut pandang rumah tangga (semua jenis pendapatan dan pengeluaran), termasuk topik seperti distribusi pendapatan, pendapatan dalam bentuk natura, transfer pendapatan yang diterima dan dibayarkan, pengukuran kemiskinan berbasis pendapatan atau pengeluaran, perlindungan konsumen, pola konsumsi, barang konsumsi dan barang tahan lama, kekayaan dan utang rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah total biaya pengeluaran rumah tangga dibagi dengan banyaknya rumah tangga yang ada. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumahtangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2.117
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kota Palopo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Milyar /Thn)	2.980.59	3.075	3.266.35	3.478.46	3.644.63
2	Jumlah Rumah Tangga (RT)	40,202	41.123	57.755	44,382	45.725
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Juta/Tahun)		74.14	74.77	56.56	78.36	79.71

Sumber Data : Data BPS Kota Palopo tahun 2022

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah konsumsi rumah tangga di Kota Palopo sejak tahun 2021 meningkat yaitu 74.77 juta/tahun jika dibandingkan pada tahun 2020 yaitu 74.14 juta/tahun, sedangkan tahun 2022 kembali menurun menjadi 56.56 juta per tahun per rumah tangga. Pada Tahun 2023 dan 2024 kembali mengalami peningkatan pada angka 78.36 di tahun 2023 dan 79.71 di tahun 2024. Hal ini disebabkan meningkatnya daya beli masyarakat.

2) Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan per Kapita adalah rata-rata jumlah uang yang dikeluarkan seseorang untuk membeli barang dan jasa yang bukan makanan dalam satu bulan. Angka ini digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, karena semakin tinggi proporsi pengeluaran non-makanan, umumnya menunjukkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup.Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan pada dasarnya saling berkaitan. Dalam kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan didahulukan sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi yang dibelanjakan untuk bukan makanan. Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan (ekonomi) makanan secara umum rendah, sedangkan elastisitas permintaan terhadap kebutuhan bukan makanan relatif tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan sedangkan sisa pendapatan dapat disimpan sebagai tabungan/diinvestasikan.

Tabel 2.118
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita untuk Makanan dan Bukan Makanan

Uraian	Palopo (tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Makanan	44,65	50.68	47.47	46.64	48,06
Konsumsi Bukan Makanan	55,35	49.32	52.53	53.36	51,94

Sumber Data : BPS Prov. Sulawesi Selatan

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tahun 2020 – 2024 permintaan terhadap akan kebutuhan makanan rata-rata masih rendah jika di bandingkan dengan permintaan kebutuhan bukan makanan yang di kategorikan relatih tinggi.

B. FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

1) Ketataan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan terhadap RTRW adalah tindakan mengikuti dan mematuhi pedoman dan peraturan yang tertuang dalam dokumen RTRW untuk memastikan pembangunan dan pemanfaatan ruang berjalan efektif, efisien, dan

berkelanjutan, sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yang telah ditetapkan untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas dan mengurangi konflik penggunaan lahan.

2) Luas Wilayah Produktif

Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Indeks infrastruktur adalah alat untuk menilai infrastruktur dengan beberapa komponen penilaian yang terdiri dari Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas, Penyediaan transportasi, Penyediaan infrastruktur air bersih, Penyediaan infrastruktur drainase. Salah satu Indeks layanan infrastruktur dipengaruhi oleh indikator kemantapan jalan dan konektivitas jalan, dimana pemantapan jalan dipengaruhi oleh pembangunan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan, salah satu indicator yang digunakan yaitu proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.

Tabel 2.119

Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Jalan Kondisi baik (km)	382.95	394.68	412.37	337.36	340.742
Panjang jalan Keseluruhan	503.16	503.16	503.16	549.635	552.3702
Mantap	349.31	338.21	278.785	280.941	284.324
%	69.42	67.22	55.41	51.11	51.47
Tidak Mantap	153.85	164.95	224.375	268.694	268.0462
Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	69.42	67.22	55.41	51.11	51.47

Sumber Data : Dinas PUPR Tahun 2024

Dari tabel diatas menunjukan bahwa kondisi jalan dalam keadaan mantap adalah kondisi jalan dalam kategori baik dan sedang, dengan persentase di tahun 2020 sebesar 69.42% dan tahun 2024 yaitu 51.47%, artinya yaitu volume jalan yang rusak mengalami pengurangan, dan pemerintah memprioritaskan perbaikan jalan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.120

Persentase penduduk berakses air minum

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Berakses Air Minum (jiwa)	175.646	177.105	180.145	149.804	150.054
Jumlah penduduk	184.681	187.331	190.867	194.448	182.898
Persentase penduduk berakses air minum	95.11	94.54	94.38	77.04	82.04

Sumber Data : Dinas PUPR tahun 2025

Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2024, besaran penduduk Kota Palopo yang memiliki akses terhadap air minum sebanyak 82.04%. Kondisi ini menurun jika dibandingkan tahun 2020 yang berada pada angka 95.11%. Meski demikian ini menunjukkan bahwa masih ada kurang lebih 5% penduduk Kota Palopo yang belum memiliki akses air minum.

Tabel 2.121

Rumah Tinggal Bersanitasi

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	33.066	34.872	38.992	46.069	46,172
Jumlah rumah tinggal	39.514	41.22	43.467	55.713	57,779
Persentase rumah tinggal bersanitasi	83.68	84.60	89.70	82.69	79.91

Sumber data : Dinas PUPR tahun 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa perbaikan kualitas hunian masyarakat Kota Palopo terjadi pluktuasi. Pada Tahun 2020 persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 83.68%, kemudian meningkat di tahun 2021 sebesar 84.60% dan tahun 2022 sebesar 89.70%. Kemudian pada tahun 2023 dan 2024 kembali mengalami penurunan dengan angka 82.69% tahun 2023 dan 79.91% tahun 2024. Rumah Tinggal Bersanitasi adalah hunian yang memiliki fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja), rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi. Rumah tinggal adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta bagi pemiliknya

Tabel 2.122
Jumlah arus penumpang angkutan umum

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan bis (Orang)	5.395	945,036	2,301,320	1,982,192	872.745
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan kapal laut (Orang)	238	0	0	0	0
Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah.	5.633	945.036	2.301.320	1.982.192	872.745

Sumber data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2025

Data ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2024, jumlah penumpang yang keluar masuk di Kota Palopo mengalami pluktuasi. Jika tahun 2020 ada sebanyak 5.633 ribu orang arus penumpang umum yang menggunakan bis dan kapal laut, sementara di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan hingga 945.036 ribu orang tahun 2021 dan 2.301.320 juta orang di tahun 2022, akan tetapi pada tahun 2023-2024 kembali mengalami penurunan sebesar 1.982.192 juta orang jika di bandingkan tahun 2022. Begitupula dengan tahun 2024 sebesar 872.745 ribu orang. Salah satu faktor terjadinya penurunan tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan angkutan umum kapal laut, sebagian menggunakan pesawat dan juga masyarakat banyak menggunakan angkutan pribadi.

3) Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah Kota Palopo dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh 17 sektor lapagan usaha terhadap peningkatan pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) dan jumlah Angkatan kerja, Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.123
Produktivitas Total Daerah sesuai dengan 17 sektor

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,352.04	1,493.21	1,672.46	1,716.09	1,730.09
Jumlah Angkatan Kerja	85.026	84.97	91.96	94.88	97.189
Produktivitas total daerah (a)	**15.90**	**17.57**	**18.19**	**18.09**	**17.80**
Pertambangan dan Penggalian	12.55	13.43	15.57	16.90	17.46
Jumlah Angkatan Kerja	85.026	84.97	91.96	94.88	97.189
Produktivitas total daerah (b)	**0.15**	**0.16**	**0.17**	**0.18**	**0.18**
Industri Pengolahan	205.18	216.58	247.16	269.80	289.73
Jumlah Angkatan Kerja	85.026	84.97	91.96	94.88	97.189
Produktivitas total daerah (c)	**2.41**	**2.55**	**2.69**	**2.84**	**2.98**
Pengadaan Listrik dan Gas	6.18	6.46	6.74	8.02	8.61
Jumlah Angkatan Kerja	85.026	84.97	91.96	94.88	97.189
Produktivitas total daerah (d)	**0.07**	**0.08**	**0.07**	**0.08**	**0.09**
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13.61	13.58	14.97	15.58	16.62
Jumlah Angkatan Kerja	85.026	84.97	91.96	94.88	97.189
Produktivitas total daerah (e)	**0.16**	**0.16**	**0.16**	**0.16**	**0.17**
Konstruksi	1,325.43	1,454.37	1,689.45	1,834.10	1,861.81
Jumlah Angkatan Kerja	85.026	84.97	91.96	94.88	97.189
Produktivitas total daerah (f)	**15.59**	**17.12**	**18.37**	**19.33**	**19.16**
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,963.95	2,095.14	2,295.74	2,488.59	2,674.30
Jumlah Angkatan Kerja	85.026	84.97	91.96	94.88	97.189
Produktivitas total daerah (g)	**23.10**	**24.66**	**24.96**	**26.23**	**27.52**
Transportasi dan Pergudangan	409.35	485.29	648.31	793.69	858.37
Jumlah Angkatan Kerja	85.026	84.97	91.96	94.88	97.189
Produktivitas total daerah (h)	**4.81**	**5.71**	**7.05**	**8.37**	**8.83**
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87.50	94.27	108.04	119.19	131.24
Jumlah Angkatan Kerja	85.026	84.97	91.96	94.88	97.189
Produktivitas total daerah (i)	**1.03**	**1.11**	**1.17**	**1.26**	**1.35**

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Informasi dan Komunikasi	374.82	388.18	413.59	443.13	473.20
Jumlah Angkatan Kerja	85.026	84.97	91.96	94.88	97.189
Produktivitas total daerah (j)	**4.41**	**4.57**	**4.50**	**4.67**	**4.87**
Jasa Keuangan dan Asuransi	593.39	671.08	772.18	861.24	916.3
Jumlah Angkatan Kerja	85.026	84.97	91.96	94.88	97.189
Produktivitas total daerah (k)	**6.98**	**7.90**	**8.40**	**9.08**	**9.43**
Real Estate	403.01	414.50	463.54	472.12	503.11
Jumlah Angkatan Kerja	85.026	84.97	91.96	94.88	97.189
Produktivitas total daerah (l)	**4.74**	**4.88**	**5.04**	**4.98**	**5.18**
Jasa Perusahaan	7.46	7.82	9.01	10.26	11.05
Jumlah Angkatan Kerja	85.026	84.97	91.96	94.88	97.189
Produktivitas total daerah (n)	**0.09**	**0.09**	**0.10**	**0.11**	**0.11**
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	624.20	666.24	671.01	667.40	740.49
Jumlah Angkatan Kerja	85.026	84.97	91.96	94.88	97.189
Produktivitas total daerah (m)	**7.34**	**7.84**	**7.30**	**7.03**	**7.62**
Jasa Pendidikan	349.40	359.18	362.23	374.33	398.50
Jumlah Angkatan Kerja	85.026	84.97	91.96	94.88	97.189
Produktivitas total daerah (o)	**4.11**	**4.23**	**3.94**	**3.95**	**4.10**
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	193.41	223.66	241.47	257.24	278.2
Jumlah Angkatan Kerja	85.026	84.97	91.96	94.88	97.189
Produktivitas total daerah (p)	**2.27**	**2.63**	**2.63**	**2.71**	**2.86**
Jasa Lainnya	103.81	111.04	136.42	152.14	174.85
Jumlah Angkatan Kerja	85.026	84.97	91.96	94.88	97.189
Produktivitas total daerah (q)	**1.22**	**1.31**	**1.48**	**1.60**	**1.80**

Sumber Data : BPS Kota Palopo tahun 2025

4) Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum

Rasio pinjaman terhadap simpanan *(Loan to Deposit Ratio/LDR)* di bank umum Kota Palopo, adalah rasio yang menunjukkan seberapa banyak pinjaman yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan simpanan yang dimiliki nasabah. LDR yang tinggi bisa menunjukkan bank lebih agresif dalam memberikan pinjaman, sementara LDR yang rendah bisa menunjukkan bank lebih fokus pada likuiditas. LDR dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, suku bunga, kebijakan bank sentral, dan kondisi pasar keuangan.

Tabel 2.124

Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pinjaman di bank umum	4.751.940.214.372	5.019.501.974.221	5.982.735.221.133	10.413.496.216.046	10,413,320
Dana pihak ketiga di bank umum	4.233.827.110.433	4.272.646.121.310	4.627.678.336.755	5.335.222.132.328	5,946,588
Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	112.24	117.48	129.28	195.18	175.11

Sumber Data : BI Sulsel Tahun 2025

Dari data tabel di atas, pada tahun 2020-2024 menunjukan bahwa penyaluran untuk dana kredit yang di berikan kepada masyarakat lebih besar dari pada masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.

C. Fokus IKLIM BERINVESTASI

1) Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat stabilitas keamanan yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Selain stabilitas politik, aspek keamanan juga merupakan salah satu indikator penting bagi investor untuk berinvestasi pada suatu wilayah tertentu.

Tabel 2.125
Angka Kriminalitas yang tertangani Tahun 2020-2024

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	484	555	1 207	1	1
Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	257	296	643	563	563
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	63,01	54,95	62,05	82,94	82,94
Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana	18.09	18,09	7,25	7,95	7,95

Sumber Data : BPS Prov. Sulawesi Selatan tahun 2025

Data angka kriminalitas Kota Palopo tahun 2020 hingga 2024 mengalami pluktuasi dimana pada tahun 2020 s/d 2022 menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan, sementara di tahun 2023 sd 2024 kembali mengalami penurunan, hal ini menandakan bahwa tingkat keamanan kota Palopo semakin membaik.

2) Jumlah Demonstrasi

Tabel 2.126
Jumlah Demonstrasi di Kota Palopo

Indikator	2024
Jumlah Kejadian Unjuk Rasa	18

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

D. FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

1) Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja, yang dapat dilihat dari rasio lulusan S1/S2/S3, menunjukkan masalah kesenjangan kualitas tenaga kerja di Indonesia, terutama pada jenjang S2 dan S3 yang masih sangat rendah (sekitar 0,5% dari populasi produktif) dibandingkan negara maju (sekitar 9%) dan negara ASEAN lainnya. Angka ini menandakan penurunan ketersediaan tenaga kerja terampil dan berpengetahuan tinggi yang dapat berdampak pada daya saing ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

2) Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan)

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator yang dapat berfungsi sebagai indikator demografi maupun indkator ekonomi. Sebagai indikator demografi, rasio ketergantungan digunakan untuk mengetahui beban ketergantungan penduduk yang belum atau tidak produktif terhadap penduduk usia produktif disuatu wilayah. Sedangkan sebagai indikator ekonomi, rasio ketergantungan untuk mengetahui suatu daerah dapat digolongkan dalam kategori maju atau masih tahap berkembang. Rasio ketergantungan Kota Palopo, seperti di daerah lain umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu: jumlah penduduk yang masih muda (0-14 tahun) dan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Penyebab utama perubahan rasio ketergantungan Kota Palopo selama 5 tahun terakhir, kemungkinan disebabkan oleh perubahan struktur usia penduduk. Rasio ketergantungan mengacu pada perbandingan jumlah penduduk yang tidak produktif (anak-anak dan lansia) dengan jumlah penduduk yang produktif (usia kerja). Perubahan ini bisa dipicu oleh beberapa faktor, seperti Perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup dapat meningkatkan angka harapan hidup, sehingga jumlah lansia akan bertambah, dan rasio ketergantungan meningkat. Jika angka kelahiran menurun secara signifikan, maka proporsi anak-anak akan berkurang, dan rasio ketergantungan bisa menurun. Namun, jika angka kematian lansia juga menurun, maka rasio ketergantungan tetap tinggi. Jika ada migrasi besar-besaran, terutama migrasi orang muda ke kota lain untuk bekerja, maka rasio ketergantungan bisa meningkat karena persentase penduduk produktif menurun. Sebaliknya, jika ada migrasi lansia ke Palopo, rasio ketergantungan bisa meningkat. Jika ada perubahan signifikan dalam struktur usia penduduk, misalnya peningkatan jumlah lansia atau peningkatan jumlah anak-anak, maka rasio ketergantungan akan berubah. Faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi rasio ketergantungan adalah perubahan tingkat pengangguran, peningkatan partisipasi wanita dalam dunia kerja, dan perubahan kebijakan pemerintah yang terkait dengan penduduk.

Tabel 2.127
Rasio Ketergantungan Kota PalopoTahun 2020-2024

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia 0 – 14 thn	48.30	32.09	48.58	48.83	49.21
Penduduk Usia 65+ thn	9.28	5.59	9.88	10.26	10.70
Jumlah penduduk Usia 0-14 dan 65+ thn	57.58	37.68	58.46	59.09	59.91
Penduduk Usia 15 –64 thn (Usia Produktif)	127.10	104.92	131.41	133.68	135.77

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Ketergantungan (%)	45.30	35.91	44.49	44.20	44.13

Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan hasil olahan

2.2 CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH

2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu untuk mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran sebagaiman telah ditetapkan dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD) tahun 2024-2026 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 13 tahun 2023 yaitu terdapat 4 indikator tujuan, 10 indikator sasaran, Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palopo tahun 2024 yang disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Palopo dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2024 sebagaimana di jabarkan dalam tabel di bawa ini sebagai berikut :

Tabel 2.128
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
						Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas (T1)		Indeks Reformasi Birokrasi	poin	44,19	60-70	61,62	94.80	Sangat tinggi
		Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	poin	84,16	87.67	85,31	97.30	Sangat tinggi
			Indeks SAKIP	poin	64,35	65-70	64,3	91.85	Sangat tinggi
2	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat & Perekonomian Daerah yang Berkualitas (T2)		PDRB per Kapita (ADHB)	juta/kapita/thn	54,47	58	56,65	97.67	Sangat tinggi
			Persentase Penduduk Miskin	persen	7,69	7.58	7,35	96.96	Sangat tinggi
		Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha (S2)	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	7,81	8,07	7,64	94.67	Sangat tinggi
		Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas (S3)	Angka Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,34	5,98	4,4	73.57	Sedang
			Gini Rasio	angka	0,367	0,337	0,346	102.67	Sangat tinggi
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (S4)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	80,77	79,6	81,25	102.07	Sangat tinggi
			Indeks Pembangunan Gender	poin	97,61	97,35	97,71	100,36	Sangat tinggi
3	Terwujudnya Lingkungan Layak Huni dan Berkelanjutan (T3)		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	43,9	58	69,24	119.37	Sangat tinggi
		Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kualitas Lingkungan Perkotaaan (S5)	Indeks Resiko Bencana (IRB)	poin dan predikat	187,91	195	187,91	96.36	Sangat tinggi
			Luas Wilayah yang Tergenang/ Terdampak Banjir	Ha	12	9	13	144.44	Sangat tinggi
			Persentase Luas Kawasan Kumuh dari Total Luas Wilayah Kota	persen	1,1	1	1,06	106	Sangat tinggi
RATA RATA KINERJA CAPAIAN IKU								94.12	Sangat Tinggi

Sumber data : Lakip Kota Palopo 2024

Berdasarkan tabel 2.5.1 rata-rata kinerja capaian IKU tahun 2024 adalah 94.12% dengan kategori Sangat Tinggi hal ini di pengaruhi beberapa indikator yaitu :

- **Reformasi Birokrasi dengan tujuan 1 yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas** sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2020 tentang grand design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan road map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Palopo, berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan indeks RB Pemerintah Kota Pa lopo tahun 2023 adalah 44,19 dengan kategori (C), pada tahun 2024 Pemerintah Kota Palopo telah melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Palopo sehingga mampu memperbaiki nilai Reformasi Birokrasi menjadi nilai 61,62 dengan predikat (B).

- **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) & Indeks SAKIP dengan Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan** sesuai Peraturan Walikota Palopo Nomor 13 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo Tahun 2024-2026, Indikator utama yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelayanan publik adalah Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan publik yang diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 meningkat dari 84,16 Tahun 2023 menjadi 85,31 Tahun 2024. Hal ini berarti naik sebesar 1,14%. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan baik secara mandiri maupun kerjasama dengan lembaga instansi Daerah. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2024 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 64.043.807.797,- dengan realisasi sebesar Rp 53.669.949.119,- atau 78.69%.
- **Indeks SAKIP** sesuai dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan pres iden nomor 29 tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) telah melakukan evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada pe merintah Kota Palopo, berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan indek SAKIP Pemerintah Kota Palopo tahun 2023 adalah 64,35 dengan katagori (B), pada tahun 2024 pemerintah kota palopo telah melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan SAKIP di pemerintah Kota Palopo tetapi mengalami penurunan nilai menjadi 64,30 dengan predikat (B)
- **PDRB per Kapita (ADHB) & Persentase Penduduk Miskin dengan tujuan 2 yaitu Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat & Perekonomian Daerah yang Berkualitas** dimana PDRB per kapita (atas dasar harga berlaku) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk meng etahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Angka PDRB per Ka pita masyarakat Kota Palopo Tahun 2024 adalah 54,47 juta per kapita per tahun. Ini menunju kan bahwa setiap penduduk Kota Palopo secara rata-rata memiliki kontribusi ekonomi sebesar Rp 4,54 juta per bulan. Angka ini lebih baik atau meningkat dibandingkan tahun 2023, dimana PDRB per kapita penduduk Kota Palopo pada posisi 51,45 juta atau sekitar 4,287 juta rupiah per bulan.
- **Angka persentase penduduk miskin di Kota Palopo** terus mengalami penurunan setiap ta hunnya, dengan realisasi tahun 2024 sebesar 7,35%, yang lebih baik dari target tahun tersebut (7,58%). Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah Kota Palopo dalam menekan angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan di Kota Palopo dari tahun ke tahun menun jukkan tren yang konsisten berdasarkan data capaian. Penurunan berlanjut pada tahun 2023 dengan angka 7,69%, sementara pada tahun 2024 realisasi angka kemiskinan mencapai 7,35%, lebih rendah diband ingkan target yang ditetapkan sebesar 7,58%.Dengan capaian tersebut, able t realisasi kinerja pada tahun 2024 mencapai 103,13% dari target yang ditetapkan.
- **Tingkat Pengangguran Terbuka dengan sasaran 2 yaitu Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha** Jika dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 7,81%, sementara pada tahun 2024 turun menjadi 7,64%. Ini menunjukkan penurunan sebesar 0,17 poin persentase, melanjutkan tren positif sejak tahun 2021 (9,03%) dan 2022 (8,2%). Penurunan ini mengindikasikan keberlanjutan efektivitas kebijakan ketenaga kerjaan yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, capaian ting kat pengangguran terbuka tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif dengan pencapaian di atas target tahunan dan telah memenuhi target jangka menengah lebih cepat dari yang direncanakan.
- **Angka Pertumbuhan Ekonomi & Gini Rasio dengan sasaran 3 yaitu Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas** di beberapa daerah di Sulawesi Sela tan, termasuk Kota Palopo, selama periode 2021-2024. Kota Palopo mengalami pertumbuhan ekonomi yang dalam dua tahun terakhir menurun, dengan angka 5,41% (2021), 5,83% (2022), 4,34% (2023), dan 4,40% (2024). Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Palopo tercatat sebesar 4,4%, mengalami sedikit peningkatan dari 4,34% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi, meskipun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5,83%.
  Pada tahun 2024, **Gini Rasio** Kota Palopo diproyeksikan sebesar 0,346, sedikit lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 0,337. Dengan tingkat realisasi kinerja menca pai 97,39%, capaian ini menunjukkan bahwa meskipun ketimpangan pendapatan masih lebih tinggi dari target, secara umum telah terjadi perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Semakin tinggi angka Gini Rasio, semakin timpang distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Sebaliknya, jika angkanya rendah, berarti pendapatan lebih merata.
- **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) & Indeks Pembangunan Gender dengan sasaran 4 yaitu Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia** Kota Palopo juga mengalami peningkatan, dari 80,77 pada 2023 menjadi 81,25 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat dari sisi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Indeks kesehatan meningkat dari 83,08 menjadi 83,37, sedangkan indeks pengeluaran yang mencer minkan daya beli masyarakat juga mengalami kenaikan dari 80,18 menjadi 81,21. Peningkatan IPM ini didukung oleh meningkatnya angka rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Palopo tahun 2024 (11,16 Tahun) yang lebih baik atau meningkat dibandingkan tahun sebel umnya yakni 11,13 dan 11,09 tahun masing-maisng pada tahun 2023 dan 2022. Demikian halnya dengan angka harapan lama sekolah yang pada tahun 2024 sudah berada pada angka 15,13 Tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni 15,12 dan 15,11 Tahun. Hal lainnya yang berpengaruh tehadap IPM adalah meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Pa lopo yang pada tahun 2024 berada pada posisi 74,19 Tahun, lebih baik atau meningkat diband ingkan tahun 2023 yang berada pada angka 70,44 tahun.
- **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** Kota Palopo menunjukkan tren peningkatan yang posi tif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, realisasi IPG mencapai 97,71, melampaui target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 97,35. Dengan capaian ini, tingkat realisasi terh adap target tahun 2024 mencapai 103,69%, yang berarti pencapaian ini telah

melebihi ekspek tasi yang direncanakan. Peningkatan IPG Kota Palopo hingga 97,71 pada tahun 2024 merupakan hasil dari siner gi berbagai faktor, termasuk peningkatan layanan kesehatan perempuan, akses pendidikan yang lebih merata, pemberdayaan ekonomi perempuan, kebijakan afirmatif berbasis gender, serta stabilitas ekonomi makro daerah. Dengan tren yang terus meningkat, tantangan selan jutnya adalah memastikan keberlanjutan program-program yang mendukung kesetaraan gender dan memperkuat peran perempuan dalam berbagai aspek pembangunan di Kota Palopo.

- **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2024 dengan tujuan 3 yaitu Terwujudnya Lingkungan Layak Huni dan Berkelanjutan** mencapai angka 69,24 Poin, capaian 2024 ini telah berada di atas angka target akhir RPD yakni 62 poin atau 111,67%. Meningkatnya capaian IKLH Kota Palopo disebabkan meningkatnya nilai parameter pembentuk IKLH yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).
- **Indeks Resiko Bencana (IRB), Luas Wilayah yang Tergenang/ Terdampak Banjir, Persentase Luas Kawasan Kumuh dari Total Luas Wilayah Kota dengan sasasaran 5 yaitu Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kualitas Lingkungan Perkotaaan** Sampai pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Palopo berhasil mencapai indikator kinerja utama pada Indikator 12 penurunan Indeks Risiko Bencana dari target 195 menjadi 187,91 atau mencapai kinerja 103,77%, sementara terhadap target akhir periode RPD, penurunan Indeks Risiko Bencana telah mencapai angka 98,45%, atau memiliki predikat Tinggi. Capaian indikator kinerja utama pada Indeks Resiko Bencana sebesar 187,91 dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar 103,77 atau memiliki predikat Sangat Tinggi. Angka Indeks Resiko Bencana 2024 ini juga menunjukkan bahwa baru sekitar 98,45% target RPD 2026 yang berhasil direalisasikan dimana pada tahun 2026.
- Sampai pada tahun 2024 Pemerintah Kota Palopo berhasil menurunkan **luas wilayah yang tergenang/terdampak banjir** dari 15 hektar pada 2023 menjadi 13 hektar 2024. Angka ini dibawah target RPD untuk tahun 2024 yaitu sebesar 9 hektar atau mencapai kinerja 69,23%, sementara capaian kinerja terhadap target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 38,46%. Untuk indikator yang kedua yaitu Luas Wilayah Tergenang/Terdampak Banjir realisasi kin erja tahun 2024 yaitu 13 dan dibawah target tahun 2024 yang telah ditetapkan di RPD yaitu 9 sehingga capaian kinerjanya adalah 69,23 atau masi kurang dari target RPD.
- **Persentase Luas Kawasan Kumuh** dari Total Luas Wilayah Kota realisasi kinerja tahun 2024 yaitu 1,06% dan dibawah target tahun 2024 yang telah ditetapkan di RPD yaitu 1 sehingga capaian kinerjanya adalah 94,34 atau masih kurang dari target RPD. Masalah banjir di Kota Palopo sangat dipengaruhi oleh 4 Daerah Aliran Sungai yang hulun ya berada di luar wilayah Kota Palopo sehingga pencegahannya masih sulit dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo.

2.3 EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPD

2.3.1 EVALUASI PELAKSANAAN RPD TAHUN 2024-2026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/program strategis nasional dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten /Kota. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Evaluasi merupakan proses penentuan nilai atau pentingnya suatu kebijakan program dan kegiatan. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu program, kegiatan, sub kegiatan, kebijakan, organisasi, sektor, dan bantuan lainnya. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap suatu rencana. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

2.3.1.1. Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi bahan evaluasi yang bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan yang disesuaikan terhadapat manajemen pengelolaan output pelaksanaan kegiatan serta masalah yang di hadapi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 digambarkan evaluasi pelaksanaan kesesuaian penjabaran program RPD periode 2024-2026 kedalam RKPD Tahun 2024 dan APBD Kota Palopo Tahun 2024 yang telah dimutahirkan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 sebagai berikut :

2.3.1.2. Konsistensi Kerangka Pendanaan

Penganggaran kinerja adalah penggunaan informasi secara sistematis tentang hasil dan dampak kebijakan publik untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan menentukan tingkat pendanaan yang dialokasikan untuk kebijakan-kebijakan dalam konteks anggaran. Penganggaran kinerja dapat melayani sejumlah tujuan yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi,

salah satu wujud pengelolaan keuangan yang baik adalah mampu merencanakan kebutuhannya dalam satu tahun anggaran dan melaksanakan dengan tepat apa yang telah direncanakannya. Kerangka pendanaan berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan anggaran belanja mempunyai beberapa permasalahan yang terjadi yaitu perencanaan kegiatan dan keuangan yang kurang maksimal pada tingkat perangkat daerah, sebagaimana dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.129

Konsistensi Kerangka Pendana RPD, RKPD dan APBD Kota Palopo Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	KERANGKA PENDANAAN DAN ANGGARAN OPD TAHUN 2024					SELISIH KERANGKA PENDANAAN DAN ANGGARAN					
		RPD 2024-2026	RKPD TAHUN 2024		APBD TAHUN 2024		RKPD & RPD		APBD & RKPD		APBD & RPD	
			POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4-3	9 = 5-3	10 = 6 -4	11 = 7-5	12 = 6 - 3	13 = 7 - 3
1	Dinas Pendidikan	193,755,711,008.97	193,755,711,009.00	200,116,609,107.00	200,135,854,863.00	197,768,034,502.00	0.03	6,360,898,098.03	6,380,143,854.00	(2,348,574,605.00)	6,380,143,854.03	4,012,323,493.03
2	Dinas Kesehatan	150,567,466,627.50	150,567,466,628.00	174,485,870,274.00	160,668,604,869.00	177,977,881,116.00	0.50	23,918,403,646.50	10,101,138,241.00	3,492,010,842.00	10,101,138,241.50	27,410,414,488.50
3	RSUD Sawerigading	103,244,258,461.20	103,244,258,461.20	130,890,700,617.00	120,890,700,617.00	136,801,877,311.00	-	27,646,442,155.80	17,646,442,155.80	5,911,176,694.00	17,646,442,155.80	33,557,618,849.80
4	Dinas PUPR	209,226,682,628.92	209,226,682,628.92	83,109,701,560.00	85,034,894,700.00	86,162,568,200.00	-	(126,116,981,068.92)	(124,191,787,928.92)	3,052,866,640.00	(124,191,787,928.92)	(123,064,114,428.92)
5	Dinas Perumahan & Pemukiman	5,554,540,040.00	5,554,540,041.00	7,363,388,000.00	7,713,388,000.00	6,018,966,000.00	1.00	1,808,847,960.00	2,158,847,959.00	(1,344,422,000.00)	2,158,847,960.00	464,425,960.00
6	Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat	16,120,742,075.00	16,120,742,075.00	55,661,878,242.00	26,451,615,490.00	40,487,775,874.00	-	39,541,136,167.00	10,330,873,415.00	(15,174,102,368.00)	10,330,873,415.00	24,367,033,799.00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5,505,194,700.00	5,505,194,700.00	5,358,898,404.00	5,648,607,000.00	5,581,650,000.00	-	(146,296,296.00)	143,412,300.00	222,751,596.00	143,412,300.00	76,455,300.00
8	Satuan Polisi Pamong praja	7,334,364,520.00	7,334,364,520.00	7,162,440,463.00	7,208,170,540.00	7,241,401,175.00	-	(171,924,057.00)	(126,193,980.00)	78,960,712.00	(126,193,980.00)	(92,963,345.00)
9	Badan Penanggulangan Bencana	3,664,846,350.00	3,664,846,350.00	4,143,773,110.00	4,199,617,000.00	4,191,805,110.00	-	478,926,760.00	534,770,650.00	48,032,000.00	534,770,650.00	526,958,760.00
10	Dinas Sosial	4,478,524,380.00	4,478,524,380.00	5,343,076,000.00	4,664,660,000.00	4,578,953,000.00	-	864,551,620.00	186,135,620.00	(764,123,000.00)	186,135,620.00	100,428,620.00
11	Dinas Tenaga Kerja	2,949,796,080.00	2,949,796,080.00	3,434,884,291.00	3,398,764,000.00	2,991,797,271.00	-	485,088,211.00	448,967,920.00	(443,087,020.00)	448,967,920.00	42,001,191.00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	2,787,383,610.00	2,811,383,610.00	3,955,290,500.00	3,663,839,000.00	4,024,740,000.00	24,000,000.00	1,167,906,890.00	852,455,390.00	69,449,500.00	876,455,390.00	1,237,356,390.00
13	Dinas Ketahanan Pangan	2,366,283,150.00	2,366,283,150.00	2,319,699,138.00	2,625,087,000.00	2,362,014,000.00	-	(46,584,012.00)	258,803,850.00	42,314,862.00	258,803,850.00	(4,269,150.00)
14	Dinas Pertanahan	10,006,974,190.00	10,006,974,190.00	7,640,282,380.00	7,607,419,000.00	5,263,472,000.00	-	(2,366,691,810.00)	(2,399,555,190.00)	(2,376,810,380.00)	(2,399,555,190.00)	(4,743,502,190.00)
15	Dinas Lingkungan Hidup	43,911,604,683.40	43,911,604,683.00	35,732,543,000.00	36,202,113,000.00	36,379,860,000.00	(0.40)	(8,179,061,683.40)	(7,709,491,683.00)	647,317,000.00	(7,709,491,683.40)	(7,531,744,683.40)
16	Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil	3,430,937,580.00	3,430,937,581.00	3,934,750,806.00	3,792,489,000.00	3,975,329,000.00	1.00	503,813,226.00	361,551,419.00	40,578,194.00	361,551,420.00	544,391,420.00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	17,782,320,370.00	17,782,320,371.00	9,827,272,446.00	10,066,607,000.00	10,024,377,000.00	1.00	(7,955,047,924.00)	(7,715,713,371.00)	197,104,554.00	(7,715,713,370.00)	(7,757,943,370.00)
18	Dinas Perhubungan	7,925,744,246.60										312,599,753.40

NO	PERANGKAT DAERAH	KERANGKA PENDANAAN DAN ANGGARAN OPD TAHUN 2024					SELISIH KERANGKA PENDANAAN DAN ANGGARAN					
		RPD 2024-2026	RKPD TAHUN 2024		APBD TAHUN 2024		RKPD & RPD		APBD & RKPD		APBD & RPD	
			POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4-3	9 = 5-3	10 = 6 -4	11 = 7-5	12 = 6 - 3	13 = 7 - 3
			7,925,744,247.00	7,776,804,000.00	8,151,647,490.00	8,238,344,000.00	0.40	(148,940,246.60)	225,903,243.00	461,540,000.00	225,903,243.40	
19	Dinas Komunikasi & Informatika	5,126,338,800.00	5,126,338,800.00	5,893,317,108.00	10,128,286,000.00	6,282,748,000.00	-	766,978,308.00	5,001,947,200.00	389,430,892.00	5,001,947,200.00	1,156,409,200.00
20	Dinas Koperasi	3,546,494,820.00	3,546,494,820.00	2,978,056,224.00	3,311,109,000.00	3,026,867,000.00	-	(568,438,596.00)	(235,385,820.00)	48,810,776.00	(235,385,820.00)	(519,627,820.00)
21	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan satu pintu	6,015,977,550.00	6,015,977,550.00	5,621,850,000.00	5,846,850,000.00	6,511,890,000.00	-	(394,127,550.00)	(169,127,550.00)	890,040,000.00	(169,127,550.00)	495,912,450.00
22	Dinas Pemuda & Olahraga	5,016,829,950.00	5,016,829,950.00	4,689,460,192.00	4,821,046,000.00	4,886,950,000.00	-	(327,369,758.00)	(195,783,950.00)	197,489,808.00	(195,783,950.00)	(129,879,950.00)
23	Dinas Persandian & Statistik	2,104,907,310.00	2,104,907,309.00	2,397,408,270.00	2,657,924,000.00	2,419,862,000.00	(1.00)	292,500,960.00	553,016,691.00	22,453,730.00	553,016,690.00	314,954,690.00
24	Dinas Kebudayaan	2,812,016,790.00	2,812,016,790.00	2,927,037,000.00	2,945,462,000.00	2,987,947,000.00	-	115,020,210.00	133,445,210.00	60,910,000.00	133,445,210.00	175,930,210.00
25	Dinas Perpustakaan	2,595,883,950.00	2,595,883,950.00	2,665,615,981.00	2,566,763,000.00	2,719,180,000.00	-	69,732,031.00	(29,120,950.00)	53,564,019.00	(29,120,950.00)	123,296,050.00
26	Dinas Kearsipan	1,840,543,660.00	1,840,543,661.00	2,182,031,000.00	2,207,031,000.00	2,209,406,000.00	1.00	341,487,340.00	366,487,339.00	27,375,000.00	366,487,340.00	368,862,340.00
27	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif	9,695,599,700.00	9,695,599,700.00	3,951,767,760.00	4,351,644,000.00	3,986,991,000.00	-	(5,743,831,940.00)	(5,343,955,700.00)	35,223,240.00	(5,343,955,700.00)	(5,708,608,700.00)
28	Dinas Pertanian, p, Peternakan & Perkebunan	19,556,373,870.00	19,556,373,870.00	20,708,150,032.00	21,541,379,300.00	22,157,944,000.00	-	1,151,776,162.00	1,985,005,430.00	1,449,793,968.00	1,985,005,430.00	2,601,570,130.00
29	Dinas Perdagangan	5,497,719,480.00	5,497,719,479.00	6,112,050,822.00	6,490,103,000.00	6,166,644,110.00	(1.00)	614,331,342.00	992,383,521.00	54,593,288.00	992,383,520.00	668,924,630.00
30	Dinas Perindustrian	2,442,630,960.00	2,442,630,960.00	2,633,809,104.00	2,682,718,000.00	2,665,408,000.00	-	191,178,144.00	240,087,040.00	31,598,896.00	240,087,040.00	222,777,040.00
31	Dinas Transmigrasi	2,151,589,770.00	2,151,589,770.00	2,648,370,000.00	2,648,538,000.00	2,522,402,000.00	-	496,780,230.00	496,948,230.00	(125,968,000.00)	496,948,230.00	370,812,230.00
32	Dinas Perikanan	5,651,960,490.00	5,651,960,490.00	5,800,828,500.00	5,756,871,000.00	5,519,203,000.00	-	148,868,010.00	104,910,510.00	(281,625,500.00)	104,910,510.00	(132,757,490.00)
33	Bappeda	11,379,039,560.00	11,379,039,562.00	5,517,511,507.00	5,614,840,000.00	5,607,894,510.00	2.00	(5,861,528,053.00)	(5,764,199,562.00)	90,383,003.00	(5,764,199,560.00)	(5,771,145,050.00)
34	BPKAD	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,965,131,000.00	25,965,131,000.00	20,327,221,682.00	-	965,131,000.00	965,131,000.00	(5,637,909,318.00)	965,131,000.00	(4,672,778,318.00)
35	BAPENDA	10,463,287,230.00	10,463,287,230.00	11,548,710,000.00	11,548,717,000.00	12,309,369,200.00	-	1,085,422,770.00	1,085,429,770.00	760,659,200.00	1,085,429,770.00	1,846,081,970.00
36	BKPSDM	9,531,988,290.00	9,531,988,291.00	6,620,053,680.00	6,546,415,000.00	6,707,958,000.00	1.00	(2,911,934,610.00)	(2,985,573,291.00)	87,904,320.00	(2,985,573,290.00)	(2,824,030,290.00)
37	Dinas Penelitian & Pengembangan	3,211,793,640.00	3,211,793,640.00	2,561,016,000.00	2,599,026,000.00	2,460,944,000.00	-	(650,777,640.00)	(612,767,640.00)	(100,072,000.00)	(612,767,640.00)	(750,849,640.00)
38	Inspektorat	7,965,271,710.00	7,965,271,710.00	8,363,772,560.00	8,489,195,000.00	8,514,486,000.00	-	398,500,850.00	523,923,290.00	150,713,440.00	523,923,290.00	549,214,290.00
39	Sekretariat DPRD	26,853,060,960.00	26,853,060,961.00	28,007,513,000.00	28,003,344,000.00	28,945,619,000.00	1.00	1,154,452,040.00	1,150,283,039.00	938,106,000.00	1,150,283,040.00	2,092,558,040.00

NO	PERANGKAT DAERAH	KERANGKA PENDANAAN DAN ANGGARAN OPD TAHUN 2024					SELISIH KERANGKA PENDANAAN DAN ANGGARAN					
			RKPD TAHUN 2024		APBD TAHUN 2024		RKPD & RPD		APBD & RKPD		APBD & RPD	
		RPD 2024-2026	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN	POKOK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4-3	9 = 5-3	10 = 6 -4	11 = 7-5	12 = 6 - 3	13 = 7 - 3
40	Sekretariat Daerah	57,676,577,810.00	57,676,577,810.00	44,872,099,620.00	46,201,061,000.00	42,977,376,920.00	-	(12,804,478,190.00)	(11,475,516,810.00)	(1,894,722,700.00)	(11,475,516,810.00)	(14,699,200,890.00)
41	Kecamatan Wara Selatan	4,459,293,630.00	4,459,293,630.00	5,790,755,000.00	5,815,755,000.00	5,832,499,000.00	-	1,331,461,370.00	1,356,461,370.00	41,744,000.00	1,356,461,370.00	1,373,205,370.00
42	Kecamatan Wara Timur	7,077,235,065.00	7,077,235,065.00	10,377,552,288.00	10,377,552,288.00	10,047,893,288.00	-	3,300,317,223.00	3,300,317,223.00	(329,659,000.00)	3,300,317,223.00	2,970,658,223.00
43	Kecamatan Wara Utara	5,242,110,390.00	5,242,110,390.00	7,136,651,956.00	7,152,154,000.00	7,201,364,000.00	-	1,894,541,566.00	1,910,043,610.00	64,712,044.00	1,910,043,610.00	1,959,253,610.00
44	Kecamatan Wara barat	4,593,981,150.00	4,593,981,150.00	5,528,450,832.00	6,137,686,000.00	5,579,567,000.00	-	934,469,682.00	1,543,704,850.00	51,116,168.00	1,543,704,850.00	985,585,850.00
45	Kecamatan Bara	5,831,958,330.00	5,831,958,329.00	7,886,448,390.00	8,313,198,000.00	7,968,493,000.00	(1.00)	2,054,490,060.00	2,481,239,671.00	82,044,610.00	2,481,239,670.00	2,136,534,670.00
46	Kecamatan Wara	6,123,938,040.00	6,123,938,040.00	5,721,467,000.00	9,133,111,000.00	8,605,026,000.00	-	(402,471,040.00)	3,009,172,960.00	2,883,559,000.00	3,009,172,960.00	2,481,087,960.00
47	Kecamatan Mungkajang	4,277,314,800.00	4,277,314,800.00	4,886,448,390.00	5,324,310,000.00	5,080,259,000.00	-	609,133,590.00	1,046,995,200.00	193,810,610.00	1,046,995,200.00	802,944,200.00
48	Kecamatan Sendana	4,353,657,660.00	4,353,657,660.00	5,180,690,700.00	5,422,244,000.00	5,228,394,000.00	-	827,033,040.00	1,068,586,340.00	47,703,300.00	1,068,586,340.00	874,736,340.00
49	Kecamatan Telluwanua	6,240,547,170.00	6,240,547,170.00	7,708,884,996.00	8,456,097,000.00	7,776,370,000.00	-	1,468,337,826.00	2,215,549,830.00	67,485,004.00	2,215,549,830.00	1,535,822,830.00
Jumlah		1,064,949,297,236.59	1,064,973,297,242.12	1,013,140,771,250.00	977,179,639,157.00	1,005,305,022,269.00	24,000,005.53	(51,808,525,986.59)	(87,793,658,085.12)	(7,835,748,981.00)	(87,769,658,079.59)	(59,644,274,967.59)

Sumber data : RPD tahun 2024-2026, RKPD tahun 2024, APBD 2024

Berdasarkan tabel konsistensi kerangka pendanaan dapat di gambarkan sebagai berikut :

a. RKPD 2024 terhadap RPD 2024-2026

- Terdapat perbedaan jumlah pagu pada RKPD 2024 dengan RPD 2024-2026 di mana pada pagu RKPD 2024 sebesar Rp.1,064,973,297,242.12 sedangkan pada RPD tahun 2024-2026 sebesar Rp. 1,064,949,297,236.59 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 24,000,005.53 atau 105.42%.
- Terdapat perbedaan jumlah pagu pada RKPD peurubahan 2024 dengan RPD 2024-2026 di mana pagu RKPD perubahan sebesar Rp. Rp. 1,013,140,771,250.00 sedangkan pada RPD tahun 2024-2026 sebesar Rp. Rp. 1,064,949,297,236.59 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 51,808,525,986.59 atau 1.05%.

a. APBD 2024 terhadap RKPD 2024

- Terdapat perbedaan jumlah pagu pada APBD tahun 2024 terhadap RKPD tahun 2024 di mana pada pagu APBD tahun 2024 sebesar Rp. 977,179,639,157.00 sedangkan pada RKPD tahun 2024 sebesar Rp. 1,064,973,297,242.12 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 87,793,658,085.12 atau 105.52%.
- Terdapat perbedaan jumlah pagu pada APBD perubahan tahun 2024 terhadapat RKPD perubahan tahun 2024 dimana jumlah pagu pada APBD perubahan sebesar Rp. 1,005,305,022,269.00 sedangkan pada RPD sebesar Rp. 1,013,140,771,250.00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 7,835,748,981.00 atau 100.30%.

b. APBD 2024 terhadap RPD 2024-2026

- Terdapat perbedaan jumlah pagu APBD tahun 2024 terhadap RPD tahun 2024-2026 dimana pagu APBD tahun 2024 sebesar Rp. 977,179,639,157.00 sedangkan pagu pada RPD sebesar Rp. 1,064,949,297,236.59 dan terjadi selisih sebesar Rp. 87,769,658,079.59 atau 105.51%.
- Terdapat perbedaan jumlah pagu APBD perubahan tahun 2024 terhadap RPD tahun 2024-2026 dimana pagu APBD perubahan sebesar Rp. 1,005,305,022,269.00 sedangkan jumlah pagu pada RPD sebesar Rp. 1,064,949,297,236.59 terjadi selisih sebesar Rp. 105.48%.

Tabel. 130
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD
sampai dengan Tahun 2025 Kota Palopo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**																	
1.01.00	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan																	
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	465,900,300,554	88.69	133,779,959,955	100	158,294,540,708	95.78	150,395,677,317	95.78	95.01	184.47	284,175,637,272	184.47	60.99	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen			6	4,049,000	6	7,168,000	6	7,168,000	100.00	100.00	12.00	11,217,000			Dinas Pendidikan
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan keuangan	laporan			12	132,987,898,734	12	157,205,629,716	12	149,366,363,175	97.00	95.01	23.64	282,354,261,909			Dinas Pendidikan
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	laporan			1	19,317,000	1	30,945,100	1	30,745,100	100.00	99.35	2.00	50,062,100			Dinas Pendidikan
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	orang			174	32,127,650	174	65,157,000	163	60,466,933	93.51	92.80	336.70	92,594,583			Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	jenis			1.4	268,342,294	2	252,317,000	2	249,247,033	100.00	98.78	3.40	517,589,327			Dinas Pendidikan
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	unit			0	-	3	182,816,000	3	143,065,000	83.33	78.26	2.50	143,065,000			Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	jenis			3	403,258,221	3	431,707,892	3	431,035,276	100.00	99.84	6.00	834,293,497			Dinas Pendidikan
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibiayai	unit			71.19	64,967,056	138	118,800,000	128	107,586,800	92.75	90.56	199.19	172,553,856			Dinas Pendidikan
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Warga Negara usia 7-15tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	120,729,671,359	65.04	38,588,811,786	100	39,437,753,794	83.49	38,666,027,317	83.49	98.04	148.53	77,254,839,103	148.53	63.99	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Pendidikan Dasar yang Ditangani (Sekolah)	Sekolah			50.05	18,512,474,049	81	23,154,369,694	73.5	22,790,689,755	90.74	98.43	123.55	41,303,163,804			Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Pendidikan Menengah Pertama yang Ditangani (Sekolah)	Sekolah			19.83	17,172,721,875	25	12,995,720,700	22.45	12,777,979,770	89.80	98.32	42.28	29,950,701,645			Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga PAUD yang ditangani (Lembaga)	Sekolah			81	2,490,070,000	122	2,643,636,500	78.4	2,563,018,400	64.26	96.95	159.40	5,053,088,400			Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang ditangani (Lembaga)	Sekolah			7.25	413,545,862	15	644,026,900	13.4	534,339,392	89.33	82.97	20.65	947,885,254			Dinas Pendidikan
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Lokal (%)	%	100	59,191,013	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Pendidikan
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	Sekolah			0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Pendidikan
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan (Sekolah)	Sekolah			0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Pendidikan
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Sekolah yang Memenuhi Rasio Ideal Guru dan Siswa	%	100	35,444,605	75	14,200,000	100	35,740,000	100	35,740,000	100.00	100.00	175.00	49,940,000	175.00	140.90	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Pendidikan PAUD,Dasar dan NonFormal yang memenuhi rasio guru ideal	laporan			0.75	14,200,000	1	35,740,000	1	35,740,000	100.00	100.00	1.75	49,940,000			Dinas Pendidikan
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar yang berisin	%	100	22,485,000	50	5,000,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	50.00	5,000,000	50.00	22.24	Dinas Pendidikan
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Lembaga Pendidikan yang Berizin	laporan			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Pendidikan
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah rekomendasi izin PAUDNI yang dikeluarkan	Sekolah			127	5,000,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	127.00	5,000,000			Dinas Pendidikan
0:28	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	159,433,703,138	100	55,661,865,801	100	65,971,188,577	96	63,298,229,797	96.00	95.95	196.00	118,960,095,598	196.00	74.61	Dinas Kesehatan
1.02.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang di sediakan	dokumen			6	1,533,750	6	3,500,000	6	3,500,000	100.00	100.00	12.00	5,033,750			Dinas Kesehatan
1.02.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan yang Dikelola	jenis			3	53,480,033,109	3	64,161,058,457	2.4	61,659,155,155	80.00	96.10	5.40	115,139,188,264			Dinas Kesehatan
1.02.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Sub kegiatan Administrasi Keuangan yang dikelola	jenis			3	58,000,000	12	69,600,000	12	69,600,000	100.00	100.00	15.00	127,600,000			Dinas Kesehatan
1.02.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang telah Mengikuti Bimtek	orang			8	27,990,000	5	20,892,290	4.1	16,940,000	82.00	81.08	12.10	44,930,000			Dinas Kesehatan
1.02.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumalah Sub Kegiatan Administrasi umum yang dikelola	jenis			2	363,951,878	4	587,934,230	1.9	567,873,832	47.50	96.59	3.90	931,825,710			Dinas Kesehatan
1.02.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Milik Dinas yang Tersedia	Unit			74	90,771,360	70	11,546,000	67.3	11,101,000	96.14	96.15	141.30	101,872,360			Dinas Kesehatan
1.02.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang Dikelola	jasa			3	1,561,818,604	3	941,663,600	2.6	838,327,848	86.67	89.03	5.60	2,400,146,452			Dinas Kesehatan
1.02.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Randis yang BerfungsiBaik dan Layak Jalan	Unit/Tahun			60	77,767,100	60	174,994,000	35.3	131,731,962	58.83	75.28	95.30	209,499,062			Dinas Kesehatan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Universal Helath Coverage (%)	%	100	291,360,413,604	100	96,224,495,698	100	110,492,336,045	24.91	88,700,156,869	24.91	80.28	124.91	184,924,652,567	124.91	63.47	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan (RS dan puskesmas/jaringannya) yang berfungsi baik dan terakreditasi	Puskesmas			12	20,432,638,036	12	4,788,383,320	2.05	4,512,559,266	17.08	94.24	14.05	24,945,197,302			Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah jenis layanan kesehatan yang dilaksanakan	puskemas			12	75,728,439,062	12	105,510,663,725	10.4	84,075,303,803	86.67	79.68	22.40	159,803,742,865			Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi kesehatan yang di kelola	sistem			1	63,418,600	1	71,774,000	0	68,613,800	-	95.60	1.00	132,032,400			Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang diawasi	laporan			0	-	8	121,515,000	2.4	43,680,000	30.00	35.95	2.40	43,680,000			Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan	%	100	1,016,013,956	5	230,334,770	100	1,116,793,894	42.48	647,234,000	42.48	57.95	47.48	877,568,770	47.48	86.37	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen			1	230,334,770	3	279,145,000	0.7	127,075,000	23.33	45.52	1.70	357,409,770			Dinas Kesehatan
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan mutu dan kompetensi	orang			0	-	12	837,648,894	7.5	520,159,000	62.50	62.10	7.50	520,159,000			Dinas Kesehatan
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat dan Alat Kesehatan, serta Usaha TTM & TTU dan Usaha Lain yang Memenuhi Syarat Kesehatan (%)	%	100	1,369,687,266	29.26	351,553,000	35	397,562,600	19.8	207,347,028	56.57	52.15	49.06	558,900,028	49.06	40.80	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotik,Toko Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Berizin	buah			23	351,553,000	121	95,161,600	102.9	77,355,528	85.04	81.29	125.90	428,908,528			Dinas Kesehatan
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Usaha TTM & TTU yang Diberikan Sertifikat terkait Aspek Kesehatan	usaha/tahun			0	-	486	137,387,000	156.6	43,976,000	32.22	32.01	156.60	43,976,000			Dinas Kesehatan
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Usaha TPM yang memperoleh Sertifikat Laik Higiene	usaha/tahun			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Kesehatan
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Usaha yang Produknya di Periksa	usaha			0	-	20	165,014,000	10.4	86,015,500	52.00	52.13	10.40	86,015,500			Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	%	100	1,349,100,000	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Kesehatan
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang melaksanakan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat	puskesmas			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Kesehatan
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Upaya Promotif Preventif	puskesmas			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang melaksanakan Upaya UKBM	puskesmas			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Kesehatan
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	87,333,092,098	100	26,213,818,394	100	29,799,847,000	96	28,522,627,080	96.00	95.71	196.00	54,736,445,474	196.00	62.68	RSUD Sawerigading
1.02.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	laporan			12	26,213,818,394	12	29,799,847,000	11.5	28,522,627,080	95.83	95.71	23.50	54,736,445,474			RSUD Sawerigading

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit	nilai	85	##########	72	84,886,363,233	100	107,002,030,311	91.31	93,458,881,829	91.31	87.34	163.31	178,345,245,062	192.13	79.70	RSUD Sawerigading
1.02.02 .2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang di benahi (Jenis)	unit			0	-	3	3,215,608,617	2.9	3,069,456,519	96.67	95.45	2.90	3,069,456,519			RSUD Sawerigading
1.02.02 .2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan yang di fasilitasi	unit			21.33	84,886,363,233	22	103,786,421,694	19.2	90,389,425,310	87.27	87.09	40.53	175,275,788,543			RSUD Sawerigading
1.03.00	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	37,316,729,584	100	80,243,740,412	100	11,996,905,829	88.2	11,235,588,509	88.20	93.65	188.20	91,479,328,921	188.20	245.14	Dinas PUPR
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	Dokumen			10	33,112,750	5	7,621,000	5	7,615,650	100.00	99.93	15.00	40,728,400			Dinas PUPR
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan penatausahaan keuangan	laporan			85	17,830,951,858	5	6,498,862,000	5	6,073,173,632	100.00	93.45	90.00	23,904,125,490			Dinas PUPR
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	laporan			65	35,580,750	1	16,030,000	1	16,029,800	100.00	100.00	66.00	51,610,550			Dinas PUPR
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	orang			152.5	85,197,120	85	46,495,000	85	46,406,560	100.00	99.81	237.50	131,603,680			Dinas PUPR
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	jenis			4.83	1,424,866,191	5	345,995,528	4.9	335,107,262	98.00	96.85	9.73	1,759,973,453			Dinas PUPR
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit			8	58,946,020,898	33	4,630,039,145	8	4,354,608,922	24.24	94.05	16.00	63,300,629,820			Dinas PUPR
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	jenis			3	1,392,969,103	3	275,613,156	3	257,470,927	100.00	93.42	6.00	1,650,440,030			Dinas PUPR
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang Pemeliharaannya dibiayai	unit			67.7	495,041,742	134	176,250,000	65.2	145,175,756	48.66	82.37	132.90	640,217,498			Dinas PUPR
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luas Wilayah Rawan Banjir dan Kawasan Produktif yang Sarana Prasarana Sumber Daya Airnya Ditangani	ha	85	66,587,079,000	32.8	15,881,799,672	75	30,774,817,272	75	30,319,073,874	100.00	98.52	107.80	46,200,873,546	126.82	69.38	Dinas PUPR
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Lokasi Banjir / Genangan yang ditangani	Ha/M3			10.8	14,608,527,572	25	30,588,817,272	25	30,138,091,874	100.00	98.53	35.80	44,746,619,446			Dinas PUPR
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%			38	1,273,272,100	6.5	186,000,000	6500	180,982,000	100,000.00	97.30	6,538.00	1,454,254,100			Dinas PUPR
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Telah Memiliki Akses Terhadap Air Minum	%	100	1,798,800,000	100	12,324,721,038	100	563,500,000	42.1	237,082,694	42.10	42.07	142.10	12,561,803,732	142.10	698.34	Dinas PUPR
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Rumah Tangga/KK yang telah memiliki akses air minum	KK/Tahun			1900	12,324,721,038	100	563,500,000	42.1	237,082,694	42.10	42.07	1,942.10	12,561,803,732			Dinas PUPR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
				4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
	(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																	
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sarana Prasarana persampahan yang berfungsi dengan baik	%	55	899,400,000	4.9	299,367,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4.90	299,367,000	8.91	33.29	Dinas PUPR
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Persampahan yang terbangun	Unit			6	299,367,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	6.00	299,367,000			Dinas PUPR
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	100	599,600,000	100	4,015,454,230	100	359,440,000	43.45	150,031,844	43.45	41.74	143.45	4,165,486,074	143.45	694.71	Dinas PUPR
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%			98	4,015,454,230	100	359,440,000	43.45	150,031,844	43.45	41.74	141.45	4,165,486,074			Dinas PUPR
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	50	3,522,650,000	10	8,821,411,538	48	1,603,700,000	45.4	1,506,338,700	94.58	93.93	55.40	10,327,750,238	110.80	293.18	Dinas PUPR
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang di bangun	M			20000	8,821,411,538	2.4	1,603,700,000	2270	1,506,338,700	94,583.33	93.93	######	10,327,750,238			Dinas PUPR
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Luas Permukiman yang Infrastrukturnya dikembangka	Ha	0.03	2,398,400,000	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas PUPR
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Luas Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang terselenggara	m2/Tahun			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas PUPR
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung berizi Yang Terbangun	%	90	332,618,571,455	11.2	180,873,367,858	70	17,902,453,199	70	17,902,406,749	100.00	100.00	81.20	198,775,774,607	90.22	59.76	Dinas PUPR
1.03.082.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung berizin yang dibangun	Unit			70	180,873,367,858	1000	17,902,453,199	500	17,902,406,749	50.00	100.00	570.00	198,775,774,607			Dinas PUPR
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rasio Luas ruang terbuka Hijau yang tertata	%	4.50	466,211,107,959	0	-	1.5	2,000,000,000	0.7	910,815,500	46.67	45.54	0.70	910,815,500	15.56	0.20	Dinas PUPR
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH yang terselenggara	m2			0	-	83	2,000,000,000	37.8	910,815,500	45.54	45.54	37.80	910,815,500			Dinas PUPR
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proprosi Panjang Jalan yang Berkondisi Baik	%	70	##########	44.73	133,790,776,690	64	20,641,311,000	59.1	19,849,184,402	92.34	96.16	103.83	153,639,961,092	148.33	65.74	Dinas PUPR
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang ditangani	Km			10.08	133,790,776,690	468.26	20,641,311,000	432.3	19,849,184,402	92.32	96.16	442.38	153,639,961,092			Dinas PUPR
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetens	%	80	216,155,800	127.55	190,883,759	60	151,760,000	43.1	126,774,599	71.83	83.54	170.65	317,658,358	213.31	146.96	Dinas PUPR
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Kali/Tahun			18.86	187,999,759	1	117,225,000	1	111,702,849	100.00	95.29	19.86	299,702,608			Dinas PUPR
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruks	Jumlah Kegiatan Pengawasan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Kali/Tahun			2	2,884,000	1	34,535,000	1	15,071,750	100.00	43.64	3.00	17,955,750			Dinas PUPR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	1,349,100,000	95	1,101,124,588	100	168,680,900	41	168,309,115	41.00	99.78	136.00	1,269,433,703	136.00	94.09	Dinas PUPR
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Rinci tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen			2.8	1,018,681,338	1	161,436,900	1	161,099,115	100.00	99.79	3.80	1,179,780,453			Dinas PUPR
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan	Kali			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas PUPR
1.03.122.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan	Dokumen			2	82,443,250	2	7,244,000	2	7,210,000	100.00	99.53	4.00	89,653,250			Dinas PUPR
1.04.00	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																	
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	11,226,344,677	100	12,587,261,468	100	3,323,959,900	98.42	3,177,861,400	98.42	95.60	198.42	15,765,122,868	198.42	140.43	Dinas Perumahan & Pemukiman
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen			10	21,353,250	8	14,468,400	7	14,069,780	87.50	97.24	17.00	35,423,030			Dinas Perumahan & Pemukiman
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Penatausahaan Keuangan	Laporan			38	10,183,253,341	3	2,770,194,000	2.9	2,634,849,965	96.67	95.11	40.90	12,818,103,306			Dinas Perumahan & Pemukiman
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Aset	Laporan			3	15,663,000	3	7,937,500	2.9	7,499,000	96.67	94.48	5.90	23,162,000			Dinas Perumahan & Pemukiman
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	Orang			30	65,780,580	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	30.00	65,780,580			Dinas Perumahan & Pemukiman
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sub Kegiatan Administrasi Umum yang akan ditatakelolakan	Jenis			3.9	1,117,337,302	4	290,799,480	4	289,185,971	100.00	99.45	7.90	1,406,523,273			Dinas Perumahan & Pemukiman
1.04.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Perumahan & Pemukiman
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Daerah yang dibiayai	Surat/Jenis/Buah			3	845,192,499	3	200,026,520	3	191,965,457	100.00	95.97	6.00	1,037,157,956			Dinas Perumahan & Pemukiman
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pemeliharaannya Di biayai	Unit			54.9	122,601,496	47	40,534,000	45.9	40,291,227	97.66	99.40	100.80	162,892,723			Dinas Perumahan & Pemukiman
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi serta fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak program pemerintah	%	100	887,712,147	50	398,369,480	100	130,209,700	81	96,618,260	81.00	74.20	131.00	494,987,740	131.00	55.76	Dinas Perumahan & Pemukiman
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi	Dokumen			1	196,064,920	3	3,919,500	3	2,759,260	96.67	70.40	3.90	198,824,180			Dinas Perumahan & Pemukiman
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi dan pembentukan Tim				0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Perumahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
	Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyediaan Rehab Rumah Korban Bencana																& Pemukiman
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang Tertangani	Unit			0	-	10	53,800,200	4.5	22,550,000	45.00	41.91	4.50	22,550,000			Dinas Perumahan & Pemukiman
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Meningkatnya Jumlah Kawasan RUSUN dan RUSUS yang Pengelolanya di bina	lokasi			4	202,304,560	4	72,490,000	4	71,309,000	100.00	98.37	8.00	273,613,560			Dinas Perumahan & Pemukiman
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani	%	100	1,354,605,078	98.5	1,176,237,450	55	747,337,200	54	731,569,165	98.18	97.89	152.50	1,907,806,615	152.50	140.84	Dinas Perumahan & Pemukiman
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tersedianya Dokumen Kebijakan PKP	Dokumen			5	33,421,600	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	5.00	33,421,600			Dinas Perumahan & Pemukiman
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Meningkatnya Luas Kawasan Kumuh yang tertangan	Ha			104	1,142,815,850	233.93	747,337,200	231.6	731,569,165	99.00	97.89	335.60	1,874,385,015			Dinas Perumahan & Pemukiman
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan pemukiman kumuh tertangani	%	15.00	599,600,000	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Perumahan & Pemukiman
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni yang di Rehab	Unit			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Perumahan & Pemukiman
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung Dengan PSU	%	46.00	1,195,143,706	90.4	981,785,660	41	1,814,459,400	38.3	1,789,481,697	93.41	98.62	128.70	2,771,267,357	279.78	231.88	Dinas Perumahan & Pemukiman
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	Unit			34.5	981,785,660	35	1,814,459,400	32.7	1,789,481,697	93.43	98.62	67.20	2,771,267,357			Dinas Perumahan & Pemukiman
1.04.06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang Tersertifikasi dan Teregistrasi	%	10.00	43,171,200	110	30,662,000	10	2,999,800	9.8	2,932,900	98.00	97.77	119.80	33,594,900	1,198.00	77.82	Dinas Perumahan & Pemukiman
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Meningkatnya Jumlah Pengembang Perumahan yang Tersertfikasi dan Teregistrasi	Orang			72	30,662,000	10	2,999,800	9.8	2,932,900	98.00	97.77	81.80	33,594,900			Dinas Perumahan & Pemukiman
1.05.00	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				108,985,053,514													
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	11,918,454,968	100	16,777,792,422	100	4,435,336,541	99.83	4,201,927,147	99.83	94.74	199.83	20,979,719,569	199.83	176.03	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Kinerja yang disusun	Dokumen			10	3,827,500	17	1,384,800	17	1,384,800	100.00	100.00	27.00	5,212,300			DINAS SATUAN POLISI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
																		PAMONG PRAJA
1.05.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	Laporan			7	10,591,983,028	111	4,094,354,600	111	3,864,624,750	100.00	94.39	118.00	14,456,607,778			DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	Laporan			283	14,400,000	12	7,200,000	12	7,200,000	100.00	100.00	295.00	21,600,000			DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01 .2.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	Laporan			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01 .2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	Jenis			3	440,577,494	4	125,254,000	4	124,935,412	100.00	99.75	7.00	565,512,906			DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah peralatan yang dibutuhkan	Laporan			4	16,300,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4.00	16,300,000			DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01 .2.07	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	Jenis			3	412,079,410	4	136,593,141	4	134,517,665	100.00	98.48	7.00	546,597,075			DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01 .2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	unit			18	247,570,784	22	70,550,000	32	69,264,520	145.45	98.18	50.00	316,835,304			DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Total Persentase Rata-rata Gangguan Trantibum dan Perda/Perkada yang dapat diselesaikan	%	100	7,263,792,336	98.65	8,017,368,632	5014	2,806,064,634	5014	2,803,770,486	100.00	99.92	5,112.65	10,821,139,118	5,112.65	148.97	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Orang Yang melaksanakan Kegiatan	orang			5	7,795,644,606	4913	2,763,426,999	4913	2,761,132,851	100.00	99.92	4,918.00	10,556,777,457			DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02	Penegakan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Kasus yang diselesaikan	kasus			17.5	221,724,026	101	42,637,635	101	42,637,635	100.00	100.00	118.50	264,361,661			DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	8,355,423,002	115.74	9,626,334,592	100	3,610,734,470	98.87	3,480,901,029	98.87	96.40	214.61	13,107,235,621	214.61	156.87	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen			3.5	5,490,250	6	2,139,000	5	2,106,000	83.33	98.46	8.50	7,596,250			DINAS PEMADAM KEBAKAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
																		AN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	laporan			15	7,879,599,911	15	3,004,033,500	14.6	2,893,978,626	97.33	96.34	29.60	10,773,578,537			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	unit			9.9	17,362,100	1	7,848,000	1	7,835,400	100.00	99.84	10.90	25,197,500			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN Perangkat Daerah yang dikelola	orang			75	134,539,760	31	10,500,000	31	10,500,000	100.00	100.00	106.00	145,039,760			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Yang Ditatakelolakan	jenis			83.16	223,254,660	4	112,955,400	4	111,904,534	100.00	99.07	87.16	335,159,194			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Diadakan	jenis			1.1	18,708,900	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1.10	18,708,900			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Daerah Yang Dibiayai	jenis			1445	1,173,503,240	3	411,916,070	2.9	394,467,109	96.67	95.76	1,447.90	1,567,970,349			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang pemeliharaannya dibiayai	unit			52.7	173,875,771	27	61,342,500	26	60,109,360	96.30	97.99	78.70	233,985,131			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.03	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Total Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	2,742,768,268	96.41	5,091,849,146	100	1,970,915,530	90.89	1,791,349,202	90.89	90.89	187.30	6,883,198,348	187.30	250.96	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.03.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase capaian tingkat waktu tanggap (response time)	km			7.3	5,088,549,146	7.5	1,969,365,530	6.2	1,789,799,202	82.67	90.88	13.50	6,878,348,348			DINAS PEMADAM KEBAKAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
				4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
	Kebakaran dalam Daerah dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	AN DAN PENYELA MATAN
1.05.03.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran	unit			4	1,050,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4.00	1,050,000			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELA MATAN
1.05.03.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran	kejadian			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELA MATAN
1.05.03.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Masyarakat yang mempero eh sosialisasi dan edukasi	Orang			6.7	2,250,000	400	1,550,000	400	1,550,000	100.00	100.00	406.70	3,800,000			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELA MATAN
1.05.03.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah korban jiwa dan harta benda yang ditangani	kejadian			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELA MATAN
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	10,832,934,226	200	7,284,104,607	100	3,141,899,110	97.75	3,056,341,040	97.75	97.28	297.75	10,340,445,647	297.75	95.45	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen			16	18,861,250	9	6,975,500	9	6,975,500	100.00	100.00	25.00	25,836,750			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	laporan			100	6,033,981,644	4	2,212,706,500	4	2,167,232,183	100.00	97.94	104.00	8,201,213,827			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset Yang dtata kelolakan	laporan			12	14,431,250	1	7,230,000	1	7,200,000	100.00	99.59	13.00	21,631,250			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang di Biayai	orang			26	3,996,000	22	45,787,500	22	45,787,500	100.00	100.00	48.00	49,783,500			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	jenis			100	282,718,975	5	254,480,350	5	251,542,741	100.00	98.85	105.00	534,261,716			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
1.05.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah Aset yang diadakan	unit			2	97,422,040	6	183,783,330	6	180,528,330	100.00	98.23	8.00	277,950,370			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen yang disiapkan	laporan			140	622,841,950	3	311,530,930	3	302,550,785	100.00	97.12	143.00	925,392,735			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan aset yang dibiayai	buah			115	209,851,498	24	119,405,000	19.8	94,524,001	82.50	79.16	134.80	304,375,499			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pengaduan dan Evakuasi yang Dilaksanakan dengan Memenuhi Respon Time 15 Menit	%	100	5,576,708,714	176	7,883,984,563	100	1,049,906,000	54.58	939,353,885	54.58	89.47	230.58	8,823,338,448	230.58	158.22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk	informasi			100	194,403,761	2	36,500,000	2	36,500,000	100.00	100.00	102.00	230,903,761			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk	informasi			117	5,556,680,802	7	275,381,000	100	243,668,885	1,428.57	88.48	217.00	5,800,349,687			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	pencarian, pertolongan dan evakuasi korban	orang			109	2,132,900,000	3	708,025,000	2	654,185,000	66.67	92.40	111.00	2,787,085,000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Jenis Penataan Sistem Dasar Penangulangan Bencana yang dilaksanakan				0	-	2	30,000,000	2	5,000,000	100.00	16.67	2.00	5,000,000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.06.00	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																	
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	9,457,944,997	95	8,332,607,441	100	3,412,206,300	94.38	3,273,250,861	94.38	95.93	189.38	11,605,858,302	189.38	122.71	Dinas Sosial
1.06.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			5	4,200,250	4	11,941,600	3.9	11,525,150	97.50	96.51	8.90	15,725,400			Dinas Sosial
1.06.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan keuangan	laporan			3	7,254,035,743	3	2,364,011,500	2.9	2,267,761,338	96.67	95.93	5.90	9,521,797,081			Dinas Sosial
1.06.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	orang			0	-	45	68,000,000	43.9	66,326,560	97.56	97.54	43.90	66,326,560			Dinas Sosial
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	jenis			3	413,676,372	3	372,203,938	2.3	351,698,139	76.67	94.49	5.30	765,374,511			Dinas Sosial
1.06.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di adakan	unit			3	13,196,000	2	115,224,000	2	112,934,000	100.00	98.01	5.00	126,130,000			Dinas Sosial
1.06.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	jenis			3	504,170,899	3	263,225,262	4.7916	253,981,074	159.72	96.49	7.79	758,151,973			Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
1.06.01 2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	unit			57.6	143,328,177	62	217,600,000	85.1942	209,024,600	137.41	96.06	142.79	352,352,777			Dinas Sosial
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Rumah Tangga/ Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pemberdayaan	%	95	345,065,303	59	348,046,575	100	180,316,000	82.5	165,936,200	82.50	92.03	141.50	513,982,775	148.95	148.95	Dinas Sosial
1.06.02.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang tertangani	potensi			1.9	348,046,575	24	180,316,000	30.9	165,936,200	128.75	92.03	32.80	513,982,775			Dinas Sosial
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Kasus Korban Tindak Kekerasan Migran yang Diseleksaikan	%	100	299,800,000	0	-	100	2,800,000	156	2,793,924	156.00	99.78	156.00	2,793,924	156.00	0.93	Dinas Sosial
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang menerima pelayanan	laporan			0	-	5	2,800,000	7.8	2,793,924	156.00	99.78	7.80	2,793,924			Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Menerima Layanan sesuai standar	%	100	436,349,906	96.78	631,044,726	100	130,213,000	95	120,565,884	95.00	92.59	191.78	751,610,610	191.78	172.25	Dinas Sosial
1.06.04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti yang menerima pelayanan	orang			149.7	373,798,443	102	86,242,000	96.9	78,995,720	95.00	91.60	246.60	452,794,163			Dinas Sosial
1.06.04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza yang menerima layanan	orang			44	257,246,283	100	43,971,000	95	41,570,164	95.00	94.54	139.00	298,816,447			Dinas Sosial
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	2,296,024,296	34.9	4,715,483,055	100	310,083,700	98.5	303,140,850	98.50	97.76	133.40	5,018,623,905	133.40	218.58	Dinas Sosial
1.06.05 2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak - Anak Terlantar luar panti yang di pantau	orang			43.8	20,000,000	50	118,100,000	48.5	114,170,000	97.00	96.67	92.30	134,170,000			Dinas Sosial
1.06.05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	kk			10591	4,695,483,055	20526	191,983,700	20526	188,970,850	100.00	98.43	31,117.00	4,884,453,905			Dinas Sosial
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	%	100	592,602,668	96.5	1,996,889,990	100	484,842,000	96.5	476,931,225	96.50	98.37	193.00	2,473,821,215	193.00	417.45	Dinas Sosial
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang diberikan pelayanan	orang			112	1,675,080,710	100	73,342,000	112	68,191,275	112.00	92.98	224.00	1,743,271,985			Dinas Sosial
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Rawan Bencana	lokasi			5	321,809,280	5	411,500,000	5	408,739,950	100.00	99.33	10.00	730,549,230			Dinas Sosial
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Luas Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	Ha	2.5	134,451,306	2.5	117,673,990	2.5	58,492,000	2.5	54,806,000	100.00	93.70	5.00	172,479,990	200.00	128.28	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
1.06.07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	lokasi			0.7	117,673,990	12	58,492,000	11.4	54,806,000	95.00	93.70	12.10	172,479,990			Dinas Sosial
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																	
2.07.00	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																	
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	7,305,444,330	305.54	7,152,359,584	100	2,441,730,000	93.55	2,276,589,922	93.55	93.24	399.09	9,428,949,506	399.09	129.07	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			23	2,975,750	7	1,550,000	7	1,063,000	100.00	68.58	30.00	4,038,750			Dinas Tenaga Kerja
2.07.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	laporan			48	5,992,330,741	18	2,012,830,000	18	1,927,548,402	100.00	95.76	66.00	7,919,879,143			Dinas Tenaga Kerja
2.07.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	laporan			10	15,005,750	5	8,401,000	5	8,398,850	100.00	99.97	15.00	23,404,600			Dinas Tenaga Kerja
2.07.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	laporan			0	-	23	18,174,000	23	12,086,900	100.00	66.51	23.00	12,086,900			Dinas Tenaga Kerja
2.07.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang Ditatakelolakan	jenis			5.9	447,954,346	2	196,357,000	2	169,137,507	100.00	86.14	7.90	617,091,853			Dinas Tenaga Kerja
2.07.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	unit			9.4	199,799,930	1	39,772,410	0.5	16,463,520	50.00	41.39	9.90	216,263,450			Dinas Tenaga Kerja
2.07.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dibiayai	jasa			18	365,468,815	3	116,935,590	3	103,939,883	100.00	88.89	21.00	469,408,698			Dinas Tenaga Kerja
2.07.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Pemeliharaannya Dibiayai	jasa			148	128,824,252	49	47,710,000	48.2	37,951,860	98.37	79.55	196.20	166,776,112			Dinas Tenaga Kerja
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Ditetapkan	%			100	9,155,000	100	9,155,000	100	9,155,000	100.00	100.00	200.00	18,310,000			Dinas Tenaga Kerja
2.07.02 2.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	Dokumen			1	9,155,000	1	9,155,000	1	9,155,000	100.00	100.00	2.00	18,310,000			Dinas Tenaga Kerja
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	80	1,214,190,000	153.13	313,568,920	78	254,262,271	40	151,954,000	51.28	59.76	193.13	465,522,920	241.41	38.34	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetansi	Jumlah Jenis Pelatihan Berdasarkan Kompetensi	Jenis			4.6	267,568,920	8	250,876,271	0.2	149,978,800	2.50	59.78	4.80	417,547,720			Dinas Tenaga Kerja
2.07.03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang aktif (Buah)	LPKS			12	46,000,000	14	3,386,000	14	1,975,200	100.00	58.33	26.00	47,975,200			Dinas Tenaga Kerja
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	54	347,654,151	109.7	167,431,500	54	216,551,000	54	206,695,500	100.00	95.45	163.70	374,127,000	303.15	107.61	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04 2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	orang			4455	76,375,500	2500	118,396,000	2500	114,554,250	100.00	96.76	6,955.00	190,929,750			Dinas Tenaga Kerja
2.07.04 2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Lembaga Penempatan Kerja Swasta yang Suda Berisin	lembaga			1	2,400,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1.00	2,400,000			Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
2.07.04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja yang dikelola	orang			8232	88,656,000	400	98,155,000	400	92,141,250	100.00	93.87	8,632.00	180,797,250			Dinas Tenaga Kerja
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	32	65,528,335	110.96	222,311,250	30	70,099,000	17.25	62,897,150	57.50	89.73	128.21	285,208,400	400.66	435.24	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan/Perjanjian Kerja Bersama yang Disahkan	perjanjian			17	165,057,250	10	61,809,000	9.5	55,885,900	95.00	90.42	26.50	220,943,150			Dinas Tenaga Kerja
2.07.05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Perselisihan yang Dilaporkan	kasus			46	57,254,000	18	8,290,000	3.6	7,011,250	20.00	84.57	49.60	64,265,250			Dinas Tenaga Kerja
2.08.00	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	6,310,945,896	100	6,312,032,269	100	2,716,615,000	99.2	2,614,233,306	99.20	96.23	199.20	8,926,265,575	199.20	141.44	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			4	8,197,500	5	2,805,000	5	2,805,000	100.00	100.00	9.00	11,002,500			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	laporan			12	5,268,784,462	12	2,244,754,000	11.9	2,151,701,881	99.17	95.85	23.90	7,420,486,343			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	laporan			1	10,450,000	1	6,600,000	1	6,600,000	100.00	100.00	2.00	17,050,000			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi ASN PD yang di kelola	orang			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub. Kegiatan Administrasi Umum yang di Tata Kelolakan	jenis			6	462,193,871	6	192,802,300	6	186,818,596	100.00	96.90	12.00	649,012,467			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	jenis			2	71,327,450	3	52,303,500	3	52,260,000	100.00	99.92	5.00	123,587,450			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Daerah yang dibiaya	jenis			3	411,211,816	3	154,006,900	3	150,904,100	100.00	97.99	6.00	562,115,916			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pemeliharaannya dibiayai	unit			5	79,867,170	5	63,343,300	4.8	63,143,729	96.00	99.68	9.80	143,010,899			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	25.30	1,228,016,776	48.39	1,051,875,151	48.15	828,355,000	41.9	701,983,840	87.02	84.74	90.29	1,753,858,991	356.88	142.82	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Kota Palopo yang memenuhi 7 Prasyarat PUG	OPD			49	320,204,200	49	153,485,000	42.5	114,821,930	86.73	74.81	91.50	435,026,130			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang mendapatkan Pemberdayaan di Bidang Ekonomi, Politik, Hukum dan Sosial	orang			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat kota yang terstandarisasi layanan pemberdayaan perempuan	lembaga			68	731,670,951	4	674,870,000	3.5	587,161,910	87.50	87.00	71.50	1,318,832,861			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase OPD yang Menyediakan Layanan Perlindungan Perempuan yang Terstandarisasi (%)	%	2	210,534,550	2	450,234,991	2	174,434,500	2	108,567,750	100.00	62.24	4.00	558,802,741	200.00	265.42	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang difasilitasi dalam pengembangan Model Sinergi Layanan Pencegahan Kekerasan terhadap	opd			0	-	5	66,715,000	4.6	61,342,500	92.00	91.95	4.60	61,342,500			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
2.08.03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Layanan pada UPT PPA yang Terstandarisasi	unit			1	121,194,454	5	65,519,500	3.3	14,800,250	66.00	22.59	4.30	135,994,704			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikembangkan	lembaga			4	329,040,537	7	42,200,000	5.4	32,425,000	77.14	76.84	9.40	361,465,537			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pembinaan Kualitas Keluarga	%	100	299,800,000	95	18,883,000	100	15,610,000	100	15,560,000	100.00	99.68	195.00	34,443,000	195.00	11.49	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kel./Kec. yang menyediakan Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak Anak	layanan			0	-	1	15,610,000	1	15,560,000	100.00	99.68	1.00	15,560,000			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04 2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang Menyediakan layanan bagi Keluarga dan Hak Anak	layanan			1	18,883,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1.00	18,883,000			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Jumlah Sistem Data Gender dan Anak yang Berfungsi Baik	sistem	1	17,388,400	1	33,789,400	1	1,500,000	1	1,500,000	100.00	100.00	2.00	35,289,400	200.00	202.95	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di	Jumlah Data dan Informasi Gender dan Anak di tingkat OPD	Aplikasi			1	33,789,400	49	1,500,000	49	1,500,000	100.00	100.00	50.00	35,289,400			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Diselesaikan (%)	%	100	345,295,500	710	151,679,550	7112	21,260,000	711.2	20,855,000	10.00	98.10	1,421.20	172,534,550	1,421.20	49.97	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang meningkat level pemenuhan indikator Kota Layak Anak (KLA)	opd			36	151,679,550	25	21,260,000	25	20,855,000	100.00	98.10	61.00	172,534,550			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
2.08.07 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	poin			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.08	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Angka Tngkat Pemenuhan Layak Anak (Poin)	poin	780	74,500,300	0	-	100	266,965,500	57.5	152,182,470	57.50	57.00	57.50	152,182,470	7.37	204.27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.08.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan dan atau kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan model pencegahan kekerasan	kelurahan			0	-	5	34,785,000	4.8	32,945,000	96.00	94.71	4.80	32,945,000			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.08.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang memperoleh Layanan Komprehensif	orang			0	-	5	205,360,500	3.9	119,237,470	78.00	58.06	3.90	119,237,470			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.08.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak	lembaga			0	-	3	26,820,000	0	-	-	-	-	-			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09.00	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																	
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	6,277,379,089	90.65	6,334,231,818	100	2,187,612,530	84.84	2,118,029,382	84.84	96.82	175.49	8,452,261,200	175.49	134.65	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			9	8,284,200	9	1,494,300	9	1,494,000	100.00	99.98	18.00	9,778,200			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	laporan			11	5,324,645,056	12	1,887,772,000	11.9	1,829,197,735	99.17	96.90	22.90	7,153,842,791			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	laporan			8	16,847,200	12	6,660,000	12	6,660,000	100.00	100.00	20.00	23,507,200			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN Perangkat Daerah yang dikelola	orang			35	21,837,730	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	35.00	21,837,730			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	jenis			4	466,248,778	3	140,384,400	3	140,360,157	100.00	99.98	7.00	606,608,935			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit			9	5,829,000	2	6,912,000	0	-	-	-	9.00	5,829,000			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	unit			40	343,864,078	36	111,819,830	34.8	108,308,502	96.67	96.86	74.80	452,172,580			Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
2.09.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	jenis			3	146,675,776	4	32,570,000	3.9	32,008,988	97.50	98.28	6.90	178,684,764			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah Kelompok Tani yang Memanfaatkan Infrastruktur Ketahanan Pangan (Kelompok)	Kelompok	15	599,600,000	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur ketahanan pangan (lumbung pangan dan lantai jemur) yang tersedia	unit			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Melaksanakan Diversifikasi Pangan (%)	%	72	116,377,563	24	1,252,997,650	28	152,474,000	28	152,232,752	100.00	99.84	52.00	1,405,230,402	72.22	1,207.48	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kebutuhan pangan pokok atau pangan lainnya (Ton/Kap/Hari)	ton			13259	90,452,750	17.32	72,074,000	17323	71,835,700	100,017.32	99.67	########	162,288,450			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pengelola cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah Daerah	laporan			0	-	48	51,350,000	48	51,347,052	100.00	99.99	48.00	51,347,052			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka kecukupan gizi masyarakat Kota Palopo	skor			1801	1,162,544,900	85	29,050,000	85	29,050,000	100.00	100.00	1,886.00	1,191,594,900			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Lokasi Rawan pangan (Kelurahan)	keluarahan	7	108,677,500	1	133,339,085	2	2,500,000	2	2,500,000	100.00	100.00	3.00	135,839,085	42.86	124.99	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terdeteksinya daerah rawan pangan dan rentan pangan	keluarahan			41	21,400,000	48	1,500,000	48	1,500,000	100.00	100.00	89.00	22,900,000			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah	kelompok			1	111,939,085	2	1,000,000	2	1,000,000	100.00	100.00	3.00	112,939,085			Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanaan pangan .	%	97	63,740,478	15	98,164,300	95	19,427,470	91	19,427,000	95.79	100.00	106.00	117,591,300	109.28	184.48	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	laporan			15	98,164,300	5	19,427,470	5	19,427,000	100.00	100.00	20.00	117,591,300			Dinas Ketahanan Pangan
2.10.00	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan																	
2.10.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	6,916,029,238	95.72	6,871,939,088	100	2,804,396,000	90.46	2,533,815,649	90.46	90.35	186.18	9,405,754,737	186.18	136.00	Dinas Pertanahan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, rka dan dpa perangkat daerah dan laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	dokumen			4	13,185,500	4	3,855,000	4	3,110,500	100.00	80.69	8.00	16,296,000			Dinas Pertanahan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayar dan jumlah laporan bulanan, smesteran dan tahunan	laporan			12	5,737,313,308	5	7,200,000	9.8	1,967,763,604	196.00	######	21.80	7,705,076,912			Dinas Pertanahan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan			12	15,410,000	5	7,200,000	5	7,200,000	100.00	100.00	17.00	22,610,000			Dinas Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas yang diadakan dan Jumlah ASN Yang mengikuti Bimtek	orang			2	37,599,600	23	130,908,500	10.9	111,076,800	47.39	84.85	12.90	148,676,400			Dinas Pertanahan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai, alat listrik, SPPD dan alat pembersih kantor	jenis			1	298,104,083	1	321,283,400	0.9	260,701,105	90.00	81.14	1.90	558,805,188			Dinas Pertanahan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	unit			13	262,976,890	3	68,849,970	0.6	13,000,000	20.00	18.88	13.60	275,976,890			Dinas Pertanahan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak , penggandaan, rekening air, listrik, internet dan jumlah	jenis			10	446,877,909	12	170,782,130	10	148,409,800	83.33	86.90	20.00	595,287,709			Dinas Pertanahan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas biaya pemeliharaan kendaraan dan pajak kendaraan	unit			19	60,471,798	12	37,960,000	10.9	22,553,840	90.83	59.41	29.90	83,025,638			Dinas Pertanahan
2.10.02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	%	100	15,829,440	75	11,025,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	75.00	11,025,000	75.00	69.65	Dinas Pertanahan
	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian izin penanaman modal usaha	kali			3	11,025,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	3.00	11,025,000			Dinas Pertanahan
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	83	96,745,460	59	68,139,500	100	24,250,000	63.4	20,072,500	63.40	82.77	122.40	88,212,000	147.47	91.18	Dinas Pertanahan
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sengketa, konflik, perkara tanah dan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan	laporan			19	68,139,500	20	24,250,000	14.3	20,072,500	71.50	82.77	33.30	88,212,000			Dinas Pertanahan
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Subjek Ganti Kerugian Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah	%	70	22,485,000,000	27.7	12,170,109,625	50	2,434,826,000	29.7	1,443,560,098	59.40	59.29	57.40	13,613,669,723	82.00	60.55	Dinas Pertanahan
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Subjek Ganti Kerugian Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah	dokumen			5	12,170,109,625	7	2,434,826,000	4.2	1,443,560,098	60.00	59.29	9.20	13,613,669,723			Dinas Pertanahan
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Penetapan Objek Redistribusi Tanah	%	70	35,976,000	11	26,485,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	11.00	26,485,000	15.71	73.62	Dinas Pertanahan
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data inventarisasi subyek penerima redistribusi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	jenis			2	26,485,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2.00	26,485,000			Dinas Pertanahan
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Pengelolaan Objek Tanah Kosong	%	55	17,118,580	55	46,190,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	55.00	46,190,000	100.00	269.82	Dinas Pertanahan
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Pengelolaan Objek Tanah Kosong	%			55	46,190,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	55.00	46,190,000			Dinas Pertanahan
2.10.09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	%	100	12,711,520	100	11,935,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	11,935,000	100.00	93.89	Dinas Pertanahan
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah pemnfaatan tanah negara	dokumen			2	11,935,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2.00	11,935,000			Dinas Pertanahan
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Luas pemanafaatan dan penggunaan tanah	Ha	36	12,891,400	6	12,470,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	6.00	12,470,000	16.67	96.73	Dinas Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
				4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Data pemanfaatan dan penggunaan tanah Pemerintah Kota	laporan			8	12,470,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	8.00	12,470,000			Dinas Pertanahan
2.11.00	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																	
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	23,307,683,908	90	29,039,926,143	100	7,818,512,134	80.63	7,445,981,665	80.63	95.24	170.63	36,485,907,808	170.63	156.54	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			12	276,827,000	7	117,130,000	7	74,817,120	100.00	63.88	19.00	351,644,120			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	laporan			12	18,532,421,699	12	6,418,586,000	11.88	6,226,035,362	99.00	97.00	23.88	24,758,457,061			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan			0	-	12	4,500,000	12	4,351,880	100.00	96.71	12.00	4,351,880			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	orang			1	5,000,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1.00	5,000,000			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01 6.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	paket			1	1,053,074,496	5	460,072,400	4.7	450,515,165	94.00	97.92	5.70	1,503,589,661			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit			29	179,332,000	5	119,361,000	2.8	89,200,000	56.00	74.73	31.80	268,532,000			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	jenis			219	6,905,590,787	3	464,468,734	2.7	407,402,409	90.00	87.71	221.70	7,312,993,196			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit			6	348,057,899	48	234,394,000	41.6	193,659,729	86.67	82.62	47.60	541,717,628			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kajian Lingkungan yang Disusun	dokumen	1	676,461,225	1	403,674,300	4	123,454,000	4	122,018,560	100.00	98.84	5.00	525,692,860	500.00	77.71	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Yang Disusun dan di Telaah	dokumen			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah kajian lingkungan yang disusun	dokumen			4	403,674,300	2	123,454,000	2	122,018,560	100.00	98.84	6.00	525,692,860			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	indeks Kualitas Air	nilai	13	1,238,632,394	2	467,121,800	2	114,215,600	1.9	109,494,340	95.00	95.87	3.90	576,616,140	30.00	46.55	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah komponen data lingkungan hidup yang dikelola	dokumen			8	467,121,800	5	92,015,600	4.9	88,214,340	98.00	95.87	12.90	555,336,140			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Terkait Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	laporan			0	-	4	22,200,000	3.8	21,280,000	95.00	95.86	3.80	21,280,000			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang dikelola/ditangani	ha	1,178	11,974,609,202	3063	11,197,167,050	47.9	4,183,863,890	45	3,910,033,730	93.95	93.46	3,108.00	15,107,200,780	263.84	126.16	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terwujudnya pengelolaan ruang terbuka hijau yang baik	ha			3063	11,197,167,050	47.9	4,183,863,890	45	3,910,033,730	93.95	93.46	3,108.00	15,107,200,780			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Sumber Limbah B3 di Kota Palopo yang diawasi	%	100	533,219,183	100	44,111,250	100	24,750,000	61.8	21,841,000	61.80	88.25	161.80	65,952,250	161.80	12.37	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
2.11.05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Tersusunnya laporan limbah B3 yang dikelola	laporan			12	44,111,250	30	24,750,000	26.5	21,841,000	88.33	88.25	38.50	65,952,250			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	dokumen			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Izin tentang Lingkungan yang Diproses Tepat Waktu	%	100	45,119,900	100	74,756,790	100	40,250,100	100	40,024,820	100.00	99.44	200.00	114,781,610	200.00	254.39	Dinas Lingkungan Hidup
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen AMDAL yang dikeluarkan	dokumen			12	74,756,790	11.55	40,250,100	11.55	40,024,820	100.00	99.44	23.55	114,781,610			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Aktif	%	100	86,532,773	60	77,967,800	33	99,349,500	33	93,539,000	100.00	94.15	93.00	171,506,800	93.00	198.20	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi tentang gerakan peduli lingkungan yang dilaksanakan dengan baik	kali			6	77,967,800	1	99,349,500	1	93,539,000	100.00	94.15	7.00	171,506,800			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase sekolah binaan yang berpredikat adiwiyata	%	100	77,948,000	100	92,830,000	16	28,328,000	16	27,819,800	100.00	98.21	116.00	120,649,800	116.00	154.78	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya sekolah binaan adiwiyata	Sekolah			24	92,830,000	14	28,328,000	14	27,819,800	100.00	98.21	38.00	120,649,800			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	%	100	85,967,650	100	79,827,750	100	11,300,200	100	10,890,000	100.00	96.37	200.00	90,717,750	200.00	105.53	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pengaduan lingkungan hidup tepat waktu	dokumen			28	79,827,750	1	11,300,200	1	10,890,000	100.00	96.37	29.00	90,717,750			Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan	%	95	43,829,813,681	53	37,058,095,602	81.48	14,683,067,850	72.3	13,060,251,500	88.73	88.95	125.30	50,118,347,102	131.89	114.35	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan persampahan	%			53	37,058,095,602	74.5	14,683,067,850	66.1	13,060,251,500	88.72	88.95	119.10	50,118,347,102			Dinas Lingkungan Hidup
2.15.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		%			79	29,859,920,685	90	9,246,768,726	79.4	8,567,554,427	88.22	92.65	158.40	38,427,475,112			Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		unit			236	29,859,920,685	1100	9,246,768,726	97	8,567,554,427	8.82	92.65	333.00	38,427,475,112			Dinas Lingkungan Hidup
2.12.00	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	9,765,369,661	97	9,752,265,048	100	3,509,619,696	89.51	3,276,197,286	89.51	93.35	186.51	13,028,462,334	186.51	133.41	Dinas Kependudukan dan Catatan sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
2.12.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			4	5,800,000	8	3,591,500	8	3,361,500	100.00	93.60	12.00	9,161,500			Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
2.12.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	laporan			16	7,032,176,584	29	2,833,482,900	26.9	2,725,383,746	92.76	96.18	42.90	9,757,560,330			Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
2.12.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolalaan Aset	unit			6	14,400,000	12	7,380,000	11.8	7,200,000	98.33	97.56	17.80	21,600,000			Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
2.12.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi ASN perangkat daerah yang di	orang			7	47,829,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	7.00	47,829,000			Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
2.12.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Yang Ditatakelolakan	jenis			3	831,567,010	100	274,144,000	94	239,415,387	94.00	87.33	97.00	1,070,982,397			Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
2.12.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Jenis/Unit)	unit			12	221,293,860	7	200,657,142	4.3	122,770,000	61.43	61.18	16.30	344,063,860			Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
2.12.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Daerah Yang Dibiayai	jasa			3	1,400,050,836	3	132,814,154	2.9	127,777,515	96.67	96.21	5.90	1,527,828,351			Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
2.12.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Pemeliharaannya Dibiayai (Unit)	unit			45	199,147,758	49	57,550,000	40.8	50,289,138	83.27	87.38	85.80	249,436,896			Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	97	195,386,406	98	189,760,250	95	233,485,924	73.4	154,050,000	77.26	65.98	171.40	343,810,250	176.70	175.96	Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
2.12.02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Layanan pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan (Jenis/Tahun)	jenis			2	126,738,000	2	233,485,924	1.5	154,050,000	75.00	65.98	3.50	280,788,000			Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
2.12.02 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Layanan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	jenis			2	34,600,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2.00	34,600,000			Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
2.12.02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	laporan			85	4,000,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	85.00	4,000,000			Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
2.12.02 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan penyelengaraan dan pengunaan dokumen kependudukan	laporan			12	24,422,250	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	12.00	24,422,250			Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk per 100	%	77	98,034,600	100	92,975,000	75	73,771,170	100	73,644,400	133.33	99.83	200.00	166,619,400	259.74	169.96	Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
2.12.03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Layanan Catatan Sipil yang dilaksanakan	jenis			2	92,975,000	2	73,771,170	2	73,644,400	100.00	99.83	4.00	166,619,400			Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Informasi Kependudukan yang Berfungsi Baik	sistem	1	285,634,450	1	359,975,100	5	142,352,310	5	142,247,040	100.00	99.93	6.00	502,222,140	600.00	175.83	Dinas Kependudu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
																		kan dan Catatan sipil
2.12.04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengelolaan Data base Kependudukan	data			1	68,376,000	12	64,252,310	12	64,247,040	100.00	99.99	13.00	132,623,040			Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
2.12.04 2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	siak			1	108,450,000	1	78,100,000	1	78,000,000	100.00	99.87	2.00	186,450,000			Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
2.12.04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Jenis Layanan Informasi Administrasi Kependudukan (Layanan)	jenis			1	183,149,100	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1.00	183,149,100			Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
2.12.5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota	dokumen			0	-	1	16,099,900	0.93	15,000,000	93.00	93.17	0.93	15,000,000			Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
2.12.5.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang diterbitkan	buku			0	-	1	16,099,900	0.93	15,000,000	93.00	93.17	0.93	15,000,000			Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
2.14.00	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	11,683,167,776	85	10,797,554,491	100	3,570,772,000	93.83	3,396,545,198	93.83	95.12	178.83	14,194,099,689	178.83	121.49	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2.14.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			8	23,515,750	8	10,364,000	8	9,173,220	100.00	88.51	16.00	32,688,970			Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2.14.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	laporan			14	9,242,795,937	38	3,123,466,000	31.2	2,978,062,655	82.11	95.34	45.20	12,220,858,592			Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2.14.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	laporan			1	20,400,000	112	8,850,000	112	8,700,000	100.00	98.31	113.00	29,100,000			Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2.14.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN Perangkat Daerah yang dikelola	orang			48	314,526,670	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	48.00	314,526,670			Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2.14.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelola	jenis			3	403,915,980	6	120,553,000	6	120,365,696	100.00	99.84	9.00	524,281,676			Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2.14.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit			5	120,269,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	5.00	120,269,000			Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2.14.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	jenis			12	372,409,977	32	188,208,000	29.4	181,396,107	91.88	96.38	41.40	553,806,084			Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2.14.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	unit			31	299,721,177	115	119,331,000	100.1	98,847,520	87.04	82.83	131.10	398,568,697			Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2	423,185,688	1	290,002,000	2	134,180,000	1.9	131,400,000	95.00	97.93	2.90	421,402,000	145.00	99.58	Dinas Pengendalia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
																		n Penduduk & KB
2.14.02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen & data pengendalian penduduk yang tersusun	dokumen			1	89,235,000	2	26,180,000	1.8	23,400,000	90.00	89.38	2.80	112,635,000			Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2.14.02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan data mikro keluarga	laporan			1	200,767,000	11	108,000,000	11	108,000,000	100.00	100.00	12.00	308,767,000			Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 (%)	%	85	21,136,372,935	69	17,888,959,050	75	6,003,725,000	60	5,164,886,450	80.00	86.03	129.00	23,053,845,500	151.76	109.07	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2.14.03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk & KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah UPTD yang sarananya di tata kelola	layanan			3	1,608,193,850	6	997,400,000	5	779,561,450	83.33	78.16	8.00	2,387,755,300			Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2.14.03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh & petugas lapangan KB	layanan			4	10,050,571,000	550	2,793,570,000	442.9	2,602,450,000	80.53	93.16	446.90	12,653,021,000			Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2.14.03 2.03	Pengendalian & Pendistribusian Kebutuhan Alat & Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah alokon KB yang tersedia dan di distribusikan kepada faskes dan pemasangan KB MKJP	layanan			5	5,444,691,200	300	1,720,205,000	274.5	1,518,875,000	91.50	88.30	279.50	6,963,566,200			Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2.14.03 2.04	Pemberdayaan & Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan & Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah layanan kegiatan pembinaan KB yang dilaksanakan	layanan			1	785,503,000	3	492,550,000	2	264,000,000	66.67	53.60	3.00	1,049,503,000			Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera I yang Meningkat Menjadi Keluarga Sejahtera	%	1	98,100,000	1	2,456,685,500	1	315,700,000	0.89	248,050,000	89.00	78.57	1.89	2,704,735,500	189.00	2,757.12	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2.14.04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS yang dibentuk & dibina	kelompok			33	641,705,500	13	315,700,000	11.6	248,050,000	89.23	78.57	44.60	889,755,500			Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2.14.04 2.02	Pelaksanaan & Peningkatan Peran serta organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan & kesejahteraan keluarga	Jumlah kelompok yang sudah dibina	kelompok			211	1,814,980,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	211.00	1,814,980,000			Dinas Pengendalian Penduduk & KB
2.15.00	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																	
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	17,139,284,188	100	17,033,005,557	100	7,179,976,180	93.75	6,781,771,705	93.75	94.45	193.75	23,814,777,262	193.75	138.95	Dinas Perhubungan
2.15.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	dokumen			8	3,755,350	9	1,436,100	9	854,000	100.00	59.47	17.00	4,609,350			Dinas Perhubungan
2.15.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	laporan			12	15,270,725,498	12	6,382,384,000	12	6,082,742,175	100.00	95.31	24.00	21,353,467,673			Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
2.15.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	laporan			10	25,600,000	12	9,765,000	12	9,765,000	100.00	100.00	22.00	35,365,000			Dinas Perhubungan
2.15.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN Perangkat Daerah yang dikelola	laporan			70	16,524,439	74	113,275,500	74	112,787,100	100.00	99.57	144.00	129,311,539			Dinas Perhubungan
2.15.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang ditatakelolakan	jenis			14	343,225,662	4	156,599,700	4	154,056,416	100.00	98.38	18.00	497,282,078			Dinas Perhubungan
2.15.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit			16	232,313,236	17	26,537,880	8.5	10,950,000	50.00	41.26	24.50	243,263,236			Dinas Perhubungan
2.15.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	jenis			3	792,628,132	3	270,628,000	3	265,990,140	100.00	98.29	6.00	1,058,618,272			Dinas Perhubungan
2.15.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	unit			54	348,233,240	56	219,350,000	56	144,626,874	100.00	65.93	110.00	492,860,114			Dinas Perhubungan
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	15	53,197,578,808	4	2,646,742,500	3.94	955,713,850	3.9	825,890,100	98.98	86.42	7.90	3,472,632,600	52.67	6.53	Dinas Perhubungan
2.15.02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Lalu Lintas Angkutan Jalan yang ditetapkan	dokumen			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Perhubungan
2.15.02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah Perlengkapan Jalan Kabupaten	laporan			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Perhubungan
2.15.02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pemeliharaan Pengelolaan Terminal	laporan			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Perhubungan
2.15.02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Fasilitas Parkir	laporan			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Perhubungan
2.15.02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum	unit			1200	284,958,000	190	97,100,000	188.1	60,500,000	99.00	62.31	1,388.10	345,458,000			Dinas Perhubungan
2.15.02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dilaksanakan Rekayasa Lalu Lintas	KM			301	1,581,654,000	301	640,053,850	299	554,787,600	99.34	86.68	600.00	2,136,441,600			Dinas Perhubungan
2.15.02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	KALI			250	780,130,500	12	218,560,000	12	210,602,500	100.00	96.36	262.00	990,733,000			Dinas Perhubungan
2.15.02 2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin trayek Lintas Daerah LLAJ	laporan			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Perhubungan
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah pelabuhan penumpang yang beroperasi	unit	1	242,878,473	35	225,950,000	1	104,671,400	13	85,800,000	1,300.00	81.97	48.00	311,750,000	4,800.00	128.36	Dinas Perhubungan
2.15.03 2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi izin usaha angkutan laut yang dilaksanakan	Koordinasi			4	225,950,000	24	85,800,000	24	85,800,000	100.00	100.00	28.00	311,750,000			Dinas Perhubungan
2.15.03 2.08	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah pemeliharaan perbaikan kapal	laporan			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
2.15.03 2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pembangunan tambat labuh	unit			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Perhubungan
2.16.00	Urusan Pemerintahan BidangKomunikasi dan Informatika																	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	8,159,399,821	97	6,264,963,474	100	2,224,394,400	99.25	2,123,105,601	99.25	95.45	196.25	8,388,069,075	196.25	102.80	Dinas Komunikasi & Informatika
2.16.02	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			3	8,181,500	5	4,605,000	5	4,575,000	100.00	99.35	8.00	12,756,500			Dinas Komunikasi & Informatika
2.16.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan penataushaan keuangan PD	laporan			12	5,165,701,989	12	1,883,455,500	11.9	1,825,596,871	99.17	96.93	23.90	6,991,298,860			Dinas Komunikasi & Informatika
2.16.04	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			3	13,853,750	1	8,570,000	1	8,570,000	100.00	100.00	4.00	22,423,750			Dinas Komunikasi & Informatika
2.16.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelolah	orang			25	197,719,302	25	8,268,000	25	7,889,125	100.00	95.42	50.00	205,608,427			Dinas Komunikasi & Informatika
2.16.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	jasa			3	111,134,879	3	174,426,000	3	174,380,825	100.00	99.97	6.00	285,515,704			Dinas Komunikasi & Informatika
2.16.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit			3	46,350,000	10	40,638,000	4	1,710,000	40.00	4.21	7.00	48,060,000			Dinas Komunikasi & Informatika
2.16.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	jenis			3	533,459,822	10	74,001,900	3	73,973,500	30.00	99.96	6.00	607,433,322			Dinas Komunikasi & Informatika
2.16.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipeliharaannya dibiayai	unit			3	151,863,232	3	30,430,000	2.9	28,120,280	96.67	92.41	5.90	179,983,512			Dinas Komunikasi & Informatika
2.16.10	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	%	5	4,412,548,289	65	6,919,667,000	5	1,971,901,035	63.9	1,804,577,750	1,278.00	91.51	128.90	8,724,244,750	2,578.00	197.71	Dinas Komunikasi & Informatika
2.16.11	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah informasi yang disebarluaskan	informasi			380	6,919,667,000	400	1,971,901,035	365	1,804,577,750	91.25	91.51	745.00	8,724,244,750			Dinas Komunikasi & Informatika
2.16.12	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	1	2,952,055,650	90	2,323,757,400	1	2,086,452,565	77.7	2,019,962,891	7,770.00	96.81	167.70	4,343,720,291	16,770.00	147.14	Dinas Komunikasi & Informatika
2.16.13	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain yang disediakan	domain			1	28,750,000	1	1,223,526,000	1	1,223,370,804	100.00	99.99	2.00	1,252,120,804			Dinas Komunikasi & Informatika
2.16.14	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang kelolah dan dikembangkan	Aplikasi			37	2,295,007,400	2	862,926,565	1.9	796,592,087	95.00	92.31	38.90	3,091,599,487			Dinas Komunikasi & Informatika
2.16.15	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
2.16.16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	8,200,750,186	93	8,020,848,647	100	2,783,988,680	90.44	2,610,699,463	90.44	93.78	183.44	10,631,548,110	183.44	129.64	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.16.17	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen perencanaan daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			7	8,296,000	9	2,110,000	9	2,110,000	100.00	100.00	16.00	10,406,000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.16.18	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	laporan			12	6,617,879,914	12	2,309,462,000	11.9	2,174,382,359	99.17	94.15	23.90	8,792,262,273			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.16.19	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Mili Daerah Pada SKPD	laporan			1	14,378,000	1	6,050,000	1	6,050,000	100.00	100.00	2.00	20,428,000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.16.20	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	orang			18	56,626,280	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	18.00	56,626,280			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.16.21	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yangditata Kelolakan	jenis			1	677,927,793	6	239,678,000	6	220,149,134	100.00	91.85	7.00	898,076,927			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.16.22	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Brg Milik daerah yg diadakan (Unit)	unit			12	29,764,000	23	40,340,000	23	40,239,000	100.00	99.75	35.00	70,003,000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.16.23	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan daerah yg dibiayai (Jenis	jasa			12	493,263,257	39	160,148,680	14.2	145,860,050	36.41	91.08	26.20	639,123,307			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.16.24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah brg Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yg pemeliharaannya dibiayai (Unit)	unit			33	122,713,403	50	26,200,000	49	21,908,920	98.00	83.62	82.00	144,622,323			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.16.25	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Usaha Simpan Pinjam yang Berizin	%	78	599,600,000	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.16.26	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab./Kota	Jumlah rekomendasi penerbitan izin Simpan Pinjam	rekomendasi			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.16.27	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab./Kota	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin	rekomendasi			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
2.16.28	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat Kepatuhannya terhadap peraturan perundang undangan	%	87	23,759,150	48	17,750,000	71	3,800,000	71	3,800,000	100.00	100.00	119.00	21,550,000	136.78	90.70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.16.29	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kab./Kota	Jumlah KSP/USP yg diperiksa dan diawasi (Kop)	koperasi			60	17,750,000	77	3,800,000	77	3,800,000	100.00	100.00	137.00	21,550,000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.16.30	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang Sehat	%	70	4,571,950	48	12,250,000	60	8,000,000	30	7,999,940	50.00	100.00	78.00	20,249,940	111.43	442.92	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.16.31	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai Kesehatannya	koperasi			23	12,250,000	70	8,000,000	70	7,999,940	100.00	100.00	93.00	20,249,940			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.16.32	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Presentase Pengurus Koperasi aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	%	85	639,848,150	75	787,069,400	91	36,877,000	91	35,625,100	100.00	96.61	166.00	822,694,500	195.29	128.58	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.16.33	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yg mengikuti Pendidikan dan latihan Perkoperasian	orang			90	787,069,400	120	36,877,000	120	35,625,100	100.00	96.61	210.00	822,694,500			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.16.34	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Aktif	%	87	23,759,150	73	15,600,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	73.00	15,600,000	83.91	65.66	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kab./Kota	Jumlah Koperasi yg diberdayakan dan dilindungi melalui pembinaan dan pendampingan	koperasi			75	15,600,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	75.00	15,600,000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang diberdayakan	%	9	627,088,662	32	381,111,100	7.9	14,599,800	20	8,900,000	253.16	60.96	52.00	390,011,100	577.78	62.19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.17.07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yg diberdayakan melalui pendataan,kemitraan, perizinan, dan kelembagaan.	umkm			279	381,111,100	75	14,599,800	50	8,900,000	66.67	60.96	329.00	390,011,100			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	difasilitasi pengembangan usahanya	%	30	620,412,116	36	584,769,275	250	179,601,520	23.6	126,880,455	9.44	70.65	59.60	711,649,730	198.67	114.71	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.17.08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yg ditingkatkan menjadi usaha kecil	unit usaha			210	584,769,275	120	179,601,520	91.2	126,880,455	76.00	70.65	301.20	711,649,730			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.18.00	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	15,102,425,000	69.92	15,070,652,581	100	5,456,477,100	99.36	5,150,961,001	99.36	94.40	169.28	20,221,613,582	169.28	133.90	Dinas Penanaman Modal & Satu Pintu
2.18.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	dokumen			2	6,123,250	6	3,077,300	6	3,066,600	100.00	99.65	8.00	9,189,850			Dinas Penanaman Modal & Satu Pintu
2.18.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	laporan			27	9,395,769,411	36	3,777,286,200	35.5	3,618,802,929	98.61	95.80	62.50	13,014,572,340			Dinas Penanaman Modal & Satu Pintu
2.18.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	laporan			1	17,600,000	1	9,933,800	1	9,600,000	100.00	96.64	2.00	27,200,000			Dinas Penanaman Modal & Satu Pintu
2.18.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Memiliki Sertifikat Bintek	laporan			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Penanaman Modal & Satu Pintu
2.18.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang ditatakelolakan	jenis			2	886,937,336	3	281,698,000	3	281,217,985	100.00	99.83	5.00	1,168,155,321			Dinas Penanaman Modal & Satu Pintu
2.18.01 .207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	laporan			0	-	9	74,368,890	0	-	-	-	-	-			Dinas Penanaman Modal & Satu Pintu
2.18.01 .208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	laporan			0	-	3	1,163,332,910	3	1,096,256,150	100.00	94.23	3.00	1,096,256,150			Dinas Penanaman Modal & Satu Pintu
2.18.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang pemeliharaan nya dibiayai	unit			16	286,247,203	32	146,780,000	31.2	142,017,337	97.50	96.76	47.20	428,264,540			Dinas Penanaman Modal & Satu Pintu
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Per 100 Juta Nilai PMDN)	%	18	413,364,240	14	187,320,000	15	159,628,900	14.3	145,268,350	95.33	91.00	28.30	332,588,350	157.22	80.46	Dinas Penanaman Modal & Satu Pintu
2.18.02 2.01	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha	laporan			6	187,320,000	1	159,628,900	1	145,268,350	100.00	91.00	7.00	332,588,350			Dinas Penanaman Modal & Satu Pintu
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Investasi yang Masuk per Tahun	%/thn	33	153,212,790	40	280,501,580	30	274,098,000	21	144,419,541	70.00	52.69	61.00	424,921,121	184.85	277.34	Dinas Penanaman Modal & Satu Pintu
2.18.03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Promosi yang diselenggarakan Penanaman Modal	laporan			4	280,501,580	3	274,098,000	2.1	144,419,541	70.00	52.69	6.10	424,921,121			Dinas Penanaman Modal & Satu Pintu
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	%	100	1,266,535,080	11.9	1,346,455,000	12	209,250,000	12	206,575,000	100.00	98.72	23.90	1,553,030,000	23.90	122.62	Dinas Penanaman Modal & Satu Pintu
2.18.04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Layanan Perizinan yang dikelola Penanaman Modal	laporan			18	1,346,455,000	23	209,250,000	23	206,575,000	100.00	98.72	41.00	1,553,030,000			Dinas Penanaman Modal & Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Investor dan Penanam Modal di Daerah yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	100	1,267,380,000	64	984,701,740	100	406,818,000	93.3	340,315,000	93.30	83.65	157.30	1,325,016,740	157.30	104.55	Dinas Penanaman Modal & Satu Pintu
2.18.05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	laporan			65	984,701,740	103	406,818,000	96.1	340,315,000	93.30	83.65	161.10	1,325,016,740			Dinas Penanaman Modal & Satu Pintu
2.18.6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi perizinan dan dan non perizinan yang terintegrasi yang dikelola	%			0	-	12	5,618,000	12	5,600,000	100.00	99.68	12.00	5,600,000			Dinas Penanaman Modal & Satu Pintu
2.18.6.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data penanaman modal dan informasi pelayanan perizinan berbasis elektronik	laporan			0	-	12	5,618,000	12	5,600,000	100.00	99.68	12.00	5,600,000			Dinas Penanaman Modal & Satu Pintu
2.19.00	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga																	
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	9,436,607,302	99.48	10,133,464,909	100	3,242,943,600	79.6	3,074,281,510	79.60	94.80	179.08	13,207,746,419	179.08	139.96	Dinas Pemuda & Olahraga
2.19.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			7	5,887,300	7	1,750,000	7	1,750,000	100.00	100.00	14.00	7,637,300			Dinas Pemuda & Olahraga
2.19.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	laporan			2	8,865,697,360	2	2,843,520,000	2	2,694,803,955	100.00	94.77	4.00	11,560,501,315			Dinas Pemuda & Olahraga
2.19.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	laporan			1	33,735,000	1	13,600,000	1	13,600,000	100.00	100.00	2.00	47,335,000			Dinas Pemuda & Olahraga
2.19.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelolah	orang			28	47,164,060	30	-	0	-	-	#DIV/0!	28.00	47,164,060			Dinas Pemuda & Olahraga
2.19.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi umum yang ditatakelolahkan	jenis			3	471,436,594	3	165,297,000	3	165,297,000	100.00	100.00	6.00	636,733,594			Dinas Pemuda & Olahraga
2.19.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	unit			18	68,958,560	18	-	0	-	-	#DIV/0!	18.00	68,958,560			Dinas Pemuda & Olahraga
2.19.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Daerah yang dibiayai	jenis			3	500,668,071	3	162,132,000	2.8	153,511,150	93.33	94.68	5.80	654,179,221			Dinas Pemuda & Olahraga
2.19.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang pemeliharaannya dibiayai	unit			36	139,917,964	33	56,644,600	20.6	45,319,405	62.42	80.01	56.60	185,237,369			Dinas Pemuda & Olahraga
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	243	511,850,968	1.16	1,209,498,220	1.36	170,911,600	0.7	61,326,150	51.47	35.88	1.86	1,270,824,370	0.77	248.28	Dinas Pemuda & Olahraga
2.19.02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang mendapatkan pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepelaporan pemuda serta wirausaha pemula	laporan			171	989,498,220	100	70,911,600	100	61,326,150	100.00	86.48	271.00	1,050,824,370			Dinas Pemuda & Olahraga
2.19.02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	laporan			1	220,000,000	1	100,000,000	0	-	-	-	1.00	220,000,000			Dinas Pemuda & Olahraga
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Prestasi Olahraga	kali/tahun	232	512,192,430	1	5,253,610,627	1	1,473,094,800	1	1,443,410,000	100.00	97.98	2.00	6,697,020,627	0.86	1,307.52	Dinas Pemuda & Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
2.19.03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabor yang dikembangkan	laporan			0	-	1	-	0	-	-	#DIV/0!	-	-			Dinas Pemuda & Olahraga
2.19.03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan event Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	laporan			2	527,579,840	1	138,150,000	1	138,077,600	100.00	99.95	3.00	665,657,440			Dinas Pemuda & Olahraga
2.19.03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang dibina	laporan			10	295,883,080	4	-	0	-	-	#DIV/0!	10.00	295,883,080			Dinas Pemuda & Olahraga
2.19.03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi olahraga yang dibina	laporan			1	3,835,062,000	2	800,000,000	2	800,000,000	100.00	100.00	3.00	4,635,062,000			Dinas Pemuda & Olahraga
2.19.03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olaharaga Rektreasi yang difasilitasi	laporan			4	595,085,707	4	534,944,800	4	505,332,400	100.00	94.46	8.00	1,100,418,107			Dinas Pemuda & Olahraga
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kwartir Pramuka yang Aktif	%	100	599,600,000	0	-	100	-	0	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Pemuda & Olahraga
2.19.04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kwartir Pramuka yang dibina	laporan			0	-	1	-	0	-		#DIV/0!	-	-			Dinas Pemuda & Olahraga
2.20.00	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																	
2.20.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	6,075,873,897	99.64	5,840,031,113	100	2,357,236,000	85.53	2,270,977,041	85.53	96.34	185.17	8,111,008,154	185.17	133.50	Dinas Persandian & Statistik
2.20.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang di susun tepat waktu	dokumen			8	7,700,000	8	6,461,900	8	5,891,100	100.00	91.17	16.00	13,591,100			Dinas Persandian & Statistik
2.20.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	laporan			7	5,456,693,481	7	2,117,321,900	6.9	2,034,518,224	98.57	96.09	13.90	7,491,211,705			Dinas Persandian & Statistik
2.20.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	laporan			1	23,014,000	1	6,600,000	1	6,600,000	100.00	100.00	2.00	29,614,000			Dinas Persandian & Statistik
2.20.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	orang			20	9,602,400	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	20.00	9,602,400			Dinas Persandian & Statistik
2.20.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub kegiatan administrasi umum yang ditata kelola	jenis			25	353,234,357	25	113,308,500	25	113,304,300	100.00	100.00	50.00	466,538,657			Dinas Persandian & Statistik
2.20.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit			5	28,009,500	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	5.00	28,009,500			Dinas Persandian & Statistik
2.20.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang di biayai	jenis			3	291,723,246	3	92,293,700	3	89,446,747	100.00	96.92	6.00	381,169,993			Dinas Persandian & Statistik
2.20.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaanya di biayai	unit			16	56,804,013	16	21,250,000	16	21,216,670	100.00	99.84	32.00	78,020,683			Dinas Persandian & Statistik
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	226,822,684	85.2	188,610,800	85	39,101,000	85	39,074,800	100.00	99.93	170.20	227,685,600	170.20	100.38	Dinas Persandian & Statistik
2.20.02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang telah terpenuhi data statistik	laporan			44	188,610,800	49	39,101,000	49	39,074,800	100.00	99.93	93.00	227,685,600			Dinas Persandian & Statistik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
2.21.00	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian											#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Persandian & Statistik
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Siber	%	100	71,558,081	85	66,983,250	85	23,525,000	85	23,514,800	100.00	99.96	170.00	90,498,050	170.00	126.47	Dinas Persandian & Statistik
2.21.02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang pengelolaan informasi sesuai SOP	laporan			39	26,888,250	48	10,190,000	48	10,179,800	100.00	99.90	87.00	37,068,050			Dinas Persandian & Statistik
2.21.02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan sandi pada perangkat daerah	laporan			49	40,095,000	49	13,335,000	49	13,335,000	100.00	100.00	98.00	53,430,000			Dinas Persandian & Statistik
2.22.00	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																	
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	6,478,121,790	84.99	6,478,541,892	100	2,450,575,900	99.19	2,279,186,676	99.19	93.01	184.18	8,757,728,568	184.18	135.19	Dinas Kebudayaan
2.22.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			7	5,485,670	11	3,327,000	11	3,325,900	100.00	99.97	18.00	8,811,570			Dinas Kebudayaan
2.22.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	laporan			14	5,417,106,286	14	1,993,734,000	13.8	1,855,837,714	98.57	93.08	27.80	7,272,944,000			Dinas Kebudayaan
2.22.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	laporan			1	11,640,000	1	6,030,000	1	6,000,000	100.00	99.50	2.00	17,640,000			Dinas Kebudayaan
2.22.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	orang			19	3,290,000	23	990,000	23	990,000	100.00	100.00	42.00	4,280,000			Dinas Kebudayaan
2.22.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	jenis			3	530,258,039	4	237,822,900	3.9	212,861,437	97.50	89.50	6.90	743,119,476			Dinas Kebudayaan
2.22.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit			0	-	5	33,413,000	4	33,413,000	80.00	100.00	4.00	33,413,000			Dinas Kebudayaan
2.22.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	jenis			2	409,138,286	3	138,559,000	3	136,756,329	100.00	98.70	5.00	545,894,615			Dinas Kebudayaan
2.22.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	unit			4	101,623,611	4	36,700,000	4	30,002,296	100.00	81.75	8.00	131,625,907			Dinas Kebudayaan
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	100	868,241,037	100	634,313,520	100	111,227,500	99	108,165,000	99.00	97.25	199.00	742,478,520	199.00	85.52	Dinas Kebudayaan
2.22.02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Seni dan Budaya yang Dilaksanakan (Kali/Tahun)	kali			6	495,123,310	6	27,977,500	5.9	24,915,000	98.33	89.05	11.90	520,038,310			Dinas Kebudayaan
2.22.02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pentas Kesenian yang Dilaksanakan/Diikuti (Kali/Tahun)	kali			5	139,190,210	4	-	0	-	-	#DIV/0!	5.00	139,190,210			Dinas Kebudayaan
2.22.02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Adat Istiadat dan Budaya yang dilestarikan	unit			0	-	2	83,250,000	2	83,250,000	100.00	100.00	2.00	83,250,000			Dinas Kebudayaan
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	presentase Sanggar Kesenian yang Mendapatkan Pelatihan/Pembinaan	%	100	299,800,000	100	76,985,270	100	221,393,500	99	186,149,000	99.00	84.08	199.00	263,134,270	199.00	87.77	Dinas Kebudayaan
2.22.03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Grup/Kelompok Kesenian yang dibina	buah			3	76,985,270	3	221,393,500	3	186,149,000	100.00	84.08	6.00	263,134,270			Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Event Pameran Sejarah yang Dilaksanakan	kali/tahun	6	555,000,000	5	193,169,000	3	-	0	-	-	#DIV/0!	5.00	193,169,000	83.33	34.81	Dinas Kebudayaan
2.22.04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Karya Budaya yang dilestarikan	buah			5	193,169,000	50	-	0	-	-	#DIV/0!	5.00	193,169,000			Dinas Kebudayaan
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	persentase cagar budaya yang dikelolah secara terpadu	%	100	314,789,331	0.75	318,908,912	1	204,750,100	1	168,020,985	100.00	82.06	1.75	486,929,897	1.75	154.68	Dinas Kebudayaan
2.22.05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah WBTB/WBB yang di tetapkan	buah			2	42,985,200	4	137,075,120	4	118,643,385	100.00	86.55	6.00	161,628,585			Dinas Kebudayaan
2.22.05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Pengelolaannya Berbasis Kemitraan (Buah)	buah			40	275,923,712	55	67,674,980	55	49,377,600	100.00	72.96	95.00	325,301,312			Dinas Kebudayaan
2.22.05 2.03	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benda Pusaka yang dikelola secara terpadu	laporan			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Kebudayaan
2.23.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang dikelola secara baik	%			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Kebudayaan
2.23.05 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang di kelola Secara baik	unit			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Kebudayaan
2.23.00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan																	
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	7,369,728,570	96.73	7,072,432,926	100	2,483,800,000	96.42	2,350,749,671	96.42	94.64	193.15	9,423,182,597	193.15	127.86	Dinas Perpustakaan
2.23.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			3	6,320,010	7	984,000	7	984,000	100.00	100.00	10.00	7,304,010			Dinas Perpustakaan
2.23.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	laporan			4	6,064,896,235	4	2,190,071,000	3.9	2,092,208,397	97.50	95.53	7.90	8,157,104,632			Dinas Perpustakaan
2.23.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	laporan			1	20,253,335	5	8,400,000	5	8,400,000	100.00	100.00	6.00	28,653,335			Dinas Perpustakaan
2.23.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN PD yang dikelola	orang			9	65,507,000	30	2,165,000	25.5	1,610,000	85.00	74.36	34.50	67,117,000			Dinas Perpustakaan
2.23.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang Ditatakelola	jenis			2	282,362,550	4	84,351,500	3.8	64,192,854	95.00	76.10	5.80	346,555,404			Dinas Perpustakaan
2.23.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang Diadakan	unit			3	52,660,300	8	-	0	-	-	#DIV/0!	3.00	52,660,300			Dinas Perpustakaan
2.23.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Daerah yang dibiayai	jenis			3	452,058,597	3	146,802,500	3	144,511,590	100.00	98.44	6.00	596,570,187			Dinas Perpustakaan
2.23.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang Pemeliharaannya dibiayai	unit			22.1	128,374,899	48	51,026,000	46.2	38,842,830	96.25	76.12	68.30	167,217,729			Dinas Perpustakaan
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	%	15	191,542,220	21.8	659,730,300	4	235,380,000	4	225,755,750	100.00	95.91	25.80	885,486,050	172.00	462.29	Dinas Perpustakaan
2.23.02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Layanan Perpustakaan	laporan			2.8	569,185,300	26	5,600,000	26	5,600,000	100.00	100.00	28.80	574,785,300			Dinas Perpustakaan
2.23.02 2.02	Pembudyaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Operasional Perpustakaan Keliling	laporan			3	90,545,000	1	229,780,000	1	220,155,750	100.00	95.81	4.00	310,700,750			Dinas Perpustakaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah Event Pameran Naskah Kuno yang Dilaksanakan	kali/tahun	1	299,800,000	0	-	1	-	0	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan
2.23.03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilaksanakan	laporan			0	-	20	-	0	-	-	#DIV/0!	-	-			Dinas Perpustakaan
2.24.00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan																	
2.24.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	5,346,285,882	95.34	5,098,453,045	100	2,140,143,380	98.95	2,030,681,370	98.95	94.89	194.29	7,129,134,415	194.29	133.35	Dinas Kearsipan
2.24.012.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	laporan			2	12,617,900	6	3,950,000	6	3,950,000	100.00	100.00	8.00	16,567,900			Dinas Kearsipan
2.24.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	laporan			7	4,256,609,414	11	1,898,152,480	10.9	1,784,071,155	99.09	93.99	17.90	6,040,680,569			Dinas Kearsipan
2.24.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Aset	laporan			11	16,308,000	12	6,201,900	12	6,201,900	100.00	100.00	23.00	22,509,900			Dinas Kearsipan
2.24.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan			2	13,131,700	10	-	0	-	-	#DIV/0!	2.00	13,131,700			Dinas Kearsipan
2.24.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang ditatakelola	jenis			11	391,165,608	14	126,656,000	14	126,543,505	100.00	99.91	25.00	517,709,113			Dinas Kearsipan
2.24.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	unit			1	34,450,900	5	-	5	5,000,000	100.00	#DIV/0!	6.00	39,450,900			Dinas Kearsipan
2.24.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Daerah yang dibiayai	jasa			11	284,005,600	36	81,733,000	36	81,730,500	100.00	100.00	47.00	365,736,100			Dinas Kearsipan
2.24.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pemeliharaannya dibiayai	unit			6	90,163,923	13	23,450,000	12	23,184,310	92.31	98.87	18.00	113,348,233			Dinas Kearsipan
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	27	108,047,470	10	110,096,600	25	56,452,720	25	56,320,200	100.00	99.77	35.00	166,416,800	129.63	154.02	Dinas Kearsipan
2.24.02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	OPD yang memiliki standar operasional prosedur (OPD) pengelolaan Arsip)	laporan			714	64,491,600	100	31,684,420	100	31,623,800	100.00	99.81	814.00	96,115,400			Dinas Kearsipan
2.24.02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	laporan			47	34,207,400	47	3,400,200	47	3,400,200	100.00	100.00	94.00	37,607,600			Dinas Kearsipan
2.24.02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota Melalui JIKN	laporan			10	11,397,600	20	21,368,100	20	21,296,200	100.00	99.66	30.00	32,693,800			Dinas Kearsipan
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	%	10	89,070,580	22	85,889,600	10	7,809,900	10	7,809,900	100.00	100.00	32.00	93,699,500	320.00	105.20	Dinas Kearsipan
2.24.03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip Yang Dimusnahkan Yang Memiliki Retensi Dibawah 10 Tahun	laporan			49	65,871,600	25	5,209,800	25	5,209,800	100.00	100.00	74.00	71,081,400			Dinas Kearsipan
2.24.03 2.02	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	laporan			20	20,018,000	25	2,600,100	20	2,600,100	80.00	100.00	40.00	22,618,100			Dinas Kearsipan
3	Urusan Pemerintahan Pilihan																	
3.25.00	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	13,925,756,694	91.1	12,476,500,814	100	4,367,949,775	82.49	4,124,583,305	82.49	94.43	173.59	16,601,084,119	173.59	119.21	Dinas Perikanan
3.25.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			8	7,602,500	8	1,230,000	8	1,074,840	100.00	87.39	16.00	8,677,340			Dinas Perikanan
3.25.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	laporan			11	10,692,224,192	712	3,895,774,000	702.5	3,692,180,500	98.67	94.77	713.50	14,384,404,692			Dinas Perikanan
3.25.01 2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang difasilitasi	orang			4	76,606,238	42	-	0	-	-	#DIV/0!	4.00	76,606,238			Dinas Perikanan
3.25.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	jenis			2	785,195,247	2	206,166,000	2	203,976,705	100.00	98.94	4.00	989,171,952			Dinas Perikanan
3.25.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit			4	210,581,820	11	24,677,000	0	-	-	-	4.00	210,581,820			Dinas Perikanan
3.25.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	jasa			3	484,970,953	3	172,392,775	3	171,929,770	100.00	99.73	6.00	656,900,723			Dinas Perikanan
3.25.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	unit			63	219,319,864	50	67,710,000	48.1	55,421,490	96.20	81.85	111.10	274,741,354			Dinas Perikanan
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	19,395	2,183,998,330	19122	4,393,190,944	18795.3	739,903,000	18795	543,065,810	100.00	73.40	37,917.00	4,936,256,754	195.50	226.02	Dinas Perikanan
3.25.03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan	unit			49	3,916,053,244	40	-	0	-	-	#DIV/0!	49.00	3,916,053,244			Dinas Perikanan
3.25.03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kelompok nelayan yang diberdayakan	laporan			29	331,990,700	30	693,903,000	30	497,455,810	100.00	71.69	59.00	829,446,510			Dinas Perikanan
3.25.03 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang dikelola	laporan			1	145,147,000	1	46,000,000	1	45,610,000	100.00	99.15	2.00	190,757,000			Dinas Perikanan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	192,110	391,246,495	147679	1,679,310,850	176629	271,847,500	174863	264,930,800	99.00	97.46	######	1,944,241,650	167.89	496.94	Dinas Perikanan
3.25.04 2.01	Pemberdayaan Pembudid daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Yang	laporan			29	53,725,000	30	21,410,000	29.4	18,950,000	98.00	88.51	58.40	72,675,000			Dinas Perikanan
3.25.04 2.02	Pengelolaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Luas lahan budidaya yang produktif	ha			3	1,625,585,850	3	250,437,500	3	245,980,800	100.00	98.22	6.00	1,871,566,650			Dinas Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	ton/tahun	14,473	614,733,379	110	973,277,947	139.11	139,502,725	139.11	131,788,005	100.00	94.47	249.11	1,105,065,952	1.72	179.76	Dinas Perikanan
3.25.06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah tanda daftar usaha pengolahan yang diterbitkan	tanda daftar			12	25,150,000	12	10,660,000	12	10,660,000	100.00	100.00	24.00	35,810,000			Dinas Perikanan
3.25.06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produk yang dikembangkan	produk			4	50,755,000	4	17,642,825	4	17,635,000	100.00	99.96	8.00	68,390,000			Dinas Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
3.25.06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten / Kota	Jumlah kelompok pengolah dan pemasar perikanan	kelompok			9	897,372,947	22758.3	111,199,900	22758	103,493,005	100.00	93.07	######	1,000,865,952			Dinas Perikanan
3.26.00	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																	
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	9,964,869,322	99.52	8,550,542,425	100	3,267,220,200	80.58	2,943,998,563	80.58	90.11	180.10	11,494,540,988	180.10	115.35	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			6	3,600,000	6	1,921,900	3	-	50.00	-	9.00	3,600,000			Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan penatausahaan keuangan	laporan			12	7,411,739,017	14	2,604,201,000	12.9	2,455,779,397	92.14	94.30	24.90	9,867,518,414			Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan pengelolaan aset	laporan			12	16,500,000	1	6,750,000	1	6,600,000	100.00	97.78	13.00	23,100,000			Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelolah	orang			4	23,484,220	6	71,991,500	5.6	61,745,664	93.33	85.77	9.60	85,229,884			Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub kegiatan adaministrasi umum yang ditatakelolakan	laporan			2	267,529,418	2	257,689,000	1.5	154,390,995	75.00	59.91	3.50	421,920,413			Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah yang diadakan	unit			2	47,567,000	4	55,028,580	2.5	47,924,000	62.50	87.09	4.50	95,491,000			Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	jenis			3	666,748,797	3	235,088,220	2.7	197,127,997	90.00	83.85	5.70	863,876,794			Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaan dibiayai	unit			26	113,373,973	22	34,550,000	18.3	20,430,510	83.18	59.13	44.30	133,804,483			Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	%	0.30	1,729,989,904	117 000	655,376,300	5	132,605,000	4.7	113,418,689	94.00	85.53	######	768,794,989	######	44.44	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.02 2.01	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi pariwisata prioritas yang dikelola	laporan			1	648,426,300	1	82,580,000	1	82,578,689	100.00	100.00	2.00	731,004,989			Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Prioritas yang Dikelola						1	50,025,000	0.9	30,840,000	90.00	61.65	0.90	30,840,000			Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.02 2.02	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar usaha pengolahan	laporan			3	6,950,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	3.00	6,950,000			Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisata	%	146	1,379,886,462	10	724,447,444	10	379,009,800	10	355,056,048	100.00	93.68	20.00	1,079,503,492	13.70	78.23	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
3.26.03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Angka kunjungan wisatawan (%/Tahun)	laporan			130 000	724,447,444	10	379,009,800	10	355,056,048	100.00	93.68	##### #	1,079,50 3,492			Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Usaha Ekraf Binaan yang Aktif Berusaha	%	90	299,800,000	10	46,155,000	0	-	0	-	#DIV/ 0!	#DIV/0!	10.00	46,155,0 00	11.11	15.40	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.04 2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Gedung ruang kreatif	unit			0	-	0	-	0	-	#DIV/ 0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.04 2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Ekosistem ekonomi kreatif	ekraf			2	46,155,000	100	208,156,000	0	-	-	-	2.00	46,155,0 00			Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tingkat Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah	%	90	845,058,252	88. 97	523,515,959	10	208,156,000	10	199,229,800	100.00	95.71	98.97	722,745, 759	109.97	85.53	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif	orang			12	312,300,959	10	208,156,000	10	199,229,800	100.00	95.71	22.00	511,530, 759			Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.26.05 2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kompetensi pelaku ekonomi kreatif	ekraf			80	211,215,000	100	-	0	-	-	#DIV/0!	80.00	211,215, 000			Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
3.27.00	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	41,073,131, 042	100	39,706,271, 227	100	14,138,551, 010	99. 42	13,584,855, 894	99.42	96.08	199.42	53,291,1 27,121	199.42	129.7 5	Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	dokumen			8	59,083,750	7	11,606,000	6.9	10,448,000	98.57	90.02	14.90	69,531,7 50			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	laporan			28	35,228,645, 149	28	12,537,124, 000	27. 7	12,020,799, 806	98.93	95.88	55.70	47,249,4 44,955			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	laporan			5	43,500,000	5	18,060,000	5	18,000,000	100.00	99.67	10.00	61,500,0 00			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang Dikelola	orang			136	246,424,102	7	49,940,075	7	49,940,075	100.00	100.00	143.00	296,364, 177			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang Ditatakelolakan	laporan			4	1,479,441,7 56	5	552,084,500	5	550,236,886	100.00	99.67	9.00	2,029,67 8,642			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
3.27.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Negara yang Diadakan	unit			10	249,997,500	20	116,455,000	12	106,600,000	60.00	91.54	22.00	356,597,500			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang Dibiayai	jasa			3	2,010,671,199	3	555,985,435	3	549,774,328	100.00	98.88	6.00	2,560,445,527			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pemeliharaannya Dibiayai	unit			214	388,507,771	147	297,296,000	145.2	279,056,799	98.78	93.86	359.20	667,564,570			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	%	5	14,124,993,835	5	15,498,108,384	3	6,503,463,090	3.1625	6,233,691,381	105.42	95.85	8.16	21,731,799,765	163.25	153.85	Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Kelompok Tani dan Sarana yang Diawasi	kelompok			10	2,177,692,970	6	689,955,000	5.7	680,063,360	95.00	98.57	15.70	2,857,756,330			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit Unggul Hewan/Tanaman yang Beredar di Masyarakat	buah			5700	2,038,721,550	4	2,281,753,090	3.9	2,032,454,247	97.50	89.07	5,703.90	4,071,175,797			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan yang Dilaksanakan	laporan			12	257,792,028	12	13,000,000	12	13,000,000	100.00	100.00	24.00	270,792,028			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.02 2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengawasan/Pemeriksaan Obat Hewan Ditingkat Pengecer	buah			12	12,900,000	12	5,000,000	12	4,950,000	100.00	99.00	24.00	17,850,000			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit Ayam Hasil Penetasan UPTD	bibit			131000	3,083,505,994	12	1,000,000,000	12	994,778,120	100.00	99.48	######	4,078,284,114			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Jenis/Bibit Ternak dan Pakan Ternak yang Diadakan	jenis			4	7,927,495,842	4	2,513,755,000	4	2,508,445,654	100.00	99.79	8.00	10,435,941,496			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Lahan Sawah ber Indeks Pertanaman (IP) diatas 2	%	9	2,120,338,762	9	8,738,242,600	5	1,091,580,000	4.8	722,928,040	96.00	66.23	13.80	9,461,170,640	153.33	446.21	Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Prasarana Pertanian yang Dikelola	unit			122	229,742,870	5	184,900,000	4.8	153,001,440	96.00	82.75	126.80	382,744,310			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun	unit			11	8,486,738,480	8	902,800,000	7.4	566,046,600	92.50	62.70	18.40	9,052,785,080			Dinas Pertanian, perkebunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
				4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
																		& Peternakan
3.27.03 2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah Pengembangan Bibit Ternak yang Diawasi	laporan			2	21,761,250	2	3,880,000	2	3,880,000	100.00	100.00	4.00	25,641,250			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	28	206,862,000	2	506,297,800	2	93,400,000	2	86,300,000	100.00	92.40	4.00	592,597,800	14.29	286.47	Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak yang Ditangani	laporan			10250	261,747,800	9	39,000,000	8.8	32,300,000	97.78	82.82	######	294,047,800			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner						5	49,400,000	12	49,200,000	240.00	99.60	12.00	49,200,000			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.04 2.02	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Ternak yang ditertibkan	laporan			250	244,550,000	12	5,000,000	12	4,800,000	100.00	96.00	262.00	249,350,000			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Lahan Pertanian yang Gagal Panen/Gagal Tanam	%	0.5	707,719,123	1	919,548,430	1	49,095,000	1	42,934,500	100.00	87.45	2.00	962,482,930	400.00	136.00	Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Lahan Pertanian yang Dikendalikan	laporan			100	919,548,430	70	49,095,000	67.9	42,934,500	97.00	87.45	167.90	962,482,930			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang Berizin	%	37	599,600,000	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.06 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pertanian yang Ditertibkan	laporan			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.06 2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Usaha Peternakan yang Ditertibkan	laporan			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.06 2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	laporan			0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan kapasitas Kelembagaan Petani dan SDM Pertanian	%	76	389,586,412	55	929,936,951	53	281,854,900	53	281,727,200	100.00	99.95	108.00	1,211,664,151	142.11	311.01	Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
3.27.07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluhan dan Pendampingan Kelompok Tani	laporan			12	929,936,951	53	281,854,900	53	281,727,200	100.00	99.95	65.00	1,211,664,151			Dinas Pertanian, perkebunan & Peternakan
3.30.00	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																	
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	12,800,554,811	100	12,181,541,809	100	4,407,610,350	99.56	4,186,996,460	99.56	94.99	199.56	16,368,538,269	199.56	127.87	Dinas Perdagangan
3.30.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	dokumen			8	20,535,500	8	8,614,200	8	4,413,800	100.00	51.24	16.00	24,949,300			Dinas Perdagangan
3.30.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penataausahaan Keuangan (Laporan	laporan			4	10,878,630,838	4	3,980,259,090	4	3,793,775,518	100.00	95.31	8.00	14,672,406,356			Dinas Perdagangan
3.30.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset (Laporan	laporan			4	28,475,750	2	9,707,800	2	8,907,700	100.00	91.76	6.00	37,383,450			Dinas Perdagangan
3.30.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi ASN Perangkat Daerah Yang Dikelola (Jenis)	jenis			42	46,104,530	52	13,116,300	52	12,006,300	100.00	91.54	94.00	58,110,830			Dinas Perdagangan
3.30.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Yang Ditatakelolakan (Jenis)	jenis			5	397,629,248	5	184,543,059	5	184,486,499	100.00	99.97	10.00	582,115,747			Dinas Perdagangan
3.30.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Jenis/Unit)	jenis			2	13,475,400	17	26,095,000	17	26,095,000	100.00	100.00	19.00	39,570,400			Dinas Perdagangan
3.30.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Daerah Yang Dibiayai	jasa			3	663,067,657	4	140,284,901	3.9	112,638,142	97.50	80.29	6.90	775,705,799			Dinas Perdagangan
3.30.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Pemeliharaannya Dibiayai (Unit)	unit			46	133,622,886	85	44,990,000	85	44,673,501	100.00	99.30	131.00	178,296,387			Dinas Perdagangan
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	71	1,991,502,629	13.5	2,064,192,650	57.14	1,273,875,400	54.3	843,358,600	95.03	66.20	67.80	2,907,551,250	94.93	146.00	Dinas Perdagangan
3.30.03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Yang Berfungsi Baik (Unit)	unit			0	-	5	646,100,000	4.5	271,975,000	90.00	42.09	4.50	271,975,000			Dinas Perdagangan
3.30.03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pedagang Yang Dibina (Pedagang)	laporan			1427	2,064,192,650	3	627,775,400	3	571,383,600	100.00	91.02	1,430.00	2,635,576,250			Dinas Perdagangan
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Distributor Barang Bersubsidi, Bahan Pokok dan Penting Lainnya yang Diawasi	%	100	1,630,171,704	100	1,564,444,101	100	403,208,360	96.67	345,824,516	96.67	85.77	196.67	1,910,268,617	196.67	117.18	Dinas Perdagangan
3.30.04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Upaya Penjaminan Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting (Kali)	kali/tahun			2	727,921,901	2	166,378,630	1.9	140,503,428	95.00	84.45	3.90	868,425,329			Dinas Perdagangan
3.30.04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Barang Bersubsidi yang Diawasi (Jenis)	unit			11	836,522,200	14	232,829,730	13.3	201,321,088	95.00	86.47	24.30	1,037,843,288			Dinas Perdagangan
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah	Jenis Pengawasan Yang Dilaksanakan						4	4,000,000	2	4,000,000	50.00	100.00	2.00	4,000,000			Dinas Perdagangan
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	64.5	136,540,312	54.7	164,243,290	63.24	45,076,000	63	43,165,000	99.62	95.76	117.70	207,408,290	182.48	151.90	Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
3.30.06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan tera dan tera ulang (Kali)	laporan			5	164,243,290	2	45,076,000	2	43,165,000	100.00	95.76	7.00	207,408,290			Dinas Perdagangan
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha Produk lokal Yang Masuk Pasar	%	57.69	89,880,040	36.76	40,822,882	34.61	36,874,000	32.9	32,860,460	95.06	89.12	69.66	73,683,342	120.75	81.98	Dinas Perdagangan
3.30.07 2.02	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Iven Promosi Perdagangan Yang Dilaksanakan/Diikuti (Iven)	laporan			1	40,822,882	1	36,874,000	1	32,860,460	100.00	89.12	2.00	73,683,342			Dinas Perdagangan
3.31.00	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																	
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	7,217,011,949	91.02	6,548,572,895	100	2,177,687,500	62.53	1,993,199,219	62.53	91.53	153.55	8,541,772,114	153.55	118.36	Dinas Perindustrian
3.31.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu (dokumen)	dokumen			8	6,240,000	8	1,582,800	5.4	779,500	67.50	49.25	13.40	7,019,500			Dinas Perindustrian
3.31.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	laporan			45	5,801,158,807	45	1,894,583,000	30.9	1,788,815,875	68.67	94.42	75.90	7,589,974,682			Dinas Perindustrian
3.31.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelola Aset	laporan			1	13,685,000	1	6,815,000	1	6,665,000	100.00	97.80	2.00	20,350,000			Dinas Perindustrian
3.31.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN Perangkat Daerah yang dikelola	laporan			0	-	20	17,832,000	7.6	7,473,200	38.00	41.91	7.60	7,473,200			Dinas Perindustrian
3.31.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang ditatakelolakan	jenis			3	296,694,215	2	112,191,000	1.5	84,984,376	75.00	75.75	4.50	381,678,591			Dinas Perindustrian
3.31.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	unit			2	51,834,000	17	11,100,000	0	-	-	-	2.00	51,834,000			Dinas Perindustrian
3.31.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Daerah yang dibiayai	jasa			3	304,846,825	3	88,923,700	2.5	69,971,680	83.33	78.69	5.50	374,818,505			Dinas Perindustrian
3.31.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang pemeliharaannya dibiayai	unit			465	74,114,048	17	44,660,000	11.6	34,509,588	68.24	77.27	476.60	108,623,636			Dinas Perindustrian
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	95	122,339,386	72.8	192,196,100	85	438,460,500	40.8	304,960,117	48.00	69.55	113.60	497,156,217	119.58	406.37	Dinas Perindustrian
3.31.02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun dan dievaluasi	dokumen			127	192,196,100	5	438,460,500	2.4	304,960,117	48.00	69.55	129.40	497,156,217			Dinas Perindustrian
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Unit Industri yang Berizin	%	17	29,980,000	18	84,600,000	14	-	0	-	-	#DIV/0!	18.00	84,600,000	105.88	282.19	Dinas Perindustrian
3.31.03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Memperoleh Izin Usaha Industri	laporan			28	84,600,000	6	-	0	-	-	#DIV/0!	28.00	84,600,000			Dinas Perindustrian
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Industri Kecil Menengah dan Perusahaan di Kawasan Industri Kota Palopo yang Datanya Masuk dalam SII Nasional	%	35	27,646,057	11.3	17,371,500	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	11.30	17,371,500	32.29	62.84	Dinas Perindustrian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
3.31.04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang di data	laporan			363	17,371,500	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	363.00	17,371,500			Dinas Perindustrian
3.32.00	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi																	
3.32.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	6,249,996,556	88.15	5,927,695,791	100	2,445,155,000	93.4	2,273,397,179	93.40	92.98	181.55	8,201,092,970	181.55	131.22	Dinas Transmigrasi
3.32.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			2	2,875,250	8	1,490,000	7.2	515,000	90.00	34.56	9.20	3,390,250			Dinas Transmigrasi
3.32.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan yang disusun	laporan			4	5,354,026,646	22	2,247,626,000	21.6	2,144,539,139	98.18	95.41	25.60	7,498,565,785			Dinas Transmigrasi
3.32.01 2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Adminitrasi ASN PD yang Dikelola	orang			22	9,000,000	24	12,000,000	0	-	-	-	22.00	9,000,000			Dinas Transmigrasi
3.32.01 2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumah Sub kegiatan adminstrasi umum yang ditatakelolakan	laporan			56	356,422,919	1	103,104,000	1	82,911,040	100.00	80.41	57.00	439,333,959			Dinas Transmigrasi
3.32.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	unit			3	66,049,000	4	80,935,000	405.9	45,432,000	10,147.50	56.13	408.90	111,481,000			Dinas Transmigrasi
3.32.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pennjang urusan daerah yang dibiayai	jasa			19	152,132,998	450	57,695,000	405	32,806,850	90.00	56.86	424.00	184,939,848			Dinas Transmigrasi
3.32.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerahyang pemelihraannya dibiayai	unit			5	53,237,978	1	23,240,000	0.9	12,625,150	90.00	54.33	5.90	65,863,128			Dinas Transmigrasi
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya	ha	43	265,625,798	300	166,634,241	1	77,247,000	0.9	52,662,560	90.00	68.17	300.90	219,296,801	699.77	82.56	Dinas Transmigrasi
3.32.03 2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi peserta transmigrasi	laporan			5	166,634,241	600	77,247,000	555	52,662,560	92.50	68.17	560.00	219,296,801			Dinas Transmigrasi
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	
4.01.00	Sekretariat Daerah																	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	91,839,511,244	91.45	94,805,666,495	100	30,147,058,501	97.98	28,616,209,009	97.98	94.92	189.43	123,421,875,504	189.43	134.39	Sekretariat Daerah
4.01.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			7	238,557,800	7	166,301,100	7	166,290,760	100.00	99.99	14.00	404,848,560			Sekretariat Daerah
4.01.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan penatausahaan keuangan	laporan			3	41,963,075,123	7	13,784,559,900	6.9	13,269,207,801	98.57	96.26	9.90	55,232,282,924			Sekretariat Daerah
4.01.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	laporan			4	569,463,945	4	198,900,000	4	189,530,300	100.00	95.29	8.00	758,994,245			Sekretariat Daerah
4.01.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN Perangkat Daerah Yang Dikelola	orang			40	227,329,733	40	93,522,000	39	87,295,759	97.50	93.34	79.00	314,625,492			Sekretariat Daerah
4.01.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Subkegiatan Administrasi Umum yang ditatakelolakan	jasa			7	10,183,738,516	8	1,596,425,851	8	1,588,979,361	100.00	99.53	15.00	11,772,717,877			Sekretariat Daerah
4.01.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	unit			4	3,184,304,200	5	750,034,200	4.7	671,217,670	94.00	89.49	8.70	3,855,521,870			Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
4.01.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	jasa			4	19,065,679,337	4	6,515,210,900	3.9	5,948,542,166	97.50	91.30	7.90	25,014,221,503			Sekretariat Daerah
4.01.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang pemeliharaannya dibiayai	unit			431	4,548,657,515	545	1,862,044,000	512.3	1,696,148,091	94.00	91.09	943.30	6,244,805,606			Sekretariat Daerah
4.01.01 2.15	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Operasional KDH dan WKDH	laporan			26	7,937,411,128	36	2,534,500,000	36	2,531,638,188	100.00	99.89	62.00	10,469,049,316			Sekretariat Daerah
4.01.01 2.16	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Kerumahtanggaan yang di Fasilitasi	laporan			3	3,133,840,000	3	889,505,000	3	884,460,950	100.00	99.43	6.00	4,018,300,950			Sekretariat Daerah
4.01.01 2.17	Penataan Organisasi	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi umum yang ditatakelolakan	laporan			7	918,162,259	49	662,511,250	46.6	489,472,028	95.10	73.88	53.60	1,407,634,287			Sekretariat Daerah
4.01.01 2.18	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan protokoleran	laporan			1	2,835,446,939	1	1,093,544,300	1	1,093,425,935	100.00	99.99	2.00	3,928,872,874			Sekretariat Daerah
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	78,115,498,320	97.92	47,319,451,561	100	11,286,393,370	97	9,774,208,253	97.00	86.60	194.92	57,093,659,814	194.92	73.09	Sekretariat Daerah
4.01.02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan	laporan			20	15,880,428,409	20	768,424,800	19.4	699,467,401	97.00	91.03	39.40	16,579,895,810			Sekretariat Daerah
4.01.02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Dilaksanakan	laporan			19	27,563,621,084	21	8,364,245,400	19.1	6,929,590,095	90.95	82.85	38.10	34,493,211,179			Sekretariat Daerah
4.01.02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Layanan Produk Hukum Daerah yang	layanan			857	3,016,281,918	857	1,035,283,000	857	1,029,945,495	100.00	99.48	1,714.00	4,046,227,413			Sekretariat Daerah
4.01.02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Rekomendasi Terkait Pengelolaan Perekonomian Daerah	laporan			34	859,120,150	34	1,118,440,170	34	1,115,205,262	100.00	99.71	68.00	1,974,325,412			Sekretariat Daerah
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan data/informasi bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan	%	100	3,191,839,198	97.86	3,269,250,389	100	1,543,925,049	100	1,532,076,505	100.00	99.23	197.86	4,801,326,894	197.86	150.43	Sekretariat Daerah
4.01.03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Rekomendasi Terkait Pengelolaan Perekonomian Daerah	laporan			11	964,988,956	12	480,553,900	12	478,946,225	100.00	99.67	23.00	1,443,935,181			Sekretariat Daerah
4.01.03 2.03	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah yang di	laporan			24	756,388,653	25	325,983,750	25	322,420,928	100.00	98.91	49.00	1,078,809,581			Sekretariat Daerah
4.01.03 2.04	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pemenuhan 17 Standar LPSE	laporan			83	1,184,383,170	83	586,452,220	83	580,861,692	100.00	99.05	166.00	1,765,244,862			Sekretariat Daerah
4.01.03 2.05	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Pemantauan SDA yang dilaksanakan	laporan			3	363,489,610	3	150,935,179	3	149,847,660	100.00	99.28	6.00	513,337,270			Sekretariat Daerah
4.02.00	Sekretariat DPRD																	
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	73,542,654,142	82.91	76,832,824,548	100	25,968,528,800	93.39	24,250,908,118	93.39	93.39	176.30	101,083,732,666	176.30	137.45	Sekretariat DPRD
4.02.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	dokumen			7	59,259,200	7	24,692,000	6.9	24,468,000	98.57	99.09	13.90	83,727,200			Sekretariat DPRD
4.02.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Penatausahaan Keuangan	laporan			3	14,696,764,788	3	3,071,249,000	3	2,816,140,653	100.00	91.69	6.00	17,512,905,441			Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
4.02.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Aset	laporan			1	35,000,000	1	15,600,000	0.9	12,000,000	90.00	76.92	1.90	47,000,000			Sekretariat DPRD
4.02.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN Perangkat Daerah Yang Dikelola	laporan			12	809,077,960	37	270,610,000	36.6	238,535,814	98.92	88.15	48.60	1,047,613,774			Sekretariat DPRD
4.02.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang ditatakelolakan	laporan			4	2,844,299,238	5	900,725,000	3.8	863,040,207	76.00	95.82	7.80	3,707,339,445			Sekretariat DPRD
4.02.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Diadakan	unit			13	1,051,900,600	30	643,741,000	27	496,529,023	90.00	77.13	40.00	1,548,429,623			Sekretariat DPRD
4.02.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Daerah yang Dibiayai	jasa			3	4,039,669,167	3	2,022,237,896	3	1,930,966,759	100.00	95.49	6.00	5,970,635,926			Sekretariat DPRD
4.02.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pemeliharaannya Dibiayai	unit			32	1,364,455,170	33	559,920,000	30.5	431,853,745	92.42	77.13	62.50	1,796,308,915			Sekretariat DPRD
4.02.01 2.10	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Yang Difasilitasi	laporan			2	30,357,886,941	3	12,352,458,000	3	11,546,907,612	100.00	93.48	5.00	41,904,794,553			Sekretariat DPRD
4.02.01	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Administrasi DPRD yang dilaksanakan	laporan			2	21,574,511,484	3	6,107,295,904	2.2	5,890,466,305	73.33	96.45	4.20	27,464,977,789			Sekretariat DPRD
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Prolegda yang Ditetapkan Menjadi Regulasi Daerah	%	100	7,776,009,250	80.09	7,401,782,675	100	2,977,090,200	72.03	2,686,490,619	72.03	90.24	152.12	10,088,273,294	152.12	129.74	Sekretariat DPRD
4.02.02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Rancangan Perda yang difasilitasi	laporan			3	4,591,512,727	25	1,625,517,050	24.5	1,574,682,584	98.00	96.87	27.50	6,166,195,311			Sekretariat DPRD
4.02.02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen yang disusun	dokumen			3	178,497,000	11	94,930,000	8.2	44,335,000	74.55	46.70	11.20	222,832,000			Sekretariat DPRD
4.02.02 2.03	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen yang disusun	dokumen			2	1,321,778,038	4	805,538,000	3	721,104,255	75.00	89.52	5.00	2,042,882,293			Sekretariat DPRD
4.02.02 2.04	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Aspirasi Masyarakat Yang dilaksanakan	laporan			3	1,037,013,500	3	312,858,000	1.9	232,233,000	63.33	74.23	4.90	1,269,246,500			Sekretariat DPRD
4.02.02	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Tugas DPRD yang difasilitas	laporan			3	272,981,410	4	138,247,150	2	114,135,780	50.00	82.56	5.00	387,117,190			Sekretariat DPRD
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																	
5.01.00	Perencanaan																	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	13,726,522,880	100	12,369,365,328	100	4,276,893,210	99.29	3,991,736,976	99.29	93.33	199.29	16,361,102,304	199.29	119.19	BAPPEDA
5.01.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			8	40,781,000	4	12,100,000	4	12,100,000	100.00	100.00	12.00	52,881,000			BAPPEDA
5.01.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	laporan			12	8,289,401,037	14	3,122,940,000	14	3,010,610,698	100.00	96.40	26.00	11,300,011,735			BAPPEDA
5.01.01 2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	jenis			35	599,934,442	32	16,995,750	30.4	9,995,750	95.00	58.81	65.40	609,930,192			BAPPEDA
5.01.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang Ditatakelolakan	laporan			5	1,780,648,655	5	493,200,980	5	492,852,983	100.00	99.93	10.00	2,273,501,638			BAPPEDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
5.01.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit			21	310,466,500	8	129,631,980	8	128,612,980	100.00	99.21	29.00	439,079,480			BAPPEDA
5.01.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	jenis			45	1,270,472,205	4	476,704,000	4	316,163,885	100.00	66.32	49.00	1,586,636,090			BAPPEDA
5.01.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	unit			17	77,661,489	17	25,320,500	17	21,400,680	100.00	84.52	34.00	99,062,169			BAPPEDA
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Tahunan Terhadap Target Kinerja Tahunan dalam RKPD	%	100	2,154,960,152	88.16	1,769,415,017	100	799,999,800	100	691,433,296	100.00	86.43	188.16	2,460,848,313	188.16	114.19	BAPPEDA
5.01.02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan	dokumen			3	867,673,772	3	568,710,800	3	536,028,825	100.00	94.25	6.00	1,403,702,597			BAPPEDA
5.01.02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikelolah	laporan			2	206,661,185	2	34,083,000	2	21,453,560	100.00	62.95	4.00	228,114,745			BAPPEDA
5.01.02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pengendalian dan Evaluasi	laporan			10	695,080,060	10	197,206,000	10	133,950,911	100.00	67.92	20.00	829,030,971			BAPPEDA
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	%	100	2,527,568,081	96.3	2,149,396,001	100	538,001,500	88.89	435,722,251	88.89	80.99	185.19	2,585,118,252	185.19	102.28	BAPPEDA
5.01.03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dokumen perencanaannya dikoordinasikan	laporan			49	959,836,421	49	246,812,500	49	205,106,820	100.00	83.10	98.00	1,164,943,241			BAPPEDA
5.01.03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Dokumen Perencanaanya dikoordinasikan	laporan			5	595,329,230	5	115,446,000	10	79,407,742	200.00	68.78	15.00	674,736,972			BAPPEDA
5.01.03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dokumen perencanaannya dikoordinasikan	laporan			9	594,230,350	9	175,743,000	5	151,207,689	55.56	86.04	14.00	745,438,039			BAPPEDA
5.02.00	Keuangan																	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	57,845,172,725	97.64	27,324,215,062	100	8,688,063,682	93.75	8,064,261,606	93.75	92.82	191.39	35,388,476,668	191.39	61.18	BPKAD
5.02.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			7	23,216,250	3	20,000,000	3	20,000,000	100.00	100.00	10.00	43,216,250			BPKAD
5.02.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai SAP	laporan			14	14,406,932,235	12	4,979,029,684	10.8	4,443,099,305	90.00	89.24	24.80	18,850,031,540			BPKAD
5.02.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	laporan			1	96,400,000	1	44,600,000	1	44,600,000	100.00	100.00	2.00	141,000,000			BPKAD
5.02.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	laporan			32	243,787,446	50	78,970,000	50	77,287,601	100.00	97.87	82.00	321,075,047			BPKAD
5.02.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	jenis			126	1,525,044,431	132	591,684,000	114.4	591,680,023	86.67	100.00	240.40	2,116,724,454			BPKAD
5.02.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah yang diadakan	unit			34	5,641,809,190	15	547,779,298	13.7	496,979,298	91.33	90.73	47.70	6,138,788,488			BPKAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
5.02.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	jasa			26	3,798,632,839	36	2,015,365,700	36	1,983,681,236	100.00	98.43	62.00	5,782,314,075			BPKAD
5.02.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	unit			52	1,588,392,671	69	410,635,000	69	406,934,143	100.00	99.10	121.00	1,995,326,814			BPKAD
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kesesuaian Pagu pada Dokumen Penganggaran Terhadap Dokumen Perencanaan	%	100	41,477,646,289	92.95	18,970,429,706	100	7,860,007,000	87	6,770,666,444	87.00	86.14	179.95	25,741,096,149	179.95	62.06	BPKAD
5.02.02 .2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah	dokumen			136	4,387,673,160	204	1,735,546,000	204	1,708,352,860	100.00	98.43	340.00	6,096,026,020			BPKAD
5.02.02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Kuangan yang diterbitkan	dokumen			4200	5,513,817,161	4200	1,961,091,000	4200	1,924,514,347	100.00	98.13	8,400.00	7,438,331,508			BPKAD
5.02.02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo	laporan			1	4,930,773,139	1	2,053,005,000	1	2,032,857,198	100.00	99.02	2.00	6,963,630,337			BPKAD
5.02.02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Bunga Utang dan Kegiatan Darurat yang dibiayai	laporan			1	4,053,733,246	3	2,043,165,000	2	1,037,742,039	66.67	50.79	3.00	5,091,475,284			BPKAD
5.02.02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	laporan			1	84,433,000	1	67,200,000	1	67,200,000	100.00	100.00	2.00	151,633,000			BPKAD
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Barang yang Memenuhi SAP	%	100	7,817,716,712	84	10,679,032,324	100	4,048,305,000	81.27	3,916,576,957	81.27	96.75	165.27	14,595,609,281	165.27	186.70	BPKAD
5.02.03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	dokumen			16	10,679,032,324	14	4,048,305,000	11.4	3,916,576,957	81.43	96.75	27.40	14,595,609,281			BPKAD
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	20,959,293,216	95.31	19,876,995,785	100	8,552,498,500	98.77	8,090,226,712	98.77	94.59	194.08	27,967,222,497	194.08	133.44	BAPENDA
5.02.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah Yang di Susun Tepat Waktu	dokumen			6	7,748,500	6	2,609,000	6	2,609,000	100.00	100.00	12.00	10,357,500			BAPENDA
5.02.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	laporan			4	15,494,488,609	2	6,981,042,200	3.9	6,576,434,490	195.00	94.20	7.90	22,070,923,099			BAPENDA
5.02.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	laporan			1	125,050,800	1	45,795,100	1	45,794,500	100.00	100.00	2.00	170,845,300			BAPENDA
5.02.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi ASN Perangkat Daerah yang dikelola	orang			166	180,810,750	38	41,799,800	38	41,798,750	100.00	100.00	204.00	222,609,500			BAPENDA
5.02.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	laporan			4	2,296,820,532	4	824,692,500	4	815,229,576	100.00	98.85	8.00	3,112,050,108			BAPENDA
5.02.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	unit			21	45,965,000	19	88,095,000	19	87,670,000	100.00	99.52	40.00	133,635,000			BAPENDA
5.02.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	laporan			3	1,448,658,406	3	467,934,900	2.9	424,158,358	96.67	90.64	5.90	1,872,816,764			BAPENDA
5.02.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Pemeliharaannya dibiayai	unit			48	277,453,188	64	100,530,000	61.6	96,532,038	96.25	96.02	109.60	373,985,226			BAPENDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Kesesuaian Realisasi Pendapatan Daerah dengan Target Pendapatan Daerah	%	100	10,726,499,830	95.65	11,117,394,350	100	3,756,850,700	99.5	3,734,460,800	99.50	99.40	195.15	14,851,855,150	195.15	138.46	BAPENDA
5.02.04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Total Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi (Milyar/Tahun)	laporan			211	11,117,394,350	185	3,756,850,700	185	3,734,460,800	100.00	99.40	396.00	14,851,855,150			BAPENDA
5.03.00	Kepegawaian																	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	13,473,838,699	71.58	12,471,964,826	100	4,570,842,500	86.92	4,346,169,018	86.92	95.08	158.50	16,818,133,844	158.50	124.82	BKPSDM
5.03.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			3	22,000,000	3	5,160,000	3	4,800,000	100.00	93.02	6.00	26,800,000			BKPSDM
5.03.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	laporan			3	9,481,399,438	3	3,564,538,000	2.9	3,388,955,631	96.67	95.07	5.90	12,870,355,069			BKPSDM
5.03.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	laporan			1	15,600,000	1	7,914,000	1	7,800,000	100.00	98.56	2.00	23,400,000			BKPSDM
5.03.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	orang			5	45,127,425	39	36,609,000	39	35,984,385	100.00	98.29	44.00	81,111,810			BKPSDM
5.03.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	laporan			3	1,187,090,935	3	359,211,500	3	358,610,767	100.00	99.83	6.00	1,545,701,702			BKPSDM
5.03.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit			0	78,757,500	22	41,450,000	0	-	-	-	-	78,757,500			BKPSDM
5.03.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiaya	jasa			6	1,500,976,900	9	514,460,000	9	509,617,100	100.00	99.06	15.00	2,010,594,000			BKPSDM
5.03.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	unit			66	141,012,628	45	41,500,000	45	40,401,135	100.00	97.35	111.00	181,413,763			BKPSDM
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS yang ditempatkan sesuai Syarat Jabatan dan Syarat Kompetensinya	%	65	11,813,678,211	54.04	5,700,234,344	70	1,738,898,500	68.7	1,456,801,347	98.14	83.78	122.74	7,157,035,691	188.83	60.58	BKPSDM
5.03.02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Kebutuhan pengadaan, dan Pemberhentian ASN	laporan			1	1,860,221,921	1	580,772,500	0.9	481,022,901	90.00	82.82	1.90	2,341,244,822			BKPSDM
5.03.02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi Promosi dan ASN	laporan			1	2,290,669,457	1	845,504,000	1	676,470,620	100.00	80.01	2.00	2,967,140,077			BKPSDM
5.03.02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi	laporan			1	1,072,348,000	2	157,450,000	2	154,054,990	100.00	97.84	3.00	1,226,402,990			BKPSDM
5.03.02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	laporan			2	476,994,966	2	155,172,000	2	145,252,836	100.00	93.61	4.00	622,247,802			BKPSDM
5.04.00	Pendidikan dan Pelatihan				8,351,941,549													BKPSDM
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	persentase Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang pernah mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan	%	50	3,578,039,549	100	5,970,099,810	60	398,217,000	60	369,532,100	100.00	92.80	160.00	6,339,631,910	320.00	177.18	BKPSDM
5.04.02 2.01	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan dan diikuti				5	5,970,099,810	2	398,217,000	2	369,532,100	100.00	92.80	7.00	6,339,631,910			BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
5.05.00	Penelitian dan Pengembangan																	
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	7,522,842,426	98.72	6,711,737,187	100	2,272,897,500	94.4	2,143,334,398	94.40	94.30	193.12	8,855,071,585	193.12	117.71	Badan Penelitian & Pengembangan
5.05.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			8	3,000,000	2	1,500,000	1	490,700	50.00	32.71	9.00	3,490,700			Badan Penelitian & Pengembangan
5.05.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	laporan			12	5,638,493,221	12	1,955,058,000	11.4	1,849,687,128	95.00	94.61	23.40	7,488,180,349			Badan Penelitian & Pengembangan
5.05.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	Laporan			2	19,139,500	12	7,100,000	11.4	6,600,000	95.00	92.96	13.40	25,739,500			Badan Penelitian & Pengembangan
5.05.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi ASN Perangkat Daerah yang dikelola	orang			0	18,500,000	39	-	0	-	-	#DIV/0!	-	18,500,000			Badan Penelitian & Pengembangan
5.05.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang ditatakelolakan	laporan			2	510,072,253	2	151,582,000	2	147,672,250	100.00	97.42	4.00	657,744,503			Badan Penelitian & Pengembangan
5.05.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	unit			6	29,676,000	7	-	0	-	-	#DIV/0!	6.00	29,676,000			Badan Penelitian & Pengembangan
5.05.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang dibiayai	jasa			295	377,244,545	3	118,907,500	1.7	104,545,820	56.67	87.92	296.70	481,790,365			Badan Penelitian & Pengembangan
5.05.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang Urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	unit			20	115,611,668	39	38,750,000	34.6	34,338,500	88.72	88.62	54.60	149,950,168			Badan Penelitian & Pengembangan
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, dan Teknologi yang Diwujudkan (Inovasi)	%	100	2,203,377,102	97.8	1,872,366,032	100	188,046,500	100	198,910,400	100.00	105.78	197.80	2,071,276,432	197.80	94.00	Badan Penelitian & Pengembangan
5.05.02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Hasil kelitbangan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturanyang ditindaklanjuti	laporan			1	638,299,000	1	-	0	-	-	#DIV/0!	1.00	638,299,000			Badan Penelitian & Pengembangan
5.05.02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah hasil kelitbangan sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti	laporan			1	118,350,000	1	-	0	41,600,000	-	#DIV/0!	1.00	159,950,000			Badan Penelitian & Pengembangan
5.05.02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	laporan			2	720,194,000	3	50,000,000	3	49,830,000	100.00	99.66	5.00	770,024,000			Badan Penelitian & Pengembangan
5.05.02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang difasilitasi	laporan			24	395,523,032	11	138,046,500	11	107,480,400	100.00	77.86	35.00	503,003,432			Badan Penelitian & Pengembangan
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan																	
6.01.00	Inspektorat Daerah																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	18,818,349,000	93.59	16,952,337,827	100	6,829,671,000	94.75	6,365,313,795	94.75	93.20	188.34	23,317,651,622	188.34	123.91	Inspektorat
6.01.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah	dokumen			8	597,500	8	240,000	8	228,900	100.00	95.38	16.00	826,400			Inspektorat
6.01.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	laporan			12	14,173,377,398	24	6,000,346,000	23.7	5,592,622,496	98.75	93.21	35.70	19,765,999,894			Inspektorat
6.01.01 2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	orang			18	359,286,661	3	124,768,000	30	123,557,500	1,000.00	99.03	48.00	482,844,161			Inspektorat
6.01.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	jenis			3	1,186,557,232	3	289,226,000	2.9	287,174,786	96.67	99.29	5.90	1,473,732,018			Inspektorat
6.01.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit			22	165,100,950	30	57,000,720	30	56,200,720	100.00	98.60	52.00	221,301,670			Inspektorat
6.01.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	jasa			3	882,356,207	3	292,931,280	3	264,621,458	96.67	90.34	5.90	1,146,977,665			Inspektorat
6.01.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	unit			36	185,061,879	42	65,159,000	29.9	40,907,935	71.19	62.78	65.90	225,969,814			Inspektorat
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	64	4,893,158,718	63	4,826,924,455	62	1,551,691,000	58.6	1,432,069,975	94.52	92.29	121.60	6,258,994,430	190.00	127.91	Inspektorat
6.01.02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	laporan			107	3,436,701,326	161	1,160,995,000	161	1,087,140,575	100.00	93.64	268.00	4,523,841,901			Inspektorat
6.01.02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	laporan			22	1,390,223,129	24	390,696,000	21.4	344,929,400	89.17	88.29	43.40	1,735,152,529			Inspektorat
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rata-Rata Nilai PMPRB Organisasi Perangkat Daerah	indeks	55	422,133,390	21	334,763,738	53	133,124,000	39.8	99,812,960	75.09	74.98	60.80	434,576,698	110.55	102.95	Inspektorat
6.01.03 2.01	Pendampingan dan Asistensi	Jumalah Laporan Pendampingan dan Asistensi	laporan			7	334,763,738	30	133,124,000	22.5	99,812,960	75.00	74.98	29.50	434,576,698			Inspektorat
7	Unsur Kewilayahan																	
7.01.00	Kecamatan																	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	15,930,910,308	88	15,037,479,121	100	5,282,792,000	97.78	5,064,413,156	97.78	95.87	185.78	20,101,892,277	185.78	126.18	Kecamatan Wara
7.01.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			10	28,204,800	10	9,000,000	10	8,600,000	100.00	95.56	20.00	36,804,800			Kecamatan Wara
7.01.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	laporan			17	14,359,037,976	17	5,061,574,000	17	4,872,690,495	100.00	96.27	34.00	19,231,728,471			Kecamatan Wara
7.01.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Aset	laporan			12	12,152,500	12	7,206,000	12	7,206,000	100.00	100.00	24.00	19,358,500			Kecamatan Wara
7.01.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN Perangkat Daerah yang dikelola	jenis			1	8,250,000	2	8,000,000	0	-	-	-	1.00	8,250,000			Kecamatan Wara
7.01.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	jenis			2	103,571,526	2	28,006,000	2	26,532,625	100.00	94.74	4.00	130,104,151			Kecamatan Wara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan						6	17,596,000	6	17,596,000	100.00	100.00	6.00	17,596,000			Kecamatan Wara
7.01.01 2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	jenis			3	444,854,700	3	126,593,000	2.9	110,161,766	96.67	87.02	5.90	555,016,466			Kecamatan Wara
7.01.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	unit			6	81,407,619	11	24,817,000	9.9	21,626,270	90.00	87.14	15.90	103,033,889			Kecamatan Wara
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	%	100	1,835,975,200	67.7	1,115,187,179	84	658,590,000	77.7	543,799,875	92.50	82.57	145.40	1,658,987,054	145.40	90.36	Kecamatan Wara
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Layanan Urusan yang diselenggarakan (Jenis Layanan)	layanan			4	1,080,885,179	6	647,014,000	5.4	533,423,875	90.00	82.44	9.40	1,614,309,054			Kecamatan Wara
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis layanan yang di proses tepat waktu	layanan			21	34,302,000	24	11,576,000	22.8	10,376,000	95.00	89.63	43.80	44,678,000			Kecamatan Wara
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	%	100	40,622,900	88	979,802,968	100	611,050,000	60	8,149,800	60.00	1.33	148.00	987,952,768	148.00	2,432.01	Kecamatan Wara
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	kelurahan			5	979,802,968	6	611,050,000	3.6	8,149,800	60.00	1.33	8.60	987,952,768			Kecamatan Wara
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial	%	100	737,508,000	80	1,992,190,000	100	2,052,594,000	90	591,144,000	90.00	28.80	170.00	2,583,334,000	170.00	350.28	Kecamatan Wara
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan yang bebas konflik sosial	kelurahan			5	1,992,190,000	6	2,052,594,000	5.4	591,144,000	90.00	28.80	10.40	2,583,334,000			Kecamatan Wara
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	13,144,614,078	44	12,728,279,692	100	4,612,498,450	96.76	4,436,324,837	96.76	96.18	140.76	17,164,604,529	140.76	130.58	Kecamatan Wara Utara
7.01.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			0	600,250	5	-	0	-	-	#DIV/0!	-	600,250			Kecamatan Wara Utara
7.01.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	laporan			467	12,192,287,787	12	4,348,908,000	17	4,212,650,540	141.67	96.87	484.00	16,404,938,327			Kecamatan Wara Utara
7.01.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	laporan			1	20,100,000	12	6,000,000	12	6,000,000	100.00	100.00	13.00	26,100,000			Kecamatan Wara Utara
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola						15	-	0	-	-	#DIV/0!	-	-			Kecamatan Wara Utara
7.01.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	jenis			1	61,517,175	3	27,781,100	4.8	19,014,300	160.00	68.44	5.80	80,531,475			Kecamatan Wara Utara
7.01.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	jenis			0	-	4	104,293,000	6	104,230,000	150.00	99.94	6.00	104,230,000			Kecamatan Wara Utara
7.01.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	jenis			2	340,769,381	3	90,605,550	3	75,183,997	100.00	82.98	5.00	415,953,378			Kecamatan Wara Utara
7.01.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	unit			1	113,005,099	6	34,910,800	5.5	19,246,000	91.67	55.13	6.50	132,251,099			Kecamatan Wara Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	%	100	1,886,941,200	44	949,828,361	100	579,165,550	79.8	437,284,852	79.80	75.50	123.80	1,387,113,213	123.80	73.51	Kecamatan Wara Utara
7.01.02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah layanan urusan yang diselenggarakan	layanan			3	925,328,361	10	569,565,550	9	428,484,852	90.00	75.23	12.00	1,353,813,213			Kecamatan Wara Utara
7.01.02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis layanan yang diproses tepat waktu	layanan			1	24,500,000	10	9,600,000	10	8,800,000	100.00	91.67	11.00	33,300,000			Kecamatan Wara Utara
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	%	100	71,352,400	54	365,163,160	100	628,900,000	50	23,672,500	50.00	3.76	104.00	388,835,660	104.00	544.95	Kecamatan Wara Utara
7.01.03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (kelurahan/tahun)	kelurahan			3	365,163,160	6	628,900,000	6	23,672,500	100.00	3.76	9.00	388,835,660			Kecamatan Wara Utara
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelurahan yang bebas konflik social Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	771,685,200	27	1,456,450,000	100	1,380,800,000	90	408,200,000	90.00	29.56	117.00	1,864,650,000	117.00	241.63	Kecamatan Wara Utara
7.01.04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Koordinasi			1	1,456,450,000	6	1,380,800,000	5.4	408,200,000	90.00	29.56	6.40	1,864,650,000			Kecamatan Wara Utara
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	18,274,675,619	94.67	19,036,086,192	60	6,296,751,288	49.9	5,964,314,473	83.17	94.72	144.57	25,000,400,665	144.57	136.80	Kecamatan Wara Timur
7.01.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			4	35,290,000	100	-	0	-	-	#DIV/0!	4.00	35,290,000			Kecamatan Wara Timur
7.01.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	laporan			17	18,281,830,775	20	6,051,964,000	19.2	5,757,419,755	96.00	95.13	36.20	24,039,250,530			Kecamatan Wara Timur
7.01.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	laporan			12	18,200,000	12	6,000,000	11.4	5,000,000	95.00	83.33	23.40	23,200,000			Kecamatan Wara Timur
7.01.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikolola	laporan			0	-	73	-	0	-	-	#DIV/0!	-	-			Kecamatan Wara Timur
7.01.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan administrasi umum yang ditata kelola	jenis			8	220,569,000	4	52,415,000	2.7	35,000,000	67.50	66.77	10.70	255,569,000			Kecamatan Wara Timur
7.01.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit			0	-	12	80,000,000	12	80,000,000	100.00	100.00	12.00	80,000,000			Kecamatan Wara Timur
7.01.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	jenis			3	421,176,417	3	88,372,288	2.9	72,074,718	96.67	81.56	5.90	493,251,135			Kecamatan Wara Timur
7.01.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	unit			5	59,020,000	69	18,000,000	31.05	14,820,000	45.00	82.33	36.05	73,840,000			Kecamatan Wara Timur
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	%	100	2,215,522,000	75.4	1,957,669,426	17	763,142,000	15.7	539,327,971	92.35	70.67	91.10	2,496,997,397	91.10	112.70	Kecamatan Wara Timur
7.01.02 2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yangtidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	layanan			5	1,900,569,426	7	733,142,000	6.3	514,327,971	90.00	70.15	11.30	2,414,897,397			Kecamatan Wara Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
7.01.02 2.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	layanan			24	57,100,000	24	30,000,000	22.8	25,000,000	95.00	83.33	46.80	82,100,000			Kecamatan Wara Timur
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	%	100	13,491,000	100	166,620,000	100	705,000,000	50	5,000,000	50.00	0.71	150.00	171,620,000	150.00	1,272.11	Kecamatan Wara Timur
7.01.03 2.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Rata-Rata LPMK, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	kelurahan			7	166,620,000	7	705,000,000	4	5,000,000	57.14	0.71	11.00	171,620,000			Kecamatan Wara Timur
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	%	100	928,180,800	76.5	2,167,000,000	100	2,283,000,000	90	666,250,000	90.00	29.18	166.50	2,833,250,000	166.50	305.25	Kecamatan Wara Timur
7.01.04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial	kelurahan			7	2,167,000,000	7	2,283,000,000	6.3	666,250,000	90.00	29.18	13.30	2,833,250,000			Kecamatan Wara Timur
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	11,561,742,030	85.61	10,434,461,372	100	3,598,705,930	98.17	3,489,117,415	98.17	96.95	183.78	13,923,578,787	183.78	120.43	Kecamatan Wara Barat
7.01.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			7	9,442,000	10	2,986,800	10	2,931,800	100.00	98.16	17.00	12,373,800			Kecamatan Wara Barat
7.01.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	laporan			10	9,859,171,385	81	3,420,542,000	81	3,326,590,561	100.00	97.25	91.00	13,185,761,946			Kecamatan Wara Barat
7.01.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan			12	20,100,000	12	6,000,000	12	6,000,000	100.00	100.00	24.00	26,100,000			Kecamatan Wara Barat
7.01.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	paket			1	102,114,120	28	40,009,000	26.6	32,500,000	95.00	81.23	27.60	134,614,120			Kecamatan Wara Barat
7.01.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	dokumen			6	134,007,236	310	36,273,000	302.3	35,665,900	97.52	98.33	308.30	169,673,136			Kecamatan Wara Barat
7.01.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset yang ditatakelolakan	unit			2	18,041,250	6	15,651,360	6	15,650,000	100.00	99.99	8.00	33,691,250			Kecamatan Wara Barat
7.01.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan daerah yang dibiayai	jenis			10	213,628,356	3	48,315,770	2.9	43,688,154	96.67	90.42	12.90	257,316,510			Kecamatan Wara Barat
7.01.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			1	77,957,025	15	28,928,000	14.5	26,091,000	96.67	90.19	15.50	104,048,025			Kecamatan Wara Barat
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	%	100	1,615,922,000	77.6	1,133,076,407	100	538,669,870	99.33	482,534,694	99.33	89.58	176.93	1,615,611,101	176.93	99.98	Kecamatan Wara Barat
7.01.02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pengaduan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	layanan			12	35,500,000	12	10,100,000	12	10,100,000	100.00	100.00	24.00	45,600,000			Kecamatan Wara Barat
7.01.02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan belanja yang dapat terkafer pada biaya operasional kelurahan	dokumen			47	1,062,276,407	25	518,469,870	24.5	462,334,694	98.00	89.17	71.50	1,524,611,101			Kecamatan Wara Barat
7.01.02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Pembagunan sarana dan prasarana				12	35,300,000	12	10,100,000	12	10,100,000	100.00	100.00	24.00	45,400,000			Kecamatan Wara Barat
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	%	100	71,952,000	94.18	120,611,786	100	522,100,000	66.67	20,100,000	66.67	3.85	160.85	140,711,786	160.85	195.56	Kecamatan Wara Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
7.01.03 2.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	laporan			5	120,611,786	5	522,100,000	4.5	20,100,000	90.00	3.85	9.50	140,711,786			Kecamatan Wara Barat
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	%	100	662,258,200	78.8	1,026,650,000	100	920,091,200	90	283,640,000	90.00	30.83	168.80	1,310,290,000	168.80	197.85	Kecamatan Wara Barat
7.01.04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan			9	1,026,650,000	5	920,091,200	4.5	283,640,000	90.00	30.83	13.50	1,310,290,000			Kecamatan Wara Barat
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	11,784,499,426	91.12	11,282,710,002	100	3,958,307,800	88.01	3,792,993,005	88.01	95.82	179.13	15,075,703,007	179.13	127.93	Kecamatan Wara Selatan
7.01.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat daerah Yang di Susun Tepat Waktu	dokumen			10	7,090,750		7,110,000	10	6,008,000	#DIV/0!	84.50	20.00	13,098,750			Kecamatan Wara Selatan
7.01.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	laporan			12	10,720,351,499	21	3,769,364,000	20.1	3,643,909,563	95.71	96.67	32.10	14,364,261,062			Kecamatan Wara Selatan
7.01.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	laporan			12	7,200,000	12	7,200,000	12	7,200,000	100.00	100.00	24.00	14,400,000			Kecamatan Wara Selatan
7.01.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN Perangkat Daerah Yang di Kelola	stell			15	15,400,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	15.00	15,400,000			Kecamatan Wara Selatan
7.01.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Yang di tataKelolakan	jenis			5	112,757,665	46	43,966,800	26.2	37,894,085	56.96	86.19	31.20	150,651,750			Kecamatan Wara Selatan
7.01.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang di Adakan	unit			0	-	0	12,900,000	0	-	#DIV/0!	-	-	-			Kecamatan Wara Selatan
7.01.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Daerah Yang di Biayai	jenis			4	295,353,842	124	93,717,000	99.6	75,942,857	80.32	81.03	103.60	371,296,699			Kecamatan Wara Selatan
7.01.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Pemeliharaanya di Biayai	unit			20	124,556,246	72	24,050,000	68.4	22,038,500	95.00	91.64	88.40	146,594,746			Kecamatan Wara Selatan
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	%	100	1,218,986,800	85.02	776,829,374	85	794,861,200	76.5	277,097,584	90.00	34.86	161.52	1,053,926,958	161.52	86.46	Kecamatan Wara Selatan
7.01.02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Layanan Urusan Yang di Selenggarakan (Jenis Layanan)	layanan			8	756,529,374	98	790,061,200	88.2	274,097,584	90.00	34.69	96.20	1,030,626,958			Kecamatan Wara Selatan
7.01.02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis Layanan Yang di Proses Tepat Waktu	jenis			5	20,300,000	24	4,800,000	21.6	3,000,000	90.00	62.50	26.60	23,300,000			Kecamatan Wara Selatan
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	%	100	11,242,500	100	114,832,100	100	4,130,000	100	4,116,000	100.00	99.66	200.00	118,948,100	200.00	1,058.02	Kecamatan Wara Selatan
7.01.03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan Yang Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	kelurahan			4	114,832,100	4	4,130,000	4	4,116,000	100.00	99.66	8.00	118,948,100			Kecamatan Wara Selatan
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	%	100	489,273,600	78	1,086,800,000	100	1,075,200,000	90	313,200,000	90.00	29.13	168.00	1,400,000,000	168.00	286.14	Kecamatan Wara Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
7.01.04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan yang bebas konflik sosial	kelurahan			4	1,086,800,000	4	1,075,200,000	3.6	313,200,000	90.00	29.13	7.60	1,400,000,000			Kecamatan Wara Selatan
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	15,516,466,764	90.02	14,593,750,911	100	5,116,953,000	91.24	4,886,797,960	91.24	95.50	181.26	19,480,548,871	181.26	125.55	Kecamatan Bara
7.01.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	dokumen			5	3,391,500	12	306,200	12	303,000	100.00	98.95	17.00	3,694,500			Kecamatan Bara
7.01.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dibuat	dokumen			6	13,771,091,115	8	4,825,741,200	7.9	4,614,717,152	98.75	95.63	13.90	18,385,808,267			Kecamatan Bara
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset						12	7,800,000	11.8	7,150,000	98.33	91.67	11.80	7,150,000			Kecamatan Bara
7.01.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi ASN perangkat daerah yang dikelola	jenis			17	7,500,000	75	-	0	-	-	#DIV/0!	17.00	7,500,000			Kecamatan Bara
7.01.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang di tata kelolakan	jenis			3	198,765,073	2	26,750,400	2	26,716,850	100.00	99.87	5.00	225,481,923			Kecamatan Bara
7.01.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah perlengkapan kantor	unit			1	16,827,782	11	58,961,420	5	47,118,000	45.45	79.91	6.00	63,945,782			Kecamatan Bara
7.01.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan	jasa			3	483,510,801	3	161,691,780	3	158,633,318	100.00	98.11	6.00	642,144,119			Kecamatan Bara
7.01.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaan	unit			22	112,664,640	12	35,702,000	11.6	32,159,640	96.67	90.08	33.60	144,824,280			Kecamatan Bara
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	%	100	1,511,379,755	80.64	1,401,494,138	100	979,240,000	80	374,999,638	80.00	38.29	160.64	1,776,493,776	160.64	117.54	Kecamatan Bara
7.01.02 2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yangtidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	laporan			10	1,389,449,138	12	979,240,000	9.6	374,999,638	80.00	38.29	19.60	1,764,448,776			Kecamatan Bara
7.01.02 2.04	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah layanan yang diproses tepat waktu	layanan			10	12,045,000	2	-	0	-	-	#DIV/0!	10.00	12,045,000			Kecamatan Bara
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	%	100	18,382,747	67.25	369,445,300	100	5,400,000	100	5,400,000	100.00	100.00	167.25	374,845,300	167.25	2,039.11	Kecamatan Bara
7.01.03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	laporan			8	369,445,300	3	5,400,000	3	5,400,000	100.00	100.00	11.00	374,845,300			Kecamatan Bara
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	%	100	614,590,000	78	1,793,795,000	100	1,866,900,000	90	539,115,000	90.00	28.88	168.00	2,332,910,000	168.00	379.59	Kecamatan Bara
7.01.04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah laporan hasil sinegritas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	laporan			9	1,793,795,000	5	1,866,900,000	4.5	539,115,000	90.00	28.88	13.50	2,332,910,000			Kecamatan Bara
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	11,242,065,290	94.15	10,423,611,282	100	3,439,709,000	97.93	3,256,752,865	97.93	94.68	192.08	13,680,364,147	192.08	121.69	Kecamatan Mungkajang
7.01.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			5	2,950,000	4	3,790,000	4	2,265,000	100.00	59.76	9.00	5,215,000			Kecamatan Mungkajang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
7.01.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja perangkat daerah yang disusun tepat	laporan			6	9,706,878,311	14	3,219,840,000	13.4	3,077,190,334	95.71	95.57	19.40	12,784,068,645			Kecamatan Mungkajang
7.01.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset yang ditatakelolakan	unit			11	20,060,000	12	7,200,000	10.8	5,820,000	90.00	80.83	22.00	25,880,000			Kecamatan Mungkajang
7.01.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	stell			41	64,881,850	50	6,305,000	45	5,500,000	90.00	87.23	86.00	70,381,850			Kecamatan Mungkajang
7.01.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	kegiatan			4	159,126,175	5	34,971,000	5	34,774,273	100.00	99.44	9.00	193,900,448			Kecamatan Mungkajang
7.01.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	unit			1	20,335,160	2	29,899,000	1	14,899,000	50.00	49.83	2.00	35,234,160			Kecamatan Mungkajang
7.01.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	jenis			6	302,852,794	8	98,504,000	7.4	81,554,958	92.50	82.79	13.40	384,407,752			Kecamatan Mungkajang
7.01.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	unit			34	146,526,992	55	39,200,000	26.8	34,749,300	48.73	88.65	60.80	181,276,292			Kecamatan Mungkajang
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	%	100	1,203,037,440	56.5	362,380,733	100	418,525,000	80.24	356,481,123	80.24	85.18	136.74	718,861,856	136.74	59.75	Kecamatan Mungkajang
7.01.02 2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yangtidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Layanan Urusan yang diselnggarakan (Jenis Layanan)	layanan			4	360,369,733	4	414,090,000	3.9	353,146,123	97.50	85.28	7.90	713,515,856			Kecamatan Mungkajang
7.01.02 2.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Jenis Layanan yang Diproses Tepat Waktu (Jenis)	layanan			1	2,011,000	2	4,435,000	1.9	3,335,000	95.00	75.20	2.90	5,346,000			Kecamatan Mungkajang
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	%	100	16,638,900	100	924,858,000	100	408,150,000	63.33	6,300,000	63.33	1.54	163.33	931,158,000	163.33	5,596.27	Kecamatan Mungkajang
7.01.03 2.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan/Tahun)	kelurahan			4	924,858,000	4	408,150,000	2.5	6,300,000	62.50	1.54	6.50	931,158,000			Kecamatan Mungkajang
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	%	100	491,177,330	77.1	858,635,250	100	813,875,000	90	240,575,000	90.00	29.56	167.10	1,099,210,250	167.10	223.79	Kecamatan Mungkajang
7.01.04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kelurahan yang bebas konflik sosial	kelurahan			4	858,635,250	4	813,875,000	3.6	240,575,000	90.00	29.56	7.60	1,099,210,250			Kecamatan Mungkajang
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	11,466,252,732	91.36	10,132,097,866	100	3,703,309,000	93.03	3,515,169,079	93.03	94.92	184.39	13,647,266,945	184.39	119.02	Kecamatan Sendana
7.01.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			7	1,533,000	10	650,000	5	300,000	50.00	46.15	12.00	1,833,000			Kecamatan Sendana
7.01.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan penata usahaan keuangan yang dibuat	laporan			100	9,539,653,284	17	3,469,649,000	16.7	3,288,954,119	98.24	94.79	116.70	12,828,607,403			Kecamatan Sendana
7.01.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengelolah Aset	laporan			12	13,946,000	12	7,480,000	12	6,880,000	100.00	91.98	24.00	20,826,000			Kecamatan Sendana
7.01.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	orang			100	8,991,000	1	14,537,675	1	14,537,675	100.00	100.00	101.00	23,528,675			Kecamatan Sendana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
7.01.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Umum yang dikelola	jenis			87	123,151,800	2	34,712,000	2	33,740,705	100.00	97.20	89.00	156,892,505			Kecamatan Sendana
7.01.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang yang diadakan	unit			100	7,825,500	6	52,170,000	6	52,170,000	100.00	100.00	106.00	59,995,500			Kecamatan Sendana
7.01.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi yang dikelolah	jenis			100	368,679,407	4	83,485,000	4	78,686,580	100.00	94.25	104.00	447,365,987			Kecamatan Sendana
7.01.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik derah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara dan dibiayai	unit			100	68,317,875	20	40,625,325	19.3	39,900,000	96.50	98.21	119.30	108,217,875			Kecamatan Sendana
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	%	100	1,213,590,400	100	733,090,759	100	371,285,000	100	364,057,692	100.00	98.05	200.00	1,097,148,451	200.00	90.41	Kecamatan Sendana
7.01.02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kacamatan	Jumlah biaya operasional kelurahan	kelurahan			12	71,239,682	12	2,900,000	12	2,700,000	100.00	93.10	24.00	73,939,682			Kecamatan Sendana
7.01.02 2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	layanan			10	659,851,077	4	365,480,000	4	358,652,692	100.00	98.13	14.00	1,018,503,769			Kecamatan Sendana
7.01.02 2.04	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Layanan Perizinan NonUsaha, Non perizinan yang dilaksanakan	layanan			12	2,000,000	12	2,905,000	12	2,705,000	100.00	93.12	24.00	4,705,000			Kecamatan Sendana
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	%	100	14,990,000	100	16,275,000	100	405,000,000	50	5,000,000	50.00	1.23	150.00	21,275,000	150.00	141.93	Kecamatan Sendana
7.01.03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Partisipasi Kegiatan masyarakat Dalam Kegiatan Kemasyarakatan	layanan			12	14,275,000	4	405,000,000	2	5,000,000	50.00	1.23	14.00	19,275,000			Kecamatan Sendana
7.01.03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	layanan			12	2,000,000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	12.00	2,000,000			Kecamatan Sendana
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	%	100	489,273,600	78	805,200,000	100	748,800,000	90	222,000,000	90.00	29.65	168.00	1,027,200,000	168.00	209.94	Kecamatan Sendana
7.01.04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Yang dibuat,Laporan Babinsa dan Babinkamtibmas	laporan			2	805,200,000	4	748,800,000	3.6	222,000,000	90.00	29.65	5.60	1,027,200,000			Kecamatan Sendana
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	15,901,341,034	96	14,837,866,271	100	5,010,930,000	90.1	4,735,250,476	90.10	94.50	186.10	19,573,116,747	186.10	123.09	Kecamatan Telluwanua
7.01.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah Yang di Susun Tepat Waktu	dokumen			7	23,345,000	100	8,000,000	11.3	6,950,500	11.30	86.88	18.30	30,295,500			Kecamatan Telluwanua
7.01.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penata Usahaan Keuangan	laporan			1	14,152,785,485	100	4,787,008,000	92	4,565,291,513	92.00	95.37	93.00	18,718,076,998			Kecamatan Telluwanua
7.01.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	dokumen			1	6,499,000	100	5,900,000	100	5,000,000	100.00	84.75	101.00	11,499,000			Kecamatan Telluwanua
7.01.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	jenis			5	121,703,021	100	44,677,300	93.3	22,286,095	93.30	49.88	98.30	143,989,116			Kecamatan Telluwanua
7.01.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit			3	33,146,500	100	18,360,000	100	18,000,000	100.00	98.04	103.00	51,146,500			Kecamatan Telluwanua

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
7.01.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan	jasa			3	414,047,004	100	115,605,000	98.33	95,718,618	98.33	82.80	101.33	509,765,622			Kecamatan Telluwanua
7.01.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahdaerah yang pemeliharaannya di biayai	unit			3	86,340,261	100	31,379,700	60	22,003,750	60.00	70.12	63.00	108,344,011			Kecamatan Telluwanua
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	%	100	2,098,600,000	81.07	1,489,876,281	100	732,840,000	95	616,234,522	95.00	84.09	176.07	2,106,110,803	176.07	100.36	Kecamatan Telluwanua
7.01.02 2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah laporan pendukung efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	laporan			97	1,489,876,281	100	732,840,000	95	616,234,522	95.00	84.09	192.00	2,106,110,803			Kecamatan Telluwanua
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	%	100	41,972,000	100	429,446,047	100	712,000,000	45	7,750,000	45.00	1.09	145.00	437,196,047	145.00	1,041.64	Kecamatan Telluwanua
7.01.03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan dan jumlah laporan pemberdayaan yang dihasilkan	kelurahan			7	429,446,047	100	712,000,000	3.2	7,750,000	3.20	1.09	10.20	437,196,047			Kecamatan Telluwanua
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	856,228,800	78	1,443,250,000	100	1,320,600,000	90	391,350,000	90.00	29.63	168.00	1,834,600,000	168.00	214.27	Kecamatan Telluwanua
7.01.04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kelurahan Yang Bebas Konflik	kelurahan			6	1,443,250,000	7	1,320,600,000	6.3	391,350,000	90.00	29.63	12.30	1,834,600,000			Kecamatan Telluwanua
8	Unsur Pemerintahan Umum																	
8.01.00	Kesatuan Bangsa dan Politik																	
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	8,672,573,927	99.74	9,542,136,190	100	2,750,890,100	95.29	2,627,444,878	95.29	95.51	195.03	12,169,581,068	195.03	140.32	KESBANG POL
8.01.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen			3	30,805,000	2	9,885,600	2	9,883,900	100.00	99.98	5.00	40,688,900			KESBANG POL
8.01.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	laporan			2	8,340,669,888	2	2,387,460,800	2	2,284,818,130	100.00	95.70	4.00	10,625,488,018			KESBANG POL
8.01.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	laporan			1	14,516,000	1	7,339,500	0.9	6,600,000	90.00	89.92	1.90	21,116,000			KESBANG POL
8.01.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	laporan			29	20,950,000	29	-	0	-	-	#DIV/0!	29.00	20,950,000			KESBANG POL
8.01.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	laporan			3	514,403,744	4	152,445,000	4	151,713,710	100.00	99.52	7.00	666,117,454			KESBANG POL
8.01.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	laporan			1	87,401,100	5	18,200,000	5	18,200,000	100.00	100.00	6.00	105,601,100			KESBANG POL
8.01.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	laporan			1	425,103,428	3	146,959,200	2.9	129,348,938	96.67	88.02	3.90	554,452,366			KESBANG POL
8.01.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	laporan			20	108,287,030	12	28,600,000	9.8	26,880,200	81.67	93.99	29.80	135,167,230			KESBANG POL
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter k`ebangsaan	%	100	1,978,080,400	93.67	922,422,189	100	675,345,000	88.3	662,812,895	88.30	98.14	181.97	1,585,235,084	181.97	80.14	KESBANG POL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2	3		4		5		6		7		8 = /6 x 100%		9 = 5 +7		10=9/54x100%		12
8.01.02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Etnis yang berpartisipasi dalam Pemahaman di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	laporan			23	922,422,189	23	675,345,000	20.3	662,812,895	88.26	98.14	43.30	1,585,235,084			KESBANG POL
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Cakupan Lembaga atau Organisasi yang Mendapatkan Pendidikan Politik	%	100	2,761,959,935	87	3,473,409,980	100	35,547,424,874	100	35,506,025,005	100.00	99.88	187.00	38,979,434,985	187.00	1,411.30	KESBANG POL
8.01.03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	Jumlah Partai Politik yang mendapatkan pembinaan	kebijakan			8.9	3,473,409,980	10	35,547,424,874	10	35,506,025,005	100.00	99.88	18.90	38,979,434,985			KESBANG POL
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Angka Pertumbuhan OrganisasiKemasyarakatan yang Terdaftar	%	100	204,456,105	100	252,083,000	90	117,417,200	66.1	115,695,000	73.44	98.53	166.10	367,778,000	166.10	179.88	KESBANG POL
8.01.04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan danPengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi masyarakat binaan yang aktif	laporan			114	252,083,000	114	117,417,200	114	115,695,000	100.00	98.53	228.00	367,778,000			KESBANG POL
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan Keluarga Miskin yang Mendapatkan edukasi	%	100	190,522,900	100	192,806,750	100	136,612,700	100	134,678,239	100.00	98.58	200.00	327,484,989	200.00	171.89	KESBANG POL
8.01.05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	kebijakan			3	192,806,750	3	136,612,700	3	134,678,239	100.00	98.58	6.00	327,484,989			KESBANG POL
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Wilayah Rawan Konflik yang Dibina	%	100	2,861,111,320	94.45	1,720,738,750	90	1,260,086,000	87.8	1,246,092,090	97.56	98.89	182.25	2,966,830,840	182.25	103.70	KESBANG POL
8.01.06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kelurahan Rawan Konflik yang dibina	laporan			4.7	1,720,738,750	5	1,260,086,000	4.9	1,246,092,090	98.00	98.89	9.60	2,966,830,840			KESBANG POL

Berdasarkan tabel diatas dapat di gambarkan sebagai berikut :

1. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdapat 18 program dan 63 kegiatan yaitu di antaranya Program Pengembangan Kurikulum, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengembangan Permukiman, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Pengelolaan Izin Lokasi, Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, Program Pengelolaan Tanah Kosong, Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah, Program Penatagunaan Tanah, Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pengelolaan Permuseuman, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Program Perizinan Usaha Pertanian, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdiri dari 14 program dan 261 kegiatan, yaitu Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Pencatatan Sipil, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan ;
   1) Program/Kegiatan Tidak Tercapai (<90%)
      Kemungkinan faktor penyebab:
      - Keterlambatan pelaksanaan: proses pengadaan, administrasi keuangan, atau revisi DPA menyebabkan realisasi kegiatan menurun.
      - Hambatan sumber daya manusia: kurangnya tenaga teknis, pelatihan, atau pergantian personel.
      - Faktor eksternal: kondisi cuaca ekstrem, inflasi, atau kebijakan nasional yang berubah.
      - Keterbatasan anggaran: penghematan, refocusing, atau penundaan pencairan anggaran.
      - Kurangnya koordinasi antar-unit kerja: terutama untuk program lintas bidang/urusan.
      - Keterlambatan data pendukung: indikator kinerja tidak terukur tepat waktu.
   2) Program/Kegiatan Tercapai (90–110%)
      Kemungkinan faktor keberhasilan :
      - Perencanaan dan penganggaran yang realistis sesuai kapasitas pelaksanaan.
      - Kedisiplinan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal.
      - Koordinasi efektif antara OPD dan pihak terkait (misal sekolah, puskesmas, atau kecamatan).
      - Pemanfaatan teknologi informasi yang mempercepat proses pelaporan dan monitoring.
      - Stabilitas anggaran dan dukungan kebijakan dari pimpinan daerah.
   3) Program/Kegiatan Melebihi Target (>110%)
      Kemungkinan faktor penyebab :
      - Efisiensi penggunaan anggaran atau sinergi kegiatan antar program.
      - Indikator terlalu konservatif atau target awal terlalu rendah.
      - Adanya bantuan tambahan dari pusat atau provinsi yang tidak diproyeksikan di RKPD awal.
      - Dampak multiplier positif dari kegiatan sebelumnya (contoh: peningkatan partisipasi masyarakat).
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
   1) Terhadap Konsistensi Pencapaian Target Renstra
      - Proporsi capaian kinerja yang belum mencapai target (26%) menunjukkan bahwa tidak semua indikator Renstra akan dapat dicapai secara penuh sesuai rencana tahunan.
      - Jika tren ini berlanjut, maka akumulasi capaian indikator Renstra lima tahunan berpotensi mengalami deviasi negatif terhadap target RPJMD.

- Diperlukan penyesuaian strategi dan reorientasi target tahunan, terutama pada program dengan capaian di bawah 90%.

2) Terhadap Efektivitas Program dan Anggaran

- Adanya kegiatan tidak tercapai menandakan adanya in efisiensi dalam pelaksanaan program, baik dari sisi input (anggaran, SDM) maupun proses (pengadaan, koordinasi).
- Program dengan capaian melebihi target perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa keberhasilan tersebut tidak berasal dari target awal yang terlalu rendah, agar efektivitas penganggaran tetap terjaga.
- Perangkat daerah perlu memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis kinerja**,** bukan hanya realisasi keuangan.

3) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- Ketidaktercapaian target berpotensi menurunkan nilai SAKIP dan penilaian akuntabilitas kinerja OPD**.**
- Hal ini menuntut peningkatan kualitas perencanaan kinerja (*logical framework* dan indikator SMART).
- OPD perlu mengkaji keterkaitan antara output dan outcome agar capaian indikator dapat mencerminkan hasil nyata dari program.

4) Terhadap Revisi dan Penyesuaian Renstra

- Diperlukan revisi atau penyempurnaan Renstra OPD pada periode berikutnya untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kapasitas aktual pelaksanaan.
- Penyesuaian target Renstra perlu memperhatikan:
  - Hasil capaian tahunan rata-rata (trend 2022–2024),
  - Perubahan lingkungan strategis (regulasi, fiskal, sosial ekonomi),
  - dan potensi capaian realistis berdasarkan hasil evaluasi.

5) Terhadap Kinerja Lintas Perangkat Daerah

- Beberapa indikator capaian Renstra bersifat lintas sektor. Ketika satu OPD tidak mencapai target, dapat mempengaruhi capaian OPD lain.
- Diperlukan sinkronisasi target kinerja antar-OPD**,** terutama pada program prioritas daerah (misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar).

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan relatif efektif namun masih menyisakan ketimpangan antar program dan perangkat daerah**.**
Implikasinya terhadap target Renstra adalah perlunya:

- penguatan sistem perencanaan berbasis hasil *(result-based planning)***,**
- peningkatan kualitas indikator dan baseline Renstra**,** serta
- percepatan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan strategis agar target jangka menengah Renstra tetap dapat dicapai secara agregat.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

1) Penguatan pada Aspek Perencanaan Kinerja

a. Penyusunan indikator kinerja yang lebih SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) agar target kinerja lebih realistis dan terukur.
b. Pemutakhiran baseline data dan asumsi perencanaan**,** terutama pada indikator yang mengalami perubahan lingkungan strategis (misalnya kebijakan nasional, inflasi, dan kondisi ekonomi daerah).
c. Penajaman prioritas program dan kegiatan melalui *review* rencana kerja tahunan (Renja) agar lebih fokus pada program yang memberikan dampak langsung terhadap sasaran RPJMD.
d. Peningkatan koordinasi lintas-OPD dalam perencanaan indikator yang bersifat lintas sektor, untuk menghindari tumpang tindih target dan kegiatan.

2) Kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja

a. Penerapan penganggaran berbasis hasil (performance-based budgeting) dengan mengaitkan secara langsung antara input anggaran dan output/outcome yang dihasilkan.
b. Pengutamaan anggaran pada program prioritas daerah**,** khususnya yang capaian kinerjanya masih di bawah target atau berkontribusi besar terhadap target Renstra.
c. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui evaluasi rutin terhadap program yang berulang tetapi kurang memberikan dampak signifikan.
d. Penerapan mekanisme *reward and punishment* dalam pengalokasian anggaran tahun berikutnya berdasarkan capaian kinerja tahun berjalan.

3) Perbaikan Mekanisme Pelaksanaan dan Monitoring

a. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi (monev) berbasis data elektronik secara berkala untuk mendeteksi dini deviasi antara target dan realisasi.
b. Penegasan tanggung jawab kinerja pada masing-masing OPD, termasuk pelaporan capaian indikator secara triwulanan agar koreksi dapat dilakukan lebih cepat.
c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan pelaporan, integrasi data, dan analisis capaian program melalui dashboard kinerja daerah.

4) Kebijakan Penguatan Kapasitas dan Koordinasi
   a. Peningkatan kapasitas SDM perencana dan pelaksana program, melalui pelatihan manajemen kinerja, penyusunan indikator, dan analisis capaian.
   b. Optimalisasi koordinasi antara TAPD, Bappeda, dan OPD pelaksana, agar sinkronisasi perencanaan dan penganggaran lebih tepat waktu dan selaras dengan kebijakan daerah.
   c. Mendorong kolaborasi antar-OPD untuk program yang memiliki indikator lintas sektor (misalnya pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan).
5) Penyesuaian Target dan Revisi Renstra
   a. Melakukan review Renstra OPD terhadap indikator yang secara konsisten tidak tercapai, untuk dilakukan penyesuaian target berdasarkan evaluasi kapasitas pelaksanaan aktual.
   b. Reorientasi program dan kegiatan agar lebih adaptif terhadap kondisi aktual, termasuk memperhitungkan perubahan kebijakan nasional dan kemampuan fiskal daerah.
   c. Penetapan target tahunan bertahap *(progressive target)* untuk indikator yang masih sulit dicapai, agar peningkatan kinerja lebih realistis dan berkesinambungan.
6) Pengendalian dan Evaluasi Berkelanjutan
   a. Evaluasi kinerja dilakukan tidak hanya pada akhir tahun, tetapi secara triwulanan untuk mendeteksi masalah pelaksanaan sejak dini.
   b. Penyusunan laporan evaluasi kinerja berbasis data dan analisis sebab-akibat, bukan hanya deskriptif, agar menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan.
   c. Integrasi hasil evaluasi ke dalam siklus perencanaan berikutnya (RKPD dan Renja), sehingga hasil pembelajaran dapat langsung mempengaruhi pengambilan keputusan anggaran.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang diarahkan pada perbaikan kualitas perencanaan kinerja, penguatan monitoring, efisiensi penggunaan anggaran, serta peningkatan koordinasi lintas-OPD akan menjadi kunci untuk mengatasi faktor penyebab ketidaktercapaian target. Dengan demikian, implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan konsistensi capaian program terhadap target Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RPJMD.

2.4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Merujuk pada analisa secara umum dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan pertama tahun 2025 serta analisis isu aktual pada media sosial yang menggunakan algoritma data, maka berikut adalah permasalahan pembangunan Kota Palopo Tahun 2026, berdasarkan pendekatan Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah :

1. Ketergantungan fiskal tinggi dan PAD masih rendah, sementara layanan publik belum optimal.

Permasalahan utama dalam aspek ini adalah rendahnya kapasitas fiskal Kota Palopo yang menyebabkan keterbatasan dalam mendanai pembangunan. Ketergantungan pada dana transfer masih tinggi, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal. Selain itu, efektivitas belanja daerah masih perlu ditingkatkan agar lebih strategis dan berbasis kinerja. Fiskal Kota Palopo sampai dengan tahun 2024, memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah. Pada tahun 2023, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 943,08 miliar, di mana hanya Rp 194,01 miliar atau sekitar 20,6% berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan sisanya—lebih dari 78%—merupakan pendapatan transfer. Permasalahan PAD semakin terlihat jika ditelaah lebih dalam. Dari total PAD tahun 2023, sebagian besar berasal dari kategori "Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah" yang mencapai Rp 129,41 miliar, sementara pajak daerah hanya menyumbang Rp 46,68 miliar dan retribusi daerah lebih kecil lagi, hanya Rp 10,56 miliar Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya menghasilkan Rp 7,34 miliar, yang juga menunjukkan bahwa aset-aset daerah belum dikelola secara produktif untuk menghasilkan penerimaan yang lebih besar. Jika PAD tidak mengalami pertumbuhan yang substansial, maka ketergantungan terhadap dana transfer akan semakin memperlemah kapasitas daerah dalam mengatur pembangunan secara mandiri. Ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer juga menimbulkan risiko fiskal yang besar. Jika terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, seperti pengurangan dana transfer atau penyesuaian skema alokasi, maka Kota Palopo akan mengalami tekanan fiskal yang berat. Selain itu, ketergantungan ini juga membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan karena sebagian besar anggaran yang diterima bersifat *earmarked* atau sudah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat.

Tabel 2.131
Pemetaan Permasalahan Ketergantungan Fiskal Tinggi dan PAD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya Kapasitas Fiskal Kota Palopo	1. Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal. - Tahun 2023, PAD hanya Rp 194,01 miliar (20,6% dari total pendapatan), sementara 78% berasal dari pendapatan transfer.	- Basis pajak dan retribusi daerah masih sempit, karena potensi pajak belum tergarap maksimal, termasuk pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. - Pemanfaatan aset daerah belum optimal, banyak aset daerah belum dikelola secara

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	- Pajak daerah hanya menyumbang Rp 46,68 miliar, dan retribusi daerah Rp 10,56 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja daerah.	produktif untuk menghasilkan pendapatan tambahan. - Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, sistem insentif yang kurang menarik, serta belum maksimalnya digitalisasi layanan perpajakan.
Rendahnya efektivitas belanja daerah	2. Alokasi belanja daerah masih kurang strategis dan belum sepenuhnya berbasis kinerja. - Belanja operasional masih mendominasi, sementara belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi hanya berkisar 20-25%. - Banyak program yang bersifat rutin tanpa evaluasi efektivitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	- Proporsi belanja pegawai masih tinggi, sehingga ruang fiskal untuk belanja produktif menjadi terbatas. - Belum optimalnya mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, menyebabkan efisiensi dan efektivitas belanja masih rendah. - Koordinasi antar-perangkat daerah dalam perencanaan program masih lemah, sehingga banyak program yang tumpang tindih atau kurang terintegrasi.
Risiko fiskal akibat ketergantungan terhadap dana transfer	3. Ketergantungan pada dana transfer membuat fiskal daerah rentan terhadap perubahan kebijakan pusat. - Jika terjadi perubahan kebijakan alokasi dana transfer, Palopo berisiko mengalami tekanan fiskal. - Banyak dana transfer bersifat *earmarked*, sehingga fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sangat terbatas.	- PAD belum mampu menutup kebutuhan belanja daerah, sehingga setiap pengurangan dana transfer langsung berdampak pada program pembangunan. - Kurangnya diversifikasi sumber pendapatan daerah, terutama dalam mengembangkan potensi pendapatan dari sektor jasa, industri kreatif, dan pengelolaan kekayaan daerah. - Ketergantungan pada mekanisme fiskal pusat menghambat inovasi pendanaan daerah, misalnya dalam skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) atau optimalisasi dana bagi hasil.
Digitalisasi Layanan Publik Berjalan Lamban	4. Digitalisasi layanan publik berjalan lambat, menghambat efisiensi dan transparansi layanan. - Banyak layanan administrasi daerah masih berbasis manual, memperpanjang waktu pelayanan bagi masyarakat. - Sistem informasi dan integrasi data antar-perangkat daerah masih lemah, menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan lambatnya pengambilan keputusan.	- Infrastruktur teknologi informasi masih terbatas, baik dari sisi jaringan maupun perangkat keras dan lunak yang digunakan dalam layanan publik. - SDM aparatur yang belum sepenuhnya menguasai teknologi digital, menyebabkan implementasi sistem digital belum optimal. - Regulasi dan kebijakan digitalisasi masih kurang komprehensif, sehingga belum ada peta jalan yang jelas untuk percepatan layanan berbasis digital.

2. Ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan yang masih tinggi, pertumbuhan pendapatan masyarakat berjalan lamban.

Kesenjangan yang ditandai dengan ketimpangan di Kota Palopo meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan Rasio Gini yang naik dari 0,354 pada 2020 menjadi 0,371 pada 2022, sebelum sedikit menurun ke 0,367 pada 2023. (Data 2024, belum direlease BPS). Ketimpangan di Kota Palopo bahkan lebih tinggi atau melampuai rata-rata Sulawesi Selatan yang cenderung menurun ke angka 0,377.

Perbaikan kesejahteraan juga berjalan lamban. Berdasarkan data PDRB per kapita Kota Palopo pada tahun 2024 mencapai 56,65 juta rupiah Jika dibandingkan dengan rata-rata PDRB per kapita Sulawesi Selatan tahun 2024 yang mencapai 73,57 juta rupiah, maka capaian Kota Palopo masih berada di bawah rata-rata provinsi. Sementara itu, dibandingkan dengan PDRB per kapita nasional (PDB) tahun 2024 yang sebesar 78,62 juta rupiah, PDRB per kapita Kota Palopo masih lebih rendah sekitar 21,97 juta rupiah atau 27,94% lebih kecil.

Dalam hal pertumbuhan, PDRB per kapita Kota Palopo dari 2021 hingga 2024 meningkat sebesar 10,02 juta rupiah atau 21,48%. Namun, pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Sulawesi Selatan yang meningkat 13,91 juta rupiah (23,32%), serta pertumbuhan nasional yang naik 16,42 juta rupiah (26,39%). Dari segi persentase kenaikan tahunan, Palopo mengalami tren perlambatan pertumbuhan, di mana kenaikan dari 2021 ke 2022 adalah 10,34%, lalu turun menjadi 5,87% pada 2023, dan semakin melambat menjadi 4,00% pada 2024.

Akses terhadap layanan dasar yang berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat serta kesenjangan ekonomi di Kota Palopo. Ketimpangan dalam akses layanan ini dapat memperdalam disparitas sosial-ekonomi, di mana kelompok masyarakat berpendapatan rendah

sering kali menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan yang layak, yang pada gilirannya membatasi peluang mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing di pasar kerja.

Keterbatasan akses layanan dasar juga berdampak langsung pada produktivitas tenaga kerja, yang menjadi salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Jika kelompok berpenghasilan rendah tidak mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai, potensi mereka untuk berkontribusi dalam perekonomian akan semakin terbatas, memperburuk ketimpangan pendapatan dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam aspek ini, masih terdapat kesenjangan dalam akses dan kualitas layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Angka putus sekolah dan ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Selain itu, isu kesehatan masyarakat, termasuk stunting, kecukupan gizi, dan layanan kesehatan primer, serta perilaku hidup bersih sehata di Kota Palopo masih menjadi tantangan yang perlu ditangani melalui pendekatan promotif dan preventif berbasis komunitas.

Dalam hal kemiskinan, penurunannya di Kota Palopo hanya 0,52% dalam 4 tahun, kinerja ini tertinggal atau jauh lebih lambat atau belum lebih baik terhadap penurunan kemiskinan nasional (-1,16%) dan Sulawesi Selatan (-0,66%) sampai dengan 2024. Laju penurunan kemiskinan Kota Palopo juga lebih kecil atau belum lebih baik dibandingkan beberapa daerah lain, seperti: Luwu (-0,95%), Tana Toraja (-1,31%), Luwu Utara (-2,17%) (paling signifikan)

Tabel 2.132
Pemetaan Permasalahan Ketimpangan Ekonomi Dan Kesejahteraan yang Masih Tinggi, Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat Berjalan Lamban

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Ketimpangan ekonomi meningkat	1. Ketimpangan ekonomi meningkat, tercermin dari kenaikan Rasio Gini. - Rasio Gini meningkat dari 0,354 (2020) menjadi 0,371 (2022), kemudian sedikit menurun menjadi 0,367 (2023). - Rasio Gini Kota Palopo tetap lebih tinggi dari rata-rata Sulawesi Selatan yang turun menjadi 0,377 (2023).	- Lapangan kerja di sektor formal terbatas, menyebabkan banyak masyarakat bergantung pada sektor informal dengan pendapatan tidak stabil. - Pola investasi belum merata, lebih banyak terkonsentrasi di sektor perdagangan dan jasa, sementara sektor lain belum berkembang. - Program perlindungan sosial belum optimal, bantuan sosial belum selalu tepat sasaran dan tidak cukup mendorong kemandirian ekonomi kelompok rentan Kota Palopo.
Pendapatan per kapita tertinggal	2. PDRB per kapita Kota Palopo lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. - PDRB per kapita Kota Palopo Rp 56,65 juta (2024), lebih rendah dibandingkan rata-rata Sulsel Rp 73,57 juta dan nasional Rp 78,62 juta. - Pertumbuhan PDRB per kapita Palopo selama 2021-2024 hanya 21,48%, lebih rendah dari Sulsel (23,32%) dan nasional (26,39%).	- Sektor unggulan belum berkembang optimal, daya saing sektor industri kreatif, dan jasa, belum optimal. - Produktivitas tenaga kerja rendah, banyak tenaga kerja masih memiliki keterampilan dasar dan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. - Akses permodalan terbatas,
Kesenjangan akses terhadap layanan dasar	4. Kesenjangan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. - Masih ada anak putus sekolah, terutama pada jenjang SMP.	- Distribusi layanan pendidikan dan kesehatan tidak merata, masih terkonsentrasi di pusat kota. - Keterbatasan sarana air bersih dan sanitasi, terutama di permukiman padat penduduk dan daerah pinggiran. - Daya beli masyarakat masih rendah, menyebabkan akses terhadap layanan dasar berkualitas menjadi terbatas.
Laju penurunan kemiskinan lambat	5. Laju penurunan kemiskinan lebih lambat dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan. - Dalam empat tahun terakhir, kemiskinan di Kota Palopo hanya turun 0,52%, lebih lambat dibandingkan nasional (-1,16%) dan Sulsel (-0,66%).	- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat masih sporadis, belum berbasis data dan tidak berkelanjutan. - Akses pasar bagi usaha kecil masih terbatas, banyak usaha mikro yang sulit berkembang karena kurangnya pendampingan dan jejaring pemasaran. - Belum ada kebijakan afirmatif yang efektif, seperti insentif bagi wirausaha baru
Produktivitas tenaga kerja rendah	6. Angka Pengangguran 7,64% pada 2024, masih lebih tinggi dari target RPD 2026 (7,75%) dan masih lebih tinggi dari rata rata Sulawesi Selatan: 5,55% (2024) dan nasional 5,32% (2024).	- Kurangnya akses terhadap pelatihan kerja berbasis industri, cakupan dan frekwensi program pelatihan masih umum dan belum mengakomodasi kebutuhan spesifik pasar tenaga kerja. - Minimnya keterlibatan dunia usaha dalam pendidikan vokasi, belum ada skema kemitraan industri yang berkelanjutan dengan lembaga pendidikan.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masalah kesehatan masyarakat	7. Tantangan dalam peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk stunting dan kecukupan gizi. - Prevalensi stunting di Kota Palopo mencapai 22,8% (2024), masih lebih tinggi dari target nasional 14% pada 2024.	- Pola konsumsi gizi belum optimal, banyak rumah tangga dengan pola makan kurang seimbang akibat keterbatasan ekonomi dan minimnya edukasi gizi. - Pelayanan kesehatan dasar belum optimal, fasilitas kesehatan primer masih kurang tenaga medis dan alat kesehatan. - Sanitasi dan akses air bersih masih menjadi tantangan, meningkatkan risiko penyakit dan memperburuk kondisi kesehatan anak-anak.

3. Pertumbuhan ekonomi daerah melambat, daya saing dan produktivitas belum optimal.

Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo Tahun 2024 hanya berada pada angka 4,40% dan jauh dibawah target yang berada pada angka 5,98%. Kemudian berdasarkan tren pertumbuhan ekonomi Kota Palopo dari tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya indikasi perlambatan yang cukup mengkhawatirkan. Meskipun pada tahun 2021 dan 2022 Palopo mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, tren ini tidak berlanjut pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan pertumbuhan dari 5,83% di tahun 2022 menjadi 4,34% di tahun 2023, serta hanya sedikit meningkat menjadi 4,40% di tahun 2024, sepertinya mengindikasikan bahwa momentum pertumbuhan mulai melemah. Fakta bahwa angka pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional mengindikasikan bahwa ada persoalan dalam penanganan masalah ekonomi Kota Palopo. Dengan tren yang terus melemah sejak 2023, pencapaian target akhir RPD 2026 sebesar 6,62% akan menjadi tantangan yang semakin sulit. Apalagi jika dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan seperti Makassar (5,56%) dan Parepare (5,30%) yang mampu mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi pada tahun 2024. Ketertinggalan ini menunjukkan bahwa strategi ekonomi Kota Palopo belum cukup optimal dalam memanfaatkan potensi lokal dan menarik investasi.

Perlambatan ini juga bisa berdampak pada aspek sosial, termasuk peningkatan pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat. Jika Kota Palopo tidak mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan, maka daya tariknya sebagai pusat ekonomi di wilayah Luwu Raya bisa semakin tergerus. Dengan demikian, perlambatan ini kami lihat sebagai sebagai permasalahan pembangunan yang serius dan memerlukan respons kebijakan yang lebih kuat. Pemerintah Kota Palopo perlu merancang strategi akselerasi ekonomi yang komprehensif dengan fokus pada peningkatan investasi, optimalisasi sektor produktif seperti perdagangan dan jasa, serta penguatan UMKM agar dapat menjadi motor penggerak ekonomi Kota Palopo. Selain itu, perlu ada kebijakan yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Produktivitas tenaga kerja di Kota Palopo mengalami tren penurunan signifikan dari 102,6 ribu rupiah/tenaga kerja/tahun pada 2021 menjadi 72,3 ribu rupiah pada 2022, yang berarti terjadi penurunan sekitar 29,5% dalam satu tahun. Pada 2023, terjadi sedikit kenaikan menjadi 72,8 ribu rupiah, namun peningkatannya hanya 0,7% dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024, produktivitas kembali meningkat menjadi 74,1 ribu rupiah, tetapi secara keseluruhan masih jauh lebih rendah dibandingkan capaian pada 2021.Jika dilihat dalam tren empat tahun terakhir, angka produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan drastis pada 2022 dan hanya mengalami pemulihan yang lambat hingga 2024. Secara kumulatif, dibandingkan 2021, produktivitas pada 2024 masih lebih rendah sekitar 27,7%, menunjukkan bahwa belum ada pemulihan penuh ke tingkat sebelum penurunan terjadi. Jika tren ini terus berlanjut tanpa percepatan pemulihan, maka daya saing tenaga kerja Kota Palopo dapat semakin tertinggal dibandingkan daerah lain yang mengalami pertumbuhan lebih stabil. Dengan produktivitas yang lebih rendah, daya saing tenaga kerja Palopo dalam menarik investasi dan menciptakan nilai tambah dalam perekonomian juga ikut menurun. Jika tren ini tidak segera diatasi dengan strategi peningkatan keterampilan tenaga kerja, optimalisasi sektor unggulan, dan peningkatan efisiensi usaha, maka pertumbuhan ekonomi Palopo bisa semakin tertinggal dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan. Hal ini juga dapat berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi Kota Palopo adalah belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas. Daya saing investasi dan iklim usaha masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal penyederhanaan regulasi dan penguatan kemitraan dengan dunia usaha. Selain itu, sektor UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam akses permodalan dan literasi digital, sehingga perlu ada upaya penguatan ekonomi kreatif dan transformasi digital bagi pelaku usaha kecil.

Tabel 2.133

Pemetaan Permasalahan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melambat, Daya Saing dan Produktivitas belum Optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tren Ekonomi Melamban dan Tertinggal, serta Produktivitas Daerah Bermasalah	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo pada 2024 hanya 4,40%, jauh di bawah target 5,98%, dan menunjukkan tren perlambatan sejak 2023.	- Kurangnya investasi baru yang masuk ke Kota Palopo, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. (lihat data investor di capaian DPMPTSP) - Daya tarik ekonomi Kota Palopo yang melemah dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan seperti Makassar dan Parepare.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		- Ketergantungan yang masih tinggi pada sektor perdagangan dan jasa tanpa diversifikasi yang memadai ke sektor produktif lainnya.
	2. Produktivitas tenaga kerja mengalami tren penurunan dari 102,6 ribu rupiah/tenaga kerja/tahun pada 2021 menjadi 74,1 ribu rupiah pada 2024.	- Keterbatasan dalam peningkatan keterampilan tenaga kerja dan akses pelatihan berbasis kebutuhan industri. - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam sektor usaha, menyebabkan efisiensi produksi rendah. - Tingginya proporsi pekerja di sektor informal dengan tingkat produktivitas yang relatif lebih rendah dibanding sektor formal.
	3. Daya beli masyarakat cenderung melemah seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi.	- Inflasi yang tidak seimbang dengan kenaikan pendapatan, menyebabkan daya beli stagnan atau menurun. - Sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat belum mendapat dukungan yang cukup dalam akses permodalan dan pemasaran.
	4. Daya saing investasi dan iklim usaha masih kurang kompetitif dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan.	- Regulasi yang belum cukup menarik bagi investor, termasuk perizinan yang masih relatif panjang. - Infrastruktur pendukung bisnis seperti kawasan industri, konektivitas transportasi, dan digitalisasi belum optimal. - Minimnya insentif yang diberikan bagi pelaku usaha dan investor yang ingin berinvestasi di Palopo.
	5. Sektor UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam akses permodalan dan literasi digital, menghambat transformasi ekonomi.	- Keterbatasan program pembiayaan yang mudah diakses oleh UMKM, terutama bagi usaha kecil yang baru berkembang. - Rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan bisnis, pemasaran, dan transaksi keuangan. - Kurangnya pendampingan dan inkubasi bisnis yang dapat mempercepat skala usaha UMKM.
	6. Pemanfaatan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas masih belum optimal.	- Keterbatasan akses transportasi dan logistik yang menghambat pergerakan barang dan jasa. - Kurangnya integrasi infrastruktur fisik dan digital dalam mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi. - Belum adanya kebijakan yang terfokus pada pengembangan kawasan ekonomi strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor produktif.

4. Ketahanan pangan stagnan dan degradasi lingkungan meningkat.

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dalam 3 tahun terakhir, 2022- 2024, terlihat bahwa IKP Kota Palopo masih berada di bawah rata-rata provinsi dan daerah lainnya, yang mengindikasikan potensi permasalahan dalam aspek ketahanan pangan. Pada tahun 2022, Palopo memiliki IKP terendah (73,41) dibandingkan Sulsel (81,38), Makassar (83,86), dan Parepare (79,1). Meskipun mengalami peningkatan signifikan pada 2023 menjadi 82,93, angka ini masih lebih rendah dibandingkan provinsi dan daerah lainnya, serta hanya mengalami kenaikan 0,12 poin di 2024 (83,05), menunjukkan stagnasi dalam peningkatan ketahanan pangan.

Sebagai perbandingan, Makassar mengalami lonjakan IKP yang sangat signifikan, dari 83,86 (2022) menjadi 97,95 (2024), sedangkan Sulsel dan Parepare relatif stabil di angka 83-an. Tren ini menunjukkan bahwa Palopo masih memiliki tantangan dalam ketahanan pangan, terutama dalam menjaga stabilitas produksi pangan, aksesibilitas, serta distribusi bahan pangan bagi masyarakat. Kondisi ini berbandinhg terbalik dengan pertumbuhan penduduk yang membutuhkan pangan, justru semakin meningkat. Jika tren stagnasi ini berlanjut, maka Palopo dapat mengalami risiko kerentanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Sulsel, sehingga diperlukan intervensi yang lebih kuat dalam kebijakan ketahanan pangan daerah.

Dalam konteks ketahanan pangan, nilai IKP yang masih relatif rendah dan stagnan di Kota Palopo mencerminkan tantangan dalam tiga aspek utama: ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan dapat terpengaruh oleh produksi pertanian yang belum optimal atau ketergantungan pada pasokan luar daerah. Aksesibilitas pangan terkait dengan daya beli masyarakat serta efektivitas sistem distribusi yang mungkin belum merata. Sementara itu, pemanfaatan pangan berkaitan dengan pola konsumsi dan kualitas gizi masyarakat yang dapat berimplikasi pada tingkat kesehatan. Jika tren stagnasi ini berlanjut, maka Palopo berisiko mengalami kerentanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Sulsel, sehingga diperlukan intervensi yang lebih kuat dalam kebijakan ketahanan pangan daerah, baik melalui peningkatan produksi lokal, penguatan infrastruktur distribusi, maupun program intervensi sosial bagi kelompok rentan.

Pada aspek lingkungan, terutama persampahan, juga masih menjadi persoalan yang serius dan potensial berdampak pada banyak aspek, mulai dari kesehatan pribadi sampai dengan kesehatan lingkungan masyarakat. Berdasarkan data pengelolaan sampah di Kota Palopo, terdapat tren peningkatan volume timbulan sampah dari 23.735,37 ton (2021) menjadi 25.362,00 ton (2024). Namun, jumlah sampah yang ditangani hanya berkisar 24.038,09 ton (2023) hingga 25.362,00 ton (2024), menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kota Palopo masih menghadapi tantangan dalam aspek efisiensi pengangkutan, pengurangan timbulan sampah, serta peningkatan kapasitas pengolahan dan daur ulang. Selain itu, indikator ruang terbuka hijau (RTH) yang stagnan di 47,9 km² sejak 2021 mengindikasikan minimnya upaya dalam mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan strategi keberlanjutan lingkungan.

Pada aspek yang lebih luas dan strategis, degradasi lingkungan dan perubahan iklim menjadi tantangan utama dalam aspek ini, terutama terkait dengan perubahan tata guna lahan, pengelolaan sampah, dan peningkatan risiko bencana alam. Selain itu, ketahanan pangan masih menghadapi kendala dari sisi produksi lokal yang belum optimal serta fluktuasi harga komoditas strategis yang berdampak pada inflasi daerah. Efisiensi penggunaan energi dan air bersih juga menjadi perhatian, terutama dalam konteks keberlanjutan sumber daya di perkotaan.

Tabel 2.134

Pemetaan Permasalahan Ketahanan Pangan Stagnan dan Degradasi Lingkungan Meningkat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Stagnasi Ketahanan Pangan dan Masalah Lingkungan Makin Meningkat	1. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Palopo stagnan di angka 83,05 pada 2024, masih di bawah rata-rata provinsi dan daerah lain.	- Ketergantungan tinggi terhadap pasokan pangan dari luar daerah akibat produksi pangan lokal yang belum optimal.
		- Kurangnya diversifikasi komoditas pertanian yang dapat meningkatkan ketahanan terhadap fluktuasi pasokan dan harga.
		- Minimnya program penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas dan teknologi pertanian.
	2. Aksesibilitas pangan masih terbatas bagi kelompok rentan, terutama dalam hal daya beli dan distribusi pangan.	- Ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, menyebabkan daya beli terhadap pangan masih rendah.
		- Sistem distribusi pangan belum efisien, dengan keterbatasan infrastruktur rantai pasok yang memperlambat pergerakan pangan dari produsen ke konsumen.
	3. Pengelolaan sampah belum optimal, dengan volume timbulan sampah meningkat menjadi 25.362 ton pada 2024, namun belum seluruhnya terkelola dengan baik.	- Kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah masih terbatas, termasuk jumlah armada pengangkut dan fasilitas daur ulang yang belum berkembang.
		- Kurangnya kebijakan insentif bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurangi, memilah, dan mendaur ulang sampah.
	4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) stagnan di 47,9 km² sejak 2021, menunjukkan minimnya upaya keberlanjutan lingkungan.	- Keterbatasan lahan dan insentif bagi pengembangan RTH di kawasan perkotaan.
		- Belum adanya kebijakan efektif yang mengintegrasikan pembangunan kota dengan pendekatan berbasis lingkungan.
	5. Degradasi lingkungan dan perubahan iklim memperburuk ketahanan pangan dan meningkatkan risiko bencana.	- Perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali, mengurangi area produktif pertanian dan menambah risiko banjir serta longsor.
		- Minimnya strategi mitigasi perubahan iklim yang spesifik untuk Kota Palopo, terutama dalam ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	6. Efisiensi penggunaan energi dan air bersih masih menjadi tantangan keberlanjutan di Kota Palopo.	- Ketergantungan pada sumber energi konvensional dengan belum berkembangnya energi terbarukan.
		- Belum optimalnya pengelolaan air baku dan distribusi air bersih bagi masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk cepat.

5. Ketahanan sosial masyarakat semakin terancam akibat perubahan sosial dan ekonomi.

Tingkat kemiskinan di Kota Palopo yang masih berada pada angka 7,35% di tahun 2024, meskipun mengalami tren penurunan dari 8,14% pada 2021, tetap menjadi indikator yang perlu dicermati dalam konteks ketahanan sosial masyarakat. Kesenjangan ekonomi yang masih ada dapat memperlemah kohesi sosial dan meningkatkan potensi konflik sosial, terutama jika kelompok rentan merasa tersisih dari proses pembangunan. Kondisi ini berisiko memperburuk inklusivitas pembangunan, menghambat partisipasi kelompok perempuan dan pemuda dalam ekonomi lokal, serta memperkuat segregasi sosial atau pengkotak-kotakan di masyarakat yang dapat menghambat terbentuknya harmoni dalam masyarakat yang semakin heterogen. Dari perspektif regional, Kota Palopo memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lain di Sulawesi Selatan, seperti Luwu (11,7%), Tana Toraja (10,79%), dan Luwu Utara (11,24%). Namun, dibandingkan dengan kota-kota lain seperti Parepare (5,27%) dan Makassar (4,97%), angka kemiskinan Kota Palopo masih cukup tinggi.

Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam penciptaan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, yang dapat mengakibatkan meningkatnya ketimpangan sosial. Ketimpangan ini berpotensi menjadi pemicu meningkatnya ancaman sosial, seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, serta gangguan ketertiban umum akibat meningkatnya frustrasi sosial di kalangan kelompok rentan yang kesulitan mengakses peluang ekonomi. Untuk mengatasi ancaman terhadap ketahanan sosial ini, Pemerintah Kota Palopo perlu merancang kebijakan yang tidak hanya fokus pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga pada penguatan nilai sosial budaya dan keterlibatan komunitas dalam menciptakan stabilitas sosial. Peran aktif komunitas dalam membangun jaringan sosial yang inklusif dapat menjadi langkah strategis. Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan tidak hanya menjadi sekadar pencapaian statistik, tetapi juga berdampak langsung dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, inklusif, dan berdaya secara sosial maupun ekonomi.

Isu-isu seperti kesenjangan sosial, inklusivitas pembangunan, serta peningkatan partisipasi kelompok perempuan dan pemuda dalam pembangunan menjadi perhatian utama Peemrimtah Kota Palopo dalam aspek ketahanan sosial. Karena menjadi tantangan dalam membangun harmoni sosial di tengah dinamika masyarakat Kota Palopo yang semakin heterogen. Ancaman sosial lainnya adalah narkoba dan gangguan ketertiban umum perlu diantisipasi melalui penguatan nilai sosial budaya serta keterlibatan komunitas dalam menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik.

Tabel 2.135
Pemetaan Permasalahan Ketahanan Sosial Masyarakat Semakin Terancam Akibat Perubahan Sosial dan Ekonomi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Ancaman Terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat Meningkat	1. Tingkat kemiskinan di Kota Palopo masih 7,35% pada 2024, meskipun menurun dari tahun sebelumnya.	- Kurangnya diversifikasi ekonomi yang mengarah pada ketergantungan terhadap sektor perdagangan dan jasa dengan produktivitas rendah.
		- Rendahnya akses tenaga kerja lokal terhadap pelatihan berbasis keterampilan industri dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
	2. Kesenjangan ekonomi yang masih ada berpotensi memperlemah kohesi sosial dan meningkatkan potensi konflik sosial.	- Keterbatasan skema pembiayaan inklusif bagi UMKM dan wirausaha lokal yang berasal dari kelompok miskin dan rentan.
		- Tidak meratanya distribusi program pengentasan kemiskinan dan minimnya evaluasi terhadap efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kemandirian ekonomi.
	3. Rendahnya inklusivitas pembangunan yang menyebabkan segregasi sosial dalam masyarakat.	- Kurangnya program pendampingan berbasis komunitas yang mampu meningkatkan partisipasi perempuan dan pemuda dalam ekonomi lokal.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		- Belum optimalnya peran forum warga atau kelompok sosial dalam perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat marjinal.
	4. Ancaman sosial meningkat, seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan gangguan ketertiban umum.	- Tidak adanya sistem deteksi dini berbasis data untuk memetakan wilayah dengan tingkat risiko sosial tinggi.
		- Lemahnya koordinasi antarinstansi dalam program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi kelompok rentan, termasuk mantan pelaku kriminal dan pengguna narkoba.
	5. Lemahnya peran komunitas dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang semakin heterogen.	- Kurangnya insentif dan dukungan bagi inisiatif sosial berbasis lokal dalam membangun jejaring sosial dan solidaritas masyarakat.
		- Minimnya regulasi atau kebijakan daerah yang memperkuat kapasitas organisasi sosial, seperti Karang Taruna dan lembaga adat, dalam mengatasi permasalahan sosial di lingkungan mereka.

Tabel 2.136
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan dengan Tujuan dan Sasaran Daerah

No	Permasalahan Pembangunan 2026	Isu Strategis 2026	Prioritas Pembangunan 2026	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
1	Ketergantungan fiskal tinggi dan PAD masih rendah, sementara layanan publik belum optimal.	Ketahanan fiskal daerah yang rendah dan efektivitas belanja yang belum maksimal.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digitalisasi layanan publik.	T1 - Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	S1 - Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan
2	Ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan yang masih tinggi, pertumbuhan pendapatan masyarakat berjalan lamban.	Pemerataan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan berbasis produktivitas.	Pembangunan manusia yang inklusif dan penguatan kualitas layanan dasar.	T2 - Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Daerah yang Berkualitas	S2 - Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha
3	Pertumbuhan ekonomi daerah melambat, daya saing dan produktivitas belum optimal.	Penguatan infrastruktur produktif dan peningkatan investasi daerah.	Pengembangan produktivitas ekonomi berbasis kewirausahaan dan investasi lokal.	T2 - Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Daerah yang Berkualitas	S3 - Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas
4	Ketahanan pangan stagnan dan degradasi lingkungan meningkat.	Peningkatan ketahanan pangan, energi, dan keberlanjutan lingkungan.	Pengembangan infrastruktur strategis yang adaptif dan berkelanjutan.	T3 - Terwujudnya Lingkungan Layak Huni dan Berkelanjutan	S5 - Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kualitas Lingkungan Perkotaan
5	Ketahanan sosial masyarakat semakin terancam akibat perubahan sosial dan ekonomi.	Penguatan ketahanan sosial dan daya rekat budaya dalam masyarakat.	Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan budaya lokal.	T2 - Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Daerah yang Berkualitas	S4 - Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah mencakup tantangan administratif dan regulasi yang tumpang tindih, keterbatasan finansial dan sumber daya, isu-isu politis dan koordinasi, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu, terdapat rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya optimalisasi teknologi informasi, dan kelemahan dalam perencanaan dan penganggaran yang menjadi kendala dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah. Berikut identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Palopo.

Tabel. 2.137

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan	
		Masih adanya anak putus sekolah, kualitas Pendidikan terutama angka rendahnya angka literasi, dan pemeliharaan sarpras sekolah
		Meningkatnya anak bolos sekolah, dan kekerasan antar sesama anak/bully
		Ketimpangan kualitas lulusan sekolah negeri dan swasta, serta kalah kompetisi dalam lomba sains
		Pembinaan terhadap kelompok belajar masyarakat belum optimal dalam mendorong pendidikan kesetaraan
2	Kesehatan	
		Prevalensi HIV/AIDS di Palopo, rekon data PBI APBD BPJS, status RS palemai tandi, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas posyandu
		Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan belum mencakupi seluruh unsur pelayanan yang dipersyaratkan.
		Tuntutan pada layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan tanpa antrian dengan kejelasan waktu pelayanan, semakin mengemuka.
		Keteraturan dan ketepatan waktu dalam menyalurkan bansos eks-penderita kusta (Uang makan sering terlambat @Rp.500.000/bln Penerima manfaat 23 Jiwa).
		Belum adanya Pemberdayaan masyarakat eks-penderita kusta kalang-kalang
		Rasio jumlah balita dan posyandu dari waktu ke waktu terus menunjukan trend yang tidak berimbang. Demikian halnya dengan rasio ideal pelayanan dokter umum, dokter spesialis terhadap jumlah pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (RS).
		Upaya penanggulangan penyakit menular dan penciptaan lingkungan yang sehat, perbaikan gizi, dan promosi kesehatan lainnya belum optimal.
		Kebutuhan dokter spesialis PNS yang belum memadai
		Peningkatan penunjang sarana dan prasarana volume drainase belakang RSUD Sawerigading yang sering mengakibatkan meluapnya air di lingkungan rumah sakit
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pembaruan data drainase, kondisi jalan, jaringan air minum; biaya pemeliharaan jalan jembatan, dan tumpang tindih perizin bangunan dengan Dinas PTSP
		Kurangnya sumber pendanaan diluar APBD/APBN melalui CSR
		Belum dilakukannya Edukasi kepada warga untuk menjaga dan memelihara fasilitas publik
		Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan di kawasan pesisir dan daerah luar kota belum memadai dan belum merata.
		Eksistensi lahan khusus lahan pertanian di Kota
		Palopo terus berkurang oleh pengembangan seperti perumahan dan pengalihan fungsi lahan ke sektor lainya
		Jaringan irigasi yang sudah berumur sehingga mengalami kerusakan dan mengancam keberlanjutan pertanian kurang efektif dalam layanan air.
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		Update data RTLH dan kawasan kumuh; Pengelolaan rusun/rusus sesuai peruntukan penerima manfaat
		Munculnya pengembang baru tanpa memperhatikan dampak lingkungan bagi warga sekitar; Penyerahan fasum fasos kepada pemerintah
		Penyediaan jatah 10 petak rusun di lantai I bagi penyandang disabilitas belum memungkinkan untuk disediakan
		Belum tercukupinya dukungan prasarana dan sarana umum (PSU) dalam menghadirkan lingkungan perumahan/ pemukiman yang sehat dan aman.
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	

NO	BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN
		Upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal kurang bersinergi antar stakeholder
		Fasilitas, sarana-prasarana serta kapasitas SDM Satpol PP dalam penegakan Perda secara menyeluruh belum memadai.
		Upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban, termasuk pelibatannya dalam pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) dan menjaga keamanan, belum memadai.
		Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dalam masyarakat termasuk pada lingkungan perumahan belum memadai.
		Kecukupan sarana dan prasarana serta peralatan penanganan kebakaran belum memadai dalam memenuhi tingkat waktu tanggap *(response time rate)* yang baik pada wilayah manajemen kebakaran (WMK).
		Kapasitas dalam penyediaan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum berkembang seiring dengan tuntutan/kebutuhan.
		Kapasitas dan kerjasama stakeholder daerah dalam pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat, serta deteksi dini dan pencegahan konflik sosial, masih rendah.
6	Sosial	
		Data mutakhir untuk keseluruhan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS dalam berbagai kelompok/golongan belum tersedia dengan cukup sebagai dasar dalam penanganan PMKS.
		Ketersediaan sumberdaya manusia, finansial dan sarana-prasarana dalam penanganan, pemberian bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS masih terbatas.
		Kemampuan panti sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) dalam penyediaan sarana pelayanan sosial dan prasarana kesejahteraan sosial masih terbatas.
		Kemampuan SDM dan sarana-prasarana dalam rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, anak terlantar di luar panti, lanjut usia telantar di luar panti, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, masih terbatas.
		Kemampuan SDM dan sarana-prasarana dalam evakuasi, bantuan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana masih terbatas.
		Data mutakhir untuk keseluruhan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS dalam berbagai kelompok/golongan belum tersedia dengan cukup sebagai dasar dalam penanganan PMKS.
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1	Tenaga Kerja	
		Data yang lengkap tentang pekerja dan pencari kerja untuk kepentingan penyaluran pencari kerja, keselamatan dan perlindungan pekerja, serta kepesertaan dalam program Jamsostek belum tersedia secara termutakhirkan.
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kesempatan kerja (bursa kerja) belum memadai dalam kondisi peluang kesempatan kerja dan lapangan berusaha tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja.
		Cakupan besaran pencari kerja dan tenaga kerja dalam pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat, dan pelatihan kewirausahaan belum memadai.
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Kompetensi dan peluang perempuan untuk bersaing pada pekerjaan di lembaga pemerintah, DPRD dan lembaga swasta belum memadai.
		Kapasitas unit pelayanan terpadu dalam penanganan pengaduan, rehabilitasi sosial, layanan kesehatan dan layanan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan masih terbatas.
		Kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum efektif dalam pengintegrasian pada kebijakan dan penganggaran.
3	Pangan	
		Koordinasi dan penanganan daerah rawan dengan stake holder lain yang terkait belum efektif
		Pemantauan dan analisis akses pangan, harga pangan, cadangan pangan dan pengembangan model distribusi, pemasaran hasil, dan sistem informasi pangan yang efisien belum memadai
		Diversifikasi pemanfaatan pangan masyarakat belum optimal dalam mendukung pemenuhan pangan berimbang sesuai pola pangan harapan.

NO	BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN
		Sinergi dan koordinasi dengan stake holder terkait dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan belum optimal
4	Pertanahan	
		Pengembangan sistem informasi dan pendaftaran tanah belum memadai dalam mendukung sertifikasi tanah.
		Penataan penguasaaan, pemilikan dan penggunan dan pemanfaatan tanah belum optimal dalam mencegah dan menyelesaikan kasus tanah negara maupun tanah masyarakat.
		Sertifikasi asset pemerintah belum mencapai 100%
5	Lingkungan Hidup	
		Beberapa spot lokasi di Kota Palopo masih sering dilanda banjir dan di beberapa titik lainnya digenangi air saat musim penghujan tiba serta kebakaran hutan dalam skala kecil pada musim kemarau.
		Luas lahan kritis dan tingkat kerusakan hutan terus bertambah seriring dengan semakin menurunnya daya tampung lingkungan, kapasitas dan kualitas air baku, akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan.
		Pengintegrasian RPPLH dan KLHS kedalam dokumen perencanaan daerah belum terukur dan dilengkapi data mutakhir.
		Pemantauan, pengukuran dan pengendalian kualitas tutupan lahan, air dan udara belum terkordinasikan secara rutin dan efektif.
		Identifikasi, verifikasi, penetapan dan pendampingan masyarakat hukum adat serta kearifan dan pengetahuan lokal terkait pengelolaan lingkungan hidup belum terprioritaskan.
		Luas area penanganan sampah serta pengurangan sampah melalui mekanisme reduce, reuse dan recicle (3R) masih terbatas.
		Dampak pemanasan global semakin meningkatdalam kondisi penanganan efek gas rumah kaca belum optimal.
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Ketidaktersediaan bahan dan fasilitas menghambat pelayanan
		Penerbitan E-KTP secara tepat waktu dan memuaskan.
		Peralatan perekaman E-KTP banyak yang rusak
		Belum tersosialisasikan secara maksimal penerbitan KIA bagi anak dibawah 17 tahun
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Kebutuhan sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran desa yang baik belum terpenuhi secara merata termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi.
		Kinerja LPM dalam pemberdayaan masyarakat belum efektif dan merata.
		Kinerja PKK dalam pembinaan masyarakat belum efektif dan merata.
	`	Kapasitas SDM dan perlengkapan pada posyandu berkembang secara tidak berimbang dengan kebutuhan pelayanan masyarakat khususnya ibu hamil dan bayi.
		Keswadayaan masyarakat dalam mendorong dan memeliharan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat belum optimal
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Ketersediaan dan Pemanfaatan Rencana Induk Pengendalian Penduduk dan kebijakan kependudukan lainnya dalam pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk belum efektif.
		Pelayanan kontrasepsi belum menjangkau secara menyeluruh pada pasangan usia subur dalam menekan kelahiran anak.
		Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri serta kesadaran kesehatan reproduksi belum memadai.
		Bina keluarga balita, keluarga remaja dan keluarga lansia belum didukung oleh tenaga pendampingyang memadai.
		Model operasional BKB-Posyandu-PADU belum terkoordinasi.
9	Perhubungan	
		Fasilitas uji KIR masih menggunakan asset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
		Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ kurang optimal
		Pengendalian dan pengamanan lalu lintas belum memadai
		Pengawasan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum belum memadai
		Pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan belum tergali dengan baik.
		Uji KIR sesuai standar belum mencakupi semua angkutan umum.
		Pemenuhan rambu-rambu lalu lintas belum mencakupi sesuai kebutuhan

NO	BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN
10	Komunikasi dan Informatika	
		Kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan belum berkembang secara fungsional.
		Layanan telekomunikasi belum menjangkau semua wilayah.
		Data tentang kepemilikan masyarakat atas hand-phone/telepon, akses internet dan komputer pribadi belum terpenuhi secara lengkap.
		SDM bidang teknologi komunikasi dan informasi pada OPD belum terpenuhi
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
		Iklim usaha kecil dan menengah belum kondusif dan memadai.
		Kemampuan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM belum memadai
		Sistem pendukung usaha bagi UMKM belum optimal belum berkembang.
12	Penanaman Modal	
		Iklim investasi dan realisasi investasi belum didukung oleh kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pengembangan sistem informasi, penyederhanaan prosedur, kajian isentif investasi secara memadai.
		Penyiapan potensi sumberdaya dan sarana-prasarana daerah pendukung investasi masih terbatas.
		Pengembangan data dan informasi statistik daerah terkait investasi belum tersinergikan antar OPD.
		Iklim investasi dan realisasi investasi belum didukung oleh kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pengembangan sistem informasi, penyederhanaan prosedur, kajian isentif investasi secara memadai.
13	Kepemudaan dan Olahraga	
		Sarana/prasarana serta kordinasi antar elemen pemuda dalam mendorong keaktifan organisasi dan peran serta pemuda belum memadai.
		Jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda belum memadai.
		Sarana/prasarana serta fasilitas olah raga serta pelatih cabang olahraga dalam mendorong atlet/cabang olah raga berprestasi masih terbatas.
		Kebijakan dan manajemen serta pemasyarakatan olahraga belum memadai
		Sarana/prasarana serta kordinasi antar elemen pemuda dalam mendorong keaktifan organisasi dan peran serta pemuda belum memadai.
		Jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda belum memadai.
14	Statistik	
		Belum tersedianya data lengkap berdasarkan indikator kinerja kunci masing-masing perangkat daerah.
		Terlambatnya ketersediaan data umum kondisi daerah yang termuat dalam Kabupaten dalam Angka, dan PDRB, sehingga kurang mutakhir dijadikan dasar dalam perencanaan tahunan.
		Upaya pengembangan data/informasi/statistik daerah belum terkoodinasi dan masih sektoral, dimana data statitik daerah masih bervariasi pada tingkat PD, bahkan terkadang multi interpretasi.
		Pemanfaatan informasi dan teknologi digital berbasis web dalam pengelolaan data statitik daerah belum signifikan.
15	Persandian	
		Kelembagaan dan arah pengembangan dan pengelolaan SDM persandian daerah belum terstruktur secara massive dan terkoordinasi dengan baik.
		Penggunaan sandi belum termanifestasikan dalam komunikasi perangkat daerah.
16	Kebudayaan	
		Penyelenggaraan festival seni dan budayabelum berlangsung secara berkala
		Benda, situs dan kawasan cagar budaya belum terkelola secara sistematis dalam kerangka pelestarian.
		Ketersedian data karya budaya untuk kepentingan inventarisasi dan revitalisasi belum akurat dan komprensif.
		Penyelenggaraan festival seni dan budayabelum berlangsung secara berkala
17	Perpustakaan	
		Minat baca masyarakat Kota Palopo masih sangat rendah
		Keterbatasan dalam memperluas ruang baca dan penyimpanan buku dikarenakan status bangunan perpustakaan masuk dalam Kawasan cagar budaya
		Terbatasnya tenaga fungsional kepustakawan
18	Kearsipan	

NO	BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN
		Cakupan dan kualitas penerapan pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah belum menyeluruh
Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan		
1	Pariwisata	
		Destinasi wisata yang ada belum tertata mengikuti perkembangan kontemporer kepariwisataan dan masih ada potensi destinasi wisata yang belum dikembangkan.
		Pemasaran dan jaringan kemitraan kepariwisataan belum efektif mendukung peningkatan jumlah pengunjung wisata.
		Pengembangan komunikasi dan informasi dalam promosi kepariwisataan masih minim.
		Penerimaan dan kontribusi sektor kepariwisataan terhadap PAD dan PDRB belum optimal.
2	Pertanian	
		Penerapanteknologi dan ketersediaan sarana prasarana pendukung pertanian, peternakan dan perkebunan masih terbatas.
		Pengolahan produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan belum optimal
		Jaringan dan kemitraan usaha baik produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perkebunan belum memadai
		Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan sektor pertanian secara luas masih minim
		Kelompok tani masih belum mandiri dan naik kelas
3	Perdagangan	
		Simpul distribusi dan sentra ekonomi masyarakat lainnya masih jauh dari kondisi nyaman
		Kelembagaan dan kemitraan perdagangan belum optimal
		Pengawasan mutu dan peredaran barang yang beredar belum memadai dan terkoordinasi baik dengan PD lainnya.
		Perlindungan atas konsumen belum optimal
		Pembinaan terhadap personal dan kelembagaan pedagang kaki lima dan asongan belum optimal.
4	Perindustrian	
		Data potensi dan karaketeristik usaha kelompok pengrajin belum tersedia dengan cukup.
		Kluster industri kecil dan menengah dalam suatu kawasan industri belum berkembang dengan optimal.
		Pemanfaatan teknologi informasi dan sinergi antar pihak dalam pengembangan industri belum memadai.
		Data potensi dan karaketeristik usaha kelompok pengrajin belum tersedia dengan cukup.
5	Kelautan dan Perikanan	
		Kapasitas peralatan dan teknologi penangkapan ikan belum berkembang mengikuti tuntutan baru dalam modernisasi perikanan.
		Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan masih minim.
		Kelompok nelayan belum berkembang optimal sebagai wahana peningkatan produksi dan edukasi bagi penangkapan yang ramah lingkungan
Penunjang Urusan		
1	Perencanaan Pembangunan	
		Kualitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah masih sangat terbatas
		Ketersediaan data sesuai indikator kinerja kunci berbagai urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah masih terbatas.
		Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam penyelenggaraan urusan oleh perangkat daerah belum akurat dan tepat waktu.
		Pembahasan prioritas Renja/RKPD dalam proses musrenbang RKPD belum substantif berbasis fakta.
		Penjabaran konsistensi RPJMD ke dalam RKPD dan RKPD kedalam APBD belum akurat.
		Pengendalian pemanfaatan ruang dalam membangun konsistensi RTRW belum akurat dan menyeluruh.
2	Keuangan	
		SDM berkualitas pada OPD dalam analisis dan pelaporan keuangan masih terbatas.
		Porsi SILPA dalam penyelenggaraan keuangan daerah masih signifikan.
		Program/kegiatan yang tidak berjalan karena keterbatasan realisasi anggaran masih ada.

NO	BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN
		Pendapatan Asli Daerah masih sangat minim dan masih sangat tergantung pada Dana Alokasi Umum.
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	
		Kebutuhan dana untuk pendidikan dan pelatihan formal, structural dan fungsional bagi ASN tidak mencukupi sesuai tingkat kebutuhan ASN.
		Penyelenggaraan tugas jabatan fungsional pada beberapa PD belum optimal dalam peningkatan capaian kinerja.
		Banyaknya PNS yang telah memasuki usia pensiun
4	Penelitian dan Pengembangan	
		SDM dan sarana/prasarana kelitbangan daerah belum memadai dalam mendukung kegiatan kelitbangan
		Iklim pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah belum berjalan dengan baik.
5	Pengawasan	
		Temuan pelanggaran administrative dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah masih ada.
		Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK belum maksimal.
6	Sekretariat Dewan	
		Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat
		Kelengkapan DPRD belum akurat.
		Rendahnya produk hukum daerah hasil legislasi pihak eksekutif dan legislatif
		Rendahnya pemahaman anggota DPRD terhdap tugas pekerjaannya
7	Sekretariat Daerah	
		Perumusan kebijakan dan kordinasi administrasi belum sepenuhnya efektif mendukung penyelenggaraan urusan.
		Penyelenggaraan kegiatan antara Sekretariat Daerah dengan perangkat daerah sering tumpang tindih.

2.5 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah permasalahan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah dan membutuhkan perhatian serta kebijakan khusus dalam dokumen perencanaan. Olehnya isu strategis umumnya berdampak luas terhadap masyarakat dan pembangunan daerah, bersifat lintas sektor atau multi urusan dan membutuhkan koordinasi antar pemangku kepentingan, memiliki urgensi tinggi untuk ditangani dalam periode perencanaan, sekaligus dapat diukur melalui indikator atau data yang tersedia. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa perumusan isu strategis didasarkan pada evaluasi pembangunan, permasalahan daerah, kebijakan nasional dan provinsi, serta tren global yang relevan. Penyusunannya berbasis data, dan berdampak luas dan memiliki urgensi tinggi agar menjadi fokus dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk RKPD.

2.5.1 Isu Strategis Global

Dunia pada 2025–2026 akan menghadapi lanskap strategis yang kompleks, didominasi oleh persaingan geopolitik AS-China dan fragmentasi tatanan global. Ketegangan di Taiwan dan Laut China Selatan berpotensi memicu krisis keamanan, sementara ekspansi blok seperti BRICS+ (dengan anggota baru seperti Arab Saudi dan Iran) mengubah dinamika kekuatan tradisional. Di sisi lain, konflik regional yang belum terselesaikan—dari perang Ukraina hingga krisis Timur Tengah—terus mengganggu stabilitas, memperburuk kerawanan pangan dan migrasi paksa. Bersamaan dengan itu, transformasi ekonomi melalui *friend-shoring* dan persaingan subsidi hijau (seperti *Inflation Reduction Act* AS) mempercepat fragmentasi rantai pasok global, meninggalkan negara berkembang dalam jerat utang dan ketimpangan.

Di tengah turbulensi geopolitik dan ekonomi, disrupsi teknologi dan tekanan iklim semakin menguji ketahanan global. Kemajuan AI tidak hanya memacu inovasi, tetapi juga menjadi senjata disinformasi—mengancam integritas pemilu dan keamanan siber infrastruktur kritis. Sementara itu, dampak perubahan iklim semakin nyata: bencana ekstrem memicu krisis air dan pangan, mendorong migrasi massal serta memperuncing ketegangan sumber daya. Upaya kolektif seperti COP30 dan dana Loss and Damage menjadi ujian bagi multilateralisme yang rapuh, di mana aktor non-negara (perusahaan teknologi, LSM) pun turut membentuk respons global. Dalam dunia yang saling terhubung ini, resiliensi nasional akan bergantung pada kemampuan negara mengelola multikrisis dengan strategi adaptif lintas sektor.

Identifikasi isu strategis adalah tantangan kunci atau menjadi tulang punggung penyusunan agenda pembangunan daerah, menyempurnakan proses perencanaan berjenjang. Pemilahan isu berdampak tinggi memperkuat legitimasi kebijakan prioritas sekaligus menjamin akuntabilitas keabsahan moral kebijakan publik. Tanpa penajaman persoalan strategis, arah pembangunan rentan menyimpang dari kebutuhan esensial masa depan, suatu realitas ditetapkan sebagai fokus strategis ketika mengandung konsekuensi jangka panjang bagi kemajuan wilayah atau kualitas

hidup warga. Kelalaian mengantisipasi kondisi ini berpotensi memicu kerugian sistemik, sementara kegagalan memanfaatkannya berarti menyia-nyiakan kesempatan meningkatkan kemakmuran berkelanjutan. pada penyusunan agenda Kota Palopo Tahun 2026 penetapannya mensyaratkan analisis mendalam atas problematik lokal serta dampak dinamika eksternal (global, nasional, kawasan). Harmonisasi dengan arah kebijakan fundamental—tercermin dalam program pada dokumen perencanaan Pembangunan Daerah menjadi syarat mutlak perumusan isu strategis. Kesesuaian dengan panduan resmi seperti cetak biru palopo atau Rencana Pembangunan Daerah 2024–2026 ini memastikan setiap prioritas selaras dengan cita-cita kolektif dan komitmen Daerah terhadap harapan masyarakat.

A. Persaingan Strategis AS-China dan Polarisasi Ekonomi

Teknologi dan keamanan nasional persaingan di bidang teknologi kritis seperti semikonduktor, kecerdasan buatan (ai), komputasi kuantum, dan energi hijau akan semakin ketat. Ini akan memicu lebih banyak pembatasan ekspor, kontrol investasi, dan upaya untuk mendominasi standar teknologi global.

Reshoring dan friendshoring, rantai pasok global akan terus direorganisasi berdasarkan aliansi politik dan keamanan ("blok"), bukan hanya efisiensi ekonomi. Negara-negara akan didorong untuk memindahkan produksi ke negara-negara sekutu (friendshoring) atau kembali ke domestik (reshoring) untuk mengurangi ketergantungan dan risiko. Pengaruh di global south, AS dan China akan terus bersaing untuk mendapatkan pengaruh di kawasan global south (seperti afrika, amerika latin, dan asia tenggara) melalui investasi, diplomasi, dan inisiatif infrastruktur (seperti belt and road initiative vs partnership for global infrastructure and investment).

B. Perubahan Iklim dan Transisi Energi yang Kompleks

Tekanan untuk beraksi terhadap perubahan iklim akan semakin besar, tetapi jalannya akan penuh tantangan, dampak yang semakin nyata frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem (gelombang panas, banjir, kekeringan) akan terus meningkat, menekankan sistem pangan, mengancam keamanan air, dan menciptakan pengungsi iklim. Transisi energi yang tidak merata:perlombaan menuju energi terbarukan akan berlanjut, namun ketegangan akan muncul antara kecepatan transisi, keamanan energi, dan keterjangkauan. Ketergantungan pada mineral kritikal untuk energi hijau akan menjadi titik geopolitik baru. Mekanisme pembiayaan dan loss & damage: implementasi mekanisme pendanaan untuk membantu negara-negara rentan beradaptasi dengan iklim dan menangani kerugian (loss and damage) yang telah terjadi akan menjadi isu diplomasi yang panas.

C. Konflik Regional dan Instabilitas Keamanan

Beberapa konflik yang berlangsung pada 2023-2024 kemungkinan masih akan berlarut-larut atau telah bermetamorfosis, menciptakan ketidakpastian yang luas. Perang Rusia-Ukrainn Konflik ini akan terus menjadi penentu stabilitas keamanan Eropa, mempengaruhi aliansi seperti NATO, dan berdampak pada pasar energi dan pangan global. Ketegangan di Timur Tengah: Konflik Israel-Palestina dan ketegangan dengan Iran akan terus menjadi sumber instabilitas utama. dengan risiko eskalasi yang berdampak pada jalur pelayaran global dan harga energi. hotspot Lainnya: Ketegangan di kawasan seperti Laut China Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tetap berpotensi memicu krisis besar.

2.5.2 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

Isu strategis adalah permasalahan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah dan membutuhkan perhatian serta kebijakan khusus dalam dokumen perencanaan. Olehnya isu strategis umumnya berdampak luas terhadap masyarakat dan pembangunan daerah, bersifat lintas sektor atau multi urusan dan membutuhkan koordinasi antar pemangku kepentingan, memiliki urgensi tinggi untuk ditangani dalam periode perencanaan, sekaligus dapat diukur melalui indikator atau data yang tersedia

A. Ketidakstabilan Ekonomi Makro dan Global

Ketidakstabilan ekonomi makro dan global merupakan kondisi di mana variabel-variabel ekonomi utama (Produk Domestik Bruto, Tingkat Inflasi, TingkatPengangguran, Suku Bunga, Nilai Tukar Mata Uang, Neraca Pembayaran, danEkspektasi/perkiraan pelaku ekonomi tentang kondisi ekonomi di masa depan)mengalami fluktuasi yang signifikan dan sulit diprediksi, baik di tingkat nasionalmaupun internasional. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif yang luas bagiperekonomian, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatanpengangguran, inflasi yang tinggi, dan krisis keuangan.

Tingkat stabilitas ekonomi makro Sulawesi Selatan relatif rendah, terjadi karenaterbatasnya kapasitas fiskal daerah dan ketergantungan terhadap transfer kedaerah yang masih tinggi, rasio pajak daerah yang masih rendah, serta belumoptimalnya pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD),aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD)merupakan gambaran rendahnya kapasitas fiskal daerah. Kualitas belanja daerahmasih rendah, di mana rata-rata porsi belanja pegawai masih melampauiproporsi yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

B. Pemanfaatan Bonus Demografi

Sulawesi Selatan ke depan akan mengalami perubahan demografi yang cepat, dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2030. Dalam periode tersebut,

Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah dengan angkatan kerja yang banyak. Namun pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua (usia 65+ tahun) meningkat. Kondisi demografi tersebut memberi kesempatan yang terbuka untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif sebagai pendorong utama pembangunan dan memanfaatkan usia produktif secara efektif. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan apabila kualitas, produktivitas, dan inovasi usia produktif terus ditingkatkan mulai periode awal pembangunan jangka panjang ke depan. Proporsi demografi yang mengarah pada bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan berimplikasi pada tantangan untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam kewajiban perlindungan sosial, akselerasi pemenuhan hak anak, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan dan perlindungan lansia, tanpa mengabaikan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Transisi demografi sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, mulai dari meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi yang bermuara pada aglomerasi penduduk di perkotaan, transisi epidemiologi, pergeseran nilai yang berpotensi menurunkan kualitas ketahanan keluarga,rentannya perlindungan terhadap anak. Dibutuhkan intervensi dari hulu sampaihilir untuk mengoptimalkan bonus demografi agar dapat mencetak generasi digital dengan talenta dan daya saing global, namun tetap menjunjung nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat yang positif.

C. Pengelolaan Pusat-pusat Pertumbuhan

Kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di luar pulau jawa dan khususnya pada Kawasan Indonesia Timur (KIT) merupakan peluang besar bagi pembangunan dan kemajuan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan ditetapkannya sejumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai pusat pusat pertumbuhan baru akan melahirkan sejumlah peluang baru dan berkelanjutan bagi pembangunan Sulawesi Selatan dalam jangka panjang.

Perekonomian Sulawesi Selatan diharapkan akan semakin memainkan peran penting dalam akselerasi dan penguatan perekonomian nasional Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah ekonomi dan dengan dukungan iklim investasi yang ditandai dengan kemudahan investasi pada pengelolaan sumber daya alam, mulai dari hulu hingga hilir akan menempatkan Sulawesi Selatan sebagai daerah paling strategis dan siap untuk memanfaatkan segenap peluang yang tersedia. Percepatan realisasi pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) akan memberi peluang dan tantangan baru bagi Sulawesi Selatan dengan endowment factor dan letak geografisnya akan menjadi pusat pertumbuhan baru perekonomian nasional Indonesia. Perekonomian wilayah Sulawesi Selatan memiliki dua momentum penting yang harus dimanfaatkan guna menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah yang semakin inklusif. Pertama, momentum percepatan realisasi investasi pengelolaan sumber daya alam untuk hilirisasi industri. Kedua, momentum pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dan sejumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai pusat pertumbuhan baru, menempatkan Sulawesi Selatan yang secara geografis paling strategis untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, bukan hanya untuk IKN & KSN terkait, bahkan harus menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan wilayah, Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Pembangunan IKN, dan pengembangan KSN sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru, harus mampu dimanfaatkan oleh Sulawesi Selatan, bukan hanya lahirnya KSN yang sejenis di Sulawesi Selatan. Secara berkesinambungan dalam jangka panjang akan membuka peluang bagi seluruh daerah di Sulawesi Selatan untuk tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya unggulan daerah sebagai dampak backward and forward linkage dari pembangunan IKN dan pusat-pusat pertumbuhan KSN tersebut.

Selain itu, perlu dioptimalkan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan yang diarahkan pada peran kabupaten/kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, pusat pengolahan sumber daya alam; pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; serta pusat pengembangan jasa pariwisata, pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Perlu dioptimalkan pula pengembangan wilayah berdasarkan koridor pemerataan yang diarahkan pada fungsi kabupaten sebagai kawasan penyangga bagi pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan meliputi poros pengembangan Selatan- Selatan, Poros pengembangan Selatan – Bagian Tengah, Poros pengembangan Selatan – Utara, Poros pengembangan Utara – Utara, dan Poros Pengembangan Utara – bagian Tengah, menjadi tantangan sekaligus peluang tumbuhnya pusat- pusat pertumbuhan yang lebih merata di Sulawesi Selatan.

Poros pengembangan Utara – Utara yang menghubungkan Kawasan Parepare sebagai dengan Kawasan Palopo, sebagai pusat pertumbuhan nasional yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Selat Makassar dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, perikanan, pertambangan, agro dan mina industri serta minyak dan gas bumi. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Parepare dan Kawasan Strategis Nasional Sorowako serta KSN Toraja yang juga berperan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja sekaligus bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar Toraja; dan Poros Pengembangan Utara – bagian Tengah yang menghubungkan Kawasan Palopo sebagai pusat pertumbuhan dengan Kawasan Watampone, sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata, serta agro dan mina industri.

D. Kontribusi Sulawesi Selatan Sebagai Lumbung Pangan Nasional

Fokus pemenuhan pangan nasional, Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produk pangan nasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya swasembada pangan nasional. Dalam sistem logistik nasional, pemenuhan

kebutuhan pangan yang menjangkau seluruh wilayah mendorong penggunaan sistem transportasi dan pergudangan akan sangat penting untuk mendekatkan daerah-daerah penghasil pangan dengan pusat- pusat konsumsi pangan. Menghubungkan pusat-pusat produksi pangan tertentu di Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk cepat terjangkau pada wilayah lainnya, misalnya pada Kawasan Barat Indonesia (KBI). Dalam konteks ini, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis, selain sebagai daerah penghasil utama pangan nasional, juga menjadi penghubung dan lalu lintas utama transportasi logistik yang menjangkau semua wilayah di Indonesia. Artinya, secara geografis dan substansial Sulawesi Selatan sangat strategis dan penting dalam pengembangan wilayah di Indonesia, sebagai pintu gerbang utama Indonesia di Kawasan Timur serta penghubung dan lalu lintas utama pelayaran dan penerbangan antara KTI dan KBI, ada begitu banyak potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan sehingga Sulawesi Selatan tidak hanya berkontribusi secara nasional, tetapi juga mampu mendorong kemajuan wilayahnya untuk terciptanya masyarakat Sulawesi Selatan yang sejahtera.

Meningkatnya kebutuhan pangan sebagai dampak pertumbuhan penduduk menjadi tantangan Sulawesi Selatan dalam menguatkan ketahanan pangan daerah. Selain itu kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana yg dapat merusak lahan pertanian serta tingginya alih fungsi lahan pertanian, yang diperparah dengan menurunnya kualitas dan produktifitas lahan, serta infrastruktur pertanian yang kurang memadai, juga berdampak terhadap terbatasnya ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang bergizi dan berkualitas di masyarakat. Posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional yang perlu dikuatkan ditunjukkan oleh kondisi Indeks Ketahanan Pangan Provinsi di tahun 2024, masih berada di urutan ke 4 dengan IKP tertinggi dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dengan nilai 83,82 persen dibawah Provinsi Bali (88,23), Provinsi Jawa Tengah (85,34), dan DKI Jakarta (85,13). Selain itu, jumlah petani skala kecil di Sulawesi Selatan mencapai 556.446 unit atau 53,35 persen dari total petani yang ada atau dari 100 petani 53 diantaranya petani skala keci, Sulsel peringkat ke 28 dalam jumlah petani skala kecil terbesar di Indonesia.

Selain ketahanan pangan, posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan seyogyanya memberi dampak positif terhadap penurunan prevalensi ketidakcukupan pangan yang mencerminkan rendahnya akses yang memadai terhadap pangan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar penduduk. Namun faktanya, Sulawesi Selatan hanya menempati peringkat ke 10 provinsi dengan PoU terendah. Distribusi pangan yang tidak merata di Sulawesi Selatan merupakan salah satu tantangan besar dalam memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Masalah utama yang menyebabkan ketidakmerataan ini adalah infrastruktur yang kurang memadai, rantai pasok yang masih kompleks, serta kurangnya koordinasi antara daerah yang berdampak pada fluktuasi harga pangan, dan pada akhirnya mempengaruhi pola konsumsi pangan terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam konteks pembangunan ke depan, perlu diperhatikan upaya peningkatan akses terhadap sarana pangan, terutama di daerah kepulauan dan wilayah sulit akses. Selain itu, dibutuhkan pula upaya untuk mengoptimalkan diversifikasi pangan dan meningkatkan literasi gizi masyarakat, agar masyarakat lebih menyadari pentingnya mengonsumsi beragam jenis pangan yang lebih bergizi dan menyehatkan. Perubahan iklim dan kejadian bencana yang mempengaruhi ketahanan pangan di Sulawesi Selatan, perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan dan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi sumber pangan lokal. Olehnya itu, penting untuk meningkatkan pendampingan dan pendidikan petani tentang pertanian berkelanjutan dan menjaga produktifitas lahan yang ramah lingkungan.

E. Hilirisasi Sumber Daya Alam

Hilirisasi sumber daya alam merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan sumber daya alam dalam suatu industri manufaktur dan mewujudkan rantai nilai yang berkeadilan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam beragam dan tersebar pada seluruh wilayah. Sumber daya alam tersebut berasal dari sektor unggulan pertanian, perkebunan, pe`rikanan, peternakan, pertambangan dan energi terbarukan. Ketersediaan sumber daya alam serta posisi kuat Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Indonesia Timur dan sebagai wilayah penyangga IKN dapat menjadi modal utama untuk menjamin/menjaga pertumbuhan ekonomi yang kondusif dalam jangka panjang.Potensi sumber daya alam yang tersedia dapat menjadikan Sulawesi Selatan sebagai tujuan investasi yang potensial terutama dalam hilirisasi sumber daya alam dan komoditas unggulan. Kondisi tersebut memberikan tantangan terhadap penyediaan infrastruktur, penyediaan sumber daya manusia dan kemudahan investasi dalam mendorong hilirisasi serta dukungan pembinaan/permodalan bagi pengembangan hilirisasi oleh industri pengolahan kecil ditingkat masyarakat, koperasi dan UMKM. Sumber daya alam Sulawesi Selatan yang beragam merupakan potensi besar yang dapat memberikan multiplayer effect melalui hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah (added value) sehingga mendorong peningkatan pendapatan dan menciptakan sumber penghidupan baru bagi masyarakat.

F. Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal

Kelembagaan adalah aturan main di dalam suatu tujuan bersama yang dianggap penting secara jangka panjang, baik melalui suatu aransemen organisasi maupun tanpa adanya struktur organisasi. Salah satu tantangan kelembagaan dalam pembangunan adalah bagaimana mewujudkan prinsip kepemerintahan yang baik yakni efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan ketaatan hukum sebagai perilaku terpola di kalangan ASN. Dalam konteks ini, struktur birokrasi perlu semakin mendorong pelembagaan prinsip-prinsip tersebut sehingga penyelenggaraan pelayan publik semakin memuaskan masyarakat. Selain itu, penguatan masyarakat sipil diperlukan agar partisipasi mereka dalam program pemerintah semakin signifikan serta dapat mendorong keberdayaan masyarakat secara umum untuk pemecahan masalah dalam lokalitasnya.

Tantangan lain adalah kemandirian fiskal. Sebagian besar pembiayaan untuk pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat masih bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Karena itu, aktivitas perekonomian daerah harus semakin didorong melalui *autonomous investment* maupun *induced investment* sehingga sumber pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi dapat dimaksimalkan. Selain itu, pemanfaatan anggaran belanja daerah perlu dikelola dengan baik sehingga lebih efektif dalam menstimulasi perekonomian daerah serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai kebutuhan belanjanya. Kapasitas fiskal ini mencerminkan kekuatan dan kesehatan keuangan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan mengelola sumber daya keuangannya, yang dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan, besaran belanja yang harus ditanggung, tingkat utang, dan kondisi ekonomi secara umum, baik di tingkat nasional maupun regional.

Ketidakstabilan ekonomi makro didorong oleh faktor fiskal dan moneter, baik oleh salah faktor ataupun kedua-duanya secara simultan. Meskipun demikian dalam konteks pembangunan daerah, ketidakstabilan ekonomi makro akan lebih dominan faktor dari sisi fiskal, karena dari perspektif itulah pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi secara langsung. Pada aspek fiskal, stabilitas ekonomi makro Sulawesi Selatan yang rendah terjadi karena terbatasnya kapasitas fiskal daerah dan ketergantungan terhadap transfer ke daerah yang masih tinggi, rasio pajak daerah yang masih rendah, serta belum optimalnya pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD) merupakan gambaran rendahnya kapasitas fiskal daerah. Kualitas belanja daerah juga masih rendah, di mana rata-rata porsi belanja pegawai masih melampaui proporsi yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, inflasi yang belum terkendali, krisis lapangan pekerjaan, krisis utang, belum optimalnya peningkatan kontribusi pajak daerah, dan keterbatasan digitalisasi hampir pada semua sektor juga mempengaruhi stabilitas ekonomi makro dan kapasitas fiskal Sulawesi Selatan.

G. Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Ekosistem Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan (AI)

Perkembangan teknologi telah mengubah hal-hal fundamental kehidupan manusia pada berbagai bidang. Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial inteligent/AI) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Namun, inovasi digital juga berisiko menimbulkan disrupsi serta memunculkan tantangan baru bagi pihak-pihak yang tidak siap. Disrupsi teknologi dan transformasi digital tersebut akan membawa peluang sekaligus ancaman dalam pembangunan jangka panjang daerah ke depan. Dalam perekonomian, perkembangan teknologi mendorong berkembangnya pertanian presisi berbasis drone dan satelit untuk pemetaan lahan, aplikasi mobil untuk akses informasi cuaca dan harga komoditi, ataupun perkembangan e- commerce produk pertanian. Perkembangan yang dipengaruhi teknologi digital seperti itu akan berlaku pada industri manufaktur, dunia perbankan, layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Transformasi digital merupakan peluang bagi individu dan kelompok masyarakat yang cepat beradaptasi dengannya, sebaliknya akan menjadi ancaman bagi individu ataupun kelompok yang tidak bisa mengakses dan memanfaatkannya. Diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan bagi kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dan pada saat yang sama mengoptimalkan tantang dan peluang dalam mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih besar dari transformasi digital yang sedang dan terus berlangsung.

H. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Dukungan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan terhadap kebijakan nasional dan tuntutan peningkatan nilai tambah ekonomi bukan hanya sekedar pada ketersediaan SDA, tetapi juga penyiapan daya dukung sumber daya manusia serta sarana prasarana dan infrastruktur wilayahnya. Sulawesi Selatan sejatinya mengambil peran sebagai pusat pengembangan SDM Indonesia dalam mendukung hilirisasi/pembangunan ekonomi. Pengembangan SDM menjadi fokus perhatian pada setiap daerah dengan berbasis pada pemenuhan kompetensi sesuai dengan potensi SDA yang akan dikelola pada setiap daerah. Pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM untuk pengembangan IPTEKIN harus sejalan dengan potensi SDA yang dimiliki setiap daerah di Sulawesi Selatan. Diperlukan kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan pemerataan hingga daerah 3T, perbaikan gizi masyarakat berbasis siklus hidup, pemenuhan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga, perlindungan perempuan dan anak termasuk disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

I. Daya Dukung Daya Tampung dan Kerusakan Lingkungan

Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup salah satunya akibat luasan tutupan hutan yang terus menurun. Hal ini diindikasikan dengan menurunnya distribusi jasa lingkungan antara lain jasa lingkungan penyediaan air, jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana longsor dan banjir serta jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati.

Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis, jasa lingkungan penyediaan air di Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk kategori kelas rendah (sangat rendah- rendah) telah meliputi 65,32% dari total luas wilayah. Untuk jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana longsor untuk kategori kelas rendah seluas 35,32% dari total luas wilayah Sulawesi Selatan dengan sebaran kategori rendah terluas adalah Kabupaten Luwu Timur yaitu

sekitar 4,89% dari seluruh luasan wilayah kabupatennya. Untuk jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir untuk kategori rendah (rendah-sangat rendah) seluas 67,1% dari total luas wilayah Sulawesi Selatan dengan sebaran terutama di kabupaten Bone, Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara dan Wajo. Jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati dengan kategori kelas rendah (rendah-sangat rendah) sebarannya mencakup 60,98% dari total luas wilayah Sulawesi Selatan. Kondisi ini menunjukkan jika kemampuan daya dukung untuk jasa-jasa lingkungan tersebut telah membutuhkan upaya-upaya perbaikan sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya dukungnya.

Untuk daya dukung air, beberapa wilayah kabupaten/kota telah menunjukkan angka negatif yang berarti kebutuhan air di wilayah tersebut lebih tinggi dari ketersediaannya. Walaupun ada juga kabupaten yang memiliki ketersediaan air melimpah. Dari hasil analisis hingga tahun 2029, kabupaten yang tingkat kebutuhan airnya lebih tinggi dari ketersediaannya antara lain adalah Kota Makassar, Parepare dan Palopo serta Kabupaten Wajo, Soppeng dan Sidenreng Rappang. Data ini menunjukkan bahwa di tahun 2029, tiga kota dan beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tidak mampu memenuhi kebutuhan air (domestik dan lahan) atau telah melewati ambang batas. Untuk itu isu terkait daya dukung lingkungan terutama daya dukung air memerlukan perhatian yang serius dan menjadi prioritas. Terutama karena wilayah-wilayah tersebut sebagian besar merupakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memiliki jumlah penduduk terbesar.

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Selatan juga ditandai dengan menurunnya daya tampung yang diindikasikan tingginya timbulan sampah dan tinja. Tingginya timbulan sampah disebabkan oleh masih rendahnya pemilahan sampah dari sumber, belum seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah, serta belum terpadunya pengelolaan sampah. Sementara timbulan tinja disebabkan belum optimalnya eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) melalui perubahan perilaku masyarakat; belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; dan belum optimalnya pemenuhan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), khususnya di wilayah perkotaan. Kondisi ini merupakan tantangan yang tidak ringan, dan harus menjadi prioritas untuk diatasi dalam pembangunan jangka panjang seluruh daerah di Sulawesi Selatan.

J. Perubahan Iklim dan Risiko Bencana

Saat ini dunia sedang menghadapi ancaman global yang dikenal dengan Triple Planetary Crisis yaitu perubahan iklim, berkurangnya *biodiversity* serta penumpukan limbah dan polusi. Perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan sudah menjadi perhatian serius hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia. Dampak perubahan iklim seperti, cuaca ekstrem, kenaikan suhu dan permukaan laut, meningkatnya kejadian kekeringan dan banjir, meningkatnya kegagalan panen dan bencana kelaparan serta meningkatnya risiko penyakit.

Indonesia termasuk Sulawesi Selatan juga terdampak secara nyata dan signifikan pada kehidupan masyarakat. Dampak perubahan iklim dapat mengancam posisi Sulawesi Selatan sebagai sentra produksi pangan dan mengganggu suplai pangan baik skala domestik, regional dan internasional. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, abrasi pantai dan bencana hidrometeorologi lainnya juga meningkatkan kerentanan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan iklim memberikan dampak yang signifikan pula terhadap sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Dampak ini dapat bersifat langsung, seperti kenaikan suhu air laut dan perubahan pola arus, maupun tidak langsung, seperti peningkatan frekuensi badai dan degradasi ekosistem pesisir.

Perubahan iklim juga mendorong peningkatan kasus penyakit yang ditularkan oleh vector melalui air dan peningkatan suhu sehingga diperlukan langkah preventif dari pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan dampak dan risiko tersebut. Oleh karena itu penguatan kapasitas pada level lokal/komunitas, kabupa`ten/kota dan provinsi dalam beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan lainnya yang inklusif merupakan keniscayaan.

2.5.3 Isu Strategis Kota Palopo

Sesuai Permendagri 86/2017, perumusan isu strategis didasarkan pada evaluasi pembangunan, permasalahan daerah, kebijakan nasional dan provinsi, serta tren global yang relevan. Penyusunannya berbasis data, dan berdampak luas dan memiliki urgensi tinggi agar menjadi fokus dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk RKPD. Berikut adalah isu strategis Kota Palopo Tahun 2026 :

- **Tata Kelola Fiskal dan Peningkatan Layanan Publik**

Dua isu strategis utama dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Palopo adalah rendahnya kemandirian fiskal yang masih bergantung pada dana transfer pusat serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan belanja daerah. Untuk itu, diperlukan strategi peningkatan PAD, optimalisasi struktur belanja, serta penguatan perencanaan berbasis kinerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

1) Kemandirian Fiskal yang Rendah dan Ketergantungan pada Transfer Pusat

Realisasi pendapatan Kota Palopo Tahun 2023 sebesar 927.78 Milyar dengan kontribusi utama dari dana transfer pemerintah pusat. Sementara itu, belanja daerah mencapai 927.78 Milyar dengan proporsi terbesar dialokasikan untuk belanja operasi sebesar 745.22 Milyar (80,32% dari total belanja). Pada tahun 2024, realisasi

pendapatan daerah mengalami stagnasi dengan nilai 927.62 Milyar. Namun, belanja daerah tetap tinggi dengan proporsi belanja pegawai mencapai 475.63 Milyar (51,28% dari total belanja) dan belanja barang dan jasa 305.74 Milyar (32,96%). Hal ini menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk belanja pembangunan masih terbatas akibat tingginya belanja rutin.

Dampak Strategis:
Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer menghambat fleksibilitas daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang mandiri. Keterbatasan PAD menyebabkan rendahnya kemampuan daerah dalam mendanai program strategis yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat. Rasio belanja pegawai yang tinggi mengurangi proporsi belanja modal yang hanya mencapai 100.24 Milyar (10,81% dari total belanja) pada tahun 2024, sehingga berdampak pada terbatasnya investasi dalam infrastruktur dan layanan publik yang lebih produktif. Meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui diversifikasi sumber pendapatan, seperti pajak daerah, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah, melakukan efisiensi belanja pegawai dan meningkatkan efektivitas program berbasis hasil (performance-based budgeting) dan meningkatkan porsi belanja modal untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menjadi hal utama yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Palopo ppada tahun 2026, agar kondisi fiskal dan ekonomi Kota Palopo lebih baik lagi.

2) Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Belanja Daerah

Sesuai struktur belanja Kota Palopo menunjukkan bahwa belanja operasi masih mendominasi alokasi anggaran dengan kenaikan dari 745.22 Milyar pada tahun 2023 menjadi Rp. 827.38 Milyar pada tahun 2024 (naik 11,03%). Namun, belanja modal mengalami penurunan drastis dari 182.55 Milyar pada tahun 2023 menjadi Rp. 100.24 Milyar pada tahun 2024 (turun 45,07%). Hal ini menandakan bahwa kapasitas belanja daerah dalam mendukung investasi pembangunan semakin berkurang.

Dampak Strategis:

Penurunan belanja modal dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah akibat minimnya investasi pada infrastruktur yang produktif. Tingginya belanja hibah yang meningkat dari 11.73 Milyar pada 2023 menjadi Rp. 44.96 Milyar pada 2024 berpotensi menekan alokasi anggaran bagi sektor prioritas lainnya. Ketidakseimbangan struktur belanja antara belanja rutin dan belanja produktif berisiko mengurangi efektivitas pembangunan jangka menengah dan panjang. Pemerintah Kota Palopo perlu meningkatkan efisiensi belanja melalui evaluasi program berbasis kinerja dan rasionalisasi belanja operasional yang tidak berdampak langsung pada masyarakat dan tujuan serta sasaran pembangunan Kota Palopo, memperbesar porsi belanja modal dengan mengarahkan anggaran untuk proyek strategis yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah serta mengoptimalkan penggunaan belanja hibah dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terukur.

Pada aspek layanan dan kualitasnya, digitalisasi menjadi salah satu strategi utama di Kota Palopo untuk memastikan aksesibilitas dan efisiensi layanan pemerintah kepada masyarakat. Dengan anggaran belanja operasi yang terus meningkat, termasuk belanja pegawai yang mencapai 475,63 miliar pada 2024, perlu dilakukan reformasi dalam pola pelayanan dengan mengadopsi teknologi digital. Digitalisasi layanan publik mencakup pengembangan platform pelayanan berbasis elektronik, penerapan sistem informasi keuangan dan perencanaan daerah yang terintegrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam penggunaan teknologi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses layanan, serta mengurangi biaya operasional jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

7) **Layanan Dasar, Kualitas Hidup, dan Kesejahteraan Masyarakat**

Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kota Palopo masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam akses layanan dasar, kualitas pendidikan dan ketenagakerjaan, kesehatan masyarakat dan ketahanan gizi, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Data menunjukkan beberapa tren yang perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Pada aspek ekonomi dan kemiskinan, Pertumbuhan PDRB mengalami tren fluktuatif, dari 5,41% (2021) naik ke 5,83% (2022), namun turun menjadi 4,34% (2023) dan 4,4% (2024). PDRB per kapita meningkat dari 46,52 juta (2021) menjadi 56,65 juta (2024) tapi masih jauh dibawah rata rata sulsel dan nasional. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 8,14% (2021) menjadi 7,35% (2024), namun masih memerlukan upaya pengurangan yang lebih signifikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami perbaikan dari 8,83% (2021) menjadi 7,64% (2024), namun lebih tinggi daraipada sulsel dan nasional. Produktivitas Total Daerah sempat turun signifikan dari 102,6 ribu/tenaga kerja (2021) menjadi 72,3 ribu/tenaga kerja (2022) dan mulai meningkat kembali ke 74,1 ribu/tenaga kerja (2024), menunjukkan perlunya strategi peningkatan daya saing tenaga kerja.

Indeks Pendidikan menunjukkan tren peningkatan dari 78,38 (2021) menjadi 79,10 (2023), meskipun masih terdapat tantangan dalam peningkatan mutu pendidikan. Angka Melek Huruf tetap stabil di atas 97%, namun mengalami sedikit penurunan pada 2022. Angka Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 10,94 tahun (2021) menjadi 11,16 tahun (2024), tetapi masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar nasional. Sementara angka Harapan Lama Sekolah bertahan di angka 15,09 tahun (2021) hingga 15,13 tahun (2024).

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B sempat turun dari 89,43% (2021) menjadi 82,89% (2023), namun naik kembali ke 87,37% (2024), yang menunjukkan adanya tantangan dalam akses pendidikan menengah. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B juga menunjukkan tren penurunan dari 80,37% (2021) menjadi 77,03% (2024), menandakan perlunya intervensi untuk meningkatkan angka kelulusan dan pencegahan putus sekolah. Meski

demikian Indeks Kesehatan meningkat dari 78,34 (2021) menjadi 83,37 (2024), mencerminkan perbaikan layanan kesehatan. Angka Harapan Hidup meningkat dari 70,92 tahun (2021) menjadi 74,19 tahun (2024), menunjukkan keberhasilan layanan kesehatan dasar namun tetap memerlukan penguatan layanan preventif dan kuratif.

Pada aspek air minum, layanan akses air minum layak di Kota Palopo meningkat dari 80,02% (2020) menjadi 85,11% (2024), tetapi masih ada gap sekitar 15% masyarakat yang belum terlayani dengan baik. Akses air minum aman stagnan di 76,59% (2024), menunjukkan perlunya peningkatan kualitas layanan. Sanitasi layak meningkat dari 83,63% (2020) menjadi 84,85% (2024), tetapi masih perlu percepatan dalam penyediaan fasilitas sanitasi dan pengolahan limbah domestik untuk mendukung lingkungan yang sehat dan produktif. Untuk aspek rumah layak huni, persentase rumah layak huni meningkat dari 92,75% (2020) menjadi 93,26% (2024), tetapi sekitar 7% rumah tangga masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Tetapi backlog kepemilikan perumahan masih tinggi dengan 7.807 unit pada 2024, menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki hunian tetap.

Isu layanan dasar, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat Kota Palopo ini akan berdampak pada ketimpangan akses layanan pendidikan dan kesehatan, kesenjangan kesejahteraan sosial antara kelompok masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif akibat rendahnya daya saing tenaga kerja. Kemudian pada akhirnya tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang dapat berujung pada permasalahan sosial lainnya.

Olehnya isu layanan dasar, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan Kota Palopo. Dengan kondisi indikator yang menunjukkan progres positif namun masih menghadapi beberapa tantangan, diperlukan intervensi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

8) **Infrastruktur Produktif, Stabilitas Ekonomi, dan Peningkatan Investasi**

Pembangunan infrastruktur produktif menjadi kunci dalam meningkatkan konektivitas ekonomi dan stabilitas sosial. Penguatan sektor ekonomi berbasis teknologi serta digitalisasi UMKM akan memperkuat daya saing daerah dalam menarik investasi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kota Palopo. Intervensi kebijakan yang lebih baik dan terarah dalam pemanfaatan infrastruktur strategis, percepatan digitalisasi, dan penguatan sektor ekonomi potensial menjadi prioritas utama untuk mewujudkan Kota Palopo sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi regional. Kota Palopo sebagai kota niaga dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Selatan menghadapi tantangan dalam pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan daya saing investasi dan kemudahan berusaha menjadi kunci dalam menarik investasi baru serta memperkuat sektor ekonomi potensial. Selain itu, akselerasi digitalisasi bagi pelaku UMKM perlu didorong agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan lanskap ekonomi global.

Salah satu spek masalah sekaligus tantangan dalam mendukung konetifitas ekonomi di Kota Palopo adalah kualitas Infrastruktur Dasar. Panjang jalan kota mengalami fluktuasi dari 310,83 km (2020) menjadi 268,699 km (2024), dengan kondisi jalan mantap relatif stagnan di 54,85% pada 2024. Masih terdapat 15,665 km jalan dalam kondisi rusak ringan dan 14,392 km dalam kondisi rusak berat pada 2024, yang berpotensi menghambat distribusi barang dan mobilitas ekonomi. Kualitas jaringan irigasi juga mengalami penurunan, di mana irigasi dalam kondisi baik menurun dari 57,07% (2020) menjadi 47,10% (2024), yang dapat mempengaruhi produktivitas sektor pertanian sebagai sektor basic daerah.

Aspek daya saing investasi dan iklim usaha masih perlu terus diperkuat, dimana infrastruktur produktif yang belum optimal harus dapat diakselerasi, sehingga bisa mencegah biaya logistik dan operasional usaha yang lebih tinggi di Kota Palopo. Hal penting lainnya dalam isu ini adalah kebijakan investasi harus lebih agresif dalam menarik investor baru, pengembangan kemitraan bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jaringan bisnis, dan menguatkan akses UMKM terhadap platform digital untuk mampu meningkatkan daya saing dan jangkauan pasar. Olehnya arah kebijakan pembangunan pada aspek ini adalah pembangunan Infrastruktur yang mendukung konektivitas dan aksesibilitas ekonomi, kemudian upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan untuk mengurangi persentase jalan rusak dan meningkatkan konektivitas antarwilayah ekonomi harus diperkuat, upaya optimalisasi infrastruktur irigasi guna mendukung ketahanan pangan dan sektor pertanian sebagai sektor basis ekonomi daerah. Untuk meningkatkan Daya Saing Iklim Usaha, regulasi dan perizinan investasi di Kota Palopo harus menyakinkan dan mampu untuk menarik lebih banyak investor. Termasuk menangani sejumlah spot pusat ekonomi dan mengembangkan kemitraan strategis antara sektor publik dan swasta guna meningkatkan nilai tambah produk daerah.

Revitalisasi sektor-sektor potensial daerah, termasuk sektor pertanian, perdagangan, dan jasa berbasis teknoligiyang lebih baik, pengembangan Industri Berbasis Teknologi dan Ekonomi Kreatif dan penguatan upaya inovasi dan teknologi dalam sektor industri untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing dalah sejumlah upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kota Palopo melalui sejumlah perangkat daerah terkait. Termasuk menguatkan dukungan bagi peningkatan dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif, termasuk industri digital, seni, dan budaya, peningkatan peran pendidikan dan pelatihan vokasi dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif dan adaptif terhadap perkembangan industri. Dan menguatkan upaya fasilitasi UMKM dalam mengakses pasar digital melalui *platform e-comm*erce dan *marketplace*.

9) **Ketahanan Pangan, Energi, dan Lingkungan**

Ketahanan pangan, energi, dan lingkungan di Kota Palopo menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama dalam pengelolaan sampah, pemanfaatan energi, serta mitigasi bencana. Data pengelolaan sampah menunjukkan masih banyaknya sampah yang belum tertangani dengan baik, sehingga perlu ada peningkatan strategi berbasis keberlanjutan. Dengan implementasi kebijakan yang tepat, Kota Palopo dapat meningkatkan ketahanan pangan,

mengurangi dampak lingkungan, serta mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang. Berdasarkan data pengelolaan sampah Kota Palopo Tahun 2023, terdapat 34.833,23 ton/tahun timbulan sampah, di mana 22,72% (7.913,98 ton/tahun) belum terkelola dengan baik. Sementara itu, hanya 8,27% (2.880,35 ton/tahun) sampah yang berhasil dikurangi melalui pembatasan timbulan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang. Hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan lebih kuat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Dari sisi energi, pemanfaatan sumber daya yang efisien menjadi tantangan tersendiri. Penggunaan energi terbarukan masih sangat terbatas, sementara kebutuhan air bersih dan energi terus meningkat. Selain itu, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan perlu diperkuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dan mengendalikan potensi inflasi akibat distribusi logistik yang tidak optimal. Pada aspek ketahanan pangan, sesuai ata Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dalam 3 tahun terakhir, 2022- 2024, terlihat bahwa IKP Kota Palopo masih berada di bawah rata-rata provinsi dan daerah lainnya, yang mengindikasikan potensi permasalahan dalam aspek ketahanan pangan. Pada tahun 2022, Palopo memiliki IKP terendah (73,41) dibandingkan Sulsel (81,38), Makassar (83,86), dan Parepare (79,1). Meskipun mengalami peningkatan signifikan pada 2023 menjadi 82,93, angka ini masih lebih rendah dibandingkan provinsi dan daerah lainnya, serta hanya mengalami kenaikan 0,12 poin di 2024 (83,05), menunjukkan stagnasi dalam peningkatan ketahanan pangan.

Sebagai perbandingan, Makassar mengalami lonjakan IKP yang sangat signifikan, dari 83,86 (2022) menjadi 97,95 (2024), sedangkan Sulsel dan Parepare relatif stabil di angka 83-an. Tren ini menunjukkan bahwa Palopo masih memiliki tantangan dalam ketahanan pangan, terutama dalam menjaga stabilitas produksi pangan, aksesibilitas, serta distribusi bahan pangan bagi masyarakat. Kondisi ini berbandinhg terbalik dengan pertumbuhan penduduk yang membutuhkan pangan, justru semakin meningkat. Jika tren stagnasi ini berlanjut, maka Palopo dapat mengalami risiko kerentanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Sulsel, sehingga diperlukan intervensi yang lebih kuat dalam kebijakan ketahanan pangan daerah. Dalam konteks ketahanan pangan, nilai IKP yang masih relatif rendah dan stagnan di Kota Palopo mencerminkan tantangan dalam tiga aspek utama: ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan.

Beberapa persoalan utama dalam isu strategis ini adalah, pada aspek pangan, produksi lokal yang masih terbatas, menyebabkan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Sehingga Palopo penting dan cocok dengan pengembangan pertanian berkonsep urban farming dan peningkatan efisiensi produksi pertanian. Termasuk di dalamnya kebijakan pengawasan distribusi dan konsumsi logistik daerah untuk mengurangi dampak inflasi pada komoditas strategis. Ancaman lain dalam isu ini adalah degradasi lingkungan dan perubahan iklim, dan perubahan tata guna lahan yang berkontribusi terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Ketahanan terhadap Bencana dan Krisis Lingkungan adalah aspek lain dalam isu ini dimana kapasitas mitigasi bencana Kota Palopo masih sangat perlu diperkuat, terutama dalam respons cepat terhadap bencana ekologis.

10) **Ketahanan Sosial Masyarakat**

Ketahanan sosial masyarakat Kota Palopo menjadi aspek krusial dalam pembangunan daerah, pasca menghadapi dinamika politik dan merespon dinamika sosial, ekonomi, kota yang semakin kompleks. Kota Palopo menghadapi berbagai tantangan dalam aspek ketahanan sosial, termasuk peningkatan jumlah konflik sosial, ketimpangan akses layanan dan ekonomi bagi kelompok marginal, serta melemahnya modal sosial akibat polarisasi politik. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memperkuat pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta penguatan solidaritas sosial berbasis kearifan lokal. Jumlah konflik di Kota Palopo mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2023 dengan 189 kasus, dibandingkan dengan hanya 2 kasus pada tahun 2021 dan 2022. Meski demikian, penanganan konflik sosial menunjukkan tren positif, meningkat dari 80% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah konflik meningkat, respons pemerintah dalam menangani konflik juga semakin baik. Namun, adanya lonjakan jumlah konflik ini perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama terkait dengan faktor pemicunya, apakah berasal dari ketegangan sosial, dinamika politik, atau faktor ekonomi yang mempengaruhi stabilitas sosial.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan tren yang cukup baik. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu meningkat pada tahun 2023 hingga 75,8%. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila, dan kewaspadaan terhadap potensi konflik juga mengalami peningkatan, mencapai 92% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan efektivitas berbagai program sosialisasi dan peningkatan kesadaran politik yang dijalankan. Meski demikian, keterwakilan perempuan dalam politik masih perlu diperkuat, dengan persentase perempuan dalam kepengurusan partai yang masih stagnan di angka 38-39% dalam kurun waktu 2022-2024. Ke depan, perlu ada kebijakan afirmatif yang lebih kuat untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Pada aspek kesetaraan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Palopo mengalami sedikit peningkatan dari 97,58 (2022) menjadi 97,61 (2023), menandakan bahwa kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan semakin menipis. Namun, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) justru mengalami penurunan dari 79,1 menjadi 78,19, menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan masih melemah. Meski Indeks Ketimpangan Gender (IKG) membaik dari 0,289 (2022) ke 0,273 (2023), angka ini masih menunjukkan ketimpangan akses terhadap `pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, terutama bagi kelompok perempuan kepala keluarga, difabel, dan masyarakat miskin perkotaan.

Kota Palopo nampaknya menghadapi tantangan dalam mengatasi polarisasi sosial dan meningkatkan partisipasi kelompok rentan dalam ekonomi produktif. Meski tren perbaikan ada, stagnasi IDG dan masih tingginya angka IKG mengindikasikan bahwa aspek pemberdayaan belum sejalan dengan peningkatan akses dasar. Untuk itu, perlu strategi

yang lebih agresif dalam menciptakan peluang ekonomi yang inklusif serta memperkuat modal sosial berbasis gotong royong dan kearifan lokal. Olehnya pemerintah Kota Palopo penting untuk menguatkan upaya peningkatan program pemberdayaan masyarakat berbasis inklusi dan kesetaraan, fokus pada peningkatan IDG agar perempuan memiliki akses yang lebih besar dalam perekonomian dan pengambilan keputusan, memperkuat kapasitas perempuan dan pemuda dalam kewirausahaan dan sektor produktif lainnya, penguatan budaya gotong royong dan kearifan lokal dalam membangun ketahanan sosial, mengembangkan program berbasis komunitas untuk memperkuat kohesi sosial, menangkal dampak polarisasi politik dan konflik sosial melalui pendekatan berbasis nilai budaya dan agama.

Upaya lain adalah penguatan kebijakan perlindungan sosial yang adaptif terhadap kelompok rentan dengan memperluas akses layanan sosial dan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga, pemuda, dan kelompok marjinal, meningkatkan skema perlindungan sosial yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi, meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam aktivitas pembangunan daerah, mendorong partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan ekonomi, terutama di sektor UMKM dan kepemimpinan daerah, mendorong keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan strategis. Ketahanan sosial di Kota Palopo akan diupayakan penanganannya melalui pendekatan berbasis pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta penguatan modal sosial berbasis kearifan lokal.

2.6 INOVASI DAERAH

2.6.1 Riset yang Dilakukan pada Tahun 2024

Riset adalah proses kegiatan sistematis, kritis, dan ilmiah untuk menyelidiki atau mempelajari sesuatu guna memperoleh pengetahuan baru, memecahkan masalah, atau memprediksi fenomena. Istilah ini juga sering disebut sebagai penelitian atau *research*, dan dapat dilakukan oleh individu maupun lembaga dalam berbagai bidang, baik akademis maupun bisnis, dengan tujuan tertentu seperti pengembangan ilmu pengetahuan, pemahaman konsumen, atau peningkatan kualitas produk. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pemerintah Kota Palopo melaksanakan riset dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan perguruan tinggi. Riset yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan. Berikut riset yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo pada Tahun 2024.

Tabel 2.138
Riset yang Dilakukan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2024

No	Judul	Pelaksana
1	Pengentasan Kemiskinan Ekstrem melalui Program Ketahanan Pangan dan Kegiatan Padat Karya di Kota Palopo	Bappelitbangda Kota Palopo kerjasama dengan LP2M IAIN Palopo

Sumber : Badan Penelitian dan Penngembangan Daerah Kota Palopo, 2025.

Hasil riset yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang berorientasi pada strategi perencanaan yang efektif dan adaptif, mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti penggunaan sumber daya alam yang bijaksana, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial, demi tercapainya keseimbangan antara kebutuhan masa kini dan generasi mendatang.

2.6.2 Data Inovasi yang Diterapkan di Tahun 2023

Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Defenisi tersebut sebagaimana disebutkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Inovasi daerah mencakup gagasan baru, metode, atau solusi yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dan Manfaat Inovasi Daerah:

- Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah:
  Inovasi bertujuan untuk membuat penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih efisien dan efektif.
- Mewujudkan *Good Governance*:
  Inovasi daerah berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
- Mempercepat Reformasi Birokrasi:
  Inovasi menjadi langkah untuk menyelaraskan dan mensinkronkan birokrasi dalam melayani masyarakat.
- Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat:
  Inovasi daerah dapat menjadi alat efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Mendorong Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat:

Inovasi dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses-proses inovasi yang dilakukan pemerintah daerah.

Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan praktik-praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, melalui fungsi pembinaannya, terus mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba inovasi sampai pada proses keberhasilan uji coba yang kemudian diterapkan dengan perda dan perkada. Daftar inovasi yang diterapkan pada 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023 pada Lingkup Pemerintahan Kota Palopodisajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 139

Data Inovasi yang Diterapkan di Tahun 2023 pada Lingkup Pemerintahan Kota Palopo

No	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
1	Dinas Kesehatan - UPT Antar Jemput	PEPK-MEDSOS (Peningkatan Efektivas pelayanan Kesehatan berbantuan Sosmed) di UPT Jemput Antar)
2	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	PADI KUNING (Palopo dalam Inovasi Kuat dan Berdaya Saing)
3	Sekretariat Daerah – Bagian Umum	SERGAP (Sistem Informasi Pengelolaan dan Monitoring Barang Pinjam Pakai)
4	Dinas Perhubungan	TRAFFIC GUARDIAN (Pengawasan Rambu Lalu Lintas di Kecamatan Wara Berbantuan Sosial Media)
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	ORANG KEREN (Optimalisasi Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak) di Kota Palopo
6	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	AKULAH TANGAN KANAN (Aksi Terpadu Untuk Adaptasi dan Penegakan Ketentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)
7	Dinas Kesehatan	JASA LABRAK (Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laboran bergerak)
8	Dinas Kearsipan	SIMARCIS-CES (Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Berbasis Microsoft Acces)
9	Dinas Lingkungan Hidup	Penambahan Fitur ASAL SAMPAH dalam Peningkatan Sistem Pencatatan Eletronik Jembatan Timbang TPA Mancani
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SI LANCAR (Sistem Layanan Cepat, Akurat dan Responsif) Perizinan
11	Kecamatan Wara Timur – Kelurahan Surutanga	Kelompok Pemuda Peduli Sampah
12	RSUD Sawerigading	SIREMUN (Sistem Informasi e-Remunerasi)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	LA PEPE KAKAK(Layanan Percepatan Penerbitan Kartu Keluarga dan Akta Kematian)
14	Dinas Sosial	Efektifitas Pengelolaan Pengarsipan Bagian Umum dan Kepegawaian
15	Dinas Pendidikan	SI PANASSA (Sistem Informasi Sarana Prasarana SMP)
16	Sekretariat Daerah – Bagian Sekretariat Daerah	SI PINTAR IBADAH (Sistem Pengelolaan Informasi Data Rumah Ibadah)
17	Dinas Perdagangan	E-TERA (Elektronik Layanan Tera)
18	Satuan Polisi Pamong Praja	GARDA TRANTIBUM (Kelompok Penyelenggara Peraturan Daerah Ketentraman dan Ketertiban Umum)
19	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	PIKNIK KE PALOPO (Pertanian Hidroponik Nikmatnya Petani Kota Palopo)
20	Dinas Kesehatan - Puskesmas Sendana	GARDU CANTING (Gerakan Terpadu Cegah Stunting)
21	Kecamatan Wara Barat – Kelurahan Malatunrung	TO MAKANJA (Tomarundung Taat Akan Pajak)
22	Kecamatan Sendana – Kelurahan Mawa	Digitalisasi Informasi Bantuan Sosial Melalui Grup Whatsapp
23	Kecamatan Wara Timur	Implementasi Program Kampung Qur'ani
24	Kecamatan Wara Utara– Kelurahan Sabbamparu	Perpustakaan Mini pada Ruang Pelayanan Kelurahan Sabbamparu
25	Kecamatan Wara Selatan - Kelurahan Takkalala	SIPAKILALA (Digitalisasi Layanan Informasi Terpadu Kelurahan Takkalala)
26	Kecamatan Wara Selatan	OPTIMALISASI PENILAIAN PEGAWAI KINERJA PEGAWAI MELALUI SIPLOOK (Sistem Penilaian Kinerja ASN Berbasis Log Book

No	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelaksanaan dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tepat waktu
28	Kecamatan Wara	Percepatan Proses Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) GU melalui JEBOL (jemput bola) dan Bimbingan Pelatihan
29	Kecamatan Wara Timur - Kelurahan Benteng	SIPANTER KALENG (Optimalisasi Administrasi Kearsipan Terpusat Kelurahan Benteng)
30	Kecamatan Wara Selatan - Kelurahan Sampoddo	SIPAKAINGE (Sistem Pelayanan Masyarakat Berbasis Aplikasi Smartphone dan Google Form)
31	Kecamatan Wara Barat - Kelurahan Lebang	PELITAKU (Pelayanan Data Admistrasi Kependudukan)
32	Kecamatan Wara Timur - Kelurahan Malatunrung	OPTIKAL MAL (Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan Malatunrung)

Sumber : Badan Penelitian dan Penngembangan Daerah Kota Palopo, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kota Palopo memiliki 32 inovasi pada tahun 2023 yang diterapkan dan terdata di indeks Inovasi Daerah Kementerian dalam Neger. Dari 49 Perangkat Daerah di Kota Palopo, hanya 22 OPD yang menerapkan inovasi di tahun 2023. Dengan demikian, angka partisipasi OPD di Lingkup Pemerintahan Kota Palopo menurun ke 44,90% dalam penerapan inovasi di tahun 2023.

Pada penelianan Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2023, Kota Palopo memiliki predikat Inovatif dari hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian dalam Negeri dengan skor 55,92.

2.6.3 Data Inovasi yang Diterapkan di Tahun 2024

Penerapan inovasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 atau mengalami peningkatan sebesar 34,37 persen. Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo, terdapat 43 inovasi baru yang diterapkan di 18 perangkat daerah. Data Inovasi Pemerintah Kota Palopo pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut;

Tabel 2.140

Data Inovasi yang Diterapkan di Tahun 2024 pada Lingkup Pemerintah Kota Palopo

No	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
1	Dinas Pendidikan - SMPN 14 Palopo	Strategi Permisi Berbantuan Judisto-Massikola
2	Dinas Lingkungan Hidup	Penggunaan Lembar Ceklist dan Data Dinding untuk Tertib Administrasi Pelaporan Pertanggungjawaban/ SPJ)
3	Dinas Kesehatan - Puskesmas Mungkajang	PEMUDAMU (Pemutakhiran Data melalui Coaching clinic Puskesmas Mungkajang)
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Contolling Realisasi Anggaran dengan Form Excel Conecting LRA
5	Dinas Kesehatan - Puskesmas Wisata Padang Lambe	Pemanfaatan Medali PON (Media Sosial WhatsApp dalam Menerima Respon Masyarakat)
6	Dinas Kesehatan - Puskesmas Mungkajang	TAKESI (Tanam Kelor Cegah Stunting)
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	SI PALING CAKEP (Sistem Informasi Pelayanan Keliling di Kecamatan dan Kelurahan se Kota Palopo)
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PAKAM (Pemutakhiran Data dalam Rangka Pengamanan Aset Barang Barang Milik Daerah Pemerintah kota Palopo)
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SIGAP (Sistem Informasi Jaga Barang, Mutasi dan Pensiun)
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	OPU AWAS BANG DUL (Optimalisasi Fungsi Pengawasan Perizinan Bangunan Gedung)
11	Dinas Kesehatan - Puskesmas Wisata Padang Lambe	INGATKAN BUMIL MINUM TABLET FE (Peningkatan Kepatuhan Ibu Hamil Minum Tablet FE)
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAK SEKDIS PUPR (Pengelolaan Arsip Kantor Secara Efektif dan Efisien pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
13	Dinas Perikanan	Siapmi dengan XAMPP Control
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Digitalisasi Arsip E-Archive
15	Dinas Pendidikan - SMPN 7 Palopo	Edukasi Cinta Shalat dalam Pembelajaran Agama Islam
16	Dinas Perdagangan - UPTD Pasar Andi Tadda	MAKASIH (Masuk Bersih Keluar Bersih)

No	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
17	Dinas Kesehatan - UPTD Jemput Antar	Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kesehatan Berbantuan Sosial Media
18	Dinas Perdagangan - UPTD Pasar Andi Tadda	PASTIADA (Media Sosial Pasar Andi Tadda)
19	Dinas Perdagangan - UPTD Pasar Andi Tadda	SIKAP (Speaker Info Keamanan Pangan)
20	Dinas Perdagangan - UPTD Pasar Andi Tadda	BU' KOS (Pembuatan Pupuk Kompos)
21	Dinas Perhubungan	E-SAFE CARD (Peningkatan Keselamatan Kapal Melalui E-Safe di Pelabuhan Tanjung Ringgit)
22	Dinas Pendidikan	SESAMA (Sekolah untuk Semua)
23	Kecamatan Wara Barat	PEREKAT PESTA (Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Objek Wisata)
24	Dinas Kesehatan - Puskesmas Mungkajang	Peningkatan Pengisian Identifikasi pada Rekam Medis dengan Menggunakan Form Cheklist)
25	Kecamatan Wara - Kelurahan Lagaligo	PALOMA (Publikasi Alur Pelayanan Melalui Media Cetak dan online)
26	Kecamatan Wara Utara - Kelurahan Batupasi	SIMANTAP (Pemantapan Media Informasi dalam Pengelolaan Administrasi dan Registrasi Pertanahan)
27	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - UPTD Perbibitan Ternak Unggas	Optimalisasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (OPPENSOP) Manajemen Pemeliharaan Induk Ayam
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	INSAN KIN (Integrasi Penenggulangan Kemiskinan)
29	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Efektivitas Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) untuk Pengembangan Bawang Merah
30	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Optimalisasi Persiapan Kelengkapan Dokumen Penetapan CPCL pada Pengadaan Sarana Pasca Panen melalui Checklist Form (CHECK-TANI)
31	Dinas Kesehatan - Puskesmas Wara Selatan	GELI JEDAH (Gerakan Lincah Jemput Dahak)
32	Dinas Kesehatan	SI NONI (Efisiensi Sistem Pembayaran Non Tunai Jasa Insentif Tenaga Kesehatan Puskesmas)
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROPER (Kolaborasi Membanhun Profesionalisme ASN)
34	Dinas Kesehatan - Puskesmas Wisata Padang Lambe	Edukasi PHBS dengan Metode Card Telling
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	GENERASI (Gerakan Pendampingan Inovasi)
36	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DOOR-KB (Datangi Orang, Optimalkan Respons Keluarga Berencana) - Akselerasi Program KB PUS dengan Door to Door
37	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Upaya Peningkatan Peserta Akseptor KB Melalui Layanan Door to Door dan Penyebarluasan Informasi di Posyandu AYO BER-KB
38	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KLIK-KB (Kelola Laporan Instan dan Konsisten Kinerja KB) - Akselerasi Laporan pertanggungjawaban UPTD KB
39	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - UPTD PP & KB Kecamatan Bara	LACAK PUS & JUS (Laporan Data Capaian Akseptor Pasangan Usia Subur dan Janda Usia Subur pada UPTD PP dan KB
40	Dinas Kesehatan - Puskesmas Sendana	Optimalisasi Kegiatan Penyediaan Calon Pendonor Darah bagi Ibu Hamil dengan SIDORA
41	Dinas Pendidikan - SMPN 12 Palopo	LASKAR (Layanan Siswa untuk Karir) Efektifitas Perencanaan Karir Siswa melalui Layanan Karir)
42	Kecamatan Sendana	PETI KEMAS (Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)
43	Dinas Kesehatan - Puskesmas Sendana	BATARA - BTA RAJIN DIPERIKSA (Pemeriksaan BTA Mikroskopik)

Sumber : Badan Penelitian dan Penngembangan Daerah Kota Palopo, 2025.

2.6.4 Indeks Inovasi Daerah Kota Palopo

Indeks inovasi daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Kementerian Dalam Negeri melaksanakan Penilaian Indeks Inovasi Daerah setiap tahun. Penilaian Indeks Inovasi daerah dimaksudkan untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Penilaian Indeks Inovasi Daerah merupakan motivasi bagi Pemerintah Kota Palopo untuk mewujudkan Palopo sebagai daerah yang inovatif. Peran serta serta dukungan dari Perangkat Daerah menjadi sebuah keniscayaan. Perangkat Daerah harus mengambil peran dengan menciptakan inovasi baru dalam rangka menciptaka Palopo sebagai daerah yang inovatif.

Tabel 2.141
Indeks Inovasi Daerah Kota Palopo

Tahun	Nilai	Kategori
2020	278	Kurang Inovatif
2021	26,67	Kurang Inovatif
2022	56,61	Inovatif
2023	55,92	Inovatif
2024	65,30	Sangat Inovatif

Sumber : Badan Penelitian dan Penngembangan Daerah Kota Palopo, 2025.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Sebagai upaya mewujudkan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta perluasan pemenuhan pelayanan dasar, maka pembangunan wilayah Palopo dan Sekitarnya diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) agar dapat berfungsi sebagai kawasan lumbung pangan nasional, dan pusat industri pengolahan hasil perkebunan, pusat pengembangan komoditas pertambangan nikel. Selain itu, wilayah Palopo dan Sekitarnya juga merupakan bagian dari kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Toraja dan Sekitarnya yang diarahkan sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang didukung oleh industri dan jasa wisata.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kota Palopo, ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun lalu, terutama pada sejumlah indikator makro pembangunan. Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2026, Optimalisasi sektor produktif dan potensial di Kota Palopo akan diupayakan dengan mengidentifikasi serta mengembangkan industri kreatif, pertanian yang berteknologi termasuk urban farming, dan pariwisata serta jasa lain. Dan ini diupayakan dapat mendorong kolaborasi antara pelaku usaha lokal, investor, dan lembaga keuangan, sehingga menciptakan sinergi yang meningkatkan nilai tambah, produktivitas, serta membuka lapangan kerja baru.

Pengembangan kawasan produktif dan komoditas potensial lainnya di Kota Palopo diarahkan pada Pemantapan Pemulihan Ekonomi berbasis UMKM dan sektor Produktif, Kreatif dan Potensial, Termasuk Pariwisata dan Seni Budaya, Pengembangan Ekonomi Circular, Digitalisasi Pengelolaan sumber-sumber PAD dan Investasi Daerah untuk membuka Lapangan Pekerjaan. Penyediaan dukungan infrastruktur pendukung, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas usaha dan sumber daya pelaku usaha serta jejaring kemitraan adalah beberapa poin utama dalam strategi pengembangan kawasan produktif dan komoditas potensial tersebut. Bagian lain dari strategi ini adalah menyediakan ruang-ruang kolaborasi yang lebih partisipatif dan lebih luas bersama seluruh komponen dan pemangku kepentingan yang ada untuk memastikan ketertiban dan kenyamanan daerah sehingga kondusifitas Kota Palopo dapat terus tumbuh dan berkembang sebagai salah satu syarat utama membangun daya tarik Kota Palopo sebagai destinasi investasi, dengan dukungan sarana dan prasarana serta promosi investasi yang memadai.

Berikut adalah kondisi ekonomi makro Kota Palopo Tahun 2024 dan perkiraan tahun berjalan 2025:

Tabel 3.1.
Kondisi dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro
Kota Palopo 2024-2025

Indikator	Capaian Tahun Lalu (2024)	Target Tahun Berjalan (2025)
Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	4,40	6,05
Laju inflasi (%/Tahun)	1,87	2
PDRB per kapita (Juta/Tahun)	56.65	62
Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	14.369	14.018
Indeks Gini (Angka)	0.346*	0,334
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,35	7,1
Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,64	7,3

** Angka Proyeksi*
Sumber: Kota Palopo Dalam Angka 2025; RPD 2024-2026

3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.1. Prospek Perekonomian Daerah

Pemerintah Kota Palopo tetap optimis bahwa perekenomian tahun 2026 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2025 dimana pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada angka 6,62 %, bahkan juga tetap akan kompetitif dibandingkan beberapa kota di Sulsel.

Tiga lapangan usaha yang diharapkan tetap memberikan kontribusi utama bagi LPE Kota Palopo 2026 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, dan sector Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Upaya-upaya yang bersifat pemulihan atas perekonomian daerah dan recovery atas aspek kesejahteraan masyarakat melalui 3 lapangan usaha tersebut, tetap akan menjadi fokus penanganan pemerintah Kota Palopo.

Prospek ekonomi Kota Palopo di Tahun 2026 digambarkan sebagai berikut :

a) Pemerintah Kota Palopo optimis, target angka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 (6,62%) optimis bisa diwujudkan dengan implementasi aktifitas berusaha masyarakat secara konvensional dan optimalisasi serta edukasi kesempatan

berusaha masyarakat dan investasi daerah. Memulihkan sejumlah sektor informal pada sektor perniagaan di Kota Palopo dan mengupayakan massivenya pemanfaatan teknologi informasi berbasis daring bagi para pelaku usaha diharapkan mampu memperluas skala dan volume usaha, lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha baru;

b) Penguatan lapangan Usaha Pertanian dan Perikanan di Kota Palopo tahun 2026, akan diarahkan pada pengembangan usaha pada spot potensial dan produktif, terutama pada komoditas pangan, peternakan dan perkebunan dengan meningkatkan cakupan ketersediaan infrastruktur berusaha dan peralatan serta sarana prasarana lain, serta optimalisasi pembinaan dan pengembangan kapasitas usaha. Termasuk upaya diversifikasi dan hilirisasi produk berbasis pengolahan yang menghasilkan nilai tambah, namun menjaga sinergitas dan keterkaitannya dengan sektor lain, sehingga pengembangan pertanian, perikanan dan peternakan juga bisa menjadi triger (pengungkit) bagi pengembangan sector lain misalnya kepariwisataan, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat;

c) Pada sektor informal, perkembangan investasi yang masuk ke Kota Palopo pada tahun 2026, juga berupaya dipulihkan oleh Pemerintah Kota Palopo melalui serangkaian kegiatan promosi investasi dan memastikan pelayanan investasi di kota ini akan jauh lebih kompetitif, lebih mudah, lebih cepat dan lebih akuntabel dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan melalukan sejumlah inovasi layanan. Termasuk mengoptimalisasi sejumlah iven tahunan yang akan dilaksanakan tahun 2026, dengan skala yang lebih kompetitif dalam upaya meningkatkan angka kunjungan ke Kota Palopo. Sektor informal ini di Kota Palopo mencakup beberapa lapangan usaha berbasis UMKM dan sektor Produktif, Kreatif dan Potensial, termasuk Pariwisata dan Seni Budaya, Pengembangan Ekonomi Circular, Digitalisasi Pengelolaan sumber-sumber PAD dan Investasi Daerah untuk membuka lapangan pekerjaan, dan jasa-jasa advertising lainnya;

d) Angka kemiskinan diproyeksi 7,06% pada tahun 2026, dimana Pemerintah Kota Palopo akan melaksanakan sejumlah program perlindungan dan pemberdayaan sosial, mulai dari bantuan sosial, bantuan pembinaan dan pemberdayaan usaha, pemberdayaan keluarga yang difokuskan pada pemanfaatan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), untuk memastikan ketepatan sasaran program. Selain menurunkan angka kemiskinan, serangkaian upaya ini diharapkan mampu meningkatkan beberapa indikator ekonomi atau kesejahteraan masyarakat lainnya pada tahun 2026, seperti meningkatnya pendapatan per kapita, menguatnya paritas daya beli masyarakat. Upaya ini akan disinergikan dengan program-program berbasisi masyarakat kecil termasuk pengembangan ekonomi circular (pemanfaatan barang bekas menjadi produk baru yang bernilai ekonomis);

e) Pada sisi pengelolaan pendapatan, Pemerintah Kota Palopo juga akan melakukan serangkaian upaya agar pendapatan dapat dioptimalkan, sejalan dengan trend peningkatan belanja pemerintah Kota Palopo. Misalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan PAD, baik dari sisi kemudahan pembayaran, maupun optimalisasi sumber sumber PAD lain yang potensial. Kemudian optimalisasi peningkatan Dana Alokasi Khusus yang kontribusinya bagi Pendapatan Kota Palopo cukup siginifikan, dengan meningkatkan koordinasi dan sinergitas pemerintah pusat dan daerah, dengan memastikan bahwa pemanfaatan dan penatausahaan DAK Kota Palopo terus lebih baik. Persentase PAD terhadap Pendapatan Kota Palopo Tahun 2026 ditargetkan pada angka 25,%.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Palopo akan berupaya:

a) Memastikan aktifitas produksi barang dan jasa pada semua lapangan usaha terutama pada tiga kontributor ekonomi terbesar Kota Palopo, berlangsung dengan lancar termasuk menumbuhkembangkan iklim yang kondusif bagi pengembangan wisata dan ekonomi kreatif daerah dengan terus mengembangkan spot potensial dan spot kawasan produktif yang sudah ada;

b) Mengoptimalisasi sejumlah iven-iven lokal tahunan di Kota Palopo pada Tahun 2026, dengan meningkatkan daya tarik sehingga mampu lebih banyak mendatangkan angka kunjungan masyarakat dengan mengelaborasi program-program lintas Perangkat Daerah;

c) Memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur termasuk infrastruktur strategis daerah, selain menambah daya saing infratsruktur kota, juga mampu menjadi lapangan kerja baru dan kesempatan kerja baru dan menyerap lebih banyak banyak tenaga kerja lokal;

d) Menjaga dan memastikan bahwa pengeluaran dan belanja Pemerintah tetap berjalan dan dilaksanakan secara tepat dan cermat dalam fungsinya sebagai salah satu stimulator ekonomi daerah;

e) Memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dengan menjaga kestabilan dan distribusi barang, dan ketersediaannya serta menjaga inflasi daerah;

f) Memastikan dan menjaga agar intervensi pemerintah dalam hal pemberdayaan dan penanganan masyarakat miskin, disabilitas serta masyarakat berkebutuhan khusus melalui program program pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin atau rentan, tetap berjalan dengan efektif;

Menjaga dan memastikan bahwa upaya-upaya recovery atau pemulihan ekonomi daerah dan status kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan secara proporsional dan tepat sasaran.

3.1.1.2. Tantangan Perekonomian Global

Ekonomi global menghadapi tantangan yang semakin rumit. Ekonomi global merujuk pada sistem ekonomi yang melibatkan ketergantungan dan interaksi antara berbagai negara di seluruh dunia. Aktivitas ekonomi seperti perdagangan internasional, investasi lintas batas, dan pergerakan modal antar negara menjadi elemen utama yang membentuk dinamika ekonomi global. Lingkupnya mencakup pertukaran barang, jasa, dan sumber daya di antara negara-negara, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi mata uang, kebijakan perdagangan internasional, dan dinamika pasar

keuangan yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi secara global. Dalam laporan "Indonesia Economic Prospects" yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada bulan Desember 2023 menyatakan bahwa, "Risiko perlambatan ekonomi di Indonesia akan semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan, walaupun secara keseluruhan, kondisi perekonomian dalam negeri masih dianggap solid.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Ekonomi Global

- Ketidakpastian Geopolitik. Ketidakpastian dalam relasi geopolitik antar negara-negara utama, yang dapat menjadi pemicu penurunan ekonomi global melalui konflik, perselisihan perdagangan, atau perubahan dalam dinamika politik internasional, berdampak pada kepercayaan pelaku pasar dan investasi. Dikutip dalam TimesIndonesia, Jakarta, mengatakan, diperkirakan akan menyaksikan ekonomi Indonesia semakin bergantung pada faktor-faktor GDP (Gross Domestic Product) atau Produk Domestik Bruto (PDB) seiring dengan penurunan permintaan global yang diantisipasi. Di sisi lain, peningkatan signifikan dalam pengeluaran fiskal, terutama selama masa pemilihan umum, diharapkan dapat memacu pertumbuhan PDB sebesar 5% year-on-year (YoY).
- Perubahan Nilai Mata Uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang memiliki dampak yang besar terhadap daya saing ekspor dan impor suatu negara. Perubahan yang mendadak dan signifikan dalam nilai tukar dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan perdagangan internasional. Menurut Bisnis.Com, proyeksi pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia hanya sekitar 9% dan 9,4%, masing-masing, yang mengindikasikan penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022. Penurunan pertumbuhan ekspor dan impor ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi dunia yang diharapkan terjadi pada tahun mendatang.
- Fluktuasi Harga Komoditas. Perubahan dalam harga komoditas global, seperti minyak, logam, dan pertanian, memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi dunia, terutama memberikan kerugian pada negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditas tertentu. "Sementara itu, dengan pelemahan ekonomi negara mitra utama Indonesia, pertumbuhan positif di negara-negara lain, terutama di Amerika Utara (2,2%), Amerika Selatan (3,3%), dan Asia (5,8%), dianggap sebagai peluang yang perlu dioptimalkan oleh Indonesia untuk memperluas pasar ekspornya. Meskipun harga beberapa komoditas, termasuk batubara, diperkirakan stagnan pada tahun depan, kecuali untuk minyak mentah yang memproyeksikan kenaikan, memberikan dimensi tambahan dalam strategi ekspor Indonesia.

3.1.1.3. Tantangan Perekonomian Nasional

Melemahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga (KRT) yang merupakan komponen utama penyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB) Indonesia menjadi isu krusial yang masih akan dihadapi perekonomi nasional 2025 (Avisenna, 2024). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada triwulan I 2024 KRT tumbuh sebesar 4,91% dengan kontribusi sebesar 54,93% terhadap PDB (Avisena, 2024). Pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dibanding triwulan I 2023 yaitu 4,54% (LPEM FEB UI, 2023). Kondisi serupa terjadi pada triwulan II 2024, pertumbuhan KRT sedikit naik menjadi 4,93% dengan kontribusi terhadap PDB 54,53%. Namun demikian, kontribusi PDB pada triwulan II 2024 lebih rendah dibanding triwulan I 2024, padahal pertumbuhan KRT meningkat pada triwulan II 2024. Kondisi ini terjadi karena normalisasi kegiatan ekonomi pasca pemilihan umum. Pada triwulan III 2024, tren melambat berlanjut dengan pertumbuhan stagnan di 4,91% dan kontribusi turun lebih jauh ke 53,08%.

Pada tahun ini (2025), perekonomian global menghadapi berbagai tantangan kompleks seperti perang dagang dan konflik geopolitik (Lestari, 2024). Berdasarkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), risiko ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dengan laju pertumbuhan global yang diproyeksikan sebesar 3,3% per tahun selama dua tahun ke depan. Laporan OECD menyebutkan, meningkatnya ketegangan perdagangan dan langkah proteksionisme dapat mengganggu rantai pasokan, memicu kenaikan harga energi, dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Konflik geopolitik juga menjadi ancaman signifikan terhadap perdagangan dan pasar energi, yang dapat memicu lonjakan harga energi dan inflasi. Lonjakan harga ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang-barang pokok dan kebutuhan sehari-hari sehingga dapat mengurangi daya beli rumah tangga, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah. Secara domestik, Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi antara lain daya beli masyarakat, ketimpangan ekonomi, tingkat pengangguran, dan ketergantungan terhadap impor pangan. Daya beli masyarakat, terutama pada kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah, mengalami tekanan (Masitoh, 2024). Berdasarkan data Permata Institute for Economic Research (PIER), penurunan indeks pembelian barang tahan lama (durable goods) pada kelompok pendapatan Rp2,1 juta – Rp3 juta, Rp3,1 juta – Rp4 juta, dan di atas Rp5 juta mengalami peningkatan (Masitoh, 2024). Penurunan indeks pembelian barang tahan lama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi indikasi melemahnya KRT.

3.1.1.4. Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Integrasi ekonomi hijau menjadi bagian penting dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di sulsel, karena tidak bisa dipungkiri sektor lingkungan harus menjadi pertimbangan dalam rencana pembangunan di sulsel. Dalam menerapkan pertumbuhan ekonomi hijau ada tiga tantangan yang paling utama, yaitu perubahan iklim dimana ini semua menjadi tantangan global dan diluar control, dan tentunya dibutuhkan adaptasi selain mengurangi percepatan dari emisi dan makin kesini semua nyata. Selain itu, masalah sinkronisasi program antar kementerian dan pemerintah daerah, "ini sering kali terjadi misalnya antara Kementerian KLHK dan Kementerian Pertanian, sering kali jalan sendiri. Dan yang terakhir, adalah kapasitas baik itu masalah anggaran pendanaan maupun teknis, inilah tiga tantangan yang dihadapi dalam pertumbuhan "ekonomi hijau".

3.1.1.5. Tantangan Perekonomian Daerah

Berangkat dari sejumlah dinamika dan kondisi serta capaian kinerja pada aspek ekonomi, beberapa tantangan berkaitan dengan kondisi perekenomian Kota Palopo di Tahun 2025 yang masih berlanjut pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Palopo ditargetkan meningkat pada pahun 2025 yaitu sebesar 6,05% atau meningkat 1,59% dari capaian tahun 2024 yakni 4,40%, Pemerintah Kota Palopo akan memastikan untuk tetap meningkatkan LPE pada tahun 2026 yang antara lain dengan memulihkan aktifitas berusaha masyarakat pada semua lapangan usaha, memastikan aktifitas aktifitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi misalnya produksi, distribusi dan konsumsi logistik daerah mampu berjalan dengan baik ditengah ancaman krisis energy. Terutama pada upaya menjaga kestabilan harga bahan bahan pokok dan bahan baku penting lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat dan akses terhadap barang-barang kebutuhan pokok..
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pada tahun 2024 sebesar 7,64% dibawah dari yang ditargetkan yaitu 8,07%, dengan demikian Pemerintah Kota Palopo akan mengoptimalkan kemudahan berinvestasi di Kota Palopo yang mampu menyediakan lapangan kerja dan menjadi kesempatan berusaha masyarakat.
3. Meskipun Paritas daya beli atau pengeluaran per kapita masyarakat Kota Palopo meningkat dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah Kota Palopo tetap akan meningkatkan kualitas belanja pemerintah Kota Palopo sebagai salah satu stimulator perekonomian daerah, sekaligus untuk menekan angka penduduk miskin dengan upaya peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur yang lebih produktif, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, serta pembinaan usaha masyarakat dengan menjaga ketepatan sasaran penerima termasuk mengemas pelaksanaan iven-iven produktif lokal daerah yang mampu mendatangkan angka kunjungan ke Kota Palopo sekaligus diharapkan dapat menekan laju inflasi.

Untuk menekan Gini Rasio Pemerintah Kota Palopo akan memastikan bahwa upaya pembangunan sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan dan life skill), peningkatan produktifitas sektor ekonomi, pengembangan ekonomi hijau, transformasi digital (teknologi informasi), integrasi pengembangan infrastruktur pada spot potensial dan produktif daerah.

3.1.1.5.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Palopo tahun 2024 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp11,08 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp6,65 triliun. PDRB Perkapita mencapai Rp56,65 juta. Ekonomi Kota Palopo tahun 2024 terhadap tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,40 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 14,15 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 17,63 persen.

Kontribusi terbesar PDRB menurut Lapangan Usaha Kota Palopo tahun 2024 dicapai oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 24,13 persen dari total PDRB ADHB, sedangkan menurut Pengeluaran Kota Palopo tahun 2024 dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 57,76 persen.

Ekonomi Kota Palopo triwulan I-2025 dibandingkan triwulan IV-2024 mengalami kontraksi sebesar 9,35 persen (q-to-q). Kontraksi terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran. Kontraksi terdalam dicapai oleh komponen Konsumsi Akhir Pemerintah sebesar 62,78 persen; diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 24,06 persen. Selanjutnya, komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga mengalami pertumbuhan sebesar 1,72 persen.

Struktur PDRB Kota Palopo menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Kota Palopo masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Kota Palopo yaitu sebesar 61,49 persen. Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 34,1 persen; diikuti Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah sebesar 7,14 persen. Sementara itu, komponen lainnya memiliki peranan yang relatif kecil yaitu sebesar -2,73 persen.

3.1.1.5.2. PDRB Perkapita

Berdasarkan hasil perhitungan BPS Kota Palopo, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palopo Menurut Lapangan Usaha 2024, nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 11.083,92 milyar. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar Rp 584,09 milyar dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp 10.499,83. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi. Berdasarkan harga konstan, PDRB juga mengalami kenaikan dari Rp 6.369,71 milyar di tahun 2023 menjadi Rp 6.650,07 milyar di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2024, Kota Palopo mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,4 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha dan inflasi. Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Palopo didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Palopo pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yang besarannya mencapai 24,13 persen. Berikut tabel pencapaian PDRB per Kapita Tahun 2022-2024.

Tabel 3.2.
Pencapaian PDRB per Kapita Kota Palopo
Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Realisasi		
	2022	2023	2024
Nilai PDRB			
ADHB (Milyar)	9.767,88	10.499,83	11.083,92
ADHK (Milyar)	6.104,73	6.369,71	6.650,07
Jumlah Penduduk (Jiwa)	190.87	192.76	198.53
PDRB per Kapita (ADHB) (Juta/Kapita/Thn)	51.18	54.47	56.65

Sumber: Kota Palopo Dalam Angka 2025

Berikut adalah perkembangan PDRB Menurut lapangan usaha tahun 2022-2024:

Table 3.3.
Perkembangan Nilai PDRB Kota Palopo (ADHB & ADHK)
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2022-2024

No	Bidang /Urusan	PDRB ADHB Tahun			PDRB ADHK Tahun		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1672.46	1716.09	1730.09	956.00	951.24	949.39
2	Pertambangan & Penggalian	15.57	16.90	17.46	8.06	8.55	8.84
3	Industri Pengolahan	247.16	269.80	289.73	147.42	155.98	163.41
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.74	8.02	8.61	6.59	7.11	7.70
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	14.97	15.58	16.62	16.45	17.32	18.48
6	Konstruksi	1689.45	1834.10	1861.81	894.51	940.22	947.48
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2295.74	2488.59	2674.30	1568.52	1648.94	1732.73
8	Transportasi dan Pergudangan	648.31	793.69	858.37	345.35	367.16	385.30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	108.04	119.19	131.24	68.42	74.18	79.65
10	Informasi dan Komunikasi	413.59	443.13	473.20	409.51	435.33	467.51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	772.18	861.24	916.30	446.90	488.69	511.49
12	Real Estat	463.54	472.12	503.11	283.10	298.69	316.98
13	Jasa Perusahaan	9.01	10.26	11.05	5.68	6.24	6.57
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	671.01	667.40	740.49	400.15	392.60	425.22
15	Jasa Pendidikan	362.23	374.33	398.50	270.40	277.42	298.91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	241.47	257.24	278.20	183.83	196.16	211.84
17	Jasa Lainnya	136.42	152.14	174.85	93.85	103.87	118.57
	PDRB	9767.89	10499.83	11083.92	6104.74	6369.71	6650.07

Sumber: Palopo dalam angka 2025

Berikut adalah perbandingan PDRB per kapita beberapa kabupaten/kota di Sulsel dalam tiga tahun terakhir 2022-2024:

Tabel 3.4.
Perbandingan PDRB ADHB per Kapita Kota Palopo dan
Beberapa Daerah Lain Tahun 2022-2024

Prov/Kab/Kota	Capaian PDRB per Kapita (Juta/Kapita/Tahun)		
	2022	2023	2024
Kota Palopo	51.18	54.47	56.65

Kota Pare-Pare	55.78	58.78	61.97
Kota Makassar	144.6	155.95	165.95
Kabupaten Luwu	53.38	57.36	59.72
Kabupaten Luwu Utara	48.65	53.54	47.72
Kabupaten Luwu Timur	93.36	99.49	97.18
Sulawesi Selatan	65.35	69.7	73.57
Nasional (PDB)	71.03	75	78.6

Sumber: Badan Pusat Statistik

3.1.1.5.3. Inflasi

Pada Desember 2024 di Kota Palopo terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 1,87 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,16. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya akumulasi indeks harga beberapa kelompok pengeluaran. Secara yoy, pada bulan Desember 2024 beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi: Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,05 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,51 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,37 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,30 persen; kelompok transportasi sebesar 0,58 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,23 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,05 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,57 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,62 persen. Sedangkan pada kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan juga mengalami deflasi sebesar 0,79 persen; adapun kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami perubahan harga yang sangat kecil/mendekati nol.

Tingkat inflasi month to month (mtm) Desember 2024 tercatat inflasi sebesar 0,31 persen dan tingkat inflasi tahun kalender/inflasi year to date (ytd) sebesar 1,87 persen.

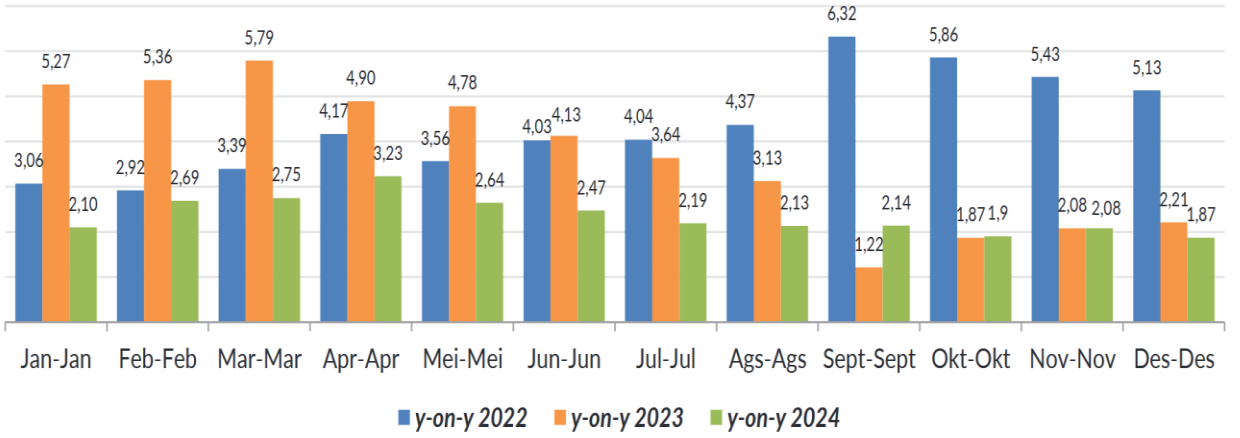

3.1.1.5.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 7,64 persen poin. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 7 hingga 8 orang penganggur. Selama lima tahun terakhir, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun mulai Agustus 2021 hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,17 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

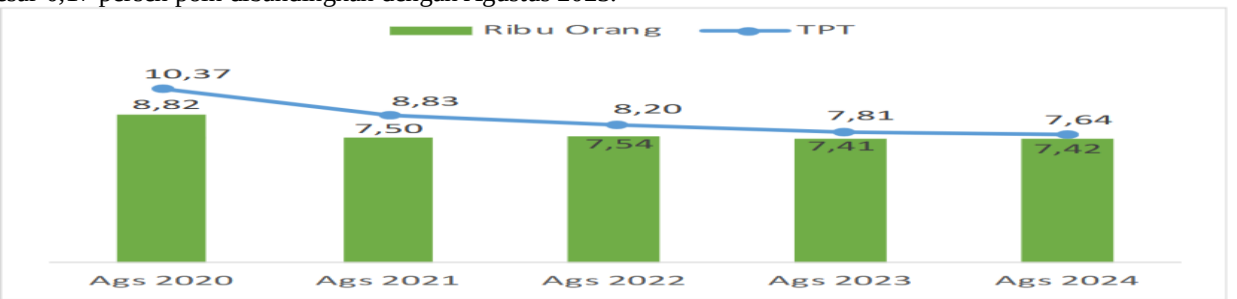

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 97,18 ribu orang, naik 2,43 persen poin disbanding Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Palopo sebesar

66,19 persen poin, naik sebesar 0,44 persen poin dibanding Agustus 2023.

Tabel 3.5.
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja
Tahun 2022-2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022 (org)	Agustus 2023 (org)	Agustus 2024 (org)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	144.477	144.301	146.827
Angkatan Kerja	91.960	94.881	97.189
- Bekerja	84.419	87.471	89.764
- Pengangguran	7.541	7.410	7.425
Bukan Angkatan Kerja	52.517	49.42	49.638
	%	%	%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63,65	65,75	66,19
- Laki-laki	77,84	78,31	80,45
- Perempuan	50,33	53,29	52,02

Sumber: Badan Pusat Statistik

3.1.1.5.5. Kemiskinan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Tingkat Kemiskinan Kota Palopo menunjukkan tren fluktuatif. Persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada 2 periode yakni Maret 2020 (7,85 persen), Maret 2021 (8,14 persen). Peningkatan persentase penduduk miskin pada Maret 2020 dan Maret 2021 disebabkan oleh pandemic covid-19 yang terjadi saat itu mengakibatkan kondisi perekonomian global mengalami penurunan, sedangkan pada Maret 2022 persentase penduduk miskin kembali mengalami penurunan karena kembali pulihnya kondisi perekonomian pasca pandemic covid-19.

Secara umum tingkat kemiskinan di Kota Palopo pada Maret 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode Maret 2023 secara persentase. Persentase penduduk miskin di Kota Palopo pada Maret 2024 tercatat sebesar 7,35 persen menurun sebesar 0,34 persen poin dibandingkan periode Maret 2023 (7,69 persen). Selanjutnya secara jumlah, penduduk miskin di Kota Palopo menurun sebesar 0,42 ribu jiwa atau sekitar 420 jiwa dibandingkan dengan Maret 2023 (14,85 ribu jiwa) dan menurun sebesar 0,35 ribu jiwa terhadap Maret 2022 (14,78 ribu jiwa) dan pada tahun 2024 penduduk miskin Kota Palopo tercatat 14.43 ribu jiwa.

Pada Maret 2024, Garis Kemiskinan sebesar Rp 466.521,-/kapita/bulan. Jika dibandingkan dengan Maret 2023, Garis Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar Rp 24.245,-/kapita/bulan.

Tabel 3.6.
Pencapaian Indikator Kemiskinan Kota Palopo
dan beberapa daerah lain Tahun 2024

Indikator	Tahun 2024						
	Kota Palopo	Kota Makassar	Kab Toraja Utara	Kab Luwu	Kab Luwu Utara	Kab Luwu Timur	Sulsel
Jml Penduduk Miskin (Dalam ribuan)	14,43	79,53	25,97	44,24	36,46	20,7	736,48
Persentase Penduduk Miskin	7,35	4,97	10,73	11,7	11,24	6,55	8,06
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,94	0,81	1,21	2,05	2,10	1,31	1,39
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,19	0,18	0,24	0,53	0,58	0,39	0,34
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	466.521	592.753	413.029	433.898	431.98	460.356	459.226

Sumber: Badan Pusat Statistik

3.1.1.5.6. Gini Rasio

Gini rasio Kota Palopo pada tahun 2024 pada angka 0.333 menurun atau membaik dibandingkan tahun 2023 yang berada pada posisi 0.367, Angka gini rasio Kota Palopo tahun 2024 menurun sebesar 0.034 poin, kondisi ini lebih baik dibandingkan Kota Makassar menurun 0,15 poin, Pare-pare menurun 0,005, poin dan juga lebih baik dari Sulawesi Selatan yang tidak mengalami penurunan 0,014 poin dan Nasional yang justru meningkat di tahun 2024 sebesar 0,014 poin.

Gini rasio menjadi indikator yang kedua sasaran pembangunan yang ketiga Kota Palopo, sesuai dengan dokumen RPD Kota Palopo 2024-2026 dan merupakan indikator utama dalam menilai tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Berikut adalah angka proyeksi gini rasio Kota Palopo Tahun 2024, yang diproyeksi dengan menggunakan

pendekatan indikator kesejahteraan masyarakat lainnya misalnya distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan, dan komponen pembentuk IPM dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dan beberapa tahun sebelumnya sampai dengan awal maret 2024.

Tabel 3.7.
Pencapaian Gini Rasio Kota Palopo dan beberapa daerah lain
Tahun 2022-2024

Prov/Kabupaten/Kota (Maret)	Tahun		
	2022	2023	2024
Kota Makassar	0,395	0,387	0,372
Kota Pare-Pare	0,379	0,381	0,376
Kota Palopo	0.371	0,367	0,333
Sulawesi Selatan	0,377	0,377	0,373
Nasional	0.381	0,388	0,399

Sumber: Badan Pusat Statistik

3.1.2. Arah Kebijakan Nasional Tahun 2026

Arah kebijakan Ekonomi Nasional tahun 2026 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah melalui Penyusunan rencana pembangunan ekonomi hijau dan rendah karbon; Menyelaraskan kebijakan ekonomi hijau dan lingkungan hidup; Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di tingkat daerah; Menguatkan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; Menjaga inflasi dalam sasarannya; Menjaga nilai tukar yang sesuai fundamental; Mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; Menjaga stabilitas sistem keuangan; Mendukung pertumbuhan sektor perdagangan dan UMKM dan Memperkuat akseptasi pembayaran digital.

Arah kebijakan Ekonomi makro secara nasional ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM. Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain pertama, efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja. Kedua, optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (service delivery). Ketiga, redesain sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (spending better) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (result based) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (automatic stabilizer). Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional menderivasi arah kebijakan perekonomian daerah. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan-permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang diprirotaskan di tahun 2026, telah ditetapkan beberapa target pembangunan, diantaranya penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, insidensi tuberkolosis, eliminasi malaria, kusta, serta peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment). Disisi fiskal, kebijakan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal jangka menengah. Hal ini tercermin dari rasio utang yang berada pada kisaran 30 persen Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) dan defisit anggaran yang terjaga lebih rendah dari 3,0 persen PDB. Melalui kinerja perekonomian yang kuat dan stabil, kesejahteraan masyarakat meningkat. Ekspansi perekonomian domestik mampu menciptakan tambahan lebih dari 11 juta lapangan kerja pada tahun 2015-2019, melebihi target 10 juta lapangan kerja. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,28 persen pada tahun 2019 dari 6,18 persen pada tahun 2015. PDB per kapita terus meningkat dari USD3.531 pada tahun 2014 menjadi USD3.927 pada tahun 2018, setara dengan GINI per kapita (Atlas Method) USD3.840 mendekati ambang batas negara berpendapatan menengah-tinggi.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kota Palopo pada tahun 2026 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi yang telah dicapai pada tahun 2024 dan proyeksi hingga tahun 2027. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu urusan pemerintahan. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah), Pendapatan Transfer

(meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah), dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum, arah kebijakan pendapatan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal, efektif dan efisien melalui sistem pemungutan aktif, terpadu dan terkoordinir dengan memanfaatkan teknologi informasi secara real time, on time (tepat waktu), real value (tepat nilai), dan real amount (tepat jumlah) sehingga lebih transparan dan akuntabel;
b. Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) berbasis sistem dalam jaringan (online) dari segi pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, pelaporan pajak dan retribusi, fasilitas pembayaran, pengawasan, penertiban hingga penindakan;
c. Mendorong perbaikan integrasi database potensi PDRD dengan sinkronisasi pendataan, perizinan dan partisipasi stakeholders serta komponen lainnya agar lebih terstruktur hasil kolektibilitas dan tingkat capaian realisasinya;
d. Pemanfaatan perekaman data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta laporan operasional yang mencerminkan laporan keuangan;
e. Optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan peningkatan kerja sama dengan melibatkan organisasi masyarakat atau organisasi non pemerintah;
f. Mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi internal dan eksternal Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo yang efektif dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk sinkronisasi data Wajib Pajak Pusat dan Daerah;
g. Peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan unit kerja serta usaha-usaha lainnya yang berpotensi untuk mendorong peningkatan PAD;
h. Mengoptimalkan pelaksanaan tax clearance, melalui kerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo, untuk layanan administrasi melalui verifikasi pemenuhan kewajiban pembayaran pajak terlebih dahulu sebelum diberikan pelayanan;
i. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan OPD pengelola pendapatan;
j. Peningkatan dan Penataan Prosedur sistem administrasi keuangan, sistemn pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi asset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dan hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
k. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;

Mengoptimalkan Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Capaian realisasi pendapatan Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2024 sebesar Rp.915,517 miliar atau 93,33% dari target yang ditetapkan, kondisi ini diatas kinerja tahun 2023 dimana angka realisasi pendapatan terhadap target pada posisi 83,29%. Untuk Pendapatan Asli Daerah atau PAD, tahun 2024, realisasinya Rp.206.389 miliar atau 83,02%. Sementara capaian pendapatan transfer yang tahun 2024 capaian realisasinya 709.128.722.423,00 atau 96,83%, angka tersebut dibawah dari angka capaian tahun 2023 (98,73%). Sementara Lain-lain Pendapatan yang sah tahun 2024 tidak ada realisasi sesuai dengan tidak adanya target pendapatan. Sementara realisasi pada tahun 2023 sebesar 12.281.670.655 (28.63%). Arah kebijakan pendapatan daerah sebagaimana diurai diatas, akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Palopo meningkatkan kinerja pendapatan daerah di tahun 2026.

Total pendapatan Kota Palopo diproyeksikan mengalami kontraksi sebesar 4,88% dari Rp1.043,84 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp992,89 miliar pada tahun 2026. Penurunan ini terutama dipicu oleh melemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. PAD mengalami penurunan signifikan sebesar 12,25% dari targer tahun 2025 yakni Rp270,44 miliar menjadi Rp237,32 miliar, dengan kontraksi multidimensi, penurunan target atau proyeksi PAD pada tahun 2026 disebabkan rendahnya realisasi pendapatan pada tahun 2024 dan realisasi s.d. semester I tahun berjalan (2025). Dapat dijelaskan target atau proyeksi pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut: Pajak Daerah diproyeksikan Turun 11,07% atau Rp77,61 miliar menjadi Rp69,02 miliar, hal ini mengindikasikan potensi pelemahan basis pajak lokal. Hal sama terjadi pada proyeksi pada objek Retribusi Daerah yang juga turun 7,64% atau dari Rp162,18 miliar yang ditargetkan pada tahun berjalan (2025) menjadi Rp149,80 miliar (proyeksi tahun 2026), hal ini mencerminkan tantangan dalam optimalisasi layanan publik berbasis retribusi. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan meningkat 5,88% atau dari Rp.8,5 miliar menjadi Rp.9 miliar. Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan signifikan yaitu menurun 57,09% dari target tahun berjalan sebesar Rp.22,138 miliar menjadi Rp.9,547 miliar, penurunan proyeksi dengan melihat realisasi tahun 2024. Ini menandakan kerapuhan pendapatan non-inti dan perlunya diversifikasi sumber pendapatan.

Ketergantungan pada dana transfer tetap dominan yakni 76% dari total pendapatan yang diproyeksikan pada tahun2026. Pendapatan Transfer diproyeksikan menurun 2,31% dari tahun berjalan (2025) atau dari Rp.773,404 miliar menjadi Rp.755,575 pada tahun 2026. Pendapatan Transfer dapat diuraikan sebagai berikut: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat: Stagnan (-0,22%), namun komposisinya berubah secara diametral: DAU naik 4,22% (didorong kebijakan afirmatif), sementara DAK turun 18,10% dari Rp142,16 miliar menjadi Rp116,44 miliar. Dana Insentif Fiskal diproyeksikan meningkat 24,18% atau dari Rp.6,442 miliar menjadi Rp.8 miliar. Transfer Antar Daerah diproyeksikan Turun dari target tahun berjalan sebesar 24,38% atau dari Rp73,41 miliar menjadi Rp55,53 miliar, hal ini diakibatkan terutama karena penurunan Bantuan Keuangan (-50,86%) dan Bagi Hasil (-16,58%).

Proyeksi Pendapatan tahun 2026 mengisyaratkan tiga tantangan utama:

- Kerentanan Fiskal: Penurunan PAD yang multidimensi memerlukan revitalisasi kebijakan pajak/retribusi dan penguatan pendapatan non-konvensional (e.g., pengelolaan aset daerah).
- Ketergantungan Struktural: Stagnansi transfer pusat dan kolapsnya transfer antar daerah mengharuskan optimalisasi skema Dana Insentif Fiskal (proyeksi +24,18%) serta diplomasi fiskal antar-daerah.
- Konsistensi Perencanaan: Disparitas proyeksi komponen utama (DAK vs. DAU) membutuhkan realignment postur APBD dengan prioritas RPJMD dan sinergi pusat-daerah yang terukur.

Berikut adalah tabel capaian sekaligus menjadi perbandingan kinerja realisasi pendapatan Pemerintah Kota Palopo sejak 2023-2024, tahun berjalan (2025) dan proyeksi Pendapatan Daerah Kota Palopo 2026 s.d 2027.

Tabel 3.8.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Palopo
Tahun 2023 s.d tahun 2027

Uraian	Jumlah				
	Realisasi Tahun (n-3) 2023	Realisasi Tahun (n-2) 2024	Tahun Berjalan (n-1) 2025	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (n) 2026	Proyeksi/Target Pada Tahun (n+1) 2027
PENDAPATAN	**943,087,588,524.71**	**915,517,759,132.35**	**1,043,841,397,653.00**	**992,891,374,999.25**	**997,855,831,874.00**
Pendapatan Asli Daerah	**194,013,652,599.96**	**206,389,036,709.35**	**270,437,146,000.00**	**237,316,092,834.01**	**238,502,673,298.00**
Pajak Daerah	46,687,824,782.00	48,534,432,801.00	77,614,970,000.00	69,019,777,129.01	69,364,876,014.00
Retribusi Daerah	10,560,295,890.00	140,371,347,175.00	162,184,176,000.00	149,796,315,705.00	150,545,297,284.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,347,070,226.00	8,020,016,252.00	8,500,000,000.00	9,000,000,000.00	9,045,000,000.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	129,418,461,701.96	9,463,240,481.35	22,138,000,000.00	9,500,000,000.00	9,547,500,000.00
Pendapatan Transfer	**736,792,265,269.75**	**709,128,722,423.00**	**773,404,251,653.00**	**755,575,282,165.24**	**759,353,158,576.00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**658,230,414,371.00**	**654,149,905,364.00**	**693,551,541,000.00**	**692,046,676,935.65**	**695,506,910,320.00**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak	13,754,459,389.00	17,007,888,762.00	15,548,450,000.00	17,177,967,649.62	17,263,857,488.00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	3,819,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	504,787,401,000.00	521,857,620,000.00	535,839,357,000.00	558,431,468,718.01	561,223,626,062.00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus	135,869,549,982.00	115,284,396,602.00	142,163,734,000.00	116,437,240,568.02	117,019,426,770.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	**5,930,155,000.00**	**0.00**	**6,442,293,000.00**	**8,000,000,000.00**	**8,040,000,000.00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Insentif Fiskal	5,930,155,000.00	0.00	6,442,293,000.00	8,000,000,000.00	8,040,000,000.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**72,631,695,898.75**	**54,978,817,059.00**	**73,410,417,653.00**	**55,528,605,229.59**	**55,806,248,256.00**
Pendapatan Bagi Hasil	68,267,853,898.75	46,874,632,059.00	56,754,292,853.00	47,343,378,379.59	47,580,095,272.00
Bantuan Keuangan	4,363,842,000.00	8,104,185,000.00	16,656,124,800.00	8,185,226,850.00	8,226,152,984.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan	**12,281,670,655.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Lainnya	12,281,670,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Bappeda Kota Palopo

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dapat dilaksanakan Bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau pemerintah daerah dengan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan /isu yang dihadapi maka ditetapkan arah kebijakan belanja daerah 2026 sebagaiberikut :

1. Belanja Pemerintah Kota Palopo tahun 2026 diarahkan pada pemenuhan mandatory spending yang mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengawasan, sesuai dengan kaidah alokasi yang berlaku.
2. Secara sektoral, belanja tersebut juga diarahkan pada pemenuhan standar pelayanan minimal masyarakat (SPM) dalam 6 urusan, dan mendukung pencapaian Sustainabel Development Goals atau SDGs/TPB.
3. Belanja Pemerintah Kota Palopo akan diarahkan menggunakan pola money follow the program, sehingga alokasi anggaran akan diarahkan untuk mendukung janji politik kepala daerah, tujuan dan sasaran pembangunan, dan prioritas pembangunan Kota Palopo, yang dalam pengalokasiannya juga akan beririsan dengan dukungan Pemerintah Kota Palopo bagi prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2026.
4. Belanja Pemerintah Kota Palopo tahun 2026 juga akan diarahkan untuk upaya penyelesaian utang belanja Pemerintah Kota Palopo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pada jenis belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel dan transparan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, Belanja tidak terduga diperuntukkan untuk penanganan bencana alam, bencana non alam dan bantuan sosial yang tidak direncanakan.
6. Belanja operasi setiap perangkat daerah diarahkan untuk mendukung operasional perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Palopo 2024-2026. Ini bermakna bahwa belanja akan diarahkan untuk sepenuhnya mendukung prioritas pembangunan Kota Palopo dan mentrigger pembangunan nasional dan Sulsel.

   Alokasi Belanja pada tahun 2026 diuraikan antara lain sebagai berikut:
   - Belanja pegawai yang pengalokasian dananya untuk gaji pegawai dengan asumsi bahwa sudah tidak ada lagi kenaikan gaji pegawai dan diganti dengan Gaji Tunjangan Hari Raya. Akres Gaji sebesar 2,5 % untuk mengantisipasi kenaikan gaji pegawai yang disebabkan Kenaikan Gaji Berkala, kenaikan tunjangan maupun yang disebabkan karena adanya promosi jabatan, pemberian insentif pegawai termasuk gaji ke 13 yang diberikan setiap tahunnya, Iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan PNS, Upah pungut/insentif, Sertifikasi Guru, tambahan penghasilan guru non sertifikasi serta tambahan penghasilan lainnya bagi PNSD, Penyediaan Gaji untuk PPPK, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
   - Belanja hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat, sepanjang berpartisipasi dan mendukung penyelenggaraan pembangunan atau pelayanan dasar di Kota Palopo dan untuk pemberian bantuan kepada partai politik sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri dalam negeri tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
   - Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau membantu masyarakat yang mengalami krisis sosial dan
   - Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan non alam dan/atau bantuan sosial yang tidak direncanakan serta kebutuhan mendesak lainnya.

Dalam rangka menyesuaikan postur fiskal dengan kondisi proyeksi pendapatan tahun 2026, Pemerintah Kota Palopo melakukan penyesuaian signifikan pada struktur belanja, khususnya belanja operasi yang turun sebesar 12,34% dari Rp892,01 miliar di tahun 2025 menjadi Rp782,01 miliar pada tahun 2026. Penurunan ini mencerminkan pendekatan konsolidasi fiskal secara strategis, di mana komponen belanja pegawai dikurangi sebesar 11% sebagai indikasi awal rasionalisasi SDM aparatur, perbaikan manajemen kepegawaian, atau penundaan rekrutmen. Sementara itu, belanja barang dan jasa yang menurun 15% menandakan arah kebijakan efisiensi operasional, penguatan digitalisasi layanan, dan pengurangan belanja yang bersifat non-prioritas. Langkah ini merupakan respons adaptif terhadap tekanan pendapatan serta bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan belanja yang lebih produktif.

Arah kebijakan belanja Kota Palopo pada tahun rencana 2026 menunjukkan perubahan orientasi fiskal yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya alokasi belanja modal sebesar 46%, dari Rp128,88 miliar menjadi Rp187,98 miliar. Kenaikan ini menjadikan belanja modal berkontribusi sebesar 19,0% terhadap total belanja, meningkat 12,4% pada tahun sebelumnya. Transformasi ini mengindikasikan komitmen Pemerintah Daerah terhadap pembangunan infrastruktur strategis dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara teknokratis, arah kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pada pembangunan jangka menengah dan menandakan ruang fiskal yang mulai diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan RPJMD. Lebih

jauh, hal ini membuka peluang eksplorasi skema pembiayaan inovatif seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai strategi untuk mengatasi keterbatasan pendapatan murni.

Meskipun terjadi penghematan dalam komponen belanja operasi, Pemerintah Daerah tetap menunjukkan keberpihakan kepada kelompok rentan melalui peningkatan belanja bantuan sosial dan hibah. Belanja hibah meningkat sebesar 30%, dari Rp9,99 miliar menjadi Rp12,99 miliar, mencerminkan dukungan terhadap sektor non-pemerintah dalam penyelenggaraan fungsi layanan sosial dan keagamaan. Lebih mencolok, belanja bantuan sosial mengalami lonjakan signifikan sebesar 61,73%, dari Rp162 miliar menjadi Rp262 miliar. Kenaikan ini mencerminkan penguatan mandat perlindungan sosial di tengah potensi peningkatan ketimpangan dan kerentanan ekonomi masyarakat. Secara substansi, ini menegaskan bahwa strategi belanja sosial tetap dipertahankan sebagai prioritas meskipun berada dalam tekanan fiskal, sejalan dengan prinsip inklusivitas dan keadilan pembangunan. Belanja tidak terduga tetap dialokasikan sebesar Rp20 miliar pada tahun 2026, setara dengan 1,9% dari total belanja, dan dipertahankan sebagai instrumen mitigasi risiko fiskal terhadap potensi kejadian luar biasa seperti bencana, krisis ekonomi, atau dinamika sosial-politik. Di sisi lain, belanja subsidi tidak dialokasikan pada tahun 2025 maupun 2026, mencerminkan tidak adanya kebijakan subsidi sektoral yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Palopo. Hal yang sama juga berlaku pada belanja transfer antar pemerintah, yang tetap nihil. Stabilitas ini memperlihatkan fokus anggaran pada belanja produktif dan strategis, sekaligus mencerminkan keterbatasan fiskal untuk mendanai program subsidi jangka pendek yang berisiko menekan struktur belanja pembangunan.

Postur anggaran belanja Kota Palopo tahun 2026 menunjukkan konsistensi kebijakan dalam menjaga keseimbangan fiskal. Total belanja diproyeksikan turun sebesar 4,89%, selaras dengan proyeksi penurunan pendapatan, dengan defisit anggaran tetap dalam kendali. Strategi pengalihan alokasi sebesar Rp110 miliar dari belanja operasi ke belanja modal mencerminkan arah kebijakan transformasi struktural. Rasio belanja modal terhadap operasi meningkat dari 14,5% menjadi 24,0%, mencerminkan peningkatan fleksibilitas fiskal meskipun masih dibatasi oleh kapasitas pendapatan riil. Dalam konteks ini, efektivitas belanja modal menjadi perhatian utama, karena peningkatan anggaran perlu diimbangi dengan kesiapan teknis, kapasitas pelaksanaan, serta sinkronisasi dengan proyek prioritas RPJMD. Pemantauan realisasi dan penguatan tata kelola pelaksanaan menjadi prasyarat agar belanja yang ditingkatkan benar-benar menghasilkan output dan outcome pembangunan yang terukur.

Berikut adalah tabel capaian sekaligus menjadi perbandingan kinerja realisasi belanja Pemerintah Kota Palopo sejak 2023-2024, belanja Tahun Berjalan dan proyeksi belanja Tahun 2026 s.d 2027.

Tabel 3.9.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palopo
Tahun 2023 s.d tahun 2027

Uraian	Jumlah				
	Realisasi Tahun (n-3) 2023	Realisasi Tahun (n-2) 2024	Tahun Berjalan (n-1) 2025	Proyeksi/Target pada tahun Rencana (n) 2026	Proyeksi pada tahun (n+1) 2027
BELANJA	**927,786,559,564.18**	**927,628,260,310.17**	**1,040,900,022,653.00**	**990,000,000,000.00**	**994,914,456,874.00**
Belanja Operasi	**745,228,569,827.38**	**827,381,598,042.75**	**892,016,618,126.00**	**782,015,746,806.00**	**785,925,825,540.00**
Belanja Pegawai	428,698,208,691.01	475,635,880,044.29	515,568,718,101.00	456,847,511,362.00	459,131,748,918.00
Belanja Barang dan Jasa	303,586,612,693.37	305,747,676,636.79	364,891,920,385.00	311,008,639,572.00	312,563,682,770.00
Belanja Bunga	1,097,664,953.00	894,669,536.67	1,400,000,000.00	903,616,232.00	908,134,314.00
Belanja Subsidi		0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Hibah	11,735,083,490.00	44,967,371,825.00	9,993,979,640.00	12,993,979,640.00	13,058,949,538.00
Belanja Bantuan Sosial	111,000,000.00	136,000,000.00	162,000,000.00	262,000,000.00	263,310,000.00
Belanja Modal	**182,557,989,736.80**	**100,246,662,267.42**	**128,883,404,527.00**	**187,984,253,194.00**	**188,988,631,334.00**
Belanja Tak Terduga	**0.00**	**0.00**	**20,000,000,000.00**	**20,000,000,000.00**	**20,000,000,000.00**
Belanja Transfer		0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Sumber: Bappeda Kota Palopo

3.2.3.1. Alokasi Belanja Perangkat Daerah

Alokasi pagu belanja perangkat daerah Tahun 2026 bersifat indikatif, dengan prinsip *money follow the program*. Money follow program kami maknai sebagai upaya atau tindakan pengalokasian anggaran sesuai prioritas program pembangunan daerah, bukan berdasarkan tugas pokok atau fungsi sebuah perangkat daerah. Jadi besar kecilnya anggaran perangkat daerah yang dialokasikan, mengikuti prioritas pembangunan yang akan diintervensi, besarnya kontribusi terhadap tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palopo, tidak dialokasikan dengan pertimbangan atau berdasarkan tugas dan fungsi.

Secara umum pagu indikatif perangkat daerah menurun jika dibandingkan dengan pagu belanja daerah pada tahun 2025 yang disebabkan penurunan target pendapatan daerah yang didasarkan pada capaian pendapatan pada tahun 2024.

Berikut adalah tabel Alokasi Pagu Indikatif Belanja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun 2026:

Tabel 3.10.
Jumlah Pagu Alokasi Belanja Perangkat Daerah
Tahun 2026

Kode	Urusan/ Program	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**	**660,859,501,898.00**	
1.01.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**	**200,320,708,058.00**	
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	159,839,813,059.00	Dinas Pendidikan
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	40,442,180,499.00	Dinas Pendidikan
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	19,565,800.00	Dinas Pendidikan
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11,716,200.00	Dinas Pendidikan
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	7,432,500.00	Dinas Pendidikan
1.02.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**	**319,745,399,604.00**	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63,600,024,973.00	Dinas Kesehatan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	112,994,810,719.00	Dinas Kesehatan
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	344,658,503.00	Dinas Kesehatan
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	464,633,739.00	Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	457,650,000.00	Dinas Kesehatan
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33,932,379,670.00	RSUD Sawerigading
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	107,951,242,000.00	RSUD Sawerigading
1.03.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**114,389,818,624.00**	
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20,691,718,495.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	21,541,834,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,360,981,180.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	201,587,080.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,944,787,350.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1,644,047,356.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	16,752,600,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	46,250,262,663.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	62,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	940,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**5,543,113,254.00**	
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,717,554,916.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	308,635,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	1,128,516,738.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	374,850,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	13,556,600.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**	**16,370,799,754.00**	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,980,136,466.00	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2,202,800,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,644,627,706.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	1,048,046,720.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,405,227,862.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1,089,961,000.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**	**4,489,662,604.00**	
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,234,420,732.00	Dinas Sosial
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	182,100,000.00	Dinas Sosial
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	193,200,000.00	Dinas Sosial
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	579,341,872.00	Dinas Sosial
1.06.06	Program Penanganan Bencana	244,312,500.00	Dinas Sosial
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	56,287,500.00	Dinas Sosial
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**93,775,885,134.00**	
2.07.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**	**3,404,290,996.00**	
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,549,778,696.00	Dinas Tenaga Kerja
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	17,100,000.00	
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	492,487,650.00	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	121,172,450.00	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05	Program Hubungan Industrial	223,752,200.00	Dinas Tenaga Kerja
2.08.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**4,354,396,484.00**	
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,843,766,684.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	172,198,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	880,555,200.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	10,060,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	47,853,000.00	Dinas Pemberdayaan

			Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	329,033,600.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.08	2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	70,930,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**	**2,737,275,618.00**	
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,361,496,618.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2,000,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	195,674,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	133,105,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	45,000,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.10.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**	**4,588,781,454.00**	
2.10.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,485,629,858.00	Dinas Pertanahan
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	46,800,000.00	Dinas Pertanahan
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1,920,066,596.00	Dinas Pertanahan
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	119,860,000.00	Dinas Pertanahan
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	5,420,000.00	Dinas Pertanahan
2.10.09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	5,485,000.00	Dinas Pertanahan
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	5,520,000.00	Dinas Pertanahan
2.11.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**	**26,476,057,172.00**	
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,754,776,722.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	150,100,200.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	408,800,200.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3,760,321,200.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	160,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	24,150,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	324,480,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10,400,100.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	13,883,028,750.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Dinas Lingkungan Hidup
2.12.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**3,360,548,678.00**	
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,123,503,678.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	106,525,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	33,895,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi	87,000,000.00	Dinas Kependudukan dan

	Kependudukan		Pencatatan Sipil
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	9,625,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.14.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**7,737,750,254.00**	
2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,717,190,154.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	189,440,100.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2,580,400,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1,250,720,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**	**8,956,829,852.00**	
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,773,059,769.00	Dinas Perhubungan
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3,000,000,000.00	Dinas Perhubungan
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	183,770,083.00	Dinas Perhubungan
2.16.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**	**5,021,189,304.00**	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,375,017,467.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1,331,600,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,314,571,837.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**	**3,473,750,478.00**	
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	480,201,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	4,500,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	8,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	43,500,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	10,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	120,500,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	201,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	2,606,049,478.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**	**5,892,580,128.00**	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,181,382,628.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	166,638,800.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	144,882,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	215,010,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	183,985,800.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	680,900.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**8,106,926,658.00**	
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,198,469,212.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	201,681,800.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4,563,432,852.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	143,342,794.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.20.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**	**2,480,098,154.00**	
2.20.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,389,907,954.00	Dinas Persandian dan Statistik
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	90,190,200.00	Dinas Persandian dan Statistik
2.21.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**	**85,652,700.00**	
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	85,652,700.00	Dinas Persandian dan Statistik
2.22.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**	**2,754,337,780.00**	
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,229,214,780.00	Dinas Kebudayaan
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	188,000,000.00	Dinas Kebudayaan
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	136,755,000.00	Dinas Kebudayaan
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	73,065,000.00	Dinas Kebudayaan
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	112,303,000.00	Dinas Kebudayaan
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	15,000,000.00	Dinas Kebudayaan
2.23.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**	**2,542,638,174.00**	
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,441,688,174.00	Dinas Perpustakaan
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	100,950,000.00	Dinas Perpustakaan
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	0.00	Dinas Perpustakaan
2.24.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**	**1,802,781,250.00**	
2.24.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,730,969,055.00	Dinas Kearsipan
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	64,002,295.00	Dinas Kearsipan
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	7,809,900.00	Dinas Kearsipan
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**41,026,305,442.00**	
3.25.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**	**5,536,029,644.00**	
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,534,293,495.00	Dinas Perikanan
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	691,570,297.00	Dinas Perikanan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	122,861,578.00	Dinas Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	172,854,274.00	Dinas Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	14,450,000.00	Dinas Perikanan
3.26.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**	**6,271,405,808.00**	
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,583,678,008.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2,369,531,800.00	Dinas Pariwisata dan

			Ekonomi Kreatif
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	318,196,000.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.27.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**	**19,258,241,034.00**	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14,016,753,548.00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,487,695,000.00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2,314,210,000.00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	45,000,000.00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	394,582,486.00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	0.00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3.30.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**	**5,384,952,366.00**	
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,064,245,247.02	Dinas Perdagangan
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	633,701,365.98	Dinas Perdagangan
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	452,689,600.00	Dinas Perdagangan
	Program Pengambangan Ekspor	156,843,272.00	Dinas Perdagangan
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	49,248,210.00	Dinas Perdagangan
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	28,224,671.00	Dinas Perdagangan
3.31.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**	**2,468,219,404.00**	
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,354,806,154.00	Dinas Perindustrian
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	95,101,250.00	Dinas Perindustrian
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	5,280,000.00	Dinas Perindustrian
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	13,032,000.00	Dinas Perindustrian
3.32.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**	**2,107,457,186.00**	
3.32.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,107,457,186.00	Dinas Transmigrasi
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0.00	Dinas Transmigrasi
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	**68,098,061,548.00**	
4.01.00	**Sekretariat Daerah**	**41,795,800,268.00**	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33,207,346,043.00	Sekretariat Daerah
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	7,323,980,026.00	Sekretariat Daerah
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	1,264,474,199.00	Sekretariat Daerah
4.02.00	**Sekretariat DPRD**	**26,302,261,280.00**	
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22,622,063,780.00	Sekretariat DPRD
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	3,680,197,500.00	Sekretariat DPRD
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	**61,919,576,226.00**	
5.01.00	**Perencanaan**	**7,308,349,872.00**	

5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,808,349,872.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,500,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,000,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02.00	**Keuangan**	**43,055,839,988.00**	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,488,018,690.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	17,274,818,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,984,335,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,679,788,098.00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,628,880,200.00	Badan Pendapatan Daerah
5.03.00	**Kepegawaian**	**7,060,319,345.00**	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,455,703,200.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	2,604,616,145.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.00	**Pendidikan dan Pelatihan**	**1,349,152,459.00**	
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,349,152,459.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05.00	**Penelitian dan Pengembangan**	**3,145,914,562.00**	
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,451,996,826.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	692,917,736.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Riset dan Inovasi Daerah	1,000,000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**	**10,376,891,114.00**	
6.01.00	**Inspektorat Daerah**	**10,376,891,114.00**	
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,221,275,114.00	Inspektorat
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,006,884,000.00	Inspektorat
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	148,732,000.00	Inspektorat
7	**Unsur Kewilayahan**	**47,952,975,588.00**	
7.01.00	**Kecamatan**	**47,952,975,588.00**	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,164,808,174.00	Kecamatan Wara
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	690,818,000.00	Kecamatan Wara
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12,600,000.00	Kecamatan Wara
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,222,800,000.00	Kecamatan Wara
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,476,865,750.00	Kecamatan Wara Utara
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	582,703,000.00	Kecamatan Wara Utara
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	43,720,000.00	Kecamatan Wara Utara
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	139,447,482.00	Kecamatan Wara Utara
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,944,978,539.00	Kecamatan Wara Timur

	Kabupaten/Kota		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	799,531,550.00	Kecamatan Wara Timur
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4,236,525.00	Kecamatan Wara Timur
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	291,472,920.00	Kecamatan Wara Timur
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,763,909,622.00	Kecamatan Wara Barat
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	567,441,550.00	Kecamatan Wara Barat
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	22,800,000.00	Kecamatan Wara Barat
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	207,400,000.00	Kecamatan Wara Barat
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,813,743,312.00	Kecamatan Wara Selatan
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	432,983,000.00	Kecamatan Wara Selatan
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3,700,000.00	Kecamatan Wara Selatan
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	179,200,000.00	Kecamatan Wara Selatan
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,330,783,528.00	Kecamatan Bara
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	330,401,910.00	Kecamatan Bara
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	16,000,000.00	Kecamatan Bara
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,112,400,000.00	Kecamatan Bara
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,652,868,102.00	Kecamatan Mungkajang
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	439,065,056.00	Kecamatan Mungkajang
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5,205,000.00	Kecamatan Mungkajang
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	154,242,000.00	Kecamatan Mungkajang
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,705,092,106.00	Kecamatan Sendana
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	464,915,000.00	Kecamatan Sendana
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4,950,000.00	Kecamatan Sendana
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	151,200,000.00	Kecamatan Sendana
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,012,593,462.00	Kecamatan Telluwanua
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	700,000,000.00	Kecamatan Telluwanua
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	712,500,000.00	Kecamatan Telluwanua
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	795,600,000.00	Kecamatan Telluwanua
8	**Unsur Pemerintahan Umum**	**5,990,803,050.00**	
8.01.00	**Kesatuan Bangsa dan Politik**	**5,990,803,050.00**	
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,200,286,910.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	698,089,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	944,903,140.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	114,665,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	34,335,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	998,524,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Total		**990,000,000,000.00**	

Sumber: Bappeda Kota Palopo

Tabel 3.11.
Proyeksi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kota Palopo
Tahun 2026

Urusan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	**660,859,501,898.00**	
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	200,320,708,058.00	Dinas Pendidikan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	177,861,777,934.00	Dinas Kesehatan
	141,883,621,670.00	RSUD Sawerigading
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	114,389,818,624.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	5,543,113,254.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	7,182,936,466.00	Satuan Polisi Pamong Praja
	3,692,674,426.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	5,495,188,862.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	4,489,662,604.00	Dinas Sosial
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**93,775,885,134.00**	
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	3,404,290,996.00	Dinas Tenaga Kerja
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,354,396,484.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2,737,275,618.00	Dinas Ketahanan Pangan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	4,588,781,454.00	Dinas Pertanahan
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	26,476,057,172.00	Dinas Lingkungan Hidup
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,360,548,678.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7,737,750,254.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	8,956,829,852.00	Dinas Perhubungan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	5,021,189,304.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	3,473,750,478.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	5,892,580,128.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8,106,926,658.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	2,480,098,154.00	Dinas Persandian dan Statistik
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	85,652,700.00	Dinas Persandian dan Statistik
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2,754,337,780.00	Dinas Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2,542,638,174.00	Dinas Perpustakaan
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	1,802,781,250.00	Dinas Kearsipan
Urusan Pemerintahan Pilihan	**41,026,305,442.00**	
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	5,536,029,644.00	Dinas Perikanan
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	6,271,405,808.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	19,258,241,034.00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	5,384,952,366.00	Dinas Perdagangan
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	2,468,219,404.00	Dinas Perindustrian
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	2,107,457,186.00	Dinas Transmigrasi
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	**68,098,061,548.00**	
Sekretariat Daerah	41,795,800,268.00	Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD	26,302,261,280.00	Sekretariat DPRD

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	**61,919,576,226.00**	
Perencanaan	7,308,349,872.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Keuangan	30,747,171,690.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	12,308,668,298.00	Badan Pendapatan Daerah
Kepegawaian	8,409,471,804.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penelitian dan Pengembangan	3,145,914,562.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	**10,376,891,114.00**	
Inspektorat Daerah	10,376,891,114.00	Inspektorat
Unsur Kewilayahan	**47,952,975,588.00**	
Kecamatan Wara	6,091,026,174.00	Kecamatan Wara
Kecamatan Wara Utara	5,242,736,232.00	Kecamatan Wara Utara
Kecamatan Wara Timur	7,040,219,534.00	Kecamatan Wara Timur
Kecamatan Wara Barat	4,561,551,172.00	Kecamatan Wara Barat
Kecamatan Wara Selatan	4,429,626,312.00	Kecamatan Wara Selatan
Kecamatan Bara	5,789,585,438.00	Kecamatan Bara
Kecamatan Mungkajang	4,251,380,158.00	Kecamatan Mungkajang
Kecamatan Sendana	4,326,157,106.00	Kecamatan Sendana
Kecamatan Telluwanua	6,220,693,462.00	Kecamatan Telluwanua
Unsur Pemerintahan Umum	**5,990,803,050.00**	
Kesatuan Bangsa dan Politik	5,990,803,050.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH	**990,000,000,000.00**	

Sumber: Bappeda Kota Palopo

3.2.3.2. Alokasi Belanja Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh Undang-Undang yang bertujuan mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Ini merupakan besaran dana wajib yang disediakan pemerintah dalam formula APBD, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan perintah Undang-Undang.
Berikut adalah proporsi mandatory spending sesuai kebijakan kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
2. Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).
4. Bagi pemerintah kabupaten/kota, yang nilai APBD-nya sampai dengan 1 Triliyun, maka lokasi anggaran untuk Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dialokasikan 1% dari total APBD. (berlaku sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020)

Berikut adalah rencana alokasi Belanja Pemerintah Kota Palopo sebagai upaya pemenuhan mandatory spending pada Tahun 2026:

Tabel 3.12.
Rencana Alokasi Belanja Pemerintah Kota Palopo
Untuk Pemenuhan Mandatory Spending Tahun 2026

Mandatory Spanding	Alokasi (%)	Urusan/ Program	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pendidikan	**21.64**		**214,210,807,439.00**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	159,839,813,059.00	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	40,442,180,499.00	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	344,658,503.00	Dinas Pendidikan

		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	464,633,739.00	Dinas Pendidikan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	457,650,000.00	Dinas Pendidikan
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	492,487,650.00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,441,688,174.00	Dinas Perpustakaan
		Program Pembinaan Perpustakaan	2,441,688,174.00	Dinas Perpustakaan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	-	Dinas Perpustakaan
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	324,480,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	201,681,800.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4,563,432,852.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	143,342,794.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	10,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Penyuluhan Pertanian	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,349,152,459.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	692,917,736.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Riset dan Inovasi Daerah	1,000,000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kesehatan	**26.13**		**258,725,774,631.00**	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	112,994,810,719.00	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	344,658,503.00	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	464,633,739.00	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	457,650,000.00	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33,932,379,670.00	RSUD Sawerigading
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	107,951,242,000.00	RSUD Sawerigading
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2,580,400,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Infrastruktur	**27.69**		**274,099,334,508.50**	
		Program Pengelolaan Pendidikan	40,442,180,499.00	Dinas Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	56,497,405,359.50	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	53,975,621,000.00	RSUD Sawerigading

		Masyarakat		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	21,541,834,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,360,981,180.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	201,587,080.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,944,787,350.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1,644,047,356.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Permukiman	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan Gedung	16,752,600,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	46,250,262,663.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Perumahan	308,635,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	1,128,516,738.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	374,850,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2,369,531,800.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1,920,066,596.00	Dinas Pertanahan
		Program Pengelolaan Persampahan	13,883,028,750.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3,000,000,000.00	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1,331,600,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,314,571,837.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,487,695,000.00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2,369,531,800.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	**1.05**		**10,376,891,114.00**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,221,275,114.00	Inspektorat

		Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,006,884,000.00	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	148,732,000.00	Inspektorat

Sumber: Bappeda Kota Palopo

3.2.3.3. Alokasi Belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kerangka regulasi yang dipedomani Pemerintah Kota Palopo dalam RKPD Tahun 2026 terkait Standar pelayanan minimal (SPM) adalah Permendagri 59/2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan. Untuk dalam mendukung SPM Pemerintah Kota Palopo merencanakan mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. 253,753,722,069.00 atau 26.69% dari total APBD pada RKPD 2026

Berikut adalah alokasi dukungan belanja Pemerintah kota Palopo bagi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM):

Tabel 3.13.
Rencana Alokasi Belanja Pemerintah Kota Palopo
Untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026

No.	Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Program Pengelolaan Pendidikan	40,442,180,499.00	Dinas Pendidikan
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	112,994,810,719.00	Dinas Kesehatan
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	107,951,242,000.00	RSUD Sawerigading
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,360,981,180.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1,644,047,356.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2,202,800,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Program Penanggulangan Bencana	1,048,046,720.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1,089,961,000.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9	Program Rehabilitasi Sosial	579,341,872.00	Dinas Sosial
10	Program Penanganan Bencana	56,287,500.00	Dinas Sosial
	JUMLAH	**269,369,698,846.00**	**27.21%**

Sumber: Bappeda Kota Palopo

3.2.3.4. Alokasi Belanja SDGS/TPB

Untuk dalam mendukung pencapaian SDGs Pemerintah Kota Palopo merencanakan akan mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. 455,086,936,881.00 atau 48% dari rencana total Belanja Daerah Pemerintah Kota Palopo. Karena beririsan dengan sejumlah prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kota Palopo, satu program bisa memberikan efek pada lebih dari satu tujuan pembangunan dalam SDGs.
Berikut adalah alokasi dukungan belanja Pemerintah kota Palopo bagi pencapaian SDGs :

Tabel 3.14.
Rencana Alokasi Belanja Pemerintah Kota Palopo
Untuk Dukungan Bagi SDGs/TPB Tahun 2026

Tujuan TPB/SDGs	Program Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
TUJUAN 1 (Tanpa Kemiskinan)		**6,295,938,692.00**	
	Program Pemberdayaan Sosial	182,100,000.00	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	579,341,872.00	Dinas Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	244,312,500.00	Dinas Sosial

	Program Penanganan Bencana	56,287,500.00	Dinas Sosial
	Program Pengendalian Penduduk	189,440,100.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2,580,400,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1,250,720,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	10,060,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak
	Program Pencatatan Sipil	33,895,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	87,000,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Penanggulangan Bencana	1,048,046,720.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	34,335,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TUJUAN 2 (Tanpa Kelaparan)		**826,468,600.00**	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	195,674,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	133,105,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	45,000,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	452,689,600.00	Dinas Perdagangan
TUJUAN 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)		**224,328,761,222.00**	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	112,994,810,719.00	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	107,951,242,000.00	RSUD Sawerigading
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	457,650,000.00	Dinas Kesehatan
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2,580,400,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	344,658,503.00	Dinas Kesehatan
TUJUAN 4 (Pendidikan Berkualitas)		**116,245,791,135.00**	
	Program Pengelolaan Pendidikan	112,994,810,719.00	Dinas Pendidikan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	464,633,739.00	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	344,658,503.00	Dinas Pendidikan
	Program Pembinaan Perpustakaan	2,441,688,174.00	Dinas Perpustakaan
TUJUAN 5 (Kesetaraan Gender)		**549,084,600.00**	
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	172,198,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	47,853,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak
	2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	329,033,600.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak
	Program Pengelolaan Pendidikan	sudah dianggarkan di tujuan 4	Dinas Pendidikan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	sudah dianggarkan di tujuan 3	Dinas Kesehatan/RSUD
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	sudah dianggarkan di tujuan 1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	sudah dianggarkan di tujuan 3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	sudah dianggarkan di tujuan 1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TUJUAN 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak)		**29,491,650,386.00**	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,360,981,180.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1,644,047,356.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4,944,787,350.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	21,541,834,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TUJUAN 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)		**19,691,137,535.98**	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	492,487,650.00	Dinas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	121,172,450.00	Dinas Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial	223,752,200.00	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	166,638,800.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal	144,882,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	318,196,000.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4,563,432,852.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	201,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	43,500,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	120,500,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan UMKM	2,606,049,478.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	8,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penatagunaan Tanah	5,520,000.00	Dinas Pertanahan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	691,570,297.00	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	691,570,297.00	Dinas Perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	122,861,578.00	Dinas Perikanan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,487,695,000.00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2,314,210,000.00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	45,000,000.00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	394,582,486.00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Program Penyuluhan Pertanian	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2,000,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	633,701,365.98	Dinas Perdagangan
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	156,843,272.00	Dinas Perdagangan

	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	49,248,210.00	Dinas Perdagangan
	Program Pelayanan Penanaman Modal	215,010,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	183,985,800.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2,369,531,800.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program Pemasaran Pariwisata	318,196,000.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
TUJUAN 9 (Industri, Innovasi dan Infrastruktur)		**50,544,165,996.00**	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	95,101,250.00	Dinas Perindustrian
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	13,032,000.00	Dinas Perindustrian
	Program Penataan Bangunan Gedung	46,250,262,663.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan	940,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3,000,000,000.00	Dinas Perhubungan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Pelayaran	183,770,083.00	Dinas Perhubungan
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	62,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TUJUAN 10 (Berkurangnya Kesenjangan)		**1,142,073,338.00**	
	Program Kawasan Permukiman	1,128,516,738.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	13,556,600.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Pendidikan	sudah dianggarkan di tujuan 4 dan 5	Dinas Pendidikan
	Program Hubungan Industrial	sudah dianggarkan di tujuan 8	Dinas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	sudah dianggarkan di tujuan 8	Dinas Tenaga Kerja
TUJUAN 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)		**1,417,637,600.00**	
	Program Kawasan Permukiman	sudah dianggarkan di tujuan 10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	sudah dianggarkan di tujuan 10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Perumahan	308,635,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	13,556,600.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Permukiman	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	5,485,000.00	Dinas Pertanahan
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	-	Dinas Transmigrasi
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1,089,961,000.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

TUJUAN 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)		**14,714,769,569.00**	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	160,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	13,883,028,750.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	201,587,080.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	464,633,739.00	Dinas Kesehatan
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	5,520,000.00	Dinas Pertanahan
TUJUAN 13 (Penanganan Perubahan Iklim)		**1,694,080,400.00**	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	940,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	324,480,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	408,800,200.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	10,400,100.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10,400,100.00	Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN 15 (Ekosistem Darat)		**3,934,571,400.00**	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	150,100,200.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3,760,321,200.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	24,150,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)		**55,567,757,626.00**	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4,158,034,920.00	Kecamatan
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	56,287,500.00	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	998,524,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Perlindungan Perempuan	880,555,200.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	70,930,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2,202,800,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	457,650,000.00	Dinas Pendidikan
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	17,274,818,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,984,335,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,500,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,000,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	7,323,980,026.00	Sekretariat Daerah
	Program Perekonomian dan Pembangunan	1,264,474,199.00	Sekretariat Daerah

	Program Kepegawaian Daerah	2,604,616,145.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,349,152,459.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,006,884,000.00	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	148,732,000.00	Inspektorat
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	3,680,197,500.00	Sekretariat DPRD
	Program Pendaftaran Penduduk	106,525,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1,331,600,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,314,571,837.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	85,652,700.00	Dinas Persandian dan Statistik
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	4,500,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	5,280,000.00	Dinas Perindustrian
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	698,089,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	944,903,140.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	114,665,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TUJUAN 17 (Kemitraan Mencapai Tujuan)		**12,840,048,399.00**	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,628,880,200.00	Badan Pendapatan Daerah
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	143,342,794.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5,007,859,066.00	Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	921,439,007.00	Kecamatan
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	692,917,736.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1,920,066,596.00	Dinas Pertanahan
	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	5,420,000.00	Dinas Pertanahan
	Program Pengembangan Kebudayaan	188,000,000.00	Dinas Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	136,755,000.00	Dinas Kebudayaan
	Program Pembinaan Sejarah	73,065,000.00	Dinas Kebudayaan
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	112,303,000.00	Dinas Kebudayaan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	sudah dianggarkan di tujuan 8	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	10,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	-	Dinas Perpustakaan
	TOTAL DUKUNGAN	**539,283,936,498.98**	**54.47%**

Sumber: Bappeda Kota Palopo

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Istilah pembiayaan berbeda dengan pendanaan (funding). Pendanaan diartikan sebagai dana atau uang dan digunakan sebagai kata umum, sedangkan pembiayaan diartikan sebagai penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 2026, jika dalam perhitungan RAPBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Kebijakan pembiayaan daerah Kota Palopo pada tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026 menunjukkan pola yang sangat konservatif dan relatif statis. Hal ini tercermin dari seluruh komponen penerimaan pembiayaan, hanya dari sisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang terdapat anggaran sebesar Rp.50jt selebihnya dari komponen pencairan dana cadangan, hasil penjualan aset, pinjaman daerah, maupun penerimaan piutang tidak dianggarkan atau nihil. Sama halnya di sisi pengeluaran pembiayaan, hanya terdapat satu komponen aktif, yaitu pembayaran pokok utang yang tetap sebesar Rp2,94 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto menunjukkan defisit yang konstan sebesar Rp2,94 miliar, tanpa adanya upaya kompensasi dari penerimaan pembiayaan. Ini mencerminkan pola pembiayaan yang sangat berhati-hati, berisiko rendah. Pola pembiayaan ini menunjukkan pendekatan fiskal ultra-konservatif, dengan fokus pada penghindaran risiko dan tanpa pengaktifan instrumen pembiayaan tambahan. Tidak adanya mobilisasi aset daerah maupun penggunaan pinjaman baru mengindikasikan ketergantungan penuh pada pendapatan asli daerah dan transfer pusat dalam membiayai pembangunan. Di sisi lain, kewajiban rutin pembayaran pokok utang tetap dilaksanakan meskipun tidak ada penerimaan pembiayaan, yang berimplikasi pada pengurangan likuiditas kas daerah. Pendekatan ini dapat dinilai aman secara jangka pendek, namun dalam jangka menengah cenderung membatasi kapasitas fiskal untuk mendorong belanja strategis, terutama dalam situasi pendapatan yang fluktuatif.

Adapun komposisi realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kota Palopo Tahun 2023-2024, tahun berjalan (2025) dan proyeksi tahun 2026-2027 diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Palopo
Tahun 2023 s.d tahun 2027

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
	Realisasi Tahun (n-3) 2023	Realisasi Tahun (n-2) 2024	Tahun Berjalan (n-1) 2025	Proyeksi/Target pada tahun Rencana (n) 2026	Proyeksi pada tahun (n+1) 2027
Penerimaan Pembiayaan					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14,907,764,409.58	18,000,000,000.00	0.00	50,000,000.00	
Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**14,907,764,409.58**	**18,000,000,000.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**
Pengeluaran Pembiayaan					
Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pembayaran Pokok Utang	1,470,686,565.00	2,941,375,000.00	2,941,375,000.00	2,941,375,000.00	2,941,375,000.00
Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1,470,686,565.00**	**2,941,375,000.00**	**2,941,375,000.00**	**2,941,375,000.00**	**2,941,375,000.00**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**13,437,077,844.58**	**15,058,625,000.00**	**(2,941,375,000.00)**	**(2,891,375,000.00)**	**(2,941,375,000.00)**

Sumber: Bappeda Kota Palopo

Selengkapnya Target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dalam RKPD Tahun 2026 yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.16.
RINGKASAN RKPD PEMERINTAH KOTA PALOPO
Tahun 2023 s.d tahun 2027

Uraian	Jumlah				
	Realisasi Tahun (n-3) 2023	Realisasi Tahun (n-2) 2024	Tahun Berjalan (n-1) 2025	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (n) 2026	Proyeksi/Target Pada Tahun (n+1) 2027
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah	**194,013,652,599.96**	**206,389,036,709.35**	**270,437,146,000.00**	**237,316,092,834.01**	**238,502,673,298.00**
Pajak Daerah	46,687,824,782.00	48,534,432,801.00	77,614,970,000.00	69,019,777,129.01	69,364,876,014.00
Retribusi Daerah	10,560,295,890.00	140,371,347,175.00	162,184,176,000.00	149,796,315,705.00	150,545,297,284.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,347,070,226.00	8,020,016,252.00	8,500,000,000.00	9,000,000,000.00	9,045,000,000.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	129,418,461,701.96	9,463,240,481.35	22,138,000,000.00	9,500,000,000.00	9,547,500,000.00
Pendapatan Transfer	**736,792,265,269.75**	**709,128,722,423.00**	**773,404,251,653.00**	**755,575,282,165.24**	**759,353,158,576.00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	***658,230,414,371.00***	***654,149,905,364.00***	***693,551,541,000.00***	***692,046,676,935.65***	***695,506,910,320.00***
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak	13,754,459,389.00	17,007,888,762.00	15,548,450,000.00	17,177,967,649.62	17,263,857,488.00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	3,819,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	504,787,401,000.00	521,857,620,000.00	535,839,357,000.00	558,431,468,718.01	561,223,626,062.00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus	135,869,549,982.00	115,284,396,602.00	142,163,734,000.00	116,437,240,568.02	117,019,426,770.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	***5,930,155,000.00***	***0.00***	***6,442,293,000.00***	***8,000,000,000.00***	***8,040,000,000.00***
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Insentif Fiskal	5,930,155,000.00	0.00	6,442,293,000.00	8,000,000,000.00	8,040,000,000.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	***72,631,695,898.75***	***54,978,817,059.00***	***73,410,417,653.00***	***55,528,605,229.59***	***55,806,248,256.00***
Pendapatan Bagi Hasil	68,267,853,898.75	46,874,632,059.00	56,754,292,853.00	47,343,378,379.59	47,580,095,272.00
Bantuan Keuangan	4,363,842,000.00	8,104,185,000.00	16,656,124,800.00	8,185,226,850.00	8,226,152,984.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan	**12,281,670,655.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Lainnya	12,281,670,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN	**943,087,588,524.71**	**915,517,759,132.35**	**1,043,841,397,653.00**	**992,891,374,999.25**	**997,855,831,874.00**
BELANJA					
Belanja Operasi	**745,228,569,827.38**	**827,381,598,042.75**	**892,016,618,126.00**	**782,015,746,806.00**	**785,925,825,540.00**
Belanja Pegawai	428,698,208,691.01	475,635,880,044.29	515,568,718,101.00	456,847,511,362.00	459,131,748,918.00
Belanja Barang dan Jasa	303,586,612,693.37	305,747,676,636.79	364,891,920,385.00	311,008,639,572.00	312,563,682,770.00
Belanja Bunga	1,097,664,953.00	894,669,536.67	1,400,000,000.00	903,616,232.00	908,134,314.00
Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Hibah	11,735,083,490.00	44,967,371,825.00	9,993,979,640.00	12,993,979,640.00	13,058,949,538.00

Belanja Bantuan Sosial	111,000,000.00	136,000,000.00	162,000,000.00	262,000,000.00	263,310,000.00
Belanja Modal	**182,557,989,736.80**	**100,246,662,267.42**	**128,883,404,527.00**	**187,984,253,194.00**	**188,988,631,334.00**
Belanja Tak Terduga	**0.00**	**0.00**	**20,000,000,000.00**	**20,000,000,000.00**	**20,000,000,000.00**
Belanja Transfer	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
JUMLAH BELANJA	**927,786,559,564.18**	**927,628,260,310.17**	**1,040,900,022,653.00**	**990,000,000,000.00**	**994,914,456,874.00**
Total Surplus/(Defisit)	**15,301,028,960.53**	**(12,110,501,177.82)**	**2,941,375,000.00**	**2,891,374,999.25**	**2,941,375,000.00**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**14,907,764,409.58**	**18,000,000,000.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14,907,764,409.58	18,000,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1,470,686,565.00**	**2,941,375,000.00**	**2,941,375,000.00**	**2,941,375,000.00**	**2,941,375,000.00**
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1,470,686,565.00	2,941,375,000.00	2,941,375,000.00	2,941,375,000.00	2,941,375,000.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**13,437,077,844.58**	**15,058,625,000.00**	**(2,941,375,000.00)**	**(2,891,375,000.00)**	**(2,941,375,000.00)**
Pembiayaan Netto	**13,437,077,844.58**	**15,058,625,000.00**	**(2,941,375,000.00)**	**(2,891,375,000.00)**	**(2,941,375,000.00)**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**28,738,106,805.11**	**2,948,123,822.18**	**0.00**	**(0.75)**	**0.00**
TOTAL APBD	**927,786,559,564.18**	**927,628,260,310.17**	**1,040,900,022,653.00**	**990,000,000,000.00**	**994,914,456,874.00**

Sumber: Bappeda Kota Palopo

3.2.5. Pendanaan Pembangunan Lainnya

Sesuai semangat Otonomi Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka tantangan Pemerintah Kota Palopo adalah bagaimana meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, yang akan selalu diperhadapkan pada keterbatasan anggaran pembangunan. Olehnya ada tiga alternative pembiayaan pembangunan yang bisa ditempuh yakni Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Obligasi dan Corporate Sosial Responsibility (CSR).

3.2.5.1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) (*Public Private Partnership)*

Keterbatasan APBD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberpa alternatif pendanaan, salah satunya dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai *Public Private Partnership (PPP).*

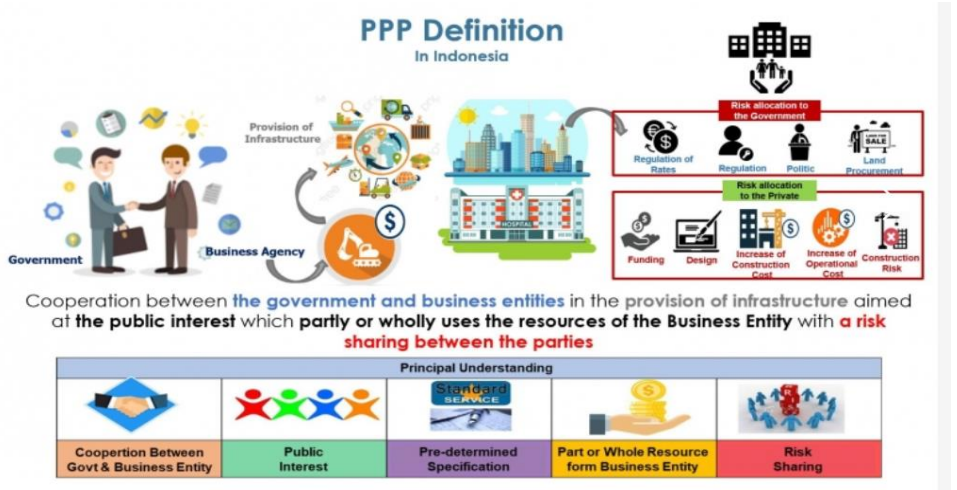

PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resiko.

KPBU sebagaimana amanat Perpres No.38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Dalam Penyediaan Infrastruktur antara lain:

1. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
2. Termasuk ke dalam 19 jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
3. Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (Value for Money) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

3.2.5.2. Obligasi

Merupakan pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat dan diterbitkan melalui pasar modal domestik dengan menggunakan mata uang rupiah.Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal. Obligasi daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat dan provinsi dengan memanfaatkan dana dari masyarakat.

Obligasi Daerah merupakan pinjaman jangka panjang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.Dikeluarkan dalam mata uang rupiah.Hasil penjualan digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karakteristik Kegiatan yang Dapat Didanai dengan Obligasi Daerah antara lain: Kegiatan investasi sarana dan prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik dan menghasilkan penerimaan bagi APBD, sesuai dengan dokumen perencanaan daerah, merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada, dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari obligasi daerah.

Kegiatan yang didanai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah. Menurut DJPK beberapa pekerjaan yang dapat dilaksanakan adalah Pelayanan air minum, Penanganan limbah dan persampahan, Transportasi, Rumah sakit, Pasar tradisional, Tempat perbelanjaan, Pusat hiburan, Wilayah wisata dan pelestarian alam, Terminal dan sub-terminal, Perumahan dan rumah susun, Pelabuahan lokal dan regional.

3.2.5.3. Coorporate Social Responsibility (CSR)

Adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. CSR juga merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Beberapa potensi bidang pelayanan yang bisa diintervensi dengan pola CSR adalah perbaikan layanan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pembangunan dan penyediaan infrastruktur, pembinaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan bidang lain sepanjang bersinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palopo.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memiliki peran strategis dalam memastikan kesinambungan pembangunan di Kota Palopo. Sebagai tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo 2024-2026, RKPD 2026 menjadi instrumen penting dalam menuntaskan berbagai target pembangunan yang telah dirancang, sekaligus menjadi refleksi terhadap capaian pembangunan daerah sebelum memasuki periode perencanaan berikutnya.

Dokumen RKPD 2026 juga merupakan dokumen peralihan yang menjembatani transisi dari RPD menuju Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo 2025-2029. Dalam perannya ini, RKPD 2026 tidak hanya harus mampu mengawal penyelesaian agenda pembangunan sebelumnya, tetapi juga mulai mengakomodasi arah kebijakan baru yang selaras dengan visi jangka panjang Kota Palopo sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2025-2045.

Secara normatif, RKPD 2026 yang menjadi dokumen transisi idealnya memiliki karakteristik unik karena harus mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan yang telah berjalan dengan visi, misi, serta program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2029. Dengan berpedoman pada janji politik kepala daerah yang baru, RKPD 2026 harus dapat memastikan bahwa arah pembangunan Kota Palopo tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta daya saing ekonomi lokal. Tetapi mengingat dinamika politik Kota Palopo, nampaknya visi misi serta janji politik Walikota dan Wakil Walikota Palopo periode 2025-2029, belum akan diakomodir dalam RKPD ini, sebab sampai dengan ditetapkan bulan Juni 2026, walikota dan wakil walikota Palopo secara resmi belum dilantik. Dampaknya elemen kunci perencanaan dalam RKPD ini, masih akan menjadi RPD Kota Palopo 2024-2026 sebagai referensi utama, sampai diterbitkannya RPJMD Kota Palopo 2025-2029.

Disisi lain, sebagai periode awal implementasi RPJPD 2025-2045, RKPD 2026 juga harus mulai meletakkan fondasi bagi transformasi jangka panjang yang mencakup penguatan sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan ketahanan ekonomi dan lingkungan dalam menghadapi tantangan global dan perubahan iklim.

Dalam skala yang lebih luas, RKPD 2026 Kota Palopo juga akan diserasikan dengan kebijakan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto serta kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Di tingkat nasional, berbagai agenda prioritas seperti penyediaan makan siang gratis bagi siswa, peningkatan ketahanan pangan dan energi, serta penanganan kemiskinan esktrem, stunting, inflasi dan penanganan anak putus sekolah harus diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah yang relevan dan kontekstual dengan kebutuhan Kota Palopo.

Disisi lain, kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi berbasis inovasi, peningkatan kualitas layanan publik, serta pembangunan infrastruktur strategis harus menjadi acuan bagi perumusan program prioritas daerah. Dengan demikian, RKPD 2026 Kota Palopo diharapkan menjadi dokumen yang tidak hanya menjamin kesinambungan pembangunan, tetapi juga responsif terhadap dinamika kebijakan nasional dan regional, sehingga mampu mendorong Kota Palopo menuju pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Olehnya, sasaran dan prioritas pembangunan Kota Palopo Tahun 2026 diharapkan dapat memastikan kesinambungan pembangunan yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 serta sebagai bagian dari transisi menuju Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Sebagai tahun terakhir dalam siklus RPD, perencanaan pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk menuntaskan target-target strategis yang belum tercapai, sekaligus menjadi titik awal implementasi visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2029. Oleh karena itu, sasaran pembangunan Kota Palopo pada tahun ini harus mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, dengan tetap berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat serta potensi unggulan daerah.

Dalam menentukan prioritas pembangunan tahun 2026, Pemerintah Kota Palopo berpedoman pada agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, serta kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Sejumlah program prioritas nasional, seperti peningkatan ketahanan pangan dan energi, percepatan transformasi digital, penguatan ekonomi berbasis teknologi, serta pemerataan pembangunan infrastruktur, akan diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan Kota Palopo sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Selain itu, sasaran pembangunan juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial dan meningkatkan kualitas layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial yang lebih inklusif dan adaptif.

Dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan yang kompleks, Pemerintah Kota Palopo menetapkan sasaran pembangunan 2026 yang berorientasi pada sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta keberlanjutan lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, prioritas pembangunan akan difokuskan pada pengembangan sektor basic dan potensial daerah, serta penguatan ketahanan kota terhadap berbagai risiko, termasuk perubahan iklim dan ketahanan pangan. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berbasis bukti,

pembangunan Kota Palopo tahun 2026 diharapkan mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta ketahanan lingkungan yang berkelanjutan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Palopo dalam RKPD 2026 merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024-2026 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2023 tentang RPD Kota Palopo periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Tujuan Pembangunan Daerah Kota Palopo 2026;
   1) Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas (T1);
   2) Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Daerah yang Berkualitas (T2);
   3) Terwujudnya Lingkungan Layak Huni dan Berkelanjutan (T3).

2. Rancangan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2026;
   1) Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1);
   2) Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha (S2 3);
   3) Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas (S3);
   4) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (S4);
   5) Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kualitas Lingkungan Perkotaaan (S5).

Berikut adalah tabel tujuan dan sasaran serta Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Kota Palopo Tahun 2026

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Kota Palopo Tahun 2026

Tujuan (T) dan Sasaran RPD (S)		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian Kinerja	Target Kinerja RKPD	Target Kinerja RPD
				2024	2026	2026
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas (T1)	1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Poin	85.31	88	88
Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1)	2	Indeks Reformasi Birokrasi – I.S1.1	Poin	61.62	71-80	81-90
	3	Indeks SAKIP – I.S1.2	Poin	64.3	71-80	81-90
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat & Perekonomian Daerah yang Berkualitas (T2)	4	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta/Kapita/Thn	56.65	62.38*	65
	5	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7.35	7.06-6.89*	7,06
Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha (S2)	6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) – I.S2.1	Persen	7.64	7.46*	7,75
Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas (S3)	7	Angka Pertumbuhan Ekonomi - I.S3.2	Persen	4.4	5.29*	6,62
	8	Gini Rasio - I.S3.3	Koefisien	0.346	0,320*	0,319
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (S4)	9	Indeks Pembangunan Manusia – I.S4.1	Poin	81.25	82.22*	82,22
	10	Indeks Pembangunan Gender – I.S4.2	Poin	97.71	97.39	97,39
Terwujudnya Lingkungan Layak Huni dan Berkelanjutan (T3)	11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69.24	70	62
Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kualitas Lingkungan Perkotaaan (S5)	12	Indeks Resiko Bencana – I.S5-1	P Predikat	187.91	185	185
	13	Luas Wilayah yang Tergenang/Terdampak Banjir	Ha	13	5	5

Tujuan (T) dan Sasaran RPD (S)			Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian Kinerja	Target Kinerja RKPD	Target Kinerja RPD
					2024	2026	2026
		14	Persentase Luas Kawasan Kumuh dari Total Luas Wilayah Kota – I.S5-3	Persen	1.06	0.5	0,5

**Target kinerja makro daerah 2026, sesuai hasil asistensi dengan Pemprov Sulsel*

Sesuai tabel diatas, terdapat penyesuaian target kinerja sejumlah indikator kinerja utama pada tahun 2026. Penyesuaian yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan target RPD ini mencerminkan penyesuaian taktis yang dilakukan Pemerintah Kota Palopo dengan mempertimbangkan dinamika dan kapasitas aktual intervensi yang dapat dilakukan Kota Palopo. Tetapi bukan dimaknai sebagai pelemahan komitmen terhadap sasaran pembangunan jangka menengah. Target RPD bersifat normatif, sedangkan RKPD merupakan penjabaran teknokratik tahunan yang mempertimbangkan realisasi yang telah dicapai, prediksi fiskal, dan daya dukung kebijakan sektoral.

Penyesuaian Target Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Target capaian indeks RB Kota Palopo disesuaikan menjadi 71-80 poin pada tahun 2026, lebih rendah dibandingkan target RPD 2026 yakni 81-90 poin. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pada tahun 2024, nilai Indeks RB Kota Palopo masih berada pada angka 61.62 poin. Gap capaian cukup besar ini mengindikasikan jika reformasi birokrasi Kota Palopo masih pada tahap penguatan fondasi, termasuk aspek penataan organisasi, SDM ASN, serta manajemen kinerja berbasis RB. Oleh karena itu, target RKPD 2026 ditetapkan lebih moderat agar tetap realistis dan terukur, mengingat peningkatan skor RB secara nasional bersifat bertahap dan berbasis validasi oleh KemenPAN-RB.

Penyesuaian Target Kinerja Indeks SAKIP

Target capaian indeks SAKIP Kota Palopo disesuaikan menjadi 71-80 poin pada tahun 2026, lebih rendah dibandingkan target RPD 2026 yakni 81-90 poin. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pada tahun 2024, nilai Indeks RB Kota Palopo masih berada pada angka 64.30 poin. SAKIP Kota Palopo masih berada di level B, yang menggambarkan bahwa sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja belum sepenuhnya integratif. Kota Palopo masih membutuhkan internalisasi lebih lanjut dan lebih jauh ke seluruh perangkat daerah agar penguatan SAKIP berjalan efektif. Target RKPD disesuaikan sebagai upaya menutup gap ±7 poin dengan mempertimbangkan kapasitas SDM perencana dan sistem evaluasi kinerja yang masih dalam penguatan.

Penyesuaian Target Kinerja PDRB per Kapita (ADHB)

Target capaian PDRB per kapita Kota Palopo disesuaikan menjadi 62.38 juta/kapita/tahun pada tahun 2026, lebih pesimis dibandingkan target RPD 2026 yakni 65 juta/kapita/tahun. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pada tahun 2024, nilai cspaian PDRB per kapita Kota Palopo hanya berada pada angka 56.65 juta/kapita/tahun.

Dalam konteks ini, kenaikan PDRB per kapita sebesar ±10,1% dari capaian 2024 sudah mencerminkan skenario optimis–moderat. Sementara target RPD bersifat aspiratif jangka menengah, target RKPD mengacu pada realisasi pertumbuhan sektoral Kota Palopo yang lebih konservatif, dimana struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa, dengan kontribusi sektor produktif dan nilai tambah lokal yang belum optimal.

Penyesuaian Target Kinerja Persentase Penduduk Miskin

Target capaian kinerja persentase penduduk miskin Kota Palopo disesuaikan menjadi 6.89-7.06%, yang merupakan angka moderat, dari hasil kesepakatan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pada tahun 2024, persentase penduduk miskin Kota Palopo masih berada pada angka 7.35%.

Penyesuaian Target Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka

Target capaian kinerja tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo disesuaikan menjadi 7.46%, angka yang lebih optimis dibandingkan dengan target yang ada dalam RPD Kota Palopo yang merupakan angka moderat 7.75%, Target ini juga mempertimbangkan bahwa pada tahun 2024, pengangguran terbuka masih berada pada angka 7.64%.

Penyesuaian Target Kinerja Pertumbuhan Ekonomi

Target capaian kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Palopo ditargetkan lebih moderat yakni 5.29% dibandingkan target RPD Kota Palopo 2026 yang berada pada angka 6.62%. Target ini juga mempertimbangkan bahwa pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Palopo berada pada angka 4.4%. Target RKPD disusun dengan pendekatan realistis dan mempertimbangkan baseline pertumbuhan Palopo yang masih di bawah rerata nasional. Kenaikan menjadi 5.29% (dari 4.4%) mencerminkan akselerasi bertahap, terutama jika strategi peningkatan sektor perdagangan dan ekonomi produktif lainnya di Kota Palopo berjalan efektif. |

Penyesuaian Target Kinerja Gini Rasio

Target capaian kinerja gini rasio Kota Palopo ditargetkan lebih moderat yakni 0.320 poin dibandingkan target RPD Kota Palopo 2026 yang berada pada angka 0.319 poin. Ini juga mempertimbangkan angka gini rasio Kota Palopo tahun 2024 yang berada pada angka 0.333 poin.

Target RKPD ditetapkan 0.320 sebagai refleksi realitas sosial-ekonomi Palopo saat ini, dan masih berada pada kategori "ketimpangan sedang". Penurunan lebih tajam ke 0.319 ke depannya, perlu didukung oleh reformasi fiskal yang lebih masiv dan optimal dan perluasan jaminan sosial yang lebih agresif.

Penyesuaian Target Kinerja Indeks Kualitas Limngkungan Hidup

Penyesuaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Palopo tahun 2026 menjadi 70 didasarkan pada pertimbangan capaian kinerja tahun 2024 yang telah mencapai 69,24, atau mendekati target yang ditetapkan sebelumnya. Peningkatan sebesar 0,76 poin dalam kurun dua tahun dinilai realistis dan terukur, mengingat tren perbaikan kualitas lingkungan yang didukung oleh berbagai program pengendalian pencemaran, rehabilitasi ruang terbuka hijau, dan peningkatan pengelolaan sampah.

Untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan. Strategi pembangunan dirancang sebagai pendekatan utama dalam menyelesaikan tantangan dan permasalahan yang dihadapi, sedangkan arah kebijakan memberikan fokus dan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan daerah serta dinamika lingkungan strategis.

Dengan menghubungkan tujuan dan sasaran pembangunan dengan strategi dan arah kebijakan yang tepat, diharapkan setiap langkah pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini akan mendorong optimalisasi sumber daya serta meningkatkan sinergi antar sektor guna mencapai transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Berikut adalah sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Palopo Tahun 2026

Tabel 4.2
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palopo 2026

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2026
Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1)	Mengembangkan Kinerja Birokrasi, Kebijakan dan Standar Tata Kelola Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien (Stra 1)	Pemantapan Kapabilitas SDM, Kapasitas Kelembagaan/Organisasi, Sarana Prasarana, Tata Kelola serta Jenis dan Jumlah Inovasi
Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha (S2)	Mengembangkan Kapabilitas Tenaga Kerja, Kegiatan Ekonomi Produktif, Kemudahan Berusaha, Kesetaraan, Keberdayaan, seiring dengan Pengendalian Demografi Daerah (Stra 2)	Optimalisasi Upaya Pembinaan Angkatan Kerja, Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perluasan Akses Terhadap Layanan dan Infrastruktur Dasar
Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas (S3)	Mengembangkan Pusat-Pusat Ekonomi Daerah, Sektor Produktif Potensial serta Investasi dalam Iklim Kondusif (Stra 3)	Optimalisasi Sektor Produktif dan Potensial Daerah, Investasi Berbasis Ekosistem, dan Dukungan Infrastruktur, Teknologi, serta Ketertiban Daerah
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (S4)	Mengembangkan Kinerja Standar Pelayanan, Kapasitas dan Ekosistem Pendidikan, Kesehatan, Prestasi dan Literasi Masyarakat (Stra 4)	Optimalisasi Akses, Cakupan, Mutu serta Daya Saing Struktur (SDM), Infrastruktur, dan Suprastruktur, Tata Kelola serta Kinerja Layanan
Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kualitas Lingkungan Perkotaaan (S5)	Mengembangkan Upaya Mitigasi, Adaptasi, responsif perubahan Iklim, secara Kolaboratif Partisipatif Dalam Pengelolaan Pemanfaatan Ruang (Stra 5)	Optimalisasi Dukungan Infrastruktur, Upaya Mitigasi, Layanan Keselamatan dan Perlindungan, serta Partisipasi Kolaborasi Dalam Pengelolaan Pemanfaatan Ruang dan Iklim

Strategi Pembangunan Kota Palopo Tahun 2026

Ada lima strategi pembangunan Kota Palopo Tahun 2026, dalam mencapai sasaran pembangunan Kota Palopo. Berikut adalah strategi pembangunan Kota Palopo Tahun 2026.

1. **Mengembangkan Kinerja Birokrasi, Kebijakan dan Standar Tata Kelola Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien (Stra 1) dengan sasaran yang ingin dicapai adalah : Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1)**

   Strategi ini tidak hanya berfokus pada perbaikan internal birokrasi, tetapi juga pada transformasi sistem pelayanan publik melalui inovasi, standarisasi, dan tata kelola yang kuat. Dengan penguatan aspek-aspek seperti peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi digital, standarisasi kebijakan, akuntabilitas, dan kolaborasi antar lembaga, strategi ini secara holistik mendukung sasaran Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1). Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu menghasilkan birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada pelayanan prima, sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

2. **Mengembangkan Kapabilitas Tenaga Kerja, Kegiatan Ekonomi Produktif, Kemudahan Berusaha, Kesetaraan, Keberdayaan, seiring dengan Pengendalian Demografi Daerah (Stra 2) dengan sasaran yang ingin dicapai adalah : Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha (S2).**

   Melalui sinergi antara pengembangan kapabilitas tenaga kerja, peningkatan kegiatan ekonomi produktif, kemudahan berusaha, prinsip kesetaraan dan keberdayaan, serta pengendalian demografi, strategi ini menyediakan landasan yang kokoh bagi terbukanya lebih banyak kesempatan kerja dan dukungan terhadap kewirausahaan. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek tersebut, strategi ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan adaptif, serta secara langsung mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha (S2).

3. **Mengembangkan Pusat-Pusat Ekonomi Daerah, Sektor Produktif Potensial serta Investasi dalam Iklim Kondusif (Stra 3) dengan sasaran yang ingin dicapai adalah : Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas (S3)**

   Dengan mengintegrasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi, penguatan sektor produktif potensial, dan penciptaan iklim investasi yang ramah, strategi ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai sasaran meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas (S3). Langkah-langkah strategis ini bekerja secara sinergis untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas ekonomi secara keseluruhan, yang pada akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Palopo.

4. **Mengembangkan Kinerja Standar Pelayanan, Kapasitas dan Ekosistem Pendidikan, Kesehatan, Prestasi dan Literasi Masyarakat (Stra 4) dengan sasaran yang ingin dicapai adalah : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (S4)**

   Melalui integrasi pengembangan standar pelayanan, peningkatan kapasitas pendidikan, optimalisasi pelayanan kesehatan, serta promosi prestasi dan literasi, startegi ini membentuk fondasi yang kokoh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan ekosistem yang mendukung dan pelayanan publik yang unggul, masyarakat Kota Palopo diharpkan tidak hanya mendapatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas, tetapi juga diberdayakan untuk meraih prestasi dan mengembangkan potensi maksimalnya. Hal ini secara langsung mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (S4), yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi Kota Palopo**.**

5. **Mengembangkan Upaya Mitigasi, Adaptasi, responsif perubahan Iklim, secara Kolaboratif Partisipatif Dalam Pengelolaan Pemanfaatan Ruang (Stra 5) dengan sasaran yang ingin dicapai adalah : Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kualitas Lingkungan Perkotaaan (S5)**

   Melalui integrasi upaya mitigasi, adaptasi, dan pengelolaan tata ruang yang partisipatif, strategi ini membangun fondasi bagi peningkatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan kualitas lingkungan perkotaan (S5). Dengan memberdayakan berbagai pihak untuk berkolaborasi, strategi ini memastikan bahwa kebijakan lingkungan Pemerintah Kota Palopo tidak hanya responsif terhadap perubahan iklim, tetapi juga mendukung terciptanya Kota Palopo yang nyaman, hijau, dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan ketahanan lingkungan bagi masyarakat perkotaan.

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

Dalam rangka menghadapi tantangan global, nasional, regional dan kebutuhan peningkatan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Kota Palopo merumuskan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2026. Kebijakan ini dirancang untuk mewujudkan kota yang maju tanggung berkelanjutan terutama dalam pendidikan dan perniagaan, sebagaimana visi jangka panjang Kota Palopo 2045, melalui pendekatan terpadu yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, serta pelestarian lingkungan.

1. **Pemantapan Kapabilitas SDM, Kapasitas Kelembagaan/Organisasi, Sarana Prasarana, Tata Kelola serta Jenis dan Jumlah Inovasi**.

   Untuk mencapai sasaran S1, yaitu meningkatnya kapasitas birokrasi dan tata kelola layanan, kebijakan ini menekankan penguatan sumber daya manusia melalui program pelatihan intensif dan pengembangan kompetensi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses kerja yang lebih cepat, transparan, dan responsif. Selain itu, optimalisasi kapasitas kelembagaan lingkup Pemerintah Kota Palopo dilakukan melalui restrukturisasi organisasi, penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti infrastruktur TI dan fasilitas pendukung yang menunjang operasional birokrasi.

   Lebih lanjut, perbaikan tata kelola lingkup Kota Palopo juga akan ditingkatkan dengan penerapan standar operasional yang konsisten serta prinsip-prinsip good governance yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas. Dorongan inovasi berbasis teknologi, melalui pengembangan aplikasi digital dan forum inovasi internal, diharapkan dapat menciptakan solusi kreatif yang meningkatkan efisiensi dan adaptabilitas birokrasi dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, integrasi aspek peningkatan SDM, kelembagaan, sarana prasarana, tata kelola, dan inovasi secara menyeluruh akan mendorong tercapainya layanan publik di Kota Palopo yang lebih optimal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

   - Penguatan SDM melalui pelatihan intensif dan pengembangan kompetensi berbasis teknologi.
   - Optimalisasi kapasitas kelembagaan dengan restrukturisasi organisasi dan penerapan sistem monitoring serta evaluasi yang efektif.
   - Penyediaan sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur TI untuk mendukung efisiensi birokrasi.
   - Peningkatan tata kelola melalui penerapan prinsip-prinsip good governance yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas.
   - Pengembangan inovasi berbasis teknologi, seperti aplikasi digital layanan publik dan forum inovasi internal.

2. **Optimalisasi Upaya Pembinaan Angkatan Kerja, Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perluasan Akses Terhadap Layanan dan Infrastruktur Dasar**

   dan inklusif, sehingga potensi pasar kerja dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pertumbuhan Optimalisasi upaya pembinaan angkatan kerja, rehabilitasi, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan perluasan akses terhadap layanan dan infrastruktur dasar merupakan pendekatan yang akan diupayakan Pemerintah Kota Palopo Palopo menciptakan lapangan kerja dan mendukung semangat kewirausahaan.

   Kebijakan ini mengutamakan peningkatan keterampilan dan kapasitas kerja melalui pelatihan vokasional, penguatan jaringan perlindungan sosial yang memastikan kesejahteraan pekerja dan keluarga. Dengan menyediakan akses yang lebih luas ke layanan publik dan infrastruktur dasar seperti kesehatan, dan pendidikan, Kota Palopo berupaya menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif ekonomi lokal.

   Selain itu, Pemerintah Kota Palopo juga akan berupaya mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang mengintegrasikan pelatihan kewirausahaan, bantuan sarana prasaran kerja, dan pendampingan, yang secara langsung meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan strategi ini, peluang kerja dan usaha tidak hanya ditingkatkan melalui pembinaan kapasitas, tetapi juga melalui penyediaan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan usaha, sehingga secara simultan membuka akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif.
   - Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasional yang selaras dengan kebutuhan industri nasional, regional dan lokal Kota Palopo.
   - Penguatan jaringan perlindungan sosial untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
   - Perluasan akses terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesehatan guna menciptakan lingkungan yang inklusif.
   - Program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, fasilitasi dan bantuan sarana prasarana kerja, dan pendampingan usaha.

3. **Optimalisasi Sektor Produktif dan Potensial Daerah, Investasi Berbasis Ekosistem, dan Dukungan Infrastruktur, Teknologi, serta Ketertiban Daerah**

   Optimalisasi sektor produktif dan potensial di Kota Palopo akan diupayakan dengan mengidentifikasi serta mengembangkan industri kreatif, pertanian yang berteknologi termasuk urban farming, dan pariwisata serta jasa lain. Dan ini diupayakan dapat mendorong kolaborasi antara pelaku usaha lokal, investor, dan lembaga keuangan, sehingga menciptakan sinergi yang meningkatkan nilai tambah, produktivitas, serta membuka lapangan kerja baru.

Di sisi lain, dukungan infrastruktur, teknologi, dan ketertiban daerah menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi meliputi transportasi, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas publik, bersama dengan adopsi teknologi digital, akan meningkatkan efisiensi operasional serta mempercepat proses bisnis. Selain itu, penerapan sistem keamanan dan penegakan aturan/regulasi daerah yang konsisten memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha, sehingga menciptakan lingkungan yang stabil dan menarik untuk investasi. Langkah-langkah strategis tersebut secara holistik diharapkan dapat mewujudkan kondisi ekonomi Kota Palopo yang lebih baik.

- Identifikasi dan pengembangan sektor produktif unggulan, seperti industri kreatif, pertanian berbasis teknologi (urban farming), serta pariwisata dan jasa.
- Fasilitasi investasi berbasis ekosistem yang mendorong sinergi antara pelaku usaha lokal, investor, dan lembaga keuangan.
- Pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung konektivitas dan efisiensi usaha.
- Penguatan tata kelola investasi melalui penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan.
- Penegakan aturan yang konsisten guna menciptakan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha.

4. Optimalisasi Akses, Cakupan, Mutu serta Daya Saing Struktur (SDM), Infrastruktur, dan Suprastruktur, Tata Kelola serta Kinerja Layanan

Kebijakan ini menitikberatkan optimalisasi akses, cakupan, mutu, dan daya saing SDM, infrastruktur, serta suprastruktur, di samping perbaikan tata kelola dan kinerja layanan sebagai upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendekatan ini mencakup peningkatan aksesibilitas pendidikan dan pelatihan, kerjasama pemanfaatan dan pelatihan di pusat pelatihan vokasional, untuk memastikan bahwa setiap unit kerja dan lembaga pendidikan dapat menghasilkan SDM yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Di sisi lain, kebijakan ini juga mendorong perbaikan tata kelola melalui penerapan sistem manajemen kinerja yang transparan dan akuntabel, serta peningkatan layanan publik agar lebih responsif dan efisien. Sinergi antara penguatan struktur SDM, penyediaan infrastruktur dan suprastruktur yang memadai, serta tata kelola layanan yang berkualitas, akan menjadi landasan strategis untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan di Kota Palopo.

- Peningkatan akses dan mutu pendidikan serta kerjasama pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
- Pengembangan dan modernisasi infrastruktur pendidikan serta pelatihan tenaga kerja.
- Peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan dengan sistem manajemen kinerja yang transparan dan akuntabel.
- Penguatan layanan publik agar lebih responsif, efisien, dan berbasis teknologi.

5. Optimalisasi Dukungan Infrastruktur, Upaya Mitigasi, Layanan Keselamatan dan Perlindungan, serta Partisipasi Kolaborasi Dalam Pengelolaan Pemanfaatan Ruang dan Iklim

Optimalisasi dukungan infrastruktur, upaya mitigasi, layanan keselamatan dan perlindungan, serta partisipasi kolaborasi dalam pengelolaan pemanfaatan ruang dan iklim sangat esensial dalam memitigasi dampak bencana serta perubahan iklim yang semakin nyata.

Bagi Pemerintah Kota Palopo, pembenahan infrastruktur perkotaan, seperti sistem drainase, pengelolaan ruang terbuka hijau dan fasilitas publik yang ramah lingkungan, akan meningkatkan kualitas hidup warga serta ketangguhan kota Palopo terhadap peristiwa ekstrem.

Perlindungan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim juga mencakup peningkatan layanan keselamatan, seperti sistem peringatan dini serta penguatan kapasitas respons terhadap bencana. Dalam hal ini, partisipasi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan adaptif. Dengan mengintegrasikan pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan, serta strategi mitigasi dan kesiapsiagaan yang kuat, kualitas lingkungan perkotaan akan semakin meningkat, menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

- Pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, seperti sistem drainase perkotaan dan ruang terbuka hijau.
- Penguatan sistem peringatan dini serta peningkatan kapasitas respons bencana.
- Kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan ruang dan adaptasi perubahan iklim.
- Pengintegrasian kebijakan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan guna menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan berdaya tahan tinggi.

4.2 Prioritas Pembangunan

4.2.1. Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2026

Prioritas pembangunan daerah Kota Palopo 2026 adalah gambaran hal-hal atau aspek tentang sesuatu kondisi yang akan lebih didahulukan, yang proses pemilihan dan perumusannya dilakukan dengan mempertimbangkan :

- Arahan dan Prioritas Pembangunan Nasional (RKP) dan Sulawesi Selatan Tahun 2026 (Top-Down). Mengacu pada kebijakan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

- Permasalahan Pembangunan Kota Palopo dan Hasil Evaluasi Pembangunan Tahun Berjalan (Teknokratis). Berdasarkan analisis terhadap capaian pembangunan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas program pembangunan ke depan.

- Isu Strategis Daerah yang Diperoleh dari Analisis Kondisi Faktual dan Proses Perencanaan Partisipatif (Bottom-Up). Mengakomodasi tantangan pembangunan yang dihadapi Kota Palopo melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha.

- Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Palopo Tahun 2026 (Politis). Mempertimbangkan usulan dan masukan dari DPRD sebagai representasi masyarakat dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah.

- Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo 2024-2026 mengacu pada dokumen perencanaan daerah sebagai panduan utama dalam menentukan prioritas pembangunan yang sejalan dengan visi jangka menengah daerah.

Dalam konteks tersebut diatas, prioritas pembangunan Kota Palopo disusun untuk menjawab atau merespon permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan, tetapi memiliki relevansi atau menjadi trigger bagi pencapaian tujuan sasaran pembangunan dan visi misi serta janji politik dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Palopo.

Keterkaitan antara semua elemen ini sebagai upaya Pemerintah Kota Palopo memastikan kualitas perencanaan pembangunan sebagai sebuah sinergi kerja yang holistic, integrative, tematik dan berbasis spasial. Olehnya prioritas pembangunan Kota Palopo diarahkan untuk menjadi arahan dan menjadi jalan keluar atas permasalahan pembangunan, sekaligus merespon isu strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah.

Secara garis besar, prioritas pembangunan Kota Palopo diarahkan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi pembangunan, merespon permasalahan dan isu strategis, menjaga relevansinya dengan pokok pikiran DPRD Kota Palopo, serta prioritas RKP dan RKPD Sulsel tahun 2026, namun dalam jangka panjang, on the track dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Palopo, dalam rangka rangka mencapai tujuan sasaran pembangunan Kota Palopo.

Tema Pembangunan Kota Palopo

"Peningkatan Produktivitas dan Penguatan SDM serta Pemanfaatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Inklusif."

Tema pembangunan Kota Palopo tahun 2026, "Peningkatan Produktivitas dan Penguatan SDM serta Pemanfaatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Inklusif di Kota Palopo," menegaskan bahwa peningkatan ekonomi harus didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan infrastruktur yang memadai. Fokusnya adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Palopo secara adil dan merata.

Untuk mewujudkan hal ini, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digitalisasi layanan publik akan dilakukan melalui percepatan transformasi digital dalam administrasi pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. Layanan Goverment To Government (G to G), Government to Citizen (G to C), dan Government To Business (G to B), akan terus berupaya dikembangkan Pemerintah Kota Palopo. Khusus bagi sistem layanan publik berbasis teknologi akan diperluas untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan, seperti optimalisasi penerapan sistem perizinan online, digitalisasi data kependudukan, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan layanan berbasis data.

Selanjutnya, pembangunan manusia yang inklusif dan penguatan kualitas layanan dasar akan difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pemerintah akan memperkuat akses terhadap layanan pendidikan yang lebih berkualitas, mendorong program kerjasama vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta memperluas cakupan layanan kesehatan dasar yang lebih merata. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang produktif dan siap menghadapi tantangan ekonomi Kota Palopo ke depan.

Di sektor ekonomi, pengembangan produktivitas berbasis kewirausahaan dan investasi lokal akan dilakukan dengan menyiapkan dan mengembangkan spot spot ekonomi bagi bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), memfasilitasi perluasan akses permodalan, serta meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan pendampingan bisnis. Program kemitraan dan kerjasama antara pemberi kerja termasuk para pengusaha lokal juga akan diperkuat guna menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi Kota Palopo.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengembangan dan pemanfaatan sejumlah infrastruktur strategis yang adaptif dan berkelanjutan akan difokuskan pada pemnfaatan sejumlah bangunan dan aset daerah yang potensial mendapatkan pendapatan asli daerah, pembangunan dan perbaikan jalan, drainase, jaringan air bersih, serta infrastruktur digital. Pemerintah Kota Palopo juga akan berupaya memastikan bahwa pembangunan atau pemanfaatan infrastruktur memperhitungkan aspek ketahanan lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Terakhir, peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan budaya lokal akan diwujudkan melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, penguatan peran lembaga sosial dan adat, serta peningkatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan pendekatan ini, masyarakat Kota Palopo tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 4.3
Keterkaitan dan Relvansi Tema Pembangunan Kota Palopo 2026
Terhadap Tema Nasional dan Provinsi Sulsel

Tema	Isi Tema	Relevansi dengan Tema Pembangunan Kota Palopo 2026
Tema RKP 2026	*"Kedaulatan Pangan dan Energi, dan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"*	- Kota Palopo mendukung peningkatan produktivitas ekonomi, terutama di sektor perdagangan, jasa, dan UMKM, termasuk pangan dan energi untuk mempercepat pertumbuhan inklusif.
		- Pemanfaatan infrastruktur akan mendukung konektivitas ekonomi dan efisiensi produksi, selaras dengan upaya nasional dalam mendorong kemandirian ekonomi.
Tema RKPD Sulawesi Selatan 2026	*"Peningkatan Kualitas SDM yang Berakhlak dan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif"*	- Kota Palopo menitikberatkan **penguatan SDM dan infrastruktur strategis** sebagai kunci meningkatkan daya saing daerah.
		- Fokus pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial mendukung pengembangan SDM berkualitas di Sulawesi Selatan.
		- Pemanfaatan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kebijakan provinsi dalam mendorong konektivitas dan keberlanjutan pembangunan.
Tema Pembangunan Kota Palopo 2026	*"Peningkatan Produktivitas dan Penguatan SDM serta Pemanfaatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Inklusif di Kota Palopo"*	- Tema ini mengakomodasi **aspek produktivitas ekonomi** (sejalan dengan RKP 2026), serta **penguatan SDM dan infrastruktur** (sejalan dengan RKPD Sulsel 2026).
		- Fokus pertumbuhan inklusif memastikan pembangunan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Kota Palopo.

Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2026

Prioritas pembangunan mencakup pada penentuan bidang, sektor, atau program yang dianggap paling mendesak atau strategis untuk diutamakan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Prioritas Kota Palopo berikut ini ditentukan berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti kebutuhan masyarakat yang disampaikan secara partisipatif (musrenbang), potensi wilayah, anggaran yang tersedia, serta dampak yang diharapkan terhadap peningkatan kesejahteraan (teknokratis), dan dari pokok-pokok pikiran DPRD Kota Palopo (politis) serta beberapa arahan kebijakan pusat dan Provinsi sulawesi Selatan.

Dengan menentukan prioritas pembangunan, sumber daya dapat dialokasikan secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal. Misalnya, Kota Palopo yang menghadapi tantangan dalam hal kapasitas fiskal daerah, sebagai salah satu dari beberapa prioritas utama untuk mendukung pembangunan di Kota Palopo.

1. **Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digitalisasi layanan publik.**

Prioritas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang yang transparan, akuntabel, dan berbasis digitalisasi layanan publik. bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta tata kelola yang lebih baik, terutama pada aspek optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja serta transformasi layanan publik berbasis digital.

Prioritas ini berfokus pada tiga pilar utama:

- **Peningkatan Pendapatan dan Efisiensi Belanja**

  Melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi pengelolaan anggaran, tata kelola keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan keseimbangan fiskal dan mendukung kebutuhan pembangunan prioritas di Kota Palopo.

  Optimaliasi pendapatan ini secara keseluruhan mencakup transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan memaksimalkan dana transfer dengan mengusulkan program-program prioritas yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi DAK yang lebih besar, kemudian memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap Kota Palopo, menjaga sinkronisasi program dengan nasional, menyesuaikan program daerah dengan arah kebijakan nasional atau prestasi daerah untuk mengakses dana insentif daerah (DID), pemanfaatan bersama aset atau sumber daya dan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat misalnya memanfaatkan peluang hibah atau proyek yang didukung oleh kementerian/lembaga.

  Optimalsiasi pengelolaan pendapatan termasuk pendapatan asli daertah melalui penguatan kerangka regulasi, kelembagaan dan pengawasan akan dilakukan Pemerintah Kota Palopo. Misalnya dengan mengoptimalsiasi potensi pajak dan retribusi, dengan memastikan aset-aset dapat dipergunakan untuk hal produktif, perluasan strategis kemudahan pembayaran dengan pemanfaatan teknologi, optmalisasi sosialisasi dan edukasi, pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, termasuk sewa, peningkatan promosi dan kemudahan berinvestasi, dan paling penting adalah penegakan hukum punishment and reward terutama dalam pengawasan dan penegakan aturan tentang PAD, termasuk meningkatkan pengawasan/audit dan tindakan tegas terhadap pelanggaran pajak atau retribusi. Sampai pada upaya meguatkan kapasitas SDM, terutama kompetensi pegawai yang mengelola pajak dan retribusi melalui pelatihan reguler dan mendorong integritas dan inovasi aparatur untuk memberikan pelayanan berkualitas.

  Efisiensi dan Efektifitas Belanja, Pemerintah Kota Palopo akan berupaya memastikan belanjanya dialokasikan untuk fokus pada belanja produktif. Misalnya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dengan terus menguatkan penganggaran pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

  Kemudian untuk menjaga efisiensi dan efektifitas belanja adalah, mengimplementasikan penyusunan anggaran yang berfokus pada tujuan sasaran dan kinerja yang terukur, dengan menjaga konsistensi dan relevansi penganggaran dengan rencana yang ada, tepat sasaran, dan berpengaruh langsung terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Palopo, sehingga meemiliki cascading kinerja yang jelas (*money follow the program*).

  Belanja juga akan diarahkan untuk memenuhi semua mandatory spending, termasuk menanangani dan mengintenrvensi sejumlah program nasional dan regional di sulsel misalnya penanganan stunting, kemiskinan esktrem, inflasi, makan siang gratus dan bergizi, dan pengangguran terbuka. Bahkan jika memungkinkan, pembiayaan dengan pola kemitraan dengan sektor prIvat pada tahun 2026, juga akan ditempuh Pemerintah Kota Palopo sebagai sebuah rencana lain, sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tekanan pada kapasitas fiskal Kota Palopo dalam membiayai pembangunan.

- **Reformasi Birokrasi, Transparansi, dan Akuntabilitas**

  Reformasi birokrasi menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Palopo untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi ini dilakukan melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), perbaikan layanan, dan sejumlah upaya lain. Selain itu, pelatihan berbasis kompetensi diberikan secara berkala untuk meningkatkan kapabilitas aparatur dalam memberikan pelayanan yang inovatif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

  Di sisi lain mengawal dan memastikan transparansi bagi Pemrintah Kota Palopo juga menjadi elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka dan dapat dipercaya. Pemerintah Kota Palopo berkomitmen meningkatkan keterbukaan informasi melalui digitalisasi layanan publik dan penyampaian informasi yang mudah diakses oleh

masyarakat. Langkah ini akan terus berupaya diwujudkan dengan penerapan sistem berbasis teknologi informasi yang memungkinkan publik dapat memantau progres pelaksanaan program kerja pemerintah. Selain itu,

Akuntabilitas Pemerintah Kota Palopo akan berupaya terus ditingkatkan melalui pertanggungjawaban yang jelas atas setiap kebijakan, anggaran, dan kinerja kepada masyarakat. Hal ini mencakup penyusunan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan menjaga serta memastikan pagu anggaran pembangunan di semua wilayah Kota Palopo diarahkan secara proporsional.
Pemerintah Kota Palopo juga akan mengoptimalkan peran audit untuk memastikan bahwa setiap program kerja berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi pemerintah dan masyarakat.

Dengan mengintegrasikan reformasi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, diharapkan tercipta pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Upaya lainnya adalah berupaya membangun Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi & Birokrasi Bersih Melayani disamping terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pegawai.

- **Digitalisasi dan Inovasi Layanan Publik**

  Digitalisasi layanan publik merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Palopo untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan kepada masyarakat. Proses ini dilakukan melalui pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung sistem pelayanan yang terintegrasi dan mudah diakses. Sistem informasi berbasis daring (online) diterapkan pada berbagai sektor, seperti pelayanan perizinan, administrasi kependudukan, pendidikan seperti pendaftaran siswa baru, dan kesehatan misalnya antrian layanan di RS, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih cepat dan nyaman tanpa harus menghadapi birokrasi yang berbelit-belit.

  Inovasi layanan publik menjadi komplementer dalam upaya digitalisasi untuk memastikan layanan yang diberikan tidak hanya cepat, mudah, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Palopo mendorong terciptanya berbagai solusi inovatif melalui laboratorium diklat kepemimpinan untuk melahirkan inovasi dan terobosan baru termasuk reformer reformer dalam pelayanan publik.

  Untuk mendukung keberhasilan digitalisasi dan inovasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor pemerintahan menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, peran pemimpin di setiap instansi pemerintah juga menjadi kunci dalam mendorong budaya inovasi dan penggunaan teknologi yang efektif.

  Melalui digitalisasi dan inovasi layanan publik, Pemerintah Kota Palopo berkomitmen untuk mewujudkan layanan yang inklusif, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi tantangan regional dan global.

Beberapa indikator untuk mengukur kinerja prioritas ini adalah meningkatnya rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah, nilai dan predikat laporan keuangan dan asset Pemerintah Kota Palopo, meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja serta nilai Indeks Inovasi Daerah dan terakhir adalah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. **Pembangunan manusia yang inklusif dan penguatan kualitas layanan dasar.**
   Prioritas kedua dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2026 adalah Pembangunan Manusia yang inklusif dan penguatan kualitas layan dasar. Prioritas ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, serta penguatan perlindungan masyarakat. Fokus utamanya adalah membangun masyarakat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing dengan akses yang merata terhadap layanan dasar yang berkualitas.

   Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi landasan utama dalam prioritas ini. Pemerintah Kota Palopo akan mengarahkan kebijakan untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak atas layanan pendidikan yang inklusif, kesehatan yang preventif dan promotif, serta akses infrastruktur dasar yang memadai. Dengan memperkuat komitmen pada SPM, Kota Palopo diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang adil dan merata, yang menjadi prasyarat utama dalam pembangunan manusia yang berkualitas.

   Pada sektor pendidikan, pengembangan layanan yang inklusif menjadi prioritas strategis. Pemerintah Kota Palopo berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas. Upaya ini dilakukan melalui program strategis daerah yakni bantuan peralatan dan perlengkapan sekolah, bantuan biaya pendidikan, penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, serta pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja seperti training/diklat. Pendidikan berkualitas diharapkan dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) dan menciptakan generasi muda Kota Palopo yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Di bidang kesehatan, pendekatan preventif dan promotif menjadi pilar utama sebagai salah satu transformasi kesehatan. Pemerintah akan memperkuat layanan kesehatan primer melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan di puskesmas, posyandu, dan rumah sakit. Sinergi dengan program pemerintah pusat yakni "Makan Siang Gratis Bergizi" untuk anak sekolah juga akan disupport Pemerintah Kota Palopo untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal dan mencegah malnutrisi. Upaya lainnya adalah pengembangan puskesmas menjadi rumah sakit, jiwa dan anak, dan rehabilitasi para pasien kasus narkoba.

Selain itu, upaya pengendalian penyakit menular, penanganan stunting, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat menjadi fokus utama. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup (AHH) masyarakat Kota Palopo.

Akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi layak juga menjadi perhatian penting. Pemerintah Kota Palopo akan memastikan bahwa setiap rumah tangga memiliki akses terhadap sumber air yang aman dan fasilitas sanitasi yang memadai. Terutama bagi warga tidak mampu. Dengan demikian, prioritas ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Program ini akan diintegrasikan dengan upaya pengelolaan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam.

Selain itu, prioritas ini juga mencakup penguatan perlindungan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak. Program perlindungan sosial adaptif akan dikembangkan untuk memberikan jaminan sosial dan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan ini termasuk bagi perempuan dan anak.

Untuk mendukung implementasi prioritas ini, penguatan kelembagaan dan tata kelola menjadi langkah penting. Pemerintah akan meningkatkan kapasitas aparatur di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan kerjasama serta dukungan dengan para akademisi seperti hibah, akan diperkuat untuk memperluas cakupan program pembangunan manusia.

Indikator keberhasilan prioritas ini mencakup peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dasar, serta persentase rumah tangga dengan akses air bersih dan sanitasi layak. Melalui indikator ini, diharapkan pembangunan manusia di Kota Palopo dapat terukur dan memberikan dampak yang nyata.

Dengan fokus pada pemenuhan SPM dan pengembangan layanan dasar yang inklusif dan berkualitas, Pemerintah Kota Palopo berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, tangguh, dan berdaya saing. Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan Kota Palopo dapat menjadi kota yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga unggul dalam kualitas hidup masyarakatnya.

3. Pengembangan produktivitas ekonomi berbasis kewirausahaan dan investasi

Prioritas ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pariwisata, dan industri kreatif. Dengan mengoptimalkan potensi sektor basic (perdagangan, jasa keuangan asuransi, transportasi/pergudangan dll) dan potensial (pertanian, kehutanan, perikanan, akomodasi makan minum, konstruksi dll) Kota Palopo, upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan menciptakan lebih banyak peluang kerja serta peluang usaha bagi masyarakat.

Pengembangan sektor UMKM menjadi salah satu fokus utama dengan memberikan dukungan dalam fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan fasilitasi pemasaran bahkan kemitraan usaha, termasuk mengoptimalkan sejumlah sarana prasarana yang potensial digunakan untuk perdagangan di Kota Palopo, misalnya sejumlah pasar dan bangunan pasar yang sampai dengan tahun 2025 belum dimanfaatkan secara optimal. Termasuk membantu komunitas potnsial lain di Kota Palopo misalnya kelompok usaha wanita dan atau dasawisma secara selektif dan proporsional. Sementara di sektor primer pertanian dalam arti luas, penyediaan dan distribusi bibit pertanian dan ternak akan menjadi contoh penting lain, yang menjadi upaya Pemerintah Kota Palopo.

Pemerintah Kota Palopo akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, akademisi, dan sektor swasta, untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Selain itu, digitalisasi UMKM melalui pelatihan e-commerce dan platform pemasaran daring akan diprioritaskan untuk memperluas pasar dan daya saing produk lokal.

Pariwisata dan industri kreatif yang diarahkan dikembangkan berbasis ekosistem juga menjadi pilar penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Potensi wisata budaya, alam, dan kuliner di Kota Palopo akan terus dikembangkan melalui promosi dan peningkatan fasilitas penunjang pariwisata.

Menciptakan daya tarik kota, yang menjadi alasan banyak orang datang ke Kota Palopo, adalah harapan Pemerintah Kota Palopo yang berusaha ingin diwujudkan dalam berbagai aktifitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Kota Palopo juga akan bekerja sama dengan komunitas lokal dan pelaku industri kreatif untuk mendorong lahirnya produk-produk dan iven iven daerah yang inovatif yang mampu menarik minat bahkan meningkatkan angka kunjungan ke Kota Palopo. Langkah ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Untuk menciptakan lingkungan investasi yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Palopo akan terus mengadopsi model penyederhanaan perizinan dan pemberian insentif investasi, termasuk mengupayakan pembangunan infrastruktur strategis untuk mendukung aktivitas ekonomi, seperti akses jalan, fasilitas logistik, dan sebagainya.

Dalam rangka menangani inflasi dan memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok, berbagai upaya pengendalian inflasi akan dilakukan secara terintegrasi. Hal ini mencakup koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, pemantauan harga pasar, operasi pasar, serta penyediaan stok bahan pokok yang memadai. Dengan menjaga stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat dapat tetap terjaga, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi daerah, Pemerintah Kota Palopo juga akan mengintensifkan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya, serta pengembangan koperasi dan usaha bersama untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Termasuk merevitalisasi Balai Latihan Kerja seta Pelatihan & Pemanduan Bakat Pemuda.

Melalui serangkaian pelatihan dan pendidikan kewirausahaan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo, masyarakat diharapkan dapat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi, termasuk menciptakan peluang usaha baru yang berbasis pada potensi lokal. Dengan demikian, produktivitas masyarakat dapat meningkat secara signifikan, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Melalui prioritas ini, Kota Palopo berkomitmen untuk menciptakan ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing. Dengan mengintegrasikan berbagai program strategis dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tercipta perekonomian yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Pendekatan ini menjadi landasan penting bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi Kota Palopo di masa depan.
Pilar atau poin utama dari prioritas ketiga Kota Palopo tahun 2026 adalah:

Pengembangan Sektor UMKM dan Pariwisata

- Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang mampu eksis baik skala regional, nasional bahkan internasional
- Mengoptimalkan potensi pariwisata berbasis budaya, misalnya kompleks dan lokasi kedatuan, dan pariwisata berbasis alam, dan sejarah yang ada di Kota Palopo.
- Mendukung industri kreatif berbasis ekosistem lokal untuk menciptakan nilai tambah pada sektor ekonomi.

Pengembangan Sektor Industri Kreatif dan Sektor Potensial

- Memperkuat sektor industri kreatif yang menginternalisasi teknologi, seni, dan budaya lokal.
- Mengembangkan sektor-sektor basic dan potensial yang menjadi keunggulan Kota Palopo.
- Mendorong Investasi yang Inklusif dan Berkelanjutan
- Meningkatkan daya tarik investasi melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan regulasi yang mendukung.
- Memastikan investasi yang dilakukan sejalan dengan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan dampak positif bagi masyarakat lokal.

Penanganan Inflasi dan Stabilitas Ekonomi

- Mengelola inflasi daerah untuk memastikan stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
- Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah terhadap dinamika ekonomi global dan nasional.
- Meningkatkan Produktivitas dan Peluang Usaha
- Mendorong inovasi dan modernisasi di sektor ekonomi untuk meningkatkan produktivitas total daerah.
- Memperluas kesempatan kerja dan berusaha, terutama bagi kelompok masyarakat rentan dan pemuda.

Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

- Menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk mendorong *green dan blue economic dan economic circular.*
- Meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

Indikator kinerja utama yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan prioritas ini mencakup tingkat pertumbuhan ekonomi, produktivitas total daerah, pendapatan per kapita masyarakat, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan laju pertumbuhan investasi. Pemerintah Kota Palopo akan terus melakukan evaluasi secara berkala pencapaian indikator ini untuk memastikan bahwa setiap langkah strategis memberikan dampak nyata terhadap perekonomian Kota Palopo.

4. Pengembangan infrastruktur strategis yang adaptif dan berkelanjutan.

Dalam upaya menjadikan Kota Palopo sebagai kota yang layak huni, berkelanjutan, dan tangguh terhadap perubahan iklim serta risiko bencana, prioritas keempat pembangunan tahun 2026 adalah Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Ketahanan Lingkungan. Prioritas ini mencakup peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar seperti perumahan, pemukiman, transportasi, dan air bersih, serta implementasi kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan yang terintegrasi dengan mitigasi kebencanaan.

Peningkatan Pemanfaatan Infrastruktur Strategis
Akses terhadap infrastruktur strategis yang memadai adalah landasan penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kota Palopo akan memfokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan sejumlah infrastruktur strategis termasuk bangunan gedung pemerintah yang menjadi aset, pembangunan dan rehabilitasi jalan termasuk layanan angkutan kota yang lebih tertib, dan mulai mengantisipasi ancaman kemacetan dalam kota melalui upaya dan serangkaian rekayasa lalin, serta meningkatkan akses terhadap air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan usaha. Pemanfaatan sejumlah bangunan gedung dan pengembangan konektifitas dan aksesbilitas wilayah melalui infratsruktur jalan, juga menjadi penting dalam hubungannya dengan sejumlah lokus produktif dan potensial di Kota Palopo. Terutama kompleks Islamic centre dan pusat oleh oleh Palopo.

Penyediaan Perumahan Layak Huni
Penanganan backlog perumahan menjadi prioritas utama dengan memperluas cakupan rumah layak huni (RLH). Program ini akan dipadukan dengan pengembangan kawasan pemukiman yang tertata, aman dari risiko bencana, dan berorientasi pada prinsip keberlanjutan. Peran pihak swasta dalam hal ini developer menjadi salah satu point penting dalam membantu Pemerintah Kota Palopo menyiapkan lingkungan hunian yang layak dan nyaman layaknya sebuah kota. Kolaborasi dan simbiosis mutualisme bagi keduanya menjadi bagian penting dalam prioritas ini.

Pengelolaan Estetika dan Infrastrtur yang Berdaya Saing
Penataan estetika kota diarahkan pada peningkatan ruang terbuka hijau, taman kota, dan pengelolaan kawasan publik, termasuk cagar dan situs budaya. Ini bertujuan menciptakan lingkungan kota yang lebih nyaman, estetis, dan menarik bagi masyarakat maupun pihak untuk datang ke Kota Palopo. Misalnya penyediaan taman dan ruang terbuka hijau publik di masing masing kecamatan atau lingkungan pemukiman tematik yang estetis. Terutama penanganan pada kawasan kumuh dan upaya mencegah kekumuhan terutama pada daerah pesisir Kota Palopo, yang berorientasi pada upaya menciptakan daya tarik wilayah pesisir misalnya pelabuhan, tempat pelelangan ikan; atau jalan lingkar.

Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Kebijakan pembangunan akan berfokus pada perlindungan ekosistem, pengendalian polusi, dan penggunaan sumber daya yang efisien. Program ini termasuk optimalsiasi IPLT, pengelolaan limbah/tinja, layanan persampahan, konservasi air, dan kerjasama rehabilitasi kawasan hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Termasuk mendorong economic circular dan green economy produktif di masyarakat.

Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana
Mitigasi risiko bencana menjadi salah satu aspek penting, dengan penerapan teknologi peringatan dini dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Pemerintah juga akan meningkatkan infrastruktur tahan bencana seperti tanggul, kanal, sungai, dan jalur evakuasi di daerah rawan.Termasuk penanganan banjir dengan cara komprehensif baik yang bersifat partisipasi masyarakat sampai pada upaya pembangan sarana pengendali air.

Tujuan dan Sasaran yang diharapkan dari prioritas ini adalah lingkungan layak huni dan berkelanjutan, meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan kualitas lingkungan perkotaan. Beberapa ukuran keberhasilan prioritas inia dalah Persentase Infrastruktur Jalan Kota dalam Kondisi Mantap (%), Proporsi Rumah Layak Huni (RLH) (%), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Indeks Risiko Bencana Daerah (IRBD) yang menunjukkan keberhasilan mitigasi risiko bencana melalui kebijakan yang responsif.

5. Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan budaya lokal.

Prioritas ini bertujuan merekatkan kembali harmoni dan solidaritas masyarakat Kota Palopo. Polarisasi dan pengkotak-kotakan akibat berbagai dinamika politik, harus diarahkan pada upaya penguatan kembali daya rekat sosial budaya untuk ketahanan dan kesejahteraan masyarakat, sebagai langkah strategis untuk memperbaiki dan memperkuat kohesi sosial.

Pemerintah Kota Palopo memandang pentingnya rekonsiliasi sosial sebagai langkah awal untuk menghilangkan polarisasi yang mungkin masih tersisa. Kegiatan berbasis budaya lokal, iven bersama seperti olahraga, dialog antarwarga, dan penguatan nilai-nilai gotong royong menjadi strategi utama dalam membangun kembali rasa persatuan. Kehadiran pemerintah dalam memfasilitasi proses ini akan menjadi katalis bagi terciptanya hubungan sosial yang lebih harmonis.

Selain rekonsiliasi sosial, penguatan modal sosial menjadi salah satu elemen kunci dalam prioritas ini. Modal sosial, yang mencakup kepercayaan, jaringan sosial dan komunitas, dan norma-norma yang mendukung kerja sama, akan diperkuat melalui program-program komunitas. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan iven seni, budaya, dan keagamaan diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan sosial.

Dalam mendukung penguatan daya rekat sosial, pemerintah Kota Palopo berfokus pada upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Penurunan angka kemiskinan dan Rasio Gini menjadi indikator penting keberhasilan prioritas ini. Program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, termasuk penguatan UMKM, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat sekaligus mempersempit kesenjangan ekonomi.

Perhatian terhadap kelompok rentan juga menjadi prioritas dalam kebijakan ini. Penyelenggaraan program perlindungan sosial adaptif bagi kelompok rentan dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan. Program ini mencakup bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap layanan dasar yang memadai.

Kesetaraan gender juga menjadi aspek penting yang akan diperhatikan melalui prioritas ini. Dengan menggunakan Indeks Gender dan Pembangunan (GDI) sebagai salah satu indikator, pemerintah akan memastikan bahwa perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dalam berbagai sektor pembangunan. Pemberdayaan perempuan diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan sosial.

Sebagai bagian dari prioritas ini, upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi tetap menjadi perhatian utama. Program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas akan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dengan mengurangi kesenjangan ekonomi, pemerintah berharap dapat menciptakan kondisi yang lebih adil dan merata, sehingga memperkuat daya rekat sosial.

Keberhasilan prioritas ini akan diukur melalui indikator utama, yaitu Persentase Penduduk Miskin, Rasio Gini, dan Indeks Gender dan Pembangunan. Setiap indikator mencerminkan aspek yang berbeda dari kesejahteraan dan daya tahan sosial masyarakat, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak kebijakan ini.

Dalam prioritas ini Pemerintah Kota Palopo akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keagamaan, komunitas budaya, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan pelaksanaan program yang terintegrasi dan efektif. Pendekatan partisipatif akan menjadi prinsip utama dalam merancang dan melaksanakan program-program yang relevan.

Dengan implementasi yang tepat, prioritas ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat Kota Palopo yang lebih kohesif, inklusif, dan sejahtera. Hubungan sosial yang harmonis dan daya rekat yang kuat akan menjadi landasan bagi keberhasilan pembangunan di berbagai sektor. Dalam jangka panjang, masyarakat yang solid dan berdaya akan menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan global dan memastikan keberlanjutan pembangunan di Kota Palopo.

Prioritas Pembangunan 2026 Terhadap Intervensi Perangkat Daerah Utama

Prioritas pembangunan Kota Palopo Tahun 2026 dirancang untuk menjawab permasalahsan, isu strategis atau tantangan pembangunan Kota Palopo, namun sekaligus juga didesign untuk memperkuat kontribusi terhadap prioritas pembangunan nasional. Dalam kerangka tersebut, intervensi perangkat daerah utama diarahkan untuk mendukung pencapaian hasil pembangunan yang konkret dan terukur. Setiap prioritas pembangunan dikaitkan secara langsung dengan peran aktif organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki fungsi strategis sesuai tugas dan kewenangannya :

Tabel 4.4.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan, Program Prioritas dan Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun 2026

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Bentuk Utama Intervensi
1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digitalisasi layanan publik	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Koordinasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD	Penguatan fungsi legislasi dan pengawasan
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat	Pengawasan dan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintahan
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan efisien
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Perencanaan pembangunan berbasis data dan digitalisasi
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BAPPENDA	Optimalisasi PAD melalui sistem digital
	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP	Digitalisasi perizinan dan layanan investasi
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	KOMINFO	Pengembangan sistem e-government dan keterbukaan informasi publik
	Program Pendaftaran Penduduk	DISPENDUKCAPIL	Layanan administrasi kependudukan berbasis digital
	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Kearsipan	Digitalisasi dan manajemen arsip pemerintahan
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Persandian dan Statistik	Pengamanan data pemerintahan dan pengelolaan statistik daerah
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital di tingkat kecamatan
2. Pembangunan manusia yang inklusif dan penguatan kualitas layanan dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan inklusif
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Peningkatan layanan kesehatan dasar dan rujukan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Sawerigading	Optimalisasi layanan kesehatan dan peningkatan fasilitas
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk & KB	Program kesehatan reproduksi dan pengendalian kependudukan
	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	Perlindungan sosial bagi kelompok rentan
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Penguatan perlindungan perempuan dan anak
3. Pengembangan produktivitas ekonomi berbasis kewirausahaan dan investasi lokal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penguatan UMKM dan akses pembiayaan usaha
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan	Fasilitasi pasar dan perdagangan lokal
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian	Pengembangan industri kecil dan menengah

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Perangkat Daerah	Bentuk Utama Intervensi
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Peningkatan produksi pertanian dan peternakan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Peningkatan ketahanan pangan daerah
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	Penguatan sektor perikanan dan budi daya
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Pengembangan tenaga kerja dan pelatihan keterampilan
4. Pengembangan infrastruktur strategis yang adaptif dan berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur strategis
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengembangan perumahan layak dan kawasan permukiman
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan	Penguatan sistem transportasi dan mobilitas
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim
	Program Penanganan Bencana	BPBD	Mitigasi dan penanggulangan bencana
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Peningkatan kapasitas pemadam kebakaran
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Dinas Pertanahan	Penyediaan tanah/lahan dan kesesuaian ruang untuk infrastruktur Publlik
5. Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan budaya lokal	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Kebudayaan	Penguatan budaya lokal dan identitas daerah
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pengembangan potensi pemuda dan olahraga daerah
	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	Program kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Penguatan peran perempuan dalam pembangunan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	BAKESBANGPOL	Peningkatan stabilitas sosial dan demokrasi
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Satuan Polisi Pamong Praja	Penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan	Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi sosial

Tabel di atas menyajikan pemetaan Perangkat Daerah (PD) Kota Palopo berdasarkan 5 Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2026. Setiap perangkat daerah diposisikan sesuai dengan perannya dalam mendukung pencapaian masing-masing prioritas melalui bentuk intervensi utama yang relevan. Intervensi tersebut mencerminkan tugas dan fungsi utama dari setiap perangkat daerah dalam mengakselerasi pencapaian target pembangunan Kota Palopo 2026.

Misalnya Dinas Persandian dan Statistik berkontribusi dalam Prioritas 1 melalui penguatan sistem keamanan data dan pengelolaan statistik sektoral, sedangkan Dinas Transmigrasi lebih relevan dalam Prioritas 3 karena perannya dalam pengembangan wilayah transmigrasi sebagai bagian dari peningkatan ekonomi berbasis kewirausahaan dan investasi lokal. Demikian pula, Dinas Perpustakaan dan Dinas Kearsipan lebih dominan dalam Prioritas 2, dengan fokus pada peningkatan literasi masyarakat dan tata kelola arsip yang mendukung peningkatan kualitas layanan dasar. Meski demikian, kontribusi perangkat daerah tidak terbatas pada satu prioritas saja, karena tabel diatas hanya menampilkan bentuk intervensi utama untuk setiap perangkat daerah dalam satu prioritas tertentu.

Dengan demikian, meskipun tabel ini menyajikan intervensi utama perangkat daerah berdasarkan prioritas yang paling relevan, program dan kegiatan lainnya dalam perangkat daerah tersebut juga dapat berkontribusi terhadap prioritas pembangunan lainnya, mencerminkan pendekatan pembangunan yang tematik, holistik, spasial, dan integratif (THSI).

Secara internal, sasaran dan prioritas pembangunan Kota Palopo Tahun 2026 memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan tersebut untuk menjaga dan memastikan adanya keselarasan, kesesuaian antara kondisi yang diinginkan dengan apa yang seharusnya lebih dulu dikerjakan. Berikut adalah hubungan, keterkaitan antara prioritas pembangunan Kota Palopo Tahun 2026 terhadap Sasaran Pembangunan Daerah Kota Palopo adalah sebagai berikut :

Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Prioritas pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki keterkaitan erat dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, sementara prioritas pembangunan adalah langkah atau hal yang strategis yang dipilih untuk mewujudkan sasaran tersebut. Dengan kata lain, prioritas pembangunan berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan kebijakan, program, dan kegiatan agar efektif dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah dirumuskan. Penetapan prioritas pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti urgensi masalah, ketersediaan sumber daya, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Dalam implementasinya, prioritas pembangunan harus selaras dengan arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, kesinambungan antara prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan akan memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan memiliki kontribusi yang nyata dalam mencapai visi pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut adalah tabel keterkaitan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Palopo Tahun 2026 :

Tabel 4.5
Hubungan Keterkaitan Prioritas dan Tujuan, Sasaran Pembangunan Kota Palopo 2026

Priritas Pembangunan 2026	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Hubungan Keterkaitan
Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digitalisasi layanan publik.	T1 - Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	S1 - Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan	Penguatan tata kelola pemerintahan akan meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.
Pembangunan manusia yang inklusif dan penguatan kualitas layanan dasar.	T2 - Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Daerah yang Berkualitas	S2 - Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	Dengan meningkatkan layanan dasar yang inklusif, masyarakat akan lebih berdaya secara ekonomi, memiliki keterampilan yang lebih baik, dan mampu mengakses peluang kerja yang lebih luas.
Pengembangan produktivitas ekonomi berbasis kewirausahaan dan investasi lokal.	T2 - Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Daerah yang Berkualitas	S3 - Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Peningkatan produktivitas ekonomi melalui investasi dan kewirausahaan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing, serta memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
Pengembangan infrastruktur strategis yang adaptif dan berkelanjutan.	T3 - Terwujudnya Lingkungan Layak Huni dan Berkelanjutan	S5 - Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan	Infrastruktur yang strategis dan berkelanjutan akan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, mendukung ketahanan terhadap

Priritas Pembangunan 2026	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Hubungan Keterkaitan
		Kualitas Lingkungan Perkotaan	bencana, serta menciptakan lingkungan yang lebih layak huni bagi masyarakat.
Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan budaya lokal.	T2 - Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Daerah yang Berkualitas	S4 - Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dengan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan dan budaya lokal, masyarakat akan lebih resilien terhadap tantangan sosial dan ekonomi, serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Masing-masing Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dengan sasaran pembangunan daerah, guna memastikan keselarasan antara perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan.Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digitalisasi layanan publik berkontribusi terhadap meningkatnya kapasitas birokrasi dan tata kelola layanan (S1). Hal ini dicapai melalui peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan optimalisasi teknologi dalam pelayanan publik, yang sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas (T1).

Selanjutnya, pembangunan manusia yang inklusif dan penguatan kualitas layanan dasar memiliki keterkaitan dengan meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha (S2). Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, masyarakat akan lebih berdaya dan memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi. Hal ini mendukung tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah yang berkualitas (T2).

Pengembangan produktivitas ekonomi berbasis kewirausahaan dan investasi lokal sejalan dengan meningkatnya kondisi ekonomi daerah yang berkualitas (S3). Melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi lokal, dan inovasi ekonomi berbasis potensi daerah, pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif dan berkelanjutan, mendukung tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah yang berkualitas (T2).

Pengembangan infrastruktur strategis yang adaptif dan berkelanjutan berhubungan dengan meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan kualitas lingkungan perkotaan (S5). Dengan membangun infrastruktur yang tangguh, adaptif terhadap perubahan iklim, serta mendukung tata ruang yang berkelanjutan, Kota Palopo dapat mewujudkan lingkungan yang layak huni dan berkelanjutan (T3).

Terakhir, peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan budaya lokal berkaitan erat dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia (S4). Melalui penguatan modal sosial, pemberdayaan berbasis budaya lokal, dan peningkatan kesejahteraan sosial, ketahanan masyarakat dapat semakin diperkuat, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah yang berkualitas (T2).

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2026 Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 2026

Dalam rangka memastikan konsistensi dan sinergi pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2026 memperhatikan keterkaitan yang erat dengan arah dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026. Hal ini sejalan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) yang mendorong terciptanya harmonisasi program lintas wilayah dan lintas sektor. Penyesuaian dan penyelarasan prioritas pembangunan Kota Palopo dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kontribusi daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan daya saing wilayah secara berkelanjutan. Berikut adalah tabel keterkaitan prioritas pembangunan Kota Palopo 2026 terhadap prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 2026.

Tabel 4.6
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Palopo
Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 2026

No	Prioritas Pembangunan Susel	Prioritas Pembangunan Kota Palopo	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	Transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digitalisasi layanan publik	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembangunan Susel	Prioritas Pembangunan Kota Palopo	Program Prioritas	Perangkat Daerah
2	Peningkatan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BAPPENDA
			Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	KOMINFO
			Program Pendaftaran Penduduk	DISPENDUKCAPIL
			Program Pengelolaan Arsip	Dinas Kearsipan
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Persandian dan Statistik
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
3	Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	2. Pembangunan manusia yang inklusif dan penguatan kualitas layanan dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
4	Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substantif, dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan kelompok marjinal		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Sawerigading
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
			Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
5	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	3. Pengembangan produktivitas ekonomi berbasis kewirausahaan dan investasi lokal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6	Peningkatan ekonomi yang modern dan berdaya saing		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan Susel	Prioritas Pembangunan Kota Palopo	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
7	Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	4. Pengembangan infrastruktur strategis yang adaptif dan berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Peningkatan mitigasi dan ketahanan menghadapi situasi bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Bencana	BPBD
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Dinas Pertanahan
9	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	5. Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan budaya lokal	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Kebudayaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	BAKESBANGPOL

No	Prioritas Pembangunan Susel	Prioritas Pembangunan Kota Palopo	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan

Tabel ini memperlihatkan bahwa prioritas pembangunan Kota Palopo 2026 sejalan dengan prioritas pembangunan RKPD Sulsel 2026, baik dalam aspek tata kelola pemerintahan, pembangunan SDM, penguatan ekonomi, infrastruktur, maupun kesejahteraan sosial. Keselarasan ini penting untuk memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan daerah dengan provinsi, sehingga program-program yang direncanakan dapat berjalan lebih efektif dan mendapat dukungan dari berbagai level pemerintahan.

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Kota Palopo menekankan transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi layanan publik, yang selaras dengan Sulsel yang menargetkan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital dan berintegritas. Keduanya menekankan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan SDM dan Layanan Dasar

Prioritas Kota Palopo dalam pembangunan manusia yang inklusif serta penguatan layanan dasar sangat relevan dengan agenda Sulsel yang menitikberatkan pada peningkatan pendidikan dan kesehatan berbasis akhlak dan kompetensi. Selain itu, Palopo juga menyoroti aspek inklusivitas dalam layanan keagamaan, budaya, serta sosial masyarakat, yang juga ditekankan dalam prioritas pembangunan Sulsel.

Penguatan Ekonomi Daerah

Palopo mengusung strategi pengembangan produktivitas ekonomi berbasis kewirausahaan dan investasi lokal, yang sejalan dengan Sulsel yang mendorong hilirisasi pertanian, swasembada pangan, serta pengelolaan sumber daya alam berbasis ekonomi hijau dan biru. Kedua agenda ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui sektor unggulan dan pemanfaatan sumber daya lokal.

Pengembangan Infrastruktur Strategis

Kota Palopo berfokus pada infrastruktur strategis yang adaptif dan berkelanjutan, yang sejalan dengan Sulsel yang mengutamakan layanan transportasi, investasi padat karya, dan infrastruktur berwawasan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur di Palopo diarahkan untuk mendukung konektivitas dan keberlanjutan pembangunan.

Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial

Palopo menekankan pemberdayaan masyarakat dan budaya lokal sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan sosial. Hal ini sejalan dengan prioritas Sulsel dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Kesamaan ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi berbasis masyarakat menjadi salah satu prioritas utama di tingkat kota maupun provinsi.

Berikut adalah tabel keselerasan/dukungan program Kota Palopo terhadap prioritas Provinsi Sulsel Tahun 2026 :

Tabel 4.7
Keselerasan/Dukungan Program Kota Palopo
Terhadap Prioritas Provinsi Sulsel Tahun 2026 :

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kota Palopo	Perangkat Daerah
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kota Palopo	Perangkat Daerah
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dis Pendidikan
5	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Dis Pendidikan
6	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	Dis Pendidikan
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dis Perpustakaan
8	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol
9	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika Budaya Politik	Bakesbangpol
10	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol
11	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dins Satpol PP
12	Program Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Program Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Bakesbangpol
13	Program Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	Setda
14	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dis Kebudayaan
15	Program Pelestarian Cagar Budaya	Program Pelestarian Cagar Budaya	Dis Kebudayaan
16	Program Pemenuhan Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	Dis P3A
17	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Dis P3A
18	Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	Dispora
19	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dispora
20	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dis P3A
21	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Disperin
22	Program Pemberdayaan UMKM	Program Pemberdayaan UMKM	Diskop UMKM
23	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Diskop UMKM
24	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Diskop UMKM
25	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disparekraf
26	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disparekraf
27	Program Peningkatan Infrastruktur dan Keselamatan Pangan Masyarakat		-
28	Program Peningkatan Ketersediaan Pangan	Program Peningkatan Ketersediaan Pangan	Dis Ketapang
29	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pariwisata	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pariwisata	Dis Parekraf
30	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pariwisata	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pariwisata	Dis Parekraf
31	Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pengembangan		-
32	Program Penyediaan Pertanian	Program Penyediaan Pertanian Sarana dan Prasarana Pertanian	Dis Pertanian
33	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata	Dis Parekraf
34	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pariwisata	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pariwisata	Dis Parekraf
35	Program Pengembangan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengembangan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dis Pertanian
36	Program Pengembangan Pertanian Terpadu		
37	Program Pengembangan Perhubungan Jalan	Program Pengembangan Jalan	Dis PU
38	Program Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	Dis Perikanan

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kota Palopo	Perangkat Daerah
39	Program Pengembangan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengembangan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dis Perikanan
40	Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Dis Perdagangan
41	Program Standardisasi dan Penataan Pangan		
42	Program Pengembangan Iklim Usaha Industri	Program Pengembangan Iklim Usaha Industri	Disperin
43	Program Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional	Disperin
44	Program Pengembangan dan Pengembangan Perindustrian	Program Pengembangan dan Pengembangan Perindustrian	Disperin
45	Program Pemenuhan Kebutuhan Barang, Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Program Pemenuhan Kebutuhan Barang, Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Disdag
46	Program Pengembangan Industri Peralatan Medis		
47	Program Perencanaan dan Pembangunan	Program Perencanaan dan Pembangunan	Bappeda
48	Program Pengembangan Penataan Daerah		
49	Program Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
50	Program Administrasi Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
51	Program Pendataan dan Analisis Sosial		
52	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dis Ssosial
53	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Dis Ssosial
54	Program Pelatihan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dis Tenaga Kerja
55	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dis Tenaga Kerja
56	Program Pengembangan Akses Informasi	Program Pengembangan Akses Informasi	Dis Kominofo
57	Program Pengembangan Sarana Komunikasi Publik	Program Pengembangan Sarana Komunikasi Publik	Dis Kominofo
58	Program Perencanaan Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
59	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pembangunan Daerah	Bappeda
60	Program Peningkatan Pengawasan	Program Peningkatan Pengawasan	Inspektorat
61	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
62	Program Pembinaan Organisasi	Program Pembinaan Organisasi	Srtda
63	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
64	Program Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Program Pengelolaan Kepegawaian Daerah	BKPSDM
65	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Setda
66	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Umum	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Umum	Kecamatan
67	Program Kemitraan dan Pelayanan Pengadilan Bagi Masyarakat		
68	Program Pengelolaan dan Audit Daerah		
69	Program Pengelolaan Data Informasi	Program Pengelolaan Data Informasi	Dis Kominofo
70	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Dis Kominofo
71	Program Kepemerintahan Daerah	Program Kepemerintahan Daerah	Setda
72	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
73	Program Pengelolaan Perizinan	Program Pengelolaan Perizinan	DPMPTSP
74	Program Pengelolaan Aset	Program Pengelolaan Aset	BPKAD
75	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispenduk Capil
76	Program Pengembangan dan Pemberdayaan		
77	Program Pengembangan Bangunan dan Infrastruktur Dasar		
78	Program Peningkatan Jalan	Program Peningkatan Jalan	Dis PU

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kota Palopo	Perangkat Daerah
79	Program Pengembangan Ketenagakerjaan	Program Pengembangan Ketenagakerjaan	Dis Tenaga Kerja
80	Program Pemberdayaan Lembaga dan Anak	Program Pemberdayaan Lembaga dan Anak	Dis P3A
81	Program Pengelolaan Pelayanan		
82	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Dis Perkim
83	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Disperkim
84	Program Pengelolaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Program Pengelolaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Dis Pertanahan
85	Program Pembinaan Keselamatan Transportasi	Program Pembinaan Keselamatan Transportasi	Dis Perhubungan
86	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Air Bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Air Bersih	Dis PU
87	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dis PU
88	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Air Minum	Dis PU
89	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
90	Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan		
91	Program Pengembangan Perindustrian	Program Pengembangan Perindustrian	Dis Perindustrian
92	Program Pengelolaan Hutan		
93	Program Pencegahan dan Penanggulangan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertahanan		
94	Program Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Sampah	Dis Lingkungan Hidup
95	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dis Lingkungan Hidup
96	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2026 Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional 2026

Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2026 dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 mencerminkan komitmen pemerintah Kota Palopo dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara terintegrasi. Sinergi ini diwujudkan melalui penyelarasan program dan kegiatan daerah dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP 2026, termasuk delapan prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, transformasi digital, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian, agenda pembangunan Kota Palopo Tahun 2026 tidak hanya diarahkan untuk menjawab kebutuhan dan tantangan lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan Indonesia tahun 2026**.**

Pemerintah menetapkan delapan Prioritas Nasional sebagai kerangka utama pembangunan tahun 2026. **Pertama**, memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia melalui penguatan layanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. **Kedua**, memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, dan penguatan ekonomi berbasis syariah, digital, hijau, dan biru. **Ketiga,** melanjutkan pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, memperkuat koperasi, dan mengembangkan industri kreatif serta agromaritim. **Keempat**, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. **Kelima**, melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri. **Keenam**, membangun dari desa dan dari bawah sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pemberantasan kemiskinan. **Ketujuh**, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, disertai pencegahan serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. **Terakhir,** memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban.

Berikut adalah tabel sinkronisasi prioritas nasional dan Kota Palopo Tahun 2026 dan penjelasan relevansinya :

Tabel 4.8
Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Kota Palopo

Tahun 2026

Prioritas Nasional 2026	Prioritas Susel 2026	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2026	Penjelasan Relevansi
1. Penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial)	Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	2. Pembangunan manusia yang inklusif dan penguatan kualitas layanan dasar	Kedua prioritas menekankan pada peningkatan akses dan kualitas layanan dasar sebagai prasyarat utama mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan manusia seutuhnya.
	Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substantif, dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan kelompok marjinal		
2. Pertahanan-keamanan, swasembada, dan penguatan ekonomi berbasis syariah, digital, hijau, dan biru	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	3. Pengembangan produktivitas ekonomi berbasis kewirausahaan dan investasi lokal	Selaras dalam mendorong kemandirian ekonomi lokal, inovasi usaha mikro-kecil, serta digitalisasi ekonomi dan inklusi keuangan berbasis potensi daerah.
	Peningkatan ekonomi yang modern dan berdaya saing		
3. Infrastruktur, lapangan kerja, kewirausahaan, koperasi, industri kreatif & agromaritim	Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	4. Pengembangan infrastruktur strategis yang adaptif dan berkelanjutan	Keduanya mengarah pada pembangunan infrastruktur sebagai fondasi penciptaan peluang kerja, konektivitas ekonomi, dan penguatan sektor riil di daerah.
	Peningkatan mitigasi dan ketahanan menghadapi situasi bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		
4. SDM, iptek, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, disabilitas, pemuda	Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	2. Pembangunan manusia yang inklusif dan penguatan kualitas layanan dasar	Menekankan penguatan SDM inklusif, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan kelompok rentan secara spesifik dan sistematis.
5. Hilirisasi dan industri SDA bernilai tambah	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	3. Pengembangan produktivitas ekonomi berbasis kewirausahaan dan investasi lokal	Relevan dalam konteks hilirisasi berbasis potensi lokal (pertanian, perdagangan, UMKM), mendorong nilai tambah dan penguatan daya saing ekonomi daerah.
6. Pembangunan desa dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	5. Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan budaya lokal	Sama-sama menekankan pemberdayaan masyarakat dari bawah, pengurangan kemiskinan, serta pelibatan komunitas lokal berbasis budaya dan potensi wilayah.
7. Reformasi politik, hukum, birokrasi, anti korupsi, narkoba, judi, penyelundupan	Transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digitalisasi layanan publik	Sejalan dalam mendorong reformasi birokrasi digital, pelayanan publik terbuka, penguatan integritas aparatur, dan efektivitas tata kelola.

Prioritas Nasional 2026	Prioritas Susel 2026	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2026	Penjelasan Relevansi
8. Harmoni lingkungan, budaya, toleransi dan peradaban	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	5. Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan budaya lokal	Mendukung pembangunan berbasis nilai-nilai budaya lokal, harmoni sosial, dan pelestarian lingkungan sebagai unsur penting kesejahteraan dan ketahanan sosial.

Tabel diatas memperlihatkan bahwa semua prioritas pembangunan Kota Palopo 2026 memiliki relevansi substantif dengan minimal satu prioritas nasional, bahkan beberapa diantaranya memiliki multikorelasi (misalnya prioritas 2 dan 3 Palopo beririsan dengan PN 1, 2, 4, dan 5).

Kemudian terkait pemetaan peran perangkat daerah Kota Palopo dalam RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan keterkaitan langsung dengan *Outcome* Prioritas Nasional, guna memastikan konsistensi arah pembangunan nasional dan daerah serta efektivitas pelaksanaan program strategis. Setiap perangkat daerah diposisikan sebagai penanggung jawab utama maupun pendukung sesuai dengan tugas dan fungsinya terhadap pencapaian *outcome* yang relevan, seperti peningkatan kualitas SDM, transformasi ekonomi daerah berbasis potensi unggulan, penguatan layanan dasar, hingga pembangunan infrastruktur dan tata kelola. Berikut adalah tabel pemetaan peran beberapa perangkat daerah Kota Palopo dalam mengintervensi outcome prioritas nasional 2026.

Tabel 4.9
Pemetaan Peran Perangkat Daerah Kota Palopo
Terhadap Outcome Prioritas Nasional 2026

Prioritas Nasional		Outcome Prioritas		Program		Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
4. SDM, iptek, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, disabilitas, pemuda	1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan
					2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
					3	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					4	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
1. Penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial)	2	Kesehatan Untuk Semua	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6	Pengembangan Rumah Sakit	Dinas Pendidikan dan Rumah Sakit dan Jaringannya
					7	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
					8	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
					9	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
					10	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	11	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
2. Pertahanan-keamanan, swasembada, dan penguatan ekonomi berbasis syariah, digital, hijau, dan biru	3	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	12	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum
					13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	14	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					15	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
	4	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	16	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
					17	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
6. Pembangunan desa dan pemberantasan kemiskinan	5	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	18	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dians Perumahan dan Pemukiman
					19	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	

Prioritas Nasional		Outcome Prioritas		Program		Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	20	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
					21	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
1. Penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial)	6	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	9	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	22	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP, Dnas Pemadam Kebakaran
					23	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
			10	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
					25	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
			11	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	26	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
6. Pembangunan desa dan pemberantasan kemiskinan	7	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	12	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	27	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial'
					28	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			13	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	29	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			14	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	30	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
4. SDM, iptek, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, disabilitas, pemuda	8	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	15	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	31	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja
			16	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	32	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
					33	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
4. SDM, iptek, pendidikan,	9	Meningkatnya Kesetaraan Gender,		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN	34	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan

Prioritas Nasional		Outcome Prioritas		Program		Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
kesehatan, kesetaraan gender, disabilitas, pemuda		Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	17	GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	35	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan Perlindungan Anak
			18	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	36	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					37	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
2. Pertahanan-keamanan, swasembada, dan penguatan ekonomi berbasis syariah, digital, hijau, dan biru	10	Meningkatnya ketahanan pangan	19	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	38	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dians Ketahanan Pangan
					39	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
			20	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	40	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					41	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
8. Harmoni lingkungan, budaya, toleransi dan peradaban	11	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	21	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	42	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan
					43	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	
8. Harmoni lingkungan, budaya, toleransi dan peradaban	12	Lingkungan Hidup Berkualitas	22	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	44	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hiduop
					45	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
			23	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	46	Penanganan sampah melalui pengangkutan	
					47	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
					48	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
					49	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
7. Reformasi politik, hukum, birokrasi, anti	13	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan	24	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	50	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal	Dinas Kependudukan

Prioritas Nasional		Outcome Prioritas		Program		Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
korupsi, narkoba, judi, penyelundupan		pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital				Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	dan Pencatatan Sipil
					51	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
7. Reformasi politik, hukum, birokrasi, anti korupsi, narkoba, judi, penyelundupan	14	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa		PROGRAM PENATAAN DESA	52	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Bagian Pemerintahan Setda
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	53	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
8. Harmoni lingkungan, budaya, toleransi dan peradaban	15	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	25	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	54	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
					55	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
			26	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	56	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
					57	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
6. Pembangunan desa dan pemberantasan kemiskinan	16	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	27	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	58	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
					59	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
			28	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	60	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
					61	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
7. Reformasi politik, hukum, birokrasi, anti korupsi, narkoba, judi, penyelundupan	17	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	29	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	62	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Dinas Kominfo
					63	Pelayanan Informasi Publik	
					64	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			30	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	65	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	

Prioritas Nasional		Outcome Prioritas		Program		Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					66	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	
					67	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
3. Infrastruktur, lapangan kerja, kewirausahaan, koperasi, industri kreatif & agromaritim	18	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	31	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	68	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Dinas Koperasi dan UMKM
					69	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
			32	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	70	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
					71	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
5. Hilirisasi dan industri SDA bernilai tambah	19	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	33	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	72	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					73	Pengawasan Penanaman Modal	
4. SDM, iptek, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, disabilitas, pemuda	20	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	34	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	74	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Dinas Pemuda dan Olahraga
					75	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
			35	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	76	Seleksi Atlet Daerah	
					77	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
					78	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
7. Reformasi politik, hukum, birokrasi, anti korupsi, narkoba, judi, penyelundupan	21	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	36	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	79	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Dinas Persandian dan Statistik
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	80	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
7. Reformasi politik, hukum,	22	Menguatnya keamanan siber dan	37	PROGRAM PENYELENGGARAAN	81	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Dinas Persandian dan Statistik

Prioritas Nasional		Outcome Prioritas		Program		Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
birokrasi, anti korupsi, narkoba, judi, penyelundupan		sandi lingkungan Pemerintah Daerah		PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	82	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
8. Harmoni lingkungan, budaya, toleransi dan peradaban	23	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	38	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	83	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan
					84	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
			39	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	85	Penetapan Cagar Budaya	
					86	Pengembangan Cagar Budaya	
4. SDM, iptek, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, disabilitas, pemuda	24	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	40	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	87	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpusatakaan
					88	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	
			41	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	89	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	
					90	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	
7. Reformasi politik, hukum, birokrasi, anti korupsi, narkoba, judi, penyelundupan	25	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	42	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	91	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Kearsipan
	26	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa			92	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	
3. Infrastruktur, lapangan kerja, kewirausahaan, koperasi, industri kreatif & agromaritim	27	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	43	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	93	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan
					94	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
					95	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
			44	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	96	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					97	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	

Prioritas Nasional		Outcome Prioritas		Program		Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					98	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
3. Infrastruktur, lapangan kerja, kewirausahaan, koperasi, industri kreatif & agromaritim	28	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	45	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	100	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Ekraf
					101	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					102	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					103	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					104	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					105	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			46	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	106	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	
					107	Pengembangan Pendidikan	
					108	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	
					109	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	
					110	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	
					111	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	
3. Infrastruktur, lapangan kerja, kewirausahaan, koperasi, industri kreatif & agromaritim	29	Meningkatnya Produksi Pertanian	47	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	112	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Pertanian
					113	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
			48	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	114	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					115	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
5. Hilirisasi dan industri SDA bernilai tambah	30	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	49	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	116	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Dinas Perdagangan
					117	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
			50	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	118	Pameran Dagang Nasional	
					119	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
3. Infrastruktur, lapangan kerja, kewirausahaan, koperasi, industri kreatif & agromaritim	31	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	51	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	120	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian
					121	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			52	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	122	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	

Prioritas Nasional		Outcome Prioritas		Program		Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					123	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
6. Pembangunan desa dan pemberantasan kemiskinan	32	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	53	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	124	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Dinas Transmigrasi
					125	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	
			54	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	126	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	
1. Penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial)	33	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	55	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	127	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa
					128		
			56	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	129	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

Highlight Internvensi (HI)

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya menjadi salah satu fokus pembangunan dengan tujuan pemerataan kawasan. Berikut adalah uraian penjelasan dari output yang relevan dengan kondisi Kota Palopo:

1. Penguatan Kapasitas Daerah dalam Manajemen Layanan SPALD
   Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sistem penyediaan air minum dan layanan sanitasi (SPALD), sehingga kualitas layanan dapat lebih efektif dan merata.
2. Pemenuhan Akses Listrik pada Masyerakat
   Upaya ini difokuskan untuk menjamin akses listrik yang merata bagi masyarakat di kawasan Teluk Bone.
3. Pembangunan/Peningkatan/Perluasan SPAM
   Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) akan dibangun, ditingkatkan, atau diperluas untuk memastikan ketersediaan air bersih yang layak bagi masyarakat.
4. Penyediaan Perumahan
   Pemerataan pembangunan perumahan akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat di kawasan ini.
5. Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota
   Program ini dirancang untuk mengelola sampah secara terpadu di tingkat kota, mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan.
6. Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi
   Upaya ini meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap program sanitasi untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan.
7. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Listrik Sektor Ketenagalistrikan dan EBTKE
   Sertifikasi kompetensi akan diberikan kepada tenaga kerja di sektor ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan (EBTKE) untuk meningkatkan kualitas SDM dan mendukung pengembangan energi bersih.

Program-program tersebut dirancang untuk mendukung pemerataan pembangunan di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, energi terbarukan, sanitasi, dan penguatan kapasitas daerah. Beberapa intervensi yang relevan dengan situasi dan kondisi Kota Palopo adalah: penguatan kapasitas manajemen SPALD, pengembangan dan perluasan SPAM, serta pengelolaan layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT). Sistem pengelolaan persampahan skala kota juga sangat relevan mengingat tantangan Kota Palopo dalam pengelolaan sampah yang terintegrasi dan kebutuhan akan peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan perkotaan.

Selain itu, penyediaan perumahan, pemenuhan akses listrik melalui energi terbarukan, serta sertifikasi kompetensi tenaga kerja di sektor EBTKE sangat mendukung misi Palopo dalam menciptakan pusat pertumbuhan baru yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan, serta mendorong daya saing SDM. Kota Palopo memiliki potensi untuk mengembangkan kawasan hunian layak, terutama di wilayah pinggiran yang mulai berkembang, serta menjawab kebutuhan hunian atau komunitas berbasis ekonomi produktif. Dengan demikian, 7 dari 10 intervensi tersebut memiliki relevansi kuat untuk diformulasikan ke dalam program prioritas RKPD 2026 Kota Palopo.

Dalam upaya menyelaraskan perencanaan pembangunan nasional dengan daerah, dokumen RKP 2026 dan RKPD 2026 perlu dikaji secara komprehensif, khususnya terkait lokasi prioritas, highlight intervensi, serta dukungan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan/sub-kegiatan. Berikut adalah tabel lokasi prioritas, highlight intervensi dan dukungan Pemerintah Kota Palopo terhadap RKP 2026 :

Tabel 4.10
Lokasi Prioritas, Highlight Intervensi
dan Dukungan Pemerintah Kota Palopo terhadap RKP 2026

Kode	*Rkp 2026*		*Rkpd 2026*		*Kete Rangan*
	Lokasi Prioritas	***Highlight* Intervensi**	**Lokasi Prioritas**	**Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi		Program Penanggulangan Bencana	
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

Kode	Rkp 2026		Rkpd 2026		Kete Rangan
	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
			Kota Palopo	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			Kota Palopo	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			Kota Palopo	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
			Kota Palopo	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
			Kota Palopo	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Kota Palopo	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
			Kota Palopo	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
			Kota Palopo	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	

Kode	Rkp 2026		Rkpd 2026		Kete Rangan
	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
			Kota Palopo	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
			Kota Palopo	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
				Program Penanganan Bencana	
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Pelayanan Dukungan Psikososial	
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Kota Palopo	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
			Kota Palopo	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	

Kode	Rkp 2026		Rkpd 2026		Kete Rangan
	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			Kota Palopo	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
D14	Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya D14: Kota Palopo	Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya		Program Pengelolaan Persampahan	
				Pengelolaan Sampah	
			Kota Palopo	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	
			Kota Palopo	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
			Kota Palopo	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
			Kota Palopo	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
			Kota Palopo	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	
			Kota Palopo	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
	Provinsi Sulawesi Selatan	Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan,		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Kode	Rkp 2026		Rkpd 2026		Kete Rangan
	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
		perdesaan, pesisir, kepulauan, dan wilayah 3T	Kota Palopo	Normalisasi/Restorasi Sungai	
			Kota Palopo	Pembangunan Tanggul Sungai	
			Kota Palopo	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
			Kota Palopo	Rehabilitasi Tanggul Sungai	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Kota Palopo	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			Kota Palopo	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Kota Palopo	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Kota Palopo	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			Kota Palopo	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Kota Palopo	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			Kota Palopo	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
			Kota Palopo	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
			Kota Palopo	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

Tabel 4.11

Tabel Dukungan Pemerintah Kota Palopo Terhadap RKP 2026

No	Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Palopo	Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Daerah Dalam Rkpd 2026	Keterangan
1.	Prioritas Nasional 1			

No	Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Palopo	Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Daerah Dalam Rkpd 2026	Keterangan
	Penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial)	Pembangunan manusia yang inklusif dan penguatan kualitas layanan dasar (P2)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Pelayanan Informasi Publik	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
			Penyediaan Akses Internet	
2.	Prioritas Nasional 2			
	Pertahanan-keamanan, swasembada, dan penguatan	Pengembangan produktivitas ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	

No	Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Palopo	Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Daerah Dalam Rkpd 2026	Keterangan
	ekonomi berbasis syariah, digital, hijau, dan biru	berbasis kewirausahaan dan investasi lokal (P3)		
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			Pengawasan Ekstraksi Garam	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Penanganan sampah melalui pengangkutan	
			Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
			Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	

No	Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Palopo	Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Daerah Dalam Rkpd 2026	Keterangan
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
3.	Prioritas Nasional 3			
	Infrastruktur, lapangan kerja, kewirausahaan, koperasi, industri kreatif & agromaritim	Pengembangan infrastruktur strategis yang adaptif dan berkelanjutan (P4)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
			Penetapan Cagar Budaya	
			Pengembangan Cagar Budaya	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	

No	Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Palopo	Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Daerah Dalam Rkpd 2026	Keterangan
			Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	
			Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	
			Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	
			Pengembangan Pendidikan	
			Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	
			Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
			Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
			Penetapan Cagar Budaya	
			Pengembangan Cagar Budaya	
4.	Prioritas Nasional 4			
	SDM, iptek, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, disabilitas, pemuda	Pembangunan manusia yang inklusif dan penguatan kualitas layanan dasar (P2)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis	

No	Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Palopo	Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Daerah Dalam Rkpd 2026	Keterangan
			peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
			Seleksi Atlet Daerah	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Pengembangan Rumah Sakit	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	
			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum,	

No	Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Palopo	Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Daerah Dalam Rkpd 2026	Keterangan
			atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
5.	Prioritas Nasional 5			
	Hilirisasi dan industri SDA bernilai tambah	Pengembangan produktivitas ekonomi berbasis kewirausahaan dan investasi lokal (P3)	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Pameran Dagang Nasional	
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Pameran Dagang Nasional	

No	Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Palopo	Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Daerah Dalam Rkpd 2026	Keterangan
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Pameran Dagang Nasional	
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
6.	Prioritas Nasional 6			
	Pembangunan desa dan	Peningkatan kesejahteraan dan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	

No	Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Palopo	Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Daerah Dalam Rkpd 2026	Keterangan
	pemberantasan kemiskinan	ketahanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan budaya lokal (P5)		
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	
			Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	
			Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	
7.	Prioritas Nasional 7			
	Reformasi politik, hukum, birokrasi, anti	Penguatan tata kelola pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	

No	Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Palopo	Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Daerah Dalam Rkpd 2026	Keterangan
	korupsi, narkoba, judi, penyelundupan	yang transparan, akuntabel, dan berbasis digitalisasi layanan publik (P1)		
			Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
			Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
8.	Prioritas Nasional 8			
	Harmoni lingkungan, budaya, toleransi dan peradaban	Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan budaya lokal (P5)	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	

BAB. V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2026

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran daerah serta target pembangunan. Ada beberapa jenis sumber pembiayaan yang berpotensi untuk digunakan sebagai sumber pendanaan pembangunan di daerah, antara lain APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, pinjaman Bank, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*public private partnership* (PPP), Dana umat, *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dan obligasi daerah. Akan tetapi tidak semua sumber pendanaan tersebut dimiliki oleh Pemerintah Kota Palopo.

Kapasitas riil tahun 2026 sebagaimana turunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo Tahun 2024-2026 diasumsikan sebesar Rp 1.089.323.277.730,23 tetapi karena tidak tercapainya target pendapatan dan Instrsuksi Presiden No.25 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, maka tahun 2026 di proyeksikan turun menjadi Rp. 990.000.000.000,00. Belanja daerah tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program*, memperhatikan prioritas pembangunan, target atas tujuan dan sasaran pembangunan, serta diarahkan untuk menangani permasalahan pembangunan dan isu strategis 2026 di Kota Palopo, dan diupayakan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja tersebut antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kota Palopo Tahun 2026. Penyusunan target pendapatan dan belanja RKPD Kota Palopo 2026 serta proyeksi tahun 2027, tersaji dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1

Target Pendapatan dan Belanja Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027 Pemerintah Kota Palopo

Uraian	Jumlah				
	Realisasi Tahun (n-3) 2023	Realisasi Tahun (n-2) 2024	Tahun Berjalan (n-1) 2025	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n) 2026	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1) 2027
PENDAPATAN	**943,087,588,524.71**	**915,517,759,132.35**	**1,043,841,397,653**	**992,891,374,999.25**	**997,855,831,874.00**
Pendapatan Asli Daerah	**194,013,652,599.96**	**206,389,036,709.35**	**270,437,146,000**	**237,316,092,834.01**	**238,502,673,298.00**
Pajak Daerah	46,687,824,782	48,534,432,801	77,614,970,000	69,019,777,129.01	69,364,876,014.00
Retribusi Daerah	10,560,295,890	140,371,347,175	162,184,176,000	149,796,315,705.00	150,545,297,284.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,347,070,226	8,020,016,252	8,500,000,000	9,000,000,000.00	9,045,000,000.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	129,418,461,701.96	9,463,240,481.35	22,138,000,000	9,500,000,000.00	9,547,500,000.00
Pendapatan Transfer	**736,792,265,269.75**	**709,128,722,423**	**773,404,251,653**	**755,575,282,165.24**	**759,353,158,576.00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**658,230,414,371**	**654,149,905,364**	**693,551,541,000**	**692,046,676,935.65**	**695,506,910,320.00**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak	13,754,459,389	17,007,888,762	15,548,450,000	17,177,967,649.62	17,263,857,488.00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	3,819,004,000	3,621,645,600	0	0.00	0.00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	504,787,401,000	521,857,620,000	535,839,357,000	558,431,468,718.01	561,223,626,062.00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus	135,869,549,982	115,284,396,602	142,163,734,000	116,437,240,568.02	117,019,426,770.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	**5,930,155,000**	**0**	**6,442,293,000**	**8,000,000,000.00**	**8,040,000,000.00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	0	0	0	0.00	0.00
Dana Insentif Daerah (DID)	5,930,155,000	0.00	6,442,293,000.00	8,000,000,000.00	8,040,000,000.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**72,631,695,898.75**	**54,978,817,059**	**73,410,417,653.00**	**55,528,605,229.59**	**55,806,248,256.00**
Pendapatan Bagi Hasil	68,267,853,898.75	46,874,632,059	56,754,292,853.00	47,343,378,379.59	47,580,095,272.00
Bantuan Keuangan	4,363,842,000	8,104,185,000	16,656,124,800.00	8,185,226,850.00	8,226,152,984.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	**12,281,670,655**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hibah	0	0	0	0	0
Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0
Pendapatan Lainnya	12,281,670,655	0	0	0	0
BELANJA	**927,786,559,564.18**	**927,628,260,310.17**	**1,040,900,022,653**	**990,000,000,000.00**	**994,914,456,874.00**
Belanja Operasi	**745,228,569,827.38**	**827,381,598,042.75**	**892,016,618,126**	**782,015,746,806.00**	**785,925,825,540.00**
Belanja Pegawai	428,698,208,691.01	475,635,880,044.29	515,568,718,101	456,847,511,362.00	459,131,748,918.00
Belanja Barang dan Jasa	303,586,612,693.37	305,747,676,636.79	364,891,920,385	311,008,639,572.00	312,563,682,770.00

Uraian	Jumlah				
	Realisasi Tahun (n-3) 2023	Realisasi Tahun (n-2) 2024	Tahun Berjalan (n-1) 2025	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n) 2026	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1) 2027
Belanja Bunga	1,097,664,953	894,669,536.67	1,400,000,000	903,616,232.00	908,134,314.00
Belanja Subsidi		0.00	0	0.00	0.00
Belanja Hibah	11,735,083,490	44,967,371,825.00	9,993,979,640	12,993,979,640.00	13,058,949,538.00
Belanja Bantuan Sosial	111,000,000	136,000,000.00	162,000,000	262,000,000.00	263,310,000.00
Belanja Modal	**182,557,989,736.80**	**100,246,662,267.42**	**128,883,404,527**	**187,984,253,194.00**	**188,988,631,334.00**
Belanja Tak Terduga	**0**	**0**	**20,000,000,000**	**20,000,000,000.00**	**20,000,000,000.00**
Belanja Transfer	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	2.941.375.000	0	0

Sumber Data : RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026; Bappeda

Konsep rencana Belanja Daerah 2026 Kota Palopo adalah sebagai berikut :

1. Dari aspek alokasi, belanja Pemerintah Kota Palopo tahun 2026 akan tetap diarahkan pada pemenuhan *mandatory spending* yang mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengawasan (APIP), sesuai dengan kaidah alokasi yang berlaku.
2. Sektoral, belanja tersebut juga diarahkan pada pemenuhan standar pelayanan minimal masyarakat (SPM) dalam 6 urusan, dan sejumlah indikator dan target pencapaian *Sustainable Development Goals* atau SDGs/TPB.
3. Pengalokasian belanja Pemerintah Kota Palopo diarahkan menggunakan konsep *money follow the program*, yang artinya alokasi anggaran akan diarahkan pada tujuan dan sasaran pembangunan, dan prioritas pembangunan Kota Palopo. Dalam pengalokasiannya juga akan beririsan dengan dukungan Pemerintah Kota Palopo bagi prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2026.
4. Pengalokasian belanja untuk penyelesaian utang Pemerintah Kota Palopo sesuai ketentuan yang berlaku
5. Terakhir dukungan alokasi pendanaan melalui program-program di perangkat daerah yang menyasar pencapaian target prioritas nasional serta provinsi.

5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah Kota Palopo 2026, disusun dengan pendekatan kinerja dengan melakukan *cascading* tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai. Dalam konteks tersebut, program perangkat daerah dilakukan *mapping* sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan sebelumnya dan secara langsung terkait atau mengkontribusi tujuan dan sasaran pembangunan. Berikut adalah rincian program prioritas pembangunan daerah beserta target dan pagu indikatif setiap perangkat daerah :

Tabel 5.2

Tabel Program Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2026

Tujuan dan Sasaran RPD	Indikator Kinerja Utama (IKU)	No	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator	Target 2026	Anggaran 2026	Anggaran 2027	Perangkat Daerah
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas (T1)	**Indeks Reformasi Birokrasi**	1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS yang ditempatkan sesuai Syarat Jabatan dan Syarat Kompetensinya	60.00	2.604.616.145	2.716.535.315	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	45.00	1.349.152.459,00	1.282.777.459,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rata-Rata Nilai PMPRB Organisasi Perangkat Daerah	54.00	148.732.000,00	163.605.200,00	Inspektorat Daerah
		4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Tahunan Terhadap Target Kinerja Tahunan dalam RKPD	100.00	1,500,000,000	1.651.000.000,00	Bappeda
		5	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Terhadap Dokumen Perencanaan Daerah (%)	100.00	1,000,000,000	1.528.000.000,00	Bappeda
		6	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kesesuaian Pagu pada Dokumen Penganggaran Terhadap Dokumen Perencanaan (%)	100.00	17.274.818.000,00	17.620.000.000,00	BPKAD
		7	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Prolegda yang Ditetapkan Menjadi Regulasi Daerah	100.00	3.680.197.500,00	4.067.547.000,00	Sekretariat DPRD
		8	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100.00	7.323.980.026,00	9.991.195.596,00	Sekretariat Daerah
		9			100.00			BPKAD

Tujuan dan Sasaran RPD	Indikator Kinerja Utama (IKU)	No	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator	Target 2026	Anggaran 2026	Anggaran 2027	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Barang yang Memenuhi SAP		3.984.335.000,00	4.202.500.000,00	
		10	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	96.00	106.525.000,00	126.032.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		11	Program Pencatatan Sipil	Persentase Wajib KTP yang Terlayani (%)	76.00	33.895.000,00	35.634.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil
		12	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase KIM masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	5.00	1.331.600.000,00	1.698.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	100.00	94,615,376	95,561,529.76	Kecamatan
		14	Program Pelayanan Penanaman Modal	Angka Pertumbuhan Jumlah Investor di Daerah	100.00	215.010.000,00	235.550.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
		15	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Arsip (%)	26.00	64.002.295,00	69.949.324,00	Dinas Kearsipan
		16	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, dan Teknologi yang Diwujudkan (Inovasi)	100.00	692.917.736,00	165.714.200.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		17			100.00			

Tujuan dan Sasaran RPD	Indikator Kinerja Utama (IKU)	No	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator	Target 2026	Anggaran 2026	Anggaran 2027	Perangkat Daerah
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pengaduan dan Evakuasi yang Dilaksanakan dengan Memenuhi Respon Time 15 Menit		1.089.961.000,00	1.189.537.100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		18	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Angka Tingkat Ketersediaan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah sesuai Permendagri 86 (%)	100.00	90.190.200,00	78.351.020,00	Dinas Persandian dan Statistik
		19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Universal Helath Coverage (%)	100.00	107.951.242.000,00	108,327,889,400	RSUD Sawerigading
		20	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi (Privat)	100.00	5.485.000,00	6.033.500,00	Dinas Pertanahan
		21	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat	90.00	1.750.000.000,00	2.219.600.000,00	Dinas Perhubungan
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat & Perekonomian Daerah yang Berkualitas (T2)	**PDRB per Kapita (ADHB)**	22	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	8.00	120.500.000,00	91.300.000,00	Dinas Koperasi UKM
	Persentase Penduduk Miskin	23	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil (%/Tahun)	27.00	201.000.000,00	330.000.000,00	Dinas Koperasi UKM
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha (S2)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	24	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Angka Persentase Koperasi yang Aktif	86.00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Koperasi UKM
		25	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Usaha Ekraf Binaan yang Aktif Berusaha	90.00	318.196.000,00	366.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tujuan dan Sasaran RPD	Indikator Kinerja Utama (IKU)	No	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator	Target 2026	Anggaran 2026	Anggaran 2027	Perangkat Daerah
		26	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	80.00	492.487.650,00	755.011.000,00	Dinas Tenaga Kerja
		27	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Rumah Tangga/ Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pemberdayaan	92.00	182.100.000,00	188.400.000,00	Dinas Sosial
Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas (S3)	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	28	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Kesesuaian Realisasi Pendapatan Daerah dengan Target Pendapatan Daerah	100.00	3.628.880.200,00	4.240.129.600,00	Badan Pendapatan Daerah
	Angka Pertumbuhan Ekonomi	29	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kesesuaian Pagu pada Dokumen Penganggaran Terhadap Dokumen Perencanaan	100.00	17.274.818.000,00	17.620.000.000,00	BPKAD
		30	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Jumlah Retribusi dari Pasar	71.42	633.701.365,98	839.191.185,00	Dinas Perdagangan
		31	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Pengunjung Pada Destinasi Wisata Unggulan Daerah	10	2.259.231.800,00	2.171.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		32	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Usaha Ekraf Binaan yang Aktif Berusaha	85.00	318.196.000,00	366.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		33	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Total Persentase Rata-rata Gangguan Trantibum dan Perda/Perkada yang dapat diselesaikan	100.00	2.202.800.000,00	2.735.460.215,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		34	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Wilayah Rawan Konflik yang Dibina	100.00	998,524,000	1,008,509,240	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		35	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	5.00	2.487.695.000,00	4.490.225.486,00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Tujuan dan Sasaran RPD	Indikator Kinerja Utama (IKU)	No	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator	Target 2026	Anggaran 2026	Anggaran 2027	Perangkat Daerah
		36	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	28.00	45.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		37	Program penyuluhan pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Mampu Meningkatkan Produksi/Produktifitasnya	60.00	172.340.269,00	167.574.295,00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		38	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Event Pameran Sejarah yang Dilaksanakan	2.00	73.065.000,00	80.371.500,00	Dinas Kebudayaan
		39	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	19395,25 ton/Tahun	691.570.297,00	686.973.950,00	Dinas Perikanan
		40	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	192110,18 ton/Tahun	122.861.578,00	135.147.735,00	Dinas Perikanan
		41	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah Kelompok Tani yang Memanfaatkan Infrastruktur Ketahanan Pangan (Kelompok)	2 KWT	2.000.000,00	218.020.000,00	Dinas Ketahanan Pangnan
		42	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	90.00	38,417,750	38,801,928	Dinas Perindustrian
		43	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Unit Industri yang Berizin	17.00	5.280.000,00	6.144.290,00	Dinas Perindustrian
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (S4)	Indeks Pembangunan Manusia	44	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	100.00	40.442.180.499,00	43.873.597.603,00	Dinas Pendidikan
		Indeks Pembangunan Gender	45	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Universal Helath Coverage (%)	100.00	112.994.810.719,00	101,321,580,880	Dinas Kesehatan
			46	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	100.00	457.650.000,00	457.650.000,00	Dinas Kesehatan

Tujuan dan Sasaran RPD	Indikator Kinerja Utama (IKU)	No	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator	Target 2026	Anggaran 2026	Anggaran 2027	Perangkat Daerah
		47	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera I yang Meningkat Menjadi Keluarga Sejahtera (%)	1.00	1.250.720.000,00	1.255.143.000,00	Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
		48	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Event Olahraga yang Dilaksanan untuk Mendukung Kepariwisataan (Kali/Tahun)	77.00	4.563.432.852,00	1.728.681.636,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		49	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	82.00	201.681.800,00	111.849.980,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		50	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	25.00	172.198.000,00	220.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Terwujudnya Lingkungan Layak Huni dan Berkelanjutan (T3)	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**51**	Program Penanggulangan Bencana	Total Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100.00	1.048.046.720,00	1.278.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kualitas Lingkungan Perkotaaan (S5)	**Indeks Resiko Bencana**	52	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pengaduan dan Evakuasi yang Dilaksanakan dengan Memenuhi Respon Time 15 Menit	100.00	1.089.961.000,00	1.189.537.100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		53	Program Penanggulangan Bencana	Total Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100.00	1.048.046.720,00	1.278.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		54						

Tujuan dan Sasaran RPD	Indikator Kinerja Utama (IKU)	No	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator	Target 2026	Anggaran 2026	Anggaran 2027	Perangkat Daerah
	Luas Wilayah yang Terdampak Banjir		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan (%)	95.00	13.883.028.750,00	16.921.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Luas Kawasan Kumuh dari Total Luas Wilayah Kota	55	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sarana Prasarana persampahan yang berfungsi dengan baik	50.00	368.200.200,00	510.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		56	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Luas Wilayah Rawan Banjir dan Kawasan Produktif yang Sarana Prasarana Sumber Daya Airnya Ditangani	85 Ha	21.541.834.500,00	24.694.917.950,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		57	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan pemukiman kumuh tertangani	100.00	1.128.516.738,00	1.339.516.738,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		58	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung Dengan PSU	43.00	374.850.000,00	376.850.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		59	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status Kualitas Air dan Udara	15.00	368.200.200,00	510.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		60	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang dikelola/ditangani (Ha)	1176	3.760.321.200,00	4.030.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Bappeda

5.3 Rencana Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2026 mempertimbangkan beberapa aspek yakni Hasil Musrenbang RKPD Kota Palopo Tahun 2026 (partisipatif) yang melahirkan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta tetap menjaga perencanaan program sesuai RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026 (teknokratis), dan pokok-pokok pikiran DPRD (pendekatan politis). Jumlah Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo Pada Tahun 2026 terdiri dari 214 program, 591 kegiatan dan 1.644 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3
Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Alokasi Pagu Indikatif per Perangkat Daerah Tahun 2026

Kode	Urusan	Jumlah			Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Prog.	Keg.	Sub Keg.		
1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**	**42**	**130**	**411**	**660,859.501.898.00**	
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	5	16	86	200.320.708.058,00	Dinas Pendidikan
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	22	69	177,861,777,934.00	Dinas Kesehatan
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	2	4	7	141,883,621,670.00	RSUD Sawerigading
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	23	76	114.389.818.624,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	16	41	5.543.113.254,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2	10	30	7.182.936.466,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		2	12	37	3.692.674.426,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2	13	39	5.495.188.862,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	7	14	26	**4**.489.662.604,00	Dinas Sosial
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**	**82**	**149**	**398**	**93.775.885.134.00**	
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	5	16	32	3.404.290.996,00	Dinas Tenaga Kerja
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	22	53	4.354.396.484,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	5	14	39	2.737.275.618,00	Dinas Ketahanan Pangan
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	7	15	26	4.588.781.454,00	Dinas Pertanahan
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	11	21	54	26.476.057.172,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	18	35	3.360.548.678,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	16	82	7.737.750.254,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan	Jumlah			Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Prog.	Keg.	Sub Keg.		
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	3	16	34	8.956.829.852,00	Dinas Perhubungan
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	3	11	43	5.021.189.304,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	8	17	38	3.473.750.478,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	5	13	29	5.892.580.128,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4	16	43	8.106.926.658,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	2	7	19	2.565.750.854,00	Dinas Persandian dan Statistik
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	2	3	85.652.700,00	Dinas Persandian dan Statistik
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	6	16	36	2.754.337.780,00	Dinas Kebudayaan
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3	11	34	2.542.638.174,00	Dinas Perpustakaan
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	3	13	30	1.802.781.250,00	Dinas Kearsipan
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**27**	**85**	**221**	**41.026.305.442.00**	
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	4	15	31	5.536.029.644,00	Dinas Perikanan
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	5	14	40	6.271.405.808,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	7	22	62	19.258.241.034,00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	5	16	38	5.384.952.366,00	Dinas Perdagangan
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	4	10	33	2.468.219.404,00	Dinas Perindustrian
3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	2	8	17	2.107.457.186,00	Dinas Transmigrasi
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	**5**	**35**	**122**	**68.098.061.548.00**	
4.01	Sekretariat Daerah	3	20	66	41.795.800.268,00	Sekretariat Daerah
4.02	Sekretariat DPRD	2	15	56	26.302.261.280,00	Sekretariat DPRD
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	**13**	**61**	**182**	**61,919,576,226.00**	
5.01	Perencanaan	3	13	40	7.308.349.872,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02	Keuangan	3	14	52	30.747.171.690,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		2	9	34	12.308.668.298,00	Badan Pendapatan Daerah
5.03	Kepegawaian	2	12	28	7.060.319.345,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	1	1	1	1.349.152.459,00	
5.05	Penelitian dan Pengembangan	2	12	27	3.145.914.562,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**	**3**	**10**	**26**	**10.376.891.114,00**	
6.01	Inspektorat Daerah	3	10	26	10.376.891.114,00	Inspektorat Daerah
7	**Unsur Kewilayahan**	**36**	**108**	**242**	**47.952.975.588.00**	

Kode	Urusan	Jumlah			Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Prog.	Keg.	Sub Keg.		
7.01	Kecamatan Wara	4	12	25	6.091.026.174,00	Kecamatan Wara
	Kecamatan Wara Utara	4	12	31	5.242.736.232,00	Kecamatan Wara Utara
	Kecamatan Wara Timur	4	12	22	7.040.219.534,00	Kecamatan Wara Timur
	Kecamatan Wara Barat	4	13	29	4.561.551.172,00	Kecamatan Wara Barat
	Kecamatan Wara Selatan	4	12	30	4.429.626.312,00	Kecamatan Wara Selatan
	Kecamatan Bara	4	12	28	5.789.585.438,00	Kecamatan Bara
	Kecamatan Mungkajang	4	12	27	4.251.380.158,00	Kecamatan Mungkajang
	Kecamatan Sendana	4	13	26	4.326.157.106,00	Kecamatan Sendana
	Kecamatan Telluwanua	4	10	24	6.220.693.462,00	Kecamatan Telluwanua
8	**Unsur Pemerintahan Umum**	**6**	**13**	**42**	**5.990.803.050,00**	
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	42	5.990.803.050,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Total		**214**	**591**	**1.644**	**990.000.000.000,-**	

Sumber : Bappeda

Pagu indikatif Belanja Langsung tersebut digunakan untuk mendanai berbagai program Perangkat Daerah. Berikut rencana program pembangunan Kota Palopo yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program pembangunan tahun 2026 yaitu sebagai berikut :

Tabel . 5.4

Program Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO						200.320.708.058,00							213.321.759.978,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						200.320.708.058,00							213.321.759.978,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						200.320.708.058,00							213.321.759.978,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen 100 Persen	159.839.813.059,00						-	169.405.576.258,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	-			6 Dokumen 6 Dokumen	3.872.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen	-	4.686.412,00	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	1.922.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen		2.329.346,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.950.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen		2.357.066,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatusahaan Keuangan	-			12 Laporan	159.192.123.959,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Laporan	-	168.692.020.114,00	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1365 Orang/bulan	159.028.547.959,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Laporan		168.477.029.756,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				19 Dokumen	152.560.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Laporan		176.563.984,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15 Laporan	11.016.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Laporan		38.426.374,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo

															generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan aset	-			1 Laporan	21.380.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Laporan	-	16.646.135,00	
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	21.380.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Laporan		16.646.135,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang Dikelola	-			174 Orang	26.949.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Orang	-	61.283.948,00	
	1	01	01	2.05	0003	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				174 Dokumen	6.949.500,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Orang		22.000.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	20.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Orang		39.283.948,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang Ditatakelolakan	-			2 Jenis	151.282.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen	-	167.904.000,00	
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.400.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen		2.904.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	148.882.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen		165.000.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	32.654.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Unit	-	42.854.900,00	
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	6.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Unit		8.800.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	20.029.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Unit		23.054.900,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6.625.250,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Unit		11.000.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Daerah yang Dibiayai	-			3 Jenis	343.685.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Laporan	-	351.329.973,00	
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	64.431.800,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Laporan		65.075.890,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	106.901.950,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Laporan		77.070.180,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	172.352.200,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Laporan		209.183.903,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pemeliharaannya Dibiayai	-			110 Unit	67.865.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Unit	-	68.850.776,00	
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				48 Unit	15.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Unit		16.500.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				1 Unit	11.800.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Unit		12.320.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo

							Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				57 Unit	21.400.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Unit		23.100.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	19.665.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Unit		16.930.776,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	-			100 persen	40.442.180.499,00						-	43.873.597.603,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Pendidikan Dasar yang Ditangani (Sekolah)	-			81 sekolah	19.985.976.636,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan	-	22.011.976.481,00	
	1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (Usb)														
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	255.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		280.500.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu														
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	152.750.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		168.025.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	152.750.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		168.025.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	152.750.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		168.025.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	350.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		385.097.912,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	152.750.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		168.025.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu														
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	102.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		112.200.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	102.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		112.200.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	102.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		112.200.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	102.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		112.200.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	85.125.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		93.637.500,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	100.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		110.000.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	100.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		110.000.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa														
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				345 Peserta Didik	29.853.200,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		32.871.809,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo

														generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar													
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1365 Orang	25.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		27.500.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar													
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				450 Orang	44.308.460,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		48.739.306,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah													
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				81 Satuan Pendidikan	44.637.930,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		49.101.723,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar													
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	16.138.048.750,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		17.751.853.625,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar													
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				81 Orang	31.250.200,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		34.375.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar													
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	153.750.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		169.125.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar													
							Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	102.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		112.750.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				10 Orang	10.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		11.000.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan													
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	10.868.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		11.220.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	15.130.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		16.830.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	5.100.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		5.610.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan														
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	10.200.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		11.220.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi														
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	11.100.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		12.210.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks Dan Non Teks Peserta Didik														
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				1530 Buku	30.600.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		33.660.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1000 Paket	165.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		182.050.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	180.195.096,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		198.214.606,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	267.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		112.750.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo

													PENDIDIKAN-REGULER-SD						
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik													
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				81 Satuan Pendidikan	446.310.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		776.600.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	102.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		112.200.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				200 Peserta Didik	100.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		33.660.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Peserta Didik													
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	153.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		168.300.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Pendidikan Menengah Pertama yang Ditangani (Sekolah)	-			25 sekolah	16.154.825.493,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik	-	17.906.782.484,00	
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (Usb)													
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	255.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		280.500.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu													
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	765.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		841.500.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	408.388.416,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		449.227.257,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah													
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	250.120.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		275.132.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo

															pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium														
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				3 Ruang	1.225.586.885,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		1.348.090.573,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	255.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		280.500.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	204.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		224.400.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				6 Unit	562.537.336,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		343.791.069,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	153.482.052,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		168.830.257,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	80.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		88.000.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	80.160.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		88.176.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	204.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		224.400.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	81.400.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		89.540.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	198.295.004,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		145.860.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	82.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		90.200.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	120.808.800,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		132.889.680,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				250 Peserta Didik	50.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		55.000.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa														
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				350 Peserta Didik	34.459.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		37.070.343,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1365 Orang	23.026.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		112.200.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				450 Orang	53.764.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		59.132.165,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah														
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				25 Satuan Pendidikan	28.800.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		31.450.677,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama														

							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				25 Satuan Pendidikan	10.178.121.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		11.195.933.100,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				25 Orang	57.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		34.034.363,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				10 Orang	10.720.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		11.220.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan														
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	9.335.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		11.220.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	7.975.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		11.220.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	6.612.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		5.500.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan														
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				25 Komunitas	8.565.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		11.220.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi														
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	6.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		7.854.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				25 Satuan Pendidikan	125.250.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		561.000.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	306.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		336.600.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks Dan Non Teks Peserta Didik													
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				510 Buku	10.200.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		11.220.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				250 Paket	50.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		55.000.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu													
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	122.360.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		134.596.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Peserta Didik													
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	140.260.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik		154.275.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	umlah Lembaga Pendidikan PAUD yang Ditangani (Sekolah)	-			101 Satuan Pendidikan	3.497.405.380,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan	-	3.153.910.364,00	
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD													
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	242.079.608,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		266.287.569,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Paud													
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	50.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		27.500.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD													
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				110 Orang	21.695.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		11.220.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD													

							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				110 Orang	39.740.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		59.539.139,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD													
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				104 Satuan Pendidikan	50.966.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		16.830.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana Bop Paud													
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				104 Satuan Pendidikan	1.779.492.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOP PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		1.957.441.200,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bop Paud													
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				104 Orang	12.290.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		16.676.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.03	0023	Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan													
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	11.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		11.220.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan													
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	16.586.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		11.000.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	5.100.200,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		5.610.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		5.500.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan													
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	10.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		11.000.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru													

							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	153.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		204.233.228,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (Usb)													
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	785.656.572,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		204.233.228,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	100.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		110.000.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD													
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	61.200.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		67.320.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Peserta Didik PAUD													
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				1 Paket	51.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		56.100.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	51.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		56.100.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	51.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan		56.100.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	-			100 Persen	803.972.990,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Anak Tidak Sekolah	-	800.928.274,00	
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan													
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				831 Peserta Didik	10.200.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan	Anak Tidak Sekolah		11.220.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo

														penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				831 Orang	5.036.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Anak Tidak Sekolah		5.500.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan													
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				3 Satuan Pendidikan	16.290.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Anak Tidak Sekolah		17.786.785,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana Bop Sekolah Nonformal/Kesetaraan													
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				3 Satuan Pendidikan	583.628.990,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOS KINERJA, DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Anak Tidak Sekolah		541.991.889,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				3 Orang	4.345.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Anak Tidak Sekolah		5.600.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.04	0025	Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan													
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	5.365.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Anak Tidak Sekolah		5.500.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan													
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				3 Orang	5.390.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Anak Tidak Sekolah		5.500.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	5.048.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Anak Tidak Sekolah		5.500.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan													
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	5.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Anak Tidak Sekolah		5.500.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.04	0031	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi													
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	10.050.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	Anak Tidak Sekolah		5.500.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	10.200.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Anak Tidak Sekolah		11.220.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks Dan Non Teks Peserta Didik														
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				831 Buku	16.620.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Anak Tidak Sekolah		18.282.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				831 Peserta Didik	10.200.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Anak Tidak Sekolah		34.227.600,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan														
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				3 Paket	25.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Anak Tidak Sekolah		27.500.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	91.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Anak Tidak Sekolah		100.100.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-			-	19.565.800,00						-	21.522.388,00	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Lokal	-			100 Persen	10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	peserta Didik	-	11.000.000,00	
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				10 Orang	5.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	peserta Didik		5.500.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	peserta Didik		5.500.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	-			100 Persen	9.565.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan	peserta Didik	-	10.522.388,00	

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal														
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	4.640.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	peserta Didik		4.472.388,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal														
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	4.925.800,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	peserta Didik		6.050.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang Memenuhi Rasio Ideal Guru dan Siswa	-			100 Persen	11.716.200,00						-	12.887.979,00	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Lembaga Pendidikan PAUD, Dasar dan Non Formal yang Memenuhi Rasio Guru Ideal	-			1 Laporan	11.716.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Laporan	-	12.887.979,00	
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	8.716.200,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Laporan		9.587.979,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Laporan		3.300.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar yang Berizin	-			100 Persen	7.432.500,00						-	8.175.750,00	
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Lembaga Pendidikan yang Berizin	-			25 Sekolah	7.432.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Sekolah	-	8.175.750,00	
	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD Dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				25 Dokumen	5.432.500,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Sekolah		5.425.750,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
	1	01	05	2.02	0002	Pengendalian Dan Pengawasan Perizinan PAUD Dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				25 Dokumen	2.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Sekolah		2.750.000,00	Dinas Pendidikan Kota Palopo
						DINAS KESEHATAN KOTA PALOPO						177.861.777.934,00							0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						177.861.777.934,00							0,00	

	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						177.861.777.934,00							0,00	
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	63.600.024.973,00						-	0,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			6 Dokumen	17.851.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	10.201.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	7.650.600,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			3 Laporan	61.065.883.934,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				696 Orang/bulan	60.833.323.134,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				17 Dokumen	224.400.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	8.160.800,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			12 Laporan	69.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	69.600.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			5 Orang	61.206.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	61.206.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			2 Jenis	441.028.437,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	50.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	5.280.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	385.748.437,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			74 Unit	101.005.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	50.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				74 Unit	51.005.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo

	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			3 Jenis	1.706.740.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				40 Laporan	74.580.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	816.080.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	816.080.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	-			60 Unit	136.710.002,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	9.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	60.702.502,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	20.603.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	45.904.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Tingkat Pemenuhan Universal Helath Coverage	-			100 persen	112.994.810.719,00						-	0,00	

						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan (RS dan Puskesmas/Jaringannya) yang Berfungsi Baik dan Terakreditasi	-			12 buah	42.109.986.277,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana Dan Prasarana Pendukungnya														
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	506.050.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas														
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				12 Unit	714.070.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				16 Unit	1.188.617.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas														
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				12 Unit	33.041.174.082,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				16 Unit	459.045.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				16 Unit	102.265.025,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				12 Unit	1.473.024.631,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit														
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka				1 Unit	863.658.043,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo

							peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit								generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan														
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				12 Paket	3.660.071.996,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan Dan Minuman Ke Fasilitas Kesehatan														
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				12 Paket	102.010.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Layanan Kesehatan yang Dilaksanakan	-			12 Jenis	70.669.790.550,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3503 Orang	114.609.892,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3344 Orang	231.401.045,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3185 Orang	99.516.626,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14612 Orang	100.173.068,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9647 Orang	48.148.720,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif														
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				123968 Orang	64.069.931,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo

	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut													
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10355 Orang	62.739.975,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40890 Orang	58.252.811,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3060 Orang	59.427.838,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				425 Orang	132.031.543,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4050 Orang	75.745.613,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV													
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5200 Orang	81.104.326,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	162.603.940,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	150.745.908,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	184.068.757,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	2.714.769.178,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				48 Dokumen	1.001.556.495,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				83500 Dokumen	29.119.634.336,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat													
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	72.019.060,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	20.311.036.613,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	13.585.900.028,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	1.501.315.463,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/Kota													
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				12 Unit	738.919.384,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi kesehatan yang berfungsi dengan baik	-			1 Jenis	113.023.892,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	113.023.892,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang diawasi	-			8 Unit	102.010.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				90 Unit	51.005.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				8 Unit	51.005.000,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
8	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan	-			100 persen	344.658.503,00						-	0,00	
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	-			3 Dokumen	45.668.503,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan Dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				16 Dokumen	18.418.503,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1516 Orang	15.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1516 Dokumen	12.250.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan mutu dan kompetensi	-			12 persen	298.990.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1516 Orang	298.990.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
9	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat dan Alat Kesehatan, serta Usaha TTM dan TTU dan Usaha lain yang Memenuhi Syarat Kesehatan	-			100 persen	464.633.739,00						-	0,00	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin	-			121 Unit Usaha	387.340.920,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				121 Dokumen	387.340.920,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Usaha TTM dan TTU yang diberikan sertifikat terkait aspek kesehatan (Usaha/Tahun)	-			486 Usaha	21.406.230,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				12 Dokumen	21.406.230,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Usaha TPM yang Memperoleh Sertifikat Laik Higiene	-			264 Usaha	23.980.789,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	23.980.789,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah pembinaan yang dilakukan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	-			243 kali	15.606.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				12 Dokumen	15.606.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada	Jumlah Usaha yang Produknya diperiksa	-			121 Usaha	16.299.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	-	0,00	

						Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga									kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan														
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				121 Unit	16.299.800,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
10	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	-			100 persen	457.650.000,00						-	0,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat	-			12 Puskesmas	106.012.598,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				4 Dokumen	106.012.598,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Promotif Preventif	-			12 Puskesmas	239.031.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				4 Dokumen	190.133.100,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				33261 Keluarga	48.898.800,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya UKBM	-			12 Puskesmas	112.605.502,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	112.605.502,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kesehatan Kota Palopo
						RSUD SAWERIGADING KOTA PALOPO						141.883.621.670,00							0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						141.883.621.670,00							0,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						141.883.621.670,00							0,00	

11	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	33.932.379.670,00						-	0,00	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			12 Laporan	33.932.379.670,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	0,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				376 Orang/bulan	33.932.379.670,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		0,00	Rsud Sawerigading Kota Palopo
12	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit	-			85 Nilai	107.951.242.000,00						-	0,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana alat kesehatan dan pendukung lainnya Jumlah sarana, prasarana, alat kesehatan dan pendukung lainnya	-			3 Unit 3 Jenis	4.164.821.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Fasilitas Kesehatan	-	0,00	
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana Dan Prasarana Pendukungnya														
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				4 Unit	4.164.821.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENURUNAN AKI DAN AKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Fasilitas Kesehatan		0,00	Rsud Sawerigading Kota Palopo
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan yang di fasilitasi	-			22 Layanan	103.786.421.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Sarana layanan kesehatan	-	0,00	
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	103.786.421.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Sarana layanan kesehatan		0,00	Rsud Sawerigading Kota Palopo
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALOPO						114.389.818.624,00							128.464.178.986,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						114.389.818.624,00							128.464.178.986,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						114.389.818.624,00							128.464.178.986,00	
13	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	20.691.718.495,00						-	15.616.110.950,00	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			5 Dokumen	4.186.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	4.604.600,00	
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.501.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	Perangkat Daerah		2.751.100,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo

																Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.685.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		1.853.500,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			5 Laporan	14.680.563.110,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Perangkat Daerah	-	9.003.821.500,00	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	14.531.297.110,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Perangkat Daerah		8.839.628.900,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	92.475.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Perangkat Daerah		101.722.500,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	56.791.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Perangkat Daerah		62.470.100,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			1 Laporan	17.280.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	19.008.000,00	
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	17.280.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		19.008.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			67 Orang	76.910.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Perangkat Daerah	-	84.601.000,00	
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	42.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Perangkat Daerah		46.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	34.910.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Perangkat Daerah		38.401.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo

	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			5 Jenis	358.059.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	393.865.450,00	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	2.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		2.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	5.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		5.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	351.059.500,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		386.165.450,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			30 Jenis	5.064.947.885,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	5.571.462.000,00	
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	34.200.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		37.620.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	7.482.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		8.250.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	91.050.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		100.155.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	4.932.215.885,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah		5.425.437.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			3 Jenis	334.972.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	368.468.400,00	
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	22.108.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		24.318.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	95.149.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		104.663.900,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	217.715.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		239.486.500,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	-			134 Unit	154.800.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	170.280.000,00	
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	37.700.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		41.250.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				52 Unit	84.300.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		92.730.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	5.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		5.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	7.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		7.700.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.800.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		23.100.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
14	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Wilayah Rawan Banjir dan Kawasan Produktif yang Sarana Prasarana Sumber Daya Airnya Ditangani	-			85 Ha	21.541.834.500,00						-	24.694.917.950,00	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Lokasi Banjir/Genangan yang ditangani	-			25 Ha	17.665.834.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	20.431.317.950,00	

	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				3.5 KM	1.529.850.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		1.682.835.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai														
							Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				3.9 KM	14.139.984.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		15.553.982.950,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	02	2.01	0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi														
							Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun				1 Unit	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	02	2.01	0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
							Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				6 Unit	120.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		132.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	02	2.01	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai														
							Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0,8 KM	1.875.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		2.062.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	-			6500 Meter	3.876.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	4.263.600.000,00	
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				2.5 KM	3.000.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		3.300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0,25 KM	790.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		869.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	02	2.02	0021	Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				7 KM	86.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		94.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
15	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Telah Memiliki Akses Terhadap Air Minum	-			100 persen	1.360.981.180,00						-	1.895.979.000,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk berakses air minum	-			100 persen	1.360.981.180,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur	Masyarakat	-	1.895.979.000,00	

															kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan				
	1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Bukan Jaringan Perpipaan														
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				1 Unit	51.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		56.100.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan														
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				20 Liter/Detik	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan														
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				20 Liter/Detik	400.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		440.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan														
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				174 SR	908.981.180,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		999.879.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
16	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana Prasarana persampahan yang berfungsi dengan baik	-			55 persen	201.587.080,00						-	699.055.000,00	
	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Persampahan yang terbangun	-			1 Unit	201.587.080,00			-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	699.055.000,00	
	1	03	04	2.01	0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
							Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi				5 Unit	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	04	2.01	0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R														
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun				100 Ton/hari	200.587.080,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		599.055.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
17	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	-			100 persen	1.644.047.356,00						-	2.806.714.733,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tinggal bersanitasi	-			100 SR	1.644.047.356,00			-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	2.806.714.733,00	
	1	03	05	2.01	0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Spald) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat														
							Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				20 M³/Hari	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur	Masyarakat		100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo

																Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan				
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				150 Rumah Tangga	200.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Masyarakat		220.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja														
							Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Masyarakat		899.362.677,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit Pengolahan Setempat														
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				77 Rumah Tangga	1.443.047.356,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Masyarakat		1.587.352.056,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
18	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat	-			50 persen	4.944.787.350,00						-	7.131.565.600,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang di bangun	-			2400 Meter	4.944.787.350,00			-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat	-	7.131.565.600,00	
	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				3000 M	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat		350.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	06	2.01	0018	Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan														
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan				150 Orang	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	06	2.01	0019	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan														
							Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				5000 Meter	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	06	2.01	0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan														
							Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi				500 M	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	06	2.01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan														
							Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				15 Sistem Drainase Lingkungan	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	06	2.01	0022	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan														

							Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan				50 Unit	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan														
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				10 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				20 Sistem Drainase Perkotaan	2.284.054.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		2.512.459.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				22 Sistem Drainase Perkotaan	2.653.733.350,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		2.919.106.600,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
19	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung berizi yang Terbangun	-			90 persen	16.752.600.000,00						-	23.367.354.588,00	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung berizin yang dibangun	-			500 Unit	16.752.600.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	23.367.354.588,00	
	1	03	08	2.01	0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan				1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	1.030.600.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		1.130.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				2 Bangunan Gedung	2.400.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		2.640.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan Dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	13.100.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		19.353.154.588,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, Dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG														
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung				500 Dokumen	222.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Masyarakat		244.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

							(SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						Semua Kel/Desa		kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				Ruang Kota Palopo
20	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proprosi Panjang Jalan yang Berkondisi Baik	-			70 persen	46.250.262.663,00						-	51.150.281.165,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang ditangani	-			468 Km	46.250.262.663,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	51.150.281.165,00	
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				200 KM	190.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		209.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				2 KM	100.670.450,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		110.737.495,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan														
							Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				9.5 KM	6.399.365.888,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		7.039.302.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	10	2.01	0055	Rehabilitasi Jalan														
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi				23 KM	3.848.187.200,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		4.233.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	10	2.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				3 KM	7.461.520.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		8.207.672.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	10	2.01	0057	Penggantian Jembatan														
							Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian				36 Meter	771.843.600,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		849.027.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	10	2.01	0058	Rehabilitasi Jembatan														
							Panjang Jembatan yang Direhabilitasi				150 Meter	1.752.558.425,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan4. Pengembangan Infrastruktur	Masyarakat		1.927.814.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

															mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan				Ruang Kota Palopo
	1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan														
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi				8 KM	21.405.507.400,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		23.821.058.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	10	2.01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				4 Jembatan	100.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		110.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	10	2.01	0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar														
							Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				0,8 KM	1.957.120.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		2.152.832.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan														
							Panjang jembatan yang dibangun				100 Meter	2.263.489.700,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		2.489.838.670,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
21	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	-			80 persen	62.000.000,00						-	68.200.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	-			1 pelatihan	53.885.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Masyarakat	-	59.273.500,00	
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator Dan Teknisi Atau Analis														
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				50 Orang	41.676.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Masyarakat		45.843.600,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi Atau Analis														
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				25 Orang	12.209.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Masyarakat		13.429.900,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pelatihan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	-			1 pelatihan	8.115.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	Masyarakat	-	8.926.500,00	

															pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan Dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
							Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				10 Paket Pekerjaan	8.115.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		8.926.500,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
22	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW	-			100 Persen	940.000.000,00						-	1.034.000.000,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Rinci tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	844.870.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat dan Pemerintah	-	929.357.000,00	
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat dan Pemerintah		55.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Rdtr Kabupaten/Kota														
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	185.150.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat dan Pemerintah		203.665.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	12	2.01	0010	Penetapan Rdtr Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat dan Pemerintah		330.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	12	2.01	0011	Penetapan Rtrw Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat dan Pemerintah		330.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				2 Laporan	9.720.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah		10.692.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan koordinasi Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan	-			1 Dokumen	15.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah	-	16.500.000,00	
	1	03	12	2.03	0007	Sistem Informasi Dan Komunikasi Penataan Ruang														
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	15.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah		16.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo

	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan	-			2 Kegiatan	80.130.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	88.143.000,00	
	1	03	12	2.04	0003	Operasionalisasi Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang													
							Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				3 Kasus	30.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		33.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Dalam RTR													
							Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				3 Kasus	30.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		33.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan/Atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK													
							Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				50 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		16.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas Dan Fungsi Forum Penataan Ruang													
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				12 Laporan	5.130.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat		5.643.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palopo
						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO						5.543.113.254,00							5.669.664.353,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.543.113.254,00							5.669.664.353,00	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						5.543.113.254,00							5.669.664.353,00	
23	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.717.554.916,00						-	3.627.033.515,00	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.840.000,00			-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-	-	13.841.000,00	
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	11.350.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		12.350.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.490.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		1.491.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.058.353.901,00			-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-	-	2.959.904.000,00	
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	2.979.704.101,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		2.879.254.200,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20 Dokumen	76.849.800,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		77.849.800,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	1.800.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		2.800.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo

	1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	13.950.000,00			-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-	-	14.950.000,00	
	1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	13.950.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		14.950.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	31.600.000,00			-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-	-	33.600.000,00	
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				29 Paket	11.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		12.600.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				29 Orang	20.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		21.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	266.034.867,00			-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-	-	267.034.867,00	
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	1.004.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		1.004.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	5.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		5.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokume n	1.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		1.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	259.030.867,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		260.030.867,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	11.900.000,00			-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-	-	12.900.000,00	
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	11.900.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		12.900.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	277.326.148,00			-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-	-	279.253.648,00	
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	53.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		54.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	136.876.148,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		136.803.648,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	87.450.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		88.450.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	45.550.000,00			-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-	-	45.550.000,00	
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		26.500.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	1.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		1.500.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	7.100.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		7.100.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.450.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		10.450.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
24	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi serta fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak program pemerintah	-			100 persen	308.635.000,00						-	311.707.500,00	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Penyediaan Rehab Rumah Korban Bencana/Relokasi Program	-			3 Dokumen	35.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat yang terdampak bencana	-	36.000.000,00	
	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
							Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat yang terdampak bencana		11.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani														
							Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Masyarakat yang terdampak bencana		15.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	02	2.01	0008	Pendataan Dan Verifikasi Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Masyarakat yang terdampak bencana		10.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi dan pembentukan Tim Penyediaan Rehab Rumah Korban Bencana	-			2 Laporan	26.907.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Masyarakat yang terdampak bencana	-	27.907.500,00	
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														
							Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				50 Orang	15.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Masyarakat yang terdampak bencana		15.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo

														produksi melalui peran aktif koperasi.					
	1	04	02	2.02	0004	Pembentukan Dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping Dan Fasilitator													
							Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				25 Orang	11.907.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Masyarakat yang terdampak bencana		12.907.500,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana/Relokasi Program yang dibangun/direhab	-			5 Unit	122.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Masyarakat yang terdampak bencana	-	122.000.000,00	
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana													
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				5 Unit Rumah	120.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Masyarakat yang terdampak bencana		120.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana													
							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				7 Unit Rumah	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Masyarakat yang terdampak bencana		1.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota													
							Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				7 Unit Rumah	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Masyarakat yang terdampak bencana		1.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-			-	124.727.500,00			-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-	-	125.800.000,00	
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun													
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				4 Laporan	3.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		3.500.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus													
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				4 Dokumen	121.227.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		122.300.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
25	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani jumlah Hasil survei dan Dokumen Kebijakan PKP (Laporan/Dokumen)	-			100 persen 2 Dokumen	1.128.516.738,00						-	1.339.516.738,00	
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	-			2 Dokumen	2.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Masyarakat dan pemerintah kota Palopo	-	2.000.000,00	
	1	04	03	2.02	0014	Survei Dan Penetapan Lokasi Perumahan Dan Permukiman Kumuh													
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	2.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Masyarakat dan		2.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan

													Semua Kel/Desa		berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		pemerintah kota Palopo			Permukiman Kota Palopo
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	1.126.516.738,00			-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-	-	1.337.516.738,00	
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				14 Unit Rumah	579.087.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		549.087.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan Dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														
							Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				3 Dokumen	110.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		50.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh														
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				10 Ha	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		300.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh														
							Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				10 Ha	437.429.738,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		438.429.738,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
26	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	374.850.000,00						-	376.850.000,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	374.850.000,00			-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-	-	376.850.000,00	
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan Psu Perumahan														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				5 Dokumen	110.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		111.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utiltas Umum Perumahan				30 Laporan	27.850.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		27.850.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
	1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan														
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				10 Lokasi	237.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		238.000.000,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palopo
27	1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	13.556.600,00						-	14.556.600,00	
	1	04	06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	-	-			-	13.556.600,00			-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	14.556.600,00	
	1	04	06	2.01	0001	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Kecil														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi				10 Laporan	13.556.600,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur	-		14.556.600,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan

							Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil									Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan				Permukiman Kota Palopo
						DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO						5.495.188.862,00							6.018.628.948,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.495.188.862,00							6.018.628.948,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						5.495.188.862,00							6.018.628.948,00	
28	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan daerah	-			100 %	4.405.227.862,00						-	4.829.091.848,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			5 Dokumen	2.749.200,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	3.024.120,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.162.200,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		2.378.420,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	587.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		645.700,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan penatausahaan keuangan	-			15 Laporan	3.255.755.382,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	3.531.014.320,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	3.225.150.582,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		3.497.244.300,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	28.800.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		31.680.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.047.400,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		1.256.880,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	757.400,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		833.140,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	-			1 Laporan	8.095.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	8.904.500,00	
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.095.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		8.904.500,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo

	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	18.812.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	20.693.200,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	10.125.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		11.137.500,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo
	1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	8.687.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		9.555.700,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umumyang ditata kelolakan	-			4 jenis	82.760.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	126.614.950,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.065.500,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		3.372.050,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	79.695.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		123.242.900,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umumyang ditata kelolakan	-			4 Jenis	952.001.380,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	1.045.280.918,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	21.286.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		21.494.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	99.720.060,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		109.692.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	830.995.320,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		914.094.918,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	-			2 Jenis	85.054.400,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	93.559.840,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	37.500.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola	Perangkat Daerah		41.250.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan

															untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				Penyelamatan Kota Palopo
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	11.000.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		12.100.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	19.644.400,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		21.608.840,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	16.910.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		18.601.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo
29	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Pengaduan dan Evakuasi yang Dilaksanakan dengan Memenuhi Respon Time 15 Meni	-			100 %	1.089.961.000,00						-	1.189.537.100,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang dilayani sesuai Responce Time	-			7,5 Km	1.082.561.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	1.181.397.100,00	
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	1.028.061.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		1.130.867.100,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	48.300.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		44.880.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				2 Unit	6.200.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		5.650.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah masyarakat yang memperoleh sosialisasi dan edukasi	-			400 Orang	7.400.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	8.140.000,00	
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat														
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				400 Orang	7.400.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		8.140.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palopo
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALOPO						3.692.674.426,00							4.204.264.683,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.596.181.426,00							4.084.264.683,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3.596.181.426,00							4.084.264.683,00	
30	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.548.134.706,00						-	2.806.264.683,00	

	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.998.600,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	13.000.000,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.205.200,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		8.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.793.400,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		5.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.274.613.206,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	2.483.564.683,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	2.241.818.306,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		2.444.364.683,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	30.600.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		36.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.194.900,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		1.700.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		1.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.200.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	10.000.000,00	
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	7.200.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	13.700.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	17.000.000,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	13.700.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		17.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.291.680,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	4.700.000,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.288.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		1.700.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	930.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		1.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.073.680,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		1.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	6.709.780,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	8.500.000,00	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1.180.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		1.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.529.780,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		7.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	174.671.440,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	195.000.000,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	17.068.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		25.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	64.043.440,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		70.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	93.560.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	59.950.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	74.500.000,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	15.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	34.950.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		38.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	5.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		8.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		8.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
31	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-			-	1.048.046.720,00						-	1.278.000.000,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	35.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	40.000.000,00	
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				30 Orang	35.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		40.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo

	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	138.527.500,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	223.000.000,00	
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				1 Unit	15.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				35 Orang	8.775.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana														
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				1 Kawasan	9.975.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (Trc) Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				10 Orang	9.840.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		35.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		35.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	20.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		33.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	19.987.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		35.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1 Kawasan	14.950.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	817.124.500,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	930.000.000,00	
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	4.999.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				36 Orang	716.200.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		800.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	03	2.03	0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal				1 Dokumen	25.300.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		30.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan				5 Orang	20.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur	-		25.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana

							penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis						Semua Kel/Desa			Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan				Daerah Kota Palopo
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				5 Orang	25.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		33.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	25.625.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		32.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	57.394.720,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	85.000.000,00	
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana														
							Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	7.250.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	30.144.720,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		45.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) Dan Rencana Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		25.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
	X					NON URUSAN						96.493.000,00							120.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						96.493.000,00							120.000.000,00	
32	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	96.493.000,00						-	120.000.000,00	
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	96.493.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	120.000.000,00	
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	96.493.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		120.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO						7.182.936.466,00							6.718.093.070,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.182.936.466,00							6.718.093.070,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						7.182.936.466,00							6.718.093.070,00	
33	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.980.136.466,00						-	3.982.632.855,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	860.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	935.000,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	460.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		550.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				111 Laporan	400.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		385.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.607.616.466,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang	-	-	3.255.765.855,00	

															akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	4.549.936.466,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		3.187.928.855,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				84 Dokumen	57.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		66.792.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	340.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		330.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	340.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		715.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.200.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	8.712.000,00	
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	7.200.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		8.712.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	112.000.000,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				101 Paket	0,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		112.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	120.415.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	267.960.000,00	
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		12.100.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	-		6.600.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo

																Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokume n	4.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		7.260.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	115.915.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		242.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	174.350.000,00	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit	0,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		28.600.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				61 Unit	0,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		145.750.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	145.295.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	125.235.000,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	24.875.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		26.620.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5.400.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		13.915.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Laporan	115.020.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		84.700.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	98.750.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	37.675.000,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	91.750.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		26.675.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	7.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan	-		11.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo

																Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
34	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Total Persentase Rata - rata Gangguan Trantibum dan Perda/Perkada yang dapat diselesaikan	-			100 persen	2.202.800.000,00						-	2.735.460.215,00	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan pencegahan dan penindakan gangguan trantibum serta pemberdayaan perlindungan masyarakat	-			1717 Laporan	2.186.600.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	2.495.880.215,00	
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				12 Dokumen	0,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		66.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum														
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3150 Dokumen	0,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		354.860.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Pol Ppngsional Pol PP Dan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional														
							Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja				600 Orang	66.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		74.800.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan Pengawalan														
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				731 laporan	1.311.800.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		1.580.247.844,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa														
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				216 Laporan	808.200.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		207.900.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perturan Kepala Daerah														
							Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				2 Laporan	0,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		14.072.371,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ketentraman Dan Ketertiban Umum														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				202 Unit	0,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		198.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	16.200.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	239.580.000,00	
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5 Laporan	0,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		49.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran				36 Laporan	16.200.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		105.600.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo

							Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP									1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				36 Laporan	0,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		84.480.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
						DINAS SOSIAL KOTA PALOPO					4.489.662.604,00							4.725.400.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.489.662.604,00							4.725.400.000,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					4.489.662.604,00							4.725.400.000,00	
35	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	3.234.420.732,00						-	3.508.000.000,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			4 Dokumen	20.983.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah	-	23.000.000,00	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	10.369.200,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah		11.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10.614.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah		12.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.587.337.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah	-	3.035.000.000,00	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2.553.222.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah		3.000.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	32.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah		35.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	1.615.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah		0,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	26.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah	-	0,00	
	1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	26.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah		0,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	204.929.912,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	Perangkat Daerah	-	170.000.000,00	

															dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal				
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	1.885.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah		0,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	203.044.912,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah		170.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	40.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah	-	0,00	
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	40.200.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah		0,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	227.070.620,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah	-	220.000.000,00	
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	29.070.800,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah		0,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	65.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah		70.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	132.999.820,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah		150.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	127.900.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah	-	60.000.000,00	
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	37.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah		0,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	44.800.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah		60.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	7.600.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah		0,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	38.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Perangkat Daerah		0,00	Dinas Sosial Kota Palopo
36	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-			-	182.100.000,00						-	188.400.000,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	182.100.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	KELUARGA	-	188.400.000,00	
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Lembaga	163.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	KELUARGA		180.400.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	02	2.03	0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)													
							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	19.100.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	KELUARGA		8.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
37	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	193.200.000,00						-	222.000.000,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	163.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	-	182.000.000,00	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	39.600.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		45.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	21.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		22.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	18.400.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		10.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial													
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	44.900.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia		65.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo

															Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Terlantar, serta Gelandangan Pengemis			
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat													
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	39.300.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		40.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-			-	30.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Masyarakat	-	40.000.000,00	
	1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang													
							Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Masyarakat		40.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
38	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			-	579.341.872,00						-	387.000.000,00	
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	-			-	123.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Masyarakat	-	14.000.000,00	
	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar													
							Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	123.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Masyarakat		14.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	455.841.872,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Data Fakir Miskin	-	373.000.000,00	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				7500 Orang	336.366.872,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Data Fakir Miskin		100.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat													
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	15.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Data Fakir Miskin		25.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga													
							Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3000 Orang	34.800.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Data Fakir Miskin		48.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				5000 Usulan	69.675.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Data Fakir Miskin		200.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
39	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-			-	244.312.500,00						-	340.000.000,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	-	-			-	15.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan	Korban Bencana	-	40.000.000,00	

						dan Sosial Kabupaten/Kota								ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal				
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial													
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Korban Bencana		40.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	229.312.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Masyarakat	-	300.000.000,00	
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana													
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				31 Orang	229.312.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Masyarakat		300.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
40	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-			-	56.287.500,00						-	80.000.000,00	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-			-	56.287.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Taman Makam Pahlawan	-	80.000.000,00	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota													
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				600 Makam	56.287.500,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Taman Makam Pahlawan		80.000.000,00	Dinas Sosial Kota Palopo
						DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO						3.404.290.996,00							3.812.409.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.404.290.996,00							3.812.409.000,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						3.404.290.996,00							3.812.409.000,00	
41	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	2.549.778.696,00						-	2.677.272.000,00	
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			6 Dokumen	1.075.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja	-	1.129.000,00	
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	735.000,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja		772.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	340.000,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja		357.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			18 Laporan	2.171.088.108,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN pada Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja	-	2.279.644.000,00	

														generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.107.942.108,00	Kota Palopo, Wara, Dangerekko	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN pada Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja		2.213.340.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	62.050.000,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN pada Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja		65.153.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	270.000,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN pada Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja		284.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	826.000,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN pada Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja		867.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			5 Laporan	7.841.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	8.233.000,00	
	2	07	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	7.841.000,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		8.233.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			1 Jenis	12.290.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN pada Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja	-	12.905.000,00	
	2	07	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	12.290.000,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN pada Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja		12.905.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			1 Jenis	50.858.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja	-	53.401.000,00	

	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	50.858.000,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja		53.401.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			1 Jenis	5.827.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja	-	6.119.000,00	
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.827.500,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja		6.119.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			3 Jenis	95.373.088,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja	-	100.143.000,00	
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.414.000,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja		6.735.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	33.792.398,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja		35.483.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	55.166.690,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja		57.925.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	-			35 Unit	205.426.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	215.698.000,00	
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	19.250.000,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		20.213.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				14 Unit	3.025.000,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Barang Milik Daerah		3.176.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

							Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	pada Perangkat Daerah			
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	4.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4.830.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	178.551.000,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		187.479.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
42	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Ditetapkan	-			100 persen	17.100.000,00						-	17.955.000,00	
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	-			1 Dokume n	17.100.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja	-	17.955.000,00	
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokume n	17.100.000,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja		17.955.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
43	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	-			80 persen	492.487.650,00						-	755.011.000,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jenis Pelatihan Berdasarkan Kompetensi	-			7 Jenis	489.101.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Pencari Kerja	-	751.456.000,00	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				132 Orang	376.031.720,00	Kota Palopo, Bara, Temmalebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Pencari Kerja		394.833.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				24 Unit	111.069.930,00	Kota Palopo, Bara, Temmalebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Pencari Kerja		116.623.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	03	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi														
							Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n				100 Orang	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 3. Pengembangan Produktifitas	Masyarakat Pencari Kerja		120.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

																Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal				
	2	07	03	2.01	0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas														
							Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas				1 Lembaga	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Pencari Kerja		120.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	-			14 Lembaga	3.386.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	3.555.000,00	
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				14 Lembaga	3.386.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		3.555.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
44	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	-			56 persen	121.172.450,00						-	127.231.000,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberikan Pelayanan	-			2700 Orang	42.298.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Pencari Kerja	-	44.413.000,00	
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan Antar Kerja														
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				800 Orang	29.932.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Pencari Kerja		31.429.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				10 Orang	12.366.000,00	Kota Palopo, Bara, Temmalebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Pencari Kerja		12.984.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang menerima informasi pasar kerja	-			600 Orang	78.874.450,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Pencari Kerja	-	82.818.000,00	
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				100 Orang	5.036.000,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Pencari Kerja		5.288.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja														
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				120 Orang	73.838.450,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Pencari Kerja		77.530.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

															generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
45	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	-			31 Persen	223.752.200,00						-	234.940.000,00	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang Disahkan	-			15 Peraturan	11.373.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Perusahaan dan Pekerja	-	11.942.000,00	
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan														
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				15 Perusahaan	361.000,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Perusahaan dan Pekerja		379.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan														
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				200 Laporan	11.012.000,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Perusahaan dan Pekerja		11.563.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Dilaporkan	-			20 Kasus	212.379.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Perusahaan dan Pekerja	-	222.998.000,00	
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				20 Perkara	6.526.000,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Perusahaan dan Pekerja		6.852.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				2030 Orang	205.853.200,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Perusahaan dan Pekerja		216.146.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO						3.373.635.384,00							3.567.440.560,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.373.635.384,00							3.567.440.560,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						3.373.635.384,00							3.567.440.560,00	
46	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.843.766.684,00						-	3.004.507.410,00	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			5 Dokumen	10.515.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah	-	11.566.500,00	
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	6.705.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		7.375.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.810.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		4.191.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.557.815.084,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah	-	2.673.427.000,00	
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	2.507.630.084,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		2.618.863.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	46.200.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		50.160.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.010.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		2.221.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.975.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		2.182.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.684.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah	-	7.260.000,00	
	2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6.684.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		7.260.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	14.262.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah	-	15.167.100,00	
	2	08	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	14.262.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		15.167.100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

																				Anak Kota Palopo
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	86.637.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah	-	115.114.800,00	
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.794.500,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		21.787.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.136.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		2.349.600,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	4.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		4.950.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	78.207.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		86.027.700,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	116.423.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah	-	125.267.010,00	
	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12.585.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		13.843.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	36.986.900,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		37.887.190,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	66.851.200,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		73.536.320,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo

															generasi Z), dan penyandang disabilitas.				
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	51.430.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah	-	56.705.000,00	
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.250.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		39.875.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	300.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		330.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	5.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		5.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.880.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		11.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
47	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-			-	172.198.000,00						-	220.000.000,00	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PUG pada Lembaga Pemerintah	-			49 Perangkat Daerah	90.435.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah	-	176.000.000,00	
	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG													
							Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		88.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	02	2.01	0007	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota													
							Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				20 Laporan	10.435.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		88.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	81.763.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah	-	44.000.000,00	

															pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	08	02	2.03	0008	Penguatan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				1 dokumen	81.763.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah		44.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
48	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	187.100.000,00						-	199.515.250,00	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	128.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perempuan, Laki-laki, Aparat Penegak Hukum. Tenaga Kesehatan . Tenaga Pendidik dan Kependidikan	-	135.055.250,00	
	2	08	03	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas Kepada SDM Yang Terkait Langsung Pencegahan Ktp Kewenangan Provinsi														
							Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				100 orang	80.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perempuan, Laki-laki, Aparat Penegak Hukum. Tenaga Kesehatan . Tenaga Pendidik dan Kependidikan		83.607.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	03	2.01	0006	Advokasi Dan Sosialisasi Pencegahan Ktp Dan TPPO Kepada Pengambil Kebijakan Dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				49 Lembaga	48.400.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perempuan, Laki-laki, Aparat Penegak Hukum. Tenaga Kesehatan . Tenaga Pendidik dan Kependidikan		51.447.750,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	58.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4.Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-	64.460.000,00	
	2	08	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				60 orang	58.200.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4.Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		64.460.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
49	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-			-	10.060.000,00						-	11.066.000,00	
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan	-	-			-	10.060.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	Keluarga, Tokoh Agama,	-	11.066.000,00	

						Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Tokoh Masyarakat , Perangkat Daerah, LSM dan PKK			
	2	08	04	2.01	0006	Advokasi Dan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga Kepada Pengambil Kebijakan Dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Provinsi Dan Lintas Kabupaten/Kotaten/Kota, Sesuai Dengan Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah.															
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	10.060.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Keluarga, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat , Perangkat Daerah, LSM dan PKK		11.066.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
50	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-			-	47.853.000,00							-	52.638.300,00	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	47.853.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat , LSM dan Akademisi	-	52.638.300,00	
	2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, Dan Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				49 Dokumen	28.875.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat , LSM dan Akademisi		31.762.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	05	2.01	0005	Penguatan Dan Peningkatan Kualitas Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Hasil Pencatatan Dan Pelaporan Melalui Simfoni PPA														
							Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA				1 Dokumen	18.978.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat , LSM dan Akademisi		20.875.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
51	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-			-	70.930.000,00							-	79.713.600,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	70.930.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) , Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Keagamaan , Dunia Usaha, dan Satuan Pendidikan	-	79.713.600,00	
	2	08	06	2.01	0003	Advokasi Dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Lembaga	29.075.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) , Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Keagamaan , Dunia Usaha, dan Satuan Pendidikan		31.982.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
	2	08	06	2.01	0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
							jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				23 Lembaga	41.855.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) , Organisasi Masyarakat		47.731.100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo

														generasi Z), dan penyandang disabilitas.		(Ormas), Organisasi Keagamaan, Dunia Usaha, dan Satuan Pendidikan			
52	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	41.727.700,00						-	0,00	
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	41.727.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4.Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah, Lembaga Penyedia Layanan Anak, LSM, Penegah Hukum dan Anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	0,00	
	2	08	07	2.03	0013	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai														
							jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				30 Orang	41.727.700,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4.Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perangkat Daerah, Lembaga Penyedia Layanan Anak, LSM, Penegah Hukum dan Anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus		0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo
						UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK						980.761.100,00							1.342.860.700,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						980.761.100,00							1.342.860.700,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						980.761.100,00							1.342.860.700,00	
53	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	693.455.200,00						-	1.026.846.260,00	
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	693.455.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perempuan yang menjadi korban kekerasan	-	1.026.846.260,00	
	2	08	03	2.02	0003	&Layanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin BPJS, Jamkesda, Dan Sumber Pendanaan Lainnya Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&														
							Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota				10 Orang	17.850.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perempuan yang menjadi korban kekerasan		19.635.000,00	Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak
	2	08	03	2.02	0004	Layanan Gelar Kasus Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota				10 Orang	8.700.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perempuan yang menjadi korban kekerasan		9.570.000,00	Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak
	2	08	03	2.02	0006	Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				10 Orang	1.350.000,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perempuan yang menjadi korban kekerasan		1.485.000,00	Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak
	2	08	03	2.02	0007	Layanan Medikolegal Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau				7 orang	1.050.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang	Perempuan yang menjadi		1.155.000,00	Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak

							Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota						N PEREMPUAN DAN ANAK	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	korban kekerasan			
	2	08	03	2.02	0008	Layanan Pengaduan Atau Penjangkauan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota													
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				10 orang	637.323.150,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perempuan yang menjadi korban kekerasan		965.101.005,00	Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak
	2	08	03	2.02	0009	Layanan Pendampingan Korban Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota													
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				10 orang	27.182.050,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Perempuan yang menjadi korban kekerasan		29.900.255,00	Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak
54	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	287.305.900,00						-	316.014.440,00	
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	287.305.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	anak-anak yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami situasi yang memerlukan perlindungan khusus	-	316.014.440,00	
	2	08	07	2.02	0008	Layanan Pengaduan Atau Penjangkauan Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota													
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				30 Orang	137.095.500,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	anak-anak yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami situasi yang memerlukan perlindungan khusus		150.805.050,00	Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak
	2	08	07	2.02	0009	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota													
							Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				10 Orang	15.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	anak-anak yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami situasi yang memerlukan perlindungan khusus		16.500.000,00	Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak
	2	08	07	2.02	0010	Layanan Medikolegal Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota													
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				25 Orang	3.750.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	anak-anak yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami situasi yang memerlukan perlindungan khusus		4.125.000,00	Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak
	2	08	07	2.02	0011	Layanan Gelar Kasus Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota													
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				30 Orang	9.050.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	anak-anak yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami		9.955.000,00	Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak

														generasi Z), dan penyandang disabilitas.		situasi yang memerlukan perlindungan khusus			
	2	08	07	2.02	0012	Layanan Rumah Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota													
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				30 Orang	35.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	anak-anak yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami situasi yang memerlukan perlindungan khusus		39.050.000,00	Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak
	2	08	07	2.02	0013	Layanan Pendampingan Korban Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota													
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				30 Orang	59.095.500,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	anak-anak yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami situasi yang memerlukan perlindungan khusus		65.005.000,00	Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak
	2	08	07	2.02	0014	Layanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin BPJS, Jamkesda, Dan Sumber Pendanaan Lainnya Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota													
							Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10 Orang	26.237.900,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	anak-anak yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami situasi yang memerlukan perlindungan khusus		28.861.690,00	Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak
	2	08	07	2.02	0015	Layanan Spesifik Untuk Pemulihan Korban Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota													
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota				5 Orang	1.577.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	anak-anak yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami situasi yang memerlukan perlindungan khusus		1.712.700,00	Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak
						DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO					2.737.275.618,00							2.516.880.428,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.737.275.618,00							2.516.880.428,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					2.737.275.618,00							2.516.880.428,00	
55	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	2.361.496.618,00						-	2.168.386.389,00	
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			9 Dokumen	130.889.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo	-	3.520.000,00	
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	129.689.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		2.200.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.200.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		1.320.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			12 Laporan	1.848.591.618,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Aparatur Dinas Ketahanan	-	1.715.620.229,00	

															bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pangan Kota Palopo			
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	1.815.691.618,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		1.666.890.229,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	31.800.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		47.520.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	1.100.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		1.210.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			12 Laporan	6.660.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo	-	7.150.000,00	
	2	09	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Laporan	6.660.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		7.150.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			39 Orang	17.250.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo	-	60.500.000,00	
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	12.250.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		22.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		5.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	5.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		33.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			3 Jenis	127.137.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo	-	139.854.000,00	
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2.497.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan		2.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo

														kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kota Palopo			
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		2.200.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.640.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		2.904.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	120.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		132.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			3 Jenis	37.961.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo	-	41.800.000,00	
	2	09	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan													
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	17.350.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		18.700.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	5.599.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		6.600.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	15.012.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		16.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			36 Jenis	152.617.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo	-	155.403.600,00	
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	40.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		44.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	35.817.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		40.123.600,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	76.800.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		71.280.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	-			4 Unit	40.390.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Aparatur Dinas Ketahanan	-	44.538.560,00	

						Urusan Pemerintahan Daerah									bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pangan Kota Palopo			
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.250.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		28.875.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	3.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		3.300.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	1.400.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		1.540.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	4.800.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		5.280.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.940.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo		5.543.560,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
56	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan infrastruktur ketahanan pangan	-			2 Kelompok Tani	2.000.000,00						-	218.020.000,00	
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Tani yang Memanfaatkan Infrastruktur Ketahanan Pangan	-			2 Kelompok	2.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani	-	218.020.000,00	
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani		100.650.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	02	2.01	0004	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik														
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani		16.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				1 unit	500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani		100.870.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
57	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Melaksanakan Diversifikasi Pangan	-			24 persen	195.674.000,00						-	59.915.937,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	Jumlah kebutuhan pangan pokok atau pangan lainnya	-			18,47 Ton	34.411.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Masyarakat Kota Palopo	-	43.263.697,00	

						sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal				
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1.025.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo		8.800.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya													
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	5.840.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo		1.100.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga													
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	5.546.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo		4.433.697,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Di Kabupaten/Kota													
							Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				1 laporan	19.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo		17.600.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan													
							Informasi Stok Pangan				1 Dokumen	500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo		4.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota													
							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo		4.180.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (Nbm)													
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo		2.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pengelola cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah Daerah	-			48 Kelompok	130.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo	-	4.400.000,00	
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Ton	130.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo		4.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka kecukupan gizi masyarakat Kota Palopo	-			86,2 Skor	31.263.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo	-	12.252.240,00	
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan Dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun													
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1.075.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo		9.240.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo

															kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	30.188.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo		3.012.240,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
58	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Melaksanakan Diversifikasi Pangan	-			7 Kelurahan	133.105.000,00						-	48.540.318,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terdeteksinya daerah rawan pangan dan rentan pangan	-			48 Kelurahan	22.605.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo	-	6.516.125,00	
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan														
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	22.605.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo		6.516.125,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pengelola cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah Daerah	-			2 Kelompok	110.500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo	-	42.024.193,00	
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	101.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo		11.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Dan Gizi Kabupaten/Kota														
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	7.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo		11.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan Dan Gizi														
							Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo		9.024.193,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan Dan Gizi Kabupaten/Kota														
							Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo		11.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
59	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanaan Pangan	-			97 persen	45.000.000,00						-	22.017.784,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	-			5 Dokumen	45.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo	-	22.017.784,00	
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo		1.100.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan														
							Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Masyarakat Kota Palopo		1.100.000,00	Dinas Ketahanan

													Semua Kel/Desa		bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal				Pangan Kota Palopo
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	41.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo		17.617.784,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	05	2.01	0008	Koordinasi Dan Sinkronisasi Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														
							Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo		1.100.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														
							Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Kota Palopo		1.100.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo
						DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO						4.588.781.454,00							4.932.673.192,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.588.781.454,00							4.932.673.192,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						4.588.781.454,00							4.932.673.192,00	
60	2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	2.485.629.858,00						-	2.558.081.917,00	
	2	10	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			4 Dokumen	4.175.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN	-	4.592.500,00	
	2	10	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.110.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN		2.321.000,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
	2	10	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2.065.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN		2.271.500,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
	2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			12 Laporan	2.237.462.828,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN	-	2.285.098.184,00	
	2	10	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.202.512.828,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN		2.246.653.084,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo

	2	10	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokume n	32.740.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN		36.014.000,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
	2	10	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.210.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN		2.431.100,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
	2	10	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			5 Laporan	8.400.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN	-	9.240.000,00	
	2	10	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	8.400.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN		9.240.000,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
	2	10	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			23 Orang	16.328.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN	-	17.960.800,00	
	2	10	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5.00 Paket	1.998.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN		2.197.800,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
	2	10	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	14.330.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN		15.763.000,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
	2	10	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			1 Jenis	47.100.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN	-	51.810.000,00	
	2	10	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	564.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN		620.400,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
	2	10	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.320.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN		1.452.000,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
	2	10	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	45.216.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN		49.737.600,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
	2	10	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			2 Jenis	3.189.030,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN	-	3.507.933,00	
	2	10	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	1.264.290,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN		1.390.719,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
	2	10	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1.924.740,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN		2.117.214,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
	2	10	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			12 Jenis	145.955.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN	-	160.550.500,00	
	2	10	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	19.785.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN		21.763.500,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
	2	10	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7.150.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur	ASN		7.865.000,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo

															kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan				
	2	10	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	119.020.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN		130.922.000,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
	2	10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	-			19 Unit	23.020.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN	-	25.322.000,00	
	2	10	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	17.700.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN		19.470.000,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
	2	10	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	1.020.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN		1.122.000,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
	2	10	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	4.300.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN		4.730.000,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
61	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	-			83 persen	46.800.000,00						-	51.480.000,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang diselesaikan	-			8 Laporan	46.800.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	-	51.480.000,00	
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Berita Acara	37.950.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat		41.745.000,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
	2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	8.850.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat		9.735.000,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo

															produksi melalui peran aktif koperasi.					
62	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Subjek Ganti Kerugian Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah	-			70 persen	1.920.066.596,00						-	2.243.919.255,00	
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kota	-			8 Dokumen	1.920.066.596,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	-	2.243.919.255,00	
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	1.920.066.596,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat		2.243.919.255,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
63	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Penetapan Objek Redistribusi Tanah	-			70 persen	119.860.000,00						-	61.124.520,00	
	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek tanah yang mendapatkan ganti rugi	-			5 Jenis	119.860.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	-	61.124.520,00	
	2	10	06	2.01	0004	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penataan Akses Dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	59.926.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat		61.124.520,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
	2	10	06	2.01	0006	Koordinasi Dalam Rangka Penataan Aset Reforma Agraria														
							Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.				1 Berita Acara	59.934.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat		0,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
64	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pengelolaan Objek Tanah Kosong	-			55 persen	5.420.000,00						-	5.962.000,00	
	2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah laporan tanah kosong dalam 1(satu) kab/kota yang diinventarisasi	-			2 Laporan	5.420.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	-	5.962.000,00	
	2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong														
							Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				2 Laporan	5.420.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat		5.962.000,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo

65	2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Penyelesaian Ijin lokasi tanah Negara	-			100 persen	5.485.000,00						-	6.033.500,00	
	2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah pemanfaatan tanah negara	-			6 Dokumen	5.485.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	-	6.033.500,00	
	2	10	09	2.01	0001	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah														
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				2 Dokumen	5.485.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat		6.033.500,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
66	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Luas pemanafaatan dan penggunaan tanah	-			12 Ha	5.520.000,00						-	6.072.000,00	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Data pemanfaatan dan penggunaan tanah dalam satu kabupaten/Kota	-			8 Dokumen	5.520.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat	-	6.072.000,00	
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	5.520.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Pemerintah dan Masyarakat		6.072.000,00	Dinas Pertanahan Kota Palopo
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO						26.435.457.172,00							30.904.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						26.260.969.822,00							30.704.000.000,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						26.260.969.822,00							30.704.000.000,00	
67	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	7.580.289.372,00						-	8.291.000.000,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	139.654.200,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	148.000.000,00	
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	132.654.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		140.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	7.000.200,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		8.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.441.196.072,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	7.030.000.000,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				88 Orang/bulan	6.149.027.072,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		6.700.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	102.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur	-		120.000.000,00	Dinas Lingkungan

																Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan				Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	189.569.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		210.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.100,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	6.000.000,00	
	2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	5.000.100,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		6.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	46.000.000,00	
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				88 Paket	20.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		21.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	20.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	258.887.500,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	290.000.000,00	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	2.498.500,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		3.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	6.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		7.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	250.389.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		280.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	89.740.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	103.000.000,00	
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				24 Unit	10.100.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		11.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	49.556.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	15.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		16.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	15.084.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		16.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	382.323.500,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	410.000.000,00	
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	150.003.500,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		160.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	232.320.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	223.488.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	258.000.000,00	
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	35.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	81.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		90.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Perizinan Alat Besar													
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	20.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	2.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		3.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	64.988.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
68	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	150.100.200,00						-	186.000.000,00	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	115.100.000,00			-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	136.000.000,00	
	2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan Rpplh Kabupaten/Kota													
							Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				3 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		16.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan Rpplh Kabupaten/Kota													
							0				0 0	100.100.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	35.000.200,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	50.000.000,00	
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD													

							Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS Untuk KRP Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup														
							Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				1 Dokumen	25.000.200,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
69	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	368.200.200,00						-	510.000.000,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	353.200.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	490.000.000,00	
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut														
							0				2 0	22.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	45.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	03	2.01	0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara Dan Laut														
							Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun				12 Laporan	200.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota														
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2 Dokumen	85.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	15.000.200,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	20.000.000,00	
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat														
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				4 Laporan	15.000.200,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
70	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	3.760.321.200,00						-	4.030.000.000,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	3.760.321.200,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	4.030.000.000,00	
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)														
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				48,5 Ha	3.735.321.200,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		4.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
71	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-			-	160.000.000,00						-	281.000.000,00	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-			-	100.000.000,00			-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya	-	-	200.000.000,00	

																alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan				
	2	11	05	2.01	0004	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penyimpanan Sementara Limbah B3 Di Kabupaten/Kota														
							jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia				3 Unit	100.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	60.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	81.000.000,00	
	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, Dan/Atau Penimbunan															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	05	2.02	0004	Pembinaan Pengumpulan Dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Di Kabupaten/Kota														
							jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina				30 Usaha	40.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		51.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
72	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	24.150.000,00						-	25.000.000,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	24.150.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	25.000.000,00	
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH														
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		15.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha Atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				70 Badan Usaha	9.150.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
73	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	300.000.000,00						-	410.000.000,00	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	300.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	410.000.000,00	
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		110.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan Dan Kampanye Lingkungan Hidup														
							Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				250 Orang	200.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya	-		300.000.000,00	Dinas Lingkungan

													Semua Kel/Desa			alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan				Hidup Kota Palopo
74	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	24.480.000,00						-	30.000.000,00	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	24.480.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	30.000.000,00	
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				14 Entitas	24.480.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
75	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	10.400.100,00						-	20.000.000,00	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	10.400.100,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	20.000.000,00	
	2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				8 Pengaduan	10.400.100,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
76	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan	-			95 persen	13.883.028.750,00						-	16.921.000.000,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	-	-			-	13.883.028.750,00			-	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	16.921.000.000,00	
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan														
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				9 Kelompok	148.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	11.700.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	5.802.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		1.300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota														
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	59.900.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan														
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				23300 Ton	7.104.846.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		7.500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	11	2.01	0015	Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah														
							Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				40 Unit	4.500.752.750,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		4.900.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	11	2.01	0016	Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah														

							Persentase luas layanan pengumpulan sampah				82 Persentase	5.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/Pltsa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah Dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan														
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				3500 Ton	5.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST Kabupaten/Kota Atau TPA/TPST Regional														
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				23300 Ton	1.712.628.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		2.500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	11	2.01	0023	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan														
							Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		11.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	2	11	11	2.01	0030	Pengurangan Sampah Melalui Pendauran Ulang Sampah														
							Jumlah sampah yang terdaur ulang				3500 Ton	318.800.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		390.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	X					NON URUSAN						174.487.350,00							200.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						174.487.350,00							200.000.000,00	
77	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	174.487.350,00						-	200.000.000,00	
	X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	60.000.000,00	
	X	XX	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	50.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	18.602.350,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	20.000.000,00	
	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	15.002.350,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		16.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	3.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		4.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	30.860.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	40.000.000,00	
	X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	30.860.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	75.025.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	80.000.000,00	
	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	75.025.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
						UPTD LABORATORIUM						40.600.000,00							55.000.000,00	

	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						40.600.000,00							55.000.000,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						40.600.000,00							55.000.000,00	
78	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	40.600.000,00						-	55.000.000,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	40.600.000,00			-	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	55.000.000,00	
	2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut														
							Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				7 Lokasi	19.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		25.000.000,00	Uptd Laboratorium
	2	11	03	2.01	0012	Pengambilan Contoh Uji Dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan														
							Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				24 Paket	21.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Amasangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		30.000.000,00	Uptd Laboratorium
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO						3.360.548.678,00							3.536.062.194,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.360.548.678,00							3.536.062.194,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						3.360.548.678,00							3.536.062.194,00	
79	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	3.123.503.678,00						-	3.264.417.194,00	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			8 Dokumen	3.591.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil	-	3.950.650,00	
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	3.591.300,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil		3.950.650,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			29 Laporan	2.654.006.338,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Dinas Dukcapil	-	2.758.865.290,00	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	2.600.492.138,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Dinas Dukcapil		2.700.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	51.788.400,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Dinas Dukcapil		56.967.240,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				16 Laporan	965.900,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Dinas Dukcapil		1.062.050,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo

	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	759.900,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Dinas Dukcapil		836.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			12 Laporan	7.380.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil	-	8.118.000,00	
	2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	7.380.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil		8.118.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			100 Jenis	101.125.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil	-	111.237.500,00	
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.125.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil		1.237.500,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	100.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil		110.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	0,00	
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		0,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			3 Jenis	300.551.040,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil	-	319.490.754,00	
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	153.577.380,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil		168.883.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	90.000.270,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Dinas Dukcapil		99.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

															narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				Sipil Kota Palopo
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	56.973.390,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil		51.607.754,00	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	-			50 unit	56.850.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil	-	62.755.000,00	
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	37.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil		40.700.000,00	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	2.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil		2.420.000,00	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	15.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil		16.500.000,00	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.850.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil		3.135.000,00	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
80	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Perekaman Wajib KTP dan Penerbitan Kartu Identitas Anak	-			97 persen	106.525.000,00						-	126.032.500,00	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Layanan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	-			2 Jenis	41.975.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	48.812.500,00	
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				12 Dokume n	41.975.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		48.812.500,00	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				0 Laporan	0,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		0,00	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Layanan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	-			12 Jenis	14.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola	Masyarakat	-	15.510.000,00	

															narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	2	12	02	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, Dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk														
							Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				2 Dokumen	14.100.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		15.510.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	50.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil	-	61.710.000,00	
	2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				1 Laporan	50.450.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil		61.710.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
81	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran Usia 0-18 Tahun	-			100 persen	33.895.000,00						-	35.634.500,00	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	-			1 Layanan	18.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	20.240.000,00	
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				12 Dokumen	6.100.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		6.710.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 Layanan	12.300.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		13.530.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Layanan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	-			1 Jenis	15.495.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	15.394.500,00	
	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil														
							Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	6.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		7.700.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
	2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	8.995.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		7.694.500,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
82	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penerapan IKD	-			15 %	87.000.000,00						-	99.000.000,00	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan	Jumlah Penginputan Data pada Sistem	-			1 Laporan	31.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani	Dinas Dukcapil	-	34.650.000,00	

						Penyajian Database Kependudukan								pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan													
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	31.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil		34.650.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
	2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	-			1 Aplikasi	55.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil	-	64.350.000,00	
	2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, Dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
							Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				12 Dokumen	55.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil		64.350.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
83	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota	-			1 Buku	9.625.000,00						-	10.978.000,00	
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang diterbitkan	-			1 Buku	9.625.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil	-	10.978.000,00	
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain													
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	9.625.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dinas Dukcapil		10.978.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO						7.737.750.254,00							7.632.640.100,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.737.750.254,00							7.632.640.100,00	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						7.737.750.254,00							7.632.640.100,00	
84	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.717.190.154,00						-	3.557.585.950,00	
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			7 Dokumen	9.820.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat daerah	-	10.065.500,00	
	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	8.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat daerah		8.200.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.820.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat daerah		1.865.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			12 Laporan	3.133.338.154,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang	Perangkat daerah	-	2.980.400.500,00	

															sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	3.071.218.154,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat daerah		2.916.727.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	60.140.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat daerah		61.643.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.980.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat daerah		2.029.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			12 Laporan	12.279.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat daerah	-	9.510.975,00	
	2	14	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12.279.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat daerah		9.510.975,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			2 Orang	16.168.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	12.078.600,00	
	2	14	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	16.168.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		12.078.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah belanja administrasi umum yang ditatakelola	-			3 Jenis	98.157.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat daerah	-	86.960.750,00	
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	98.157.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat daerah		86.960.750,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo

															generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			11 Jenis	337.729.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat daerah	-	347.715.875,00	
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	74.600.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat daerah		76.465.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Laporan	4.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat daerah		4.100.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	259.129.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat daerah		267.150.875,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	-			124 unit	109.699.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat daerah	-	110.853.750,00	
	2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.150.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat daerah		25.163.750,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				102 Unit	59.200.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat daerah		60.680.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5.900.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat daerah		6.047.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	18.449.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat daerah		18.962.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo

85	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-			-	189.440.100,00						-	194.176.150,00	
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen pengendalian penduduk yang tersusun	-			1 Dokumen	43.840.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Sekolah & masyarakat	-	44.936.150,00	
	2	14	02	2.01	0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (Gdpk) Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	30.920.100,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Sekolah & masyarakat		28.382.400,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	02	2.01	0027	Advokasi, Sosialisasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal Di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI Dan SLTP/MTS, Serta Jalur Nonformal Dan Informal														
							Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				5 Satuan Pendidikan	12.920.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN INTERVENSI STUNTING, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Sekolah & masyarakat		16.553.750,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data mikro keluarga	-			48 Laporan	145.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Tenaga Lini Lapangan	-	149.240.000,00	
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan Dan Pengumpulan Data Keluarga														
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				48 Laporan	37.600.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Tenaga Lini Lapangan		38.540.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan Dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Dan Pelayanan KB														
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				48 Dokumen	108.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Tenaga Lini Lapangan		110.700.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
86	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-			-	2.580.400.000,00						-	2.625.735.000,00	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Layanan Advokasi dan KIE yang dilaksanakan	-			2 Layanan	644.257.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Mitra percepatan penurunan stunting	-	650.863.425,00	
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional Dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				9 Laporan	264.257.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Mitra percepatan penurunan stunting		270.863.425,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), Dan Mini Lokakarya (Minilok)														

							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				9 Laporan	180.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Mitra percepataan penurunan stunting		180.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders Dan Mitra Kerja														
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				16 Organisasi	200.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Mitra percepataan penurunan stunting		200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga lini lapangan KB	-			546 Orang	1.339.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Tenaga Lini Lapangan	-	1.363.312.500,00	
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (Imp)														
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				416 Orang	1.227.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Tenaga Lini Lapangan		1.248.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP Dan Program Bangga Kencana Di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB														
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				8 Organisasi	112.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Tenaga Lini Lapangan		115.312.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alokon KB yang tersedia dan di distribusikan kepada faskes dan pemasangan KB MKJP	-			400 Buah	400.643.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Faskes	-	410.659.075,00	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya														
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				26 Laporan	20.700.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Faskes		21.217.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Mkjp)														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1097 Orang	356.093.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENURUNAN AKI DAN AKB, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Faskes		364.995.325,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya														
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				26 Laporan	23.850.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Faskes		24.446.250,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo

	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah layanan kegiatan pembinaan KB yang dilaksanakan	-			3 Layanan	196.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	200.900.000,00	
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Di Kampung Keluarga Berkualitas													
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				48 Kampung	196.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KEFARMASIAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENURUNAN AKI DAN AKB, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		200.900.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
87	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-			-	1.250.720.000,00						-	1.255.143.000,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-			48 Laporan	283.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	287.440.000,00	
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks)													
							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				12 Laporan / Dokumen	9.600.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		9.840.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	04	2.01	0017	Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))													
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				48 Laporan	144.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		147.600.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				10 Unit	130.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		130.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi masyarakat binaan yang aktif	-			5 Organisasi Masyarakat	967.120.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	967.703.000,00	
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data Dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)													
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				429 laporan	429.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		429.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo

															generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)														
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				429 laporan	514.800.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		514.800.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
	2	14	04	2.02	0008	Promosi Dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga														
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga				5 Laporan	23.320.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		23.903.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palopo
						DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO						7.706.829.852,00							8.541.820.943,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.706.829.852,00							8.541.820.943,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						7.706.829.852,00							8.541.820.943,00	
88	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	5.773.059.769,00						-	6.125.598.768,00	
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			9 Dokumen	2.600.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah	-	2.832.000,00	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.925.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah		2.101.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	675.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah		731.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			12 Laporan	4.934.196.878,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Aparatur Sipil Negara	-	5.283.692.482,00	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/bulan	4.882.186.878,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Aparatur Sipil Negara		5.226.492.482,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				854 Dokumen	51.000.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Aparatur Sipil Negara		56.100.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo

														produksi melalui peran aktif koperasi.						
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	1.010.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Aparatur Sipil Negara		1.100.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelola aset	-			12 laporan	11.810.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah	-	12.180.000,00	
	2	15	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	11.810.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah		12.180.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi aparatur sipil negara perangkat daerah yang dikelola	-			69 Orang	15.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Aparatur Sipil Negara	-	16.500.000,00	
	2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	15.000.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Aparatur Sipil Negara		16.500.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah lsub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			4 Jenis	169.337.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah	-	184.830.800,00	
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3.496.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah		3.850.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.000.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah		1.100.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokume n	200.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur	Perangkat Daerah		220.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo

															kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan				
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58 Laporan	164.641.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah		179.660.800,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			17 unit	161.710.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah	-	105.350.000,00	
	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	144.700.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah		85.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	3.600.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah		5.500.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	13.410.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah		14.850.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibiayai	-			3 Jenis	273.514.540,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat daerah	-	300.850.000,00	
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1962 Laporan	31.499.500,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat daerah		34.650.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	70.000.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat daerah		77.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo

	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	172.015.040,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat daerah		189.200.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	-			56 unit	204.891.351,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah	-	219.363.486,00	
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.500.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah		39.600.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	89.511.351,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah		93.500.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	8.200.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah		8.360.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	70.680.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah		77.903.486,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
89	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat	-			3.94 persen	1.750.000.000,00						-	2.219.600.000,00	
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Lalu Lintas Angkutan Jalan yang ditetapkan	-			1 Dokumen	148.026.530,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat daerah	-	110.000.000,00	
	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Llaj Kabupaten/Kota													
							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	148.026.530,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat daerah		110.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo

	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan Kabupaten	-			1 Kegiatan	50.639.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat	-	55.000.000,00	
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota													
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	50.639.500,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat		55.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan pemeliharaan terminal	-			1 Kegiatan	200.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat	-	220.000.000,00	
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama Dan Penunjang)													
							Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	200.000.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat		220.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Fasilitas Parkir	-			1 Dokumen	111.144.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat	-	88.000.000,00	
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota													
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	111.144.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat		88.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum	-			200 unit	129.989.470,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat	-	137.600.000,00	
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				3000 Unit	59.989.470,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat		60.600.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	30.000.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat		33.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo

															agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				11 Unit	40.000.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat		44.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan yang dilaksanakan Rekayasa Lalulintas	-			125 Km	850.400.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat	-	1.034.000.000,00	
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	500.400.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat		550.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
							Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	125.000.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat		137.500.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas														
							Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				25 Dokume n	145.000.500,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat		159.500.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				12 Laporan	80.000.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat		187.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	-			12 Bulan	209.800.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat	-	220.000.000,00	
	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Terminal														
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				12 Laporan	209.800.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat		220.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau	-	-			-	0,00			-	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan	-	-	300.000.000,00	

						Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan				
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				20 Unit	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		300.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin trayek Lintas Daerah LLAJ	-			2 unit	50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat	-	55.000.000,00	
	2	15	02	2.14	0002	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota													
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	50.000.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat		55.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
90	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Usaha Pelayaran Kewenangan Daerah yang Berizin	-			25 persen	183.770.083,00						-	196.622.175,00	
	2	15	03	2.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dengan instansi terkait	-			24 kali	97.680.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat	-	108.647.175,00	
	2	15	03	2.02	0002	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota													
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	97.680.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat		108.647.175,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	-	-			-	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat	-	0,00	
	2	15	03	2.08	0002	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan Dan Perbaikan Kapal													
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal				0 Laporan	0,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat		0,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pembangunan tambat labuh	-			1 unit	56.088.483,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat	-	58.250.000,00	
	2	15	03	2.12	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal													
							Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				12 Laporan	26.090.083,00	Kota Palopo, Wara Utara,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	masyarakat		27.500.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo

												Semua Kel/Desa		berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan				
	2	15	03	2.12	0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal													
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia				1 Unit	29.998.400,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat		30.750.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
	2	15	03	2.15		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-			-	30.001.600,00			-	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	29.725.000,00	
	2	15	03	2.15	0002	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal													
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Laporan	30.001.600,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		29.725.000,00	Dinas Perhubungan Kota Palopo
						UPTD PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)						1.250.000.000,00							1.375.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.250.000.000,00							1.375.000.000,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						1.250.000.000,00							1.375.000.000,00	
91	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat	-			3.94 persen	1.250.000.000,00						-	1.375.000.000,00	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan Kabupaten	-			1 Kegiatan	1.250.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat	-	1.375.000.000,00	
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota													
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				100 Unit	50.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat		55.000.000,00	Uptd Penerangan Jalan Umum (Pju)
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				20 Unit	1.200.000.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	masyarakat		1.320.000.000,00	Uptd Penerangan Jalan Umum (Pju)
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO						5.021.189.304,00							5.732.529.100,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.021.189.304,00							5.732.529.100,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						5.021.189.304,00							5.732.529.100,00	
92	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.375.017.467,00						-	2.234.329.100,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.381.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	3.719.100,00	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.766.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	Perangkat Daerah		1.942.600,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo

														narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.615.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		1.776.500,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.152.750.232,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	2.008.340.000,00	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	2.090.180.232,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		1.945.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				500 Dokumen	59.200.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		59.700.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.420.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		1.540.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.950.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		2.100.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.590.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	8.700.000,00	
	2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.590.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		8.700.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	20.901.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	21.000.000,00	
	2	16	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20.901.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		21.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	51.315.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	52.000.000,00	
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD													

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	51.315.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		52.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	103.380.235,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	104.700.000,00	
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	31.782.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		32.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	5.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		5.700.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	66.598.235,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		67.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	34.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	35.870.000,00	
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	17.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		17.500.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	600.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		770.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	9.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		9.700.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		7.900.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
93	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-			-	1.331.600.000,00						-	1.698.700.000,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.331.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Kelompok Masyarakat	-	1.698.700.000,00	
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi Dengan Komunitas Informasi Masyarakat													

							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				48 Komunitas	2.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Kelompok Masyarakat		2.200.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik													
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				400 Permohonan	159.200.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Kelompok Masyarakat		160.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, Dan Aspirasi Publik													
							Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				2 Rekomendasi	2.400.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Kelompok Masyarakat		2.500.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik													
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				45 Media	1.000.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Kelompok Masyarakat		1.359.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten													
							Jumlah Konten Informasi Publik				4 Konten	168.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Kelompok Masyarakat		175.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
94	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-			-	1.314.571.837,00						-	1.799.500.000,00	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.314.571.837,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah	-	1.799.500.000,00	
	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE													
							Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah		3.300.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota													
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				49 Perangkat Daerah	152.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah		153.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	03	2.02	0032	Koordinasi Pembangunan Dan/Atau Pengembangan Aplikasi Khusus Yang Sesuai Dengan Arsitektur Dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, Serta Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE													
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan				5 Aplikasi	402.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah		402.300.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo

							prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE								mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah														
							Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				2 Laporan	16.630.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah		16.900.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet														
							Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				49 Perangkat Daerah	740.941.837,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Perangkat Daerah		1.224.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
	2	16	03	2.02	0038	Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Atau Kota Cerdas														
							Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	0,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		0,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALOPO						3.473.750.478,00							3.491.145.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						867.701.000,00							954.003.000,00	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						867.701.000,00							954.003.000,00	
95	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	480.201.000,00						-	461.103.000,00	
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			9 Dokumen	2.600.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	dokumen Perencanaa	-	2.860.000,00	
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	2.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	dokumen Perencanaa		2.860.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			12 Laporan	75.800.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN	-	77.660.000,00	
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	70.200.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		71.500.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		3.300.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		2.860.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			12 Laporan	6.750.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	asset	-	7.425.000,00	

																Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	2	17	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6.750.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	asset		7.425.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			39 Orang	47.500.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN	-	49.820.000,00	
	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				41 Paket	20.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		22.550.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
	2	17	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	27.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		27.270.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			6 Jenis	169.081.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN	-	171.650.000,00	
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	1.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		1.650.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	167.581.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		170.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			22 Jenis	49.590.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	asset	-	50.000.000,00	
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	49.590.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	asset		50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			39 Jenis	101.480.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN	-	71.048.000,00	
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				750 Laporan	40.980.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		4.498.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	60.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		66.550.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	-			33 Unit	27.400.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	asset	-	30.640.000,00	

	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	19.400.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	asset		21.340.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	3.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	asset		3.300.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	asset		6.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
96	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitasnya	-			87 persen	4.500.000,00						-	4.950.000,00	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan dan Pendampingan yang dilakukan	-			30 Laporan	4.500.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Koperasi	-	4.950.000,00	
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				30 Unit Usaha	4.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Koperasi		4.950.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
97	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	-			70 persen	8.000.000,00						-	8.800.000,00	
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai Kesehatannya	-			77 Koperasi	8.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Koperasi	-	8.800.000,00	
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				30 Unit Usaha	8.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Koperasi		8.800.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
98	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Usaha kepariwisataan dan ekraf yang tergabung dalam koperasi undefined	-			85 persen undefined undefined	43.500.000,00						-	47.850.000,00	
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta/ Koperasi yg mengikuti Pendidikan dan latihan Perkoperasian	-			30 Orang	43.500.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Koperasi	-	47.850.000,00	
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi														
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				30 Orang	43.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Koperasi		47.850.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
99	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-			-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	undefined	-			undefined undefined	10.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Koperasi	-	10.000.000,00	
	2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi Dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota														
							Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				48 Unit Usaha	10.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan	Koperasi		10.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil

															untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal				Dan Menengah Kota Palopo
##	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	-			8.50 persen	120.500.000,00						-	91.300.000,00	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	-			25 Unit Usaha	120.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku UKM	-	91.300.000,00	
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				25 Unit Usaha	6.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku UKM		6.600.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				12 Unit Usaha	6.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku UKM		6.600.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi Dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro														
							Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				8 Orang	18.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku UKM		19.800.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
							Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				250 Unit Usaha	8.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku UKM		8.800.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM UMKM Dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan Dan Pelatihan														
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				60 Orang	82.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku UKM		49.500.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
##	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil	-			33 persen	201.000.000,00						-	330.000.000,00	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	-			120 Unit Usaha	201.000.000,00			-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	UMKM	-	330.000.000,00	
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro														
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				25 Unit Usaha	200.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	UMKM		210.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
	2	17	08	2.01	0003	Penumbuhan Dan Pengembangan Kewirausahaan														
							Jumlah yang Difasilitasi				100 Orang	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan 3. Pengembangan Produktifitas	UMKM		120.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo

																Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal				
	X					NON URUSAN						2.606.049.478,00							2.537.142.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.606.049.478,00							2.537.142.000,00	
##	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	2.606.049.478,00						-	2.537.142.000,00	
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			12 Laporan	2.547.319.198,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-	-	2.477.142.000,00	
	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2.547.319.198,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		2.477.142.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			39 Jenis	58.730.280,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-	-	60.000.000,00	
	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	58.730.280,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		60.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palopo
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO						5.892.580.128,00							5.919.762.500,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.891.899.228,00							5.918.968.300,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						5.891.899.228,00							5.918.968.300,00	
##	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	5.181.382.628,00						-	5.005.418.300,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			6 Dokumen	3.077.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	3.077.300,00	
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	1.810.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		1.810.100,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	1.267.100,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		1.267.200,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			36 Laporan	3.686.042.548,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	3.045.652.000,00	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.616.946.548,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		2.973.292.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	69.096.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		72.360.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			1 Laporan	9.635.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	9.989.000,00	
	2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	9.635.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		9.989.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	19.713.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	20.000.000,00	
	2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	19.713.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		20.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			3 Jenis	171.616.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	246.000.000,00	
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	156.241.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		230.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
	2	18	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD													
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	15.375.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		16.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			11 Jenis	34.479.390,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	335.000.000,00	
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	15.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	19.479.390,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		135.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				1.149.389.590,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	1.200.000.000,00	
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1200 Laporan	109.341.700,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				13 Laporan	177.041.890,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	863.006.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		850.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	-			34 Unit	107.430.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	145.700.000,00	
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.750.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		32.500.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	16.200.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		35.700.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	29.400.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		42.500.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.080.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		35.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
##	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Per 100 Juta Nilai PMDN)	-			18 persen	166.638.800,00						-	288.000.000,00	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang- undangan yang tersusun	-			1 Dokumen	166.638.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	288.000.000,00	
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal													
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	156.619.800,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		280.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko													
							Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				4 Dokumen	10.019.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		8.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
##	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-			-	144.882.000,00						-	200.000.000,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Promosi yang diselenggarakan Penanaman Modal	-			3 Pameran	144.882.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	200.000.000,00	

	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokume n	144.882.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
##	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Angka Pertumbuhan Jumlah Investor di Daerah	-			100 persen	215.010.000,00						-	235.550.000,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Layanan Perizinan yang dikelola Penanaman modal	-			23 Layanan	215.010.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	235.550.000,00	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik													
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				9 Pelaku Usaha	100.050.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		95.550.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko													
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1000 Pelaku Usaha	39.060.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		40.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko													
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				24 Kegiatan Usaha	75.900.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
##	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Investor dan Penanam Modal di Daerah yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	-			100 persen	171.985.800,00						-	175.000.000,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan PM	-			104 Kegiatan Usaha	171.985.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	175.000.000,00	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya													
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				40 Kegiatan Usaha.	21.985.600,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		25.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha													
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				18 Pelaku Usaha	100.000.200,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal													
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan Usaha	50.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
##	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai rencana penanaman modal	-			100 persen	12.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data penanaman modal dan informasi pelayanan perizinan berbasis elektronik	-			12 Dokume n	12.000.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													

							0				0 0	12.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
	X					NON URUSAN						680.900,00							794.200,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						680.900,00							794.200,00	
##	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	680.900,00						-	794.200,00	
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			36 Laporan	680.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	794.200,00	
	X	XX	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	680.900,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		794.200,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
						DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALOPO						8.106.926.658,00							5.256.942.838,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.106.926.658,00							5.256.942.838,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						8.106.926.658,00							5.256.942.838,00	
##	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	3.198.469.212,00						-	3.258.734.149,00	
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			7 Dokumen	1.750.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	PNS/ASN	-	2.750.000,00	
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	1.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	PNS/ASN		1.650.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	750.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	PNS/ASN		1.100.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.858.053.412,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-	-	2.883.517.269,00	
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2.783.953.412,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		2.803.712.269,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				750 Dokumen	72.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		77.880.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	750.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		1.100.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	750.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		825.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.200.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-	-	7.920.000,00	
	2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	7.200.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		7.920.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-	-	0,00	
	2	19	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		0,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	111.600.800,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-	-	122.728.100,00	
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.056.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		2.261.600,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	109.544.800,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		120.466.500,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-	-	0,00	
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		0,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	192.730.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-	-	211.945.200,00	
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1200 Laporan	37.423.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		41.167.500,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							0				0 0	36.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		40.200.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	118.707.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis	-		130.577.700,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo

																Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal				
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	27.135.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-	-	29.873.580,00	
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	15.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		17.050.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	800.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		880.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	7.700.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		8.470.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.135.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		3.473.580,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
##	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	-			82 persen	201.681.800,00						-	111.849.980,00	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang dikembangkan	-			180 Orang	101.681.800,00			-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Insan Pemuda	-	111.849.980,00	
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Serta Penyusunan Dan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				0 Dokume n	10.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	Insan Pemuda		11.385.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				20 Orang	25.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Insan Pemuda		27.500.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan Bagi Yang Berprestasi Dan/Atau Berjasa Dalam Memajukan Potensi Pemuda														
							Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				10 Orang	0,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	-	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Insan Pemuda		0,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	25.144.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Insan Pemuda		27.658.400,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				9 Orang	34.051.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Insan Pemuda		37.456.100,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	02	2.01	0016	Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	7.136.800,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis	Insan Pemuda		7.850.480,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo

																Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal				
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-	-	0,00	
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Penyelenggaran Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	100.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		0,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
##	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-			-	4.563.432.852,00						-	1.728.681.636,00	
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.000.000,00			-	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-	-	120.000.000,00	
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Dan Pengawasan Prasarana Olahraga Di Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				100 Unit	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	-		120.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga prestasi tingkat daerah	-			1 Event	403.868.926,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Insan Olahraga	-	108.755.818,00	
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event Dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	40.293.926,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Insan Olahraga		44.323.318,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga														
							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				25 Orang	363.575.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Insan Olahraga		64.432.500,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	35.350.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-	-	38.885.000,00	
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah														
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				100 Orang	15.350.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		16.885.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi Yang Berprestasi Dan/Atau Berjasa Dalam Memajukan Olahraga														
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga				10 Orang	10.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		11.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	03	2.03	0010	Pembentukan Dan Penyediaan Sistem Data Keolahragaan Terpadu Di Kabupaten/Kota														
							Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis	-		11.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo

																Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal				
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	3.320.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-	-	1.122.000.000,00	
	2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan Di Kabupaten/Kota														
							Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				3 Dokumen	3.320.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		1.122.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	803.213.926,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-	-	339.040.818,00	
	2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		88.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Olahraga Rekreasi Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengembangan, Dan Pengawasan														
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	569.995.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		132.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan Olahraga Dan Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Yang Berjenjang Dan Berkelanjutan Pada Tingkat Daerah, Nasional, Dan Internasional														
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	153.218.926,00	Kota Palopo, Wara, Lagaligo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		119.040.818,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
##	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-			-	143.342.794,00						-	157.677.073,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	143.342.794,00			-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-	-	157.677.073,00	
	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas Sdm Kepramukaan Tingkat Daerah														
							Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				40 Orang	25.144.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		27.658.400,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah														
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	93.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		102.850.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
	2	19	04	2.01	0008	Partisipasi Dan Keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan														
							Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				1 Organisasi	24.698.794,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	-		27.168.673,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo
						DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO						2.565.750.854,00							2.514.898.717,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.561.088.854,00							2.508.898.717,00	
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						2.475.436.154,00							2.424.808.447,00	
##	2	20	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	2.385.245.954,00						-	2.346.457.427,00	
	2	20	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			0 Dokumen	4.800.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD	-	0,00	
	2	20	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	4.800.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	SKPD		0,00	Dinas Persandian

																1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				Dan Statistik Kota Palopo
	2	20	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			7 Laporan	2.122.740.186,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD	-	2.249.728.371,00	
	2	20	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2.092.936.186,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		2.217.498.371,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
	2	20	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	28.800.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		31.680.000,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
	2	20	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	1.004.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		550.000,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
	2	20	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			1 Laporan	6.600.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD	-	7.260.000,00	
	2	20	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				32 Laporan	6.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		7.260.000,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
	2	20	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	35.000.000,00	
	2	20	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	30.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		35.000.000,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
	2	20	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			25 Jenis	65.774.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD	-	7.863.900,00	
	2	20	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1.348.500,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		0,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
	2	20	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola	SKPD		0,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo

																Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	2	20	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	64.426.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		7.863.900,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
	2	20	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			0 Jenis	48.800.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD	-	0,00	
	2	20	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	48.800.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		0,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
	2	20	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			3 Jenis	83.831.268,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD	-	36.375.156,00	
	2	20	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	13.227.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		3.374.813,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
	2	20	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	28.004.268,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		5.280.343,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
	2	20	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	42.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		27.720.000,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
	2	20	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	-			17 unit	22.700.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD	-	10.230.000,00	
	2	20	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	6.400.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		7.040.000,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
	2	20	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	12.300.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		990.000,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
	2	20	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	4.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		2.200.000,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
##	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-			-	90.190.200,00						-	78.351.020,00	

						STATISTIK SEKTORAL														
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah partisipasi perangkat daerah dalam pengumpulan data statistik sektoral	-			49 Perangkat Daerah	90.190.200,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD	-	78.351.020,00	
	2	20	02	2.01	0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional														
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				60 %	24.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		26.400.000,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
	2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				0 %	18.962.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	SKPD		0,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
	2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				60 %	23.723.200,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		26.095.520,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
	2	20	02	2.01	0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
							Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				60 %	23.505.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		25.855.500,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						85.652.700,00							84.090.270,00	
##	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-			-	85.652.700,00						-	84.090.270,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi	-			48 Perangkat Daerah	72.289.700,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD	-	69.390.970,00	
	2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	52.288.900,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		60.590.090,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
	2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Dan Persandian Pemerintah Daerah														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				49 Perangkat Daerah	8.000.800,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		8.800.880,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
	2	21	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Persandian Pemerintah Daerah														
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian				1 Dokumen Dokumen	12.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	SKPD		0,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat yang menggunakan sandi pada Perangkat Daerah	-			49 Surat	13.363.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD	-	14.699.300,00	
	2	21	02	2.02	0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi Dan Persandian Pemerintah Daerah														
							Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				1 Kegiatan	13.363.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	SKPD		14.699.300,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo

																Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	X					NON URUSAN						4.662.000,00							6.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.662.000,00							6.000.000,00	
##	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	4.662.000,00						-	6.000.000,00	
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			0 Jenis	4.662.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	6.000.000,00	
	X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4.662.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		6.000.000,00	Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo
						DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO						2.754.337.780,00							3.427.435.549,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.754.337.780,00							3.427.435.549,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						2.754.337.780,00							3.427.435.549,00	
##	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	2.229.214.780,00						-	2.227.404.249,00	
	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			7 Dokumen	3.500.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan	-	3.850.000,00	
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	2.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		2.750.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		1.100.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			14 Laporan	1.736.310.431,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan	-	1.697.791.500,00	
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.705.245.431,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok	dinas kebudayaan		1.663.620.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo

																marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal				
	2	22	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				750 Dokumen	25.865.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		28.451.500,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	2.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		2.200.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	3.200.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		3.520.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			1 Laporan	7.172.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan	-	7.889.200,00	
	2	22	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	540.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		594.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6.632.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		7.295.200,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			25 Orang	35.050.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan	-	38.555.000,00	

	2	22	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				87 Paket	13.050.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		14.355.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.05	0003	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		1.100.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai													
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				192 Dokumen	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		1.100.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	20.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		22.000.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			5 Jenis	213.780.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan	-	225.138.200,00	
	2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	5.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		5.500.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	5.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		5.500.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan													

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				200 Paket	1.620.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		1.817.200,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokume n	110.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		121.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	2.050.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		2.200.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87 Laporan	200.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		210.000.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			2 Jenis	31.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan	-	32.300.000,00	
	2	22	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		10.200.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	20.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		21.000.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan	dinas kebudayaan		1.100.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo

													Semua Kel/Desa		toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal				
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			2 Jenis	146.770.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan	-	161.447.000,00	
	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1365 Laporan	17.350.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		19.085.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	48.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		52.800.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	81.420.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		89.562.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	-			4 Unit	55.632.349,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan	-	60.433.349,00	
	2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	26.510.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		29.161.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		550.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo

	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	11.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		12.100.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	17.622.349,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	dinas kebudayaan		18.622.349,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
##	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kelompok budaya binaan yang berpartisipasi dalam event kepariwisataan daerah	-			100 persen	188.000.000,00						-	566.800.000,00	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Dilaksanakan	-			6 kegiatan/ lokus	20.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Masyarakat	-	142.000.000,00	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				10 Objek	20.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Masyarakat		22.000.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Dan Pranata Kebudayaan														
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Masyarakat		120.000.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan / Dilaksanakan/Diikuti (Kali/Tahun)	-			4 Jenis	78.000.000,00			-	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	seniman/ma syarakat	-	205.800.000,00	
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Dan Pranata Tradisional														
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				12 Laporan	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	seniman/ma syarakat		120.000.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi Atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi Dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan														
							Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				15 Sertifikat	78.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan	seniman/ma syarakat		85.800.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo

															untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal				
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Budaya dan Adat Istiadat yang dibina dilindungi dan dilestarikan	-			4 Jenis	90.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	masyarakat	-	219.000.000,00	
	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
							Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				4 Objek	70.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	masyarakat		77.000.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Dan Pranata Adat														
							Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				100 Orang	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	masyarakat		120.000.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				6 Unit	20.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	masyarakat		22.000.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
##	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Kesenian Masyarakat yang Aktif Berpartisipasi dalam Event Kepariwisataan Daerah	-			100 persen	136.755.000,00						-	172.826.500,00	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang dibina dan dilestarikan	-			3 Jenis	136.755.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	seniman/pelajar/mahasiswa	-	172.826.500,00	
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				30 Orang	40.640.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	seniman/pelajar/mahasiswa		67.100.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga	96.115.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan	seniman/pelajar/mahasiswa		105.726.500,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo

															untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	memperhatikan pelibatan kelompok marjinal5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal				
##	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-			-	73.065.000,00						-	80.371.500,00	
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sejarah yang dilaksanakan dan dilestarikan (Kal/Tahun)	-			50 kali	73.065.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	masyarakat	-	80.371.500,00	
	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi Sejarah														
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				50 Dokumen	73.065.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	masyarakat		80.371.500,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
##	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Luas Lokasi Cagar Budaya yang Dikelola	-			100 persen	112.303.000,00						-	123.533.300,00	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Warisan Budaya yang ditetapkan	-			6 Jenis	80.852.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Warisan budaya/Objek cagar budaya	-	88.937.750,00	
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya														
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				6 Objek	80.852.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Warisan budaya/Objek cagar budaya		88.937.750,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Pengelolaannya Berbasis Kemitraan	-			55 Cagar Budaya	31.450.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Warisan budaya/Objek cagar budaya	-	34.595.550,00	
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya														
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				55 Objek	26.450.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Warisan budaya/Objek cagar budaya		29.095.550,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				6 Objek	5.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Warisan budaya/Objek cagar budaya		5.500.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
##	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah museum yang dikelola secara baik	-			1 Museum	15.000.000,00						-	256.500.000,00	

	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum yang dikelola secara baik	-			800 Orang	15.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	museum	-	256.500.000,00	
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Museum													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				15 Unit	15.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	museum		16.500.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana Dan Prasarana Museum													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				20 Unit	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	museum		120.000.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
	2	22	06	2.01	0016	Penyediaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Taman Budaya													
							Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya				6 Unit	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	museum		120.000.000,00	Dinas Kebudayaan Kota Palopo
						DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO						2.542.638.174,00							3.331.050.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.542.638.174,00							3.331.050.000,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						2.542.638.174,00							3.331.050.000,00	
##	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	2.441.688.174,00						-	2.894.950.000,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			7 Dokumen	984.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen Kota Palopo	-	1.200.000,00	
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	663.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen Kota Palopo		750.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	321.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen Kota Palopo		450.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			4 Laporan	2.130.957.671,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Laporan Keuangan Kota Palopo	-	2.547.000.000,00	
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	2.106.345.371,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola	Laporan Keuangan Kota Palopo		2.522.000.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo

														kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	23.478.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Laporan Keuangan Kota Palopo		23.650.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	546.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Laporan Keuangan Kota Palopo		675.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	588.300,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Laporan Keuangan Kota Palopo		675.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			5 Laporan	8.661.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Laporan Aset Kota Palopo	-	9.000.000,00	
	2	23	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	8.661.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Laporan Aset Kota Palopo		9.000.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			30 Orang	9.992.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo	-	13.500.000,00	
	2	23	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	2.192.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo		4.500.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	7.800.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo		9.000.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			4 Jenis	81.375.550,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo	-	92.250.000,00	

	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo		1.750.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2.473.550,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo		3.000.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokume n	2.640.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo		2.500.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	74.762.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo		85.000.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			10 unit	10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Aset Daerah Kota Palopo	-	15.000.000,00	
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Aset Daerah Kota Palopo		15.000.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			3 Jenis	148.256.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Kota Palopo	-	160.000.000,00	
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	13.256.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Kota Palopo		15.000.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	60.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Kota Palopo		65.000.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	75.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Kota Palopo		80.000.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	-			58 unit	51.461.953,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Aset Daerah Kota Palopo	-	57.000.000,00	
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	15.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Aset Daerah Kota Palopo		15.000.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	22.400.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Aset Daerah Kota Palopo		25.000.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	6.300.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Aset Daerah Kota Palopo		8.000.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	7.761.953,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Aset Daerah Kota Palopo		9.000.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
##	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan di Palopo yang Aktif	-			6 persen	86.150.000,00						-	408.600.000,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibina pengelolaanya diwilayah Kota Palopo	-			26 Pepustakaan	37.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perpustakaan Sekolah Kota Palopo	-	54.100.000,00	
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan														
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				11 Perpustakaan	8.800.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perpustakaan Sekolah Kota Palopo		12.000.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				15 Orang	3.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perpustakaan Sekolah Kota Palopo		4.600.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														

							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				160 Eksemplar	24.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perpustakaan Sekolah Kota Palopo		35.000.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan Dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	1.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perpustakaan Sekolah Kota Palopo		2.500.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Perpustakaan keliling yang dilaksanakan	-			1 Layanan	48.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat Kota Palopo	-	354.500.000,00	
	2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				15 Orang	5.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat Kota Palopo		7.000.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				5 Perpustakaan	2.750.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat Kota Palopo		3.500.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	02	2.02	0008	Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan Di Tempat-Tempat Umum Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				9 Perpustakaan	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat Kota Palopo		300.000.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				30 Orang	15.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat Kota Palopo		17.000.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Masyarakat														
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				80 Lokus	25.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat Kota Palopo		27.000.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
##	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah event pameran naskah kuno yang dilaksanakan	-			1 kali/tahun	14.800.000,00						-	27.500.000,00	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan	-			26 Naskah	14.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Pemustaka dan Komunitas Penggiat Literasi Kota Palopo	-	27.500.000,00	
	2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, Dan Pendaftaran Naskah Kuno														

							Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				16 Orang	4.800.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Pemustaka dan Komunitas Penggiat Literasi Kota Palopo		7.500.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan Dan Pengalihmediaan Naskah Kuno Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Untuk Dilestarikan Dan Didayagunakan													
							Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				1 Eksemplar	10.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Pemustaka dan Komunitas Penggiat Literasi Kota Palopo		20.000.000,00	Dinas Perpustakaan Kota Palopo
						DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO					1.802.781.250,00							1.941.470.363,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.802.781.250,00							1.941.470.363,00	
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					1.802.781.250,00							1.941.470.363,00	
##	2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	1.730.969.055,00						-	1.862.930.149,00	
	2	24	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	-			6 Dokumen	5.600.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD	-	4.848.910,00	
	2	24	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	2.800.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		2.420.000,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.800.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		2.428.910,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Penatausahaan Keuangan yang Diterbitkan	-			11 Dokumen	1.455.494.455,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	1.576.284.889,00	
	2	24	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	1.425.454.455,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		1.543.240.889,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	22.800.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		25.080.000,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	7.240.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		7.964.000,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolan Aset	-			12 Laporan	6.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD	-	6.600.000,00	
	2	24	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola	SKPD		6.600.000,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo

																Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	2	24	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			2 Orang	12.290.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	12.628.000,00	
	2	24	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	12.290.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		12.628.000,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			14 Jenis	106.392.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	117.031.200,00	
	2	24	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.050.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		1.155.000,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	100.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		110.000,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	105.242.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		115.766.200,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-			1 Unit	29.950.000,00			-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD	-	24.858.900,00	
	2	24	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	15.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		16.170.000,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	14.950.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		8.688.900,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			24 Jenis	90.502.600,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD	-	93.464.250,00	
	2	24	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	26.507.600,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		23.069.750,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	545.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	SKPD		599.500,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo

																1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	2	24	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	63.450.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		69.795.000,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	-			13 Unit	24.740.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD	-	27.214.000,00	
	2	24	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	18.900.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		20.790.000,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	600.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		660.000,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	4.100.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		4.510.000,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.140.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		1.254.000,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
##	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD Yang Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Arsip	-			27 Persen	64.002.295,00						-	69.949.324,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis	-			100 Persen	38.448.200,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD	-	41.839.820,00	
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan Dan Penggunaan Arsip Dinamis														
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				4 Berkas	8.050.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		8.401.800,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis														
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				700 Berkas	1.258.200,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		1.384.020,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Laporan	29.140.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		32.054.000,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang diakuisi dan diolah	-			50 Arsip	2.485.895,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	SKPD	-	2.734.484,00	

																Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, Dan Akses Arsip Statis														
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				50 Arsip	2.485.895,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		2.734.484,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan E-Arsip (SRIKANDI)	-			30 Persen	23.068.200,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD	-	25.375.020,00	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses Dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				30 Penggun a	23.068.200,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		25.375.020,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
##	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban	-			10 Arsip	7.809.900,00						-	8.590.890,00	
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang siap dimusnahkan	-			30 Persen	5.209.800,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD	-	5.730.780,00	
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun														
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				35 Berkas	2.600.100,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		2.860.110,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				58 Arsip	2.609.700,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD		2.870.670,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-			-	2.600.100,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	2.860.110,00	
	2	24	03	2.04	0001	Penilaian Dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				24 Arsip	2.600.100,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		2.860.110,00	Dinas Kearsipan Kota Palopo
						DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO						5.536.029.644,00							5.863.255.372,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.536.029.644,00							5.863.255.372,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						5.536.029.644,00							5.863.255.372,00	
##	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	4.534.293.495,00						-	4.795.295.311,00	
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			8 Dokume n	1.230.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN	-	6.352.500,00	
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokume n	725.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		797.500,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	505.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		5.555.000,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			757 Laporan	4.154.656.996,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN	-	4.392.754.755,00	
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	4.083.226.996,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		4.314.181.755,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	70.560.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		77.616.000,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	870.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		957.000,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang difasilitasi	-			42 Orang	12.374.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN	-	13.611.400,00	
	3	25	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	12.374.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		13.611.400,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			2 Jenis	90.603.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN	-	86.861.500,00	
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	90.603.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		86.861.500,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			12 unit	17.199.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN	-	18.918.900,00	
	3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	3.800.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		4.180.000,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	13.399.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		14.738.900,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			3 Jenis	191.420.499,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN	-	203.525.256,00	
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	26.159.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		28.803.674,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	80.509.669,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		87.768.582,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	84.751.830,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		86.953.000,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	-			56 unit	66.810.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN	-	73.271.000,00	
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	21.250.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		23.375.000,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	23.960.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		26.356.000,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	6.400.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		6.820.000,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.200.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	ASN		16.720.000,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
##	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-			19.395,25 ton/tahun	691.570.297,00						-	686.973.950,00	
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang diberdayakan	-			30 Kelompok	640.695.297,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Nelayan	-	631.011.450,00	
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				100 Orang	20.250.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Nelayan		20.756.250,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				30 Kelompok	24.619.500,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Nelayan		27.081.450,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
							Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				2000 Unit Usaha	403.200.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Nelayan		413.280.000,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	03	2.02	0004	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				20 Unit	192.625.797,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Nelayan		169.893.750,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang dikelola	-			1 TPI	50.875.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Nelayan	-	55.962.500,00	

															untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal				
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Tpi)														
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				3 Layanan	50.875.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Nelayan		55.962.500,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
##	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-			192.110,18 ton/tahun	122.861.578,00						-	135.147.735,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya yang diberdayakan	-			30 Kelompok	21.960.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pembudidaya	-	32.956.000,00	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				15 Kelompok	8.410.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pembudidaya		9.251.000,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				15 Kelompok	13.550.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pembudidaya		23.705.000,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah prasarana dan sarana pembudidaya ikan	-			3 unit	100.901.578,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pembudidaya	-	102.191.735,00	
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data Dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	15.375.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pembudidaya		16.912.500,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	28.126.200,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pembudidaya		30.938.820,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	57.400.378,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pembudidaya		54.340.415,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
##	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Pengawasan Usaha di Sektor Kelautan dan Perikanan	-			23 Pelaku Usaha	14.450.000,00						-	33.491.875,00	
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Frekuensi pelaksanaan pengawasan di wilayah perairan sungai, danau, waduk, rawa, dll.	-			13 Pelaku Usaha	14.450.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Sektor Perikanan	-	33.491.875,00	
	3	25	05	2.01	0004	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				10 Pelaku Usaha	7.225.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Sektor Perikanan		13.043.125,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	05	2.01	0006	Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan Dan/Atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				13 Pelaku Usaha	7.225.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 3. Pengembangan Produktifitas	Pelaku Usaha Sektor Perikanan		20.448.750,00	Dinas Perikanan Kota Palopo

																Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal				
##	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	-			144,73 ton/tahun	172.854.274,00						-	212.346.501,00	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah laporan penerbitan daftar usaha pengolahan	-			12 Dokumen	27.450.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	30.195.000,00	
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data Dan Informasi Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Skala Usaha Dan Risiko														
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				12 Dokumen	27.450.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		30.195.000,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha yang dikembangkan mutu dan keamanan produknya	-			4 unit	45.350.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	49.885.000,00	
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha Dan Risiko														
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				10 Unit Usaha	45.350.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		49.885.000,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia dan tersalurkan	-			23725.800 Ton	100.054.274,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	132.266.501,00	
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				23725,80 Ton	24.879.900,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		27.367.890,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				4 Pelaku Usaha	75.174.374,00	Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		104.898.611,00	Dinas Perikanan Kota Palopo
						DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALOPO						6.271.405.808,00							6.077.520.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						6.271.405.808,00							6.077.520.000,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						6.271.405.808,00							6.077.520.000,00	
##	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.583.678.008,00						-	3.427.520.000,00	
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.199.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo	-	1.320.000,00	
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	600.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo		660.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2.599.900,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo		660.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.920.716.305,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo	-	2.647.700.000,00	
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	2.871.576.305,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo		2.600.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan DanPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				14 Dokumen	46.800.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo		47.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	2.340.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo		700.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.200.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo	-	7.000.000,00	
	3	26	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				146 Laporan	7.200.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo		7.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	56.624.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo	-	70.000.000,00	
	3	26	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				41 Paket	19.250.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo		25.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo

															agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	3	26	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	37.374.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo		45.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	201.191.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo	-	265.500.000,00	
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo		1.500.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo		1.500.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1.925.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo		2.500.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	196.266.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo		260.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	61.216.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo	-	42.000.000,00	
	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	61.216.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo		42.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo

	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	279.925.303,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo	-	314.000.000,00	
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	14.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo		16.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	110.025.303,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo		93.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				29 Laporan	155.400.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo		205.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	53.605.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo	-	80.000.000,00	
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	25.150.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo		29.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	800.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo		10.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	7.800.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo		6.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	19.855.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		35.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo

															mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kota Palopo			
##	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang memenuhi Kriteria 3A	-			10 persen	2.259.231.800,00						-	2.171.000.000,00	
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-			-	302.645.000,00			-	5.Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pariwisata dan Masyarakat Kota Palopo	-	452.000.000,00	
	3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pariwisata dan Masyarakat Kota Palopo		2.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan Dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				1 Dokume n	302.645.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pariwisata dan Masyarakat Kota Palopo		450.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	5.Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-	-	2.000.000,00	
	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				10 Unit	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		2.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	1.956.586.800,00			-	5.Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pariwisata dan Masyarakat Kota Palopo	-	1.717.000.000,00	
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pariwisata dan Masyarakat Kota Palopo		2.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				13 Unit	1.844.950.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pariwisata dan Masyarakat Kota Palopo		1.200.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo

															produksi melalui peran aktif koperasi.					
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				8 Laporan	44.136.800,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pariwisata dan Masyarakat Kota Palopo		450.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	02	2.03	0010	Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	67.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Pariwisata dan Masyarakat Kota Palopo		65.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
##	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-			-	110.300.000,00						-	113.000.000,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	110.300.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	-	113.000.000,00	
	3	26	03	2.01	0005	Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				2 Dokumen	8.300.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Wisatawan Mancanegara dan Nusantara		9.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				7 Kegiatan	60.355.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Wisatawan Mancanegara dan Nusantara		65.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, Dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri														
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Promosi	41.645.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Wisatawan Mancanegara dan Nusantara		39.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
##	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-			-	318.196.000,00						-	366.000.000,00	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	220.676.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	-	285.000.000,00	
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi Dan Konservasi Ekonomi Kreatif														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	220.676.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		285.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo

															mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal				
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-			-	97.520.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	-	81.000.000,00	
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, Dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				80 Orang	97.520.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		81.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
						DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO						19.258.241.034,00							20.071.913.932,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						19.258.241.034,00							20.071.913.932,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						19.258.241.034,00							20.071.913.932,00	
##	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	14.016.753.548,00						-	13.754.500.000,00	
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			7 Dokumen	23.293.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah	-	27.500.000,00	
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	11.495.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		15.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6.798.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		7.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	5.000.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		5.500.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			28 Laporan	12.493.374.048,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah	-	12.103.000.000,00	
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				111 Orang/bulan	12.388.014.048,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		12.000.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	95.460.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		95.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.950.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		3.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	4.950.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		5.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			12 Laporan	13.230.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah	-	19.000.000,00	
	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	13.230.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		19.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			109 Orang	10.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah	-	12.000.000,00	
	3	27	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	10.000.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		12.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			5 Jenis	406.096.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah	-	455.000.000,00	
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9.502.500,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		10.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	11.594.200,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		15.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10.000.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		20.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	25.000.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		30.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	350.000.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas	Pemerintah Daerah		380.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan

															pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal				Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			1 unit	12.800.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah	-	15.000.000,00	
	3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	12.800.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		15.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			3 Jenis	927.369.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah	-	985.000.000,00	
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	50.000.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		65.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	211.000.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		220.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	666.369.800,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		700.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	-			134 unit	130.590.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah	-	138.000.000,00	
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	51.750.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		51.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				110 Unit	46.840.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		50.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12.000.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		15.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	20.000.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pemerintah Daerah		22.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
##	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	-			5 persen	2.487.695.000,00						-	4.490.225.486,00	

						PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian Yang diawasi dan didampingi	-			16 Unit	880.495.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani	-	123.577.300,00	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi													
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				12 Laporan	619.310.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani		31.020.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian													
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	261.185.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani		92.557.300,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelahiran Ternak dari Hasil Inseminasi Buatan	-			12 ekor	10.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Peternak	-	188.175.306,00	
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas Sdg Hewan/Tanaman													
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				12 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Peternak		188.175.306,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan yang Dilaksanakan	-			12 Laporan	12.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani	-	20.724.000,00	
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil													
							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				12 Laporan	12.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani		20.724.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengecer Obat Hewan yang diawasi	-			12 Unit	5.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Peternakan	-	5.500.000,00	
	3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat Dan Keamanan Peredaran Obat Hewan													
							Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				12 Laporan	5.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pelaku Usaha Peternakan		5.500.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi DOC UPTD	-			50000 ekor	803.200.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Peternak	-	1.100.000.000,00	
	3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak													
							Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				12 Laporan	803.200.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Mancani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Peternak		1.100.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Produksi Peternakan	-			4813 Ton	777.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Ternak	-	3.052.248.880,00	

															kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
							Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				2 Ton	158.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Ternak		2.386.725.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				200 Ekor	619.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Ternak		545.523.880,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
							Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				200 Dosis	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Ternak		120.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
##	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terkelola	-			2120 Ha	2.314.210.000,00						-	1.377.089.313,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Tanaman Hortikultura yang dimanfaatkan Luas Lahan Tanaman Pangan yang dimanfaatkan	-			120 Ha 2000 Ha	814.210.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani	-	546.089.821,00	
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2 Laporan	11.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani		14.410.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian Dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
							Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				2120 Ha	785.010.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani		500.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Di Kabupaten/Kota														
							Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				3 Dokumen	18.200.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani		31.679.821,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun	-			30 unit	1.500.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani	-	830.999.492,00	
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				27 Unit	1.350.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani		680.999.492,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				3 Unit	150.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani		150.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
##	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-			28 persen	45.000.000,00						-	50.000.000,00	

						MASYARAKAT VETERINER													
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Penyakit Hewan yang ditangani	-			1000 Kasus	32.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Veteriner	-	35.000.000,00	
	3	27	04	2.01	0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan Dan Zoonosis Pada Hewan													
							Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				1000 Kasus	32.000.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Veteriner		35.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-			12 Kali	13.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Veteriner	-	15.000.000,00	
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan Dan Produk Hewan													
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	13.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat Veteriner		15.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
##	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana	-			100 Persen	222.242.217,00						-	232.524.838,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Lahan Pertanian Yang dikendalikan	-			70 Ha	222.242.217,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani	-	232.524.838,00	
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan													
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				40 Ha	14.940.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani		192.201.313,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan													
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				25 Ha	195.102.217,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani		15.023.525,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan													
							Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				12 Laporan	12.200.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani		25.300.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
##	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	-			60 Persen	172.340.269,00						-	167.574.295,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pembinaan Kelompok Tani	-			60 Persen	172.340.269,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani	-	167.574.295,00	
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa													
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Unit	30.415.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani		45.716.548,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa													
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				466 Unit	116.166.269,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas	Kelompok Tani		12.270.247,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan

													Semua Kel/Desa		pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal				Perkebunan Kota Palopo
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				9 Unit	12.109.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani		22.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan Dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				9 Unit	13.650.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani		32.587.500,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan Dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian														
							Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				55 Orang	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Kelompok Tani		55.000.000,00	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Palopo
						DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO						5.384.952.366,00							6.810.130.813,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.384.952.366,00							6.810.130.813,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						5.384.952.366,00							6.810.130.813,00	
##	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.064.245.247,02						-	4.609.916.654,00	
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.143.300,00			-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-	-	9.976.250,00	
	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	8.440.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		9.976.250,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.703.300,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		0,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.563.049.577,00			-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-	-	4.092.734.654,00	
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	3.462.482.377,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		3.981.854.734,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	96.327.200,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		106.003.920,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.240.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		2.576.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		2.300.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo

	3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	9.925.000,00			-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-	-	11.413.750,00	
	3	30	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	9.925.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		11.413.750,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	62.302.440,00			-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-	-	57.342.000,00	
	3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	10.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		12.500.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.05	0003	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12.906.600,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		14.842.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	39.395.840,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		30.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	139.406.550,02			-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-	-	132.200.000,00	
	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	1.641.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		1.700.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	137.765.550,02	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		130.500.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	53.409.000,00			-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-	-	59.000.000,00	
	3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	15.499.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		15.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	34.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		38.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya													
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3.910.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		6.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	171.979.380,00			-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas	-	-	186.500.000,00	

																Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal				
	3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.356.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		10.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	112.850.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		126.300.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	8.133.380,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		8.200.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	41.640.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		42.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	54.030.000,00			-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-	-	60.750.000,00	
	3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	28.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		30.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	5.750.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		8.250.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
							Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				7 Unit	2.700.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		4.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	2.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		1.500.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	9.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		10.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.080.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		7.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
##	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	undefined Persentase Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Peningkatan Jumlah Retribusi dari Pasar	-			71.42 % % 71.42 persen 71.42 persen	633.701.365,98						-	839.191.185,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	13.288.655,98			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Sarana Perdagangan	-	127.651.593,00	
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														

							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				6 Unit	13.288.655,98	Kota Palopo, Wara, Dangerekko	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Sarana Perdagangan		7.651.593,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan													
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5.Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Sarana Perdagangan		120.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-			-	620.412.710,00			-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-	-	711.539.592,00	
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan Dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	620.412.710,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		711.539.592,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
##	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-			-	452.689.600,00						-	559.255.810,00	
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	175.641.500,00			-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-	-	226.378.650,00	
	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi Dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Agen Dan Pasar Rakyat													
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	130.566.500,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		174.628.650,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Agen Dan Pasar Rakyat													
							Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	45.075.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		51.750.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	272.778.100,00			-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-	-	327.966.660,00	
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan													
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	34.833.100,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		46.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler Dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				9 Laporan	237.945.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		281.966.660,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.270.000,00			-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-	-	4.910.500,00	
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi													
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				2 Laporan	4.270.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		4.910.500,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
##	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-			-	156.843.272,00						-	720.000.000,00	

	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	156.843.272,00			-	4.Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-	-	720.000.000,00	
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional													
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				30 Pelaku Usaha	56.843.272,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4.Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		300.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan													
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				30 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4.Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		300.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor													
							Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				10 Produk	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4.Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		120.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
##	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-			-	49.248.210,00						-	49.308.792,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	49.248.210,00			-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-	-	49.308.792,00	
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang													
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				725 Unit	49.248.210,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		49.308.792,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
##	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-			-	28.224.671,00						-	32.458.372,00	
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	28.224.671,00			-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-	-	32.458.372,00	
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota													
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				1 UMKM	28.224.671,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		32.458.372,00	Dinas Perdagangan Kota Palopo
						DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO						2.400.572.154,00							2.562.176.490,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.400.572.154,00							2.562.176.490,00	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						2.400.572.154,00							2.562.176.490,00	
##	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	2.354.806.154,00						-	2.510.941.700,00	
	3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			8 Dokumen	1.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo	-	1.870.000,00	
	3	31	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	1.700.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo		1.870.000,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo
	3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			45 Laporan	2.105.122.885,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	ASN Kota Palopo	-	2.236.556.300,00	

																Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.081.442.885,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo		2.210.508.300,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo
	3	31	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8 Dokumen	22.800.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo		25.080.000,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo
	3	31	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	880.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo		968.000,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo
	3	31	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			1 Laporan	8.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	PNS Kota Palopo	-	9.240.000,00	
	3	31	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	8.400.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	PNS Kota Palopo		9.240.000,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo
	3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			20 Orang	9.490.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo	-	11.000.000,00	
	3	31	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	9.490.200,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo		11.000.000,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo
	3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			3 Jenis	44.618.504,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo	-	47.850.000,00	
	3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	3.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo		3.850.000,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo
	3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	41.118.504,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo		44.000.000,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo
	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			3 Jenis	145.324.565,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo	-	159.845.400,00	
	3	31	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				70 Laporan	7.695.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo		8.464.500,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo
	3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				8 Laporan	43.424.640,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo		47.767.104,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo
	3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	94.204.925,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Kota Palopo		103.613.796,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo
	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	-			31 Unit	40.150.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	PNS Kota Palopo	-	44.580.000,00	
	3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	21.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	PNS Kota Palopo		23.100.000,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo
	3	31	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	1.200.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	PNS Kota Palopo		1.320.000,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo
	3	31	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	2.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	PNS Kota Palopo		2.200.000,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo
	3	31	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	3.600.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	PNS Kota Palopo		3.960.000,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo
	3	31	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12.350.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	PNS Kota Palopo		14.000.000,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo
##	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	-			95 persen	27.454.000,00						-	37.704.000,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan	-			5 Dokumen	27.454.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pembangunan Industri Kota Palopo	-	37.704.000,00	
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				2 Dokumen	2.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pembangunan Industri Kota Palopo		2.750.000,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo

															kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				4 Dokumen	24.954.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pembangunan Industri Kota Palopo		34.954.000,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo
##	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Unit Industri yang Berizin	-			17 persen	5.280.000,00						-	6.144.290,00	
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan	-			6 Jenis	5.280.000,00			-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-	-	6.144.290,00	
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota														
							-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				5 Dokumen	5.280.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	-		6.144.290,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo
##	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri Kecil Menengah dan Perusahaan di Kawasan Industri Kota Palopo yang Datanya Masuk dalam SII Nasional	-			35 persen	13.032.000,00						-	7.386.500,00	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penginputan Data pada Sistem	-			3 Laporan	13.032.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat KotaPalopo	-	7.386.500,00	
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas)														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	8.532.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat KotaPalopo		2.436.500,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo
	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi Dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui Siinas														
							Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				2 Dokumen	4.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Masyarakat KotaPalopo		4.950.000,00	Dinas Perindustrian Kota Palopo
						UPTD INDUSTRI PANGAN						67.647.250,00							6.600.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						67.647.250,00							6.600.000,00	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						67.647.250,00							6.600.000,00	
##	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	-			95 persen	67.647.250,00						-	6.600.000,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan	-			5 Dokumen	67.647.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pembangunan Industri Kota PalopoP	-	6.600.000,00	

	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				2 Dokumen	67.647.250,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 3. Pengembangan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kewirausahaan dan Investasi Lokal	Pembangunan Industri Kota PalopoP		6.600.000,00	Uptd Industri Pangan
						DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO						2.107.457.186,00							2.785.617.200,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.107.457.186,00							2.785.617.200,00	
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						2.107.457.186,00							2.785.617.200,00	
##	3	32	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah undefined	-			100 persen undefined undefined	2.107.457.186,00						-	2.717.490.200,00	
	3	32	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			8 Dokumen	1.800.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	skpd	-	2.305.000,00	
	3	32	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 laporan Dokumen	310.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	skpd		982.000,00	Dinas Transmigrasi Kota Palopo
	3	32	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	1.490.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	skpd		1.323.000,00	Dinas Transmigrasi Kota Palopo
	3	32	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan yang tersusun	-			15 Laporan	2.059.186.243,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	skpd	-	2.462.508.000,00	
	3	32	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2.010.994.243,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	skpd		2.410.618.000,00	Dinas Transmigrasi Kota Palopo
	3	32	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 bulan Dokumen	48.192.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	skpd		51.890.000,00	Dinas Transmigrasi Kota Palopo
	3	32	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			26 Orang	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur	ASN	-	16.500.000,00	

														mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan				
	3	32	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN		16.500.000,00	Dinas Transmigrasi Kota Palopo
	3	32	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pertemuan dan konsultasi yang dilaksanakan	-			50 kegiatan	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN	-	132.610.000,00	
	3	32	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan Laporan	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	ASN		132.610.000,00	Dinas Transmigrasi Kota Palopo
	3	32	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang diadakan	-			4 Unit	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Belanja barang	-	15.000.000,00	
	3	32	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Belanja barang		15.000.000,00	Dinas Transmigrasi Kota Palopo
	3	32	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			450 Jenis	31.120.943,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Belanja barang	-	59.506.000,00	
	3	32	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 bulan Laporan	286.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Belanja barang		14.866.000,00	Dinas Transmigrasi Kota Palopo
	3	32	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan Laporan	6.544.799,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Belanja barang		14.544.000,00	Dinas Transmigrasi Kota Palopo
	3	32	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan Laporan	24.290.144,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Belanja barang		30.096.000,00	Dinas Transmigrasi Kota Palopo
	3	32	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	15.350.000,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-	-	29.061.200,00	
	3	32	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	15.350.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		21.361.200,00	Dinas Transmigrasi Kota Palopo
	3	32	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	-		7.700.000,00	Dinas Transmigrasi Kota Palopo
##	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah peserta transmigrasi Luas Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya	-			300 Kepala Keluarga 600 Ha	0,00						-	68.127.000,00	
	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta transmigrasi Luas Lahan pertanian yang dikelola	-			300 Kepala Keluarga 600 Ha	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Peserta Transmigrasi	-	68.127.000,00	
	3	32	03	2.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat Dan Transmigran													
							Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				1 dokumen Dokumen	0,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Peserta Transmigrasi		55.167.000,00	Dinas Transmigrasi Kota Palopo
	3	32	03	2.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi													
							Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)				1 laporan Kepala Keluarga	0,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	Peserta Transmigrasi		12.960.000,00	Dinas Transmigrasi Kota Palopo
						SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO						41.795.800.268,00							45.283.856.151,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						40.945.300.268,00							45.114.483.651,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						40.945.300.268,00							45.114.483.651,00	
##	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	32.356.846.043,00						-	34.020.735.449,00	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			7 Dokumen	136.434.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen Perencanaan	-	150.077.510,00	
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	73.600.100,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen Perencanaan		80.960.110,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	62.834.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen Perencanaan		69.117.400,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			7 Dokumen	16.544.082.130,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	16.819.642.098,00	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2100 Orang/bulan	15.430.039.406,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		15.633.954.600,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4652 Dokumen	949.607.724,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		1.004.808.998,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	164.435.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		180.878.500,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			4 Laporan	203.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang Milik Daerah	-	223.630.000,00	
	4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	203.200.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang Milik Daerah		223.630.000,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			40 Orang	188.083.294,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	198.507.100,00	
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	59.600.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		44.000.000,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	128.483.294,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		154.507.100,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			8 Jenis	1.794.997.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Sekretariat Daerah	-	3.579.513.775,00	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	51.952.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan	Sekretariat Daerah		107.810.450,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo

													Semua Kel/Desa		pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	88.745.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Sekretariat Daerah		154.177.650,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	500.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Sekretariat Daerah		169.237.200,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Sekretariat Daerah		253.983.620,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	10.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Sekretariat Daerah		27.500.000,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	1.144.300.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Sekretariat Daerah		2.866.804.855,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			5 Unit	1.156.310.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang Milik Daerah	-	1.447.075.355,00	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	437.700.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang Milik Daerah		352.000.000,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				9 Unit	26.208.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang Milik Daerah		297.000.000,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	372.196.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang Milik Daerah		27.500.000,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	270.206.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang Milik Daerah		320.571.735,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	50.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang Milik Daerah		450.003.620,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo

	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			4 Jenis	5.359.172.119,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	sekretariat daerah	-	4.370.077.258,00	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	163.560.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	sekretariat daerah		298.372.800,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.672.459.619,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	sekretariat daerah		1.330.910.633,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	250.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	sekretariat daerah		363.000.000,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.273.152.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	sekretariat daerah		2.377.793.825,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	-			545 Unit	1.536.306.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang milik daerah	-	1.635.022.400,00	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	468.050.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang milik daerah		481.855.000,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	383.950.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang milik daerah		466.345.000,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				395 Unit	301.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang milik daerah		236.390.000,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	383.306.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang milik daerah		450.432.400,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah laporan penatausahaan operasional KDH dan WKDH	-			36 Laporan	2.684.481.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	kepala daerah dan wakil kepala daerah	-	2.763.897.458,00	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				28 Orang/Bulan	259.481.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	kepala daerah dan wakil kepala daerah		509.604.700,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo

														narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				30 Paket	120.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	kepala daerah dan wakil kepala daerah		191.792.758,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	170.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	kepala daerah dan wakil kepala daerah		249.700.000,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah														
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/Bulan	2.135.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	kepala daerah dan wakil kepala daerah		1.812.800.000,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah kerumahtanggaan yang difasilitasi	-			3 Jenis	1.146.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Sekretariat Daerah	-	1.065.608.500,00	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	710.400.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Sekretariat Daerah		579.205.000,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	333.200.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Sekretariat Daerah		396.203.500,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				2 Paket	103.200.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Sekretariat Daerah		90.200.000,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penataan secara kelembagaan	-			49 Perangkat Daerah	618.685.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	680.553.995,00	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan														
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				150 Dokumen	170.894.800,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		218.544.645,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana														
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				6 Laporan	168.659.900,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		179.623.125,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi														
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				49 Dokumen	137.384.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		139.238.825,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														

							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				49 Dokumen	141.746.400,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		143.147.400,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan protokoleran	-			1 Laporan	988.293.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Pimpinan kepala Daerah	-	1.087.130.000,00	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				770 Laporan	527.265.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Pimpinan kepala Daerah		440.610.500,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				720 Laporan	240.098.800,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Pimpinan kepala Daerah		319.625.680,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				770 Laporan	220.930.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Pimpinan kepala Daerah		326.893.820,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
##	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-			100 persen	7.323.980.026,00						-	9.991.195.596,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah administrasi tata Pemerintahan	-			20 Laporan	1.951.293.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kecamatan dan Kelurahan	-	4.907.122.996,00	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	463.150.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kecamatan dan Kelurahan		240.963.921,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	871.038.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kecamatan dan Kelurahan		4.453.013.161,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	617.105.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kecamatan dan Kelurahan		213.145.914,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	-			21 Kegiatan	4.087.512.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Masyarakat	-	4.041.634.224,00	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				4 Dokumen	780.365.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Masyarakat		1.268.997.970,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														

							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				3 Dokumen	534.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Masyarakat		889.283.241,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				12 Dokumen	2.773.147.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif5. Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Lokal	Masyarakat		1.883.353.013,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah layanan produk hukum daerah yang ditetapkan	-			857 Perda/Perkada	870.456.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat dan Dokumen Perda dan Perkada	-	586.248.328,00	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				450 Dokumen	305.431.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat dan Dokumen Perda dan Perkada		393.588.869,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus	482.566.300,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat dan Dokumen Perda dan Perkada		81.987.840,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum														
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				450 Dokumen	82.459.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat dan Dokumen Perda dan Perkada		110.671.619,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kerjasama antar daerah	-			34 Dokumen	414.718.226,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	-	456.190.048,00	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				25 Dokumen	226.704.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa		319.373.024,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	21.326.226,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa		66.002.544,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				8 Laporan	166.688.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa		70.814.480,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
##	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Capaian Kinerja ProgramPembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah	-			100 persen	1.264.474.199,00						-	1.102.552.606,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rekomendasi terkait pengelolaan perekonomian daerah	-			12 Laporan	361.147.900,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola	Masyarakat	-	357.063.333,00	

															toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokume n	101.572.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		126.750.471,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				10 Laporan	145.773.700,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		111.066.986,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokume n	113.802.200,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		119.245.876,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah yang di rekomendasikan	-			25 Laporan	298.090.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	326.726.266,00	
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				12 Dokume n	106.946.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		129.725.200,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	43.014.300,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		66.688.600,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	148.129.900,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		130.312.466,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pemenuhan 17 standar LPSE	-			83 Dokume n	474.300.420,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	341.571.900,00	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				63 Dokume n	112.086.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		117.056.500,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				8 Dokume n	235.947.920,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		138.464.600,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				60 Orang	126.266.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		86.050.800,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo

	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah pemantauan SDA yang dilaksanakan	-			3 Dokumen	130.935.179,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	77.191.107,00	
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Dan Perikanan													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				18 Dokumen	59.861.199,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		11.337.150,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Dan Lingkungan Hidup													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				14 Dokumen	17.433.230,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		18.909.000,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Energi Dan Air													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				14 Dokumen	53.640.750,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		46.944.957,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
	X					NON URUSAN						850.500.000,00							169.372.500,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						850.500.000,00							169.372.500,00	
##	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	850.500.000,00						-	169.372.500,00	
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			8 Jenis	850.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	169.372.500,00	
	X	XX	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	850.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		169.372.500,00	Sekretariat Daerah Kota Palopo
						SEKRETARIAT DPRD KOTA PALOPO						26.302.261.280,00							27.945.680.421,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						26.302.261.280,00							27.945.680.421,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						26.302.261.280,00							27.945.680.421,00	
##	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	22.622.063.780,00						-	23.878.133.421,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.410.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	27.500.000,00	
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	10.400.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		16.500.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10.010.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		11.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.623.450.283,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	3.503.500.000,00	

4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	3.455.395.283,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		3.300.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	149.040.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		181.500.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	9.015.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		11.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		11.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	13.200.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	14.520.000,00	
4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD													
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	13.200.000,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		14.520.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	208.000.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	231.250.000,00	
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				150 Paket	35.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		41.250.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				23 Orang	173.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		190.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	699.595.890,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	783.380.000,00	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	10.055.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		12.780.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor													

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2.508.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		72.600.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	30.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		33.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	30.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		33.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	24.750.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		22.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	602.282.890,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		610.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	728.398.500,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	1.235.000.000,00	
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	711.177.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		630.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	2.221.500,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		220.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	15.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		385.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.991.750.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	2.058.487.000,00	
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	186.650.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		134.027.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	424.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan	-		428.240.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo

															Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.381.100.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		1.496.220.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	745.865.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	952.533.900,00	
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	237.509.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		111.558.700,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	188.356.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		131.001.200,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	20.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		22.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	300.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		687.974.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	11.792.900.862,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	13.573.953.800,00	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Dprd													
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	11.467.900.862,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		13.271.453.800,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD													
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				25 Paket	275.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		247.500.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Dprd													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	50.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		55.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	2.798.493.245,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	1.498.008.721,00	
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan Dprd													
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		5.500.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo

																1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi Dan Konsultasi DPRD														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				0 Laporan	1.964.573.245,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		1.162.508.721,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Dprd														
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	828.920.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		330.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
##	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-			-	3.680.197.500,00						-	4.067.547.000,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	2.169.950.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	2.387.000.000,00	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan Dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				25 Dokumen	550.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		605.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				5 Dokumen	1.500.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		1.650.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	9.992.500,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		11.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		110.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib Dprd														
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	9.957.500,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		11.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	99.922.500,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	110.000.000,00	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA Dan PPAS														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	20.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		22.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo

	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS													
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	20.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		22.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD													
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	14.990.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		16.500.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan Apbd Perubahan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	14.997.500,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		16.500.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester													
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	14.945.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		16.500.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban Apbd													
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	14.990.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		16.500.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	826.000.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	990.000.000,00	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas Dprd													
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	375.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		412.500.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli													
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	120.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		158.400.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi													
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	100.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		165.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja Dprd													
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		11.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi Dan Dokumentasi DPRD													
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	221.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		243.100.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	423.125.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola	-	-	426.547.000,00	

																Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja Dalam Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		16.500.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Dprd														
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	9.985.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		11.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses														
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	398.140.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		399.047.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	161.200.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	154.000.000,00	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	9.985.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		11.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja Dprd														
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	9.985.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		11.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	35.480.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		55.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan Dprd														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	105.750.000,00	Kota Palopo, Bara, Tobulung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		77.000.000,00	Sekretariat Dprd Kota Palopo
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO						7.308.349.872,00							8.045.700.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7.308.349.872,00							8.045.700.000,00	
	5	01				PERENCANAAN						7.308.349.872,00							8.045.700.000,00	
##	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	4.808.349.872,00						-	4.866.700.000,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			5 Dokumen	18.252.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA	-	39.000.000,00	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	13.970.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA		23.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo

	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4.282.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA		16.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	-			12 Laporan	3.499.149.872,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA	-	3.488.700.000,00	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	3.450.449.872,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA		3.400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	45.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA		80.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.700.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA		8.700.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			35 Orang	278.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA	-	291.000.000,00	
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	28.900.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA		31.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				34 Orang	250.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA		260.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi yang Ditatakelolakan	-			5 Jenis	355.998.110,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA	-	449.500.000,00	
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.967.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA		6.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA		7.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokume n	35.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA		40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	15.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA		16.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	300.531.110,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA		380.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	-			21 Unit	71.127.690,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA	-	140.000.000,00	
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	28.860.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA		40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	42.267.690,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA		100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Daerah yang Dibiayai	-			4 Jenis	552.422.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA	-	425.000.000,00	
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	34.119.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA		42.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	184.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA		170.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	ASN BAPPEDA		17.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan

													Semua Kel/Desa		narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				Daerah Kota Palopo
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	324.303.200,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA		195.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pemeliharaannya Dibiayai	-			17 Unit	32.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA	-	33.500.000,00	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	27.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA		27.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	5.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN BAPPEDA		6.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
##	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Capaian Kinerja Tahunan Terhadap Target Kinerja Tahunan dalam RKPD	-			100 persen	1.500.000.000,00						-	1.651.000.000,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan	-			3 Dokumen	840.117.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo	-	912.000.000,00	
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	40.818.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		42.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	280.254.000,00	Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		290.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	519.045.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		530.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan	Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	-			1 Sistem	183.327.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang	SKPD Pemangku	-	255.000.000,00	

						Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikelola								memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kepentingan Pembangunan Kota Palopo			
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah													
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	183.327.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		190.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		65.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	476.556.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo	-	484.000.000,00	
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten/Kota													
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				8 Laporan	216.932.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		219.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	259.624.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		265.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
##	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	-			100 persen	1.000.000.000,00						-	1.528.000.000,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dokumen Perencanaannya Dikoordinasikan	-			49 Perangkat Daerah	455.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo	-	687.000.000,00	
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	104.600.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	132.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		140.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		60.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo

5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		57.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
						0				1 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		90.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	114.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		120.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				6 Laporan	103.700.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Dokumen Perencanaannya Dikoordinasikan Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Dokumen Perencanaannya Dikoordinasikan	-			5 Perangkat Daerah 5 Perangkat Daerah	343.940.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo	-	494.000.000,00	
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
						0				1 0	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	44.700.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		52.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian													
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		37.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sda													
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	191.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		145.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													

							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				2 Laporan	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA													
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	108.240.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		120.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dokumen Perencanaannya DikoordinasikanJumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dokumen Perencanaannya Dikoordinasikan	-			9 Perangkat Daerah9 Perangkat Daerah	200.760.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo	-	347.000.000,00	
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	44.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur													
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	109.260.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	0,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan													
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	47.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	SKPD Pemangku Kepentingan Pembangunan Kota Palopo		52.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO						30.747.171.690,00							30.634.000.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						30.747.171.690,00							30.634.000.000,00	
	5	02				KEUANGAN						30.747.171.690,00							30.634.000.000,00	
##	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	9.488.018.690,00						-	8.811.500.000,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-			4 Dokumen	20.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola	ASN Badan Pengelolaan Keuangan	-	20.000.000,00	

															pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	dan Aset Daerah			
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokume n	15.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		15.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		5.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai SAP	-			12 Laporan	5.922.931.690,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	5.180.000.000,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				600 Orang/b ulan	5.247.171.690,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		4.500.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokume n	645.760.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		650.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15 Laporan	30.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		30.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			1 Laporan	45.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	45.000.000,00	
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	45.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		45.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi ASN Perangkat Daerah yang dikelola	-			50 Orang	71.650.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	75.000.000,00	
	5	02	01	2.05	0003	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50 Dokume n	40.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		40.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	31.650.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		35.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo

	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang ditatakelolakan	-			132 Dokumen	458.176.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	500.000.000,00	
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	458.176.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		500.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	-			15 Unit	324.355.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	300.000.000,00	
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	324.355.500,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		300.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			36 Laporan	2.300.150.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	2.335.000.000,00	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	35.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		35.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	539.652.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		550.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.725.498.500,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		1.750.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pemeliharaannya dibiayai	-			69 Unit	345.755.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	356.500.000,00	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39.500.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		36.500.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	82.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		85.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	35.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		35.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo

																Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	100.155.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		110.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	89.100.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		90.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
##	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dokumen Penganggaran terhadap Dokumen Perencanaan	-			100 Dokumen	17.274.818.000,00						-	17.620.000.000,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah	-			204 Dokumen	1.722.682.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo	-	1.860.000.000,00	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi Dan Penyusunan KUA Dan PPAS														
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	51.600.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		55.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS														
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	51.600.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		55.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi RKA-SKPD														
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				49 Dokumen	88.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		90.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				49 Dokumen	88.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		90.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi DPA-SKPD														
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				49 Dokumen	30.800.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		35.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				49 Dokumen	30.800.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		35.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD														
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	186.066.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD														
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	186.066.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

															kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	1.009.750.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		1.100.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Kuangan yang diterbitkan	-			4.200 Dokumen	2.302.588.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo	-	2.350.000.000,00	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				4000 Dokumen	1.187.458.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		1.200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas Dan SPD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				200 Dokumen	432.880.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		450.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	682.250.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		700.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo	-			1 Laporan	1.746.479.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo	-	1.850.000.000,00	
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				588 Laporan	399.760.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		400.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi Dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO Dan Beban														
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				588 Dokumen	635.071.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		650.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	184.754.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	187.776.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Kerugian Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	165.018.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	174.100.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	11.448.069.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	11.500.000.000,00	
	5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah													
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	98.069.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		100.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok Dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah													
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1.350.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		1.400.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak													
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	10.000.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		10.000.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-			-	55.000.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	60.000.000,00	
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah													
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	55.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		60.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
##	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Barang yang Memenuhi SAP	-			100 persen	3.984.335.000,00						-	4.202.500.000,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Barang yang Memenuhi SAP	-			100 Dokumen	3.984.335.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo	-	4.202.500.000,00	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga													
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	108.150.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		110.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah													
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	50.200.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		55.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				4 Laporan	930.120.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		1.000.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah													

							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	128.400.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		150.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah													
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	2.012.665.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		2.100.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah													
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	336.250.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		340.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	214.700.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		220.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah													
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	40.500.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		42.500.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah													
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	56.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		60.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	107.350.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo		125.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo
						BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO						12.308.668.298,00							11.961.301.600,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						12.308.668.298,00							11.961.301.600,00	
	5	02				KEUANGAN						12.308.668.298,00							11.961.301.600,00	
##	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	8.679.788.098,00						-	7.721.172.000,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			6 dokumen	2.765.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo	-	2.825.900,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.415.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		1.347.500,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.350.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		1.478.400,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			4 Laporan	7.265.476.002,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	Kantor Badan Pendapatan Daerah	-	6.145.724.800,00	

															narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kota Palopo			
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	5.883.689.902,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		3.621.890.800,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.377.949.100,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		2.519.613.300,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.061.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		2.267.100,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	1.776.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		1.953.600,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan aset	-			1 Laporan	34.895.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo	-	38.384.700,00	
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	34.895.200,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		38.384.700,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			38 Orang	29.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo	-	43.780.000,00	
	5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	29.800.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		32.780.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		11.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			4 Jenis	665.488.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo	-	777.133.300,00	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.203.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		11.223.300,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo

5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	250.005.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		260.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokume n	5.280.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		5.910.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	400.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			8 Unit	80.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo	-	65.000.000,00	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		15.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	80.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		50.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			3 Jenis	490.963.896,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo	-	537.923.300,00	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	14.960.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		14.960.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	247.469.296,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		271.575.300,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	228.534.600,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		251.388.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	-			64 Unit	110.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo	-	110.400.000,00	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	37.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	Kantor Badan Pendapatan Daerah		37.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo

															narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kota Palopo			
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	15.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		15.500.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	37.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		37.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.900.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo		20.900.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
##	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Realisasi Pendapatan Daerah dengan Target Pendapatan Daerah	-			100 persen	3.628.880.200,00						-	4.240.129.600,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Pandapatan Asli Daerah yang terealisasi	-			221 Milyar/Rupiah	3.628.880.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat, Pelaku Usaha/Wajib Pajak	-	4.240.129.600,00	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				12 Dokumen	235.656.200,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat, Pelaku Usaha/Wajib Pajak		259.221.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	04	2.01	0002	Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	33.475.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat, Pelaku Usaha/Wajib Pajak		43.615.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4.Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat, Pelaku Usaha/Wajib Pajak		120.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	475.336.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat, Pelaku Usaha/Wajib Pajak		522.869.600,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)														
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				100 Obyek Pajak	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4.Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat, Pelaku Usaha/Wajib Pajak		120.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen	396.731.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat, Pelaku Usaha/Wajib Pajak		438.879.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah														
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				24 Layanan	227.136.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan	Masyarakat, Pelaku Usaha/Wajib Pajak		249.849.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo

															narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian Dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	260.591.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat, Pelaku Usaha/Wajib Pajak		290.830.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	776.629.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat, Pelaku Usaha/Wajib Pajak		854.291.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	282.237.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat, Pelaku Usaha/Wajib Pajak		307.556.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	624.989.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat, Pelaku Usaha/Wajib Pajak		687.487.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	284.100.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat, Pelaku Usaha/Wajib Pajak		312.532.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				4 Laporan	30.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat, Pelaku Usaha/Wajib Pajak		33.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALOPO						8.409.471.804,00								8.466.740.042,25	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						8.409.471.804,00								8.466.740.042,25	
	5	03				KEPEGAWAIAN						7.060.319.345,00								7.183.962.583,25	
##	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.455.703.200,00						-	4.467.427.268,25	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			3 Dokumen	6.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO	-	7.100.000,00	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		5.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		2.100.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			3 Laporan	3.462.171.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang	ASN PEMKOT PALOPO	-	3.472.271.000,00	

															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar				
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	3.396.571.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		3.406.571.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	63.600.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		63.600.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		2.100.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			1 Laporan	7.914.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO	-	7.914.000,00	
	5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				690 Laporan	7.914.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		7.914.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			39 Orang	60.556.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO	-	60.556.000,00	
	5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	60.556.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		60.556.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			3 Jenis	350.255.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO	-	350.621.018,25	
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	3.265.500,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		3.265.500,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo

															generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokume n	10.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		10.500.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembanga n Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				140 Laporan	336.490.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		336.855.518,25	Badan Kepegawaian Dan Pengembanga n Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			22 Unit	70.740.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO	-	70.898.000,00	
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	11.220.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		11.250.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembanga n Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	59.520.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		59.648.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembanga n Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			9 Jenis	465.166.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO	-	465.167.250,00	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.379 Laporan	137.166.700,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		137.167.250,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembanga n Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	124.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		124.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembanga n Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	204.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		204.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembanga n Sumber Daya Manusia Kota Palopo

	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	-			45 Unit	32.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO	-	32.900.000,00	
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	17.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		17.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	15.900.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		15.900.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
##	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang ditempatkan sesuai Syarat Jabatan dan Syarat Kompetensinya	-			65 persen	2.604.616.145,00						-	2.716.535.315,00	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Kebutuhan pengadaan dan Pemberhentian ASN	-			1 Laporan	842.121.373,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN PEMKOT PALOPO	-	952.121.373,00	
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi Dan Fasilitasi Pengadaan PNS Dan PPPK													
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				0 Dokumen	178.561.073,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN PEMKOT PALOPO		278.561.073,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN Dan Pengadaan ASN													
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				3985 Laporan	460.481.300,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		460.481.300,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian													
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				89 Dokumen	54.288.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		64.288.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi Asn													
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	78.974.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		78.974.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				4503 Dokumen	69.817.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		69.817.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo

	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi	-			1 Laporan	1.218.181.772,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO	-	1.218.181.772,00	
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi Asn													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				398 Dokumen	54.213.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		54.213.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat Asn													
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				875 Dokumen	107.582.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		107.582.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi Asn													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1.056.386.772,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		1.056.386.772,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	-			2 Laporan	367.950.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO	-	369.869.170,00	
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja Asn													
							Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				21 Orang	96.950.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		96.950.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Asn													
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				6 Orang	271.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		272.919.170,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-			2 Laporan	176.363.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO	-	176.363.000,00	
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai													
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				46 Orang	32.870.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		32.870.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Asn													
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				10 Laporan	143.493.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	ASN PEMKOT PALOPO		143.493.000,00	Badan Kepegawaian Dan

													Semua Kel/Desa		kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar				Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1.349.152.459,00							1.282.777.459,00	
##	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-			-	1.349.152.459,00						-	1.282.777.459,00	
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan dan diikuti	-			2 Laporan	1.349.152.459,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO	-	1.282.777.459,00	
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, Dan Prajabatan														
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				145 Laporan	1.349.152.459,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Pembangunan Manusia yang Inklusif dan Penguatan Kualitas Layanan Dasar	ASN PEMKOT PALOPO		1.282.777.459,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo
						BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO						3.145.914.562,00							168.431.583.058,70	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						3.145.914.562,00							168.431.583.058,70	
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						3.145.914.562,00							168.431.583.058,70	
##	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.451.996.826,00						-	2.597.383.058,70	
	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			2 Dokumen	1.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Administrasi Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.650.000,00	
	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Administrasi Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.100.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	500.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Administrasi Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		550.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			12 Laporan	2.003.344.997,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	2.105.088.058,70	
	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	1.967.044.997,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		2.065.158.058,70	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				400 Dokumen	34.800.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		38.280.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	1.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		1.650.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			12 Laporan	7.100.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Administrasi Barang Milik Daerah	-	7.810.000,00	
	5	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				173 Laporan	7.100.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Administrasi Barang Milik Daerah		7.810.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			39 Orang	21.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Pakaian Dinas Pegawai	-	23.760.000,00	
	5	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				36 Paket	21.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Pakaian Dinas Pegawai		23.760.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			2 Jenis	150.515.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Administrasi Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	-	165.000.000,00	
	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61 Laporan	150.515.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Administrasi Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		165.000.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			6 Unit	99.150.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah	-	108.735.000,00	
	5	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	63.850.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	Pengadaan Barang Milik Daerah		70.235.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo

															pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	5	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah		5.500.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	31.300.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah		33.000.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	138.136.829,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	151.500.000,00	
	5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				800 Laporan	39.387.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		44.000.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13.549.609,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		14.000.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	85.200.220,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		93.500.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	-			47 Unit	30.650.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kendaraan Dinas Operasional	-	33.840.000,00	
	5	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.250.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kendaraan Dinas Operasional		29.000.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	600.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kendaraan Dinas Operasional		660.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.800.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kendaraan Dinas Operasional		4.180.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo

															generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
##	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, dan Teknologi yang diwujudkan	-			100 persen	692.917.736,00						-	165.714.200.000,00	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil kelitbangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti jumlah hasil kelitbangan penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	-			1 Dokumen 1 dokumen	151.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	DOKUMEN KAJIAN	-	285.000.000,00	
	5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	150.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	DOKUMEN KAJIAN		165.000.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 4. Pengembangan Infrastruktur Strategis yang Adaptif dan Berkelanjutan	DOKUMEN KAJIAN		120.000.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Hasil kelitbangan Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	-			1 Dokumen	70.958.868,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	DOKUMEN PENELITIAN	-	77.100.000,00	
	5	05	02	2.02	0001	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	70.958.868,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	DOKUMEN PENELITIAN		77.100.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	-			3 Dokumen	270.958.868,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	DOKUMEN PENELITIAN	-	297.100.000,00	
	5	05	02	2.03	0001	Penelitian Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah														
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	70.958.868,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	DOKUMEN PENELITIAN		77.100.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	02	2.03	0007	Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	DOKUMEN PENELITIAN		55.000.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	02	2.03	0012	Penelitian Dan Pengembangan Penataan Ruang Dan Pertanahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	DOKUMEN PENELITIAN		165.000.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo

															generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang difasilitasi	-			15 Inovasi	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	DOKUMEN PENELITIAN	-	165.055.000.000,00	
	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba Dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi Dan Invensi Di Bidang Difusi Inovasi Dan Penerapan Teknologi														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	DOKUMEN PENELITIAN		55.000.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	150.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	DOKUMEN PENELITIAN		165.000.000.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
##	5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	-	-			-	1.000.000,00						-	120.000.000,00	
	5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	-	-			-	1.000.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	120.000.000,00	
	5	05	03	2.02	0009	Koordinasi Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Dihasilkan Oleh Lembaga/Pusat/Organisasi Penelitian Lainnya Di Daerah														
							Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah				5 Kegiatan	1.000.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		120.000.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
						INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO						10.376.891.114,00							12.087.463.776,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						10.376.891.114,00							12.087.463.776,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH						10.376.891.114,00							12.087.463.776,00	
##	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	8.221.275.114,00						-	9.627.079.276,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			8 Dokumen	262.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen	-	288.200,00	
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	130.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen		143.000,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	132.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen		145.200,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			24 Laporan	6.426.817.486,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	7.234.443.200,00	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	6.395.505.486,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		7.200.000.000,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	31.200.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		34.320.000,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	112.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		123.200,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			30 Orang	596.565.566,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	1.193.563.008,00	
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	596.565.566,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		1.193.563.008,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			3 Jenis	341.031.620,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Unit	-	375.134.782,00	
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Paket	3.550.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Unit		3.905.000,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	337.481.620,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Unit		371.229.782,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			30 Jenis	379.287.000,00			-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Paket	-	400.000.000,00	
	6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	379.287.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Paket		400.000.000,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			3 Jenis	291.886.442,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ATK	-	321.075.086,00	
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				490 Laporan	73.593.400,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	ATK		80.952.740,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo

															narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	74.865.002,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ATK		82.351.502,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	143.428.040,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ATK		157.770.844,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	-			42 unit	185.425.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang	-	102.575.000,00	
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.750.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang		40.425.000,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	3.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang		3.300.000,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	25.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang		27.500.000,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	120.675.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang		31.350.000,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
##	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-			0 Nilai 64 Nilai	2.006.884.000,00						-	2.296.779.300,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-			161 Laporan	1.427.136.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen	-	1.659.056.500,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				40 Laporan	62.925.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen		69.217.500,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				47 Laporan	558.455.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen		614.300.500,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja														
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				30 Laporan	266.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	Dokumen		292.600.000,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo

																Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan														
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				4 Laporan	220.970.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen		243.067.000,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				5 Kesepakatan	100.721.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen		200.000.000,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				26 Dokumen	218.065.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen		239.871.500,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-			24 Laporan	579.748.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen	-	637.722.800,00	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				12 Laporan	108.824.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen		119.706.400,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				20 Laporan	470.924.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen		518.016.400,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
##	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rata-Rata Nilai PMPRB Organisasi Perangkat Daerah Rata-Rata Nilai PMPRB Organisasi Perangkat Daerah	-			0 Indeks 55 Indeks	148.732.000,00						-	163.605.200,00	
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi yang dilakukan	-			30 Laporan	148.732.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen	-	163.605.200,00	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				10 perangkat daerah	18.150.000,00	Kota Palopo, Wara, Boting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen		19.965.000,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi														
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				27 Kegiatan	130.582.000,00	Kota Palopo, Wara, Dangerekko	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Dokumen		143.640.200,00	Inspektorat Daerah Kota Palopo
						KECAMATAN WARA						6.091.026.174,00							6.506.152.667,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						6.091.026.174,00							6.506.152.667,00	
	7	01				KECAMATAN						6.091.026.174,00							6.506.152.667,00	
##	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	4.164.808.174,00						-	5.462.309.867,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			10 Dokumen	11.100.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	ASN	-	12.210.000,00	

															Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	5.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		6.050.000,00	Kecamatan Wara
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	5.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		6.160.000,00	Kecamatan Wara
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			17 Laporan	3.895.798.164,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	5.166.680.467,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	3.867.460.164,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		5.134.400.967,00	Kecamatan Wara
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	25.578.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		26.669.500,00	Kecamatan Wara
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	2.760.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		5.610.000,00	Kecamatan Wara
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			12 Laporan	6.715.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Peralatan Kantor	-	7.386.500,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6.715.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Peralatan Kantor		7.386.500,00	Kecamatan Wara
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			2 Orang	8.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	8.800.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	3.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		3.300.000,00	Kecamatan Wara
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	5.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		5.500.000,00	Kecamatan Wara
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			2 Jenis	23.020.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	ASN	-	25.322.000,00	

															Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	2.400.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		2.640.000,00	Kecamatan Wara
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	20.620.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		22.682.000,00	Kecamatan Wara
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			6 Jenis	32.187.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Peralatan Kantor	-	35.475.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	10.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Peralatan Kantor		11.000.000,00	Kecamatan Wara
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	22.187.500,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Peralatan Kantor		24.475.000,00	Kecamatan Wara
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			3 Jenis	155.282.510,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	170.905.900,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.936.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		7.629.600,00	Kecamatan Wara
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	25.880.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		28.468.000,00	Kecamatan Wara
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	122.466.510,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		134.808.300,00	Kecamatan Wara
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	-			11 Unit	32.705.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Peralatan Kantor	-	35.530.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	19.800.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Peralatan Kantor		21.780.000,00	Kecamatan Wara
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	3.500.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	Peralatan Kantor		3.300.000,00	Kecamatan Wara

																Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.405.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Peralatan Kantor		10.450.000,00	Kecamatan Wara
##	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah jenis layanan urusan yang diselenggarakan	-			6 jenis	690.818.000,00						-	759.693.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Urusan yang diselenggarakan	-			6 Jenis	677.930.000,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	745.723.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	677.930.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		745.723.000,00	Kecamatan Wara
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	12.888.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	13.970.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	6.900.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		7.590.000,00	Kecamatan Wara
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	5.988.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		6.380.000,00	Kecamatan Wara
##	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	-			100 persen	12.600.000,00						-	14.905.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	-			6 Desa/Kelurahan	12.600.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Pemerintah Kelurahan Lingkup Kecamatan Wara	-	14.905.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6.600.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Pemerintah Kelurahan Lingkup Kecamatan Wara		7.260.000,00	Kecamatan Wara
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	0,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Pemerintah Kelurahan Lingkup Kecamatan Wara		2.200.000,00	Kecamatan Wara
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	6.000.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Pemerintah Kelurahan Lingkup Kecamatan Wara		5.445.000,00	Kecamatan Wara
##	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial	-			0 persen 100 persen	1.222.800.000,00						-	269.244.800,00	

	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kelurahan yang bebas konflik sosial	-			6 Desa/Kelurahan	1.222.800.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas	-	269.244.800,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	1.222.800.000,00	Kota Palopo, Wara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas		269.244.800,00	Kecamatan Wara
						KECAMATAN WARA UTARA						5.242.736.232,00							5.483.538.696,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						5.242.736.232,00							5.483.538.696,00	
	7	01				KECAMATAN						5.242.736.232,00							5.483.538.696,00	
##	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			0 persen 100 persen	4.476.865.750,00						-	4.774.287.100,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			12 Laporan	4.140.787.290,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	4.576.705.100,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				672 Orang/bulan	4.117.987.290,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		4.550.965.100,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	22.800.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		25.740.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			12 Laporan	6.000.000,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	6.600.000,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6.000.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		6.600.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			15 Orang	16.200.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	15.400.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	16.200.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		9.900.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		5.500.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			3 Jenis	32.484.000,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	19.052.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	879.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		2.200.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		2.200.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1.605.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		2.200.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		1.452.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	30.000.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		11.000.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			4 Jenis	169.026.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	22.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	26.966.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		5.500.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	142.060.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		5.500.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya													
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		5.500.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	ASN		5.500.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			3 Jenis	84.468.860,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	101.200.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.761.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		8.800.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	13.766.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		12.100.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	61.941.860,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		80.300.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	-			6 Unit	27.899.600,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	33.330.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	19.500.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		27.500.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	3.209.600,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		2.640.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	1.200.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		990.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.990.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		2.200.000,00	Kecamatan Wara Utara
##	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata -Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu Rata -Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu	-			0 persen 100 persen	582.703.000,00							-	614.541.596,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Urusan yang diselenggarakan	-			2 Kegiatan	572.583.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	603.492.096,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	572.583.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		603.492.096,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis layanan yang di proses tepat waktu	-			2 Kegiatan	10.120.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	11.049.500,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				3 Laporan	10.120.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		11.049.500,00	Kecamatan Wara Utara

##	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	-			100 persen	139.447.482,00						-	47.190.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	-			6 Desa/Kelurahan	139.447.482,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	47.190.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	23.350.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		25.190.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	0,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		11.000.000,00	Kecamatan Wara Utara
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	116.097.482,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		11.000.000,00	Kecamatan Wara Utara
##	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial	-			100 persen	43.720.000,00						-	47.520.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kelurahan yang bebas konflik sosial	-			6 Desa/Kelurahan	43.720.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN dan Masyarakat	-	47.520.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	43.720.000,00	Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN dan Masyarakat		47.520.000,00	Kecamatan Wara Utara
						KECAMATAN WARA TIMUR						7.040.219.534,00							8.344.908.516,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						7.040.219.534,00							8.344.908.516,00	
	7	01				KECAMATAN						7.040.219.534,00							8.344.908.516,00	
##	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.944.978.539,00						-	6.455.408.516,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.575.178.539,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	6.058.808.516,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	5.512.678.539,00	Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		5.987.808.516,00	Kecamatan Wara Timur
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	30.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		33.000.000,00	Kecamatan Wara Timur
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	2.500.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	-		3.000.000,00	Kecamatan Wara Timur

																Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	30.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		35.000.000,00	Kecamatan Wara Timur
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.200.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	6.000.000,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	7.200.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		6.000.000,00	Kecamatan Wara Timur
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	95.600.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	105.600.000,00	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1200 Paket	15.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		20.000.000,00	Kecamatan Wara Timur
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	50.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		55.000.000,00	Kecamatan Wara Timur
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	30.600.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		30.600.000,00	Kecamatan Wara Timur
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	217.000.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	230.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				48 Laporan	25.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		30.000.000,00	Kecamatan Wara Timur
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	27.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		30.000.000,00	Kecamatan Wara Timur
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	165.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		170.000.000,00	Kecamatan Wara Timur
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang	-	-	55.000.000,00	

																Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	25.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		30.000.000,00	Kecamatan Wara Timur
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	25.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		25.000.000,00	Kecamatan Wara Timur
##	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	799.531.550,00						-	865.000.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	769.531.550,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	832.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	769.531.550,00	Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		832.000.000,00	Kecamatan Wara Timur
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	30.000.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	33.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		16.500.000,00	Kecamatan Wara Timur
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	15.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		16.500.000,00	Kecamatan Wara Timur
##	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	4.236.525,00						-	704.500.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	236.525,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	700.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	236.525,00	Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		700.000.000,00	Kecamatan Wara Timur
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	4.000.000,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	4.500.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum				7 Lembaga	4.000.000,00	Kota Palopo, Wara Timur,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		4.500.000,00	Kecamatan Wara Timur

							Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				Kemasyarakatan		Semua Kel/Desa			1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
##	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	291.472.920,00						-	320.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	291.472.920,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	320.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				24 Laporan	291.472.920,00	Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		320.000.000,00	Kecamatan Wara Timur
						KECAMATAN WARA BARAT						4.561.551.172,00							4.808.031.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						4.561.551.172,00							4.808.031.000,00	
	7	01				KECAMATAN						4.561.551.172,00							4.808.031.000,00	
##	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	3.763.909.622,00						-	4.039.731.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			10 Dokumen	2.500.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	3.800.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	1.500.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		1.800.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	1.000.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		2.000.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			81 Laporan	3.563.317.662,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	3.840.231.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	3.511.282.662,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		3.788.531.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	50.535.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		50.000.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	1.500.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		1.700.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			9600000 Laporan	12.000.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	-	-	12.000.000,00	

																Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12.000.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		12.000.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			28 Orang	24.120.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	25.500.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	13.320.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		13.500.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokume n	10.800.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		12.000.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			310 Jenis	41.274.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	47.300.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		2.000.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		1.500.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.700.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		2.000.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan														
							0				1 0	1.200.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		2.400.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	11.000.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		11.400.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	24.874.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		28.000.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	-			15 Unit	23.300.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	19.500.000,00	

																1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	9.197.450,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		13.500.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	14.102.550,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		6.000.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			3 Jenis	63.354.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	56.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	28.436.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		25.000.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	17.820.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		19.000.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	17.098.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		12.000.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	-			15 Unit	34.043.960,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	35.400.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	27.343.960,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		27.000.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	3.500.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		3.400.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.200.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		5.000.000,00	Kecamatan Wara Barat
##	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata -Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu	-			100 persen	567.441.550,00						-	524.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah Jenis layanan yang di proses tepat waktu	-			12 Jenis	9.600.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	-	-	12.000.000,00	

						Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	9.600.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		12.000.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Urusan yang diselenggarakan	-			25 Jenis	548.241.550,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	500.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	548.241.550,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		500.000.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	9.600.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	12.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	9.600.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		12.000.000,00	Kecamatan Wara Barat
##	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	-			100 persen	22.800.000,00						-	36.300.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	-			5 Desa/Kelurahan	22.800.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	36.300.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	13.200.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		13.500.000,00	Kecamatan Wara Barat
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	9.600.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		22.800.000,00	Kecamatan Wara Barat
##	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial	-			100 persen	207.400.000,00						-	208.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kelurahan yang bebas konflik sosial	-			5 Desa/Kelurahan	207.400.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	208.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	207.400.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		208.000.000,00	Kecamatan Wara Barat
						KECAMATAN WARA SELATAN						4.429.626.312,00							4.303.273.068,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						4.429.626.312,00							4.303.273.068,00	
	7	01				KECAMATAN						4.429.626.312,00							4.303.273.068,00	
##	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-			-	3.813.743.312,00						-	3.707.158.068,00	

						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.538.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	3.380.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4.210.000,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		1.100.000,00	Kecamatan Wara Selatan
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	2.328.000,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		2.280.000,00	Kecamatan Wara Selatan
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.551.651.312,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	3.414.826.068,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	3.494.251.312,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		3.355.233.068,00	Kecamatan Wara Selatan
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	57.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		57.008.000,00	Kecamatan Wara Selatan
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				21 Laporan	0,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		2.585.000,00	Kecamatan Wara Selatan
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.200.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	7.200.000,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 Laporan	7.200.000,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		7.200.000,00	Kecamatan Wara Selatan
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	7.200.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	7.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	7.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palopo, Wara Selatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		7.000.000,00	Kecamatan Wara Selatan

													Semua Kel/Desa						
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	43.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	46.100.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				94 Paket	0,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		5.000.000,00	Kecamatan Wara Selatan
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		1.100.000,00	Kecamatan Wara Selatan
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	43.000.000,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		40.000.000,00	Kecamatan Wara Selatan
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	22.300.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	24.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	22.300.000,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		24.000.000,00	Kecamatan Wara Selatan
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	118.354.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	124.652.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	16.500.000,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		20.000.000,00	Kecamatan Wara Selatan
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	36.454.000,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		36.452.000,00	Kecamatan Wara Selatan
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	65.400.000,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		68.200.000,00	Kecamatan Wara Selatan
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	57.500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	80.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	57.500.000,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang	Perangkat Daerah		50.000.000,00	Kecamatan Wara Selatan

															pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	0,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		5.000.000,00	Kecamatan Wara Selatan
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		25.000.000,00	Kecamatan Wara Selatan
##	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	432.983.000,00						-	429.215.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	426.383.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	masyarakat	-	422.615.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100 Laporan	426.383.000,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	masyarakat		422.615.000,00	Kecamatan Wara Selatan
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	6.600.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	6.600.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				7 Dokumen	3.000.000,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		3.000.000,00	Kecamatan Wara Selatan
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				7 Laporan	3.600.000,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		3.600.000,00	Kecamatan Wara Selatan
##	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.700.000,00						-	3.700.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	3.700.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	masyarakat	-	3.700.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	3.700.000,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	masyarakat		3.700.000,00	Kecamatan Wara Selatan
##	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	179.200.000,00						-	163.200.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	179.200.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	163.200.000,00	

	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	179.200.000,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		163.200.000,00	Kecamatan Wara Selatan
						KECAMATAN BARA						5.789.585.438,00							5.814.955.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						5.789.585.438,00							5.814.955.000,00	
	7	01				KECAMATAN						5.789.585.438,00							5.814.955.000,00	
##	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	4.330.783.528,00						-	4.257.455.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Laporan	350.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN dan pemenuhan sarana kantor	-	355.000,00	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	350.000,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN dan pemenuhan sarana kantor		355.000,00	Kecamatan Bara
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			8 Laporan	3.812.535.438,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	3.730.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	3.785.835.438,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		3.700.000.000,00	Kecamatan Bara
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	26.100.000,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		29.300.000,00	Kecamatan Bara
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	300.000,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		350.000,00	Kecamatan Bara
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	300.000,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		350.000,00	Kecamatan Bara
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			12 Laporan	7.800.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN	-	8.000.000,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	7.800.000,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		8.000.000,00	Kecamatan Bara
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			120 Orang	12.798.780,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	ASN	-	10.500.000,00	

															Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	12.798.780,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	ASN		10.500.000,00	Kecamatan Bara
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			2 Jenis	27.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Non ASN	-	27.700.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Non ASN		2.200.000,00	Kecamatan Bara
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	25.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Non ASN		25.500.000,00	Kecamatan Bara
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			20 Unit	22.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang Milik Daerah	-	23.200.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang Milik Daerah		21.000.000,00	Kecamatan Bara
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	2.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Barang Milik Daerah		2.200.000,00	Kecamatan Bara
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			3 Jenis	406.297.710,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Non ASN	-	413.700.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15.500.000,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Non ASN		16.000.000,00	Kecamatan Bara
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	33.500.000,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Non ASN		35.000.000,00	Kecamatan Bara
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	2.500.000,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Non ASN		2.700.000,00	Kecamatan Bara
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	354.797.710,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Non ASN		360.000.000,00	Kecamatan Bara

																1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	-			20 Unit	42.001.600,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kendaraan DInas Jabatan dan Operasional	-	44.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.500.000,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kendaraan DInas Jabatan dan Operasional		27.000.000,00	Kecamatan Bara
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	5.500.000,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kendaraan DInas Jabatan dan Operasional		6.000.000,00	Kecamatan Bara
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.001.600,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kendaraan DInas Jabatan dan Operasional		11.000.000,00	Kecamatan Bara
##	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata -Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu	-			100 persen	330.401.910,00						-	331.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	330.401.910,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	331.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokume n	330.401.910,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		331.000.000,00	Kecamatan Bara
##	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	-			100 persen	16.000.000,00						-	26.500.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	-			5 Desa/Kel urahan	16.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kelurahan	-	26.500.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasya rakatan	6.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kelurahan		6.500.000,00	Kecamatan Bara
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	10.000.000,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Kelurahan		20.000.000,00	Kecamatan Bara
##	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial	-			100 persen	1.112.400.000,00						-	1.200.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kelurahan yang bebas konflik sosial	-			5 Desa/Kel urahan	1.112.400.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	Masyarakat	-	1.200.000.000,00	

																Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	1.112.400.000,00	Kota Palopo, Bara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		1.200.000.000,00	Kecamatan Bara
						KECAMATAN MUNGKAJANG						4.251.380.158,00								4.474.308.407,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						4.251.380.158,00								4.474.308.407,00	
	7	01				KECAMATAN						4.251.380.158,00								4.474.308.407,00	
##	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	3.652.868.102,00						-	3.846.577.407,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	-			10 Dokumen	4.640.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	2.464.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3.640.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		1.364.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	1.000.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		1.100.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.385.228.102,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	3.520.493.407,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	3.344.528.102,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		3.475.723.407,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	39.000.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		42.900.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.700.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		1.870.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.700.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	8.470.000,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	7.700.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		8.470.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	19.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola	Perangkat Daerah	-	19.800.000,00	

																Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				56 Paket	8.000.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		8.800.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		2.200.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	8.000.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		8.800.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	40.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	68.750.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				95 Paket	6.000.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		6.600.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		3.850.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	34.000.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		58.300.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	28.900.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	28.600.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	15.351.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		14.300.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	13.549.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		14.300.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	129.700.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	141.900.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	18.500.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		20.350.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	23.700.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		25.300.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	87.500.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		96.250.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	-			55 Laporan	37.700.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah	-	56.100.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	18.500.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		30.800.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	1.000.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		3.080.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	1.700.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		4.070.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	16.500.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Perangkat Daerah		18.150.000,00	Kecamatan Mungkajang
##	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata -Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu	-			100 persen	439.065.056,00						-	441.408.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Urusan yang diselenggarakan	-			4 Kelurahan	437.785.056,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	440.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	437.785.056,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		440.000.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis layanan yang di proses tepat waktu	-			2 Layanan	1.280.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	1.408.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha													

							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokume n	640.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		704.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	640.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		704.000,00	Kecamatan Mungkajang
##	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	5.205.000,00						-	6.105.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	5.205.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	6.105.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasya rakatan	4.205.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		3.905.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				17 Unit	0,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		1.100.000,00	Kecamatan Mungkajang
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	1.000.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		1.100.000,00	Kecamatan Mungkajang
##	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	154.242.000,00						-	180.218.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	154.242.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	180.218.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	154.242.000,00	Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		180.218.000,00	Kecamatan Mungkajang
						KECAMATAN SENDANA						4.326.157.106,00							4.620.267.781,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						4.326.157.106,00							4.620.267.781,00	
	7	01				KECAMATAN						4.326.157.106,00							4.620.267.781,00	
##	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.705.092.106,00						-	3.928.767.781,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.500.000,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	6.050.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokume n	5.000.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	-		5.500.000,00	Kecamatan Sendana

																Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	500.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		550.000,00	Kecamatan Sendana
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.505.985.856,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	3.682.967.781,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	3.453.025.856,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		3.643.631.781,00	Kecamatan Sendana
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				17 Dokumen	52.200.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		38.500.000,00	Kecamatan Sendana
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	360.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		396.000,00	Kecamatan Sendana
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	400.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		440.000,00	Kecamatan Sendana
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.485.000,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	7.700.000,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	7.485.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		7.700.000,00	Kecamatan Sendana
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	16.600.000,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	18.700.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 Paket	6.600.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		7.700.000,00	Kecamatan Sendana
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	10.000.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		11.000.000,00	Kecamatan Sendana
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	37.320.000,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	-	-	41.800.000,00	

															Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokume n	1.320.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		2.200.000,00	Kecamatan Sendana
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	36.000.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		39.600.000,00	Kecamatan Sendana
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	13.256.250,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	15.400.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	6.000.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		6.600.000,00	Kecamatan Sendana
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	7.256.250,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		8.800.000,00	Kecamatan Sendana
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	87.045.000,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	126.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1100 Laporan	18.575.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		20.000.000,00	Kecamatan Sendana
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	14.314.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		16.000.000,00	Kecamatan Sendana
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	54.156.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		90.000.000,00	Kecamatan Sendana
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	31.900.000,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	30.150.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25.900.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		16.500.000,00	Kecamatan Sendana
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				3 Unit	400.000,00	Kota Palopo, Sendana,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		1.200.000,00	Kecamatan Sendana

							Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Semua Kel/Desa			1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	600.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		950.000,00	Kecamatan Sendana
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		11.500.000,00	Kecamatan Sendana
##	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	464.915.000,00						-	505.800.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	2.460.000,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	3.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	2.460.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		3.000.000,00	Kecamatan Sendana
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	460.000.000,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	500.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	460.000.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		500.000.000,00	Kecamatan Sendana
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	2.455.000,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	2.800.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	2.455.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		2.800.000,00	Kecamatan Sendana
##	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	4.950.000,00						-	5.700.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	4.950.000,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	5.700.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	3.050.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		3.500.000,00	Kecamatan Sendana
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	900.000,00	Kota Palopo, Sendana,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		1.100.000,00	Kecamatan Sendana

													Semua Kel/Desa			1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	1.000.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		1.100.000,00	Kecamatan Sendana
##	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	151.200.000,00						-	180.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	151.200.000,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	180.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	151.200.000,00	Kota Palopo, Sendana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		180.000.000,00	Kecamatan Sendana
						KECAMATAN TELLUWANUA						6.220.693.462,00							6.637.739.037,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						6.220.693.462,00							6.637.739.037,00	
	7	01				KECAMATAN						6.220.693.462,00							6.637.739.037,00	
##	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	4.012.593.462,00						-	4.208.829.037,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Urusan yang diselenggarakan	-			7 Dokumen	9.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	9.900.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	8.000.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		8.800.000,00	Kecamatan Telluwanua
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	1.000.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		1.100.000,00	Kecamatan Telluwanua
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	-			100 Laporan	3.781.393.462,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	3.960.229.037,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				250 Orang/bulan	3.738.543.462,00	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		3.913.094.037,00	Kecamatan Telluwanua
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	37.850.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		41.635.000,00	Kecamatan Telluwanua
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				12 Laporan	5.000.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan	Masyarakat		5.500.000,00	Kecamatan Telluwanua

							Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola	-			100 Orang	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	16.500.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	5.000.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		5.500.000,00	Kecamatan Telluwanua
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	10.000.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		11.000.000,00	Kecamatan Telluwanua
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	-			4 Jenis	36.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	40.150.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	2.000.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		2.200.000,00	Kecamatan Telluwanua
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	4.500.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		4.950.000,00	Kecamatan Telluwanua
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	30.000.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		33.000.000,00	Kecamatan Telluwanua
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-			12 Unit	12.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	13.200.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	12.000.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		13.200.000,00	Kecamatan Telluwanua
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	-			3 Jenis	118.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	124.960.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.000.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		11.000.000,00	Kecamatan Telluwanua
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	26.000.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola	Masyarakat		22.880.000,00	Kecamatan Telluwanua

															narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	82.800.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		91.080.000,00	Kecamatan Telluwanua
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	-			20 Unit	39.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	43.890.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	29.900.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		32.890.000,00	Kecamatan Telluwanua
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	3.000.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		3.300.000,00	Kecamatan Telluwanua
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	7.000.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		7.700.000,00	Kecamatan Telluwanua
##	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata -Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu Rata -Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu	-			0 persen 100 persen	700.000.000,00						-	770.000.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Urusan yang diselenggarakan	-			100 Jenis	700.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	770.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	700.000.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		770.000.000,00	Kecamatan Telluwanua
##	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif	-			0 persen 100 persen	712.500.000,00						-	783.750.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	-			7 Desa/Kelurahan	712.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat	-	783.750.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		13.750.000,00	Kecamatan Telluwanua
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	700.000.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Masyarakat		770.000.000,00	Kecamatan Telluwanua

##	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial	-			100 persen	795.600.000,00						-	875.160.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kelurahan yang bebas konflik sosial	-			7 Desa/Kelurahan	795.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT,RW, LPMK	-	875.160.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	795.600.000,00	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT,RW, LPMK		875.160.000,00	Kecamatan Telluwanua
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO						5.990.803.050,00							6.397.945.004,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						5.990.803.050,00							6.397.945.004,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						5.990.803.050,00							6.397.945.004,00	
##	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.200.286.910,00						-	3.328.377.250,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	11.249.600,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	12.374.560,00	
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3.770.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		4.147.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	7.479.600,00	Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		8.227.560,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.701.872.800,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	2.876.977.180,00	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	2.654.673.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		2.825.057.400,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	46.200.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		50.820.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	999.800,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		1.099.780,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.200.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	7.920.000,00	
	8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD														

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	7.200.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		7.920.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	15.825.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	17.407.500,00	
	8	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	15.825.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		17.407.500,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	123.776.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	136.153.600,00	
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalas Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	1.264.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		1.390.400,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	2.400.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		2.640.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	120.112.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		132.123.200,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	69.212.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	76.133.200,00	
	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	26.150.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		28.765.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	43.062.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		47.368.200,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	244.371.510,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	171.953.210,00	
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8 Laporan	11.605.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		12.765.500,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo

	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	153.916.510,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		72.452.710,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	78.850.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		86.735.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	26.780.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	29.458.000,00	
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	19.000.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		20.900.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	750.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		825.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	3.800.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		4.180.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.230.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		3.553.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
##	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-			-	698.089.000,00						-	767.897.900,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	698.089.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	767.897.900,00	
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50 Orang	54.150.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		59.565.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				45 Orang	20.440.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		22.484.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan													
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				10 Laporan	20.965.000,00	Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,	-		21.543.500,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo

																Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik				
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka														
							Jumlah Paskibraka				76 Orang	602.534.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palopo, Wara, Tompotika	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		664.305.400,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
##	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-			-	944.903.140,00						-	1.039.393.454,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	944.903.140,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	1.039.393.454,00	
	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah														
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	13.182.500,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		14.500.750,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				15 Orang	931.720.640,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		1.024.892.704,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
##	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-			-	114.665.000,00						-	126.131.500,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	114.665.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	126.131.500,00	
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Orang	27.538.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		24.802.800,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				4 Laporan	87.127.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		101.328.700,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
##	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-			-	34.335.000,00						-	37.768.500,00	

	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	34.335.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	37.768.500,00	
	8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah														
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				4 Dokumen	150.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		165.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah														
							Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				3 Dokumen	33.060.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		36.366.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				3 Orang	1.125.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		1.237.500,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
##	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	998.524.000,00						-	1.098.376.400,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	998.524.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-	-	1.098.376.400,00	
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50 Orang	19.354.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		18.099.400,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				35 Orang	54.076.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		59.483.600,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3 Laporan	17.300.000,00	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		17.710.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	907.794.000,00	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Digitalisasi Layanan Publik	-		1.003.083.400,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palopo
											JUMLAH	**990.000.000.000,00**							**883.378.669.233,95**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program *(outcome*/hasil) dari kegiatan *(output*/keluaran*)*. Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran karena hasil *(outcomes)* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Berbagai indiktor knerja pemerintah daerah, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan atau pencapaianan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah Kota Palopo 2025-2024 selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan derah sebagai indikator utama *(key performance indicator)*. Indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Makro Pembangunan Kota Palopo Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Makro Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2026	Target Tahun 2026 (Hasil Rakortek)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,4	5	6,62	5,29
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,64	7,50	7,75	7,46
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,35	7,30	7,06	7,06-6,89
4	Gini Rasio	Nilai	0,333	0,320	0,319	0,320
5	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	n/a	18,76	18,76	21,14
6	PDRB perkapita (ADHB)	Juta/Kapita/tahun	56,65	58	65	62,38
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,25	81,73	79,40	82,22
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	69,24	74,72	74,93	74,93
9	Proporsi Kontribusi PDRB ADHB Kota Palopo terhadap Provinsi Sulawesi Selatan	Persen	1,59	1,6	1,65	1,65

Sumber : BPS Kota Palopo Tahun 2025 dan Berita Acara Rakortekbang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

RKPD Kota Palopo Tahun 2026 merupakan pencapaian tahun terakhir untuk periode Rencana Pemerintah Daerah Kota Palopo tahun 2024-2026. Namun, dari semula terdapat 7 (tujuh) indikator Makro, mengalami perubahan menjadi 9 (Sembilan) indikator. Hal ini didasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Indikator Makro Kota Palopo tahun 2026 diselaraskan dengan indikator Makro Provinsi Sulawesi Selatan.

Indikator yang ditambahkan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Proporsi Kontribusi PDRB ADHB Kota Palopo terhadap Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian IKLH Kota Palopo Tahun 2024 pada angka 69,24 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yaitu pada angka 69,52 atau menurun 0,28. Faktor pendukung pencapaian IKLH yaitu Indeks Kualitas Udara mengalami perbaikan yang mencapai 94,21. Namun Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lingkungan mengalami penurunan, masing-masing pada angka 50 untuk IKA dan 56,08 untuk IKL.

Penurunan IKLH menunjukkan adanya penurunan kualitas lingkungan yang perlu diwaspadai, terutama pada aspek udara, air, dan tutupan lahan. Penurunan ini dapat berdampak pada berkurangnya daya dukung lingkungan, meningkatnya risiko gangguan kesehatan masyarakat, serta potensi kerusakan ekosistem yang berkelanjutan yang harus segera ditangani dengan baik.

Penetapan Target Kinerja tahun 2026 berdasarkan target RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026 serta penyesuaian target pada hasil Rakortekbang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target Indikator Kinerja Utama Kota Palopo dibuat untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penetapan IKU bertujuan memberikan gambaran keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut ini;

Tabel 6.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Palopo Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Poin	85,31	87,98	88
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	61,62	80	81-90
3	Indeks SAKIP	Poin	64,30	80	81-90
4	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta/Kapita/Thn	56,65	58	62,38
5	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,35	7,30	7,06
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,64	7,50	7,46
7	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,40	5	6,62
8	Gini Rasio	Angka	0,333	0,334	0,319
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	81,25	81,73	82,22
10	Indeks Pembangunan Gender	Poin	97,71	97,71	97,39
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,24	74,72	74,93
12	Indeks Resiko Bencana (IRB)	poin dan predikat	187,91	190	185
13	Luas Wilayah yang Tergenang/ Terdampak Banjir	Ha	13	10	5
14	Persentase Luas Kawasan Kumuh dari Total Luas Wilayah Kota	Persen	1,06	0,9	0,5

Sumber : BPS Kota Palopo Tahun 2025, Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2024-2026, Berita Acara Rakortekbang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

6.3 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah memuat target penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimasukkan ke dalam IUP (Indikator Kinerja Utama Pembangunan) Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah Kota Palopo sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Daerah
Kota Palopo Tahun Tahun 2026

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan				
1	Ketahanan energi, air dan pangan				
	a. Ketahanan Energi				
	Konsumsi Listrik per kapita	Kwh	1.099,68	1.285	1.426,35
	b. Ketahanan Pangan				
	i. Indeks Ketahanan Pangan	Persen	83,05	80	81,61
	ii. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Persen	2,98	4,5	4,41
	iii. Skor Pola Pangan Harapan	Angka	88,6	92,08	92,31
	c. Ketahanan Air				
	i. Kapasitas Air Baku	m^3/detik	0,55	0,57	0,59

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
	ii. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perkotaan	Persen	99,23	97	97,24
	Lingkungan Hidup Berkualitas				
2	Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati				
	a. Proporsi realisasi penyaluran pupuk organic terhadap pupuk kimia	Persen	28,94	28	28,84
	Pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati				
	a. indeks pertanaman padi	Angka	1	2	2,06
	b. proporsi sawah beririgasi	Persen	88	88,22	88,66
	c. jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	11.254	19.000	19.760
	d. Angka Konsumsi Ikan	Kg/Tahun	52,39	70	70,70
3	Kualitas Lingkungan Hidup				
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	69,24	74,72	74,91
	b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	4,08	4,32	5,62
	c. Pengelolaan sampah	Persen	81,43	83,82	83,89
	i) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	78,28	9	12,96
	ii) Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	81,55	81,43	82,24
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
4	Indeks Resiko Bencana	Poin	153,08	190	186,20
5	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)				
	a. Kumulatif	Persen	0,06	0,23	0,51
	b. Tahunan	Persen	33,33	18,76	20,64
	Demografi				
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	3,88	4,40	4,92
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
	Kesejahteraan Ekonomi				
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,64	7,50	7,46
	Kesehatan Untuk Semua				
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,19	74,20	74,38
9	Kesehatan Ibu dan Anak				
	a. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Persen	94	94	94,24
	b. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	80,78	80,50	80,50
	c. Prevalensi Stunting	Persen	22,80	21,32	19,93
	Prevalensi stunting (eppgbm)	Persen	1	1	0,5
10	Penanganan Tuberkulosis				
	a. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis	Persen	66,45	78	78,80
	b.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	66,45	42	44,06
11	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	98,09	96	96,15
	Pendidikan Berkualitas yang Merata				
12	a.Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada asesmen tingkat nasional	Persen		85	87,55
	i) Literasi membaca		58	58	58,64
	ii) Numerasi		40,15	39	40,95
	b. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Tahun	11,16	11,43	11,23
	c. Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,13	15,35	15,37

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi	Persen	13,75	13	14,55
14	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut Pendidikan tinggi yang ditamatkan	Persen	17,32	68	68,41
	Perlindungan Sosial Adaptif				
15	a. Tingkat Kemiskinan	Persen	7,35	5,46-7,38	7,24
	b. Indeks Gini		0,360	0,360	0,359
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	43,25	42	44,79
17	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	8	8	8,52
	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	76,02	76	76,76
19	Persentase Benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Persen	35,81	50	51
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif				
20	a. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	64,31	73	73,18
	b. Indeks Perlindungan Anak	Angka	65	65	65,66
	c. Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,204	0,273	0,268
	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
	Daya Saing Sumber Daya Manusia				
21	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	81,25	81,73	82,22
	Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi				
22	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	2,5	2,63	2,75
23	Pengembangan Pariwisata				
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	1,20	1,20	1,26
	b. Jumlah wisatawan Domestik dan Mancanegara	Orang	188.082	170.000	173.502
24	Jumlah Industri ekonomi Kreatif di Kab./Kota	Unit	93	105	109
25	Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD				
	a. Jumlah Industri kecil dan Menengah pada level di Kab./Kota	Unit	14.804	14.900	15.524
	b. Persentase Koperasi Sehat di Kab./Kota	Persen	25	25	26,06
	c. Produktivitas Pertanian (Rata-rata skor dari tiga komuditas yaitu tanaman pangan, perkebunan dan perikanan budidaya)	Ton	37.192,9	139.498,78	142.977,02
	d. Produktifitas Padi Gabah Kering Giling	Ton/Ha	63	55	57,19
	e. Return on Assets (ROA) BUMD	Persen	3	3,9	4,02
	f. Jumlah produksi perikanan	Ton	169.121,21	194.000	199.529
26	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	66,19	65	66,39
	b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	52,02	53	53,40
27	Tingkat Penguasaan IPTEK				
	a. Indeks Inovasi Daerah	Angka	55,92	56,80	57,32
	b. Indeks Kapabilitas Inovasi	Angka	3,31	2,68	2,75
	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru				
28	Indeks Ekonomi Hijau	Persen	37,82	39,30	40,74
	Digitalisasi yang Unggul				
29	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan online dan terintegrasi	Persen	80	85	85,85
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
30	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar waktu barang kebutuhan pokok (Satu Data Indonesia)	Persen	5,62	8	5,90
31	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	37,67	38	38,57
32	Ekspor Barang dan Jasa				
	a. Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Persen	-4,50	-11,28	-4,61
	b. Net ekspor Barang dan Jasa (Milyar)	Milyar Rp	-299,49	-367,40	-288,46
	Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				
33	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan				
	a. Proporsi Kontribusi PDRB (ADHB) Kota Palopo terhadap Provinsi Sulsel	Persen	1,59	1,6	1,65
	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	81,91	77,50	83,88
	c. Indeks Layanan Infrastruktur		3,18	2,25	2,28
	Stabilitas Ekonomi Makro				
34	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,73	3,05	3,05
35	Tingkat Inflasi Gabungan	Persen	2,21	2,5	2,45
36	Persentase peningkatan investasi daerah	Persen	2,73	5	5,51
37	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		71,28	72	72,79
	ASPEK PELAYANAN UMUM				
	Transformasi Tata kelola				
	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif				
38	Indeks Reformasi Hukum	Angka	67,78	68	69,70
39	a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,12	3,89	3,54
	b. Indeks Pelayanan Publik	Poin	83,10	4	4,08
40	a. Indeks survey Penilaian Integritas	Poin	63,58	65	66,96
	b. Indeks Maturitas SPIP	Poin	3,06	3	3,18
	c. Indeks MCP KPK	Poin	58,73	59	61,38
	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial				
41	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	100	100	100
42	Persentase tindak criminal yang ditangani	Persen	72	72	73,45
43	a. Persentase Perempuan yang terpilih terhadap total anggota DPRD	Persen	20	28	28
	b. Jumlah PERDA yang merupakan inisiatif DPRD	Angka	5	5	5
	c. Persentase Perempuan pengurus partai politik	Persen	38,71	30	30,60
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan				
44	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,81	2,90	2,90
45	Jumlah Kerjasama provinsi / kabupaten / kota kembar /bersaudara (*sister province / sister city)*	Angka	7	7	8

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau *Key Performance Indicators* (*KPI*) memberikan arahan kepada Pemerintah Kota Palopo dalam menentukan dan mengukur kemajuan *(progress)* pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026. IKK adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah. Tujuan penetapan IKK adalah memberikan gambaran keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (*outcome*). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Oleh karena itu, penetapan IKK Kota Palopo Tahun 2025 berpedoman pada RPD Kota Palopo dan disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan Pemerintah Kota Palopo.

Tabel. 6.4
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kota Palopo Tahun Tahun 2026

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1	Pertumbuhan Ekonomi	(%/Tahun)	4,40	5	5,29
2	Laju inflasi	(%/Tahun)	1,87	2	2
3	PDRB per kapita (ADHB)	(Juta/Kapita /Tahun)	56,65	58	62,38
	Nilai PDRB ADHB	(Milliar Rupiah)	11.083,92	12.382	13.253
	Nilai PDRB ADHK	(Milliar Rupiah)	6.650,07	7.087	7.557
4	Paritas Daya Beli	(Ribu/Tahun)	14.369	14.829	14.018
5	Gini Rasio	(Angka)	0,333	0,334	0,319
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	(Persen)	92,65	92,62	92,94
7	Persentase Penduduk Miskin	(Persen)	7,35	7,38	7,06
	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem	(Persen)	0,57	1,5	0,9
8	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Palopo	(Rp/Kapita/Bulan)	466.521	325.730	305.888
9	Jumlah Penduduk Miskin	(Jiwa)	14.430	14.837	14.441
	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem	(Jiwa)	1.104	2.225	1.300
	Jumlah Penduduk	(jiwa)	195.680	201.038	204.546
10	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	(Persen)	0,57	7,38	7,06
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	(Angka)	0,94	1,29	1,2
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	(Angka)	0,19	0,31	0,32
	Indeks Kesehatan	(Angka)	83,37*	79,13	79,31
	Indeks Pendidikan	(Angka)	79,23	79,75	79.95
	Indeks Pengeluaran	(Angka)	81,21	79,84	79,98
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	(Angka)	81,25	79,82	79,40
12	Angka melek huruf /aksara usia 15+	(%)	97,76	100	100
13	Rata-rata lama sekolah	(Tahun)	11,16	10,94	10.98
	Harapan Lama Sekolah	(Tahun)	15,13	15,35	15,41
14	Angka harapan hidup	(Tahun)	71,39	71,15	71,27
	Persentase balita gizi buruk	(%/Tahun)	1,0	0	0
	Prevalensi balita gizi kurang	(%/Tahun)	8,1	8	7,5
	Prevalensi Stunting	(%/Tahun)	22,80	21,32	19,93
15	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	(%)	100	100	100
16	Angka partisipasi Angkatan kerja	(%)	72	64,80	65,05
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki/Laki	(%)	68,78	76,70	77,22
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	(%)	28,41	46,91	47,90
17	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	(%)	66,19	63,9	64,2
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki/Laki	(%)	80,45	77,37	78,43
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	(%)	52,02	48,54	48,62
18	Tingkat pengangguran terbuka (%)	(%)	7,64	7,50	7,75
	Jumlah penganggur	(Orang)	7.425	7.107	6.962
19	Rasio penduduk yang bekerja	(%)	89,76	92,05	92,25
20	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	(%)	n/a	75,69	76,82
21	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	(%)	92,36	59,54	59,91
22	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	(%)	35,43	16,615	16,78

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
	Laki – Laki	(%)	32,97	22,56	22,78
	Perempuan	(%)	39,28	10,67	10,78
23	Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	(%)	0,98	39,98	14
24	Indeks Kepuasan Masyarakat	(angka)	85,31	86,78	86,9
25	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	(%)	22,67	18,90	19,05
26	Opini BPK	(Opini)	WTP	WTP	WTP
27	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	(skor)	87,8	91,97	91,98
28	Penguatan cadangan pangan	(%)	3	98,00	98,00
29	Penanganan daerah rawan pangan	(%)	100	100,00	100,00
30.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	(%)	n.a	9,00	9,00
31	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	(%)	n.a	3,00	3,00
32	Produksi sektor pertanian				
	Padi	(Ton/Tahun)	21.039,9	22.000	22.5
	Jagung	(Ton/Tahun)	3.623	6,00	7.000
	Ubi Kayu	(Ton/Tahun)	0	60	70
	Ubi Jalar	(Ton/Tahun)	0	5	6
	Sagu	(Ton/Tahun)	13,1	15	15
	Daging (Ruminansia dan Unggas)	(Ton)	3.187,5	2.896,50	2.918,10
	Daging (Ruminansia)	(Ton)	605,18	*285,50*	295,80
	Daging Sapi	(Ton)	587,68	280,00	290,00
	Daging Kerbau	(Ton)	12,1	3,50	3,80
	Daging Kambing	(Ton)	5,4	2,00	2,00
	Daging Unggas	(Ton)	2.582,32	2.611,00	2.622,30
	Daging Ayam Kampung	(Ton)	107,91	125,00	126,00
	Daging Ayam Pedaging	(Ton)	2.451,93	2.470,00	2.480,00
	Daging Itik/Bebek/Entog	(Ton)	22,48	16,00	16,30
	Telur (Ayam Kampung/Ras/Itik/Entog)	(Ton)	1.093	2.634,00	2.660,00
	Telur Ayam Buras/Kampung	(Ton)	693	1.078,00	1.079,00
	Telur Ayam Ras Petelur	(Ton)	263	80,00	90,00
	Itik/Angsa/Entog	(Ton)	190	166,00	167,00
33	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	(%)	n.a	2,5	3,00
34	Produksi sektor perkebunan	(Ton/Tahun)	1.098,76	1.095,05	1.103,00
	Kelapa Dalam	(Ton/Tahun)	2,91	16,00	16,00
	Kopi	(Ton/Tahun)	13,18	20,05	21,00
	Kopi Robusta	(Ton/Tahun)	13,03	0	0
	Kopi Arabika	(Ton/Tahun)	0,15	0	0
	Cengkeh'	(Ton/Tahun)	95,5	125,00	127,00
	Kakao	(Ton/Tahun)	918,5	950,00	955,00
35	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	(%)	n/a	2,00	2,00
36	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	(%)	n/a	0,04	0,31
37	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	(%)	n/a	0,20	0,21
38	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	(%)	1,18	1,28	1,29
39	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB	(%)	n/a	8,30	8,40
40	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	(%)	24,13	24,30	24,70
41	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	(%)	n/a	2,90	3,00
42	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	(%)	2,9	0,70	0,90
43	Pertumbuhan Industri	(%)	5	2,70	2,90
44	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	(%)	n/a	0,70	0,90

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
45	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	(Ribu/Kapita/Tahun)	79,71	31,83	31,98
46	Nilai tukar petani (sektor tanaman pangan)	(angka)	n.a	98	100
47	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	(%)	51,94	53,45	53.67
48	Produktivitas total daerah	(Ribu/ Tenaga Kerja/Tahun)	114	104	105
49	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	(%)	0	100	100
50	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	(%)	n/a	74	75
51	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	(%)	175,11	3	3
52	Angka kriminalitas yang tertangani (per 10.000)	(angka)	0,05	27	28
53	Rasio ketergantungan	(%)	44,13	45,67	45,10
1	**Pendidikan**				
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	(%)	53,09	100	100
2	Angka Partisipasi Kasar				
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	(%)	102,78	100	100
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	(%)	87,37	100	100
3	Angka pendidikan yang ditamatkan				
	Tidak/Belum Bersekolah	(%)	12,88	3,1	2,1
	Tamat SD/sederajat	(%)	15,44	6	4
	Tamat SMP/sederajat	(%)	13,59	16	12
	Tamat SMA	(%)	32,34	29	30
	Tamat SMK	(%)	5,18	5	6
	Tamat Perguruan Tinggi	(%)	13,71	12	12
	Diploma I/II	(%)	1,00	0,2	0
	Diploma III	(%)	1,90	2.1	1.2
	Diploma IV/S1-S3	(%)	23,31	14,87	15,44
4	Angka Partisipasi Murni	(%)			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	(%)	96,68	100	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	(%)	77,03	100	100
5	Angka partisipasi sekolah	(%)			
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	(%)	99,78	1.000	1.000
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	(%)	97,49	1.000	1.000
6	Angka Putus Sekolah:				
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	(%)	0,05	0	0
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	(%)	0,09	0	0
7	Angka Kelulusan:				
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	(%)	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	(%)	100	100	100
8	Angka Melanjutkan (AM):				
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	(%)	100,20	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	(%)	85,34	100	100
9	Fasilitas Pendidikan:				

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	(%)	84,15	100	100
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	(%)	84,62	100	100
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10,000)	(%)	35,79	37,5	37,5
	SD/MI (per 10,000)	(%)	40,92	42	46
	SMP/ MTS (per 10,000)	(%)	25,66	39	43
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)	(%)	956	680	699
	SD/MI (per 10,000)	(%)	762	699	730
	SMP/ MTS (per 10,000)	(%)	514	825	856
12	Rasio guru/murid per kelas rata/rata pendidikan dasar (per 10.000)	(%)	0,79	0,60	0,60
13	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	(%)	85,34	100	100
14	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	(%)	97,76	100	100
15	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	(%)	98,48	100	100
16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D1-IV	(%)	52,44	100	100
17	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	(%)	53,09	100	100
18	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	(%)	90,20	100	100
19	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	(%)	80,28	100	100
20	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	(%)	73,94	100	100
2	**Kesehatan**				
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	(angka)	3,63	0,4	0,3
2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 100)	(angka)	96,37	99	99
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	(angka)	3,63	5	4
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	(angka)	3,63	3	2
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	(angka)	80,78	20	10
6	Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 balita)	(%)	8,84	10	11
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	(%)	0,66	4	4
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000)	(%)	4,37	4	4
9	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	(%)	1,95	6	6
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000)	(%)	19,46	6	6
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	(%)	61,85	86.42	86.98
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	(%)	77,92	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	(%)	95,83	100	100
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	(%)	100	100	100
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	(%)	81,32	82	83
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	(%)	86,48	100	100
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	(%)	5,28	10.5	12
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	(%)	66,45	100	100
19	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Rasio per 100.000 penduduk)	(%)	249,32	190	195
20	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	(%)	10,94	0	0
21	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	(%)	66,45	93	94
22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	(%)	27,06	41	42
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	(%)	100	100	100
24	Penderita diare yang ditangani (per 100.000)	(%)	60,07	9	10
25	Angka kejadian Malaria (per 1000)	(angka)	4,48	58	55
	Tingkat Kematian Akibat Malaria (per 1000)	(%)	0	0	0
26	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	(%)	89	100	100
27	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (100 ribu)	(%)	0,06	34	32
28	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	(%)	n/a	2.4	3
29	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	(%)	n/a	100	100
30	Cakupan kunjungan bayi	(%)	99,23	100	100
31	Cakupan puskesmas	(%)	133,33	133,33	133,33
32	Cakupan pembantu puskesmas	(%)	62,50	70	75
33	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	(%)	76,90	100	100
34	Cakupan pelayanan nifas	(%)	78	100	100
35	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	(%)	104,59	77	78
36	Cakupan pelayanan anak balita	(%)	97,57	75	76
37	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	(%)	42	100	100
38	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	(%)	98,19	100	100
39	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	(%)	n/a	100	100
40	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	(%)	100	100	100
41	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	(%)	0	100	100
42	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	(%)	1	0,54	0,55

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
43	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	(%)	100	0,79	0,79
44	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	(%)	90	100	100
45	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	(%)	94	100	100
46	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	(%)	94	100	100
47	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	(%)	102	100	100
48	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	(%)	94	100	100
49	Persentase orang usia 15-49 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	(%)	77	100	100
50	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	(%)	98	100	100
51	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	(%)	49	100	100
52	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	(%)	96	100	100
53	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	(%)	94	100	100
54	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	(%)	97	100	100
55	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	(%)	94	100	100
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
	Pekerjaan Umum				
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	(%)	61,69	69	70
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	(%)	28,22	28	29
3	Persentase Jalan Kewenangan Kota yang Berkondisi Baik (> 40 KM/Jam)	(%)	58,04	68	70
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	(%)	53,23	1,36	1.38
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	(%)	79,91	98	98
6	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	(%)	33,86	32	30
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	(%)	92,47	49	50
8	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	(%)	19,03	30	35
9	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	(%)	88,68	80	85
10	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik	(%)	63,18	86	87
11	Rasio Jaringan Irigasi (per 100 Ha)	(%)	82,61	88	89
12	Persentase penduduk berakses air minum (%)	(%)	81,46	100	100
13	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	(%)	76,68	100	100
14	Persentase areal kawasan kumuh	(%)	1	1.45	1.25

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
15	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	(%)	6,31	5	5
16	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	(%)	n/a	1,9	1,9
17	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000)	(%)	20,50	2	2
18	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	(%)	19,03	80	85
19	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	(%)	88,68	0	0
20	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	(%)	63,18	25	26
21	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	(%)	81,46	100	100
22	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	(%)	79,91	100	100
	Penataan Ruang:				
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	(%)	31,67	77	78
2	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	(Ha)	824,24	730	813
3	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	(%)	21,02	16,6	16,6
4	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	(%)	0,107	81	0,168
5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan		n/a	0.33	0.33
6	Ketaatan terhadap RTRW	(%)		67	68
7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	(%)	100	100	100
8	Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota	(%)	58,04	68	70
9	Rasio tenaga/operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	(%)	85,36	65	70
10	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	(%)	0	100	100
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**				
1	Rasio rumah layak huni	(%)	0,204	0,15	0,15
2	Rasio permukiman layak huni	(%)	95,64	96,34	96,65
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	(%)	93,26	97,89	97,99
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	(%)	98,65	98,8	98,95
5	Persentase pemukiman yang tertata	(%)	96,64	95	96
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	(%)	0,95	1	0,9

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	(%)	6,08	9	8,25
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	(%)	0,06	4,5	4
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	(%)	29,39	43	46
10	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	(%)	100	100	100
11	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	(%)	100	100	100
12	Persentase permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	(%)	0	25	30
13	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)(%)	(%)	30,78	7	9
14	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	(%)	29,39	35	40
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**				
1	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)	(%)	100	100	100
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	(%)	100	100	100
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	(%)	8,23	12	13
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	(%)	100	100	100
5	Persentase Penegakan PERDA	(%)	28,17	100	100
6	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	(%)	100	9.54	10.64
7	Persentase Perda dan perkada yang ditegakkann	(%)	28,17	100	100
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	(%)	0,36	100	100
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(%)	0,36	100	100
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(%)	0,57	100	100
11	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	(%)	100	100	100
12	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	(%)	100	100	100
6	**Sosial**				
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	(%)	27,21	56	57
2	Persentase PMKS yang tertangani	(%)	27,21	57	58
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	(%)	27,21	62	63
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	(%)	n/a	3	4
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	(%)	n/a	100	100
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang	(%)	0	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
	menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial				
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	(%)	100	100	100
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	(%)	100	100	100
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	(%)	11,05	42	44
10	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	(%)	100	30	30
11	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	(%)	100	100	100
1	**Tenaga Kerja**				
1	Angka sengketa pengusaha/pekerja per tahun (Per 1000)	(angka)	12	4	3
2	Angka sengketa pengusaha/pekerja di Perusahaan ber TDP per tahun (Per 1000)	(angka)	3	1	1
3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	(%)	25	55	60
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	(%)	35,15	58	59
5	Keselamatan dan perlindungan	(%)	30,20	28	28
6	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	(%)	43,25	59	60
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	(%)	1,54	1,6	1,7
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	(%)	n/a	0,5	0,5
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	(%)	42,11	30	30
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	(%)	100	12	14
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	(%)	100	5	5
12	Rasio lulusan S1/S2/S3	(%)	1570	10,98	10,98
13	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	(%)	n/a	75	75
14	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	(%)	33,97	5	5
15	Tingkat produktivitas tenaga kerja	(Ribu/Tenaga Kerja/Thn	n/a	135	145
16	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	(%)	n/a	28	28
17	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	(%)	35	58	59
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	(%)	21,56	13	14

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	(%)	25	28	28
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	(%)	21,57	6	7
4	Rasio KDRT (per 10.000)	(%)	0,86	1	1
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	(%)	28,41	48,39	48,39
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	(%)	100	100	100
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	(%)	n/a	65	70
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	(%)	n/a	65	70
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	(%)	100	100	100
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	(%)	100	60	60
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	(%)	93,75	38	42
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	(%)	n/a	34	35
13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	(%)	96,68	100	100
14	APM Perempuan pada Tingkat SD	(%)	87,00	100	100
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SD	(%)	87,33	100	100
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	(%)	77,03	0	0
16	APM Perempuan pada Tingkat SMP	(%)	87,71	82	83
17	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMP	(%)	83,91	83	84
19	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	(%)	n/a	0	0
	APM Perempuan yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	(%)	n/a	66	67
	APM Laki-Laki yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	(%)	n/a	79	80
20	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	(%)	98,48	44.9	45
21	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	(%)	n/a	46	47
22	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	(%)	16,72	0,5	0.6
23	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	(%)	100	100	100
24	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	(%)	n/a	3	3
3	**Pangan**				
1	Ketersediaan pangan utama (%)	(%)	16,86	8	8
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	(Kkal/kapita/hari)	3.363	2.549	2.599
3	Ketersediaan energi perkapita	(Kkal/kapita/hari)	3.259	2.450	2.500
4	Ketersediaan protein perkapita	(Kkal/kapita/hari)	103,69	99	99

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	(%)	97,56	91	91
6	Ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	(Ton)	10,29	6	6
4	**Pertanahan**				
1	Persentase luas lahan bersertifikat	(%)	16,88	2,95	2.95
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	(%)	100	100	100
3	Penyelesaian izin lokasi	(%)	0	100	100
4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	(%)	100	100	100
5	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	(%)	100	100	100
6	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	(angka)	n/a	2	2
7	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diresdistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	(angka)	9	9	9
8	Tersedianya tanah untuk masyarakat	(angka)	3	2	2
9	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	(kasus)	3	3	3
5	**Lingkungan Hidup**				
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedia/Belum Tersedia	Belum Tersedia	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tersedia/Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada/Tidak	Ada (KLHS RPJMD dan RPJPD)	Ada	Ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	50	40	50
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks	94,21	88.42	88,52
6	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	56,08	61,35	61,35
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	(%)	87,00	12,08	12,55
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	(%)	0	100	100
9	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	(orang)	0	1	1
10	Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	(orang)	0	1	1
11	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	(kali)	Ada (adiwiyata)	Ada	Ada
12	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	(%)	100	100	100
13	Timbulan sampah yang ditangani	(%)	78,28	75	75.3
14	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	(%)	6,70	9,15	10.05

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
15	Persentase cakupan area pelayanan	(%)	81,43	81,53	81.58
16	Persentase jumlah sampah yang tertangani	(%)	78,28	85	90
17	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	(%)	100	100	100
20	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	(%)	0	100	100
21	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundangn/aundangan	(%)	0	100	100
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kab/kota	(%)	69,24	74,72	74,93
23	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	(%)	100	100	100
24	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadapat izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	(%)	87	100	100
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
1	Rasio penduduk ber/KTP per satuan penduduk	(%)	96,05	0,90	1
2	Rasio bayi berakte kelahiran	(%)	99,51	1	1
3	Rasio pasangan berakte nikah	(%)			
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	Ada	ada	ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah / belum	Sudah	sudah	sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	(%)	98,51	98	100
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	(%)	52,37	100	100
8	Perekaman KTP elektronik	(%)	96,05	93	96
9	Persentase anak usia 0 - 7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	(%)	57,32	55	60
10	Kepemilikan akta kelahiran	(%)	97,65	100	100
11	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	(angka)	49	10	15
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	(%)	100	100	100
2	Rata/rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	(%)		1	1
3	Rata/rata jumlah kelompok binaan PKK	(%)		5,1	5,2
4	Persentase LSM aktif	(%)		5	6
5	Persentase LPM Berprestasi	(%)		4	4
6	Persentase PKK aktif	(%)	100	100	100
7	Persentase Posyandu aktif	(%)	100	100	100
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	(%)		100	100
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	(%)		100	100
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	(%)	3,88	2	2
			2,17	0	0
2	Total Fertility Rate (TFR)	(Angka)	2,18	1,7	1,68
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	(ada/tidak)	Ada	Tidak Ada`	Tidak Ada

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
4	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	(%)	66,80	0	0
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	(%)	81,63	60	65
6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	(%)	49	10	15
7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	(angka)	1	1	1
8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	(angka)	1	4	5
9	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	(angka)	4	2	3
10	Rata/rata jumlah anak per keluarga	(rata-rata)	1	2	2
11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	(%)	70,59	80	84,04
12	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	(angka)	21,0	8	8
13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (1000 PUS)	(%)	9,67	2	3
14	Cakupan PUS yang ingin ber/KB tidak terpenuhi (unmet need)	(%)	8,4	11	12
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	(%)	40,6	45	50
16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	(%)	25,32	30	40
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber/KB	(%)	57,88	95	96
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber/KB	(%)	45,55	70	75
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber/KB	(%)	19,26	55	60
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	(%)	100	11,11	11,11
21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	(%)	7,33	9	10
22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	(%)	100	100	100
23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber/KB mandiri	(%)	7,00	25	26
24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	(%)	100	100	100
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota	(%)	8,33	11	12

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
26	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	(%)	4,84	70	75
27	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	(%)	100	100	100
28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	(%)	100	100	100
29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	(%)	12,58	100	100
30	Rata/rata usia kawin pertama wanita (Tahun)	(%)	22,8	25	25
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD	(%)		90	95
32	Angka Kelahiran Total (TFR)		2,18	1,7	1,68
33	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mPCR)	(%)	65,3	84,04	84,04
34	Persentase kebutuhan ber/KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	(%)	8,4	20	30
9	**Perhubungan**				
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	(Orang)	872.745	2.347.576	12,371,052
2	Rasio ijin trayek (Per 100.000 Penduduk)	(%)	0	1,65	1.65
3	Jumlah uji kir angkutan umum	(Unit)	3.265	182	183
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis	(angka)	2	2	2
5	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	(%)	6,48	881,66	890.48
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	(%)	94,23	0,25	0.25
7	Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%)	(%)	12,22	16	16
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (per 1000)	(%)	n/a	19	20
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	(Orang/Tahun)	n/a	2.347.576	12.371.052
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	(M3/Tahun)	n/a	620,825	620,825
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	(angka)	n/a	1.173.789	1.185.527
12	Rasio konektivitas kabupaten/kota	(%)	n/a	0,18	0.18
13	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	(%)	n/a	0,26	0.26
10	**Komunikasi dan Informatika**				
1	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	(%)	100	3,65	3.75
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	(%)	85,09	0,9	0.92
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	(%)	n/a	90	95
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	(%)	28,70	0,2	0.25
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	(%)	47,45	0,65	0.7
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	(%)	100	98	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
7	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	(%)	n/a	85	87
8	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	(%)	n/a	80	80
11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**				
1	Persentase koperasi aktif	(%)	25,42	26	27
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	(%)	0	100	100
3	Persentase BPR/LKM aktif	(%)	0	100	100
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	(%)	100	85	87
5	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	(%)	30,67	26,55	26.6
6	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	(%)	17,34	8	8.05
12	**Penanaman Modal**				
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN / PMA)	(angka)	2.247	140	150
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	(Juta)	692.204	139.731	146.717
3	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	(%)	n/a	25	30
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	(Milyar rupiah)	150,52	6.653.000.000	6.985.000.000
5	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(%)	36	5	5
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**				
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	(%)	77,78	65	70
2	Persentase wirausaha muda (%)	(%)	64,65	1,8	2
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	(%)	100	71,43	71.43
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	(%)	81,58	39	40
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	(%)	100	69	70.6
6	Jumlah atlet berprestasi	(Orang)	55	24	80
7	Jumlah prestasi olahraga	(Cabang)	74	7	8
8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	(%)	n/a	1,8	2
9	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	(%)	n/a	10	10
10	Peningkatan prestasi olahrgaa	(%)	4,23	5	5
14	**Statistik**				
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada
2	Buku kabupaten dalam angka	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada
3	Buku PDRB	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	(%)	100	100	100
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	(%)	100	100	100
15	**Persandian**				
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	(%)	100	100	100
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	(%)		80	85
16	**Kebudayaan**				

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	(kali)	20	10	10
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	(%)	15,54	100	100
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	(Unit)	8	4	4
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	(Unit)	55	55	55
5	Terlestarikannya Cagar Budaya			3	3
17	**Perpustakaan**				
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	(%)	8,56	6	7
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	(%)	20,41	53,4	53.5
3	Rasio perpustakaan per satuan penduduk (per 1000)	(%)	1,24	1,38	1.38
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	(%)	7,11	891	941
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	(buah)	16.500	16.617	16.717
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	(%)	100	93	100
7	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	(%)	79,26	51,88	52
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	(indeks)	88,38	81	82
18	**Kearsipan**				
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	(%)	20,41	19	25
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	(kegiatan)	8	12	15
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Rahun 2009 tentang Kearsipan	(%)		100	100
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	(%)		75	75
1	**Pariwisata**				
1	Kunjungan wisata (%)	(%)	71,78	100	100
2	Lama kunjungan Wisata (Rata/rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun)	(hari)	2	2.5	3
3	PAD sektor pariwisata	(%)	5,025	5.1	5.14
4	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	(%)	0,12	3.7	3.7
5	Tingkat hunian akomodasi	(%)		19	20
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	(%)	1,18	0.32	0.43
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	(Rp.)		7	7
2	**Pertanian**				
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	(%)		16.4	16.9
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	(%)		6	6
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	(%)	0	4	4
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	(%)	0	40	45
5	Produksi Bahan Pangan Utama	(Ton/Tahun)		29.598,5	35.107

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
	Padi	(Ton/Tahun)	21.039,9	20.676	20.882
	Jagung	(Ton/Tahun)	3.623	5.83	6.33
	Ubi Kayu	(Ton/Tahun)	0	75	80
	Ubi Jalar	(Ton/Tahun)	0	6	7
	Sagu	(Ton/Tahun)	13,1	18	19
6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)				
	Padi	(Ton/Ha)	5,07	6,17	6.2
	Jagung	(Ton/Ha)	3623	6,31	6.33
	Ubi Kayu	(Ton/Ha)	0	31,25	31.5
	Ubi jalar	(Ton/Ha)	0	4,75	5
	Sagu	(Ton/Ha)	13,1	0,09	0.1
7	Cakupan bina kelompok petani	(%)	0	54	56
8	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	(%)		6,91	7
9	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	(%)		-28.5	-28
10	Produksi daging dan telur daerah	(ton/tahun)		5.111,42	5.256.06
	Daging (ruminansia dan unggas)	(ton/tahun)	3187,5	4.003,54	4.116,83
	Daging (ruminansia)	(ton/tahun)	605,18	776,55	798,52
	Dagung sapi	(ton)	587,68	768,39	790,13
	Daging Kerbau	(ton)	12,1	4,62	4,75
	Daging Kambing	(ton)	5,4	3,54	3,64
11	Daging Unggas	(ton)	2.582,32	3.226,99	3.318,31
	Daging ayam kampung	(ton)	107,91	129,14	132,79
	Daging ayam pedaging	(ton)	2.451,93	3.082,13	3.169,36
	Daging Itik/bebek/entong	(ton)	22,48	15,72	16,16
12	Produksi sector perkebunan / Peternakan	(ton/tahun)	1.098,76	1.107,88	1.139,23
	Telur ayam buras/kampung	(ton)	693	773.8	795,70
	Telur ayam ras petelur	(ton)	263	193,06	198,52
	Telur itik / angsa / entog	(ton)	190	192	
3	**Energi dan Sumber Daya Mineral**				
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	(%)	100	100	100
2	Rasio ketersediaan daya listrik	(%)	92,26	100	100
4	**Perdagangan**				
1	Ekspor Bersih Perdagangan	(Nilai/Juta)	n/a	0	0
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	(%)		9	10
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	(%)		89,96	81
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	(%)		61	64
5	Persentase alat/alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	(%)		68	71
5	**Perindustrian**				
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	(%)		3,5	4
2	Jumlah industri kecil dan menengah	(unit)	684	5	5
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator	(%)	5	80	95
4	Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Ada/tidak	ADA	Tidak ada	Tidak ada
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	(%)		100	100
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha	(%)		15	20

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
	kawasan industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota				
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedia/ belum tersedia		Tersedia	Tersedia
6	**Perikanan**				
1	Produksi perikanan	(%)	86,54	100	100
2	Produksi Perikanan Daerah	(Ton/Tahun)	169.121,21	190	200
3	Konsumsi ikan	(%)	93,29	100	100
4	Target Konsumsi Perikanan Daerah	(Kg/Tahun)	56,16	70	80
5	Cakupan bina kelompok nelayan	(%)	2,82	10	20
6	Produksi perikanan kelompok nelayan	(%)		8	9
7	Nilai tukar nelayan	Nilai		110,50	120
8	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	(ton)	169.121,21	211.505,43	170.016,44
1	**Perencanaan Pembangunan**				
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada (RPD)	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	RKPD	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	RTRW	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	(%)	100	100	98
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	(%)	92	100	100
2	**Keuangan**				
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SiLPA terhadap APBD	(%)	2,71	0,8	0,5
3	Persentase belanja pendidikan (20%)	(%)	21,98	20	20
4	Persentase belanja kesehatan (10%)	(%)	31,31	10	10
5	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD (%)	(%)	n/a	n/a	n/a
	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD (%)	(%)	n/a	n/a	n/a
6	Belanja Operasi Terhadap APBD	(%)	88,43	59,53	59,23
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	(%)	7,16	2	2
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu / Tidak	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
9	Perbandingan antara belanja operasi, modal dan tidak terduga				
10	Belanja Operasi Terhadap APBD (%)	(%)	88,43	59,53	59,23
11	Belanja Modal Terhadap APBD (%)	(%)	11,49	40,01	40,32
12	Belanja Tidak Terduga Terhadap APBD (%)	(%)	0,07	0,46	0,45
13	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kerja kesehatan	(%)	18,64	20	20
14	Rasio PAD (%)	(%)	22,67	19,93	19,19
15	Devialisasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	(%)	92,51	100	100
16	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	(%)	100	100	100
17	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP
18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	(%)	n/a	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**				
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	(Hari/Jam Pelajaran)	0	103,894	103,894
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	(%)	0	1,3	1.4
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	(%)	0	50	55
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	(orang)	5,86	33	33
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	(orang)	82,82	949	949
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)	(orang)	2.240	2.307	2330
7	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(%)	0	68	69
8	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(%)	13,44	38	39
9	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(%)	0	5	6
4	**Penelitian dan pengembangan**				
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.(%)	(%)	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	(%)	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	(%)	51,02	31	31
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah(%)	(%)	30	100	100
5	**Pengawasan**				
1	Persentase tindak lanjut temuan	(%)	84,20	85	86
2	Persentase pelanggaran pegawai	(%)	0,6	0,3	0,2
3	Jumlah temuan BPK	(angka)	13	6	6
4	Maturitas Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	(level)	3	3 (Nilai 3,4)	3 (Nilai 3.5)
5	Peningkatan Kapabilitass Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	(level)	3	4	4
6	**Sekretariat Dewan**				
463	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat - alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada
1	Tersusun dan terintegrasinya Program/Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasi program/program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada
7	**Sekretariat Daerah**				

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	(%)	84	40	40
2	Rasio belanja yang dilakukan melalui pengadaan	(%)		100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo
Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Palopo (diolah)

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal merupakan seperangkat kriteria atau batasan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memastikan pelayanan publik yang lebih baik dan merata di berbagai daerah. Tujuan dari penggunaan SPM adalah untuk meningkatkan kualitas dan kesetaraan pelayanan publik bagi masyarakat, sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang setara dan memadai dari pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, ditetapkan Jenis Pelayanan Dasar yang wajib dilaksanakan untuk daerah, khususnya kabupaten / kota yang terdiri atas :

a. Bidang Pendidikan
b. Bidang Kesehatan
c. Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang
d. Bidang Perumahan Rakyat
e. Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
f. Bidang sosial

Integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan dengan menyusun Rencana Pencapaian SPM ke dalam dokumen RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026 yang dijabarkan melalui target tahunan pencapaian SPM.

Capaian dan perkiraan penerapan SPM tahun 2020-2024 serta penetapan target indicator SPM tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.5
Capaian dan Perkiraan Penerapan SPM 2024, serta
Penetapan Target Indikator SPM Kota Palopo Tahun 2026
(sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021)

No	Bidang Urusan/Indikator	Target Nasional	Capaian 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	Kinerja Akhir
	Aspek Pelayanan Dasar					
I	**SPM Bidang Pendidikan**					
	Pendidikan Dasar					
1	Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	92,12	100	100	100
	Rata-Rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	66,41	66,88	68,68	68,88
	Rata-Rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	60,28	60,28	60,28	60,28
	Pendidikan Kesetaraan					
2	Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100	97,96	100	100	100
	Rata-Rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	18,90	18,90	18,90	18,90

No	Bidang Urusan/Indikator	Target Nasional	Capaian 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	Kinerja Akhir
	Rata-Rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	8,13	8,13	8,13	8,13
	Pendidikan Anak Usia Dini					
3	Jumlah Warga Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	66,42	100	100	100
II	**SPM Bidang Kesehatan**					
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	91,18	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94,73	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94,26	100	100	100
	Pelayanan kesehatan balita					
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	97,97	100	100	100
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					
5	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	92,37	100	100	100
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif					
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	96,12	100	100	100
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut					
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	92,88	100	100	100
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi					
8	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	58,53	100	100	100
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus					
9	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94,93	100	100	100
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					
10	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	94,67	100	100	100
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis					
11	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	95,37	100	100	100
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)					
12	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94,67	100	100	100
III	**SPM Bidang Pekerjaan Umum**					

No	Bidang Urusan/Indikator	Target Nasional	Capaian 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	Kinerja Akhir
	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari					
1	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	*85,11*	*100*	*100*	100
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik					
2	Jumlah warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	84,85	100	100	100
IV	**SPM Bidang Perumahan**					
	Penyediaan dan rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana					
1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100	100	100	100
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah					
2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100	100	100	100
V	**SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**					
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum					
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100	100	100	100
	Pelayanan informasi rawan bencana					
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100	100	100	100
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100	100	100	100
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100	100	100	100
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100	100	100	100
VI	**SPM Bidang Sosial**					
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti					
1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100	100	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti					
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Target Nasional	Capaian 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	Kinerja Akhir
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti					
3	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100	100	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti					
4	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100	100	100	100
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota					
5	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100%	100	100	100	100

Sumber : Laporan Capaian SPM Tahun 2024, Bagian Pemerintahan Setda Kota Palopo

6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs memberikan landasan kokoh dan merupakan instrumen utama untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan indicator TPB/SDGs untuk menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kota Palopo telah disusun hingga tahun 2023, sehingga target TPB/SDGs belum ditetapkan untuk tahun 2024 dan tahun 2025. Untuk target pencapaian indikator TPB/SDGs tahun 2024 didasarkan pada Sasaran Nasional yang termuat dalam Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs Tahun 2021-2024.

Tabel 6.6

Capaian Indikator TPB/SDGs Kota Palopo Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Instansi Pelaksana
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN						
1,1	**Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang. dari 1,25 dolar Amerika per hari.**					
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Persen	Menurun 0,4	4,51	Bappeda
1,2	**Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.**					
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	RKPD, Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran.	Persen	6,0 – 7,0	32,92	Bappeda
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional	BPS ; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Persen			Bappeda

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Instansi Pelaksana
1,3	**Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.**					
1.3.1*	"Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan."	Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial	Persen	100	74,84	Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial	Persen	100	96,82	Dinas Kesehatan Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
1.3.1.(b)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) untuk data estimasi populasi jumlah pekerja	Persen	65	44	Dinas Tenaga Kerja Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
1,4	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.**					
1.4.1*	Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	Persen	N/A		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Badan Pusat Statistik	Rumah Milik (%)		69,70	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Badan Pusat Statistik
			Rumah Sewa/ Kontrak (%)			
1,5	**Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.**					
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa/1.000	0,2	0,03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	60		Badan Penanggulangan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Instansi Pelaksana
	pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.					Bencana Daerah
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN						
2,1	**Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.**					
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Ketahanan Pangan BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Persen	5		Dinas Ketahanan Pangan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas Kor).	Persen	4		Dinas Ketahanan Pangan
2,2	**Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula**					
2.2.1*	"Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita."	Dinas Kesehatan, Survey Status Gizi Indonesia (SSGI, 2024)	Persen	14	22,80	Dinas Kesehatan
2.2.2*	"Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe."	Dinas Kesehatan, Survey Status Gizi Indonesia (SSGI, 2024)	Persen	7	1,99	Dinas Kesehatan
2.2.2.a	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Dinas Ketahanan Pangan	Poin	95,2	87,8	Dinas Ketahanan Pangan
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	Dinas Kesehatan, Survey Status Gizi Indonesia (SSGI, 2024)	Persen	33	13,59	Dinas Kesehatan
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/ perikanan/kehutanan	Dinas Ketahanan Pangan	Kg/Jiwa	41,79	37,22	Dinas Ketahanan Pangan
2,4	**Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas**					
2.4.1(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas Ketahanan Pangan	Persen	100	45,83	Dinas Ketahanan Pangan
2,5	**Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang**					
	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	Badan Pusat Statistik	PDRB Pertanian/ APBD Pertanian			Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA						

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Instansi Pelaksana
3,1	**Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.**					
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan BPS: Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	183	0,81	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya	Dinas Kesehatan				Dinas Kesehatan
	(a) ditolong oleh tenaga kesehatan;		Persen	95	100	
	(b) di fasilitas Kesehatan		Persen	95	100	
3,2	**Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000."**					
3.2.1*	"(a) Angka Kematian Balita (AKBa);	Dinas Kesehatan, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)	Kematian per 1000 kelahiran hidup	16	3,63	Dinas Kesehatan
	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup."		Kematian per 1000 kelahiran hidup	10	10	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)	Kematian per 1000 kelahiran hidup	10	3,63	Dinas Kesehatan
3,3	**Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.**					
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Dinas Kesehatan	kasus baru per 1000 penduduk tidak terinfeksi	0,18	0,22	Dinas Kesehatan
3.3.2*	"Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk."	Dinas Kesehatan	kasus baru 100.000 penduduk	190	2,49	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	Per 1000	N/A	4,48	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Instansi Pelaksana
			Penduduk			
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinas Kesehatan	Kabupaten/Kota	23	24	Dinas Kesehatan
		Jumlah kasus malaria	Jiwa	N/A	82	Dinas Kesehatan
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	per 100.000 Penduduk	1,09	0	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan	Dinas Kesehatan				Dinas Kesehatan
	(a) Filariasis		orang	0	0	
	(b) Kusta		orang	2	9	
3,4	**Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.**					
3.4.1(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	Dinas Kesehatan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)	Persen	8,7		Dinas Kesehatan
3.4.1(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)	Persen	34,1		Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)	Persen	21,8		Dinas Kesehatan
3,5	**Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan**					
	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Badan Narkotika Nasional	Jiwa	11.500		Dinas Kesehatan
	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi	Badan Narkotika Nasional	Jiwa	N/A		Dinas Kesehatan
	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir	Badan Narkotika Nasional	Jiwa	N/A		Dinas Kesehatan
3,7	**Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.**					
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persen	63,41		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jiwa/1.000	18		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Instansi Pelaksana
3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persen	2,1	2,18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3,8	**Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang**					
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persen	7,40		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.8.2	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	Persen	98	96,82	Dinas Kesehatan
3.a	**Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.**					
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Kesehatan	Persen	8,7		Dinas Kesehatan
3.b	**Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.**					
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Dinas Kesehatan	1. DPT3 satuannya %	90	38,36	Dinas Kesehatan
			2. Campak satuannya %	90	34,62	
			3. PCV2 satuannya %	90	41,25	
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Dinas Kesehatan	%	96	100	Dinas Kesehatan
3.c	**Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.**					
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	Per 1.000 penduduk	83 per 1.000 penduduk	15,18 per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS						
4,1	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.**					
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b)	Dinas Pendidikan	Persen	63		Dinas Pendidikan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Instansi Pelaksana
	kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika					
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan	Dinas Pendidikan	Persen	98,94		Dinas Pendidikan
	jenjang SD/sederajat,			NA	PM	
	SMP/sederajat,			NA	PM	
	dan SMA/sederajat			NA	PM	
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah usia	Dinas Pendidikan	Persen	N/A	4,24	Dinas Pendidikan
	Usia 7-12 tahun			NA	PM	
	Usia 13-15 tahun			NA	PM	
	Usia 16-18 tahun			NA	PM	
4,2	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.**					
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin	Dinas Pendidikan BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.	Persen	PM		Dinas Pendidikan
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Dinas Pendidikan BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.	Persen	95,65		Dinas Pendidikan
4,3	**Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.**					
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Dinas Pendidikan BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.	Persen	PM		Dinas Pendidikan
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi (PT)	Badan Pusat Statistik	Persen	32,28		Dinas Pendidikan
4,4	**Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.**					
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15- 59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Badan Pusat Statistik	Persen	PM		Dinas Pendidikan
4,5	**Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.**					
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat,	Dinas Pendidikan BPS	Persen	NA	PM	Dinas Pendidikan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Instansi Pelaksana
	SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.					
4,6	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.**					
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Badan Pusat Statistik	Persen	PM	98,48	Dinas Pendidikan
4.a	**Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua**					
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Badan Pusat Statistik	Persen	N/A		Dinas Pendidikan
4.a.1(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir pada tingkat SD/ Sederajat, SMP/ Sederajat dan SMA/ Sederajat	Dinas Pendidikan Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.	Persen	PM		Dinas Pendidikan
4.c	**Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.**					
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	Dinas Pendidikan Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.	Persen	81,8	88,46	Dinas Pendidikan
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER						
5.2	**Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya**					
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.	Persen	Menurun		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir		Persen	Menurun		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5,5	**Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.**					

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Instansi Pelaksana
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Kepegawaian Daerah (BKD)		22,52	20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	(a) parlemen tingkat pusat		Persen			
	(b) pemerintah daerah		Persen			
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).	Persen	PM	27,96	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.b	**Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkanpemberdayaan perempuan.**					
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	Badan Pusat Statistik	Persen	75,7		Dinas Komunikasi dan Informatika
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK						
6,1	**Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua**					
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan / akses air minum yang dikelola secara aman.	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Persen	15	85,11	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6,2	**Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan."**					
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Persen	90	84.86	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6,3	**Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.**					
6.3.1(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman.	Dinas Perindustrian	Persen	PM		Dinas Perindustrian
6.3.2(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	55,50	59,06	Dinas Lingkungan Hidup
6,4	**Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air**					
	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Persen	PM	N/A	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU						
7,1	**Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.**					
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Sekretariat daerah	persen	100	67,09	Sekretariat Daerah

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Instansi Pelaksana
7.1.1(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Sekretariat daerah	Mega Watt/Jiwa	14.08		Sekretariat Daerah
7.1.2(b)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga.	Sekretariat Daerah	persen			Sekretariat Daerah
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI						
8,1	**Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.**					
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita harga konstan 2010	Badan Pusat Statistik	Persen		4,40	Bappeda
8.1.1.(a)	PDRB per Kapita	Badan Pusat Statistik	juta		56,63	Bappeda
8,2	**Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya."**					
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	Badan Pusat Statistik	Persen		4,40	Bappeda
8,5	**Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.**					
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka.	Dinas Tenaga Kerja	Persen		7,64	Dinas Tenaga Kerja
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja	Persen		28,64	Dinas Tenaga Kerja
8,6	**Pada tahun 2020, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja dan tidak dalam pelatihan dan tidak sekolah.**					
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Tenaga Kerja	Persen			Dinas Tenaga Kerja
8,7	**Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.**					
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10- 17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Dinas Tenaga Kerja	Persen			Dinas Tenaga Kerja
8,9	**Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.**					
8.9.1(a)	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.	Dinas Pariwisata, Badan Pusat Statistik	Orang		217	Dinas Pariwisata
8.9.1(b)	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata, Badan Pusat Statistik	Orang		187.865	Dinas Pariwisata
TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR						
9,1	**Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.**					
9.1.1(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persen			Dinas Pekerjaan Umum dan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Instansi Pelaksana
						Penataan Ruang
9.1.1(b)	Kondisi mantap jalan provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persen		71,42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.1.1(c)	Kondisi mantap jalan kabupaten/ kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persen		58,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.	Dinas Perhubungan	Orang		872.745	Dinas Perhubungan
			ton			
9,2	**Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.**					
9.2.1(a)	Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) industri manufaktur	Badan Pusat Statistik	Persen		7,39	Bappeda
9.2.1(b)	Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 industri manufaktur.	Badan Pusat Statistik	Persen		4,76	Bappeda
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN						
10,1	**Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.**					
10.1.1.(a)	Rasio Gini	Badan Pusat Statistik	indeks		0,333	Bappeda
10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial	Persen		7,35	Dinas Sosial
10,2	**Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.**					
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen		N/A	Dinas Sosial
10,4	**Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.**					
10.4.1.(b)	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja	Persen	32,09	43,25	Dinas Tenaga Kerja
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN						
11,1	**Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.**					
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Persen		27,56	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Instansi Pelaksana
11,2	**Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.**					
11.2.1 (a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi Publik	Dinas Perhubungan	Persen			Dinas Perhubungan
11.2.1 (b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Dinas Perhubungan	Persen	11,6		Dinas Perhubungan
11.3	**Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara**					
11.3.1 (a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Hektare/Jiwa			Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia					
	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Sekretariat Daerah	Rupiah /Jiwa			Sekretariat Daerah
11,5	**Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.**					
11.5.1 *	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa/1.000		0,22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.2 (a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pusat Statistik Bappeda	Persen			Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pusat Statistik Bappeda
11.6	**Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.**					
11.6.1 (a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Dinas Lingkungan Hidup	Persen	80 penanganan dan 20 pengurangan	71,41	Dinas Lingkungan Hidup
11.6.1 (b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	Dinas Lingkungan Hidup	Persen			Dinas Lingkungan Hidup
11.6.2 (a)	Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10	Dinas Lingkungan Hidup	ugram/m3/Jiwa			Dinas Lingkungan Hidup

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Instansi Pelaksana
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks		86,59	Dinas Lingkungan Hidup
11.7	**Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan maudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas**					
11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen			Badan Pusat Statistik (BPS)
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen			Badan Pusat Statistik (BPS)
11.b	**Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030."**					
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1 Dokumen		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Memberikan dukungan kepada negara - negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memfaatkan bahan lokal					
	Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Perda			Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB						
12.4	**Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuaikerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.**					
12.4.2*	(a) Libah B3 yang dihasilkan per kapita	Dinas Lingkungan Hidup	Ton	10	N/A	Dinas Lingkungan Hidup
	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya.		Persen	20,00	N/A	
12,5	**Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.**					
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Dinas Lingkungan Hidup	Ton	12,8 juta	2.172,00	Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM						
13,1	**Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara**					
13.1.1(a)	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa	Meninggal:	Meninggal: 14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Hilang:	Hilang: 0	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Instansi Pelaksana
				Terdampak:	Terdampak: 27	
13.1.3 *	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	dokumen	36.96	1 dokumen kawasan risiko	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13,2	**Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional**					
13.2.2 *	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIGNSMART Online).				Dinas Lingkungan Hidup
13.2.2 (b)	Persentase Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Bappeda				Bappeda
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN						
14,1	**Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.**					
14.1.1 (a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut.	Dinas Lingkungan Hidup	Persen	50	N/A	Dinas Lingkungan Hidup
14,2	**Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif**					
14.2.1 *	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	kegiatan			Dinas Kelautan dan Perikanan
14,4	**Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.**					
14.4.1 *	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen			Dinas Kelautan dan Perikanan
14,5	**Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.**					
14.5.1 *	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ha			Dinas Kelautan dan Perikanan
14.6	**Melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui**					

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Instansi Pelaksana
	bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO) pada tahun 2020.					
14.6.1 (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen			Dinas Kelautan dan Perikanan
14.7	**Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan.**					
14.7.1 (a)	Persentase kontri- busi perikanan ter- hadap Produk Do- mestik Regional Bruto (PDRB).	Dinas Kelautan dan Perikanan Badan Pusat Statistik	Persen			Dinas Kelautan dan Perikanan
14.b	**Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.**					
14.b.1 *	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/kelembaga an yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan	regulasi			Dinas Kelautan dan Perikanan
14.b.1 (a)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Perikanan	Orang	120.000	2.000	Dinas Perikanan
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN						
15.1	**Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.**					
15.1.1 *	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Persen	50.1	35.6	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
15.2	**Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global**					
15.2.1 (a)	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari					
15.4.1 *	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Km2	4.13	189.64	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH						
16.1	**Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun.**					
16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen			Bappeda

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Instansi Pelaksana
16.2	**Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.**					
16.2.2 *	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persen			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.3	**Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.**					
16.3.1 (b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN): Sistem Informasi Database Bantuan Hukum."	Persen			Bagian Hukum
16.6	**Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.**					
16.6.1 *	Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persen			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
16.6.1 (a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini (WTP).	"Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi"	Persen			Badan Keuangan dan Aset Daerah
16.6.1 (b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	"Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi"	Persen			Biro Organisasi dan Tata laksana
16.6.1. (c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	"Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi."	Persen	70,00	63.56	Biro Organisasi dan Tata laksana
16.6.2 (a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Ombudsman RI	Persen	164 per 587	70.92	Biro Organisasi dan Tata laksana
16,7	**Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.**					
16.7 .1(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Sekretariat Dewan				Sekretariat Dewan
	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)		Persen			

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Instansi Pelaksana
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)		Persen	22.52	28	
16.7.1 (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II dan III)	Sekretariat Dewan	Persen	N/A	Eselon II = 26.19%, Eselon III=30.21%	Sekretariat Dewan
16.7.2 (a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Pusat Statistik (BPS)	Indeks			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.7.2 (b)	Indeks Aspek Kebebasan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Pusat Statistik (BPS)	Indeks			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.7.2. (c)	Indeks Aspek Kesetaraan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Pusat Statistik (BPS)	Indeks			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16,9	**Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.**					
16.9.1 *	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);"	Persen	NA	97.71	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16.9.1 (b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Pusat Statistik (BPS):Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor	Persen	100,00	98.39	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
TUJUAN 17 KEMINTRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN						
17,1	**Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.**					
17.1.1 *	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	Badan Pendapatan Daerah Badan Pusat Statistik	Persen	10.221	1.86	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah
17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	Badan Pendapatan Daerah Badan Pusat Statistik	Persen	8.40	0.44	Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Instansi Pelaksana
						Badan Pendapatan Daerah
17.1.2 *	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Badan Pendapatan Daerah	Persen	61.6	77.73	Badan Pendapatan Daerah
17,6	**Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global**					
17.6.1 (a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga	Dinas Komunikasi dan Informatika Badan Pusat Statistik (data jumlah rumah tangga.	Persen	30		Dinas Komunikasi dan Informatika
17,8	**Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi**					
17.8.1 *	Persentase pengguna internet	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase	82.3		Dinas Komunikasi dan Informatika
17,17	**Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.**					
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Bagian Pemerintahan Sekretariat Dearah	Mou/PKS	20		Bagian Pemerintahan Sekretariat Dearah
17:18	**Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.**					
17.19.2(b)	"Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)."	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Data Registrasi			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

BAB VII
P E N U T U P

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga keselarasan penyelenggaan pembagunan nasional dan daerah maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dijabarkan dari Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Pemerintah Kota Palopo Tahun 2026, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2026. serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo 2025-2045, sebagai sebuah keselerasan pelaksanaan pembangunan nasional.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan, RKPD akan menjadi landasan, pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk disepakati bersama antara Eksekutif dan Legislatif dalam menyusun RAPBD, RKPD juga akan menjadi acuan/pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyelenggaraan urusan pemerintahan. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi rencana kerangka ekonomi daerah, program prioritas perangkat daerah, kerangka pagu indikatif dan prakiraan maju.

Kemudian untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi yang menempatkan RKPD sebagai salah satu instrumen referensinya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Penekanan lain dalam RKPD 2026 yang sama pentingnya adalah pemenuhan dan optimalisasi pencapaian dan penganggaraan yang bersifat wajib yakni pemenuhan mandatori spending dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik cakupan maupun ketepatan sasaran, sehingga mampu bersinergi dengan upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, terutama dalam aspek meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin. Termasuk penanganan isu-isu sectoral atas dinamika persoalan pembangunan daerah, regional dan nasional dan bersifat strategis seperti isu penanganan stunting, inflasi, banjir/genangan, kumuh,sanitasi, dan sectoral lain yang terkait pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan namun berkontribusi bagi penanganan climate change yang terimplementasi dalam economic circular.

Dengan demikian seluruh kebijakan, strategi dan program atau kegiatan pembangunan Kota Palopo tahun 2026 akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palopo dalam RPD 2024-2026. Selain itu, RKPD Tahun 2026 juga diselaraskan dengan RPJMN 2025-2029, dan mendukung pencapaian Agenda Nasinal pencapaiam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs), Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta mewujudkan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam bentuk rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur beserta sumber pembiayaannya

Pelaksanaan atau implementasi rencana kerja pemerintah daerah ini tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Palopo. Rasionalisasi pada target kinerja terhadap kemampuan keuangan daerah adalah pendekatan yang akan dipakai selanjutnya untuk memastikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Palopo membiayai pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2026.

Olehnya untuk melaksanakan dan mengimplementasikan substansi RKPD ini, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Untuk menjaga konsistensi, keselerasan, dan sinergitas perencanaan pembangunan baik pusat, regional dan local, RKPD ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, termasuk sinergitas terhadap proses penganggaran dalam bentuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai dasar penyusunan RAPBD.
2. RKPD juga akan menjadi referensi dalam penyusunan RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Konsistensi, keselerasan dan sinergitas sebagaimana butir 1, adalah memastikan adanya hubungan keterkaitan antara perencanaan pada tingkat perangkat daerah, tingkat Kota dengan perencanaan regional (RKPD Sulsel) maupun nasional (RKP 2026) yang dilakukan melalui serangkaian upaya asistensi dan verifikasi terhadap dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah.

4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada kepala dan wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2026, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPD 2024-2026 serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.
6. Sebagai bentuk transparansi ke public, dokumen RKPD ini akan dipublikasikan agar semua pihak bisa mengetahui dan memahaminya serta berperan dan bertanggung jawab dalam melaksanakannya sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.
7. Perangkat Daerah dan masyarakat termasuk di dalamnya dunia usaha berkewajiban untuk mendukung dan berpartisipasi dalam implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di RKPD Tahun 2026 dengan sebaik baiknya

Sebagai rencana tindak lanjut dalam rangka memastikan adanya kesinambungan, keselarasan, dalam perencanaan pembangunan Bappeda Kota Palopo harus berupaya melakukan upaya penjaminan konsistensi keselarasan antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan dokumen Perencanaan Pemerintah Kota Palopo, melalui serangkian upaya verifikasi dokren perencanaan.

7.2. Kesimpulan

1. RKPD Kota Palopo Tahun 2026 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, usulan Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara.(PPAS)
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2026 yaitu : ***" Penguatan Fondasi Transformasi untuk Kesejahtraan dan Kualitas Hidup Masyarakat*** " sehingga program kegiatan di masing-masing Perangkat daerah mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
4. RKPD Kota Palopo Tahun 2026, pelaksanaannya harus bersinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional dengan tetap memperhitungkan potensi dan keuangan daerah. Termasuk pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Pj. WALI KOTA PALOPO,

FIRMANZA DP